



BERKARYA BERKELANJUTAN

CREATING
SUSTAINABLE
VALUE

**ANNUAL
REPORT**
LAPORAN
TAHUNAN
2025



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini, kondisi mendatang, dan lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PPI", adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) secara umum yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.

Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain dalam edisi cetak, laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi PPI www.ptppi.co.id.

This Annual Report contains forward-looking statements regarding the financial condition, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company as classified under applicable legislation, except for historical matters. These statements entail risks, uncertainties, and may result in materially different actual developments from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current conditions, future conditions, and the business environment in which the Company operates. The Company does not guarantee that the duly authenticated documents will yield certain results as expected.

This Annual Report contains the term "PPI," and occasionally the term "we" is used for convenience to refer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) in general, defined as PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) conducting its primary business activities in domestic and international trade.

References to the currency unit "Rupiah," "Rp," or IDR refer to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Indonesian Rupiah.

The report is prepared in two languages, Indonesian and English. In addition to the printed edition, a similar report can be accessed through the official PPI website www.ptppi.co.id.

Tentang Laporan Tahunan

About the Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2025, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) yang mengangkat tema “Berkarya Berkelanjutan.”

Laporan Tahunan ini berfungsi sebagai sumber dokumentasi komprehensif yang berisi informasi kinerja PPI pada tahun yang dilaporkan. Dokumen ini memuat data dan informasi material yang menggambarkan profil perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi PPI kepada otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, penyusunan Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang PPI melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk menyajikan data dan informasi material mengenai kinerja dan tata kelola perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Secara umum, isi laporan ini berasal dari analisis internal serta sumber dokumen dan narasumber yang dapat dipercaya. Beberapa bagian dari laporan ini memuat data dan informasi tentang pandangan ke depan, yang bersifat *forward-looking statement*, seperti target, harapan, perkiraan, estimasi, prospek, atau proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha PPI di masa mendatang.

Welcome to the 2025 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI), which carries the theme “Creating Sustainable Values.”

This Annual Report also serves as a comprehensive documentation source containing information on PPI’s performance in the reported year. It includes data and material information depicting the Company’s profile; operational, marketing, and financial performance; information about the duties, roles, and structural functions of the Company’s organization, applying best practices and corporate governance principles.

The primary objective of preparing this Annual Report is to enhance PPI’s information transparency to relevant authorities and other stakeholders, as well as to serve as a yearly book that fosters pride and solidarity among employees. Additionally, the preparation of this Annual Report aims to build understanding and trust among shareholders and other stakeholders regarding PPI through the provision of accurate, balanced, and relevant information.

This report embodies PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) transparency and accountability to present data and material information regarding the Company’s performance and governance to stakeholders. Generally, the contents of this report originate from internal analysis as well as reliable document sources and informants. Several sections of this report contain forward-looking statements, such as targets, expectations, estimates, prospects, or projections of PPI’s operational performance and business conditions in the future.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2025

Berkarya Berkelanjutan Creating Sustainable Value



PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PPI" atau "Perusahaan") memaknai perjalanan 22 tahun yang dinamis, berorientasi masa depan, dan penuh semangat inovatif pada tahun 2025 dengan tema 'Berkarya Berkelanjutan.'

Melalui tema ini, PT PPI menegaskan komitmennya untuk terus berkarya melalui penguatan bisnis dan inovasi, komitmen peningkatan tata kelola serta kontribusi nyata yang dilandasi dengan prinsip keberlanjutan mencakup visi jangka panjang, dampak positif, kepedulian terhadap lingkungan, dan etika dalam setiap langkah Perusahaan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PPI" or the "Company") embraced the 22-year journey, which is seen as a dynamic, future-oriented, and innovative journey, adapting the theme "Sustainable Work" in 2025.

Through this theme, PT PPI affirms the commitment to continued work through strengthening business and innovation, improving governance, and making tangible contributions based on sustainability principles, encompassing a long-term vision, positive impact, environmental awareness, and ethics in every aspect of the Company's operations.

2024

Bergerak Bersama, Menjadi Juara Move Together, Become a Champion



Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2024. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang, PPI meyakini bahwa keberhasilan jangka panjang dapat tercapai melalui kerja sama yang solid antara seluruh pemangku kepentingan baik internal perusahaan, mitra bisnis, maupun pelanggan.

Tema ini menggambarkan pentingnya kerja tim yang kompak dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi perusahaan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Dengan langkah bersama, setiap individu dan elemen dalam organisasi dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk mencapai kinerja yang optimal. Perseroan menempatkan semangat gotong royong sebagai dasar dalam melangkah menuju masa depan yang lebih sukses.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk terus tumbuh dan berinovasi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) percaya bahwa dengan bergerak bersama, setiap tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan lebih efektif, dan pencapaian visi perusahaan untuk menjadi juara di industri perdagangan dapat terwujud dengan lebih mudah.

This theme reflects the spirit of collaboration and synergy in addressing business challenges in 2024. In facing the ever-evolving market dynamics, PPI believes that long-term success is attainable through solid cooperation between all stakeholders, including the Company's internal, business partners, and customers.

This theme represents the importance of solid and supportive teamwork in achieving a common goal, namely, to serve as a superior and highly competitive company. With collaborative efforts, every individual and element in the organization can contribute to achieving optimal performance. The Company emphasizes the spirit of mutual cooperation as the basis for moving towards a more successful future.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), a company dedicated to growth and innovation, firmly believes that through collaborative efforts, challenges can be managed more effectively, and the realization of the Company's vision to serve as a leader in the trading industry can be more readily achieved.

2023

Memperkuat Rantai Pasok, Menjaga Ketahanan Pangan Strengthening the Supply Chain, Ensuring Food Security



PPI senantiasa mengambil langkah proaktif dalam mendukung ketersediaan pangan, akses, dan keterjaminan pangan sesuai dengan Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh Badan Pangan Nasional. Program ini ditujukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus menguatkan fungsinya dalam rantai pasok perdagangan dan logistik dengan membangun sinergi dan inovasi guna meningkatkan kinerja dan kapasitas bisnis yang berkelanjutan.

PPI menyadari perannya dalam mendukung ketahanan pangan dengan menjaga kelancaran rantai distribusi pangan nasional untuk memastikan menjamin harga yang adil bagi produsen dan konsumen. Untuk itu Perseroan akan selalu meningkatkan kapabilitas dan layanannya bagi masyarakat.

PPI consistently takes proactive steps to support food availability, access, and food security in line with the Government Food Reserve Program (CPP) by the National Food Agency. This program aims to address food shortages, food price fluctuations, natural disasters, social disasters, and/or emergency situations.

Therefore, PPI is committed to continuously strengthening its role in the trade and logistics supply chain by building synergy and innovation to enhance performance and sustainable business capacity.

PPI acknowledges its role in supporting food security by maintaining the smooth flow of the national food distribution chain to ensure fair prices for producers and consumers. Therefore, the Company will always improve its capabilities and services for the community.

2022

Kolaborasi Perdagangan dan Logistik untuk Memajukan Pangan Nasional Trade and Logistics Collaboration to Advance National Food



Ketahanan pangan merupakan salah satu dari yang menarik perhatian dunia. Berbagai konflik di seluruh belahan dunia telah membawa dampak pada krisis ekonomi, energi, dan pangan yang terjadi di berbagai negara lainnya. Oleh karena itu, ketahanan pangan nasional merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Demi mewujudkan ketahanan pangan nasional, PPI turut berkolaborasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan sektor pangan nasional. Dengan semangat dan komitmen untuk Indonesia, PPI bertekad untuk bersama-sama mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Food security is one of the world's major concerns, as conflicts around the world have led to economic, energy and food crises in many countries. Therefore, national food resilience is important for a country. In order to realize national food security, PPI also collaborates in facing the complex challenges of the national food sector. With passion and commitment to Indonesia, PPI is determined to jointly support national food security, so as to improve the welfare of farmers and all Indonesian people as a whole.



Daftar Isi

Table of Contents



Pendahuluan Preface

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	2
Tentang Laporan Tahunan About the Annual Report	3
Kesinambungan Tema Theme Continuity	4
Daftar Isi Table of Contents	6
Capaian Penting 2025 2025 Key Achievement	8



Ikhtisar Kinerja Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	12
Ikhtisar Operasi dan Organisasi Operations and Organization Highlights	17
Ikhtisar Saham atau Modal Stock or Capital Overview	18
Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya Information on Issuance of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds, and Other Funding	19
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	19
Kilas Peristiwa 2025 2025 Key Events	20



Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	32
Laporan Direksi Board of Directors Report	40
Surat Pernyataan Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun 2025 Statement Letter of Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) in 2025	49



Profil Perusahaan Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	52
Riwayat Singkat Perusahaan Corporate Brief History	53
Jejak Langkah Milestones	55
Bidang Usaha, Produk, dan Layanan Line of Business, Products, and Services	59

Produk dan Komoditi Products and Commodities	60
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Cultural Values	78
Sasaran dan Strategi Perusahaan Corporate Target and Strategy	81
5 Prioritas Strategi BUMN 5 SOE Strategic Priorities	82
Maksud dan Tujuan Perseroan Company Purpose and Objectives	83
Identitas dan Logo Perusahaan Corporate Identity and Logo	83
Struktur Organisasi Organization Structure	84
Manajemen dan Pejabat Perusahaan Management and Executive Officers	86
Pejabat Eksekutif Executive Officers	98
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	100
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	101
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and /or Listing of Other Securities	101
Ikhtisar Kebijakan Dividen Perseroan Overview of the Company's Dividend Policy	101
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP / MSOP)	101
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Supporting Institution and Professionals	102
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	102
Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama List of Subsidiaries and Joint Ventures	103
Informasi Pada Website Perseroan Information on the Company's Website	107
Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri List of Industry Association Membership	108
Wilayah Operasional Operational Area	110



Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian Economic Review	116
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	118
Tinjauan Keuangan Financial Review	128
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Solvency and Receivables Collectibility	143
Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy	145
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	146
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Bonding for Investment in Capital Goods	151
Pencapaian Target Tahun 2025 Target Achievement in 2025	151
Prospek Usaha Business Prospects	154

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information with Extraordinary and Rare Events	155
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku Terakhir Changes In Accounting Policies Implemented by The Company In The Last Fiscal Year	155
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Subsequent Material Information and Facts After Accountant Reporting Date	155
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties	156
Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Information in The Realization of Use of Public Offering Proceeds	163
Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara Taxation and Contribution to The State	163
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Business Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring	164
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan Changes in Legal Regulations With Significant Influence on The Company	164
Dampak Perubahan Harga Terhadap Perseroan Impact of Price Changes on The Company	164
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by The Company (ESOP/MSOP)	165
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	165



Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review

Sumber Daya Manusia Human Resources	168
--	-----



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pernyataan Komitmen Penerapan GCG Statement of GCG Implementation Commitment	196
Landasan Penerapan GCG Legal Basis of GCG Implementation	197
Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baik Langsung maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu Information About Direct and Indirect Majority and Controlling Shareholders Up to the Individual Owner	206
Dewan Komisaris Board of Commissioners	214
Direksi Board of Directors	233
Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors	258

Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs under the Board of Commissioners	270
Organ Pendukung di Bawah Direksi Supporting Organs Under the Board of Directors	291
Akuntan Publik Public Accountant	318
Manajemen Risiko Risk Management	322
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	340
Perkara Penting Tahun 2025 Legal Cases in 2025	343
Pedoman Etika Perusahaan Corporate Ethics Guidelines	344
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	348
Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption and Gratification Control Policy	353
Kebijakan Kickbacks dan Anti-Penyuapan Kickbacks and Anti-Bribery Policy	355
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds for Social and Political Activities	356
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Management of State Officials Wealth Reports	356
Transparansi Praktik Bad Governance Transparency of Bad Governance Practices	358
Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan Policy on Corporate Information Classification and Management	360
Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Governance	360
Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Commitment to Fulfilling The Rights of Creditors	361
Kebijakan Seleksi Pemasok Supplier Selection Policy	361
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	362



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	380
---	-----



Laporan Keuangan

Financial Statements



Capaian Penting 2025

2025 Key Achievement

Perdagangan Bahan Pokok Non-Staple Trade

2025

Rp731,82 miliar
billion



12,39%

2024

Rp651,12 miliar
billion



Penjualan Ekspor Export Sales

2025

Rp58,24 miliar
billion



163,05%

2024

Rp22,14 miliar
billion

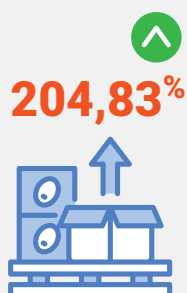


Total Ekspor Kopi Indonesia ke Mesir Total Indonesian Coffee Export to Egypt

2025
884 MT

2024
290 MT

Catatan/Remarks:
MT: Metrik Ton/ Metric Tonnes



Jumlah Aset Total Assets

2025
Rp12,23 triliun

2024
Rp4,98 triliun



Perdagangan Produk Strategis Strategic Products Trade

2025
Rp5,0 triliun

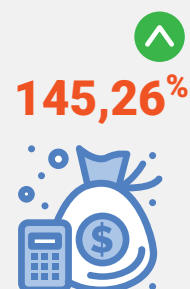
2024
Rp1,2 triliun



Jumlah Ekuitas Total Equity

2025
Rp10,64 triliun

2024
Rp3,60 triliun



Pendapatan Revenues

2025
Rp6,95 triliun

2024
Rp3,10 triliun





IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS





Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Uraian Description	2025	2024*	2023**	2022	2021	YOY 2025 – 2024 (%)
Pendapatan Revenues	6.950.154	3.099.401	2.289.292	2.367.519	1.938.824	124,24%
Beban Usaha Operating Expenses	(326.326)	(307.985)	(330.892)	(316.584)	395.1	5.96%
Pendapatan (Beban) Non Usaha – bersih Non-operating Income (Expenses) – net	(11.845)	39.008	135.778	(5.206)	(49.094)	-130,37%
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	157.819	34.907	(28.550)	81.068	(128.846)	352,11%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	205.905	25.304	70.420	75.863	(177.940)	713,73%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(17.103)	(4.871)	(19.039)	75.863	32.645	251,10%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	6.847.813	4.842	46.260	75.863	246.656	44.022,74%
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year	188.803	20.433	51.382	49.089	(145.295)	824,03%
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	7.036.616	4.842	46.260	(924)	101.361	145.224,19%
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	188.802	20.431	51.379	49.085	145.290	824,09%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	1	2	4	(5)	2.149	-43,44%
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	7.036.579	4.840	46.258	48.132	101.366	125.269,36%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	37	2	33	(5)	1.903	2.299,01%

Catatan | Note:

*) Direklasifikasi | Reclassification

**) Disajikan Kembali | Restatement

Posisi Keuangan

Financial Position

Dalam jutaan Rupiah/ In million Rupiah

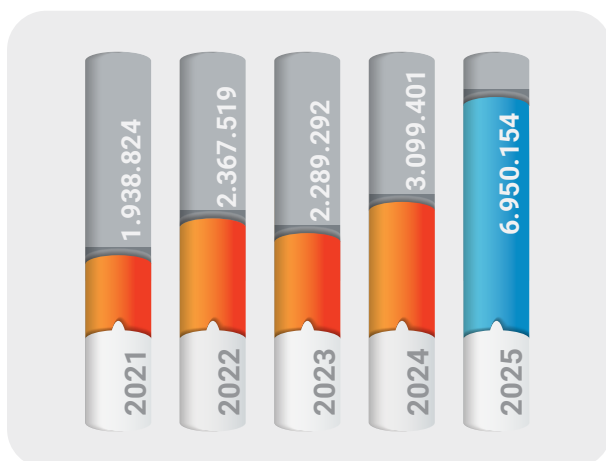
Uraian Description	2025	2024	2023*	2022	2021	YOY 2025 - 2024 (%)
Aset Assets						
Aset Lancar Current assets	1.479.303	1.204.863	670.805	770.030	823.271	22,78%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	10.774.271	3.779.095	3.777.083	3.644.768	3.587.751	185,10%
Jumlah Aset Total Assets	12.223.574	4.983.958	4.447.889	4.414.799	4.411.022	145,26%
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.436.747	1.247.557	784.441	754.351	616.102	15,16%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	150.687	136.878	952.153	995.413	1.007.482	10,09%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.587.435	1.384.435	1.736.594	1.749.764	1.623.585	14,66%
Ekuitas Equity						
Jumlah Ekuitas Total Equity	10.636.139	3.599.523	2.711.294	2.665.034	2.787.437	145,26%

Catatan:
*) Disajikan Kembali | Restatement

Pendapatan

Revenues

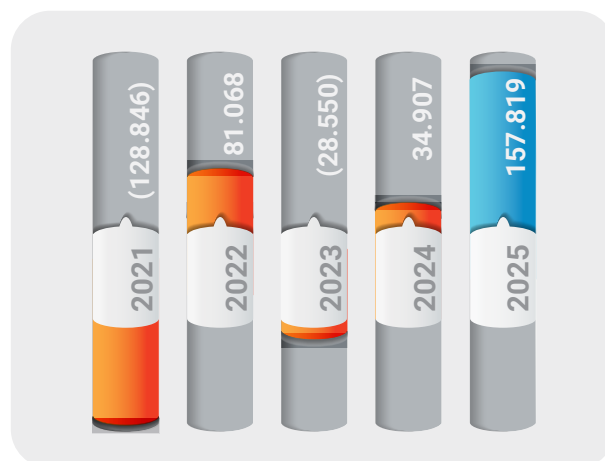
(Rp-juta |
Rp-million)



Laba (Rugi) Usaha

Operating Profit (Loss)

(Rp-juta |
Rp-million)

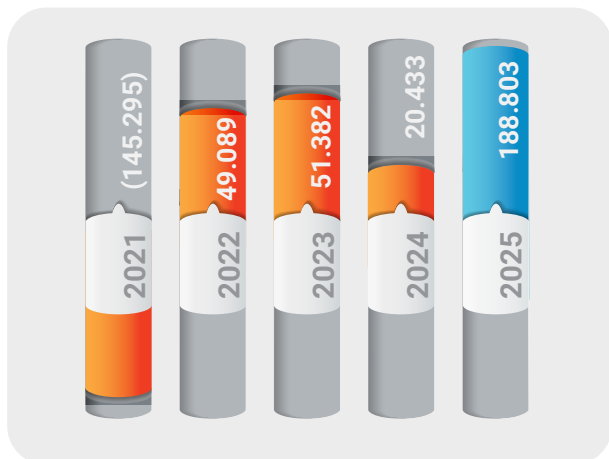




Laba Bersih Tahun Berjalan

Profit for the Year

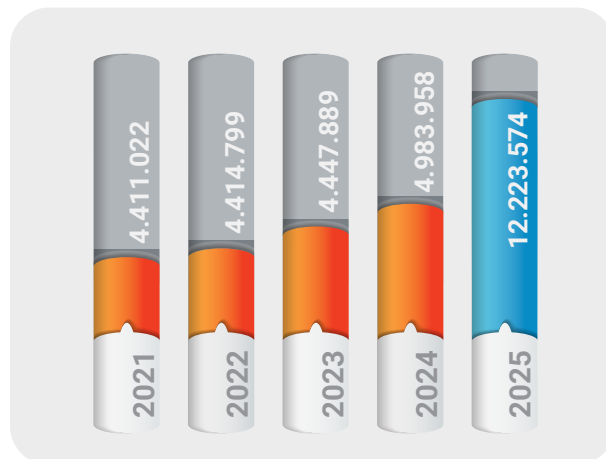
(Rp-juta |
Rp-million)



Jumlah Aset

Total Assets

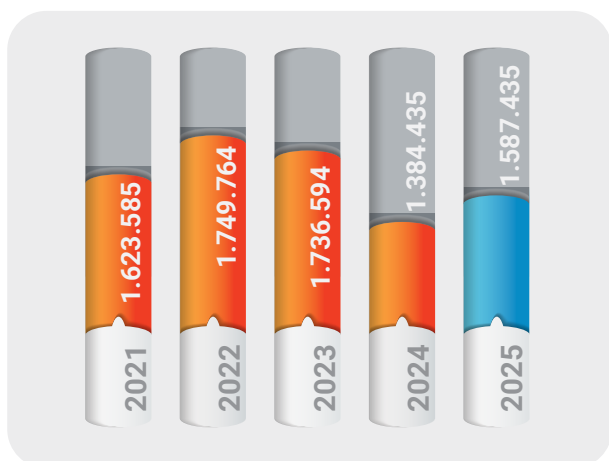
(Rp-juta |
Rp-million)



Jumlah Liabilitas

Total Liabilities

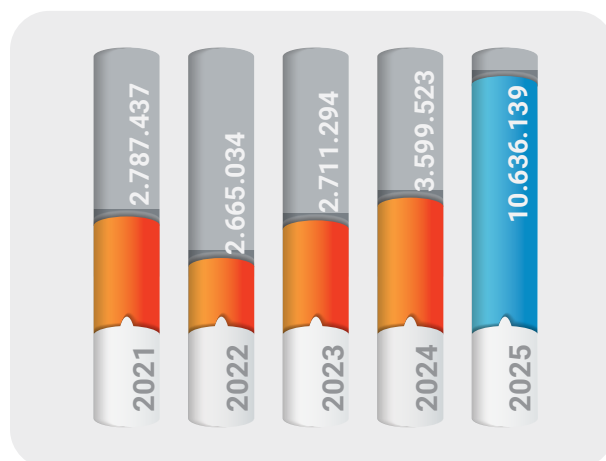
(Rp-juta |
Rp-million)



Jumlah Ekuitas

Total Equity

(Rp-juta |
Rp-million)



Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Dalam jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Uraian Description	2025	2024	2023*	2022	2021	YOY 2025 - 2024 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flow from Operating Activities	330.696	27.486	(171.180)	(19.273)	(74.448)	1103,16%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash flow from Investing Activities	(19.427)	33.398	(4.463)	5.565	(96.461)	-158,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flow from Financing Activities	(167.846)	23.950	70.938	22.067	113.719	-800,82%
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	43.423	84.834	(104.705)	8.359	230.250	-48,81%

Dalam jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Uraian Description	2025	2024	2023*	2022	2021	YOY 2025 – 2024 (%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	146.198	62.709	181.418	173.059	(57.191)	133,14%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	189.621	146.198	62.709	181.418	173.059	29,70%

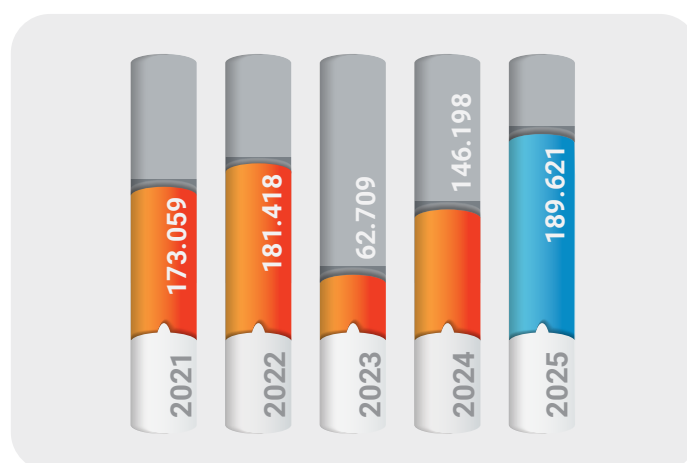
Catatan:

*) Disajikan Kembali | Restatement

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Cash and Cash Equivalents at End of the Year

(Rp-juta |
Rp-million)



Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	2025	2024	2023*	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) 2025 – 2024 (Poin) Increase (Decrease) 2025 – 2024 (Point)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	103,0	96,6	84,0	123,50	133,63	640%
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	54,7	66,7	43,5	111,33	87	-1200%
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	13,2	11,7	7,9	22,76	28,09	150%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio						
Rasio Utang Terhadap Aset (%) Debt to Assets Ratio (%)	13,0	27,8	39,0	38,16	36,81	-1480%
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio(%)	14,9	38,5	64,1	61,71	58,25	-2360%
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	30,9	79,2	44,8	65	5,7	-4830%

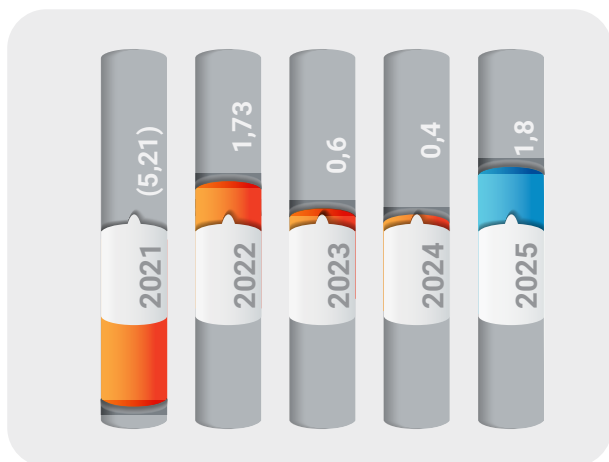


Uraian Description	2025	2024	2023*	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) 2025 – 2024 (Poin) Increase (Decrease) 2025 – 2024 (Point)
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	43,2	59,6	46,2	66,2	12,39	-1640%
Perputaran Persediaan (hari) Total Inventory Turnover (days)	2,1	8,4	20,5	15	14	-1640%
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Return On Equity (ROE)	1,8	0,4	0,6	1,73	(5,21)	140%
Imbalan Investasi (%) Return On Investment (ROI)	1,3	0,8	(0,8)	3,28	(5,3)	50%
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	7,0	10,9	13,2	16,80	13,7	140%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	2,7	0,5	0,7	2,07	(7,49)	140%
Margin EBITDA EBITDA Margin	3,4	2,2	3,0	5,53	(4,2)	120%

Imbal Hasil Ekuitas

Return On Equity (ROE)

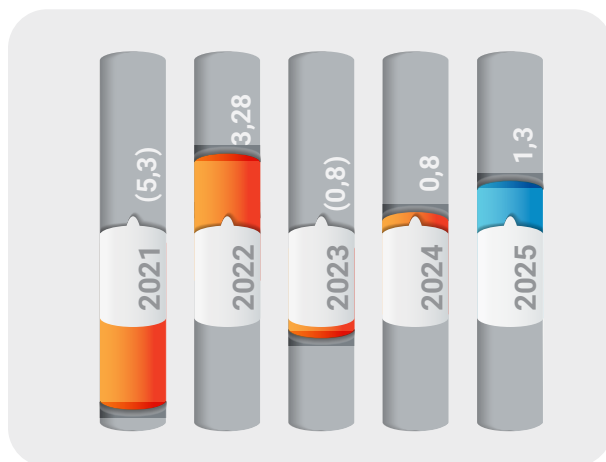
(%)



Imbal Hasil Investasi

Return On Investment (ROI)

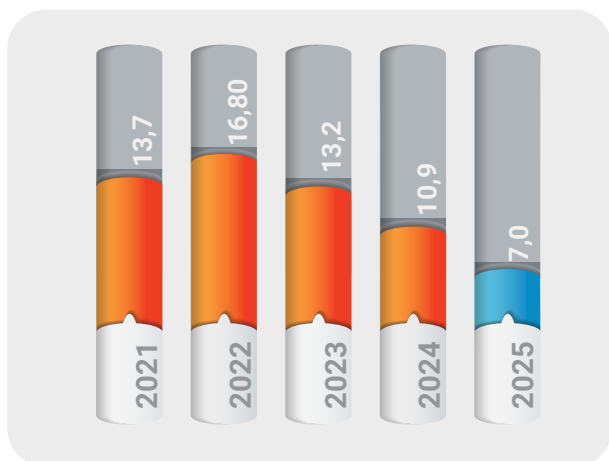
(%)



Margin Laba Kotor

Gross Profit Margin

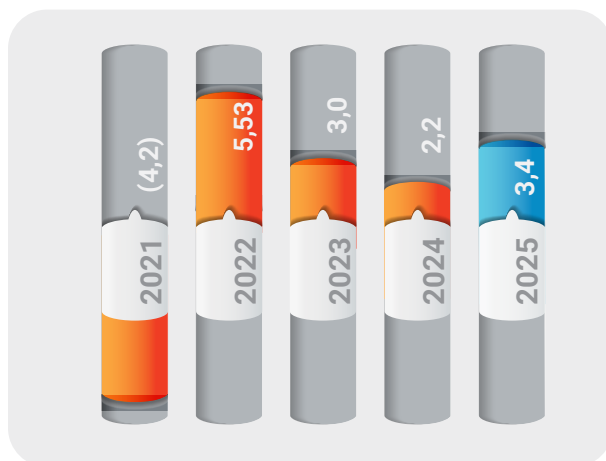
(%)



Margin EBITDA

EBITDA Margin

(%)



Ikhtisar Operasi dan Organisasi

Operations and Organization Highlights

Ikhtisar Operasi

Operations Highlights

Dalam jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Komoditi Commodities	2025			2024		
	Omzet Revenue	Laba Kotor Gross Profit	GPM GPM	Omzet Revenue	Laba Kotor Gross Profit	GPM GPM
Perdagangan Non Bahan Pokok Non-Staple Trade	731,82	48,35	6,6%	651,12	39,2	6,02%
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	495,00	19,80	4,0%	414,75	14,7	3,5%
Pupuk Non Subsidi Non-subsidized Fertilizer	48,26	2,68	5,6%	69,75	4,5	6,4%
Pestisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	32,59	10,02	30,8%	31,51	9,0	28,7%
Pestisida Non-Dharmabrand Non-Dharmabrand Pesticides	3,89	0,33	8,4%	3,25	0,2	7,5%
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Products and Equipment	1,60	0,08	4,9%	0,54	0,0	4,5%
Farmasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	124,33	14,32	11,5%	58,40	6,5	11,1%
Bahan Kimia Non B2 Non Hazardous Chemicals	2,45	0,12	4,9%	50,82	3,4	6,7%
Bahan Bangunan Building Materials	23,68	1,01	4,2%	22,10	0,9	4,0%
Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	186,22	11,73	6,3%	344,88	17,7	5,14%
Produk Pangan dan Bahan Pokok Food and Staple Products	80,16	4,17	5,2%	70,40	2,8	3,9%
Produk Konsumsi Consumer Products	106,07	7,57	7,1%	92,37	4,7	5,0%
CPP*	-	-	-	182,10	10,3	5,7%
Produk Strategis Strategic Products	5.000,00	253,71	5,1%	1.145,51	93,2	8,13%
Produk Pangan dan Hortikultura Food and Horticultural Products	4.863,06	225,69	4,6%	824,72	23,1	2,8%
Non Pangan Non-Food	136,95	28,03	20,5%	320,79	70,1	21,8%
Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	58,24	1,76	3,0%	22,14	1,0	4,3%
Ekspor Export	58,24	1,76	3,0%	22,14	1,0	4,3%
Transisi Bisnis Business Transition	22,91	21,60	94,3%	25,69	22,4	87,2%
Property Property	21,23	21,23	100,0%	22,18	22,2	100,0%
WIS	1,68	0,37	21,9%	3,51	0,2	6,6%
Anak Perusahaan Subsidiaries	951,13	144,91	15,2%	910,06	169,5	18,62%
TOTAL	6.950,33	482,1	6,9%	3.099,40	342,9	11,1%

* CPP di Perdagangan Bahan Pokok merupakan pendapatan dari pelaksanaan proyek *stunting*
CPP in Staple Trade is a revenue generated from the implementation of *stunting* projects

Ikhtisar Organisasi

KPI dan Tingkat Kesehatan Perusahaan KPI and Company Health Level	2025	2024
Skor KPI KPI Score	95,71	86,6
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level	idBBB/Stable	idBBB/Stable

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada tahun 2025, metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PT PPI menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan *Assessment* GCG BUMN Tahun 2023.

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Perseroan) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi.

Organization Review

Good Corporate Governance

In 2025, the method of measuring the implementation of GCG within PT PPI adopted the General Guidelines of Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter from the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number 52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024 regarding the Implementation of the 2023 BUMN GCG Assessment.

According to the Self Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Perseroan) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations.

Ikhtisar Saham atau Modal

Stock or Capital Overview

Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna/ sebesar 0,0001% dan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 99,99%.

Informasi tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2025, PPI tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; termasuk informasi tentang penghentian sementara perdagangan saham.

Share Ownership

The Company’s shares are owned by the Republic of Indonesia (Persero), which holds 1 Series A Two-Color Share, representing 0.0001%, and by PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), which holds 99.99%.

Information on Stock Trading and Public Share Ownership

As of December 31, 2025, PPI did not trade its shares to the public. As a result, there is no information related to stock trading that includes market capitalization based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the highest, lowest, and closing stock prices based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the volume of stock trading on the Stock Exchange in which the shares are listed; information in the form of graphs containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed and the volume of stock trading on the Stock Exchange in which the shares are listed; including information on temporary suspension of stock trading.

Informasi tentang Aksi Korporasi Lainnya

Di sepanjang tahun 2024 dan 2025, PPI tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan adanya perubahan saham. PPI juga tidak melakukan pembagian dividen saham maupun saham bonus yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham.

Information on Other Corporate Actions

Throughout 2024 and 2025, PPI did not undertake any corporate actions resulting in any share changes. PPI also did not distribute stock dividends or bonus shares, which resulted in changes in the composition of share ownership.

Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya

Information on Issuance of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds, and Other Funding

Hingga akhir tahun 2025, PPI tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya, serta bentuk pendanaan lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, maupun pendanaan lainnya.

As of the end of 2025, PPI has not issued any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities, as well as other forms of funding. Thus, information about outstanding bonds/sukuk/convertible bonds or other funding is unavailable.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Penghargaan Awards	Kategori Category	Penyelenggara Organizer	Tanggal Diberikan Awarding Date
Distributor Award 2024	Highest Sales Growth and Achievement 2024	BIOFARMA	5-7 Maret 2025 March 5-7, 2025
Anugerah BUMN 2025	Best Corporate Product Portfolio Development	BUMN Track	20 Maret 2025 March 20, 2025
14th Digital Brand Awards 2025	The 2nd Best SOE Subholding-Asset Rp2.5 trillion to <5 trillion	INFOBANK - ISENTIA	20 Maret 2025 March 20, 2025



Kilas Peristiwa 2025

2025 Key Events

8 Januari 2025
January 8, 2025



PT PPI Dukung Program Makan Sehat Bergizi

PT PPI Supports Healthy and Nutritious Food Program

Berperan aktif dalam mendukung Program Makan Sehat Bergizi melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang baik dan berkualitas.

Actively participates in supporting Healthy and Nutritious Program through good and quality nutrient fulfillment."

16 Januari 2025
January 16, 2025



Ekspor Komoditas Gum Damar

Resin Gum Commodity Export

Melakukan ekspor 15 MT gum damar ke India melalui pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, (16/01/2025).
Exporting 15 MT of gum damar to India via Tanjung Priok port on Thursday, (16/01/2025).

17 Januari 2025
January 17, 2025



PT PPI Tinjau Makan Bergizi Gratis di Makassar

PT PPI Visits Free Nutrient Meal in Makassar

Bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso melakukan kunjungan dalam rangka uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Asoka pada Jumat pagi (17/1/2025).
Together with the Coordinating Minister for Food, Zulkifli Hasan and the Minister of Trade, Budi Santoso, they visited the Free Nutritious Meal (MBG) trial at Asoka Kindergarten on Friday morning (17/1/2025).

30 Januari 2025
January 30, 2025



PT PPI Siap Tingkatkan Kinerja Positif

PT PPI Has Been Ready to Boost Positive Performance

Menggelar agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 di Jakarta, pada Kamis, (30/01/2025).

Implementation the 2025 General Meeting of Shareholders (GMS) agenda for the Company's Work and Budget Plan (RKAP) in Jakarta, on Thursday (30/01/2025).

24 Februari 2025
February 24, 2025



PT PPI Bersama Pemerintah Gelar Operasi Pasar di Berbagai Titik

PT PPI Altogether with Government Organized Market Operations in Several Locations

Melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025 hingga Sabtu, 29 Maret 2025 di titik lokasi Kantor Pos setiap hari selama bulan Ramadan.
Conducting market operations to maintain the stability of staple food prices which was held from Monday, February 24, 2025 to Saturday, March 29, 2025 at Post Office locations every day during the month of Ramadan.

25 Februari 2025
February 25, 2025



PT PPI Tinjau Operasi Pasar di Magelang

PT PPI Visited Market Operations in Magelang

Bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono melakukan peninjauan operasi pasar yang digelar di Kantor Pos Kota Magelang, Jawa Tengah pada Selasa, (25/02/2025).
Altogether with the Indonesian Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman and the Deputy Minister of Agriculture, Sudaryono, they conducted a review of market operations which was held at the Magelang City Post Office, Central Java on Tuesday (25/02/2025).



27 Februari 2025
February 27, 2025

PT PPI Pantau Operasi Pasar di Bogor

PT PPI Visited Market Operations in Bogor

Bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono dan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi melakukan kunjungan operasi pasar di Kantor Pos Bogor dan Kantor Pos Cibinong. Altogether with the Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, Sudaryono and the Head of the National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi visited market operations at the Bogor Post Office and Cibinong Post Office.



4 Maret 2025
March 4, 2025

PT PPI Bersama Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian Tinjau Operasi Pasar di Palembang

PT PPI Altogether with Ministry of Agriculture and Vice Ministry of Agriculture Visited Market Operations in Palembang

Bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, melakukan peninjauan operasi pasar di Kantor Pos Merdeka, Palembang, pada Selasa (4/3/2025). Altogether with the Indonesian Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman, and the Deputy Minister of Agriculture, Sudaryono, they conducted a review of market operations at the Merdeka Post Office, Palembang, on Tuesday (4/3/2025).



5 Maret 2025
March 5, 2025

PT PPI Raih Penghargaan Highest Sales Growth and Achievement pada Distributor Award 2024 PT Bio Farma

PT PPI Won Highest Sales Growth and Achievement Award at PT Bio Farma Distributor Award 2024

Meraih penghargaan *Highest Sales Growth and Achievement* pada Distributor Award 2024 yang diselenggarakan oleh PT Bio Farma di Jakarta, pada Rabu, (5/3/2025). Won the Highest Sales Growth and Achievement award at the 2024 Distributor Award held by PT Bio Farma in Jakarta, on Wednesday, (5/3/2025).



5 Maret 2025
March 5, 2025

PT PPI dan PT Bio Farma Lakukan Kick Off Meeting Distributor 2025

PT PPI and PT Bio Farma Held Distributor Kick Off Meeting 2025

Bersama PT Bio Farma melakukan *Kick-off Meeting* Distributor tahun 2025 di Jakarta, pada Rabu, (5/3/2025). Altogether with PT Bio Farma, they held the 2025 Distributor Kick-off Meeting in Jakarta, on Wednesday (5/3/2025).



8 Maret 2025
March 8, 2025

PT PPI dampingi Menteri Pertanian, tinjau Pasar di Rawamangun

PT PPI Accompanied Minister of Agriculture Visited Market Operations in Rawamangun

Bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman melakukan peninjauan Operasi Pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025 di Kantor Pos Jakarta Timur pada Sabtu (8/3/2025). Altogether with the Indonesian Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman, he inspected Market Operations ahead of the National Religious Holidays (HBKN) of Ramadan and Eid al-Fitr 2025 at the East Jakarta Post Office on Saturday (March 8, 2025).



10 Maret 2025
March 10, 2025

Operasi Pasar di Semarang, PT PPI Sediakan Daging Kerbau Rp75.000/kg

Market Intervention in Semarang, PT PPI Offers Buffalo Meat at Rp75,000/kg

Bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, meninjau pelaksanaan Operasi Pasar di Kantor Pos KCU Semarang pada Senin, (10/03/2025). Altogether with the Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, Sudaryono, reviewing the implementation of Market Operations at the Semarang KCU Post Office on Monday, March 10, 2025.



11 Maret 2025
March 11, 2025



Operasi Pasar di Surakarta, PT PPI Sediakan Daging Kerbau Rp75.000/kg

Market Intervention in Surakarta, PT PPI Offers Buffalo Meat at Rp75,000/kg

Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman meninjau pelaksanaan Operasi Pasar di Kantor Pos Surakarta pada Selasa, (11/03/2025).
Altogether with the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, Andi Amran Sulaiman reviewed the implementation of Market Operations at the Surakarta Post Office on Tuesday, (11/03/2025).



13 Maret 2025
March 13, 2025



PT PPI Distribusikan 6000 Paket Pangan

PT PPI Distributed 6,000 Meal Packages

Semarak Ramadan Berkah Perum Perhutani dengan mendistribusikan 6.000 Paket Pangan pada Selasa hingga Kamis, (11-13/03/2025).
Perum Perhutani's Ramadan Blessings Program by distributing 6,000 Food Packages from Tuesday to Thursday, (11-13/03/2025).



20 Maret 2025
March 20, 2025



PT PPI Raih Penghargaan di Ajang Infobank Isentia Digital Brand Award 2025

PT PPI Won Award at Infobank Isentia Digital Brand Award 2025

Meraih penghargaan dalam ajang Infobank Isentia Digital Brand Awards ke 14 Tahun 2025 untuk kategori *The 2nd Best SOE Sub Holding - Asset* Rp 2,5-5 Triliun di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Won award at the 14th Infobank Isentia Digital Brand Awards 2025 in the category of *The 2nd Best SOE Sub Holding - Assets* Rp2.5-5 Trillion in Jakarta, Thursday (20/3/2025).



20 Maret 2025
March 20, 2025



PT PPI Terima Penghargaan Anugerah BUMN 2025

PT PPI Won Anugerah BUMN 2025 Award

Menerima penghargaan Anugerah BUMN 2025 kategori *Best Corporate for Product Portfolio Development* di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Received the 2025 BUMN Award in the Best Corporate for Product Portfolio Development category in Jakarta, Thursday (20/3/2025).



21 Maret 2025
March 21, 2025



Operasi Pasar di Yogyakarta, PT PPI Sediakan Daging Kerbau Rp75.000/kg

Market Operations in Yogyakarta, PT PPI Provided Buffalo Meat of Rp75,000/kg

Bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono dan Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan pemantauan operasi pasar dalam rangka menyambut HBKN Puasa dan Idulfitri 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat, (21/3/2025).
Altogether with the Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, Sudaryono and the Deputy Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, they monitored market operations in order to welcome the 2025 HBKN Fasting and Eid al-Fitr in the Special Region of Yogyakarta, on Friday (21/3/2025).



25 Maret 2025
March 25, 2025



PT PPI Ekspor 79,2 MT Kopi ke Mesir

PT PPI Exported 79.2 MT Coffee to Egypt

Ekspor sebanyak 79,2 MT kopi *green bean* jenis robusta asal Lampung ke Mesir pada Selasa, (25/03/2025).
Exported 79.2 MT of robusta green bean coffee from Lampung to Egypt on Tuesday (25/03/2025).



PT PPI Bersama ID FOOD Berangkatkan 214 Pemudik Program Mudik Bersama BUMN

PT PPI Collaborates with ID FOOD Supported 214 People in SOEs Homecoming Program

Memberangkatkan 214 pemudik dari Gedung RNI Mega Kuningan dan Gelora Bung Karno (GBK) menuju Kota Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta pada Kamis, (27/3/2025). Departing 214 people from RNI Mega Kuningan Building and Gelora Bung Karno (GBK) to Surabaya, Surakarta and Yogyakarta cities on Thursday (27/3/2025).



PT PPI Lakukan Pertemuan dengan Verkko LLC Rusia

PT PPI Organized Meeting with Verkko LLC Russia

Melakukan pertemuan dengan Deputy CEO Far East and Arctic Development Corporation, and Russian Bussines Delegation, Mr. Kirill Kamenev di Jakarta pada Selasa, (15/04/2025). Held a meeting with Deputy CEO of Far East and Arctic Development Corporation, and Russian Business Delegation, Mr. Kirill Kamenev in Jakarta on Tuesday, (15/04/2025).



Perluas Pasar Asia Selatan, PT PPI Kembali Ekspor 15 MT Gum Damar ke India

Expanding South Asia Market, PT PPI Exported 15 MT Resin Gum to India

Ekspor gum damar sebanyak 15 MT ke India yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, pada Rabu, (23/4/2025). Export of 15 MT of gum resin to India departed via Tanjung Priok Port, on Wednesday (23/4/2025).



Terima Kunjungan DPRD Kalimantan Selatan, PT PPI dan ID Food Siap Dukung Ketahanan Pangan

PT PPI and ID Food Welcome a Visit from the South Kalimantan Regional Legislative Council and Are Ready to Support Food Security

Pertemuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menjaga ketahanan pangan yang digelar di Jakarta pada Senin, (28/4/2025). A meeting with Commission II of the South Kalimantan Provincial DPRD regarding food security was held in Jakarta on Monday (28/4/2025).



PT PPI Ekspor 80 MT Damar Batu ke India

PT PPI Exported 80 MT Stone Damat to India

Ekspor komoditas damar batu ke India sebanyak 80 MT yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Proses *stuffing* dilakukan secara bertahap pada Selasa- Rabu, (29-30/4/2025). Exports of 80 MT of damar batu to India were dispatched via Tanjung Priok Port. The stuffing process was carried out in stages from Tuesday to Wednesday (April 29-30, 2025).



Perkuat Pasar Mesir, PT PPI Ekspor 79,2 MT Kopi Robusta

Strengthening Egep Market, PT PPI Exported 79.2 MT Robusta Coffee

Ekspor kopi ke Mesir sebanyak 79,2 metrik ton (MT) *green bean* jenis robusta pada Rabu, (7/5/2025). Coffee exports to Egypt amounted to 79.2 metric tons (MT) of robusta green beans on Wednesday (7/5/2025).



3 Juni 2025
June 3, 2025



PT PPI Kembali Ekspor 79,2 MT Kopi ke Mesir

PT PPI Exported 79.2 MT Coffee to Egypt

Ekspor kopi ke Mesir sebanyak 79,2 MT kopi jenis robusta pada Selasa, (3/6/2025). Tercatat sepanjang 2025, PT PPI telah mengekspor sebanyak 396 MT. Coffee exports to Egypt amounted to 79.2 MT of robusta coffee on Tuesday (3/6/2025). Throughout 2025, PT PPI has exported 396 MT.



12 Juni 2025
June 12, 2025



Perkuat Pasar Internasional, PT PPI Ekspor 48 MT Damar Batu ke India

Strengthening International Market, PT PPI Exported 48 MT Stone Damar to India

Ekspor komoditas damar batu ke India dengan total sebanyak 48 MT yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Proses *stuffing* dilakukan secara bertahap pada Rabu - Kamis, (11-12/6/2025) Exports of 48 MT of damar batu to India were dispatched via Tanjung Priok Port. The stuffing process was carried out in stages from Wednesday to Thursday (June 11-12, 2025).



9 Juli 2025
July 9, 2025



Tingkatkan Ekspor, PT PPI Kirim 79,2 MT Kopi Robusta ke Mesir

Expanding Export, PT PPI Exported 79.2 MT Robusta Coffee to Egypt

Ekspor sebanyak 79,2 MT kopi *green bean* jenis robusta asal Lampung ke Mesir pada Rabu, (9/7/2025). Exported 79.2 MT of robusta green bean coffee from Lampung to Egypt on Wednesday (9/7/2025).



9 Juli 2025
July 9, 2025



Dorong Peningkatan Komoditas Nasional, PT PPI Ekspor 32 MT Damar Batu ke India

Supported National Commodity Growth, PT PPI Exported 32 MT Stone Damar to India

Ekspor damar batu ke India sebanyak 32 MT yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, (9/7/2025). Exports of 32 MT of resin to India were sent via Tanjung Priok Port on Wednesday (9/7/2025).



18 Juli 2025
July 18, 2025



Launching Gerakan Pangan Murah, PT PPI dan ID FOOD Distribusikan Beras SPHP

Launching of Food Bazar Program, PT PPI and ID FOOD Distirbued SPHP Rice

Mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kegiatan peluncuran serentak Program SPHP yang diinisiasi oleh Perum Bulog di berbagai wilayah operasional Perusahaan pada Jumat, (18/7/2025). Distributing Food Supply and Price Stabilization (SPHP) rice during the simultaneous launch of the SPHP Program initiated by Perum Bulog in various operational areas of the Company on Friday (18/7/2025).



21 Juli 2025
July 21, 2025



Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah

Launching of 80,000 Rural/Village Merah Putih Cooperatives Agency in Klaten, Central Java

Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, (21/07/2025). President of RI, Prabowo Subianto officially launched 80,000 Red and White Village/Kelurahan Cooperative Institutions in Klaten, Central Java, on Monday (21/07/2025).



30 Juli 2025
July 30, 2025



PT PPI Lakukan Pertemuan dengan PT Satoria Aneka Industri

PT PPI Organized Meeting with PT Satoria Aneka Industri

Bahas distribusi produk dan penguatan rantai pasok farmasi dengan PT Satoria Aneka Industri di Surabaya pada Rabu (30/07/2025).
Discuss product distribution and strengthening the pharmaceutical supply chain with PT Satoria Aneka Industri in Surabaya on Wednesday (30/07/2025).



30 Juli 2025
July 30, 2025



Hingga Juli 2025, PT PPI Ekspor 554.4 MT Kopi Robusta ke Mesir

As of July 2025, PT PPI Exported 554.4 MT Robusta Coffee to Egypt

Ekspor sebanyak 79,2 MT kopi *green bean* jenis robusta asal Lampung ke Mesir yang dilakukan secara bertahap yaitu pada Rabu, (23/7/2025) sebanyak 39,6 MT dan pada Rabu, (30/07/2025) sebanyak 39,6 MT.

The export of 79.2 MT of robusta green bean coffee from Lampung to Egypt was carried out in stages, namely on Wednesday (23/7/2025) as much as 39.6 MT and on Wednesday (30/07/2025) as much as 39.6 MT.



22 Agustus 2025
August 22, 2025



PT PPI Ekspor 32 Damar Batu ke India

PT PPI Exported 32 Stone Damar to India

Ekspor damar batu ke India sebanyak 32 MT yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, (22/08/2025).

Exports of 32 MT of resin to India were sent via Tanjung Priok Port on Friday (22/08/2025).



29 Agustus 2025
August 29, 2025



PT PPI Ekspor 18 MT Kemenyan ke Sudan

PT PPI Exported 18 MT Incense to Sudan

Ekspor komoditas unggulan berupa kemenyan/jawi super sebanyak 18 MT dengan tujuan Sudan melalui Pelabuhan Tanjung Priok menuju Sudan Port pada Jumat, 29 Agustus 2025. Export of superior commodities in the form of frankincense/jawi super as much as 18 MT to Sudan via Tanjung Priok Port to Sudan Port on Friday, August 29, 2025.



1 September 2025
September 1, 2025



PT PPI Distribusikan Beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah Serentak

PT PPI Distributed SPHP Rice through Simultaneous Food Bazar Movement

Sinergi dengan Perum BULOG untuk memastikan ketersediaan beras melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan serentak di seluruh Kantor Cabang PT PPI, mulai tanggal 30 Agustus 2025 hingga akhir Desember 2025.

Synergy with Perum BULOG to ensure the availability of rice through the Cheap Food Movement (GPM) which is implemented simultaneously in all PT PPI Branch Offices, starting from August 30, 2025 to the end of December 2025.



11 September 2025
September 11, 2025



PT PPI Bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Amankan Tiga Aset Rumah Dinas di Surabaya

PT PPI Cooperated with High Court of East Java Secured Three Official House Assets in Surabaya

Pengamanan tiga aset perusahaan berupa rumah dinas di Surabaya, Jawa Timur secara persuasif. Persuasive security of three company assets in the form of official residences in Surabaya, East Java.



2 Oktober 2025
October 2, 2025



Perkuat Ekspor Kopi, PT PPI Kirim 79,2 Ton Robusta dari Lampung ke Mesir

Strengthening Coffee Export, PT PPI Exported 79.2 Ton Robusta from Lampung to Egypt

Ekspor sebanyak 79,2 MT kopi *green bean* jenis robusta asal Lampung ke Mesir yang dilakukan secara bertahap yaitu pada Kamis, (25/9/2025) sebanyak 39,6 MT dan pada Kamis, (2/10/2025) sebanyak 39,6 MT. Exports of 79.2 MT of robusta green bean coffee from Lampung to Egypt were carried out in stages on Thursday, (25/9/2025) as much as 39.6 MT and on Thursday, (2/10/2025) as much as 39.6 MT.



3 Oktober 2025
October 3, 2025



Perluas Akses Pasar, PT PPI Ekspor 52,08 MT Kopi Robusta dari Malang ke Mesir

Expanding Market Access, PT PPI Exported 52.08 MT Robusta Coffee from Malang to Egypt

Ekspor sebanyak 52,08 MT kopi *green bean* jenis robusta asal Malang ke Mesir yang dilakukan pada Jumat, (3/10/2025). The exporting of 52.08 MT of green bean robusta coffee from Malang to Egypt was carried out on Friday (3/10/2025).



8 Oktober 2025
October 8, 2025



PT PPI Gandeng KDMP Perkuat Distribusi Pupuk Subsidi di Minahasa

PT PPI Collaborated with KDMP to Support Subsidized Fertilizer in Minahasa

Menyalurkan Pupuk Bersubsidi ke PPTS - KDMP Kembes I, Desa Kembes I, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa. Distributing Subsidized Fertilizer to PPTS - KDMP Kembes I, Kembes I Village, Tombulu District, Minahasa Regency.



15 Oktober 2025
October 15, 2025



PT PPI Ekspor 32 MT Damar Batu ke India

PT PPI Exported 32 MT Stone Damar to India

Ekspor komoditas damar batu sebanyak 32 metrik ton ke India pada Selasa (14/10/2025), dengan jadwal *Estimated Time of Departure* (ETD) pada Rabu (15/10/2025). A shipment of 32 metric tons of damar batu was exported to India on Tuesday (14/10/2025), with an Estimated Time of Departure (ETD) scheduled for Wednesday (15/10/2025).



16 Oktober 2025
October 16, 2025



Trade Expo Indonesia 2025: PT PPI Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan Haggag for Import and Export Mesir

Trade Expo Indonesia 2025: PT PPI Signed Memorandum of Understanding with Haggag for Import and Export Egypt

Melalui ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025, Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan mitra dagang dari Mesir, Haggag for Import and Export dari Mesir.

At the 40th Trade Expo Indonesia (TEI) in 2025, a Memorandum of Understanding was signed with a trading partner from Egypt, Haggag for Import and Export.



16 Oktober 2025
October 16, 2025



Trade Expo Indonesia 2025: PT PPI Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan GT Products PVT Ltd India

Trade Expo Indonesia 2025: PT PPI Signed Memorandum of Understanding with GT Products PVT Ltd India

Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 dengan GT Products PVT Ltd India.

Signing of a Memorandum of Understanding at the 40th Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 with GT Products PVT Ltd India.



18 Oktober 2025
October 18, 2025

PT PPI Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan Buyer Mesir

PT PPI Signed Memorandum of Understanding with Egypt Buyer

Penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Buyer Mesir, Mr. Michael Nessem dari MOCA Coffee yang difasilitasi oleh KBRI Kairo pada Sabtu, (18/10/2025).

Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with an Egyptian Buyer, Mr. Michael Nessem from MOCA Coffee, facilitated by the Indonesian Embassy in Cairo on Saturday, (18/10/2025).



21 Oktober 2025
October 21, 2025

PT PPI Ekspor Kontainer ke-80 Kopi Robusta dari Lampung ke Mesir

PT PPI Exported 80th Container of Robusta Coffee from Lampung to Egypt

Ekspor kopi jenis robusta sebanyak 19,8 metrik ton (MT) ke Mesir pada Selasa, (21/10/2025) yang menandai ekspor kontainer kopi ke-80 yang telah dilakukan PT PPI.

Exporting 19.8 metric tons (MT) of robusta coffee to Egypt on Tuesday (21/10/2025) marked the 80th container export of coffee carried out by PT PPI.



1 November 2025
November 1, 2025

PT PPI Gelar Gerakan Pangan Murah di Jakarta Selatan

PT PPI Held Food Bazaar in South Jakarta

Berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Mandiri yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Forum Lintas Ormas DKI Jakarta pada Sabtu (1/11/2025).

Participated in the Independent Food Bazaar Movement (GPM) activity organized by the National Food Agency in collaboration with the DKI Jakarta Cross-Ormas Forum on Saturday (1/11/2025).



6 November 2025
November 6, 2025

PT PPI Gelar FGD Cold Chain ID FOOD 2025

PT PPI Organized ID FOOD Cold Chain FGD 2025

Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang mengusung tema "Akselerasi Cold Chain untuk Penguatan Ekosistem Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Ekspor", di Grha PPI, Jakarta, pada Kamis, (6/11/2025).

Conducting Focus Group Discussion (FGD) activity with the theme "Accelerating the Cold Chain to Strengthen the National Food Security Ecosystem and Export Competitiveness", at Grha PPI, Jakarta, on Thursday, (6/11/2025).



25 November 2025
November 25, 2025

PT PPI Gelar Koordinasi Persiapan Studi Kelayakan Pengembangan Cold Chain

PT PPI Held Coordination of Cold Chain Development Feasibility Study Preparation

Mendukung program Hilirisasi Cold Chain Pertanian Nasional melalui Rapat Konsolidasi Pasca FGD Cold Chain ID FOOD 2025 untuk memperkuat sinergi dan keselarasan konsep pengembangan Cold Chain di Bandung, pada Selasa, (25/11/2025).

Supporting the National Agricultural Cold Chain Downstreaming program through the Post-FGD Consolidation Meeting of Cold Chain ID FOOD 2025 to strengthen the synergy and alignment of cold chain development concepts in Bandung, on Tuesday, (25/11/2025).



6 Desember 2025
December 6, 2025

Dukung Ekspor Komoditas Unggulan, PT PPI Kirim 16 MT Gum Damar ke India

Supported Featured Commodity Export, PT PPI Exported 16 MT Resin Gum to India

Ekspor komoditas unggulan berupa gum damar sebanyak 16 MT untuk memenuhi permintaan pasar India dengan ETD Sabtu, (6/12/2025). Exports of featured commodities in form of gum resin amounted to 16 MT to meet Indian market demand with ETD Saturday, (6/12/2025).



20 Desember 2025
December 20, 2025



Jelang Nataru, BP BUMN Lakukan Monitoring Strategis di PT PPI Cabang Madya Gorontalo

Approaching Christmas and New Year, BP BUMN Held Strategic Monitoring at PT PPI Gorontalo Madya Branch

Plt. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk BP BUMN, Abdi Mustakim, melaksanakan monitoring strategis ke PT PPI Cabang Madya Gorontalo menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pada Sabtu (20/12/2025).

Acting Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry at the State-Owned Enterprises Agency (BP BUMN), Abdi Mustakim, conducted strategic monitoring at the Gorontalo Branch of PT PPI ahead of the 2025 Christmas and 2026 New Year period on Saturday (20/12/2025).



24 Desember 2025
December 24, 2025



PT PPI Bersama ID FOOD Grup Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Natal dan Tahun Baru

PT PPI Collaborated with ID Food Group Provided Food Bazaar Approaching Christmas and New Year Season

Intensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di cabang PT PPI yang tersebar di wilayah Indonesia guna meredam fluktuasi harga jelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2026.

Intensifying Affordable Food Movement (GPM) in PT PPI branches spread across Indonesia to reduce price fluctuations ahead of Christmas and New Year 2026.





LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT







Board of Commissioners Report



Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Izinkan kami membuka laporan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan bimbingan-Nya, sehingga PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PPI" atau "Perseroan") berhasil melalui tahun 2025 dengan baik di tengah berbagai tantangan dan mencapai kinerja sesuai harapan.

Mewakili Dewan Komisaris, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah kami laksanakan selama tahun 2025 sebagai bagian dari akuntabilitas dan peran Dewan Komisaris sebagai mitra strategis Direksi untuk terus memastikan implementasi strategi dan program kerja telah sesuai dengan rencana dan arahan pemegang saham. Laporan ini juga menjadi perwujudan dari pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025.

Pandangan Atas Perkembangan Makroekonomi Tahun 2025

Dewan Komisaris melihat perkembangan ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan tren pemulihan yang moderat namun tetap dibayangi oleh ketidakpastian dalam berbagai aspek. Berdasarkan faktor-faktor Politik dan Ekonomi, tensi geopolitik yang persisten serta fragmentasi geoekonomi telah memicu peningkatan proteksionisme dan dinamika sosial-politik di berbagai wilayah. Kondisi ini juga diikuti oleh tingkat inflasi yang tetap tinggi di negara-negara maju, yang mendorong bank sentral di dunia untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat (*higher for longer*). Dengan demikian, tekanan suku bunga global berdampak pada pelemahan aktivitas ekonomi di sektor industri, properti, dan perbankan secara luas di berbagai wilayah dunia.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2025 akan tumbuh relatif stabil dengan tren moderat pada kisaran 3,1–3,2%. Momentum pertumbuhan didorong oleh ekspansi aktivitas industri di negara berkembang, peningkatan konsumsi rumah tangga di Asia, serta investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Di sisi lain, ekonomi negara maju tumbuh lebih lambat akibat tantangan demografis, efisiensi energi yang meningkat, dan penyesuaian kebijakan moneter untuk menahan inflasi. Inflasi global secara keseluruhan diperkirakan berada di sekitar 4%, atau lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya, meskipun ketidakpastian harga komoditas dan risiko geopolitik tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We would start this report by offering praise and gratitude to the Almighty God for His blessings and guidance, so that PT Perusahaan Dagang Indonesia (Persero) ("PPI" or "Company") managed to pass 2025 appropriately amidst various challenges and achieving performance as expected.

On behalf of the Board of Commissioners, please allow us to submit a report on the implementation of the supervisory duties that we have carried out during 2025 as part of the Board of Commissioners' accountability and role as the strategic partner of the Board of Directors to consistently ensure that the implementation of strategies and work program has been in accordance with the plans and directions of shareholders. This report also becomes a manifestation of the implementation of the Good Corporate Governance principles conducted by the Board of Commissioners during 2025.

Views on Macroeconomic Developments in 2025

The Board of Commissioners views that global economic developments in 2025 will show a moderate recovery trend was still overshadowed by uncertainty in various aspects. Based on political and economic factors, persistent geopolitical tensions and geoeconomic fragmentation have triggered increased protectionism and socio-political dynamics in various regions. This condition is also accompanied by inflation rates that remain high in developed countries, which encourages central banks in the world to maintain tight monetary policies (*higher for longer*). Thus, pressure on global interest rates has resulted in a widespread weakening of economic activity in the industrial, property, and banking sectors in various regions of the world.

International Monetary Fund (IMF) projects that the global economy in 2025 will grow relatively stable with a moderate trend in the range of 3.1–3.2%. Growth momentum is driven by the expansion of industrial activity in developing countries, increased household consumption in Asia, and continued infrastructure investment. On the other hand, developed countries' economies grew more slowly due to demographic challenges, increasing energy efficiency, and monetary policy adjustments to contain inflation. Overall global inflation is estimated to be around 4%, or more under control compared to the previous period, although commodity price uncertainty and geopolitical risks remain factors to be concerned.



Secara keseluruhan, kondisi perekonomian global pada 2025–2035 diperkirakan berada pada fase pertumbuhan moderat tetapi berkelanjutan, didorong oleh aktivitas industri, pertambangan, dan urbanisasi yang terus berkembang.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang cukup bervariasi. Di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat ke kisaran 2,0% (YoY), misalnya Amerika Serikat. Di kawasan Eropa, pertumbuhan diproyeksikan tetap bertahan secara moderat, meskipun masih menghadapi tekanan eksternal dan pelemahan permintaan global. Di negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2025. Meskipun beberapa negara mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi di kawasan negara berkembang didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi, serta faktor demografis yang mendukung.

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang solid dan pertumbuhan yang stabil di tengah kompleksitas kondisi ekonomi global. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 5,11% secara tahunan, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2024 sebesar 5,05% dan menunjukkan momentum ekspansi di hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk manufaktur, transportasi, dan jasa yang menjadi kontributor utama terhadap aktivitas produksi nasional. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai refleksi dari meningkatnya investasi swasta dan investasi pemerintah di berbagai proyek infrastruktur.

Dalam ranah makroekonomi, stabilitas harga menjadi pilar penting pada 2025. Inflasi nasional relatif terkendali, berada dalam kisaran target Bank Indonesia yang merupakan instrumen kebijakan moneter utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan kredibilitas kebijakan ekonomi. Sejumlah indikator makro lain seperti surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan, stabilitas nilai tukar rupiah, serta cadangan devisa yang memadai turut menunjang fondasi stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal seperti gejolak harga komoditas dan ketidakpastian perdagangan global.

Overall, global economic conditions in 2025–2035 are estimated to be in a phase of moderate but sustainable growth, driven by industrial activity, mining, and growing urbanization.

Regionally, economic growth indicates quite varied trends. In developed countries, economic growth is estimated to slow to around 2.0% (YoY), such as the United States. In the European region, growth is projected to remain moderate, although it is still facing external pressures and weakening global demand. In developing countries, economic growth is relatively stable and will still be the main support for global economic growth during 2025. Although some countries are experiencing a slowdown, economic growth in developing countries is driven by strong domestic consumption, investment, and supportive demographic factors.

In 2025, the Indonesian economy will generally show solid performance and stable growth amidst the complexity of global economic conditions. Official data from the Central Statistics Agency (BPS) notes that Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) growth reached around 5.11% on an annual basis, higher than the 2024 achievement of 5.05% and shows expansion momentum in almost all economic sectors, including manufacturing, transportation and services which are the main contributors to national production activities. This growth was mainly supported by strong household consumption and an increase in gross fixed capital formation (PMTB) as a reflection of increasing private investment and government investment in various infrastructure projects.

In the macroeconomic realm, price stability is an important pillar in 2025. National inflation is relatively controlled, within the target range of Bank Indonesia, which is the main monetary policy instrument to maintain people's purchasing power and the credibility of economic policy. A number of other macro indicators, including a sustainable trade balance surplus, stability of the rupiah exchange rate, and adequate foreign exchange reserves, also support the foundation of national economic stability amidst external pressures such as commodity price volatility and global trade uncertainty.

Penilaian Atas Implementasi Strategi dan Kinerja PPI Tahun 2025

Di tengah berbagai perkembangan situasi ekonomi global dan domestik, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan selama tahun 2025 dan menilai Perseroan berhasil meningkatkan kinerja dibandingkan tahun 2024, baik dari sisi pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun posisi aset dan ekuitas. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memfokuskan pengawasan pada area-area strategis yang merupakan kelanjutan dari perhatian Dewan Komisaris pada tahun sebelumnya, dengan penekanan pada upaya penguatan fundamental perusahaan dan keberlanjutan usaha Perseroan. Berdasarkan pengawasan atas implementasi strategi yang diterapkan Perseroan selama tahun 2025, Dewan Komisaris berpandangan bahwa penguatan pengendalian internal dan budaya risiko menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha Perseroan di tengah dinamika bisnis dan ketidakpastian eksternal yang semakin tinggi.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap eksekusi strategi perusahaan, Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme pengawasan, antara lain melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan Evaluasi Laporan Manajemen untuk memastikan perkembangan kinerja serta pencapaian RKAP dan KPI Perseroan. Dewan Komisaris juga secara aktif melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan dan likuiditas, termasuk Risiko usaha dan efektivitas operasional cabang Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa manajemen telah berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja usaha, pelaksanaan penugasan Pemerintah, dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan cukup baik selama tahun 2025. Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan berhasil mencatat capaian pendapatan Perseroan sebesar Rp6,95 triliun atau mencapai 193% dari RKAP Tahun 2025 dan meningkat 124% dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, Perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar 188,80 miliar atau tumbuh mencapai 824,03% dibandingkan tahun 2024. dari RKAP Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja operasional dan profitabilitas perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Dewan Komisaris menilai bahwa peningkatan kinerja tersebut perlu dilihat secara lebih hati-hati dan komprehensif.

Dewan Komisaris juga menekankan bahwa pelaksanaan penugasan Pemerintah harus tetap dijalankan secara prudent dan mempertimbangkan aspek *sustainability* agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan

Assessment of the Implementation of PPI Strategy and Performance in 2025

In the midst of various developments in the global and domestic economic situation, the Board of Commissioners has carried out supervisory function throughout 2025 and assesses that the Company has succeeded in improving its performance compared to 2024, both in terms of revenue, operating profit, net profit, as well as asset and equity position. Throughout 2025, the Board of Commissioners will focus its supervision on strategic areas, which is a continuation of the attention of the Board of Commissioners in the previous year, with an emphasis on efforts to strengthen the company's fundamentals and the sustainability of the Company's business. Based on the supervision of the implementation of the strategy implemented by the Company during 2025, the Board of Commissioners is of the view that strengthening internal control and risk culture are important factors in maintaining the Company's business sustainability amidst increasingly high business dynamics and external uncertainty.

In carrying out supervision over the execution of the company's strategy, the Board of Commissioners uses several monitoring mechanisms, including through Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors and Evaluation of Management Reports to ensure performance development and achievement of the Company's RKAP and KPI. The Board of Commissioners also actively supervises financial and liquidity conditions, including business risks and operational effectiveness of the Company's branches.

The Board of Commissioners assesses that management has attempted to maintain a balance between achieving business performance, implementing Government assignments, and corporate social responsibility quite well during 2025. In terms of financial performance, the Company succeeded in recording Company revenue of Rp6.95 trillion, or achieving 193% of the 2025 RKAP and increasing 124% compared to 2024. In addition, the Company managed to record a net profit of Rp188.80 billion or grew to reach 824.03% compared to 2024. from the 2025 RKAP. This achievement shows an increase in the company's operational performance and profitability compared to the previous year. However, the Board of Commissioners considers that this performance improvement needs to be viewed more carefully and comprehensively.

The Board of Commissioners also emphasized that the implementation of Government assignments must continue to be carried out prudently and consider sustainability aspects so as not to trigger excessive



terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Di sisi lain, Dewan Komisaris menilai bahwa masih terdapat beberapa area penting yang memerlukan perhatian serius dan penguatan lebih lanjut oleh Direksi, antara lain penyelesaian piutang dan penguatan *cash collection*, penguatan modal kerja dan likuiditas, peningkatan kontribusi usaha non-penugasan, optimalisasi *margin* dan evaluasi kontrak *margin* rendah, penguatan terkait legalitas, pengamanan dan optimalisasi aset, produktivitas dan kinerja kantor cabang serta penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko.

Dewan Komisaris menilai bahwa selama Tahun 2025 Direksi cukup berhasil meningkatkan volume usaha dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Namun demikian, Dewan juga mencatat bahwa peningkatan volume usaha belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas profitabilitas dan efisiensi usaha. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Dewan Komisaris berpandangan bahwa keberhasilan Perseroan ke depan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan omzet dan laba jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan Perseroan membangun struktur bisnis yang sehat, menjaga kualitas laba, memperkuat arus kas, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai Perseroan secara berkelanjutan.

Pandangan Prospek Usaha PPI

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan di tahun mendatang masih memiliki peluang yang cukup baik, khususnya mempertimbangkan posisi Perseroan sebagai bagian dari ekosistem BUMN pangan dan perdagangan nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, distribusi komoditas, serta pelaksanaan penugasan Pemerintah. Berdasarkan realisasi kinerja Perseroan selama tahun 2025, Dewan Komisaris melihat Perseroan memiliki prospek yang sangat baik, khususnya pada perdagangan komoditas strategis dan penugasan Pemerintah. Meskipun demikian, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi dan Manajemen, prospek usaha Perseroan tetap dihadapkan pada tantangan dan tekanan yang cukup besar, antara lain berkaitan dengan tingginya ketergantungan terhadap penugasan dan kebijakan Pemerintah, tekanan terhadap *gross profit margin* akibat dominasi komoditas bermargin rendah, kebutuhan modal kerja yang besar, volatilitas harga komoditas dan nilai tukar, ketergantungan terhadap perizinan dan regulasi tertentu serta meningkatnya risiko likuiditas dan tekanan *cash flow*.

pressure on the Company's financial condition and liquidity. On the other hand, the Board of Commissioners considers that there are still several important areas that require serious attention and further strengthening by the Board of Directors, including settlement of receivables and strengthening cash collections, strengthening working capital and liquidity, increasing non-assignment business contributions, optimizing margins and evaluating low margin contracts, strengthening related to legality, securing and optimizing assets, productivity and performance of branch offices as well as strengthening internal control and risk management.

The Board of Commissioners assesses that during 2025 the Board of Directors was quite successful in increasing the company's business volume and revenue growth. However, the Board also noted that the increase in business volume has not been fully accompanied by an increase in the quality of profitability and business efficiency. In connection with these conditions, the Board of Commissioners is of the view that the Company's future success is not only measured by short-term turnover and profit growth, but also by the Company's ability to build a healthy business structure, maintain profit quality, strengthen cash flow, increase efficiency, and create sustainable Company value.

View on PPI Business Prospects

The Board of Commissioners assesses that the Company's business prospects in the coming year still have quite good opportunities, especially considering the Company's position as part of the national food and trade BUMN ecosystem which has a strategic role in supporting food security, commodity distribution, and implementing Government assignments. Based on the realization of the Company's performance during 2025, the Board of Commissioners sees that the Company has very good prospects, especially in trading strategic commodities and government assignments. Despite this, the Board of Commissioners has conveyed direction to the Board of Directors and Management, the Company's business prospects are still faced with considerable challenges and pressure, including, among other things, related to high dependence on Government assignments and policies, pressure on gross profit margins due to the dominance of low-margin commodities, large working capital requirements, volatility in commodity prices and exchange rates, dependence on certain permits and regulations as well as increasing liquidity risks and cash flow pressures.

Dewan Komisaris menilai bahwa asumsi-asumsi usaha dan proyeksi yang disusun Direksi pada dasarnya cukup realistis, dengan mempertimbangkan posisi Perseroan dalam perdagangan komoditas strategis dan dukungan penugasan Pemerintah. Untuk memastikan tercapainya target kinerja di tahun depan, Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi kepada Direksi untuk terus memperkuat fundamental usaha, meningkatkan kualitas laba, memperbaiki struktur profitabilitas, mengurangi ketergantungan terhadap usaha yang bersifat *opportunistic* dan *short-term* serta terus membangun model bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa pertumbuhan volume usaha yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas *margin*, efektivitas *cash conversion*, dan disiplin pengelolaan modal kerja agar pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara jangka panjang.

Berkaitan dengan prospek usaha ke depan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Perseroan masih memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang, antara lain penguatan Peran dalam Ekosistem Pangan Nasional, pengembangan Usaha Non-Penugasan, optimalisasi dan Komersialisasi Aset, penguatan Kinerja Kantor Cabang, dan melalui sinergi Antar-BUMN dan Mitra Strategis. Pada tahun mendatang, Dewan Komisaris akan tetap memfokuskan pengawasan pada penguatan fundamental perusahaan dan peningkatan kualitas pertumbuhan usaha Perseroan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa seluruh prioritas dalam rencana kerja yang telah disusun tersebut menjadi sangat penting agar pertumbuhan Perseroan dapat berlangsung secara sehat, berkualitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2025

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan selama Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengurusan perusahaan sesuai kewenangan masing-masing organ perusahaan dan penyampaian laporan manajemen dan pelaporan keuangan secara berkala. Dewan Komisaris juga melihat bahwa implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di Perseroan telah berjalan dengan baik selama tahun 2025.

The Board of Commissioners considers that the business assumptions and projections prepared by the Board of Directors are basically quite realistic, taking into account the Company's position in strategic commodity trading and support from Government assignments. To ensure that performance targets are achieved next year, the Board of Commissioners has submitted recommendations to the Board of Directors to continue to strengthen business fundamentals, improve profit quality, improve profitability structure, reduce dependence on opportunistic and short-term businesses, and continue to build a healthier and more sustainable business model. The Board of Commissioners also considers that high business volume growth must be balanced with margin quality, effectiveness of cash conversion, and discipline in working capital management so that this growth truly provides added value for the Company in the long term.

Regarding future business prospects, the Board of Commissioners is of the view that the Company still has a number of strategic opportunities that can be utilized to support future business growth, including strengthening its role in the National Food Ecosystem, developing Non-Assignment Businesses, optimizing and commercializing assets, strengthening Branch Office Performance, and leveraging the synergies among SOEs and Strategic Partners. In the coming year, the Board of Commissioners will continue to focus its supervision on strengthening the company's fundamentals and improving the quality of the Company's business growth. The Board of Commissioners is of the view that all the priorities in the work plan that have been prepared are very important so that the Company's growth can take place in a healthy, quality and sustainable manner in the long-term.

Good Corporate Governance Implementation in 2025

The Board of Commissioners assesses that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the Company during 2025 has generally gone quite well and is one of the factors that supports improving the company's performance. Overall, the implementation of the company's supervisory and management functions is in accordance with the authority of each company organ and the submission of management reports and financial reporting on a regular basis. The Board of Commissioners also sees that the implementation of the internal control and risk management system in the Company has gone well during 2025.



Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, selama tahun 2025, pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan komite secara berkala dengan pembahasan berbagai topik yang berkaitan dengan kinerja Perseroan. Dalam rapat tersebut, Manajemen menyampaikan laporan terkait kinerja secara berkala, termasuk pelaporan keuangan dan operasional kepada pemegang saham dan *stakeholder* terkait.

Sebagai inisiatif perbaikan Tata Kelola Perusahaan ke depan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi GCG masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya pada aspek efektivitas pengendalian internal, disiplin tindak lanjut audit, budaya kepatuhan, dan konsistensi implementasi tata kelola di seluruh unit kerja dan kantor cabang. Dewan Komisaris juga mencermati bahwa masih terdapat sejumlah area yang menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, antara lain berkaitan dengan rekomendasi audit internal serta penguatan pengendalian terhadap kegiatan usaha dengan *margin* rendah dan risiko likuiditas. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya bersifat administratif dan *compliance oriented*, tetapi harus mampu mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengendalian risiko, disiplin operasional, dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No: 3/SPMB/GC.01.05/RNI.02/27/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, telah diputuskan bahwa masa jabatan Komisaris Utama berakhir efektif pada tanggal 1 April 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Commissioner	: Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris Independen Independent Commissioner	: Gigih Guntoro

Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 274 Tahun 2026 dan Nomor: 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Komisaris Utama Perseroan.

As part of the implementation of the duties of the Board of Commissioners, throughout 2025, regular meetings of the Board of Commissioners, Directors and committees will be held to discuss various topics related to the Company's performance. During these meetings, Management submits reports related to performance periodically, including financial and operational reports to shareholders and related stakeholders.

As an initiative to improve Corporate Governance in the future, the Board of Commissioners considers that GCG implementation still requires further strengthening, especially in the aspects of internal control effectiveness, audit follow-up discipline, compliance culture, and consistency of governance implementation in all work units and branch offices. The Board of Commissioners also observed that there are still a number of areas that indicate the need to improve governance, including those related to internal audit recommendations and strengthening control over low-margin business activities and liquidity risks. The Board of Commissioners is of the view that strengthening governance is not only administrative and compliance oriented, but must be able to encourage improvements in the quality of decision making, effectiveness of risk control, operational discipline and business sustainability of the Company.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Pursuant to the Letter of the Director of Human Resources of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 3/SPMB/GC.01.05/RNI.02/27/III/2025 dated March 27, 2025, it was resolved that the term of office of the President Commissioner would expire effective April 1, 2025. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners aof the Company as of December 31, 2025 was as follows:

Pursuant to the Shareholders' Resolution No. 274 of 2026 and No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 dated May 21, 2026, the shareholders approved the appointment of the Company's President Commissioner.

Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas, susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah tanggal periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Based on the shareholders' resolutions referred to above, the composition of the Board of Commissioners following the reporting period is as follows:

Komisaris Utama President Commissioner	: Shahandra Hanitiyo
Komisaris Commissioner	: Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris Independen Independent Commissioner	: Gigih Guntoro

Apresiasi dan Penutup

Dengan upaya dan kinerja yang berhasil dicapai sepanjang tahun, Dewan Komisaris menilai bahwa Tahun 2025 memberikan berbagai pelajaran penting bagi Perseroan. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham, *regulator*, Direksi, seluruh insan Perseroan, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan kepada Perseroan selama Tahun 2025.

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan di tengah dinamika usaha dan tantangan eksternal yang cukup kompleks. Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat terus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar, regulasi, dan perubahan lingkungan usaha sehingga Perseroan mampu tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Appreciation and Closing Remarks

With all the efforts and performance achieved throughout the year, the Board of Commissioners believes that 2025 has provided important lessons for the Company. Therefore, the Board of Commissioners would express our appreciation to the shareholders, regulators, the Board of Directors, all Company personnel, and all stakeholders for their support and cooperation throughout 2025.

The Board of Commissioners would also appreciate the initiatives made by the Board of Directors and all of the Company's levels in maintaining the business continuity and improving the Company's performance amidst complex business dynamics as well as external challenges. The Board of Commissioners expects that the Company will consistently improve our ability to adapt to market dynamics, regulations, and changes in the business environment and bring the Company to grow in healthy and sustainable manners, to provide long-term added value for all of our shareholders and stakeholders.

Jakarta, Juni 2026
Jakarta, June 2026



Shahandra Hanitiyo
Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Direksi

Board of Directors Report



**Wahyu Sakti
Priyonggo**

Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kami dan membawa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PPI" atau "Perseroan") dapat melalui setiap tantangan tahun 2025 dengan baik dan mempertahankan kinerja keuangan serta kinerja operasional dengan baik.

Mewakili segenap Manajemen, perkenankan kami menyampaikan laporan pengelolaan Perseroan yang telah kami jalankan selama tahun buku 2025. Laporan ini tidak hanya memuat capaian kinerja Perseroan selama tahun berjalan, tetapi juga menjelaskan upaya dalam mengatasi setiap tantangan serta strategi yang telah kami implementasikan sebagai perwujudan komitmen kami dalam menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lini Perseroan.

Kondisi Perekonomian Global dan Nasional Tahun 2025

Perkembangan ekonomi global dan nasional masih diliputi berbagai tantangan selama tahun 2025. Di tengah tren pemulihan yang moderat, hampir seluruh negara di dunia menghadapi ketidakpastian dalam berbagai aspek, antara lain eskalasi tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi yang memicu dinamika sosial-politik di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2025, tingkat inflasi cenderung tinggi di negara-negara maju dan mendorong bank sentral di dunia untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat (*higher for longer*). Di sisi lain, tekanan suku bunga global berdampak pada pelemahan aktivitas ekonomi di sektor industri, properti, dan perbankan secara luas di berbagai wilayah dunia.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh berdasarkan publikasi International Monetary Fund (IMF), secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan cukup stabil dengan tren moderat pada kisaran 3,1%–3,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan didorong oleh ekspansi aktivitas industri di negara berkembang, peningkatan konsumsi rumah tangga di Asia, serta investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Di sisi lain, ekonomi negara maju tumbuh lebih lambat akibat tantangan demografis, efisiensi energi yang meningkat, dan penyesuaian kebijakan moneter untuk menahan inflasi. Inflasi global secara keseluruhan diperkirakan sekitar 4%. Kondisi tersebut menggambarkan ekonomi berada pada fase pertumbuhan moderat tetapi berkelanjutan selama tahun 2025.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to the Almighty God for His blessings and grace, which have brought PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PPI" or the "Company") to navigate the challenges throughout 2025 smoothly while maintaining solid financial and operational performance.

On behalf of the Management, allow us to present our report on the management of the Company for the fiscal year 2025. This report does not only outlines the Company's performance achievements during the year but also describes the efforts undertaken to address various challenges, as well as the strategies we have implemented as a manifestation of our commitment to upholding the principles of Good Corporate Governance across all of the Company's operational aspects.

Global and National Economic Conditions in 2025

Global and national economic developments continued to face various challenges throughout 2025. Amid a moderate recovery trend, the majority of countries throughout the world encountered uncertainty across various fronts, including escalating geopolitical tensions and geoeconomic fragmentation, which triggered socio-political dynamics in various regions. Throughout 2025, inflation remained elevated in advanced economies, prompting central banks around the world to maintain tighter monetary policies under a higher for longer interest rate environment. At the same time, global interest rate pressures weakened economic activity across the industrial, property, and banking sectors in many regions worldwide.

Based on the publication released by International Monetary Fund (IMF), global economic growth in 2025 was projected to remain relatively stable, with moderate growth estimated at approximately 3.1%–3.2%. This growth was expected to be supported by the expansion of industrial activity in emerging economies, increased household consumption across Asia, and sustained infrastructure investment. Meanwhile, advanced economies were projected to experience slower growth due to demographic challenges, improved energy efficiency, and monetary policy adjustments aimed at containing inflation. Global inflation was projected to reach approximately 4%. Overall, these conditions reflected an economy in a phase of moderate yet sustained growth throughout 2025.



Pada tingkat domestik, perekonomian Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang solid dan pertumbuhan yang stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 5,11% pada tahun 2025, atau tumbuh positif dibandingkan 5,05% pada tahun 2024. Di sisi lain, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada Upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama tahun 2025, Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Manajemen juga melihat komitmen yang baik dari Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025, antara lain melalui penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Tantangan dan Strategi PPI Tahun 2025

Berdasarkan kondisi selama tahun 2025, Perseroan mencatat beberapa kendala yang berdampak pada kinerja Perseroan, antara lain tantangan berkaitan dengan pengelolaan *portfolio* produk, realisasi laba kotor komoditi, kebutuhan pendanaan jangka pendek, optimalisasi pendapatan *property* melalui skema kerja sama, kendala terkait perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, tantangan berkaitan dengan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas SDM serta optimalisasi Sistem ERP di Perseroan.

At the domestic level, Indonesia's economy generally demonstrated solid performance and stable growth. Statistics Indonesia (BPS) reported that Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) grew by approximately 5.11% in 2025, representing positive growth compared to 5.05% in 2024. Meanwhile, the Board of Governors' Meeting (RDG) of Bank Indonesia held on January 20–21, 2026 decided to maintain the BI-Rate at 4.75%, the Deposit Facility rate at 3.75%, and the Lending Facility rate at 5.50%. This decision was consistent with the current policy focus on stabilizing the Rupiah exchange rate against the impact of heightened global uncertainty, while supporting the achievement of the 2026–2027 inflation target and promoting economic growth.

Throughout 2025, Bank Indonesia's macroprudential policy remained directed toward supporting economic growth (*pro-growth*), including by enhancing the effectiveness of the Macroprudential Liquidity Incentive Policy (KLM) to accelerate interest rate reductions and increase credit/financing growth to the real sector, particularly priority sectors identified by the Government. Meanwhile, payment system policy continued to be directed toward promoting inclusive economic growth through the expansion of digital payment acceptance, the strengthening of the payment system industry structure, and the enhancement of the resilience of payment system infrastructure.

Management also observed the Government's strong commitment to sustain economic growth throughout 2025, including through efforts to strengthen the stabilization of the Rupiah exchange rate through interventions in both Non-Deliverable Forward (NDF) transactions in the offshore market and spot and Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) transactions in the domestic market. Bank Indonesia also continued to strengthen policy coordination with the Financial System Stability Committee (KSSK) to maintain stability and promote economic growth in line with the Government's Asta Cita program.

PPI's Challenges and Strategies in 2025

Based on the conditions prevailing throughout 2025, the Company identified several challenges that affected its performance, including those related to product portfolio management, gross profit realization from commodities, short-term funding requirements, the optimization of property income through partnership schemes, licensing matters related to the Company's business activities, challenges concerning the capacity, competence, and capability of its HR, as well as the optimization of the Company's ERP system.

Pada tahun 2025, Perseroan memiliki berbagai macam kategori produk yang diperdagangkan, kategori produk yang berbeda tersebut memiliki karakteristik bisnis yang tidak saling terkait di masing – masing kategori usahanya. Hal tersebut berpotensi bahwa Perusahaan akan gagal dalam melakukan portofolio produk yang disebabkan oleh belum adanya strategi bisnis yang memadai di masing-masing kategori produk. Di sisi lain, sebagai langkah untuk mengatasi tantangan yang terjadi pada tahun 2025, Manajemen telah mengimplementasikan strategi serta program kerja secara menyeluruh.

Secara spesifik berkaitan dengan portfolio produk, Perseroan telah menerapkan mitigasi antara lain melalui persetujuan Direksi atas *pilot project program spot worker* untuk regional Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Perseroan juga telah melaksanakan penjualan produk kaporit di Cabang Makassar dan produk tawas di Cabang Madiun sebagai produk kima umum non sakarin. Sebagai inisiatif lebih lanjut terkait *portfolio* produk, Perseroan juga dalam proses pembahasan yang diinisiasi oleh Holding ID Food terkait dengan penyaluran gula dari pabrik gula ID Food Group dengan skema *dropship* serta mengembangkan saluran penjualan untuk *supply* program Pemerintah Makanan Sehat Bergizi untuk komoditi beras, minyak goreng, sabun cuci piring dan tepung.

Selama tahun 2025, untuk menjaga stabilitas realisasi laba kotor serta pendanaan jangka pendek, Perseroan telah menyusun strategi bisnis pada setiap komoditi, pengembangan *channel* penjualan serta melakukan perbaikan harga pokok penjualan. Perseroan juga telah melakukan evaluasi kecukupan kebijakan pengelolaan piutang usaha serta menyesuaikan kondisi lingkungan bisnis.

Untuk mengoptimalkan pendapatan selama tahun 2025, Perseroan terus melakukan optimalisasi aset dengan skema jangka pendek dengan melakukan pemasaran aset-aset *idle* melalui program desentralisasi cabang dan kerja sama dengan agen properti serta melakukan optimalisasi aset jangka panjang dengan skema *Build, Operate, Transfer* (BOT); *Build, Transfer, Operate* (BTO) atau skema lain yang relevan dengan memperhatikan kondisi aset Perusahaan.

Sebagai langkah untuk memitigasi atau mengatasi tantangan terkait aspek perizinan, Perseroan telah menyusun rencana penanganan risiko dengan mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan dalam regulasi yang diatur pada tata niaga komoditi yang diperdagangkan, antara lain Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Alat Kesehatan, Perizinan terkait TDG, SLF, NIB sesuai yang

In 2025, the Company traded a wide range of product categories, each with distinct business characteristics that were not interrelated. This created the potential risk of ineffective product portfolio management due to the absence of adequate business strategies for each product category. At the same time, to address the challenges encountered during 2025, Management implemented comprehensive strategies and work programs across the Company's operations.

Specifically related to product portfolio management, the Company implemented several mitigation measures, including the Board of Directors' approval of a pilot project for the spot worker program in the Jakarta, Makassar, and Surabaya regions. The Company also commenced the sale of chlorin products through its Makassar Branch and alum products through its Madiun Branch as non-saccharin general chemical products. As a further initiative to strengthen its product portfolio, the Company also participated in discussions initiated by ID FOOD Holding regarding the distribution of sugar produced by ID FOOD Group's sugar mills under a dropship scheme, while also developing sales channels to support the Government's Makanan Sehat Bergizi Program by supplying rice, cooking oil, dishwashing soap, and flour.

Throughout 2025, to maintain the stability of gross profit realization and secure short-term funding, the Company formulated business strategies for each commodity, expanded its sales channels, and improved its cost of goods sold. The Company also evaluated the adequacy of its trade receivables management policies and adjusted them in response to changes in the business environment.

To optimize revenue throughout 2025, the Company consistently optimized our assets through short-term schemes by marketing idle assets under the branch decentralization program and in collaboration with property agents. The Company also pursued long-term asset optimization through Build, Operate, Transfer (BOT), Build, Transfer, Operate (BTO), or other relevant schemes, taking into account the condition of the Company's assets.

To mitigate and address challenges related to licensing, the Company developed risk management plans by complying with and fulfilling all regulatory requirements governing the trading of the commodities it markets, these included Pharmaceutical Wholesaler (PBF) and Medical Device Distributor licenses, licensing related to the TDG, SLF, NIB as required, as well as certification for



dipersyaratkan serta Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kategori *Cold Chain Product* (CCP) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB). Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur pergudangan sesuai ISO untuk standarisasi pergudangan.

Dalam aspek SDM, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja pegawai, Perseroan telah melaksanakan inisiatif antara lain menyusun kamus kompetensi untuk setiap level jabatan, melakukan pemenuhan pegawai sesuai *Man Power Planning*, menyusun program pelatihan keahlian sesuai dengan kamus kompetensi yang telah ditetapkan serta terus mendorong terciptanya lingkungan kerja inklusif dengan *Respectful Workplace Policy* (RWP).

Sebagai salah satu upaya optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan kapabilitas perdagangan yang terdigitalisasi, selama tahun 2025, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu implementasi Sistem ERP. Beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain melalui integrasi sistem ERP dengan sistem pendukung PPI, peningkatan performa jaringan serta penguatan infrastruktur pendukung IT di Kantor Pusat dan Cabang, penyempurnaan ERP mengacu kepada *change request* (CR), *refreshment training* dan *coaching* untuk pengguna serta integrasi sistem ERP dengan sistem pendukung untuk meningkatkan akurasi data.

Capaian Kinerja PPI Tahun 2025

Di tengah berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2025, Perseroan berhasil mencatat penjualan sebesar Rp6,95 triliun atau 193% dari target RKAP Tahun 2025, dan meningkat sebesar 124% dibandingkan Tahun 2024. Beban usaha tahun 2025 *audited* tercatat senilai Rp326,33 miliar atau 90% dibandingkan dengan anggaran RKAP tahun 2025. Setelah diperhitungkan dengan pendapatan lain-lain di luar usaha senilai Rp48,09 miliar serta beban perpajakan senilai Rp17,10 miliar, maka perusahaan mendapatkan laba bersih setelah pajak senilai Rp188,80 miliar.

Realisasi capaian pendapatan dari penjualan tersebut antara lain dikontribusikan oleh penjualan daging ruminansia. Dari aspek detail komoditi pada kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa komoditi yang mencatat pertumbuhan kinerja penjualan dibandingkan Tahun 2024, yaitu komoditi Pupuk Subsidi, Pestisida Dharmabrand, Pestisida Non Dharmabrand, Produk dan Alat Pertanian, Farmasi dan Alat Kesehatan, Bahan Bangunan, Produk Pangan dan Bahan Pokok, Produk

Good Drug Distribution Practices (CDOB) for the Cold Chain Product (CCP) category and Good Medical Device Distribution Practices (CDAKB). The Company also continued to strengthen its warehousing infrastructure in accordance with ISO standards to support warehouse standardization.

In the HR aspect, to enhance employee productivity and operational efficiency, the Company implemented several initiatives, including developing a competency dictionary for each position level, fulfilling workforce requirements in accordance with the Manpower Planning, designing competency-based training programs in line with the established competency dictionary, and continuing to foster an inclusive workplace through the implementation of the Respectful Workplace Policy (RWP).

As part of its efforts to optimize information systems and strengthen digitally enabled trading capabilities, the Company continued to improve the accuracy and timeliness of its ERP system implementation throughout 2025. Initiatives undertaken during the year included integrating the ERP system with PPI's supporting systems, enhancing network performance and strengthening IT infrastructure at the Head Office and branch offices, refining the ERP system based on approved Change Requests (CR), conducting refreshment training and coaching for users, and further integrating the ERP system with supporting systems to improve data accuracy.

PPI's Performance Achievements in 2025

Amid the various challenges and constraints encountered throughout 2025, the Company recorded sales of Rp6.95 trillion, equivalent to 193% of the 2025 RKAP target, representing an increase of 124% compared to 2024. Audited operating expenses for 2025 amounted to Rp326.33 billion, or 90% of the RKAP 2025 budget. After taking into account other non-operating income of Rp48.09 billion and tax expense of Rp17.10 billion, the Company recorded a net profit after tax of Rp188.80 billion.

The realization of sales revenue was primarily supported by sales of ruminant meat. From the commodity performance perspective, several commodities recorded higher sales performance than in 2025, namely Subsidized Fertilizers, Dharmabrand Pesticides, Non-Dharmabrand Pesticides, Agricultural Products and Equipment, Pharmaceuticals and Medical Devices, Building Materials, Food Products and Staple Commodities, Consumer Products, Food and Horticultural Products, Export Products, and Subsidiaries.

Konsumsi, Produk Pangan dan Hortikultura, Ekspor, dan Anak Perusahaan. Di sisi lain komoditi Penjualan Pupuk Non Subsidi, Bahan Kimia Non B2, CPP, Non Pangan, dan *Property* dan *WIS* mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Berdasarkan kontribusi omzet, persentase penjualan untuk tahun 2025, yaitu dikontribusikan oleh Perdagangan Non Bahan Pokok (11%), Perdagangan Bahan Pokok (3%), Produk Strategis (72%), Produk Ekspor (1%), Transisi Bisnis (0,3%), Anak Perusahaan (14%).

Per 31 Desember 2025, jumlah aset tercatat senilai Rp12.51 triliun, atau 274% dibandingkan dengan Total Aset RKAP per 31 Desember 2025, dan meningkat 151% dibanding posisi Total Aset Tahun 2024. Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2025 audited tercatat senilai Rp1.655,85 miliar atau sebesar 214% dibandingkan dengan proyeksi RKAP 31 Desember 2025 dan meningkat 20% dari periode Tahun 2024. Ekuitas per Desember 2025 audited tercatat dalam posisi positif senilai Rp10.636,14 miliar atau 281% dari RKAP Tahun 2025 dan 295% dibandingkan dengan posisi ekuitas per Desember 2024.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat kenaikan arus kas signifikan terjadi pada Aktivitas Operasi senilai Rp330,70 miliar, hal ini terjadi karena adanya penjualan dan penerimaan uang dari pelanggan terutama yang berasal dari pelaksanaan importasi daging ruminansia.

Prospek Usaha

Mempertimbangkan capaian kinerja Perseroan pada tahun 2025, Manajemen melihat prospek pertumbuhan usaha di tahun depan secara optimis. Melalui persiapan yang matang dan penguatan di seluruh lini, Perseroan masih memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang, antara lain penguatan Peran dalam Ekosistem Pangan Nasional, pengembangan Usaha Non-Penugasan, optimalisasi dan Komersialisasi Aset, penguatan Kinerja Kantor Cabang, dan melalui sinergi Antar-BUMN dan Mitra Strategis.

Manajemen telah mempersiapkan berbagai strategi dan program kerja di tahun depan dan telah menyampaikan laporan prospek usaha tersebut kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh tanggapan. Dalam rencana tersebut, Manajemen menyampaikan akan terus berfokus pada penguatan fundamental serta upaya untuk terus meningkatkan kualitas pertumbuhan usaha Perseroan di tahun depan.

On the other hand, Non-Subsidized Fertilizers, Non-B2 Chemicals, CPP, Non-Food Products, and Property and *WIS* recorded lower sales performance than in 2024. Based on revenue contribution, the 2025 sales composition comprised Non-Staple Commodity Trading (11%), Staple Commodity Trading (3%), Strategic Products (72%), Export Products (1%), Business Transition (0.3%), and Subsidiaries (14%).

As of December 31, 2025, the Company's total assets amounted to Rp12.51 trillion, equivalent to 274% of the RKAP total asset target as of December 31, 2025, and an increase of 151% compared to total assets in 2024. Audited total liabilities as of December 31, 2025 amounted to Rp1,655.85 trillion, representing 214% of the RKAP projection as of December 31, 2025 and an increase of 20% compared to 2024. Meanwhile, audited equity as of December 2025 remained positive at Rp10,636.14 trillion, equivalent to 281% of the 2025 RKAP target and 295% of the equity position as of December 2024.

In 2025, the Company recorded a significant increase in cash flows from operating activities amounting to Rp330.70 billion, primarily attributable to sales and cash receipts from customers, particularly those generated from the implementation of ruminant meat import activities.

Business Prospects

By considering the Company's performance achievements in 2025, Management remains optimistic regarding the Company's business growth prospects for the coming year. Through thorough preparation and strengthened capabilities across all business lines, the Company continues to identify a number of strategic opportunities that can be leveraged to support future business growth, including strengthening its role in the national food ecosystem, developing non-assignment business activities, optimizing and commercializing assets, enhancing the performance of branch offices, and fostering synergies with fellow SOEs and strategic partners.

Management has formulated various strategies and work programs for the coming year and has submitted its business outlook to the Board of Commissioners to obtain their feedback. Through these plans, Management conveyed that it will continue to focus on strengthening the Company's fundamentals while pursuing initiatives to further improve the quality of the Company's business growth in the coming year.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2025

Berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan, Manajemen menyampaikan bahwa implementasi GCG di Perseroan telah berjalan dengan cukup baik selama tahun 2025 dan berkontribusi sebagai salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja Perseroan. Sebagai elemen penting dalam penerapan GCG di Perseroan, Manajemen terus mendorong dan meningkatkan kualitas implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di Perseroan selama tahun 2025.

Direksi dan seluruh Organ Perseroan terkait juga secara aktif melakukan koordinasi berkaitan dengan praktik GCG di Perseroan, antara lain melalui penyelenggaraan rapat – rapat rutin, baik rapat internal Direksi bersama unit terkait maupun rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat dewan Komite di bawah Dewan Komsiaris. Dalam rapat-rapat tersebut, Manajemen melakukan pembahasan berbagai topik yang berkaitan dengan kinerja Perseroan serta menyampaikan laporan terkait kinerja secara berkala, termasuk pelaporan keuangan dan operasional Perseroan selama tahun 2025.

Sebagai inisiatif perbaikan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, Perseroan juga telah melaksanakan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2025. Indikator Utama Perusahaan sampai dengan Desember 2025 tercermin dari matriks penilaian kinerja perusahaan atau *Key Performance Indicators* (KPI), dimana penetapan perspektif, indikator serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN. Berdasarkan pengukuran Indikator Utama Perusahaan, Tahun 2025 Audited perusahaan telah mendapatkan skor 95,71.

Perubahan Komposisi Direksi

Berdasarkan Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No: 3/SPMB/GC.01.05/RNI.02/27/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, telah diputuskan bahwa masa jabatan Komisaris Utama berakhir efektif pada tanggal 1 April 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Implementation of Good Corporate Governance in 2025

In relation to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, Management stated that the implementation of GCG throughout the Company was carried out effectively during 2025 and contributed as one of the key factors supporting the improvement of the Company's performance. As an integral element of GCG implementation, Management continued to encourage and enhance the quality of the Company's internal control system and risk management practices throughout 2025.

The Board of Directors and all relevant Company organs also actively coordinated on GCG practices through the conduct of regular meetings, including internal Board of Directors' meetings with the relevant business units, joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners, and meetings with the Committees under the Board of Commissioners. During these meetings, Management discussed various matters relating to the Company's performance and regularly presented reports on the Company's financial and operational performance throughout 2025.

As part of its ongoing commitment to strengthen corporate governance, the Company also conducted the 2025 Corporate Soundness Assessment. The Company's Key Performance Indicators (KPIs) as of December 2025 were reflected in the corporate performance assessment matrix, whereby the determination of the assessment perspectives, indicators, and weightings was carried out in accordance with the Decree of the Ministry of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning the Guidelines for Determining KPIs and the Performance Assessment Criteria for SOEs. Based on the measurement of the Company's Key Indicators, the audited corporate performance for 2025 reached the score of 95.71.

Changes in the Composition of the Board of Directors

Pursuant to the Letter of the Director of Human Resources of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 3/SPMB/GC.01.05/RNI.02/27/III/2025 dated March 27, 2025, it was resolved that the term of office of the President Commissioner would expire effective April 1, 2025. Accordingly, the composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2025 was as follows:

Direktur Utama President Director	: Soegeng Hernowo
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	: Wien Irwanto
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	: Edhy Rizwan
Direktur Operasi Director of Operations	: Noverita Anggraeny

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Perseroan.

Pursuant to the Deed of Shareholders' Resolution No. 43 dated January 26, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the appointment of the Company's President Director and Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054803 tanggal 18 Februari 2026.

The aforementioned changes were acknowledged and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Letter of Receipt of Notification of Changes to the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0054803 dated February 18, 2026.

Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas, susunan Direksi Perseroan setelah tanggal periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Based on the shareholders' resolution described above, the composition of the Company's Board of Directors as end of the reporting period is as follows:

Direktur Utama President Director	: Wahyu Sakti Priyonggo
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	: Oksan Omas M. Panggabean
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	: Edhy Rizwan
Direktur Operasi Director of Operations	: Noverita Anggraeny



Apresiasi dan Penutup

Perkenankan kami menutup laporan ini dengan menyampaikan apresiasi mendalam kepada segenap pemegang saham, Dewan Komisaris serta pihak *regulator*, dan mitra usaha Perseroan atas kepercayaan yang diberikan selama tahun 2025. Apresiasi mendalam juga kami sampaikan kepada seluruh insan Perseroan atas kerja keras dan komitmen nyata dalam melaksanakan seluruh strategi dan program kerja sesuai rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun dan mencapai hasil yang baik selama tahun 2025.

Dengan semangat untuk terus berkarya secara berkelanjutan, Direksi dan segenap Manajemen yakin Perseroan akan terus tumbuh dan menjawab setiap tantangan dengan kontribusi dan dukungan terhadap program pemerintah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Appreciation and Closing Remarks

Allow us to conclude this report by expressing our sincerest appreciation to our shareholders, the Board of Commissioners, regulators, and the Company's business partners for the trust and support extended to us throughout 2025. We also extend our sincere appreciation to all employees of the Company for their hard work and unwavering commitment in implementing the strategies and work programs established at the beginning of the year, resulting in the Company's positive achievements throughout 2025.

With a continued commitment to create sustainable value, the Board of Directors and the entire Management remain confident that the Company will continue to grow and respond future challenges with the contributions and support of the Government's programs, and make meaningful contributions to the national development.

Jakarta, Juni 2026
Jakarta, June 2026



Wahyu Sakti Priyonggo
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun 2025

Statement Letter of Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia (Persero) in 2025

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tahun 2025 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) in 2025 has been contained in full, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Jakarta, Juni 2026
Jakarta, June 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris
Commissioner



Shahandra Hanitiyo
Komisaris Utama
President Commissioner



Gigih Guntoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



Wahyu Sakti Priyonggo
Direktur Utama
President Director



Oksan Omas M. Panggabean
Direktur Keuangan, Manajemen
Risiko, SDM & Umum
Director of Finance, Risk
Management, HC & General Affairs



Edhy Rizwan
Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial &
Development



Noverita Anggraeny
Direktur Operasi
Director of Operations



PROFIL PERSEROAN

COMPANY PROFILE







Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan

Name of the Company

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)



Nama Singkat

Nickname

PPI



Domisili Usaha

Business Domicile

Jakarta, Indonesia



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

19 Juni 2003 | June 19, 2003



Ruang Lingkup Usaha

Scope of Business

Kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, dan pengadaan barang-barang.

Export, import, inter-island activities, local trade, distribution, representation and agency, and procurement of goods.



Bidang Usaha

Line of Business

Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar.

Agriculture, Fisheries, Manufacturing Industry.



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

- Akta Pendirian 04 tanggal 9 Juni 2003
Deed of Establishment 04 dated June 9, 2003
- Akta Anggaran Dasar Nomor 33 tanggal 29 Agustus 2008
Deed of Association Number 33 dated August 29, 2008
- Akta Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) Nomor 5 tanggal 2 Desember 2021
Deed of Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) Number 5 dated December 2, 2021
- Perubahan Anggaran Dasar Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024
Amendment to Articles of Association Number 12 dated March 21, 2024



Modal Dasar

Authorized capital

Rp2.250.000.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah)

Rp2,250,000,000,000 (two trillion two hundred and fifty billion Rupiah)



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Fully Paid Capital

Rp1.826.131.000.000 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah).

Rp1,826,131,000,000 (one trillion eight hundred and twenty-six billion one hundred and thirty one million rupiah)



Kepemilikan Saham

Share Ownership

Kepemilikan saham Perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

The Company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs.



Jaringan Kantor

Office Network

- 29 Kantor Cabang
29 Branch Offices
- 5 Unit Operasional
5 Operasional
- Trading House di Kantor Pusat
Trading House at the Head Office



Jumlah Karyawan

Number of Employee

1.399 orang/employees



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Grha PPI

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160

Telepon / Phone Number : (021) 3862141

E-mail : ppi.info@ptppi.co.id

Website : www.ptppi.co.id

Riwayat Singkat Perusahaan

Corporate Brief History

Pada masa kolonial, Pemerintah Belanda telah mendirikan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, berupa kantor cabang suatu perusahaan asing, perusahaan lokal yang mewakili perusahaan luar negeri, agen tunggal, perusahaan yang sudah berdiri dari perusahaan induknya di luar negeri, dan perusahaan berbadan hukum dengan anak perusahaan yang berdomisili di Hindia-Belanda.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, yang terbesar adalah *The Big Five*, dengan keunggulan manajemen dan jaringan pemasaran ke seluruh pelosok dengan tujuan untuk mengeksport rempah-rempah ke Eropa.

Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia menasionalisasi semua perusahaan perdagangan tersebut menjadi perusahaan milik negara. *The Big Five* menjadi cikal bakal perusahaan dagang dan disebut Niaga pada tahun 1950-an.

Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi bertanggung jawab untuk perdagangan dan pendistribusian komoditi dasar seperti makanan pokok (beras, tepung, jagung, dan lain-lain) di samping rempah-rempah tradisional. Mereka juga bertanggung jawab untuk perdagangan dan distribusi komoditas produk-produk pertanian (pupuk dan pestisida, bahan kimia dan lain-lain) dan produk konsumen (tekstil, otomotif, dan lain-lain). Untuk itu, pemerintah memberikan hak khusus untuk beroperasi dalam jangka peraturan, modal, dan aset.

Pada bulan Juni 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan tiga perusahaan niaga yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero), menjadi satu perusahaan niaga yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PT PPI) yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2003 yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi manajemen, memaksimalkan keuntungan, integrasi bisnis dan meningkatkan kepemilikan aset.

Pada 2 Desember 2021 PPI dan PT BGR Logistik Indonesia resmi bergabung berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., Nomor 3 yang disahkan oleh Kemenkumham Nomor AHUAH.01.10-0014967 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

During the colonial period, the Dutch government established various types of trading companies, including branch offices of foreign companies, local companies representing foreign companies, sole agents, companies that were established from their parent companies abroad, and legally constituted companies with subsidiaries domiciled in the Dutch East Indies.

Among these companies, the largest were The Big Five, known for their management excellence and marketing networks extending throughout the region with the aim of exporting spices to Europe.

Subsequently, following Indonesia's independence, the Indonesian Government nationalized all trading companies, transforming The Big Five into the forerunner of trading companies known as Niaga in the 1950s.

The nationalized companies were responsible for trading and distributing basic commodities such as staple foods (rice, flour, corn, etc.) alongside traditional spices. They were also responsible for trading and distributing agricultural commodity products (fertilizers, pesticides, chemicals, etc.) and consumer products (textiles, automotive, etc.). For this purpose, the government granted special rights to operate within regulatory frameworks, capital, and assets.

In June 2003, the Indonesian Government decided to merge three trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero), into one trading company, namely PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PT PPI), effective from March 31, 2003, based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2003 aimed at enhancing management efficiency, maximizing profits, business integration, and asset ownership.

On December 2, 2021, PPI and PT BGR Logistik Indonesia officially merged based on Notarial Deed Aulia Taufani, S.H., Number 3 ratified by the Ministry of Law and Human Rights Number AHUAH.01.10-0014967 concerning the Acceptance of Notification of the Merger of the Company Limited (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).



Saat ini, PPI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan dan logistik yang terdigitalisasi, melalui tahapan inisiatif strategis dengan memperbaiki fundamental (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) dan seterusnya.

Currently, PPI is a company engaged in domestic and international trade, warehousing, and digitized logistics business through strategic initiative stages by improving fundamentals (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024), and beyond.

Keterangan Perubahan Nama

Hingga akhir 2025, PPI tidak pernah melakukan perubahan nama.

Information on Change of Name

Until the end of 2025, PPI has never changed its name.



Jejak Langkah

Milestones

1965

Pemerintah Indonesia menasionalisasi seluruh perusahaan perdagangan menjadi perusahaan milik negara dan disebut sebagai Niaga.

The Indonesian government nationalized all trading companies into state-owned companies and called them Niaga.

1961

- Perubahan nama PN Bhakti, PN Sedjati, dan PN Sinar Bhakti menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 75/1961, PP No. 90/1961, PP No.71/1967, PP No.74/1961;
Changes in the names of Bhakti, PN Sedjati, and PN Sinar Bhakti to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 75/1961, PP No. 90/1961, PP No.71/1967, PP No.74/1961;
- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Cipta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; dan Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Cipta Niaga as stated in PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; and
- Perubahan nama PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, dan PN Tulus menjadi PT Aneka Bhakti dan PT Pantjta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.
Changes in the names of PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, and PN Tulus to PT Aneka Bhakti and PT Pantjta Niaga as stated in PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.

1964

- Perubahan nama PN Budi Bhakti menjadi PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti menjadi PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti menjadi PN Dharma, dan PN Fadjar Bhakti menjadi PN Satya Niaga telah dituangkan di dalam PP 31/1964 dan PP 30/1964;
Changes in the name of PN Budi Bhakti to PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti to PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti to PN Dharma, and PN Fadjar Bhakti to PN Satya Niaga as stated in PP 31/1964 and PP 30/1964;
- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Aneka Niaga II telah dituangkan di dalam PP No. 30/1964.
Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Aneka Niaga II as stated in PP No. 30/1964.

1970

- Perubahan nama PN Kerta Niaga menjadi PT Kerta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 32/1970;
Change in the name of PN Kerta Niaga to PT Kerta Niaga as stated in PP No. 32/1970;
- Perubahan nama PN Dharma menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 22/1970;
Change in the name of PN Dharma to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 22/1970;
- Perubahan nama PT Satya Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam RUPSLB PT Dharma Niaga Tanggal 6 April 1970.
Change in the name of PT Satya Niaga to PT Dharma Niaga as stated in the EGMS of PT Dharma Niaga on April 6, 1970.

1966

Perubahan nama PT Aneka Niaga II menjadi PN Kerta Niaga, PT Pembangunan menjadi PT Cipta Niaga, dan PT Aduma Niaga III berubah menjadi PT Dirga Niaga. Seluruh perubahan tercantum di dalam PP No. 7/1966.

Change in the name of PT Aneka Niaga II to PN Kerta Niaga, PT Pembangunan to PT Cipta Niaga, and PT Aduma Niaga III to PT Dirga Niaga. All changes are stated in PP No. 7/1966.

1965

Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Niaga III tercantum di dalam Keputusan Menteri. PDN No. 002/1965 dan Keputusan Menteri. PDN No. 010/1965.

Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Niaga III as stated in the Ministerial Decree. PDN No. 002/1965 and Ministerial Decree. PDN No. 010/1965.



1971

- Perubahan nama PT Aduma Niaga I menjadi PT Aduma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 52/1971;
Change in the name of PT Aduma Niaga I to PT Aduma Niaga as stated in PP No. 52/1971;
- Perubahan nama PN Satya Niaga menjadi PT Satya Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 10/1971;
Change in the name of PN Satya Niaga to PT Satya Niaga as stated in PP No. 10/1971;
- Perubahan nama PT Aneka Niaga I menjadi PT Aneka Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 73/1971;
Change in the name of PT Aneka Niaga I to PT Aneka Niaga as stated in PP No. 73/1971;
- Perubahan nama PN Dirga Niaga menjadi PT Dirga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 36/1971;
Change in the name of PN Dirga Niaga to PT Dirga as stated in PP No. 36/1971;
- Perubahan nama PT Pantja berubah menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 37/1971; dan
Change in the name of PT Pantja to PT Pantja Niaga as stated in PP No. 37/1971; and
- Perubahan nama PN Pembangunan Niaga I menjadi PT Pembangunan Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 47/1971.
Change in the name of PN Pembangunan Niaga I to PT Pembangunan Niaga as stated in PP No. 47/1971.

1992

Penggabungan PT Dirga Niaga dan PT Pembangunan Niaga menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam Keputusan RUPSLB No. 17/1982.

Merger of PT Dirga Niaga and PT Pembangunan Niaga into PT Pantja Niaga as stated in the EGMS Resolution No. 17/1982.

1998

Perubahan nama PT Kerta Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 28/1998.

Change in the name of PT Kerta Niaga to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 28/1998.

2017

Bekerjasama dengan partner Zhong Ni, PPI meresmikan *Representative Office* di China.

In collaboration with partner Zhong Ni, the PPI inaugurated a Representative Office in China.

2015

Melakukan perubahan logo perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan ITC (*Indonesia Trading Company*) menjadi Perusahaan Perdagangan Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan dari Kementerian BUMN Nomor S-28/MBU/01/2015 pada tanggal 14 Januari 2015.

Change in the Company logo, previously known as ITC (Indonesia Trading Company) to become Perusahaan Perdagangan Indonesia in accordance with the Approval Letter from the Ministry of SOE Number S-28/MBU/01/2015 on January 14, 2015.

2003

Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Niaga atau perusahaan perdagangan, yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga (Persero) menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PPI") atau Indonesia Trading Company (ITC). Hal ini tercantum di dalam PP No. 22/2003.

Merger of 3 (three) Commerce Companies or trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero) to become PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PPI") or Indonesia Trading Company (ITC). This is stated in PP No. 22/2003.



2018

- Pertama kali menerapkan Sistem *Information and Communication Technology* (ICT) yang dimulai dengan pemberlakuan sistem ERP di tahun 2017.
Implemented the Information and Communication Technology (ICT) System for the first time starting with the implementation of the ERP system in 2017.
- PPI mengeskpor komoditi Arang Batok Kelapa ke Sri Lanka dengan sumber pasokan komoditi berasal dari area Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatra Selatan.
PPI exported Coconut Shell Charcoal commodity to Sri Lanka with commodity supply sources coming from West Java, East Java, Sulawesi and South Sumatra.
- PPI memproduksi Dharmafur kemasan 1 kg untuk segmen petani/rumah tangga dengan luasan lahan kecil.
PPI produces Dharmafur packaging in 1 kg size for the small-scale farmer/household segment.
- PPI mengeluarkan produk baru dengan *brand* sendiri, yaitu Panganesia. Berkolaborasi dengan produsen minyak goreng di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra Utara, dan mulai memasarkan produk minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter dengan *brand* Minyak Goreng Panganesia.
PPI issued a new product with its own brand, namely Panganesia. Collaborated with cooking oil producers in a number of areas, especially in North Sumatra, and began marketing 1 liter and 2 liter packaged cooking oil products under the Panganesia Cooking Oil brand.
- PPI bekerjasama dengan produsen beras di sejumlah sentra produksi beras dan memasarkan produk beras premium kemasan 5 kg dengan *brand* Beras Panganesia.
PPI collaborated with rice producers in a number of rice production centers and marketed premium 5 kg packaged rice products under the Panganesian Rice brand.
- PPI merintis peluang bisnis baru berupa pengembangan usaha kopi beserta produk turunannya dan meluncurkan produk KOPI COVARE.
PPI pioneered new business opportunities by developing the coffee business and its derivative products and launching the KOPI COVARE product.
- PPI meresmikan 15 BUMN *Shop* yang beroperasi di sejumlah wilayah di Indonesia.
PPI inaugurated 15 SOE Shops operating in a number of regions in Indonesia.



2021

Penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhandha Ghara Reksha ke dalam PT Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2021 dan PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT BGR Logistik Indonesia ke dalam PPI pada 15 September 2021.

Signing of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Reksha into PPI on December 2, 2021 and PP Number 97 of 2021 concerning the Merger of PT BGR Logistik Indonesia into the PPI on September 15, 2021



2020

- Bekerja-sama dengan *partner* Al Buraq Investment; Hongkong Star Food, PPI meresmikan *Representative Office* di Dubai.
In collaboration with partner Al Buraq Investment & Hongkong Star Food, PPI inaugurated the Representative Office in Dubai.
- Bekerjasama dengan *partner* Legacy Singapura Holding Pte Ltd, PPI meresmikan *Representative Office* di Singapura.
In collaboration with partner Legacy Singapore Holding Pte Ltd, PPI inaugurated the Representative Office in Singapore.



2019

- Bekerjasama dengan *partner* Elhamd Trading Company, PPI meresmikan *Representative Office* di Mesir.
In collaboration with partner Elhamd Trading Company, PPI inaugurated the Representative Office in Egypt.
- Bekerjasama dengan *partner* Ascent Hi-Tech Corp, PPI meresmikan *Representative Office* di Taiwan.
In collaboration with partner Ascent Hi-Tech Corp, PPI inaugurated the Representative Office in Taiwan.



2022

Pada tanggal 7 Januari 2022 secara resmi terbentuk *Holding* BUMN Pangan, dengan PT RNI (Persero) sebagai induk *holding*. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan penandatanganan Akta Inbreng saham Pemerintah antara PT RNI (Persero) dan kelima BUMN Pangan, di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam.

On January 7, 2022, the Food SOE Holding was officially formed, with PT RNI (Persero) as the holding parent. This was marked by the signing of the Deed of Inbreng of Government shares between PT RNI (Persero) and the five Food SOEs, including PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari and PT Garam.

2023

Merealisasikan ekspor perdana dalam skema Imbal Dagang Indonesia – Mesir.

Realizing the first export in the Indonesia - Egypt under Trade Returns scheme.

2024

- Pembukaan Gerai Covare Cafe milik PPI oleh Wakil Menteri BUMN di Waskita Rajawali Tower.
The grand opening of PPI's Covare Cafe outlet by the Deputy Minister of State-Owned Enterprises at Waskita Rajawali Tower.
- PT PPI Lepas Ekspor Perdana Getah Damar ke India.
PT PPI Waived its First Export of Dammar Gum.

2025

- Memperkuat peran di pasar global melalui ekspor komoditas unggulan Indonesia berupa kopi, damar, dan kemenyan ke Mesir, India, dan Sudan.
Strengthening our role in the global market by exporting Indonesia's featured commodities in the form of coffee, resin and incense to Egypt, India and Sudan.
- Menjadi bagian dari pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memperkuat konektivitas perdagangan dari desa hingga pasar, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Participate in the implementation of the Red and White Village/Subdistrict Cooperative program by strengthening trade connectivity from village to market, while supporting sustainable community economic growth.
- Persiapan dalam mendukung hilirisasi pertanian melalui program pembangunan *Cold Chain* ID FOOD 2025.
Preparation to support agricultural downstreaming through the ID FOOD Cold Chain 2025 development program.

Bidang Usaha, Produk, dan Layanan

Line of Business, Products, and Services

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI, maka dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI menjalankan kegiatan usaha utama dan pendukung sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Internasional & Perdagangan Dalam Negeri

- Hasil pertanian serta produk turunannya berikut alat-alat pertanian;
- Hasil kehutanan serta produk turunannya berikut alat-alat pengelolaan kawasan hutan;
- Hasil perkebunan serta produk turunannya berikut alat-alat perkebunan;
- Bahan-bahan untuk konstruksi;
- Alat-alat untuk konstruksi;
- Alat-alat kesehatan dan laboratorium.

Kegiatan Usaha Pendukung:

Selain menjalankan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang meliputi pergudangan, perkantoran, pertokoan, pemanfaatan lahan, transportasi, properti, dan pariwisata, serta melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Business Activities Based on the Articles of Association

As stated in the Articles of Association of PPI, in order to achieve the aforementioned purposes and objectives, PPI carries out the following main and supporting business activities:

Main Business Activities:

International Trade & Domestic Trade

- Agricultural products and their derivatives including agricultural tools;
- Forestry products and their derivatives, as well as equipment for managing forest areas;
- Plantation products and their derivatives including plantation tools;
- Construction materials;
- Construction equipment;
- Health and laboratory equipment

Supporting Business Activities:

In addition to conducting main business activities, the Company may also engage in activities aimed at optimizing resource utilization including warehousing, office space, retail space, land utilization, transportation, real estate, tourism, and carrying out government assignments in accordance with the principles of company management and laws and regulations.

Kegiatan Usaha Dijalankan di Tahun 2025

Dengan memajukan paradigma Perseroan di era modern perdagangan global, PPI secara berkelanjutan menciptakan ekosistem bisnis secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan bersama mulai dari sumber pasokan (hulu), proses nilai tambah (produksi dan pengolahan), dan secara agresif membuka jaringan distribusi (hilir) baik pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan *market share*.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PPI Nomor 12 Tahun 2024, perseroan menjalankan usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar. Untuk mencapai hal tersebut, PPI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI
- Perikanan
- Pertambangan Batu Bara dan Lignit
- Industri Makanan
- Industri Minuman

Business Activities Carried Out in 2025

By advancing the Company's paradigm in the contemporary era of global trade, PPI continuously creates a comprehensive business ecosystem while considering mutual interests starting from the supply source (upstream), value-added processes (production and processing), and aggressively opening distribution networks (downstream) both in domestic and international markets to increase market share.

Based on Amendment Deed of the Articles of Association of PPI Number 12 of 2024, the company engages in the fields of Agriculture, Fisheries, Manufacturing Industry, and Wholesale Trade. To achieve this, PPI carries out the following business activities:

- Crop Farming, Animal Husbandry, Hunting, and YBDI Activities
- Fisheries
- Coal and Lignite Mining
- Food Industry
- Beverage Industry



- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- Treatment Air Limbah
- Pengumpulan, *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
- Konstruksi Bangunan Sipil
- Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
- Penyediaan Akomodasi
- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
- Aktivitas Jasa Informasi
- *Real Estate*
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya.

- Chemical Industry and Goods from Chemicals
- Wastewater Treatment
- Collection, Treatment, and Disposal of Waste and Garbage as well as Material Recovery Activities
- Remediation and Management of Other Waste and Garbage
- Civil Construction
- Trade, Repair, and Maintenance of Cars and Motorcycles
- Wholesale Trade, Except for Cars and Motorcycles
- Warehousing and Transport Support Activities
- Accommodation Provision
- Programming Activities, Computer Consulting, and YBDI Activities
- Information Services Activities
- Real Estate
- Head Office Activities and Management Consulting
- Leasing and Operating Leases without Option Rights
- Office Administration Activities, Office Support Activities, and Other Business Support Activities.

Pengungkapan Informasi Bidang Usaha dalam Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025

Informasi tentang kegiatan usaha di atas juga telah tercantum dalam Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Disclosure of Business Fields Information in the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2025

Information about the above business activities has also been disclosed in the Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) for the fiscal year ended December 31, 2025.

Produk dan Komoditi

Products and Commodities

Dalam menjalankan usahanya, PPI menerapkan prinsip integrasi vertikal, yang artinya Perseroan memperluas pengendalian atas berbagai tahap proses produksi dan distribusi dalam industri tertentu, baik ke arah hulu maupun ke arah hilir. Dengan mengintegrasikan secara vertikal ke arah hulu, maka Perseroan dapat mengamankan rantai pasokan, menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas, dan mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Sementara integrasi ke arah hilir memungkinkan Perseroan untuk mengendalikan saluran distribusi yang lebih besar, menangkap pangsa yang lebih besar dari rantai nilai, dan menjaga profitabilitas.

In conducting its business operations, PPI adheres to the principle of vertical integration, wherein the Company expands its control over various stages of the production and distribution process within specific industries, both upstream and downstream. By vertically integrating upstream, the Company aims to secure the supply chain, maintain price stability, ensure quality, and reduce dependence on external suppliers. Meanwhile, downstream integration enables the Company to control larger distribution channels, capture a greater share of the value chain, and sustain profitability.

Ke arah hulu, Perseroan bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta produsen-produsen bahan kimia, pestisida dan obat-obatan. Sementara ke arah hilir, Perseroan memberi nilai tambah agar produk akhir memiliki kualitas yang memuaskan sesuai ekspektasi pelanggan sebelum dipasarkan melalui saluran distribusi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan aktivitas logistik dan pergudangan sebagai portofolio anak perusahaan. Kegiatan logistik dan pergudangan ini akan mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan sumber daya di seluruh rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, dan pada akhirnya mendorong keunggulan kompetitif di pasar.

Berikut ini adalah *portfolio* produk dan komoditi yang diperdagangkan oleh Perseroan:

Pestisida

Sebagai wujud komitmen untuk menjadi sahabat petani Indonesia, Perseroan terus berinovasi untuk mengembangkan solusi yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Perseroan telah memiliki rangkaian produk unggulan pestisida, yang terbagi menjadi insektisida dan herbisida, yaitu Dharmabrand.

Produk-produk pestisida Perseroan terdiri dari Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, dan Dharmafur 3G yang merupakan golongan insektisida, serta Dharmapara 276SL, dan Dharmara 480SL sebagai golongan herbisida.

Upstream, the Company collaborates with farmers, livestock breeders, fishermen, MSMEs, as well as producers of chemicals, pesticides, and pharmaceuticals. Conversely, downstream efforts focus on adding value to ensure that the final products meet customer expectations before being marketed through distribution channels domestically and internationally.

Furthermore, the Company also conducts logistics and warehousing activities as part of its subsidiary portfolio. These logistics and warehousing activities will optimize the flow of goods, information, and resources throughout the supply chain, enhance operational efficiency, reduce costs, improve customer service, and ultimately drive competitive advantage in the market.

The following is a portfolio of products and commodities traded by the Company:

Pesticides

As a form of commitment to be the best friend of Indonesian farmers, the Company continues to innovate to develop solutions needed by farmers to increase agricultural production. The Company has a series of pesticide products, which are divided into insecticides and herbicides, namely Dharmabrand.

The Company's pesticide products consist of Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, and Dharmafur 3G which are insecticides, and Dharmapara 276SL, and Dharmara 480SL as herbicides.

Jenis Pestisida Types of Pesticides	Keterangan Description
DHARMASIP 50EC	Insektisida piretroid berbahan aktif Sipermetrin 50 g/l yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan berwarna kuning muda pucat yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan kedelai. Pyrethroid insecticide with active ingredient Cypermethrin 50 g/l which functions as a contact and gastric poison, in the form of a pale light-yellow concentrate that can be emulsified to control pests on chili, onion, cabbage, tomato, and soybean plants.
DHARMASAN 600EC	Insektisida organofosfat berbahan aktif fentoat 600 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning pucat yang dapat membentuk emulsi dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai merah, kapas, kedelai, lada, tebu, dan tembakau. Organophosphate insecticide with active ingredient fentoate 600 g/l which functions as a contact poison in the form of a pale yellow concentrate that can form an emulsion in water to control pests on shallots, red chilies, cotton, soybeans, pepper, sugarcane, and tobacco.
DHARMABAS 500EC	Insektisida karbamat berbahan aktif BPMC 500 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan teh. Carbamate insecticide with active ingredient BPMC 500 g/l which functions as a contact poison in the form of a yellow concentrate that can be emulsified in water to control pests on rice, shallots, red chili, sugarcane, cocoa, and tea plants.



Jenis Pestisida Types of Pesticides	Keterangan Description
DHARMAFUR 3G	Insektisida karbamat berbahan aktif karbofuran 3% berbentuk granul yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung yang sistemik berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman kedelai, bawang merah, dan cabai. Carbamate insecticide with active ingredients 3% carbofuran in the form of granules that functions as systemic contact and stomach poison in purple granular form to control pests on soybeans, shallots, and chilies.
DHARMAPA- RA 276SL	Herbisida terbatas berbahan aktif paraquat diklorida 247 g/l bekerja sebagai racun kontak purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air berwarna biru kehijauan, untuk mengendalikan gulma umum pada pertanaman kelapa sawit (TBM). Limited herbicide with the active ingredient paraquat dichloride 247 g/l which functions as a post-growth contact poison, in the form of a blue-green solution in water, to control common weeds in oil palm plantations (TBM).
DHARMARA 480SL	Herbisida sistemik purna tumbuh berbahan aktif isopropil amina glifosat 480 g/l setara dengan Glifosat 356 g/l, yang berbentuk larutan dalam air berwarna kekuningan dan tidak selektif terhadap tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma) sasaran pada pertanaman kelapa sawit (TBM). Post-emergence systemic herbicide with the active ingredient isopropyl amine glyphosate 480 g/l equivalent to Glyphosate 356 g/l, which is in the form of a yellowish aqueous solution and is not selective against targeted cultivated plants (weeds) in oil palm plantations (TBM).



Pupuk

PPI sebagai distributor pupuk subsidi dan non subsidi bekerja sama dengan pabrik pupuk BUMN dan swasta untuk menyalurkan kebutuhan pupuk bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. PPI menyediakan kebutuhan pupuk untuk agen, kios dan *end-user* yang tersebar di setiap kantor cabang seluruh Indonesia.

Fertilizer

As a distributor of both subsidized and non-subsidized fertilizers, PPI collaborates with state-owned and private fertilizer manufacturers to supply fertilizers to agricultural businesses, including food crop farmers, livestock farmers, and smallholder plantation farmers. PPI supplies fertilizers to agents, retail outlets, and end users through its branch offices throughout Indonesia.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Pupuk KCL KCL Fertilizer	Pupuk KCL atau yang sering disebut sebagai MOP (<i>Muriate of Potash</i>) merupakan salah satu jenis pupuk tunggal yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu mengandung 60% K₂O sebagai Kalium klorida. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap klorida atau tanah dengan klorida rendah. Selain itu, Pupuk KCL dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanah. KCL fertilizer or often referred to as MOP (<i>Muriate of Potash</i>) is a single type of fertilizer that has a high concentration containing 60% K₂O as Potassium chloride. This is a fertilizer containing potassium which is very suitable for all types of plants that are tolerant to chloride or soils with low chloride. In addition, KCL fertilizer can be applied to all types of soil.
Pupuk NPK NPK Fertilizer	Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan unsur hara Nitrogen (N), Phosphat (P) dan Kalium (K). Pupuk majemuk NPK adalah pupuk yang mengandung setidaknya 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara makro yaitu N, P, dan K serta 2 unsur hara mikro. Setiap jenis pupuk atau merk memiliki presentase atau komposisi kandungan yang berbeda-beda, yang ditandai dengan angka seperti NPK 16-16- 16, NPK 15-15-15 atau NPK 12-12- 12. Angka-angka tersebut adalah presentase kandungan unsur hara makro yang ada di dalamnya, sedangkan kandungan unsur hara mikro sangat sedikit sehingga umumnya tidak ditulis pada kemasan. NPK fertilizer is a type of fertilizer which contains nitrogen (N), Phosphate (P) and Potassium (K) nutrients. NPK compound fertilizer is fertilizer that contains at least 5 nutrients consisting of 3 macro nutrients, namely N, P, and K and 2 micro nutrients. Each type of fertilizer or brand has a different percentage or composition of content, which is indicated by numbers such as NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 or NPK 12-12-12. These numbers are the percentage of macro nutrients in it, while the content of micro nutrients is very small so they are generally not written on the packaging.
Pupuk Urea Urea Fertilizer	Pupuk Urea merupakan zat yang membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk Urea dibuat secara kimiawi dengan kandungan kadar nitrogen yang cukup tinggi. Pupuk Urea membuat daun tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar. Nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun (klorofil). Dengan adanya zat hijau daun yang berlimpah, tanaman akan lebih mudah melakukan fotosintesis. Pupuk Urea juga mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah kandungan protein di dalam tanaman, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman usaha perkebunan, tanaman di sekitar peternakan dan juga tanaman di sekeliling usaha perikanan. Urea fertilizer is a substance that helps plant growth. Urea fertilizer is made chemically with fairly high nitrogen. Urea fertilizer makes plant leaves greener, lusher, and fresher. Nitrogen also helps plants to have a lot of green leaf substance (chlorophyll). In the presence of abundant leaf green matter, plants will carry out photosynthesis more easily. Urea fertilizer also accelerates plant growth, increases protein content in plants, can be used for all types of plants, including for food crops, horticultural crops, plantation crops, plants around livestock and also plants around fishing businesses.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Fertilizer Pupuk ZA ZA Fertilizer	Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen bagi tanaman. Pupuk ZA mudah menyerap air karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion amonium lebih lemah, pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya. Pupuk ZA memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen dan pakan ternak karena peningkatan kadar protein pati, padi, gula, lemak, vitamin, dan lain-lain; memperbaiki rasa dan warna hasil panen; tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan (hama, penyakit, kekeringan); kandungan nitrogennya hanya separuhnya dari pupuk urea, sehingga biasanya pemberiannya dimaksudkan sebagai sumber pemasok hara belerang pada tanah-tanah yang miskin unsur ini, maka Pupuk ZA merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara belerang. ZA fertilizer is an artificial chemical fertilizer designed to provide additional nitrogen nutrients to plants. ZA fertilizer easily absorbs water because the sulfate ion is very easily soluble in water while the ammonium ion is weaker. This fertilizer has the potential to lower the pH of the soil affected by its application. ZA fertilizer improves quality and increases production and nutritional value of crop yields and animal feed due to increased levels of protein, starch, rice, sugar, fat, vitamins, and others; improve the taste and color of crops; plants are healthier and more resistant to environmental disturbances (pests, diseases, drought); Its nitrogen content is only half that of urea fertilizer, so it is usually given as a source of sulfur nutrient supply in soils that are poor in this element, so ZA fertilizer is the best choice to meet the needs of sulfur nutrients.

Bahan Berbahaya

PPI sebagai importir dan distributor bahan kimia berbahaya di Indonesia melalui harmonisasi *supply and demand* yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok bahan kimia berbahaya. PPI memiliki produk prioritas Bahan Kimia Berbahaya, yaitu:

Hazardous Chemicals

As an importer and distributor of hazardous chemicals in Indonesia through harmonization of supply and demand supported by information and communication technology systems for the supply chain of hazardous chemicals, PPI has priority products for Hazardous Chemicals, namely:

Jenis Bahan Berbahaya Types of Hazardous Chemicals	Keterangan Description
Borax Pentahydrate	Borax Pentahydrate adalah padatan yang berbentuk kristal berfungsi sebagai pupuk untuk meningkatkan kualitas buah dan mempercepat pertumbuhan; sebagai <i>fluxing agent</i> untuk efisiensi pada ruang pembakaran pada industri kaca dan keramik; dan sebagai pengawet dalam industri kayu dan pengolahan kertas. Borax Pentahydrate is a crystalline solid that functions as a fertilizer to improve fruit quality and accelerate growth; as a fluxing agent for efficiency in combustion chambers in the glass and ceramics industry; and as a preservative in the wood and paper processing industries.
Sodium Cyanide	Sodium Cyanide adalah senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air, berfungsi sebagai bahan pembantu ekstraksi emas, perak, dan tembaga, serta sebagai bahan pengikat dalam proses pelapisan logam. Sodium Cyanide is a white solid compound that is soluble in water, and serves as an auxiliary material for the extraction of gold, silver, and copper, as well as a binder in metal plating processes.
MDEA	MDEA adalah cairan kuning jernih yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk proses pemurnian gas Carbon Dioxide (CO₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) dalam industri pengolahan gas bumi. MDEA is a clear yellow liquid that functions as an ingredient used for the purification of Carbon Dioxide (CO₂) and Hydrogen Sulfide (H₂S) gases in the natural gas processing industry.
TEA	TEA adalah senyawa kimia organik kental dengan bau amonia yang berfungsi sebagai zat pengemulsi dalam industri <i>consumer goods</i>, pewarna tekstil, dan bahan pelapis anti korosi dan anti karat untuk industri besi dan baja. TEA is an organic chemical compound, thick with ammonia odor, which functions as an emulsifier in the consumer goods industry, textile dyes, and anti-corrosion and anti-rust coating materials for the iron and steel industry.
Potassium Chlorate	Potassium Chlorate adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin dan oksigen yang berbentuk kristal putih, berfungsi sebagai bahan oksidator dalam industri kembang api, korek api, peledak dan antiseptik. Potassium Chlorate is a compound containing potassium, chlorine and oxygen in the form of white crystals, which functions as an oxidizing agent in the fireworks, matches, explosives and antiseptic industries.

Bahan Bangunan

Selain bahan-bahan yang disebutkan di atas, PPI juga melakukan perdagangan bahan bangunan, yakni Semen dan Aspal. Keduanya merupakan material penting dalam industri konstruksi dan memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di mana pun.

Building Materials

Apart from the materials mentioned above, PPI also trades in building materials, namely cement and asphalt. Both are important materials in the construction industry and play a vital role in infrastructure development everywhere.

Jenis Bahan Bangunan Types of Construction Materials	Keterangan Description
Semen Cement	PPI mendistribusikan semen Portland Jenis I, semen jenis ini adalah semen hidrolis yang proses pembuatannya mencampurkan beberapa unsur di antaranya terak, gypsum, dan bahan anorganik yang apabila diberi air akan membentuk pasta semen dan kemudian menjadi kaku dan keras. Jenis semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan semen ini di antaranya untuk konstruksi bangunan rumah pemukiman, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, landasan pacu pesawat terbang, dan lain-lain. Karakteristiknya cocok digunakan di lokasi pembangunan kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat rendah. Semen yang didistribusikan oleh PPI merupakan sinergi dengan hasil produk Semen Indonesia Grup (SIG) untuk wilayah Indonesia. Untuk wilayah Papua PPI menghadirkan semen dengan harga yang lebih terjangkau khususnya daerah Pegunungan Tengah Papua. PPI distributes Portland cement Type I. This type of cement is hydraulic cement with manufacturing process mixing several elements including slag, gypsum, and inorganic materials, which when given water will form a cement paste and then become stiff and hard. This type of cement is used for general building construction which does not require special requirements for heat hydration and initial compressive strength. The uses of this cement include the construction of residential houses, high-rise buildings, roads, bridges, airplane runways, and others. Its characteristics are suitable for use in construction sites that are far from the coast and have low sulfate levels. The cement distributed by PPI is a synergy with the products of the Semen Indonesia Group (SIG) for the Indonesian regions. For the Papua region, PPI provides cement at a more affordable price, especially in the Central Highlands of Papua.
Aspal Asphalt	Aspal merupakan salah satu bahan bangunan yang acapkali digunakan dalam sebuah proyek konstruksi jalan atau sirkulasi, yang fungsi utamanya sebagai bahan pengikat dan pelapis permukaan tanah yang penggunaannya dicampur dengan senyawa lain seperti bitumen dan mineral. Aspal akan mengikat batuan dan komponen lain agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Aspal yang didistribusikan PPI adalah jenis asphalt 60/70 yang difokuskan untuk aplikasi konstruksi jalan. Ada dua jenis aspal yang didistribusikan yaitu aspal Pertamina dan aspal Iran. Aspal Pertamina didistribusikan PPI Cabang Jogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram, dan Ambon yang meliputi Timika dan Manokwari. Sedangkan aspal Iran didistribusikan Cabang Palu dan Ambon. Asphalt is one of the building materials that is often used in road construction or circulation projects with the main function as a binder and soil surface coating which is used by mixing it with other compounds such as bitumen and minerals. Asphalt will bind rocks and other components so that they are not separated from the road surface. Asphalt distributed by PPI is asphalt 60/70 which is focused on road construction applications. There are two types of asphalt distributed, namely Pertamina asphalt and Iranian asphalt. Pertamina's asphalt is distributed by the PPI Jogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram and Ambon branches which include Timika and Manokwari. Meanwhile, the Iranian asphalt is distributed by the Palu and Ambon branches.

Transamin

Transamin adalah obat anti pendarahan berbahan baku Asam Traneksamat pertama di Indonesia. PPI merupakan pemegang lisensi dari Daiichi-Sankyo untuk mendistribusikan produk Transamin. Transamin merupakan pilihan yang terbukti aman dan efektif menangani pendarahan dengan menghambat aktivitas dari activator plasminogen dan plasmin, mencegah degradasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet dan aktivitas faktor

Transamin

Transamin is the first anti-bleeding drug made from Tranexamic Acid in Indonesia. PPI is the licensee of Daiichi-Sankyo to distribute Transamin products. Transamin is a proven safe and effective option to treat bleeding by inhibiting the activity of plasminogen and plasmin activator, preventing fibrin degradation, increasing platelet aggregation and activity of coagulation factors and preventing fragility of blood vessel walls.



koagulasi serta mencegah kerapuhan dinding pembuluh darah. Transamin memiliki 4 jenis yakni Transamin Kapsul 250 mg, Transamin Tablet 500 mg, Transamin Injeksi 250 mg, dan Transamin Injeksi 500 mg.

Transamin has 4 types, namely Transamin Capsules 250 mg, Transamin Tablets 500 mg, Transamin Injection 250 mg, and Transamin Injection 500 mg.



Farmasi dan Alat Kesehatan

PPI sebagai Pedagang Besar Farmasi dengan izin dan sertifikat distribusi oleh Kementerian Kesehatan yang tersebar di 32 Kantor Cabang bekerja sama dalam mendistribusikan produk farmasi dan alat kesehatan dari PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, dan PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribusi merupakan proses yang penting dalam menjaga efikasi, keamanan, dan kualitas suatu obat setelah proses pembuatannya. Dalam proses pendistribusiannya, PPI menjamin kualitas produk mulai dari pengadaan, penyimpanan, peraturan dan registrasi produk hingga sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) perlu diterapkan pada fasilitas distribusi termasuk apotek agar mutu obat dapat terjaga sampai obat dikonsumsi oleh pasien.

Pharmaceutical and Medical Devices

PPI as a Pharmaceutical Wholesaler with a license and distribution certificate by the Ministry of Health spread across 32 Branch Offices cooperates in distributing pharmaceutical products and medical devices from PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, and PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribution is an important process in maintaining the efficacy, safety, and quality of a drug after the manufacturing process. In the distribution process, PPI guarantees product quality starting from procurement, storage, regulation and product registration until it reaches consumers in accordance with the Good Drug Distribution Method (CDOB) which needs to be applied to distribution facilities including pharmacies so that drug quality can be maintained until the drug is consumed by the patients.

Covare

Covare



PPI secara aktif mengembangkan strategi pengelolaan kopi Arabika yang bersumber dari wilayah Sumatra dan Papua. Pendekatan yang dilakukan oleh PPI adalah dengan membantu proses panen, mengawasi kegiatan pasca panen, pengadaan biji kopi, dan mempromosikan produk premium. Dalam beberapa kesempatan, Kopi PPI dipamerkan di hadapan publik untuk disesap, dan mendapat tanggapan positif.

PPI is actively advancing strategies for the management of Arabica coffee sourced from the Sumatra and Papua regions. Our approach involves aiding the harvest process, overseeing post-harvest activities, procuring green beans, and promoting premium products. On several occasions, PPI Coffee has been showcased publicly for tasting, receiving positive feedback.

Jajaran varietas kopi yang sedang dikembangkan saat ini meliputi Kopi Covare Blend, Solok Fermented, Gayo Semi Wash, Sindoro Wine, Gayo natural, Pengalengan Honey, dan Papua Wamena. Setiap jenis memiliki profil rasa yang berbeda. Sebagai contoh, Kopi Papua Wamena memancarkan aroma yang mengingatkan pada madu, cokelat, dan karamel. Sebaliknya, Sumatra Toba menampilkan rasa herbal, cokelat, manis, pedas dengan wangi buah, diikuti dengan rasa cokelat hitam.

The current lineup of coffee varieties under development includes Covare Blend, Solok Fermented, Gayo Semi Wash, Sindoro Wine, Gayo natural, Pengalengan Honey, and Papua Wamena. Each type boasts distinct flavor profiles. For instance, Papua Wamena Coffee exudes aromas reminiscent of honey, chocolate, and caramel. In contrast, Sumatra Toba features a herbal, chocolatey, sweet, spicy taste with fruity undertones, followed by a dark chocolate aftertaste.

Dipersembahkan di bawah merek kopi PPI, Covare, inisiatif ini membangun hubungan yang kuat antara secangkir kopi dan petani, menggarisbawahi komitmen untuk menghasilkan kualitas terbaik. Konsistensi alami adalah yang terpenting, yang mempengaruhi hasil dari setiap biji kopi. Dengan mensinergikan hubungan petani dengan alam, Covare menjadi *platform* untuk memperkenalkan biji kopi yang diproses secara cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon ekspresif dari konsumen berdasarkan kualitas biji kopi yang ditawarkan dan mengembalikan nilai yang dihasilkan dari setiap cangkir kepada petani.

Presented under the PPI coffee brand name Covare, this initiative establishes a strong connection between a cup of coffee and the farmers, underscoring a commitment to producing the highest quality. Natural consistency is paramount, influencing the outcome of each coffee bean. By synergizing farmer connections with nature, Covare serves as the platform for introducing meticulously processed coffee beans. The goal is to elicit an expressive response from consumers based on the offered coffee bean quality and reciprocate the value generated by each cup to the farmers.



Aspirasi mendasar PPI adalah untuk mengembangkan inisiatif kopi ini dengan mengangkat para petani, membina kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan, dan tentu saja, memajukan pertumbuhan perusahaan dengan keuntungan yang terukur dan adil.

PPI's fundamental aspiration is to cultivate this coffee initiative by uplifting farmers, fostering collaboration among all stakeholders, and, naturally, advancing the growth of the company with measurable and equitable profits.

Kopi

PPI merupakan salah satu eksportir komoditas kopi. Kopi adalah jenis minuman hasil seduhan biji tanaman kopi. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis ini menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Kopi dapat diproses menjadi minuman dan produk-produk dengan segudang manfaat untuk kesehatan, terdapat dua jenis varietas kopi yang populer di Indonesia yaitu kopi arabika dan robusta. Adapun perbedaan antara Kopi Robusta dan Kopi Arabica diklasifikasikan berdasarkan tempat hidup, aroma dan cita rasa, proses menanam, perawatan dan ukuran biji kopi. Kopi Arabika tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 - 2000 meter dari permukaan laut, memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat dengan bentuk biji kopi yang lonjong. Adapun Kopi Robusta tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-900, idealnya 400-800 meter dari permukaan laut. Rasa Kopi Robusta cenderung lebih pahit dan kasar dengan ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan Arabika dengan bentuk bulat. Berikut ini adalah jenis-jenis kopi yang tumbuh di Indonesia:

Coffee

PPI is one of the exporters of coffee commodities. Coffee is a type of beverage that is brewed from the coffee plant. Indonesia is one of the largest coffee producers in the world. This plant that grows in the tropics is a leading commodity in Indonesia. Coffee can be processed into beverages and products with a myriad of health benefits. There are two types of coffee varieties that are popular in Indonesia, namely Arabica and Robusta coffee. The differences between Robusta Coffee and Arabica Coffee are classified based on where they grow, the aroma and taste, the growing process, the treatment and size of coffee beans. Arabica coffee grows well at an altitude of 1000 - 2000 meters above sea level, has a slightly sour taste and a color that is not too thick with an oval shape of coffee beans. The Robusta coffee grows well at an altitude of 0-900, ideally 400-800 meters above sea level. The taste of Robusta coffee tends to be more bitter and coarse with a smaller bean size than Arabica with a round shape. The following are the types of coffee that grow in Indonesia:

Jenis Kopi Type of Coffee	Keterangan Description
Kopi Aceh	Kopi Aceh tersebar di sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatra merupakan penghasil kopi arabika terbaik di Indonesia, dengan kualitas yang baik dengan cita rasa unik, keunikan kopi ini berasal dari karakteristik aroma dan rasa kopinya yang khas. Perkebunan Kopi Aceh berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl. Aceh coffee, spread along the Barisan mountain range in Sumatra Island, is the producer of the finest Arabica coffee in Indonesia, boasting excellent quality with a unique flavor profile. The uniqueness of this coffee stems from its distinct aroma and flavor characteristics. Aceh coffee plantations are situated at elevations ranging from 1000 to 1200 meters above sea level (masl).
Kopi Sumatra	Kopi Sumatra merupakan salah satu varietas kopi yang memiliki tekstur halus dan cita rasa paling berat dan kompleks di antara beragam kopi lainnya. Ketinggian pertumbuhan Kopi Sumatra berada pada 800 - 1500 mdpl. Sumatra coffee is one of the coffee varieties known for its smooth texture and the heaviest and most complex flavor among various coffee types. The growth elevation of Sumatra coffee ranges from 800 to 1500 masl.
Kopi Sulawesi	Kopi Sulawesi mempunyai karakter rasa unik dengan aroma yang kuat dan rasa yang sedikit gurih, biji buah yang tebal serta keasaman yang rendah. Petumbuhan kopi ini berada di ketinggian 1500 - 1900 mdpl. Sulawesi coffee possesses a unique flavor profile with a strong aroma, slightly savory taste, thick fruit beans, and low acidity. The growth of this coffee occurs at elevations between 1500 to 1900 masl.
Kopi Jawa	Kopi Jawa memiliki ukuran biji yang lebih kecil, dengan kandungan kafein yang rendah, serta rasa dan aroma yang nikmat. Kopi Jawa memiliki karakteristik aroma tipis rempah dengan kekentalan dan keasaman medium dan rasa yang seimbang, dengan ketinggian tanaman 1000-1500 mdpl. Javanese coffee features smaller beans, low caffeine content, and delightful taste and aroma. Javanese coffee is characterized by a thin spice aroma with medium thickness and acidity, offering a balanced taste. The plants grow at elevations between 1000 to 1500 masl.

Jenis Kopi Type of Coffee	Keterangan Description
Kopi Papua	Kopi Papua terkenal memiliki rasa yang seimbang dan lembut, dengan rasa asam dan aroma yang khas bernuansa coklat dan floral yang harum. Kopi ini terletak disepanjang lembah yang mengelilingi Kota Wamena pada ketinggian 1200 - 1600 mdpl yang merupakan tanah vulkanik dengan suhu mencapai 15°C saat malam hari. Papuan coffee is renowned for its balanced and smooth taste, with a unique acidity and aroma reminiscent of chocolate and fragrant floral notes. This coffee is located along the valleys surrounding Wamena City at elevations of 1200 to 1600 masl, on volcanic soil with temperatures dropping to 15°C at night.



Beras

PPI kerap diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk membantu menyerap hasil produksi gabah petani dengan tujuan untuk menstabilkan harga beras petani. PPI juga membranding produk beras yang sebelumnya merupakan komoditi *non-branded*, menjadi produk yang memiliki diferensiasi, eksklusif, dan dengan mengedepankan aspek komersial dan terukur.

Branding memungkinkan produsen beras, melalui PPI, untuk membedakan produk mereka dari para pesaing di pasar. Dengan membangun identitas merek yang unik, produsen dapat menonjolkan aspek kualitas, variasi, asal, atau keberlanjutan dari beras mereka, sehingga menonjol di antara produk sejenis.

PPI juga melakukan pendistribusian beras premium dengan kualitas terbaik yang diolah melalui teknologi khusus untuk menjaga kualitas, kebersihan, dan cita rasa beras. Beras yang didistribusikan memiliki keunggulan

Rice

PPI is often assigned by the Government to help absorb farmers' grain production with the aim of stabilizing farmers' rice prices. PPI also brands rice products that were previously non-branded commodities, into products that are differentiated, exclusive, and by prioritizing commercial and measurable aspects.

Branding allows rice producers, through PPI, to differentiate their products from competitors in the market. By building a unique brand identity, producers can highlight the quality, variety, origin, or sustainability aspects of their rice, thus standing out among similar products.

PPI also distributes premium rice of the highest quality, processed using specialized technology to maintain the rice's quality, cleanliness, and flavor. The rice distributed is free of stones and unhusked grains, contains no



bebas batu dan gabah, tanpa pewangi, pemutih, maupun pengawet, serta menghasilkan nasi yang pulen dan nikmat. Melalui kegiatan pendistribusian tersebut, PPI turut mendukung ketersediaan beras berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

fragrances, bleaching agents, or preservatives, and produces fluffy, delicious cooked rice. Through this distribution initiative, PPI helps ensure the availability of high-quality rice to meet public demand while strengthening the company's role in supporting national food security.



Okemam

Setiap tetes Okemam sabun pencuci piring mengandung ekstrak jeruk nipis yang ampuh untuk membantu menghancurkan kelebihan lemak dan minyak, aroma jeruk nipis yang kuat mampu menghilangkan bau sisa makanan pada peralatan dapur sekalipun wadah *plastic*.

Okemam mengandung jenis bahan aktif surfaktan anionic yang dapat larut dalam air sehingga cepat membersihkan dan menghancurkan lemak. Umumnya surfaktan berfungsi membersihkan karena mempunyai sifat yang dapat melebur dengan zat – zat lainnya sehingga dapat membungkus dan menghilangkan kotoran berminyak.

Jagung

PPI mendorong volume produksi jagung dari petani lokal untuk diolah sebagai pakan ternak yang mampu memberikan peluang besar bagi pertumbuhan komoditas jagung. Jagung dipilih sebagai pakan utama ternak karena kandungan nutrisi yang terdapat didalamnya, 70% karbohidrat, 10% protein dan 5% lemak.

Okemam

Every drop of Okemam dishwashing soap contains powerful lime extract to help destroy excess fat and oil. The strong lime aroma is able to remove the smell of food residue on kitchen utensils, even plastic containers.

Okemam contains anionic surfactant active ingredients that can dissolve in water so that it quickly cleans and destroys fat. Generally, surfactants have a cleaning function because they have the property of being able to mix with other substances so they can wrap and remove oily dirt.

Corn

PPI increases the volume of corn production from local farmers to be processed as animal feed which is able to provide great opportunities for the growth of corn commodities. Corn is chosen as the main feed for livestock because of its nutritional content, 70% carbohydrates, 10% protein and 5% fat.

Rempah-Rempah

PPI memiliki komoditas ekspor andalan: rempah-rempah, bahan botani yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Bahan-bahan serbaguna ini berfungsi sebagai bumbu penting dalam aplikasi kuliner dan menjadi komponen penting dalam pengobatan tradisional, formulasi kecantikan, farmasi, wewangian, produksi sabun, dan berbagai industri lainnya.

Spices

PPI boasts a flagship export commodity: spices, botanical ingredients renowned for their robust aromas and flavors. These versatile ingredients serve as essential seasonings in culinary applications and serve as fundamental components in traditional medicine, beauty formulations, pharmaceuticals, perfumery, soap production, and various other industries.

Pala Nutmeg		Tanaman pala memiliki daun elips yang ramping, buah seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri. Berasal dari: Ternate, Banda, Siau, Manado, dan Halmahera, tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian 500-700 meter, di atas permukaan laut. Nutmeg plant has slender elliptical leaves, fruit like lemon, yellow in color, and has a distinctive aroma because it contains essential oils. It Coming from Ternate, Banda, Siau, Manado, and Halmahera, it grows well in areas that have an altitude of 500-700 meters, above sea level.
Kapulaga Cardamom		Kapulaga disebut sebagai salah satu rempah-rempah termahal di dunia setelah kunyit dan vanila. Berasal dari Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Kapulaga dapat tumbuh pada ketinggian 200- 1000 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh secara optimal dari 300 hingga 500 m di atas permukaan laut. Cardamom is named as one of the most expensive spices in the world after turmeric and vanilla. It grows in West Java and South Sumatra. Cardamom can grow at an altitude of 200-1000 meters above sea level and can grow optimally from 300 to 500 meters above sea level.
Lada Hitam Black Pepper		Lada hitam adalah buah mentah dari tanaman Piper ningrum yang telah dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu masak, lada hitam telah dikonsumsi turun-temurun untuk mengobati gejala gangguan pencernaan maupun kondisi lainnya, termasuk: perut kembung, sakit perut, anoreksia, ulkus peptikum, nyeri perut, kram, diare, sembelit, bronkitis dan kanker. Black pepper is the unripe fruit of the Piper ningrum plant that has been dried. Apart from being used as a cooking spice, black pepper has been consumed for generations to treat symptoms of indigestion and other conditions, including: flatulence, stomach pain, anorexia, peptic ulcer, stomach pain, cramps, diarrhea, constipation, bronchitis and cancer.
Lada Putih White Pepper		Lada putih adalah rempah-rempah bercita rasa pedas dan mempunyai warna putih. Lada putih biasa dijual dalam bentuk butiran mentah atau sudah ditumbuk, yang didapatkan dari tanaman lada atau piper albi linn dan memberikan efek hangat dan pedas ketika dikonsumsi. Lada putih menjadi primadona dalam berbagai masakan dan menjadi item wajib di dapur. White pepper is a spice that has a spicy taste and has a white color. White pepper is usually sold in the form of raw or ground granules, which is obtained from the pepper plant or piper albi linn and gives a warm and spicy effect when consumed. White pepper is excellent in various dishes and is a mandatory ingredient in the kitchen.
Cengkeh Clove		Cengkeh adalah kuncup bunga <i>aromatic</i> dari pohon di keluarga <i>Myrtaceae</i>, <i>Syzygium aromaticum</i>. Mereka adalah asli Kepulauan Maluku (dari Maluku) di Indonesia, dan umumnya digunakan sebagai rempah-rempah. Cengkeh tersedia sepanjang tahun karena musim panen yang berbeda di berbagai negara. Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family of Myrtaceae, <i>Syzygium aromaticum</i>. They are native to the Maluku Islands (from the Maluku) in Indonesia, and are commonly used as a spice. Cloves are available all year round due to different harvest seasons in different countries.

Kelapa dan Turunannya

Kelapa dikenal karena keserbagunaan dan nilai ekonominya, dengan berbagai bagian pohon yang menawarkan sumber daya berharga yang dapat digunakan dalam berbagai industri. Budidaya kelapa tersebar luas di seluruh Indonesia, dengan daerah penghasil utama kelapa termasuk Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Sunda Kecil. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, iklim yang mendukung,

Coconut and Its Derivatives

Coconut palm is renowned for its versatility and economic significance, with various parts of the tree offering valuable resources that can be utilized in numerous industries. Its cultivation is widespread across Indonesia, with major coconut-producing regions including Sumatra, Java, Sulawesi, Bali, and the Lesser Sunda Islands. Indonesia's abundant natural resources, favorable climate, and extensive cultivation areas have



dan area budidaya yang luas telah mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam produksi kelapa dunia, mengukuhkan statusnya sebagai produsen kelapa nomor satu di dunia.

Kelapa yang dihasilkan telah menjadi salah satu komoditas ekspor PPI. Kelapa memiliki beragam diversifikasi produk, antara lain: Arang Kelapa, Minyak Kelapa, Santan, Sabut Kelapa, dan Gula Kelapa.

Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya

Minyak kelapa sawit mentah merupakan salah satu komoditas ekspor PPI. Minyak ini merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia, digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, industri baja, kawat, radio, industri farmasi, dan juga sebagai sumber bahan bakar nabati atau biodiesel.

Kakao

PPI juga mengeksport biji kakao atau biji coklat. Sebelum diekspor, biji coklat harus melalui proses fermentasi dan pengeringan untuk kemudian diolah lebih lanjut.

Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan bubuk kakao (coklat), yang kemudian diolah lagi menjadi kue, es krim, makanan ringan, susu, dan lain-lain.

Indonesia pada tahun 2020, memperoleh predikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Tanaman ini tumbuh dengan baik di bawah matahari tropis Indonesia.

Teh

PPI bergerak di bidang ekspor daun teh. Teh merupakan komoditas ekspor utama di Indonesia dan merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global. Daerah penghasil teh yang terkenal di Indonesia termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Teh menyajikan beragam rasa, warna, aroma, dan jenis, di antaranya adalah:

- Teh Putih: Berasal dari daun teh termuda yang ditemukan di bagian atas tanaman teh, teh putih memiliki kandungan antioksidan tertinggi dibandingkan dengan varietas teh lainnya. Teh ini menawarkan profil rasa yang lembut, segar, dan lembut.
- Teh hitam, yang sangat disukai di kalangan masyarakat Indonesia, juga disebut sebagai teh merah karena warnanya yang terkadang kemerahan. Diproduksi melalui proses oksidasi

propelled it to the forefront of global coconut production, cementing its status as the world's number one producer of coconuts.

The Coconuts produced has become one of PPI's export commodities. Coconut has a variety of product diversification, including: Coconut Charcoal, Coconut Oil, Coconut Milk, Coconut Coir, and Coconut Sugar.

Crude Palm Oil and its Derivatives

Crude palm oil is one of PPI's export commodities. It is one of the most consumed and produced oils in the world, used as raw material for cooking oil, margarine, soap, cosmetics, steel industry, wire, radio, pharmaceutical industry, and also as a source of biofuel or biodiesel.

Cocoa

PPI also exports cocoa beans or cocoa seeds. Before being exported, cocoa beans must undergo a fermentation and drying process before further processing.

Cocoa beans are the primary ingredient in the production of cocoa powder (chocolate), which is then further processed into cakes, ice cream, snacks, milk, and others.

In 2020, Indonesia earned the distinction of being the world's third-largest cocoa producer. This plant thrives well under Indonesia's tropical sun.

Tea

PPI engages in the exportation of tea. Tea stands as a cornerstone export commodity in Indonesia and ranks as the most consumed beverage globally. Notable tea-producing regions in Indonesia include West Java, Central Java, and North Sumatra. Tea presents a diverse array of flavors, colors, aromas, and types, among which are:

- White Tea: Derived from the youngest tea leaves found at the top of the tea plant, white tea boasts the highest antioxidant content compared to other tea varieties. It offers a delicate, fresh, and soft flavor profile.
- Black tea, widely favored among Indonesian citizens, is also referred to as red tea due to its occasional reddish hue. Produced through a high oxidation process, black tea yields a robust flavor

yang tinggi, teh hitam menghasilkan profil rasa yang kuat yang ditandai dengan rasanya yang lebih kuat, tajam, dan sedikit pahit.

- Teh hijau, yang terkenal sebagai minuman klasik Jepang, mudah didapatkan di pasar. Tidak seperti teh hitam, teh hijau hanya mengalami sedikit oksidasi. Dengan kadar kafein yang berada di antara teh hitam dan teh putih, teh hijau menawarkan perpaduan yang seimbang antara rasa ringan dan rasa pahit yang nyata.

profile characterized by its stronger, tangy, and mildly bitter taste.

- Green tea, renowned as a quintessential Japanese beverage, is readily accessible in markets. Unlike black tea, green tea undergoes minimal oxidation. With caffeine levels falling between those of black and white teas, green tea offers a balanced blend of mildness and pronounced bitterness.



Rotan

Posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir produk rotan terbesar berakar kuat pada keanekaragaman hayati yang kaya dan tradisi pemanfaatan rotan yang sudah berlangsung lama. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas yang menjadi rumah bagi beragam spesies rotan, menjadikannya lokasi utama untuk budidaya dan pemanenan rotan.

Industri rotan di Indonesia tidak hanya menjadi kontributor utama bagi perekonomian negara, namun juga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi banyak orang, terutama di daerah pedesaan di mana pemanenan dan pengolahan rotan lazim dilakukan. Dari pengrajin terampil yang membuat mebel rotan yang rumit hingga masyarakat lokal yang terlibat dalam praktik pemanenan rotan yang berkelanjutan, industri ini mendukung berbagai mata pencaharian di seluruh negeri.

Rattan

Indonesia's position as one of the largest exporters of rattan products is deeply rooted in its rich biodiversity and longstanding tradition of rattan utilization. The country boasts vast tropical forests that are home to a diverse array of rattan species, making it a prime location for rattan cultivation and harvesting.

The rattan industry in Indonesia is not only a major contributor to the country's economy but also plays a crucial role in providing employment and income for many people, particularly in rural areas where rattan harvesting and processing are prevalent. From skilled artisans crafting intricate rattan furniture to local communities engaged in sustainable rattan harvesting practices, the industry supports a wide range of livelihoods across the country.



Sektor rotan Indonesia dicirikan oleh kombinasi antara keahlian tradisional dan teknik produksi modern, menghasilkan beragam produk rotan berkualitas tinggi yang memenuhi pasar domestik dan internasional. Furnitur rotan, khususnya, sangat dicari karena daya tahan, estetika alami, dan daya tariknya yang ramah lingkungan.

Selain itu, industri rotan di Indonesia telah mendapat perhatian karena potensinya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan praktik pemanenan yang bertanggung jawab, mempromosikan budidaya rotan di daerah yang terdegradasi, dan mendukung masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya rotan secara berkelanjutan.

PPI sebagai *trader* produk *furniture* dan kerajinan Indonesia melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan material rotan alami dengan berbagai jenis desain kursi dan meja rotan beragam sesuai fungsinya. Industri kerajinan ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan pengrajin yang terampil dan kreatif dalam menyesuaikan permintaan pasar dalam dan luar negeri.

Ikan

Perikanan di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu ekosistem laut yang paling luas dan beragam di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas. Sebagai hasilnya, perikanan dan akuakultur merupakan kontributor yang signifikan terhadap PDB, lapangan kerja, dan gizi Indonesia.

PPI sebagai pengambil alih produk perikanan dari BUMN *Food Holding*, menyediakan produk ikan segar dan ikan beku untuk pasar dalam dan luar negeri.

Rumput Laut

Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati laut berupa spesies rumput laut, juga merupakan negara eksportir terbesar untuk komoditas rumput laut kering.

PPI memiliki komoditas andalan ekspor rumput laut dengan jenis *Seaweed Eucheuma Cottoni* dan *Seaweed Eucheuma Spinosum*. Pemenuhan komoditas ini melalui kerja sama dengan petani lokal rumput laut yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengekspos potensi komoditi Indonesia dalam memenuhi permintaan rumput laut di luar negeri.

Indonesia's rattan sector is characterized by a combination of traditional craftsmanship and modern production techniques, resulting in a diverse range of high-quality rattan products that cater to both domestic and international markets. Rattan furniture, in particular, is highly sought after for its durability, natural aesthetic, and eco-friendly appeal.

Furthermore, the rattan industry in Indonesia has received attention for its potential to promote sustainable development and environmental conservation. Efforts have been made to implement responsible harvesting practices, promote rattan cultivation in degraded areas, and support local communities in managing rattan resources sustainably.

PPI as a trader of Indonesian furniture and handicraft products conducts domestic and foreign trade with natural rattan materials with various types of rattan chair and table designs varying according to function. This handicraft industry is spread throughout Indonesia with skilled and creative craftsmen in adjusting domestic and foreign market demand.

Fish

Fisheries in Indonesia play a crucial role in the country's economy, food security, and livelihoods. Indonesia boasts one of the most extensive and diverse marine ecosystems globally, with over 17,000 islands and vast ocean territories. As a result, fisheries and aquaculture are significant contributors to Indonesia's GDP, employment, and nutrition.

As fishery product offtaker from SOE Food Holding, PPI provides fresh and frozen fish products for domestic and foreign markets.

Seaweed

Indonesia has a source of marine biodiversity in the form of seaweed species, and is also the largest exporter of dried seaweed commodities.

PPI has a mainstay export commodity for seaweed, namely *Seaweed Eucheuma Cottoni* and *Seaweed Eucheuma Spinosum*. Fulfillment of this commodity is through collaboration with local seaweed farmers which aims to encourage national economic growth, exposing the potential of Indonesian commodities in meeting demand for seaweed abroad.

PPI memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) Buduran berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan infrastruktur penunjang aktivitas pengolahan rumput laut yang dimiliki oleh PPI untuk menjamin proses pengemasannya.

PPI has the Buduran Fish Processing Unit (UPI) located in Sidoarjo, East Java, which is the supporting infrastructure for seaweed processing activities owned by PPI to guarantee the packaging process.



Cangkang Kelapa Sawit

Cangkang kelapa sawit adalah salah satu sumber energi biomassa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Komoditas ini merupakan produk ekspor yang memiliki nilai ekonomis dan diminati masyarakat global.

Cangkang kelapa sawit berasal dari limbah pengolahan minyak kelapa sawit yang mencapai 60% dari produksi minyak. Cangkang ini dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat karbon aktif. karbon aktif dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri, antara lain industri minyak, karet, gula dan farmasi.

Warung Pangan

Aplikasi Warung Pangan adalah aplikasi *mobile* yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN, dan dikembangkan oleh PPI yang bekerjasama dengan BUMN *Holding* Pangan, UMKM, serta jaringan *supplier* lainnya. Warung Pangan hadir sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dengan menyediakan *platform digital* yang memfasilitasi mereka dalam menawarkan produk pangan dengan harga bersaing dan kualitas terbaik kepada masyarakat luas.

Palm Oil Shells

Palm oil shells are an environmentally friendly and sustainable biomass energy source. This commodity is an export product that has economic value and is in demand by the global community.

Palm oil shells come from palm oil processing waste which reaches 60% of oil production. This shell is used as an ingredient to make active carbon. Activated carbon can be used by various industries, including the oil, rubber, sugar and pharmaceutical industries.

Warung Pangan

The Warung Pangan Application is a mobile application initiated by the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Ministry of State-Owned Enterprises, and developed by PPI in collaboration with the Food Holding SOE, SMEs, and other supplier networks. Warung Pangan serves as a solution to empower millions of sellers by providing a digital platform that facilitates them in offering food products at competitive prices and the best quality to the wider community.



Fitur terdapat dalam aplikasi Warung Pangan meliputi:

1. WP Asik,
2. WP Fund,
3. WP Entrepreneur ,
4. Mitra Get Mitra,
5. Mitra Prioritas,
6. Bayar Nanti.

Features available in the Warung Pangan application include:

1. WP Asik,
2. WP Fund,
3. WP Entrepreneur,
4. Partner with Get Partner,
5. Priority Partner,
6. Pay Later.

Pengelolaan Limbah terpadu

PPI menyediakan layanan terpadu untuk pengelolaan limbah berbahaya B3 yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah Non-B3.

- **Pengelolaan Limbah B3**
Memberikan solusi terpadu penanganan limbah B3 yang terkoneksi dengan Sistem Manifest Elektronik (FestTronik) KLHK yang menghubungkan antara penghasil limbah, pengangkut limbah, dan pengelola akhir limbah yang termonitor dan terintegrasi langsung dengan sistem KLHK.
- **Pengelolaan Limbah Non B3**
Menjawab tantangan dari limbah Non B3 yang dihasilkan dari limbah industri dan rumah tangga melalui aplikasi *online* lapak limbah (ALITA – Angkutan Limbah Logistik Industri dan Rumah Tangga).

Berikut ini berbagai jenis limbah yang telah dikelola secara terpadu:

1. *Electronic* dan *electric waste* (pembangkit listrik, distribusi listrik, rumah tangga hingga industri).
2. *Fly ash* dan *bottom ash* dari pembangkit listrik atau pabrik pupuk.
3. Daur ulang minyak goreng bekas menjadi Bio Diesel 50.
4. Pengolahan oli bekas dan limbah rumah sakit yang bekerjasama dengan mitra terpercaya.

Waste Integrated Solution

PPI provides integrated hazardous waste management services which include collection, transportation, utilization, and management of Non-Hazardous waste.

- **Hazardous Waste Management**
It provides an integrated solution for handling hazardous waste that is connected to the KLHK Electronic Manifest System (Fest Tronik) connecting waste producers, waste transporters, and final waste managers which is monitored and integrated directly with the KLHK system.
- **Non Hazardous Waste Management**
It responds to the challenges of Non-Hazardous waste generated from industrial and household waste through the online application for waste stalls (ALITA – Transport for Industrial and Household Logistics Waste).

The following are various types of waste that have been managed in an integrated manner:

1. Electronic and electric waste (power generation, electricity distribution, household to industry).
2. Fly ash and bottom ash from power plants or fertilizer factories.
3. Recycling used cooking oil into Bio Diesel 50.
4. Treatment of used oil and hospital waste in collaboration with trusted partners.

Unit Pengantongan Pupuk

Unit Pengantongan Pupuk (UPP) adalah fasilitas atau unit yang dirancang khusus untuk pengemasan pupuk. UPP dilengkapi dengan mesin dan peralatan yang dirancang untuk menangani pupuk dengan aman dan efisien, memastikan pengukuran yang akurat, penyegelan yang tepat, dan pelabelan yang sesuai untuk kantong atau wadah pupuk. UPP memainkan peran penting dalam rantai pasokan pupuk, memastikan bahwa pupuk dikemas dengan tepat untuk didistribusikan ke pengecer atau pengguna akhir, sehingga memfasilitasi pemanfaatan pupuk yang efisien dan efektif di bidang pertanian.

PPI melalui anak perusahaannya, PT BGR Logistik Indonesia, menyediakan Unit Pengantongan Pupuk di beberapa area di Indonesia yang menggunakan *controlling* gudang secara terintegrasi untuk gudang lokal dengan *Warehouse Management System* (WMS) dan *trucking* melalui *Fleet Management System* (FMS).

Fertilizer Packing Unit

The Fertilizer Packing Unit (UPP) is a facility or unit designed specifically for the packaging of fertilizers. It is equipped with machinery and equipment tailored to handle fertilizers safely and efficiently, ensuring accurate measurement, proper sealing, and appropriate labeling of fertilizer bags or containers. The UPP plays a crucial role in the fertilizer supply chain, ensuring that fertilizers are packaged appropriately for distribution to retailers or end-users, thereby facilitating the efficient and effective utilization of fertilizers in agriculture.

PPI, through its subsidiary portfolio, PT BGR Logistik Indonesia, provides Fertilizer Packing Units in several areas in Indonesia that use integrated warehouse control for local warehouses with the Warehouse Management System (WMS) and trucking through the Fleet Management System (FMS).





Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Corporate Vision, Mission, and Cultural Values

Pernyataan Penetapan Visi dan Misi oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2025 telah meninjau dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya PPI yang digunakan sampai dengan saat ini masih selaras dengan potensi dan perkembangan bisnis PPI.

Perubahan terakhir atas Visi & Misi PPI dilakukan pada tahun 2022 dan telah disetujui perubahannya oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.

Statement of Vision and Mission by Key Management

The Board of Commissioners and Board of Directors serving in the fiscal year 2025 have reviewed and approved that PPI's Vision, Mission & Cultural Values used to date are still aligned with PPI's business potential and development.

The last amendment to PPI's Vision & Mission was made in 2022 and the amendment was approved by the Shareholders through Board of Directors Decree No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.



Visi | Vision

Menjadi Perusahaan Perdagangan Nasional Berkelas Dunia yang Terpercaya dan Terkemuka.

To be a Trusted and Leading World Class National Trading Company.

Misi | Mission

1. Melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan internasional.
To conduct general and specialized trading for food and non-food products from upstream to downstream targeting domestic and international markets.
2. Memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan.
Provide quality products, competitive prices, and usefulness to ensure customer satisfaction and establish sustainable partnerships.
3. Merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan.
Designing an integrated ecosystem that serves to support the main business in trading.
4. Membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (data analitik) guna mendukung proses bisnis yang efisien dan inovatif.
Build operational excellence through the utilization of information technology systems (data analytics) to support efficient and innovative business processes.
5. Memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan pembangunan infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif.
Ensure optimal asset utilization and relevant supporting infrastructure development with effective investment.
6. Meningkatkan produktivitas, ketangkasan dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai.
Improve the productivity, agility and quality of human resource performance through the development of employee capabilities and competencies.





Tagline Perusahaan | Corporate Tagline

“Quality Tradelog for Everyone”

Nilai Utama

Core Values

Core Values – Akhlak

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) melakukan perubahan nilai-nilai perusahaan menjadi AKHLAK.

AKHLAK merupakan *Core Values* yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan anak perusahaannya. Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the Circular Letter of the Minister of SOEs Number: SE-7/MBU/07/2020 regarding Guidelines for Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) has changed the Company’s values into AKHLAK.

AKHLAK is the Core Values developed by the Ministry of SOEs in the context of the welfare of the community, with general goals for the benefit of the nation and state, and has specific goals for each SOE and its subsidiaries. The description of these values is as follows:

Amanah | Trustworthy



Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Trustworthy means adhering the trust given, with the expected behavior as follows:

- Fulfilling promises and commitments
- Taking responsibility for tasks, decisions, and actions taken
- Adhering to moral and ethical values

Kompeten | Competent



Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behaviors:

- Improving self-competence to respond to dynamic challenges
- Helping others learn
- Completing tasks of the highest quality.

Harmonis | Harmonious



Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious means caring for each other and respecting differences, with the following expected behaviors:

- Respecting everyone regardless of background
- Helping others
- Building a conducive work environment.



Loyal | Loyal



Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:

- Maintaining the reputation of other employees, leaders, SOEs and the State
- Willing to sacrifice to achieve a bigger goal
- Obeying the leaders as long as it is not against the law and ethics.

Adaptif | Adaptive



Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

Adaptive means continuing to innovate and being enthusiastic in moving or facing change, with the expected behaviors as follows:

- Adapting to be better quickly
- Continuously improving following technological developments
- Acting proactively

Kolaboratif | Collaborative



Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

Collaborative means building a synergistic collaboration with the expected behaviors as follows:

- Providing opportunities for various parties to contribute
- Being open to work together to generate added value
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

Filosofi Perdagangan

Trade Philosophy



1. Komersial | Commercial

Sebagai Perusahaan Terbatas, Perseron melaksanakan kegiatan perdagangan yang keuntungannya diutamakan untuk pertumbuhan usaha dan mewujudkan stabilisasi harga.

As a Limited Liability Company, Perseron conducts trading activities prioritizing profits for business growth and achieving price stabilization.



2. Terukur | Measurable

Setiap kebijakan dan strategi perdagangan PPI dilaksanakan secara terukur termasuk dalam menetapkan *margin* keuntungan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap *stakeholder*.

Every trade policy and strategy implemented by PPI is carried out in a measured manner, including determining profit margins, to ensure benefits for every stakeholder.

Sasaran dan Strategi Perusahaan

Corporate Target and Strategy

Sasaran Perusahaan

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 ditargetkan mencapai total aset sebesar Rp12.513,51 miliar, total liabilitas sebesar Rp1.655,85 miliar dan total ekuitas sebesar Rp10.857,66 miliar;
2. EBITDA sebesar Rp157,8 Miliar;
3. Laporan laba rugi setelah pajak konsolidasi tahun 2025 sebesar Rp10.857,66 miliar;
4. Capaian skor Tingkat Kesehatan Perusahaan mencapai peringkat idBBB dengan *outlook* stabil.

Strategi Perusahaan

1. Restrukturisasi hutang dan keuangan;
2. Inbreng pembentukan *holding*;
3. Eksekusi *merger* PPI - BGR;
4. Kerjasama *sales agent* produk anggota *holding*;
5. Memperluas jaringan distribusi melalui kerja sama dengan UMKM/BUMDES;
6. Akuisisi dan pengembangan aplikasi Warung Pangan;
7. Membangun jaringan perdagangan dan distribusi ke *new market* (*modern, e-commerce* dan ekspor);
8. Pembentukan *Supply Chain* untuk industri FMCG;
9. Optimalisasi penjualan produk non-pangan;
10. Pengembangan jasa *trading* & logistik untuk produk lain (*Waste Integrated Solution*);
11. Optimalisasi marketing dan *sales process*;
12. Konsolidasi & restrukturisasi organisasi;
13. Sentralisasi *support services* (HR, Legal, IT, dsb);
14. Rasionalisasi aset duplikasi PPI & BGR;
15. Digitalisasi SCM *Holding* pangan;
16. Membangun kapabilitas data *analytics* untuk arbitrase *trading*;
17. Optimalisasi pemanfaatan aset & *footprint* distribusi (optimalisasi utilisasi Gudang, *cold storage*);
18. Mendirikan *trading hub* / *rep office*;
19. Integrasi & pengembangan talenta (IFFLI, *corporate culture index*, *talent program* wanita & milenial);
20. Strategi pengelolaan aset;
21. *Research & development*;
22. Pemenuhan aspek SAL.

Company Targets

1. The consolidated financial position report as of December 31, 2025 is targeted to achieve total assets of Rp12,513.51 billion, total liabilities of Rp1,655.85 billion, and total equity of Rp10,857.66 billion.
2. EBITDA of Rp157.8 billion.
3. Consolidated profit and loss statement for the year 2025 amounting to Rp10,857.66 billion.
4. Realization of the Company's Soundness Level reached idBBB rating with Stable outlook.

Company Strategy

1. Debt and financial restructuring;
2. Inbreng establishment of holding;
3. PPI - BGR merger execution;
4. Cooperation with sales agents of cluster members' products;
5. Expanding distribution network through cooperation with MSMEs/BUMDES;
6. Warung Pangan app acquisition and development;
7. Build trade and distribution networks to new markets (*modern, e-commerce* and export);
8. Establishment of Supply Chain for FMCG industry;
9. Optimization of non-food product sales;
10. Development of trading & logistics services for other products (*Waste Integrated Solution*);
11. Optimization of marketing and sales process;
12. Organizational consolidation & restructuring;
13. Centralization of support services (HR, Legal, IT, etc.);
14. Rationalization of PPI & BGR duplicative assets;
15. SCM Holding food digitalization;
16. Building data analytics capabilities for arbitrage trading;
17. Optimization of asset utilization & distribution footprint (optimization of Warehouse utilization, cold storage);
18. Establish trading hub / rep office;
19. Talent integration & development (IFFLI, *corporate culture index*, women & millennial talent program);
20. Asset management strategy;
21. Research & development;
22. Fulfillment of SAL aspects.



5 Prioritas Strategi BUMN

5 SOE Strategic Priorities

PPI mencanangkan rencana Strategis Korporasi yang akan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan sebagai BUMN yang profesional, mandiri, unggul dan berdaya saing, serta berkontribusi maksimal pada internalisasi 5 (lima) Strategi Prioritas BUMN, antara lain:

PPI has outlined a Corporate Strategic Plan that will serve as a guideline in achieving its goals as a professional, independent, superior, and competitive state-owned enterprise, as well as contributing maximally to the internalization of the 5 (five) Strategic Priorities of State-Owned Enterprises, including:

1

Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia

Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

Economic and Social Value for Indonesia

Enhancing economic value and social impact, particularly in the areas of food security, energy, and health.

2

Inovasi Model Bisnis

Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan *stakeholders*, dan fokus pada *core business*.

Business Model Innovation

Restructuring the business model through ecosystem development, cooperation, addressing stakeholders' evolving needs, and focusing on core business.

3

Kepemimpinan Teknologi

Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management*, *advanced management*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain-lain.

Technological Leadership

Global leadership in strategic technology and institutionalizing digital capabilities such as data management, advanced management, big data, artificial intelligence, and others.

4

Peningkatan Investasi

Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

Investment Enhancement

Optimizing asset value and creating a healthy investment ecosystem.

5

Pengembangan Talenta

Menedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

Talent Development

Educating and training the workforce, developing high-quality human resources for Indonesia, professionalizing governance, and implementing HR selection systems.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Company Purpose and Objectives

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar PPI, maksud dan tujuan pendirian PPI adalah melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PPI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PPI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

As stated in article 3 of PPI's Articles of Association, the purpose and objective of establishing PPI is to conduct business in the trade sector in general, as well as to optimize the utilization of PPI's resources to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/ pursue profits in order to increase the value of PPI by implementing the principles of a Limited Liability Company.

Identitas dan Logo Perusahaan

Corporate Identity and Logo



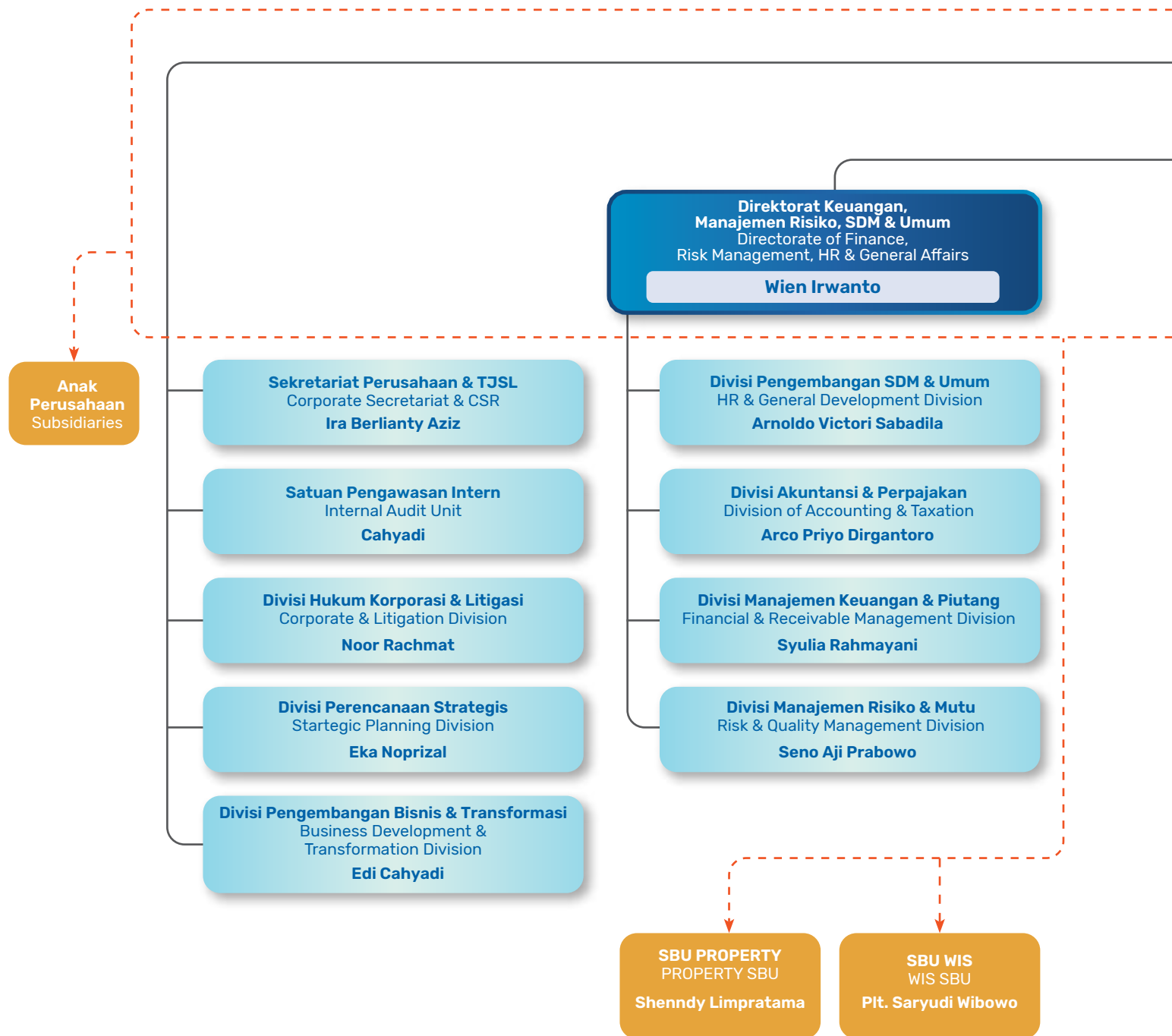


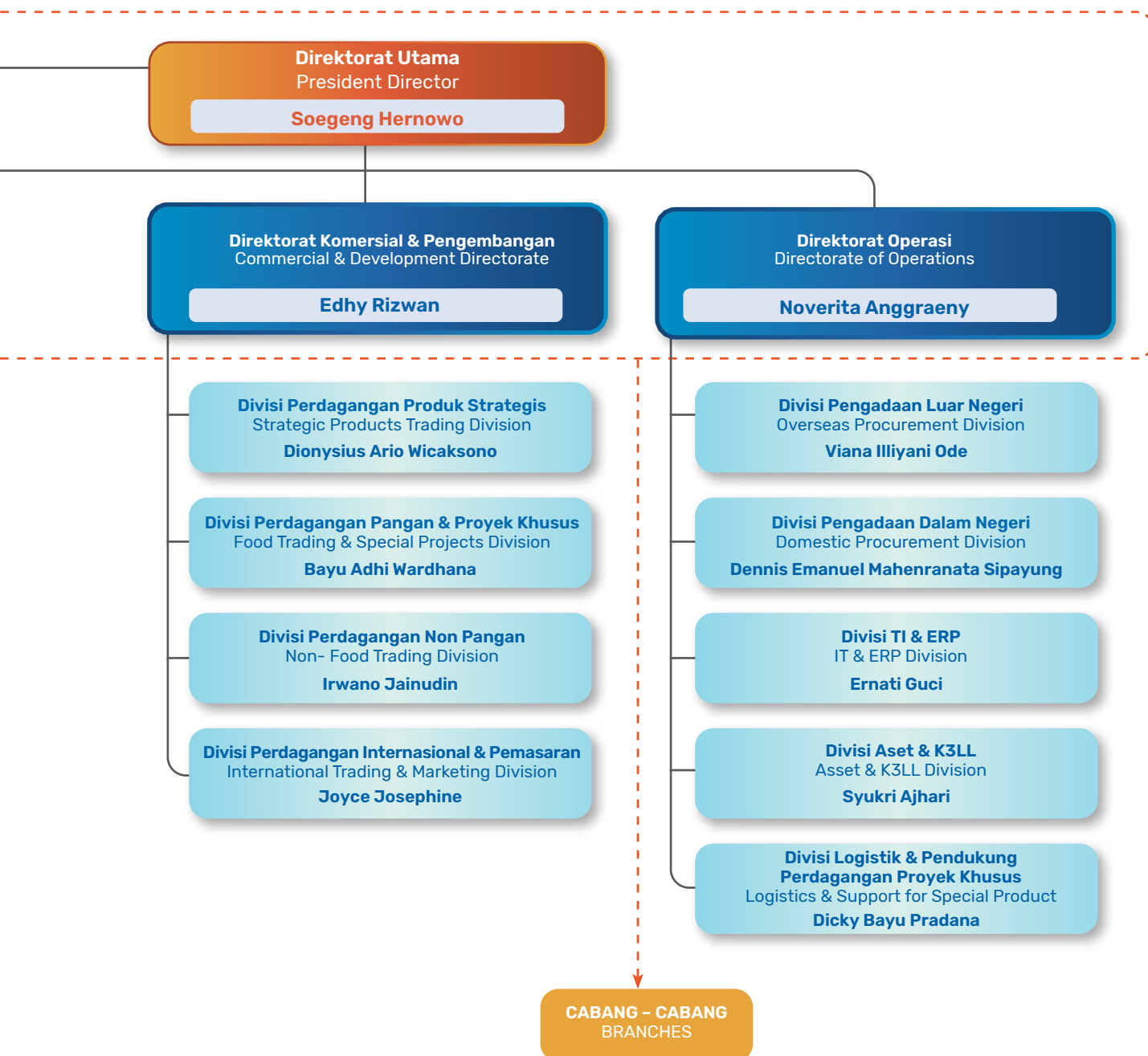
Struktur Organisasi

Organization Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 51/DU/SKD/PPI/XXI/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), susunan organisasi PPI adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 51/DU/SKD/PPI/XXI/2021 concerning Determination of the Organization Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), the organization structure of PPI is as follows:







Manajemen dan Pejabat Perusahaan

Management and Executive Officers

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2025

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners Throughout 2024

1 Januari 2025 – 1 April 2025 January 1, 2025 – April 1, 2025	1 April 2025 – 31 Desember 2025 April 1, 2025 – December 31, 2025	21 Mei 2026 – sekarang May 21, 2026 - Now	Keterangan Remarks
Hamli Komisaris Utama President Commissioner	-	Shahandra Hanitiyo Komisaris Utama President Commissioner	Berdasarkan Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No: 3/SPMB/GC.01.0/RNI.02/27/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, telah diputuskan bahwa masa jabatan Bapak Hamli sebagai Komisaris Utama berakhir efektif pada tanggal 1 April 2025. Bapak Shahandra Hanitiyo diangkat Sebagai Komisaris Utama Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Komisaris Utama Perseroan. Based on the Letter of the Director of Human Resources of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 3/SPMB/GC.01.0/RNI.02/27/III/2025 dated March 27, 2025, it was decided that Mr. Hamli's term of office as President Commissioner would end effectively on April 1, 2025. Mr. Shahandra Hanitiyo was appointed as President Commissioner. Based on the Shareholders' Decree No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 dated May 21, 2026, the shareholders approved the appointment of the Company's President Commissioner.
Setiawan Wangsaatmaja Komisaris Commissioner	Setiawan Wangsaatmaja Komisaris Commissioner	Setiawan Wangsaatmaja Komisaris Commissioner	
Gigih Guntoro Komisaris Independen Independent Commissioner	Gigih Guntoro Komisaris Independen Independent Commissioner	Gigih Guntoro Komisaris Independen Independent Commissioner	



Shahandra Hanitiyo

Komisaris Utama
President Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 50 tahun | 50 years old
Kelahiran Jakarta | Born in Jakarta

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:
21 Mei 2026 s.d. sekarang, periode pertama | May 21, 2026 to present, first term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Diangkat Sebagai Komisaris Utama Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 274 Tahun 2026 dan Nomor: 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Komisaris Utama Perseroan.

Pendidikan

- Magister Sains, Ilmu Komunikasi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (2002)
- Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (1999)

Riwayat Profesi

- Sekretaris Utama, (Eselon I/a-PPT Madya), Badan Karantina Indonesia (2024 – sekarang)
- Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (Eselon II/a-PPT Pratama), Kedeputan I, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2023 – 2024)
- Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2023)
- Kepala Biro Humas dan Umum (Eselon II/a) – PPT Pratama, Sekretariat Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2023)
- Kepala Biro Humas, Sistem Informasi dan Umum (Eselon II/a-PPT Pratama), Sekretariat Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2021 – 2023)
- Koordinator Fungsi Persuratan dan TU Pimpinan/Arsiparis, Ahli Madya, Biro Umum dan PBJ – Setjen KKP (2020 – 2021)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada

Di luar Perusahaan: Sekretaris Utama, Badan Karantina Indonesia.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as President Commissioner. Based on the Shareholders' Decree No. 274 of 2026 and No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 dated May 21, 2026, the shareholders approved the appointment of the Company's President Commissioner.

Education

- Master of Science, Communication Science, Postgraduate Program, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), University of Indonesia (2002)
- Bachelor's Degree, Political Science, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), University of Indonesia (1999)

Professional History

- Main Secretary, (Echelon I/a-PPT Intermediate), Indonesian Quarantine Agency (2024 – present)
- Director of Special Procurement Strategy and Policy Development (Echelon II/a-PPT Pratama), Deputy I, Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) (2023 – 2024)
- Acting Head of Data and Information Center, Main Secretariat, Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) (2023)
- Head of Public Relations and Public Relations Bureau (Echelon II/a) – PPT Pratama, Main Secretariat, Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) (2023)
- Head of Bureau of Public Relations, Information and General Systems (Echelon II/a-PPT Pratama), Main Secretariat, Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) (2021 – 2023)
- Coordinator of Correspondence Functions and TU Leadership/Archive, Middle Expert, General Bureau and PBJ – Secretariat General of KKP (2020 – 2021)

Concurrent Position

Within the Company: none

Outside the Company: Main Secretary, Indonesian Quarantine Agency.

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Hamli

Komisaris Utama
President Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 63 tahun | 63 years old
Kelahiran Sampang, 4 Juli 1962 |
Born in Sampang, July 4, 1962

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:
18 Desember 2023 s.d. 2 April 2025, Periode Pertama | December 18, 2023 to April 2, 2025, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama melalui No. SK-360/MBU/2023 dan Nomor 152/KEP. PS/RNI.01/XII/2023.

Pendidikan

- Sarjana Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987)
- Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999)

Riwayat Profesi

- Kepala Bidang Fisika Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2010)
- Kepala Bagian Operasi - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2010-2014)
- Analis Kebijakan Bidang Penindakan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2014-2015)
- Kepala Bidang Pencegahan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2015-2017)
- Direktur Pencegahan BNPT (2017 - 2020)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada
Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). He was appointed as President Commissioner through Decree No. SK-360/MBU/2023 and No. 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023.

Education

- Bachelor of Engineering, majoring in Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987)
- Master of Economics from University of Indonesia (1999)

Professional History

- Head of Forensic Physics Division, Forensic Laboratory Center, Criminal Investigation Unit of the National Police (2010)
- Head of Operations Section - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2010-2014)
- Policy Analyst for Enforcement - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2014-2015)
- Head of Prevention Section - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2015-2017)
- BNPT Prevention Director (2017 - 2020)

Concurrent Position

Within the Company: none
Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Setiawan Wangsaatmaja

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 61 tahun | 61 years old
Kelahiran Bandung, 26 Agustus 1963
Born in Bandung, August 26, 1963

Domisili | Domicile
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bandung, West Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:

2 Desember 2021 s.d. sekarang, Periode Pertama | December 2, 2021 to present, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pendidikan

- Sarjana Teknik Lingkungan ITB (1989)
- Magister Sanitary Engineering IHE DELFT (1994)
- Magister Environmental Engineering Asian Institute of Technology (1997)
- Doktor Teknik Lingkungan ITB (2004)

Riwayat Profesi

- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2008 -2013)
- Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2013 –2020)
- Sekretaris Daerah - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2020 –2023)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada

Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Education

- Bachelor of Environmental Engineering, ITB (1989)
- Master of Sanitary Engineering, IHE DELFT (1994)
- Master of Environmental Engineering, Asian Institute of Technology (1997)
- Doctor of Environmental Engineering, ITB (2004)

Professional History

- Head of the Regional Environmental Management Agency (BPLHD) - West Java Government (2008 -2013)
- Deputy for Apparatus Human Resources – Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (2013 – 2020)
- Regional Secretary - Regional Government of West Java (2020 – 2023)

Concurrent Position

Within the Company: none

Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Gigih Guntoro

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 49 tahun | 49 years old
Kelahiran Malang, 6 Januari 1976 |
Born in Malang, January 6, 1976

Domisili | Domicile
Depok, Jawa Barat, Indonesia |
Depok, West Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:

18 Oktober 2024 - sekarang, Periode Pertama | October 18, 2024 - to present, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: SK-228/MBU/10/2024 dan Nomor: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pendidikan

- Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (tahun 1995)
- Magister jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia (tahun 2006)

Riwayat Profesi

- Koordinator Riset Provinsi - Dirjen Migas Kementerian ESDM dan PT Koneba (2006 - 2006)
- *Manager Operasional* - PT Aviyo Consulting (2008 - 2012)
- Anggota Tim - BNP2TKI (2012 - 2012)
- Koordinator Tim - *Mapping Sosial Politik Dampak Isu Century Gate* (2013 - 2013)
- Koordinator Tim - Riset Pencitraan Calon Kepala Daerah (2013 - 2013)
- Tenaga Ahli - PT Indonesia Power (2014 - 2015)
- *Manager Operasional* - PT Consolidated Services International Inc. (2017 - sekarang)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada

Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholder of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: SK-228/MBU/10/2024 and Number: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Education

- Bachelor of Industrial Engineering, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (1995)
- Master of Sociology, University of Indonesia (2006)

Professional History

- Provincial Research Coordinator - Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Koneba (2006 - 2006)
- Manager - PT Aviyo Consulting (2008 - 2012)
- Team Member - BNP2TKI (2012 - 2012)
- Team Coordinator - *Socio-Political Mapping of the Impact of the Century Gate Issue* (2013 - 2013)
- Team Coordinator - Regional Head Candidate Image Research (2013 - 2013)
- Expert Staff - PT Indonesia Power (2014 - 2015)
- Operations Manager - PT Consolidated Services International Inc. (2017 - present)

Concurrent Position

Within the Company: none

Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2025

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners Throughout 2025

26 Juni 2023 - 13 Januari 2026 June 26, 2023 – January 13, 2026	13 Januari 2026 – sekarang January 13, 2026 - Present	Keterangan Remarks
Soegeng Hernowo Direktur Utama President Director	Wahyu Sakti Priyonggo Direktur Utama President Director	Bapak Wahyu Sakti Priyonggo diangkat Sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 53 Tahun 2026 dan Nomor: 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 tanggal 13 Januari 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Utama Perseroan. Mr. Wahyu Sakti Priyonggo was appointed as President Director pursuant to Shareholders' Resolution No. 53 of 2026 and No. 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 dated January 13, 2026; the shareholders have approved the appointment of the Company's President Director.
Wien Irwanto Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs	Oksan Omas M. Panggabean Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs	Bapak Oksan Omas M. Panggabean diangkat Sebagai Direktur berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 53 Tahun 2026 dan Nomor: 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 tanggal 13 Januari 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Perseroan. Mr. Oksan Omas M. Panggabean is appointed as Director pursuant to Shareholders' Decree No. 53 of 2026 and No. 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 dated January 13, 2026, the shareholders have approved the appointment of the Company's Director.
Edhy Rizwan Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Edhy Rizwan Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	
Novita Anggraeny Direktur Operasi Director of Operations	Novita Anggraeny Direktur Operasi Director of Operations	



Wahyu Sakti Priyonggo

Direktur Utama
President Director

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 52 tahun | 52 years old
Kelahiran Madiun, 26 Juni 1973 |
Born in Madiun, June 26, 1973

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:

13 Januari 2026 s.d sekarang, periode pertama | January 13, 2026 to present, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Diangkat Sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 53 Tahun 2026 dan Nomor: 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 tanggal 13 Januari 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Utama Perseroan.

Pendidikan

- Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional, Malang (1996).
- Magister Administrasi Publik, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon (2025)

Riwayat Profesi

- Direktur Utama, PT PG Rajawali II (2012 – 2024)
- Direktur Utama, PT Perkebunan Mitra Ogan (2020 – 2021)
- Direktur Utama, PT Lasras Astra Kartika (2016 – 2020)
- Distrik Manager, PT Perkebunan Mitra Ogan (2016)
- Kabag Teknik & Teknologi, PT Perkebunan Mitra Ogan (2014–2015)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada
Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as President Director based on Shareholders' Decree No. 53 of 2026 and No. 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 dated January 13, 2026, the shareholders have approved the appointment of the Company's President Director.

Education

- Bachelor Degree, Industrial Engineering, Institut Teknologi Nasional, Malang (1996).
- Master of Public Administration, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon (2025)

Professional History

- President Director, PT PG Rajawali II (2012 – 2024)
- President Director, PT Perkebunan Mitra Ogan (2020 – 2021)
- President Director, PT Lasras Astra Kartika (2016 – 2020)
- Manager District, PT Perkebunan Mitra Ogan (2016)
- Head of Engineering & Technology, PT Perkebunan Mitra Ogan (2014 – 2015)

Concurrent Position

Within the Company: none
Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Soegeng Hernowo

Direktur Utama

President Director

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 62 tahun | 62 years old
Kelahiran Jakarta, 21 Juli 1964 |
Born in Jakarta, July 21, 1964

Domisili | Domicile
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia |
South Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:
26 Juni 2023 s.d. 13 Januari 2026, Periode Pertama | June 26, 2023 to January 13, 2026, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: SK-169/MBU/06/2023 dan Nomor: 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) (1989)
- Master of Management, PPM School of Management (2003)

Riwayat Profesi

- Kepala Divisi *State Owned Enterprise* (SOE) Bisnis 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2019 – 2020)
- Kepala Divisi Bisnis Menengah dan Non Agri PT BRI Agroniaga, Tbk (2020 - 2021)
- Komisaris Independen PT BRI Asuransi Indonesia (2021 – 2023)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada
Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-169/MBU/06/2023 and No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 dated June 26, 2023. concerning the Dismissal and Appointment of members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Education

- Bachelor of Science in Agricultural and Resource Economics, Faculty of Agriculture, IPB University (1989)
- Master of Management, PPM School of Management (2003)

Professional History

- Head of State Owned Enterprise (SOE) Business Division 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2019 – 2020)
- Head of Medium and Non-Agricultural Business Division, PT BRI Agroniaga, Tbk (2020 - 2021)
- Independent Commissioner of PT BRI Asuransi Indonesia (2021 –2023)

Concurrent Position

Within the Company: none
Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Oksan Omas M. Panggabean

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum
Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 62 tahun | 62 years old

Kelahiran Air Batu, 4 Oktober 1969 |

Born in Air Batu, October 4, 1969

Domisili | Domicile

Jakarta Timur, Indonesia | East Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:

13 Januari 2026 s.d sekarang, periode pertama | January 13, 2026 to present, First term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Diangkat Sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 53 Tahun 2026 dan Nomor: 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026 tanggal 13 Januari 2026., para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Perseroan.

Pendidikan

- Magister Marketing, IPWIJA, Jakarta (2002)
- Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1992)

Riwayat Profesi

- Direktur Keuangan & Pendukung Bisnis, PT Rajawali Nusindo (2023 – 2026)
- Direktur Keuangan & Pendukung Bisnis, PT PG Rajawali II (2021 – 2023)
- Direktur Keuangan, SDM dan Umum, PT PG Rajawali I (2020–2021)
- PLT Direktur Utama, PT Berdikari (2020)
- Direktur Operasional, PT Berdikari (2017 – 2020)
- Direktur, PT Berdikari Meubel Nusantara (2009 – 2017)
- General Manager, PT Berdikari SBU Logistics (2007 – 2009)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada

Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as the Company's Director based on Shareholders' Decree No. 53 of 2026 and No. 06/Kep.PS/RNI.01/I/2026, dated January 13, 2026, the shareholders have approved the appointment of the Company's Director.

Education

- Master of Management in Marketing, IPWIJA, Jakarta (2002)
- Bachelor of Agriculture, IPB University (1992)

Professional History

- Director of Finance & Business Support, PT Rajawali Nusindo (2023 – 2026)
- Director of Finance & Business Support, PT PG Rajawali II (2021 – 2023)
- Director of Finance, HR and General Affairs, PT PG Rajawali I (2020 – 2021)
- Act. President Director, PT Berdikari (2020)
- Director of Operations, PT Berdikari (2017 – 2020)
- Director, PT Berdikari Meubel Nusantara (2009 – 2017)
- General Manager, PT Berdikari SBU Logistics (2007 – 2009)

Concurrent Position

Within the Company: none

Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Wien Irwanto

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum
 Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs

Data Pribadi | Personal Data
 Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
 Usia 52 tahun | 52 years old
 Kelahiran Surabaya, 7 Juni 1972 |
 Born in Surabaya, June 7, 1972

Domisili | Domicile
 Tangerang Selatan, Banten, Indonesia |
 South Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:
 1 Juli 2021 s.d 13 Juli 2026, Periode Pertama | July 1, 2021 to July 13, 2026, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan (1996)
- Magister Ekonomi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2009)

Riwayat Profesi

- Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan II, Kementerian BUMN RI (2016- 2019)
- Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019)
- Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, Kementerian BUMN RI (2019)
- Direktur Komersil PTPN XII (2019-2020)
- Komisaris PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada
 Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/MBU/07/2021 dated July 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Education

- Bachelor of Economics, Faculty of Economics, Universitas Katolik Parahyangan (1996)
- Master of Economics, Department of Islamic Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (2009)

Professional History

- Assistant Deputy for Financial Services, Survey Services & Consultants II, Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia (2016-2019)
- Commissioner of PT Mandiri Sekuritas (2019)
- Assistant Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism I, Ministry of SOEs (2019)
- Commercial Director of PTPN XII (2019-2020)
- Commissioner of PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021)

Concurrent Position

Within the Company: none
 Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Edhy Rizwan

Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial & Development

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 58 tahun | 58 years old

Kelahiran Malang, 23 Maret 1968 |

Born in Malang, March 23, 1968

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia |

Bekasi, West Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:

26 Juni 2023 s.d. sekarang, Periode Pertama | June 26, 2023 to present, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: SK-169/MBU/06/2023 dan Nomor: 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Merdeka (1991)

Riwayat Profesi

- Dewan Komisaris PT Gendis Multi Manis (2017 - 2023)
- Direktur PT Estika Tata Tiara Tbk (2023)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada

Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-169/MBU/06/2023 and No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023, dated June 26, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Education

- Bachelor of Economics majoring in Accounting, Universitas Merdeka (1991)

Professional History

- Commissioner of PT Gendis Multi Manis (2017 - 2023)
- Director of PT Estika Tata Tiara Tbk (2023)

Concurrent Position

Within the Company: none

Outside the Company: none

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Noverita Anggraeny

Direktur Operasi
Director of Operations

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 52 tahun | 52 years old
Kelahiran Jakarta, 28 November 1973 |
Born in Jakarta, November 28, 1973

Domisili | Domicile
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia |
South Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Jabatan | Term of office:

18 Desember 2023 s.d. sekarang, Periode Pertama | December 18, 2023 to present, First Term

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor SK-362/MBU/12/2023 dan Nomor 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pendidikan

- Sarjana Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Trisakti (1998)
- Program Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Gadjah Mada (2000)

Riwayat Profesi

- VP Satuan Tata Kelola Risiko dan Renstra, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2021)
- VP Departemen Manajemen Risiko, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2021 – 2022)
- Kepala Sekretariat Perusahaan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2022 – sekarang)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: tidak ada
Di luar Perusahaan: tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Appointment History and Legal Basis

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number SK-362/MBU/12/2023 and Number 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Education

- Bachelor of Architecture, Faculty of Civil Engineering and Planning, Universitas Trisakti (1998)
- Master of Management Program, Department of Marketing Management, Universitas Gadjah Mada (2000)

Professional History

- VP of Risk Governance and Strategic Planning Unit, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2021)
- VP of Risk Management Department, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2021 – 2022)
- Corporate Secretariat Head, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2022 – present)

Concurrent Position

Within the Company: none
Outside the Company: none

Affiliation Relationship

She has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Pejabat Eksekutif

Executive Officers



No	Nama Name	Jabatan Position
1.	Eka Noprizal	Kepala Divisi Perencanaan Strategis merangkap PLT Kepala Sekretariat Perusahaan & TJSL Head of Strategic Planning Division, concurrently serving as Acting Head of Corporate Secretariat & Corporate Social Responsibility (TJSL)
2.	Cahyadi	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit
3.	Noor Rachmat	Kepala Divisi Hukum Korporasi & Litigasi merangkap Kepala Divisi Aset dan K3LL Head of Corporate Law & Litigation Division, concurrently serving as Head of the Assets and K3LL Division
4.	Edi Cahyadi	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Transformasi Head of Business Development & Transformation Division
5.	Arnoldo Victori Sabadilla	Kepala Divisi Pengembangan SDM & Umum Head of Human Resources Development & General Affairs Division
6.	Seno Aji Prabowo	Kepala Divisi Manajemen Risiko & Mutu Head of Risk Management & Quality Division
7.	Syulia Rahmayani	Kepala Divisi Manajemen Keuangan & Piutang Head of Financial Management & Accounts Receivables Division
8.	Arco Priyo Dirgantoro	Kepala Divisi Akuntansi & Perpajakan Head of Accounting & Taxation Division
9.	Viana Illiyani Ode	Kepala Divisi Pengadaan Luar Negeri Head of Overseas Procurement Division



No	Nama Name	Jabatan Position
10.	Ahmad Sobirin	PLT Kepala Divisi TI & ERP Acting Head of the IT & ERP Division
11.	Dennis Emanuel Mahenranata Sipayung	Kepala Divisi Pengadaan Dalam Negeri Head of Domestic Procurement Division
12.	Dicky Bayu Pradana	Kepala Divisi Logistik & Pendukung Perdagangan Proyek Khusus Head of the Logistics & Special Projects Trade Support Division
13.	Bayu Adhi Wardhana	Kepala Divisi Perdagangan Pangan & Proyek Khusus Head of Food Trading & Special Projects Division
14.	Joyce Josephine	Kepala Divisi Perdagangan Internasional & Pemasaran Head of International Trade & Marketing Division
15.	Agis Setiawan	Kepala Divisi Perdagangan Non Pangan Head of Non-Food Trading Division
16.	Dionysius Ario Wicaksono	Kepala Divisi Perdagangan Produk Strategis Head of Strategic Product Trading Division
17.	Saryudi Wibowo	PJS Kepala SBU WIS Acting Head of WIS SBU
18.	Shenndy Limpratama	Kepala SBU Property Head of Property SBU



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

Kepemilikan saham perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

The ownership of the Company's shares is 99.99% owned by PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia, and 0.0001% are owned by the Republic of Indonesia. These shareholdings have been recorded and are maintained in the Shareholder Register (DPS), which is managed by the Corporate Secretary.

Dengan demikian di dalam Laporan Tahunan 2025 ini PPI tidak menyajikan informasi mengenai:

1. Pemegang saham berdasarkan klasifikasi institusional;
2. Pemegang saham sampai tingkat individu;
3. Pemegang saham pengendali;
4. Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih;
5. Kepemilikan saham oleh Direksi & Dewan Komisaris; dan
6. Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar.

Therefore, in this 2025 Annual Report, PPI does not provide information regarding:

1. Shareholders based on institutional classification;
2. Shareholders down to the individual level;
3. Controlling shareholders;
4. Shareholders with ownership of 5% or more;
5. Share ownership by the Board of Directors & Board of Commissioners; and
6. List of the 20 Largest Shareholders.

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Shares
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	1	1.000.000	Disetor sepenuhnya Fully paid
PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia	1.826.130	1.826.130.000.000	Disetor sepenuhnya Fully paid



Hingga akhir tahun 2025, PPI tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun.

Until the end of 2025, PPI did not issue shares for public ownership and did not trade its shares on any stock exchange.

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Karena status PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) adalah anak BUMN dan bukan perusahaan publik, maka tidak ada informasi mengenai kronologi pencatatan/pergerakan harga saham yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Due to the status of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) as a subsidiary of SOE and not a public company, there is no information regarding the chronology of listing/share price movements that can be disclosed in this Annual Report.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and / or Listing of Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2025, PPI tidak melakukan penerbitan obligasi atau efek lainnya. Oleh karenanya, tidak ada yang dapat disajikan terkait dengan hal tersebut dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

As of December 31, 2025, PPI has not issued any bonds or other securities. Therefore, nothing can be presented related to this matter in this 2025 Annual Report.

Ikhtisar Kebijakan Dividen Perseroan

Overview of the Company's Dividend Policy

Kebijakan dividen Perseroan berpedoman pada peraturan internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pembagian dividen juga mempertimbangkan kinerja keuangan serta strategi perusahaan di masa depan.

The Company's dividend policy refer to internal regulations and prevailing laws and regulations. In addition, the dividend distribution also takes into account the company's financial performance and future strategy.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2025.

The Company did not distribute dividend in the fiscal year 2025.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP / MSOP)

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

As of the end of 2025, the Company did not conduct a share ownership program for employees and/or management (ESOP/MSOP).



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Supporting Institution and Professionals

Hingga tanggal 31 Desember 2025, PPI tidak melakukan penawaran saham umum. Oleh karena itu, PPI tidak memiliki informasi terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang perlu diungkapkan di sini.

As of December 31, 2025, PPI has not conducted any public stock offerings. Therefore, PPI does not have any information regarding Capital Market Supporting Institutions and Professions that needs to be disclosed here.

Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

Hingga tahun 2025, PPI tidak memiliki entitas asosiasi, *joint venture*, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Namun, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak yakni PT PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia dengan kepemilikan saham masing-masing 99,90%.

As of 2025, PPI does not have associate entities, joint ventures and Special Purpose Vehicles (SPV). However, PPI has 2 (two) subsidiaries, namely PT PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia with 99.90% share ownership each.



Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries and Joint Ventures

Entitas Anak Hingga akhir tahun 2025, PPI tercatat memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PT PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Subsidiary Until the end of 2025, PPI has 2 (two) Subsidiaries, namely PT PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia (BLI). The details are as follows:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPI Industri")

Pada mulanya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPI Industri") didirikan dengan nama PT Dharma Niaga Putera Steel berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 18 September 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Samsul Hadi, S.H. Selanjutnya, akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan termasuk di antaranya terkait perubahan nama PT Dharma Niaga Putera Steel menjadi PT PPI Industri sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 06 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Diana Idola Hotmarito, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi.

Initially, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPI Industri") was established under the name PT Dharma Niaga Putera Steel pursuant to Notarial Deed No. 33 dated September 18, 1986, executed before Notary Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., acting as substitute notary for Notary Samsul Hadi, S.H. Subsequently, the deed of incorporation underwent several amendments, including the change of name from PT Dharma Niaga Putera Steel to PT PPI Industri, as set forth in Deed No. 06 dated October 30, 2019, executed before Notary Diana Idola Hotmarito, S.H., M.Kn., a notary in Bekasi.

Berdasarkan akta perubahan terakhir No. 17 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn., di Jakarta, telah disetujui perubahan mengenai alamat domisili perseroan yang semula berada di Banyuasin, Palembang menjadi Jakarta Pusat, Graha PPI, Jl. Abdul Muis No.8. Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor AHU-AH.01.09-0122985 tanggal 31 Mei 2023.

Based on the latest amendment deed No. 17 dated May 25, 2023, executed before Notary Nurhasanah, S.H., M.Kn., in Jakarta, an amendment has been approved regarding the company's registered address, which was previously located in Banyuasin, Palembang, and has been changed to Graha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8, Central Jakarta. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0122985 dated May 31, 2023.

PPI Industri adalah salah satu entitas anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dan Kedistributoran.

PPI Industri is one of the subsidiaries engaged in business activities in the fields of trading and distribution.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri)	
Tahun Pendirian Year of Establishment	1986
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Notaris Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Samsul Hadi, S.H., No.33 tanggal 18 September 1986 Notary Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., substitute Notary of Notary Samsul Hadi, S.H., No. 33 dated September 18, 1986.
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	18 September 1986 September 18, 1986
Domisili Domicile	Jakarta Pusat Central Jakarta
Status Status	Anak Perusahaan Subsidiary
Kegiatan Usaha Business Activities	Perdagangan dan Kedistributoran Trading and Distribution
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,90%
Jumlah Aset Total Assets	Rp59.428.021.698,-
Status Operasional Status of Operation	Beroperasi In operation
Alamat Address	Grha PPI, Jalan Abdul Muis No.8 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Phone : 021-3862141



Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PPI Industri per 31 Desember 2025 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Plt. Direktur Act. Board of Directors
Wien Irwanto	Wien Irwanto

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PPI Industri's Shareholders' Meeting dated December 23, 2025, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Struktur Permodalan PPI Industri

Modal dasar Perseroan adalah Rp4.000.000.000,- terbagi atas 4.000 saham, yang masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,-

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan 25% atau sejumlah 1.000 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,-

PPI Industri Capital Structure

The Company's authorized capital is Rp4,000,000,000, divided into 4,000 shares, each with a par value of Rp1,000,000.

From the total amount of authorized capital, 25% or 1,000 shares have been placed with a total nominal value of Rp1,000,000,000.

Kinerja PPI Industri

Ikhtisar kinerja PPI Industri selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah pendapatan: Rp33,25 miliar
- Laba (Rugi) Usaha: (Rp739,64 juta)
- Laba (Rugi) Bersih: (105,29 juta)

PPI Industri's Performance

The summary of PPI Industry's performance throughout 2025 is as follows:

- Total revenue: Rp33.25 billion
- Operating Profit (Loss): (Rp739.64 million)
- Net Profit (Loss): (105.29 million)

PT BGR Logistik Indonesia ("BLI")

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963. Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H., No.20 tanggal 13 Oktober 2021 entitas menambah kepemilikan di PT TSV dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/OXI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta No 50 tanggal 14 Juli 2022, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Berbagai layanan ditawarkan BLI seperti: *Freight Forwarding, Depo Container, EMKL/*

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (formerly known as PT Trisari Veem) was established pursuant to a notarial deed by Eliza Pondaag, S.H., No. 49, dated November 19, 1963. Pursuant to a notarial deed by Kurnia Ariani, S.H., No. 20 dated October 13, 2021, the entity increased its ownership in PT TSV by purchasing 40% of the shares of PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, consisting of 1,000 shares valued at Rp1,000,000 per share, thereby increasing its ownership in PT Tri Sari Veem to 99.9%. These shares were valued at market price based on a valuation calculation conducted by the Public Appraisal Firm of Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto, and Partners (KJPP AMAR) through Report No.: 00304/2./ 0038-00/BS/06/0819/OXI/20 dated November 30, 2020.

Based on the latest deed of amendment by Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No. 50 dated July 14, 2022, PT Trisari Veem changed its name to PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Various services are offered by BLI such as: Freight Forwarding, Container Depot, EMKL

PPJK, dan *Trucking/ Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Depo Container*, dan ke depan yaitu *shipping line & agency, Logistic Solution, Depo & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

Dalam lima tahun ke depan, BLI diproyeksikan akan menjadi *integrated digital logistics provider* bagi induk usaha/PPI. Saat ini BLI mempunyai dua kantor cabang, yaitu cabang Belawan & cabang Surabaya, 20 Divisi Regional; 2 UPP dan 2 *Depo Yard* yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan tersebut didukung dengan sistem penunjang yang akan bermanfaat kepada para pengguna jasa BLI, seperti:

- *Warehouse Integrated Application (WINA);*
- *Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);*
- *Depot Management and Agency (DENADA).*

/ PPJK, and *Trucking / Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Container Depot*, and in the future, namely *shipping line & agency, Logistic Solution, Depot & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

In the next 5 years, BLI is projected to become an integrated digital logistics provider for the parent company/PPI. Currently, BLI has two branch offices, namely Belawan & Surabaya branches, 20 Regional Divisions; 2 UPPs and 2 Depot Yards spread throughout Indonesia.

The service is supported by a supporting system that will benefit BLI service users, such as:

- *Warehouse Integrated Application (WINA);*
- *Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);*
- *Depot Management and Agency (DENADA).*

PT BGR Logistik Indonesia ("BLI")	
Tahun Pendirian Year of Establishment	1963
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	- Akta Pendirian No. 49 tanggal 19 November 1963 dari Eliza Pondang, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/312/1 tanggal 18 November 1972. - Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1976 tanggal 29 Desember 1976 - Akta Pendirian No. 21, tanggal 11 April 1977, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta dan beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 14 Juli 2022 oleh Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.kn., di Jakarta. - Deed of Incorporation No. 49 dated November 19, 1963, executed by Eliza Pondang, S.H., a notary in Jakarta. The deed of incorporation was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. Y.A.5/312/1 dated November 18, 1972. - Government Regulation No. 26 of 1976 dated December 29, 1976 - Deed of Incorporation No. 21, dated April 11, 1977, executed before Imas Fatimah, S.H., a notary in Jakarta, and amended several times, with the most recent amendment based on Notarial Deed No. 50 dated July 14, 2022, by Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.kn., in Jakarta.
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	19 November 1963 November 19, 1963
Domisili Domicile	Jakarta
Status Status	Anak Perusahaan Subsidiary
Kegiatan Usaha Business Activities	Penyedia Jasa Logistik Logistic Service Provider
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,90%
Jumlah Aset Total Assets	Rp527.153.932.267
Status Operasional Status of Operation	Beroperasi In operation
Alamat Address	Jl. Kalibesar Timur No. 5-7, Jakarta 11110 Telp: (+62) 21 691 6666 (Hunting) Fax : (+62) 21 690 3162 Email : info@bgrlogistik.id Situs Website : www.bgrlogistik.id



Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BGR Logistik Indonesia tanggal 13 Desember 2021 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Komisaris Independen merangkap PLT Komisaris Utama : Bernadetta Raras Indah Rosari Independent Commissioner and Acting President Commissioner: Bernadetta Raras Indah Rosari	- Direktur Utama President Director: Syailendra - Direktur Komersial & Operasi Director of Commercial and Operations: Indra Iliana - Direktur Keuangan, SDM, dan <i>Business Support</i> Director of Finance, Human Resources, and Business Support: Energy

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PT BGR Logistik Indonesia Shareholders' Meeting dated December 13, 2021, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Struktur Permodalan BLI

Pada 2025, modal dasar Perusahaan terbagi atas 2.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham berjumlah Rp2.500.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 13 Oktober 2021 oleh Kurnia Ariyani, S.H., PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk menjual 1.000 lembar saham Entitas kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 23 tanggal 13 Oktober 2021 oleh Kurnia Ariyani, S.H., PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) menjual 1 lembar saham Entitas kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri.

BLI's Capital Structure

In 2025, the Company's authorized capital was divided into 2,500 shares with a par value of Rp1,000,000 per share, totaling Rp2,500,000,000.

Based on the Shareholders' Resolution Statement, notarized by Notarial Deed No. 21 dated October 13, 2021, by Kurnia Ariyani, S.H., PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk sold 1,000 shares of the Entity to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Based on the Shareholders' Resolution Statement, notarized by Notarial Deed No. 23 dated October 13, 2021, by Kurnia Ariyani, S.H., PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sold 1 share of the Entity to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri.

Kinerja BLI

Ikhtisar kinerja BLI selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah pendapatan: Rp986,43 miliar
- Laba (Rugi) Usaha: Rp60,81 miliar
- Laba (Rugi) Bersih: Rp14,42 miliar

BLI's Performance

The summary of BLI's performance throughout 2025 is as follows:

- Total revenue: Rp986.43 billion
- Operating Profit (Loss): Rp60.81 billion
- Net Profit (Loss): Rp14.42 billion

Ventura Bersama

Hingga akhir 2025, PPI tidak memiliki anak usaha dan atau penyertaan saham pada ventura bersama.

Joint Venture

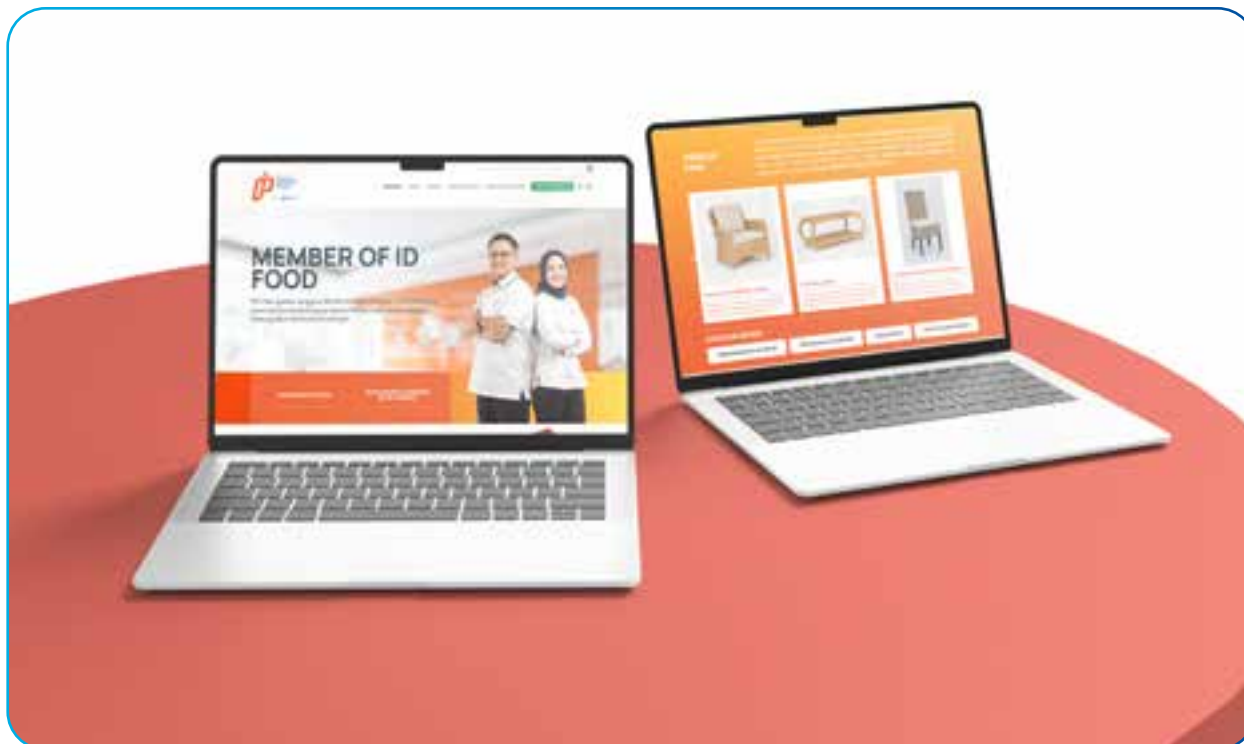
Until the end of 2025, PPI has no subsidiaries and/or equity participation in joint ventures.

Informasi Pada Website Perseroan

Information on the Company's Website

PPI memiliki situs web resmi yang dapat digunakan oleh semua pihak yaitu www.ptppi.co.id.

PPI has an official website that can be accessed by all parties at <https://www.ptppi.co.id>.



Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web ini dioptimalkan penggunaannya sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi mengenai PPI kepada para pemangku kepentingan eksternal.

All information presented on the website is displayed in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. This website is optimized for use as an effective communication medium to convey various information about PPI to external stakeholders.

Pada prinsipnya, pengungkapan seluruh informasi umum perusahaan pada situs web memperhatikan 4 (empat) hal utama yang wajib diungkapkan, antara lain:

1. Informasi Umum Perseroan;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

In principle, the disclosure of all general company information on the website considers 4 (four) main aspects that must be disclosed, including:

1. General Company Information;
2. Information for Shareholders or Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

Pengelola Situs Web

PPI Pengelolaan dan pemutakhiran situs web PPI dilakukan secara profesional sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 13/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pengelolaan *Website* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Direksi menunjuk Sekretaris Perusahaan dan *Senior Manager* Divisi Teknologi Informasi sebagai penanggung jawab

Website Management

PPI manages and updates the PPI website professionally as regulated in the Board of Directors Decree Number: 13/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018, regarding Standard Operating Procedures (SOP) for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Website Management.

Based on this Decree, the Board of Directors appoints the Company Secretary and the Senior Manager of the Information Technology Division as responsible for



atas pengelolaan situs web Perseroan. Perseroan juga membentuk Tim Admin Portal BUMN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/ SKD/PPI/ III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Admin Portal BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

managing the Company's website. The Company also forms the BUMN Portal Admin Team as designated through the Board of Directors Decree Number: 28/DU/ SKD/PPI/III/2017 dated March 16, 2017, regarding the Establishment of the BUMN Portal Admin Team of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pemenuhan Informasi pada Situs Web PPI

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa situs web PPI telah menyajikan informasi sebagai berikut:

Information Fulfillment on PPI Website

In simple terms, it can be concluded that the PPI website has provided information as follows:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu Information on Shareholder to the Individual End Owner	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 5 years)	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website

Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri

List of Industry Association Membership

Nama Asosiasi Association	Status	Lingkup Asosiasi Scope of Association
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce and Industry	Anggota Biasa Regular Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Mechanical and Electrical Technics Enterprises Association	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN) Indonesian Supplier and Distributor Association	Anggota Member	Nasional National



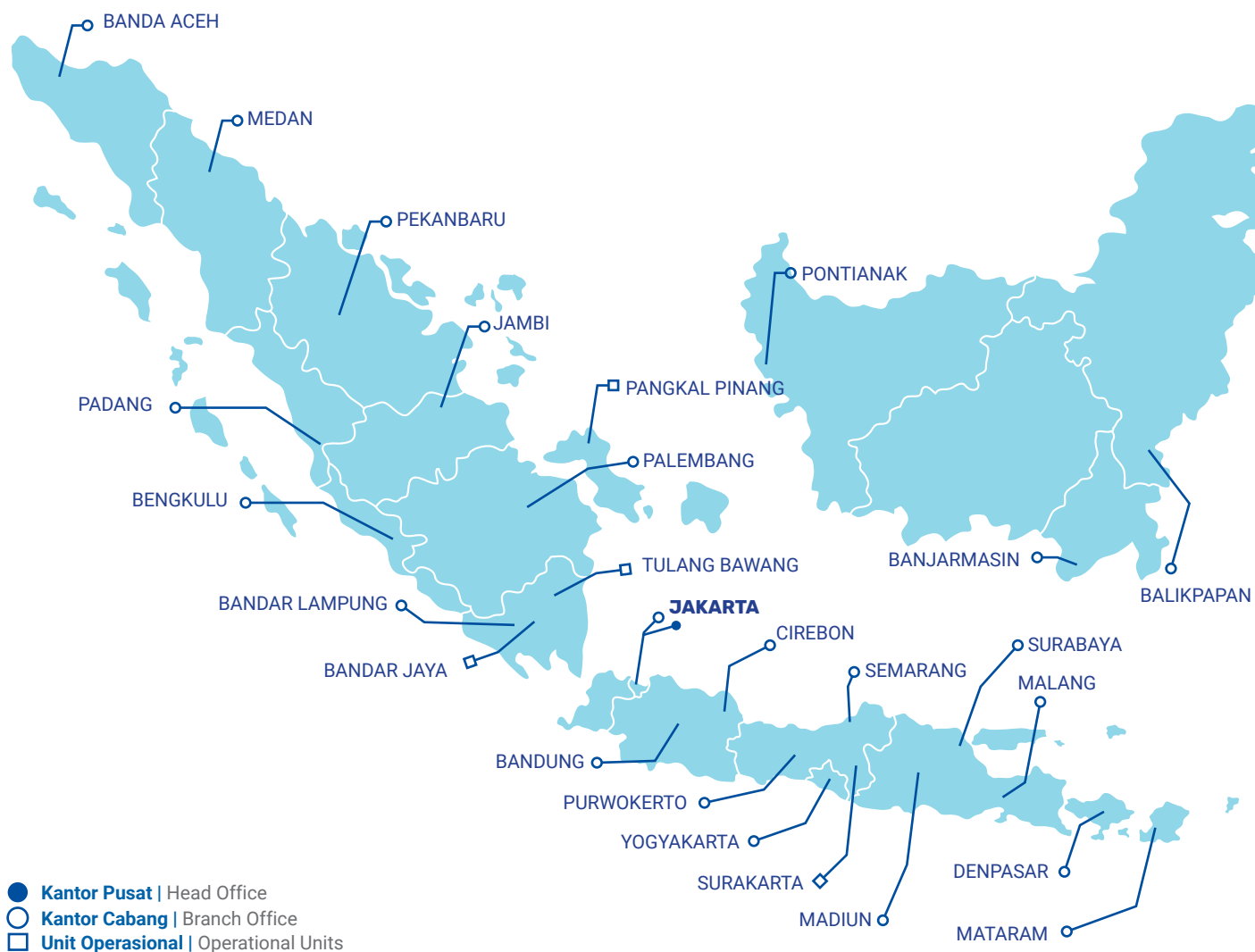


Wilayah Operasional

Operational Area

Kantor cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, membentuk jaringan bisnis yang komprehensif. Terus berkembang, Perseroan semakin memperkuat kantor-kantor cabangnya untuk mendukung operasi perdagangan, meningkatkan layanan, dan memanfaatkan peluang pasar yang sangat besar dalam industri di Indonesia.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) branch offices span across numerous key cities in Indonesia, forming its comprehensive business network. Continuously evolving, the company enhances these branches to bolster trading operations, enhance services, and tap into the immense market opportunities within Indonesia's industries.





29 Cabang dan 5 unit operasional di seluruh Indonesia
29 Branches and 5 operational units throughout Indonesia



2.021 Pelanggan
2.021 Customers



4 Gudang Stock Point
4 Stock Point Warehouses



2 Cafe Covare
2 Covare Cafes





Daftar Alamat Kantor

Office Address List

Kantor Pusat

Head Office



Grha PPI

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
Telp. | Phone: (021) 3862141
Fax.: (021) 3862143

Kantor Cabang

Branch Office

No.	Nama Cabang Branch Name	Alamat Cabang Branch Address
1	AMBON	Jl. Dr. Apituley 21/31, RT 002/RW 001, Waihaong, Nusaniwe, Maluku 97112. Telp. (0911) 344670, Fax.343897
2	BALIKPAPAN	Jl. Gajah Mada No.22, RT 003, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur 76113. Telp. (0542) 410564, 424493, Fax. 422280
3	BANDA ACEH	Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No.181, Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh 23126. Telp. (0651) 22231. 22093. 23080, Fax. 33150
4	BANDAR LAMPUNG	Jl. Jend. Sudirman No.22, RT 007/RW 001, Enggal, Bandar Lampung, Lampung 35118. Telp. (0721) 266555, 266959, Fax. 266702
5	BANDUNG	Jl. Soekarno Hatta No. 493 Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung 40265. Telp. (022) 4203696, 4204024, Fax. 4204027
6	BANJARMASIN	Jl. R. Soeprapto No. 53 RT 001/RW 001, Antasan Besar, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan 70114. Telp. (0511) 3352095, 3354102, Fax.3352442,3354157
7	BENGKULU	Jl. A. Yani No.28, Kebun Keling, Teluk Segara, Bengkulu 38116. Telp. (0736) 21024. Fax.22130
8	CIREBON	Jl. Kebumen No.1, Lemahwungkuk, Cirebon, Jawa Barat 45111. Telp. (0231) 201153, 209765. Fax. 207368
9	DENPASAR	Jl. Hayam Wuruk No.117, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali. 80235. Telp. (0361) 222315, 224104. Fax. 224104
10	GORONTALO	Jl. Cendrawasih No.12, RT 005, Heledulaa Selatan, Kota Timur, Gorontalo 96118. Telp. (0435) 821443, 821042. Fax. 829944
11	JAKARTA	Jl. Malaka No.7-9, RT 007/RW 003, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat 11230. Telp. (021) 6927519, 6928030. Fax. 691162
12	JAMBI	Jl. Serunai Malam II, No.66, RT 001, Suka Karya, Kota Baru, Kota Jambi 36127. Telp. (0741) 43246, Fax. 40269
13	KENDARI	Jl. Jenderal A. Yani, No.218, Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93118. Telp. (0401) 3122425. Fax.3122425
14	KUPANG	Jl. Kakatua No.24, RT 003/RW004, Bonipoi, Kota Lama, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85221. Telp. (0380) 833617. 833294, Fax. 833294
15	MADIUN	Jl. DR Sutomo No.33, RT 023/RW 007, Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur 63116. Telp. (0351) 452057, 454470, Fax. 452057
16	MAKASSAR	Jl. Bali No.9, Pattunuang, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan 90173. Telp. (0411) 3635421. Fax. 3635361
17	MALANG	Jl. Ahmad Yani Utara No.2, RT 001/RW 001, Polowijen, Sukun, Malang, Jawa Timur 65126. Telp. (0341) 485995, Fax. 491864
18	MANADO	Jl. Garuda No.16, Mahakeret Barat, Wenang, Manado, Sulawesi Utara 95111. Telp. (0431) 862066, 862366. Fax. 863221

No.	Nama Cabang Branch Name	Alamat Cabang Branch Address
19	MATARAM	Jl. TGH Saleh Hambali No. 88, Bengkel, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361. Telp/Fax. (0370) 631288
20	MEDAN	Jl. Badur No. 3, Hamdan, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara 20151. Telp. (061) 4530933
21	PADANG	Jl. Jend. Sudirman No. 37, Padang Pasir, Padang Barat, Padang, Sumatera Barat 25215. Telp. (0751) 23491
22	PALEMBANG	Jl. R. E. Martadinata No. 1, Sei Buah, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163. Telp. (0711) 351164, Fax. 312963
23	PALU	Jl. Sungai Wera No. 4, RT 001/ RW 004, Ujuna, Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah 94222. Telp. (0451) 8204242. Fax. 421397
24	PEKANBARU	Jl. Nuri No.19, RT 004/ RW 008, Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, 286124. Telp. (0761) 25105, Fax. 853823
25	PONTIANAK	Jl. Kapten Marsan No. 3, Darat Sekip, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat 78117. Telp. (0561) 732119, Fax. 734254
26	PURWOKERTO	Jl. Jend. Sudirman No.347, RT 004/ RW 007, Kranji, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah 53116. Telp. (0281) 636583
27	SEMARANG	Jl. Merak No. 8, Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174. Telp. (024) 3546161, Fax. 3546161
28	SURABAYA	Jl. Rajawali No.54, RT 007/ RW 015, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60176. Telp. (031) 3520041, Fax. 3520041
29	YOGYAKARTA	Kompleks EMPLS. PT. KAI, Jl. Lempuyangan, RT 037/ RW 007, Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 55212. Telp. (0274) 547533, Fax. 586640

Unit Operasional

Operational Unit

No	Unit Operasional Operational Unit	Alamat Address
1	Pangkal Pinang	Jl. Hamidah, No. 38, Taman Sari, Bangka Belitung 33121, Telp. 0717 – 432557
2	Parepare	Jl. Atletik, No. 50, Kel. Kampung Baru, Kec. Baeukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111, Telp. 0421 – 25205
3	Surakarta	Jl. Letjend. Sutoyo, No. 52, Jawa Tengah 57136, Telp. 0271 – 852323, 852755
4	Bandar Jaya	Jl Proklamator LK No.2, Desa Seputih kaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Lampung, Telp. 0726 -750486
5	Tulang Bawang	Jl. Perintis Unit II, Kel.Tri Tunggal Jaya, Kec.Banjar Agung, Kabupateng Tulang Bawang, Lampung, Telp. 0275- 25725



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS







Tinjauan Perekonomian

Economic Review



Kondisi Perekonomian Tahun 2025

Perekonomian global pada tahun 2025 masih menghadapi dinamika yang penuh tantangan di tengah ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara. Meskipun tekanan inflasi global mulai menunjukkan tren penurunan, pertumbuhan ekonomi dunia tetap berada pada level moderat dan belum sepenuhnya kembali ke rata-rata historis sebelum pandemi.

International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook Update* Januari 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada tahun 2025, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah rata-rata historis global sebesar 3,7%. Sementara itu, pada pembaruan Juli 2025, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,0% seiring meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional dan kebijakan tarif di sejumlah negara besar. Di sisi lain, inflasi global diproyeksikan terus menurun menjadi sekitar 4,2% pada tahun 2025, didukung oleh mulai meredanya tekanan harga energi dan membaiknya rantai pasok global.

Meskipun demikian, kondisi ekonomi global masih dibayangi sejumlah risiko utama, antara lain meningkatnya tensi geopolitik di beberapa kawasan strategis, kebijakan proteksionisme perdagangan, volatilitas pasar keuangan global, serta tingginya suku bunga acuan di negara maju yang berpotensi menekan investasi dan arus modal ke negara berkembang. Selain itu, disrupti rantai pasok dan

Economic Conditions in 2025

The global economy in 2025 will continue to face challenging dynamics amid geopolitical uncertainty, fragmentation of international trade, and adjustments to monetary policies in various countries. Although global inflationary pressures are beginning to show a downward trend, global economic growth remains moderate and has not yet fully returned to its pre-pandemic historical average.

The International Monetary Fund (IMF), in the *World Economic Outlook Update* published in January 2025, projected global economic growth of 3.3% in 2025, relatively stable compared to the previous year but still below the global historical average of 3.7%. Meanwhile, in its July 2025 update, the IMF revised its global growth projection to 3.0% due to increasing uncertainty over international trade and tariff policies in several major economies. Meanwhile, global inflation is projected to continue declining to around 4.2% in 2025, supported by easing energy price pressures and recovering global supply chains.

However, the global economy remains overshadowed by key risks, including rising geopolitical tensions in several strategic regions, trade protectionist policies, global financial market volatility, and high benchmark interest rates in developed countries, which have the potential to depress investment and capital flows to developing countries. Furthermore, supply chain disruptions and

perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama turut mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan.

Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Stabilitas makroekonomi nasional yang terjaga, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, konsumsi domestik yang solid, serta aktivitas investasi yang tetap tumbuh positif menjadi faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7%–5,1%. Aktivitas konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, stabilnya inflasi, serta terjaganya daya beli masyarakat. Di sisi lain, investasi tetap tumbuh positif terutama pada sektor infrastruktur, hilirisasi industri, digitalisasi, dan pengembangan energi berkelanjutan.

Beberapa sektor usaha masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan logistik, informasi dan komunikasi, serta sektor konstruksi dan infrastruktur. Percepatan transformasi digital dan peningkatan kebutuhan terhadap layanan berbasis teknologi juga terus mendorong pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan ketahanan meskipun menghadapi perlambatan permintaan global. Ekspor nasional tetap didukung oleh komoditas unggulan serta penguatan program hilirisasi industri, sementara impor meningkat sejalan dengan pertumbuhan aktivitas industri domestik dan kebutuhan investasi.

Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap terkendali dalam kisaran sasaran pemerintah dan Bank Indonesia. Stabilitas harga pangan, pengendalian energi, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas moneter menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat serta dukungan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan, Indonesia tetap memiliki peluang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

economic slowdowns in several major trading partners are also impacting the overall global economic growth outlook.

Amid these global challenges, the Indonesian economy in 2025 continues to demonstrate considerable resilience. Maintained national macroeconomic stability, supported by adaptive fiscal and monetary policies, solid domestic consumption, and continued positive investment growth are key factors supporting national economic growth.

Indonesia's economic growth in 2025 is projected to be in the range of 4.7%–5.1%. Household consumption remains the primary driver of economic growth, along with increased public mobility, stable inflation, and maintained purchasing power. Meanwhile, investment continues to grow positively, particularly in the infrastructure sector, industrial downstreaming, digitalization, and sustainable energy development.

Several business sectors remain key drivers of national economic growth, including manufacturing, wholesale and retail trade, transportation and logistics, information and communications, and the construction and infrastructure sectors. The acceleration of digital transformation and the increasing demand for technology-based services continue to drive the information and communications sector, making it one of the fastest-growing sectors.

Externally, Indonesia's trade performance remains resilient despite slowing global demand. National exports remain supported by leading commodities and the strengthening of industrial downstreaming programs, while imports increase in line with growth in domestic industrial activity and investment needs.

Meanwhile, Indonesia's inflation rate throughout 2025 remains controlled within the target range of the government and Bank Indonesia. Stable food prices, energy management, and policy coordination between the government and monetary authorities are important factors in maintaining national economic stability and supporting sustainable economic growth.

With relatively strong economic fundamentals and the support of government policies oriented toward stability and sustainable growth, Indonesia still has the opportunity to maintain economic growth momentum amid ongoing global economic uncertainty.



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

PPI memiliki portofolio bisnis yang terdiversifikasi mencakup perdagangan non-bahan pokok, perdagangan bahan pokok, produk strategis, produk ekspor, pengembangan bisnis baru, hingga pengelolaan anak perusahaan. Diversifikasi tersebut memberikan peluang pertumbuhan yang luas, namun di sisi lain juga menyebabkan Perseroan memiliki eksposur terhadap dinamika kondisi makroekonomi global maupun domestik yang mempengaruhi masing-masing lini usaha secara berbeda.

Sepanjang tahun 2025, kondisi ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta penyesuaian kebijakan suku bunga global yang masih berlangsung di sejumlah negara maju. Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap perdagangan internasional, harga komoditas global, serta stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk melalui pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta penguatan daya tahan sektor keuangan dalam menghadapi volatilitas pasar global.

Di tengah kondisi tersebut, beberapa lini bisnis Perseroan menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga komoditas global, pelemahan nilai tukar, peningkatan biaya logistik, serta penyesuaian kebijakan perdagangan internasional. Penurunan harga beberapa komoditas strategis seperti minyak mentah, *crude palm oil* (CPO), dan logam dasar turut memberikan tekanan terhadap aktivitas perdagangan dan *margin* usaha pada beberapa segmen bisnis Perseroan.

Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang dilakukan untuk mengendalikan *imported inflation* juga berdampak pada aktivitas perdagangan produk tertentu, khususnya pada lini usaha bahan kimia dan bahan berbahaya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku maupun perdagangan internasional.

Beberapa produk unggulan Perseroan yang terdampak kondisi tersebut antara lain:

- Kenaikan harga gas dunia dan volatilitas harga energi global turut memengaruhi harga pupuk internasional serta ketersediaan bahan baku produksi pupuk. Kondisi ini berdampak pada peningkatan harga produk dan penyesuaian rantai pasok pada sektor perdagangan pupuk dan bahan kimia.

PPI has a diversified business portfolio including non-basic material trading, basic material trading, strategic products, export products, new business development, and subsidiary management. This diversification provides broad growth opportunities, but on the other hand it also causes the Company to have exposure to the dynamics of global and domestic macroeconomic conditions which affect each business line differently.

Throughout 2025, global economic conditions will still be characterized by uncertainty due to slowing world economic growth, high geopolitical tensions, volatility in commodity prices, and ongoing adjustments to global interest rate policies in a number of developed countries. This condition also affects international trade, global commodity prices, as well as financial market stability and exchange rates in various developing countries, including Indonesia. Domestically, the Government and Bank Indonesia continue to strengthen the fiscal and monetary policy mix to maintain national economic stability, including through controlling inflation, stabilizing the Rupiah exchange rate, and strengthening the resilience of the financial sector in facing global market volatility.

Amidst of these conditions, several of the Company's business lines are facing challenges due to fluctuations in global commodity prices, weakening exchange rates, increasing logistics costs, and adjustments to international trade policies. The decline in prices of several strategic commodities such as crude oil, crude palm oil (CPO), and base metals also put pressure on trading activities and business margins in several of the Company's business segments.

In addition, the Rupiah exchange rate stabilization policy implemented to control imported inflation also has an impact on certain product trade activities, especially in the chemical and hazardous materials business lines which have a high dependence on imported raw materials and international trade.

Some of the Company's featured products that are affected by these conditions are including:

- The increase in world gas prices and volatility in global energy prices also affect international fertilizer prices and the availability of raw materials for fertilizer production. This condition has an impact on increasing product prices and adjusting supply chains in the fertilizer and chemicals trading sector.

- b. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing serta peningkatan biaya logistik global memberikan tekanan terhadap daya saing harga produk ekspor. Di sisi lain, perlambatan permintaan di pasar internasional turut berdampak pada realisasi potensi ekspor pada beberapa komoditas perdagangan Perseroan.

Selain faktor makroekonomi, beberapa komoditas unggulan Perseroan juga dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan regulasi pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait. Aktivitas impor produk bahan kimia, misalnya, masih bergantung pada penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan serta kebijakan tata niaga impor lainnya yang dapat memengaruhi kelancaran pasokan dan aktivitas perdagangan Perseroan.

Hal tersebut turut menjadi hal yang berpengaruh kepada pencapaian Perseroan dimana sampai dengan Desember tahun 2025, transaksi penjualan bahan kimia dengan kuantum besar baru dapat dilakukan penjualan dengan stok dari impor tahun lalu. Di sisi lain ada proses pengadaan bahan kimia yang juga memakan waktu sehingga membuka celah masuknya penjualan bahan kimia ilegal ex-China di pasaran.

Dengan kondisi tersebut, PPI sampai dengan Desember tahun 2025 berhasil mencatat penjualan sebesar Rp6,95 triliun atau 193% dari target RKAP s.d. Desember tahun 2025, dan meningkat sebesar 124% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari aspek detail komoditi pada kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa komoditi yang mencatat pertumbuhan kinerja penjualan dibandingkan Tahun 2024, yaitu komoditi Pupuk Subsidi, Pestisida Dharmabrand, Pestisida Non Dharmabrand, Produk dan Alat Pertanian, Farmasi dan Alat Kesehatan, Bahan Bangunan, Produk Pangan dan Bahan Pokok, Produk Konsumsi, Produk Pangan dan Hortikultura, Ekspor, dan Anak Perusahaan. Di sisi lain komoditi Penjualan Pupuk Non Subsidi, Bahan Kimia Non B2, CPP, Non Pangan, dan Property dan WIS mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024.

Berdasarkan kontribusi omzet, pareto penjualan untuk tahun 2025, yaitu dikontribusikan oleh Perdagangan Non Bahan Pokok (11%), Perdagangan Bahan Pokok (3%), Produk Strategis (72%), Produk Ekspor (1%), Transisi Bisnis (0,3%), Anak Perusahaan (14%).

- b. The weakening of the Rupiah exchange rate against foreign currencies and increasing global logistics costs put pressure on the price competitiveness of export products. On the other hand, slowing demand in the international market also had an impact on the realization of export potential for several of the Company's trade commodities.

Aside from macroeconomic factors, several of the Company's superior commodities are also influenced by the dynamics of government policies and regulations and related stakeholders. Chemical product import activities, for example, still depend on the issuance of an Import Approval Letter (SPI) from the Ministry of Trade as well as other import trade policies which can affect the smooth supply and trading activities of the Company.

This also has an impact on the Company's achievements, where until December 2025, sales transactions for chemicals with large quantities can only be made using stock from imports from last year. On the other hand, there is the process of procuring chemicals which also takes time, thus opening a gap for the sale of illegal ex-Chinese chemicals on the market.

Under these conditions, up to December 2025, PPI managed to record sales of Rp6.95 trillion or 193% of the RKAP to 2025 target. December 2025, and an increase of 124% compared to the same period last year.

Based on the detailed aspect of commodities in performance in 2025, there are several commodities that recorded growth in sales performance compared to 2024, namely subsidized fertilizers, Dharmabrand pesticides, non-Dharmabrand pesticides, agricultural products and equipment, pharmaceuticals and health equipment, building materials, food products and staples, consumer products, food and horticultural products, exports and subsidiaries. On the other hand, sales of non-subsidized fertilizers, non-B2 chemicals, CPP, non-food, and property and WIS have decreased compared to 2024.

Based on turnover contribution, sales pareto for 2025, namely contributed by Non-Basic Materials Trade (11%), Basic Materials Trade (3%), Strategic Products (72%), Export Products (1%), Business Transition (0.3%), Subsidiaries (14%).



Pendapatan per Segmen Usaha

Revenue by Business Segment

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Komoditi/Lini Bisnis Commodity/Line of Business	2025			2024		
	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%
Perdagangan Non Bahan Pokok Non-Staple Trade	731,82	48,35	6,6%	651,12	39,2	6,02%
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	495,00	19,80	4,0%	414,75	14,7	3,5%
Pupuk Non Subsidi Non-subsidized Fertilizer	48,26	2,68	5,6%	69,75	4,5	6,4%
Pestisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	32,59	10,02	30,8%	31,51	9,0	28,7%
Pestisida Non-Dharmabrand Non-Dharmabrand Pesticides	3,89	0,33	8,4%	3,25	0,2	7,5%
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Products and Equipment	1,60	0,08	4,9%	0,54	0,0	4,5%
Farmasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	124,33	14,32	11,5%	58,40	6,5	11,1%
Bahan Kimia Non B2 Non Hazardous Chemicals	2,45	0,12	4,9%	50,82	3,4	6,7%
Bahan Bangunan Building Materials	23,68	1,01	4,2%	22,10	0,9	4,0%
Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	186,22	11,73	6,3%	344,88	17,7	5,14%
Produk Pangan dan Bahan Pokok Food and Staple Products	80,16	4,17	5,2%	70,40	2,8	3,9%
Produk Konsumsi Consumer Products	106,07	7,57	7,1%	92,37	4,7	5,0%
CPP*	0,00	0,00	0,0%	182,10	10,3	5,7%
Produk Strategis Strategic Products	5.000,00	253,71	5,1%	1.145,51	93,2	8,13%
Produk Pangan dan Hortikultura Food and Horticultural Products	4.863,06	225,69	4,6%	824,72	23,1	2,8%
Non Pangan Non-Food	136,95	28,03	20,5%	320,79	70,1	21,8%
Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	58,24	1,76	3,0%	22,14	1,0	4,3%
Ekspor Export	58,24	1,76	3,0%	22,14	1,0	4,3%
Transisi Bisnis Business Transition	22,91	21,60	94,3%	25,69	22,4	87,2%
Property	21,23	21,23	100,0%	22,18	22,2	100,0%
WIS	1,68	0,37	21,9%	3,51	0,2	6,6%
Anak Perusahaan Subsidiaries	951,13	144,91	15,2%	910,06	169,5	18,62%
TOTAL	6.950,33	482,1	6,9%	3.099,40	342,9	11,1%

*) CPP di Perdagangan Bahan Pokok merupakan pendapatan dari pelaksanaan proyek *stunting*/
CPP in Staple Trade is a revenue generated from the implementation of *stunting* projects

Berikut uraian kinerja masing-masing segmen usaha Perseroan:

A. PERDAGANGAN BAHAN POKOK

Pada tahun 2025, segmen Perdagangan Bahan Pokok berhasil mencatatkan pendapatan Rp186,2 miliar. Hal ini menurun apabila dibandingkan kinerja tahun 2024 yakni mencapai Rp344,9 miliar. Dari penjualan tersebut, Perseroan berhasil menorehkan laba kotor Rp11,73 miliar rupiah, atau 6,3% dari pendapatan.

Sampai dengan Desember 2025, kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari produk perdagangan bahan pokok adalah Produk Konsumsi dengan kontribusi pendapatan 7,1% untuk laba kotor.

Apabila dibandingkan targetnya pada periode yang sama, maka realisasi penjualan Perdagangan Bahan Pokok tercapai 53% dari targetnya. Sementara jika dibandingkan dengan Desember 2024, pencapaian pendapatan sebesar 54%.

Untuk lebih detail, faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian dari tiap komoditi tersebut adalah:

1. Produk Pangan dan Bahan Pokok

Produk ini terdapat produk Pangan dan Bahan Pokok dengan pendapatan sebesar Rp80,16 miliar. Salah satu penyumbang pendapatan dari kelompok produk pangan dan bahan pokok adalah dari penjualan Beras SPHP. Perusahaan mengharapkan adanya kenaikan pendapatan karena telah diterbitkan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, yang memberikan tambahan insentif faktor pengali kemasan jika produsen menjual ke BUMN Pangan.

2. Produk Konsumsi

Produk konsumsi terdiri dari produk Unilever dan Daesang merupakan produk yang memiliki omset sebesar Rp80,06 miliar. Pendapatan dari Unilever cenderung stagnan berkaitan dengan isu pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, selain itu juga terdapat masalah modal kerja untuk pengadaan unilever. PPI juga membuka peluang kedistributoran Daesang yang telah *golive* pada Juni 2024 dengan wilayah kedistributoran pada Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Rencana Kedepan akan dilakukan penambahan wilayah kedistributoran wilayah Jakarta Barat, wilayah Jawa Timur dan di wilayah Pontianak.

The following is a description of the performance of each of the Company's business segments:

A. STAPLE TRADING

In 2025, Staple Trading segment managed to book revenue of Rp186.2 billion. This decreases when compared to the performance in 2024, which reached Rp344.9 billion. From these sales, the Company managed to book gross profit of Rp11.73 billion, or 6.3% of revenue.

Until December 2025, the largest contributor to revenue and gross profit from staple trading products is Consumer Products with a revenue contribution of 7.1% to gross profit.

When compared to the target in the same period, the realization of Basic Materials Trading sales was achieved 53% of the target. Meanwhile, when compared with December 2024, revenue achievement was 54%.

For more detail, the biggest factors that influence the achievement of each commodity are:

1. Food Products and Staples

This product includes food and staple products with revenues of Rp80.16 billion. One contributor to income from the food and staple products group is the sale of SPHP Rice. The company expects an increase in revenue because Minister of Trade Regulation Number 18 of 2024 has been issued regarding packaged palm cooking oil and governance of community cooking oil, which provides additional packaging multiplier factor incentives if producers sell to state-owned food companies.

2. Consumer Products

Consumer products consist of Unilever and Daesang products, which have a turnover of Rp80.06 billion. Unilever's income tends to stagnate due to the issue of boycotting products affiliated with Israel, besides that there are also working capital problems for Unilever procurement. PPI also opens opportunities for Daesang distribution which will go live in June 2024 with distribution areas in Central Jakarta, North Jakarta and South Jakarta. Future plans will include additional distribution areas in West Jakarta region, East Java region and the Pontianak region.



3. Penugasan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

CPP berbentuk seperti penugasan *stunting* di Tahun 2024, pada Tahun 2025 perusahaan tidak mendapatkannya lagi.

3. Assignment of Government Food Reserves (CPP)

CPP was implemented in form of *stunting* assignment in 2024, where the Company is no longer acquired such assignment in 2025.

B. PERDAGANGAN NON-BAHAN POKOK

Pada tahun 2025 segmen Perdagangan Non Bahan Pokok berhasil mencatatkan pendapatan Rp731,82 miliar. Hal ini meningkat apabila dibandingkan kinerja tahun 2024 yakni mencapai Rp651,12 miliar. Dari penjualan tersebut, Perseroan berhasil menorehkan laba kotor Rp48,35 miliar rupiah, atau 6,6% dari pendapatan.

Sampai dengan Desember 2025, kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari perdagangan non bahan pokok adalah pupuk subsidi yang secara pencapaian pendapatan sebesar 68% dan kontribusi laba kotor 41% dari total laba kotor produk non bahan pokok.

Secara total dari perdagangan non bahan pokok, realisasi pendapatan periode berjalan sebesar 117% dan laba kotor 122% dari target pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 *Audited*, pencapaian pendapatan meningkat sebesar 12% dan laba kotor meningkat sebesar 24%.

Untuk lebih detail, faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian dari tiap komoditi tersebut adalah:

1. Pupuk Subsidi

Pupuk subsidi mencapai sebesar 235% dari target Tahun 2025, hal ini dikarenakan adanya pengalihan alokasi penyaluran PT SHS kepada PT PPI. Saat ini PPI menjaga hubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi.

2. Pupuk Non-Subsidi

Secara umum, pendapatan pupuk non-subsidi mencapai 45% dari target RKAP periode berjalan yang disebabkan antara lain:

- Rencana pendistribusian Pupuk NPK Mutiara terdampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga Pupuk NPK Mutiara 16-16-16 merangkak naik dan pasokan barang terganggu dikarenakan pupuk tersebut adalah produk Impor dari Rusia sehingga rencana tersebut tidak terlaksana sementara untuk NPK Petro Nitrat milik PIHC juga memiliki harga yang tinggi di pasar;
- Fluktuasi harga pupuk non subsidi mengakibatkan penurunan daya beli;
- Perubahan status kedistributoran *retail* dengan kategori *basic* yang diterapkan oleh

B. NON-STAPLE TRADING

In 2025, the Non-Staples Trading segment managed to record revenue of Rp731.82 billion. The achievement is increasing compared to the performance in 2024, which reached Rp651.12 billion. From these sales, the Company succeeded in making a gross profit of Rp48.35 billion, or 6.6% of revenue.

As of December 2025, the largest contributor to revenue and gross profit from trade in non-staple commodities is subsidized fertilizer, which in terms of revenue reaches 68% and gross profit contributes 41% of the total gross profit of non-staple products.

In total, from non-staple commodity trading, realized revenue for the current period was 117% and gross profit was 122% of the target for the same period. When compared with 2024 *Audited*, revenue achievement increased by 12% and gross profit increased by 24%.

For more detail, the biggest factors that influence the achievement of each commodity are:

1. Subsidized Fertilizer

Subsidized fertilizer reached 235% of the 2025 target, this was due to the transfer of distribution allocation from PT SHS to PT PPI. Currently, PPI maintains relationships with customers to maintain the distribution of subsidized fertilizer according to allocation.

2. Non-Subsidized Fertilizer

In general, non-subsidized fertilizer income reached 45% of the RKAP target for the current period due to, among other things:

- The plan to distribute Mutiara NPK Fertilizer was affected by the war between Russia and Ukraine which caused the price of Mutiara 16-16-16 NPK Fertilizer to increase and the supply of goods was disrupted because the fertilizer was an imported product from Russia so the plan was not implemented while PIHC's NPK Petro Nitrate also had a high price in the market;
- Fluctuations in non-subsidized fertilizer prices result in a decrease in purchasing power;
- The change in retail distribution status to the basic category implemented by PIHC results

PIHC mengakibatkan keterbatasan varian/ jenis pupuk non subsidi yang dapat ditebus/ dibeli langsung dari Produsen/Pabrik oleh Perusahaan;

- Kebijakan terkait komitmen *cashflow* kegiatan *trading* dengan *Holding IDFOOD*;
- Komoditi pupuk non-subsidi cukup terpengaruh kondisi makro ekonomi global dan geopolitik yang menyebabkan tingginya harga bahan baku pupuk yang mayoritas masih impor. Namun, tingginya harga tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan harga jual hasil pertanian;
- Pemenuhan kelengkapan varian produk hasil produksi PIHC telah teratasi walaupun berdampak pada penurunan *margin* keuntungan dikarenakan perbedaan harga pengadaan/ pembelian tidak langsung dari Produsen/Pabrik melainkan dari distributor premium;
- Bahan baku yang dimiliki PIHC saat ini diprioritaskan untuk produksi pupuk subsidi sehingga hasil produksi SP-26, Nitrallite, dan NPK Phonska Plus sangat terbatas dan menyebabkan kelangkaan stok pada gudang penyangga dan peningkatan harga.

3. Dharmabrand

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan komoditi sampai dengan Desember 2025 antara lain:

- Adanya penurunan harga komoditi di pasar yang berbanding terbalik dengan kenaikan harga bahan aktif pestisida Dharmabrand;
- Masuknya produk baru pada komoditi pestisida dengan formulasi yang sama dengan harga yang lebih kompetitif;
- Kegiatan promosi, optimalisasi rantai pasok, penataan pola perdagangan, dan *product knowledge* kepada *salesman* belum secara optimal dilakukan;
- Pembentukan kedistributoran R1 belum optimal dikarenakan kurangnya stock serta kurangnya promosi baik ke pengguna akhir ataupun insentif kepada distributor;
- Penjualan Dharmabrand melalui e-katalog belum dapat dilakukan dikarenakan belum memenuhi TKDN;
Belum optimalnya pembentukan strata harga, sehingga ketika ekonomi mengalami kontraksi dan kompetitor menerapkan harga yang lebih murah, harga produk Dharmabrand menjadi tidak kompetitif di pasaran;

in limited variants/types of non-subsidized fertilizer that can be redeemed/purchased directly from the Producer/Factory by the Company;

- Policies regarding cash flow commitments for trading activities with IDFOOD Holding;
- Non-subsidized fertilizer commodities are quite affected by global macroeconomic and geopolitical conditions which cause high prices for fertilizer raw materials, the majority of which are still imported. However, these high prices are not offset by an increase in the selling price of agricultural products;
- Fulfillment of complete product variants produced by PIHC has been resolved even though it has an impact on reducing profit margins due to differences in procurement/ purchase prices not directly from producers/ factories but from premium distributors;
- The raw materials owned by PIHC are currently prioritized for the production of subsidized fertilizer so that the production output of SP-26, Nitrallite and NPK Phonska Plus is very limited and this has caused stock shortages in buffer warehouses and increased prices.

3. Dharmabrand

The factors that influence commodity sales performance as of December 2025 are including:

- There is a decrease in commodity prices in the market which is inversely proportional to the increase in the price of the active ingredient for the Dharmabrand pesticide;
- Entry of new products into pesticide commodities with the same formulation at more competitive prices;
- Promotional activities, optimizing the supply chain, structuring trade patterns and product knowledge for salesmen have not been carried out optimally;
- The establishment of an R1 distributorship is not yet optimal due to lack of stock and lack of promotion either to end users or incentives to distributors;
- Sales of Dharmabrand via e-catalog cannot yet be carried out because it does not meet the TKDN;
The formation of price strata is not yet optimal, so that when the economy experiences contraction and competitors apply lower prices, Dharmabrand product prices become uncompetitive in the market;



- Keterbatasan program dan tenaga pemasaran *Spot Worker* pada Cabang Cirebon, Surabaya dan Makassar.

4. Farmasi & Alat Kesehatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan komoditi pada Tahun 2025 *audited* adalah *selective customer* produk farmasi untuk menjaga *cash flow*. Tempo pembayaran pelanggan komoditi farmasi dan alat kesehatan sedang mengupayakan memperpendek (*term of payment* ±30-60 hari).

Untuk komoditi farmasi dan alat kesehatan, upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan *customer* yang telah terseleksi dan *engagement* dengan *vendor* farmasi melalui kepastian pembayaran.

5. Produk Non Pangan Lainnya

Perubahan Peraturan Pemerintah terkait perolehan Surat Permohonan Impor (SPI) maupun ketentuan distribusi sangat mempengaruhi kinerja penjualan produk Kimia Non Berbahaya. Usulan pengajuan alokasi SPI Bahan Kimia Non B2 berdasarkan surat minat dari calon *buyer*/pembeli dan percepatan proses perolehan SPI melalui koordinasi dengan para *stakeholder* terkait.

- Limited Spot Worker program and marketing personnel in the Cirebon, Surabaya and Makassar Branches.

4. Pharmaceuticals & Medical Devices

The factors that influence audited commodity sales performance in 2025 are selective customers for pharmaceutical products to maintain cash flow. The payment period for customers for pharmaceutical commodities and medical devices is being shortened (*term of payment* ± 30-60 days).

For pharmaceutical commodities and medical devices, efforts have been made to retain selected customers and engage with pharmaceutical vendors through payment certainty.

5. Other Non-Food Products

Changes in Government Regulations regarding the acquisition of Import Application Letters (SPI) and distribution provisions greatly affect the sales performance of Non-Hazardous Chemical products. Proposed submission of SPI allocation for Non-B2 Chemicals based on letters of interest from prospective buyers/purchasers and accelerating the process of obtaining SPI through coordination with relevant stakeholders.

C. PRODUK STRATEGIS

Pada tahun 2025, segmen Produk Strategis berhasil mencatatkan pendapatan Rp5.000,0 miliar. Hal ini merupakan peningkatan signifikan apabila dibandingkan kinerja tahun 2024 yakni mencapai Rp1.145,5 miliar. Dari penjualan tersebut, Perseroan berhasil menorehkan laba kotor Rp253,71 miliar rupiah, atau 5,1% dari pendapatan.

Sampai dengan bulan Desember 2025, kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari produk strategis adalah dari Produk Pangan dan Hortikultura yaitu kontribusi pendapatan sebesar 97% dan laba kotor sebesar 89%.

Apabila dibandingkan targetnya, maka realisasi Produk Strategis Tahun 2025 *audited* mengalami peningkatan signifikan sebesar 367% dari targetnya. Sementara jika dibandingkan Tahun 2024 *Audited*, pencapaian mengalami peningkatan pendapatan sebesar 437%.

Faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian Produk Strategis adalah:

1. Bahan Kimia

Produk bahan kimia merupakan salah satu produk inti yang memiliki kontribusi besar di PPI,

C. STRATEGIC PRODUCTS

In 2025, the Strategic Products segment will successfully record revenue of Rp5,000.0 billion. This is a significant increase compared to the performance in 2024, which reached Rp1,145.5 billion. From these sales, the Company succeeded in making a gross profit of Rp253.71 billion rupiah, or 5.1% of revenue.

As of December 2025, the largest contributor to revenue and gross profit from strategic products is from Food and Horticulture Products, namely a revenue contribution of 97% and gross profit of 89%.

If compared to the target, the realization of the audited Strategic Products in 2025 experienced a significant increase of 367% from the target. Meanwhile, when compared to 2024 *Audited*, the achievement has increased in income by 437%.

The most significant factors that influence the achievement of Strategic Products are as follows:

1. Chemicals

Chemical products are one of the core products that have a large contribution to the PPI, but

namun cukup terpengaruh dari waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) mengingat karakteristiknya yang merupakan produk teregulasi. Selain itu, kondisi makroekonomi dan geopolitik global juga memiliki pengaruh pada ketersediaan dan harga mengingat produk tersebut didapatkan melalui impor.

2. Produk Impor Hortikultura

Pada produk pangan dan hortikultura terdapat realisasi penjualan beras khusus impor senilai Rp4,86 triliun yang terdiri dari penjualan daging ruminansia (daging kerbau sejumlah 43.288 MT dan daging sapi sejumlah 30.176 MT) dan penyaluran 2025 atas stok daging kerbau tahun 2024 sebanyak 1.344 MT dengan total pendapatan daging Ruminansia senilai Rp4,66 triliun serta dari penjualan Bawang Bombay sejumlah 20.666 MT dengan pendapatan senilai Rp191,15 miliar.

are quite affected by the time the Import Approval Letter (SPI) is issued considering their characteristics as regulated products. Apart from that, global macroeconomic and geopolitical conditions also have an influence on availability and prices considering that these products are obtained through imports.

2. Imported Horticultural Products

In the food and horticulture sector, sales of specially imported rice totaled Rp4.86 trillion, consisting of sales of ruminant meat (43,288 MT of buffalo meat and 30. 176 metric tons) and the 2025 distribution of 1,344 metric tons of buffalo meat from the 2024 stockpile, resulting in total revenue from ruminant meat of Rp4.66 trillion, as well as from the sale of 20,666 metric tons of onions, generating revenue of Rp191.15 billion.

D. EKSPOR

Realisasi ekspor per 31 Desember 2025 mencapai Rp58,24 miliar dengan penjualan ekspor Gum Damar sebanyak 46 MT, Damar Batu sebanyak 224 Ton ke India, dan penjualan Kopi sebanyak 884 MT ke Mesir, serta penjualan Kemenyan sebanyak 18 MT ke Sudan.

Pencapaian ekspor ini mencatat peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 163%. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja, sebagai berikut:

- Belum ditemukan *buyer* dan *supplier* yang memenuhi kriteria serta bersedia menggunakan skema *back-to-back payment terms*;
- Sulitnya mencari *vendor* yang *reliable* untuk produk rumput laut, sehingga transaksi ekspor rumput laut masih belum dapat direalisasikan pada pencapaian Tahun 2025;
- Sinergi klaster pangan dengan PT Perindo dalam melakukan ekspor ikan, masih belum terlaksana;
- Selain itu, bisnis ekspor juga terdampak oleh faktor makro ekonomi dan geopolitik global, diantaranya:
 - Ketidakpastian nilai kurs yang sangat fluktuatif akibat perang, yang meningkatkan risiko kerugian kurs;
 - Perang di wilayah Timur Tengah yang berdampak langsung pada pasar ekspor PPI, menyebabkan kenaikan biaya logistik dan keterlambatan pengiriman akibat penutupan beberapa jalur laut;
 - Penundaan transaksi ekspor ke negara-negara potensial karena perusahaan asuransi enggan menjamin alur transaksi di wilayah konflik.

D. EXPORT

Realized exports as of December 31, 2025 reached Rp58.24 billion with export sales of 46 MT of Gum Damar, 224 Tons of Stone Damar to India, and Coffee sales of 884 MT to Egypt, and Incense sales of 18 MT to Sudan.

This export achievement recorded a significant increase compared to the realization in 2024 of 163%. The things that affect performance are as follows:

- We have not found buyers and suppliers who meet the criteria and are willing to use the back-to-back payment terms scheme;
- It is difficult to find reliable vendors for seaweed products, so seaweed export transactions cannot yet be realized by 2025;
- Food cluster synergy with PT Perindo in exporting fish has not yet been implemented;
- Apart from that, the export business is also affected by global macroeconomic and geopolitical factors, including:
 - Highly fluctuating exchange rate uncertainty due to war, which increases the risk of exchange rate losses;
 - The war in the Middle East region which had a direct impact on PPI's export market, caused an increase in logistics costs and shipping delays due to the closure of several sea routes;
 - Delays in export transactions to potential countries because insurance companies are reluctant to guarantee transaction flows in conflict areas.



Terhadap hal-hal tersebut, saat ini Perseroan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Menjalin kerja sama dengan mitra dagang atau *agregator* yang bersedia menggunakan skema *back-to-back payment terms*, serta membuka opsi skema pembayaran alternatif yang tetap aman dan fleksibel;
- Mencari dan membina *vendor* rumput laut yang *reliable*, menjalin kemitraan dengan koperasi/pelaku usaha lokal, serta menyusun standar mutu untuk menjamin kualitas ekspor;
- Terdapat potensi transaksi kayu akasia dan *furniture* rotan namun masih terkendala proses pembuatan SVLK atas nama PT PPI;
- Melakukan perhitungan nilai jual dengan menggunakan kurs aman guna memitigasi terhadap fluktuasi nilai kurs guna mengurangi risiko kerugian transaksi;
- Menganalisis dan mengalihkan sebagian target ekspor ke negara dengan kondisi geopolitik dan logistik yang lebih stabil serta menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi internasional yang memiliki skema khusus untuk wilayah konflik atau berisiko tinggi;
- Memperluas promosi produk ekspor melalui platform digital dan partisipasi aktif dalam pameran dagang internasional;
- Butuh peran dari *holding* agar terjadi sinergi penjualan yang saling menguntungkan antar anggota IDFOOD;
- Pengembangan produk ekspor lainnya melalui penguatan *engagement* dengan UMKM.

E. TRANSISI BISNIS

1) SBU Properti

Perubahan regulasi terkait peruntukan penggunaan bangunan di wilayah-wilayah strategis yang diterbitkan Pemerintah Wilayah setempat, sehingga mengharuskan penyesuaian terhadap pencarian mitra dengan peruntukan yang sesuai (*layout* berbeda dengan peruntukan sebelumnya).

Progress Komersialisasi aset tetap pada Tahun 2025 audited senilai Rp21,23 miliar atau sebanyak 183 titik aset. SBU *Property* juga mengelola salah satu bisnis unit PT PPI berupa pengelolaan SPBU yang berada di Kampung Bandan Jakarta Utara dan Cafe Covare yang berada di Grha PPI dan Waskita Rajawali Tower. Kinerja SPBU saat ini sudah ditutup dari Tahun 2023 sampai dengan saat ini tidak dapat melakukan kegiatan pengelolaan SPBU dikarenakan adanya piutang atas aset yg disewa oleh ex PT BGR sehingga pendistribusian BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga

To solve these situations, the following steps have been taken:

- Collaborating with trading partners or aggregators who are willing to use back-to-back payment terms, as well as opening alternative payment scheme options that remain safe and flexible;
- Search for and develop reliable seaweed vendors, establish partnerships with local cooperatives/business actors, and develop quality standards to guarantee export quality;
- There is potential for transactions in acacia wood and rattan furniture but there are still obstacles in the process of making SVLK in the name of PT PPI;
- Calculate the selling value using a safe exchange rate to mitigate exchange rate fluctuations to reduce the risk of transaction losses;
- Analyze and divert some export targets to countries with more stable geopolitical and logistical conditions and collaborate with international insurance companies that have special schemes for conflict or high-risk areas;
- Expand promotion of export products through digital platforms and active participation in international trade fairs;
- Needs the role of the holding company to create mutually beneficial sales synergy between IDFOOD members;
- Developing other export products through strengthening engagement with MSMEs.

E. BUSINESS TRANSITION

1) Property SBU

Changes in regulations regarding the designation of building use in strategic areas issued by the local regional government, requiring adjustments to the search for partners with appropriate designations (different layouts from previous designations).

Progress of Commercialization of fixed assets in 2025 audited achieved Rp21.23 billion or 183 asset points. SBU *Property* also manages one of PT PPI's business units in the form of managing gas stations in Kampung Bandan, North Jakarta and Cafe Covare in Grha PPI and Waskita Rajawali Tower. The current performance of the gas station has been closed from 2023 until now, it cannot carry out gas station management activities due to receivables from assets leased by former PT BGR so that the distribution of fuel by PT Pertamina Patra Niaga cannot be carried

tidak dapat dilakukan dan belum adanya bahan bakar subsidi seperti solar, dan pertalite, hal ini dikarenakan adanya persyaratan dari Pertamina terkait izin usaha KBLI dan administrasi lain untuk perdagangan kecil sebagai operator SPBU (Dalam PP No 29 Tahun 2021 bahwa KBLI Perdagangan Besar tidak dapat digabungkan dengan Perdagangan Eceran).

2) SBU WIS

Sampai dengan Desember 2025, realisasi SBU WIS senilai Rp1,69 Miliar atau sebesar 12% dibandingkan RKAP Tahun 2025 dan apa bila dibandingkan Tahun 2024 *audited* sebesar 48%. Kondisi ini dipengaruhi oleh :

- Jaringan pasokan *scrap* yang masih belum optimal yang menyebabkan stabilitas volume pasokan dan peluang bisnis.
- Keterbatasan SDM untuk kegiatan administrasi yang berpengaruh pada proses penawaran, kontrak, dan penagihan.
- Keterbatasan *supply chain* dan kegiatan administrasi untuk operasional penjualan.
- Belum optimalnya penjualan minyak jelantah yang diakibatkan oleh penurunan harga beli minyak jelantah yang berpengaruh pada *margin* dan biaya operasional.

F. KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2025, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak usaha yakni, PT PPI Industri (dahulu PT Dharma Niaga Putera Steel) dan PT BGR Logistik Indonesia (dahulu PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPII") sebelumnya dikenal sebagai PT Dharma Niaga Putera Steel didirikan berdasarkan akta notaris Syamsul Hadi, S.H., No. 33 tanggal 18 September 1986. Kegiatan utama PPII termasuk manufaktur dan perdagangan dalam rangka menunjang operasional bisnis entitas induk.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) ("BGRLI") didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963. Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 tanggal 13 Oktober 2021, kegiatan utama PT BGR Logistik Indonesia termasuk jasa logistik dan sewa gudang.

out and there is no subsidized fuel such as diesel and Pertalite, this is due to the requirements from Pertamina regarding KBLI business permits and other administration for small trade as a gas station operator (In PP No. 29 of 2021 that KBLI Large Trade cannot combined with Retail Trade).

2) WIS SBU

Until December 2025, the realization of SBU WIS achieved Rp1.69 billion or 12% compared to the 2025 RKAP and when compared to 2024 audited it was 48%. Such conditions were influenced by:

- The scrap supply network is still not optimal which causes stability in supply volume and business opportunities.
- Limited human resources for administrative activities that affect the bidding, contract and billing processes.
- Limited supply chain and administration activities for sales operations.
- Sales of used cooking oil have not been optimal due to a decrease in the purchasing price of used cooking oil which has an impact on margins and operational costs.

F. PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES

As of December 31, 2025, PPI has 2 (two) subsidiary entities, namely, PT PPI Industri (formerly PT Dharma Niaga Putera Steel) and PT BGR Logistik Indonesia (formerly PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

PT Perusahaan Dagang Indonesia Industri ("PPII") previously known as PT Dharma Niaga Putera Steel was established based on a notarial deed of Syamsul Hadi, S.H., No. 33 dated September 18, 1986. PPII's main activities include manufacturing and trading in order to support the parent entity's business operations.

PT BGR Logistics Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia (formerly known as PT Trisari Veem) ("BGRLI") was established based on the notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No.49 dated November 19, 1963. Based on the latest deed of amendment by Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 dated October 13, 2021, the main activities of PT BGR Logistik Indonesia include logistics services and warehouse rental.



Kinerja Entitas Anak

Subsidiary Performance

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Uraian Description	2025	2024	2023	YOY 2025 - 2024	
				Nominal Amount	%
Pendapatan Revenues					
PT BGR Logistik Indonesia	986.433	901.734	763.406	84.699	9,39%
PT PPI Industri	33.252	44.847	40.792	(11.595)	-25,85%
Total	1.019.685	945.581	804.198	74.104	7,84%
Laba Kotor Gross Profits					
PT BGR Logistik Indonesia	172.010	145.019	147.911	26.991	18,61%
PT PPI Industri	1.887	2.641	1.934	(754)	-0,002%
Total	173.897	147.660	149.845	26.237	17,77%

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Tinjauan keuangan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, mencerminkan posisi keuangan konsolidasian Grup per 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following financial review refers to the Financial Statements for the years ended on December 31, 2025 and 2024. The Financial Report has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners.

The auditor provides an opinion that the Company's consolidated financial statements have been presented fairly in all material respects, reflecting the Group's consolidated financial position as of December 31, 2025, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

ANALISIS POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION ANALYSIS



Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan PPI. Di tahun 2025, Jumlah Aset PPI mencapai Rp12,22 triliun. Sedangkan Liabilitas Perseroan mencapai Rp1,59 triliun dan Ekuitas mencapai Rp10,64 triliun.

The Financial Position provides briefs explanation on PPI's assets and capital growth. In 2025, PPI's Total Assets achieved Rp12.22 trillion. Meanwhile, the Company's Liabilities reached Rp1.59 trillion and Equity amounted Rp10.64 trillion.



Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Positions

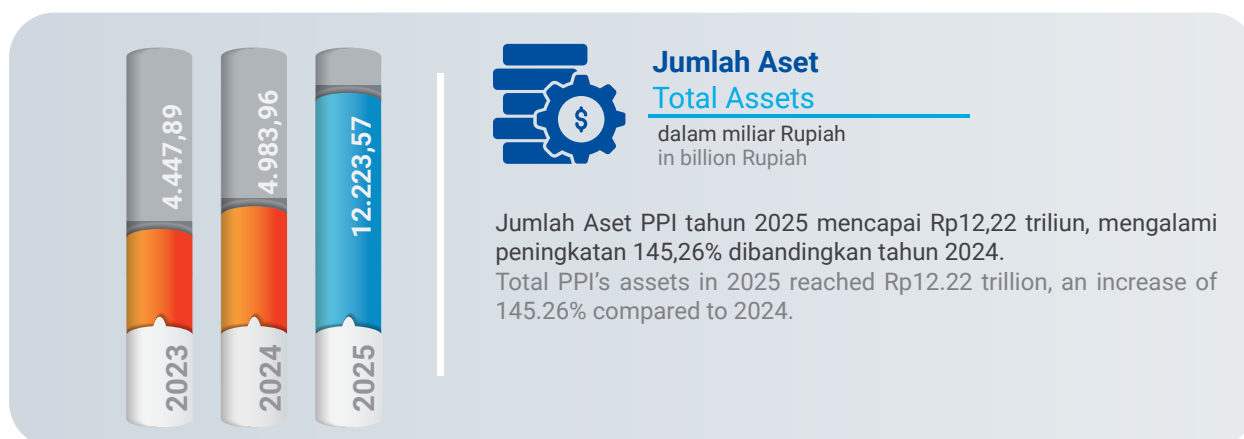
Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Posisi Keuangan Financial Position	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	1.479,30	1.204,86	670,81	274,44	22,78%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	10.774,27	3.779,10	3.777,08	6.995,18	185,10%
Jumlah Aset Total Assets	12.223,57	4.983,96	4.447,89	7.239,62	145,26%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.436,75	1.247,56	784,44	189,19	15,16%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	150,69	136,88	952,15	13,81	10,09%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.587,43	1.384,44	1.736,59	203,00	14,66%
Ekuitas Equity	10.857,57	3.599,48	2.711,29	7.258,09	201,64%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	12.223,57	4.983,96	4.447,89	7.239,52	145,26%

*) Disajikan kembali/As restated

ASET

ASSETS



Total Aset 2023-2025 (Rp-miliar)

Total Assets 2023-2025 (Rp-billion)

Aset Assets	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Aset Lancar Current Assets	1.479,30	1.204,86	670,81	274,44	22,78%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	10.774,27	3.779,10	3.777,08	6.965,18	185,10%



Aset Assets	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Jumlah Aset Total Assets	12.223,57	4.983,96	4.447,89	7.239,52	145,26%

*) Disajikan kembali/As restated

Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Dibandingkan tahun 2024, Total Aset Lancar tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 22,78%, sedangkan Total Aset Tidak Lancar tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 186,10%, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Asset performance is influenced by Current Assets and Non-Current Assets. Compared to 2024, Total Current Assets in 2025 experienced an increase of 22.78%, while Total Non-Current Assets in 2025 experienced an increase of 186.10%, as explained below.

Aset Lancar

Current Assets

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Aset Lancar Current Assets	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	189,62	146,20	62,71	43,42	29,70%
Piutang usaha Trade receivables					
Pihak Berelasi Related Parties	154,25	126,60	92,42	27,65	21,84%
Pihak Ketiga Third Parties	442,37	559,36	192,25	(116,99)	-20,92%
Piutang Lain-lain Other Receivables	25,65	31,90	1,95	(6,25)	-19,60%
Persediaan Inventories	38,14	64,92	113,34	(26,77)	-41,24%
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual Non-current assets held for sale	-	59,26	-	(59,26)	-100,00%
Uang muka Advances	482,09	148,20	120,96	333,88	225,28%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	46,55	34,72	57,71	11,82	34,04%
Biaya dibayar di muka Prepaid expenses	100,64	33,69	29,47	66,94	198,68%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	1.489,30	1.204,86	670,81	274,44	22,78%

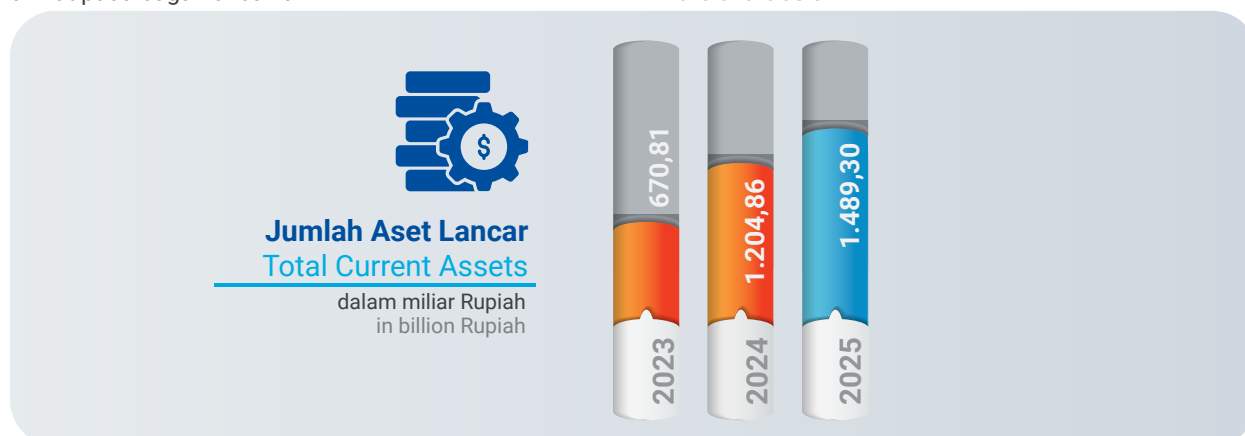
*) Disajikan kembali/As restated

Jumlah Aset Lancar tahun 2025 sebesar Rp1.49 triliun, naik 22,78% atau setara dengan Rp274,44 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,20 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Kas dan setara kas, serta piutang usaha, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Total Current Assets in 2025 reached Rp1.49 trillion, an increase of 22.78% or the equivalent of Rp274.44 billion compared to 2024 of Rp1.20 trillion. This increase was mainly due to an increase in cash and cash equivalents, as well as trade receivables, as explained below.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The growth of the Company's Current Assets can be seen in the chart below.



Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perseroan tahun 2025 sebesar Rp189,62 miliar, meningkat 29,70% atau setara dengan Rp43,42 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp146,20 miliar.

Cash and Cash Equivalents

The Company's Cash and Cash Equivalents in 2025 amounted to Rp189.62 billion, an increase of 29.70% or equivalent to Rp43.42 billion compared to 2024 of Rp146.20 billion.

Piutang Usaha - Bersih

Piutang Usaha - Bersih tahun 2025 terdiri dari Piutang Usaha – Pihak Berelasi sebesar Rp154,25 miliar, Piutang Usaha – Pihak Ketiga sebesar Rp442,37 miliar dan Piutang Lain-lain sebesar 25,65 miliar. Piutang usaha dengan pihak berelasi mengalami peningkatan sedangkan piutang usaha dengan pihak ketiga dan piutang lain-lain mengalami penurunan dibanding tahun 2024.

Trade Receivables - Net

Trade Receivables - Net in 2025 consists of Trade Receivables - Related Parties of Rp154.25 billion, Trade Receivables - Third Parties of Rp442.37 billion and Other Receivables of Rp25.65 billion. Trade receivables with related parties have increased, while trade receivables with third parties and other receivables have decreased compared to 2024.

Persediaan

Persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi untuk tujuan penjualan, atau berupa bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi maupun penyediaan jasa.

Inventories

Inventory is an asset held for sale in normal business activities, in the production process for sales purposes, or in the form of materials and equipment used in the production process or providing services.

Persediaan tahun 2025 sebesar Rp38,24 miliar, menurun 41,24% atau setara dengan Rp26,77 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp64,92 miliar.

Inventories in 2025 amounted to Rp38.24 billion, a decrease of 41.24% or the equivalent of Rp26.77 billion compared to Rp64.92 billion in 2024.

Uang Muka

Uang Muka merupakan pengeluaran kas atau bank yang dilakukan Perusahaan sebagai pembayaran di muka atas pengadaan barang, jasa, maupun kegiatan penunjang operasional sebelum barang atau jasa tersebut diterima serta dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan.

Advances

Advances is a cash or bank disbursement made by the Company as an advance payment for the procurement of goods, services or operational support activities before the goods or services are received and accounted for by the Company.

Uang Muka tahun 2025 sebesar Rp482,09 miliar, meningkat 225,28% atau setara dengan Rp333,88 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp148,20 miliar.

In 2025, advances amounted to Rp482.09 billion, an increase of 225.28% or the equivalent of Rp333.88 billion compared to Rp148.20 billion in 2024.



Pajak Dibayar di Muka

Pajak Dibayar di Muka merupakan seluruh pembayaran pajak yang telah dilakukan dan dapat diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pajak terkait, termasuk kelebihan pembayaran pajak yang akan dimintakan restitusi atau dikompensasikan pada kewajiban pajak periode berikutnya.

Pajak Dibayar di Muka tahun 2025 sebesar Rp46,55 miliar, meningkat 34,04% atau setara dengan Rp11,82 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp34,72 miliar.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka merupakan pengeluaran yang telah dilakukan oleh Perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang, dengan masa manfaat lebih dari satu periode atau satu tahun.

Biaya Dibayar di Muka tahun 2025 sebesar Rp100,64 miliar, meningkat 198,68% atau setara dengan Rp66,94 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp33,69 miliar.

Prepaid Taxes

Prepaid Tax is all tax payments that have been made and can be calculated as a deduction from the related tax liability, including excess tax payments that will be requested for refund or compensation in the next period's tax liability.

Prepaid Taxes in 2025 amounted to Rp46.55 billion, an increase of 34.04% or the equivalent of Rp11.82 billion compared to Rp34.72 billion in 2024.

Prepaid Expenses

Prepaid Expenses refer to the expenditures that have been made by the Company to obtain economic benefits in the future, with a useful life of more than one period or one year.

Prepaid Expenses in 2025 amounted to Rp100.64 billion, an increase of 198.68% or the equivalent of Rp66.94 billion compared to Rp33.69 billion in 2024.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Investasi pada Saham Investment in Shares	3,95	4,50	7,52	(0,55)	-12,11%
Aset tetap Fixed assets	8.632,51	1.887,17	1.891,84	6.745,33	357,43%
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	18,12	21,71	31,76	(3,59)	-16,52%
Properti Investasi Investment Properties	1.509,38	1.279,97	1.285,46	229,41	17,92%
Aset Hak Guna Right of Use Assets	28,77	13,31	19,58	15,46	116,11%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	174,25	169,20	5,05	5,05	2,98%
Aset lain-lain Other Assets	377,29	403,23	380,52	(25,94)	-6,43%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	10.774,27	3.779,10	3.777,08	6.995,18	185,10%

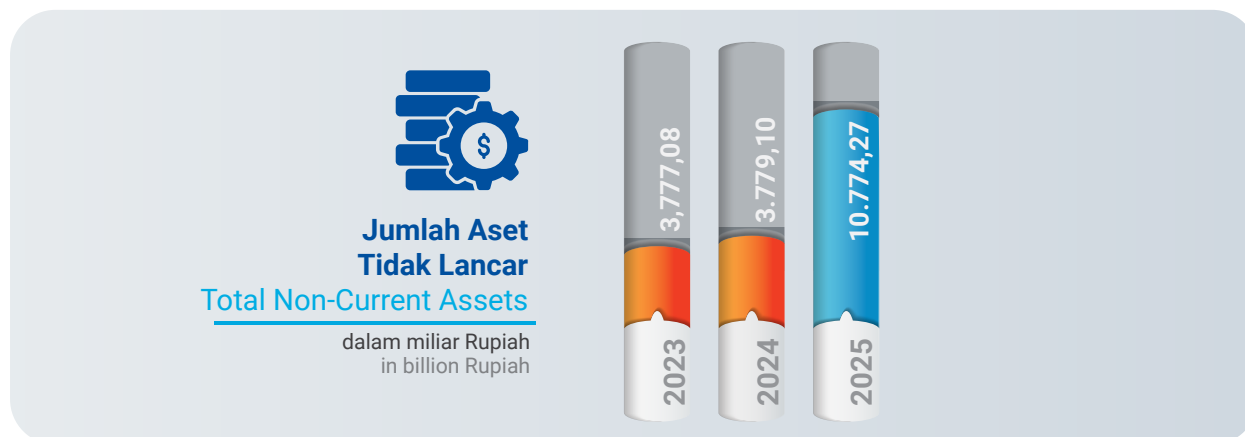
*) Disajikan kembali/As restated

Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2025 sebesar Rp10,77 triliun, meningkat 185,10% atau setara dengan Rp6.995,18 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,78 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pada aset pajak tangguhan dan aset lain-lain, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Total Non-Current Assets in 2025 amounted to Rp10.77 trillion, increased by 185.10% or the equivalent of Rp6,995.18 billion compared to Rp3.78 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in deferred tax assets and other assets, as explained below.

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Total Non-Current Assets can be seen in the chart below.



Investasi pada Saham

Investasi pada Saham tahun 2025 sebesar Rp3,95 miliar, menurun -12,11% atau setara dengan Rp0,55 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,50 miliar.

Investment in Shares

Investment in shares in 2025 amounted Rp3.95 billion, a decrease of -12.11% or the equivalent of Rp0.55 billion compared to Rp4.50 billion in 2024.

Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan, baik untuk produksi atau pengadaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, maupun untuk tujuan administratif, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Fixed Assets

Fixed assets are tangible assets owned and used in the Company's operational activities, whether for the production or procurement of goods and services, rented to other parties, or for administrative purposes, and have a useful life of more than one year.

Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp8,63 triliun, naik 357,43% atau setara dengan Rp6,74 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,89 triliun.

Fixed Assets in 2025 amounted to Rp8.63 trillion, an increase of 357.43% or the equivalent of Rp6.74 trillion compared to Rp1.89 trillion in 2024.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki bentuk fisik, dan memberikan manfaat ekonomi bagi Perusahaan di masa mendatang.

Intangible Assets

Intangible assets are non-monetary assets that can be identified, have no physical form, and provide economic benefits for the Company in the future.

Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebesar Rp18,12 miliar, menurun 16,52% atau setara dengan Rp3,59 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21,71 miliar.

Intangible Assets in 2025 amounted to Rp18.12 billion, a decrease of 16.52% or the equivalent of Rp3.59 billion compared to Rp21.71 billion in 2024.

Properti Investasi

Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp1,51 triliun, naik 17,92% atau setara dengan Rp229,41 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,28 triliun.

Investment Property

Investment Property in 2025 amounted to Rp1.51 trillion, an increase of 17.92% or equivalent to Rp229.41 billion compared to Rp1.28 trillion in 2024.

Aset Hak Guna

Aset Hak Guna tahun 2025 sebesar Rp28,77 miliar, meningkat 116,11% atau setara dengan Rp15,46 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,31 miliar.

Rights of Use Assets

Rights of Use Assets in 2025 amounted to Rp28.77 billion, an increase of 116.11% or the equivalent of Rp15.46 billion compared to Rp13.31 billion in 2024.



Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan tahun 2025 sebesar Rp28,77 miliar, meningkat 116,11% atau setara dengan Rp15,46 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp169,20 miliar.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp377,29 miliar, turun 6,43% atau setara dengan Rp25,94 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp403,23 miliar.

LIABILITAS

Jumlah Liabilitas PPI tahun 2025 mencapai Rp1,59 triliun, mengalami naik 14,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,38 triliun.

Total Liabilitas 2023-2025 (Rp-miliar)

Liabilitas Liabilities	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.436,75	1.247,56	784,44	189,19	15,16%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	150,69	136,88	952,15	13,81	10,09%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.587,43	1.384,44	1.736,59	203,00	14,66%

*) Disajikan kembali/As restated

Liabilitas Perseroan dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dibandingkan tahun 2024, Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 15,16%, dan Liabilitas Jangka Panjang tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10,09%, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Utang Usaha Trade Payable					
Pihak Berelasi Related Parties	90,02	56,36	70,19	33,66	59,71%
Pihak Ketiga Third Parties	685,45	403,83	184,73	281,63	69,74%
Utang Pajak Tax Payables	14,86	20,01	18,50	(5,14)	-25,72%
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Jangka Panjang: Short-Term Liabilities Net of Non-Current Portion					
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	1,16	1,92	0,38	(0,76)	-39,58%
Beban Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	99,81	216,75	0,38	(116,93)	-53,95%

Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets in 2025 amounted to Rp28.77 billion, an increase of 116.11% or the equivalent of Rp15.46 billion compared to Rp169.20 billion in 2024.

Other Assets

Other Assets in 2025 amounted to Rp377.29 billion, a decrease of 6.43% or the equivalent of Rp25.94 billion compared to Rp403.23 billion in 2024.

LIABILITIES

Total PPI liabilities in 2025 reached Rp1.59 trillion, an increase of 14.66% compared to Rp1.38 trillion in 2024.

Total Liabilities 2023 – 2025 (Rp-billion)

The Company's liabilities are influenced by Short Term Liabilities and Long Term Liabilities. Compared to 2024, Total Short Term Liabilities in 2025 increased by 15.16%, and Long Term Liabilities in 2025 increased by 10.09%, as explained below.

Current Liabilities

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenues	373,26	186,14	82,41	187,12	100,52%
Utang Bank – Jangka pendek Short Term Bank Loan	79,70	303,25	258,63	(223,56)	-73,72%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liability	0,38	0,28	0,28	0,10	36,18%
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	92,11	59,03	31,03	33,08	35,92%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.436,75	1.247,56	784,44	189,19	15,16%

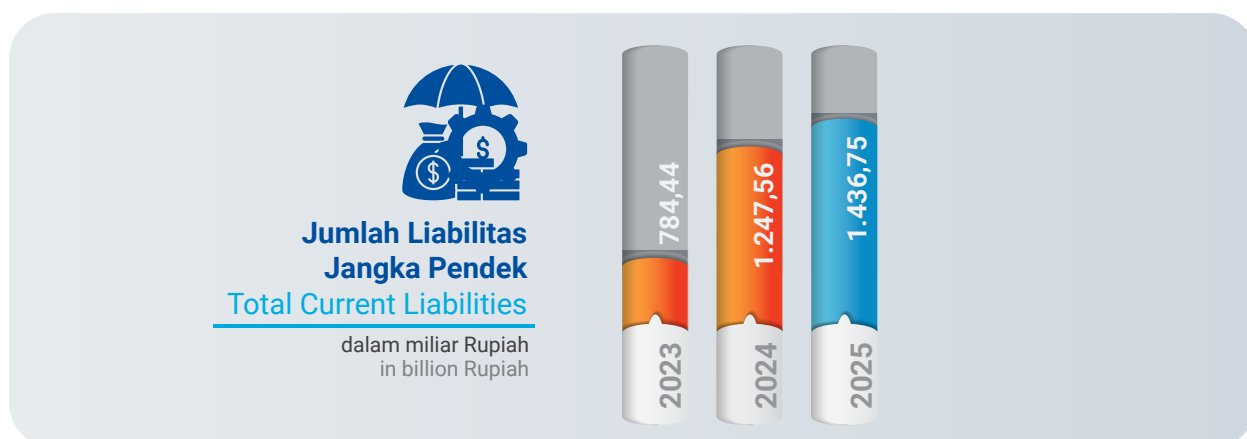
*) Disajikan kembali/As restated

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2025 sebesar Rp1,44 triliun, meningkat 15,16% atau setara dengan Rp189,19 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2024 sebesar Rp1,25 triliun. Peningkatan ini disumbangkan oleh beberapa pos akun seperti utang usaha pihak ketiga, pendapatan diterima di muka jangka pendek, utang bank jangka pendek, liabilitas imbalan kerja, dan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya.

Total Short Term Liabilities in 2025 amounted to Rp1.44 trillion, an increase of 15.16% or equivalent to Rp189.19 billion compared to Total Short Term Liabilities in 2024 of Rp1.25 trillion. This increase was contributed by several account items such as third party trade payables, short-term unearned income, short-term bank debt, employee benefits liabilities, and other short-term financial liabilities.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The growth of the Company's Total Short Term Liabilities can be seen in the chart below.



Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan tahun 2025 terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp90,02 miliar, dan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp685,45 miliar. Utang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan 59,71% dibandingkan tahun 2024 dan utang usaha pihak ketiga mengalami peningkatan 69,74% dibandingkan tahun 2024.

Trade Payables

The Company's trade payables in 2025 consist of related party trade payables amounting to Rp90.02 billion, and third party trade payables amounting to Rp685.45 billion. Related party trade payables increased 59.71% compared to 2024 and third party trade payables increased 69.74% compared to 2024.

Utang Pajak

Utang pajak merupakan kewajiban Perusahaan yang timbul atas transaksi yang dikenakan pajak dan belum

Tax Payables

Tax payables are the Company's obligations arising from transactions that are subject to tax and have not been



disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Utang Pajak tahun 2025 sebesar Rp14,86 miliar, mengalami penurunan 25,72% atau setara dengan Rp5,14 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp20,01 miliar.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa tahun 2025 sebesar Rp1,16 miliar, mengalami penurunan 39,58% atau setara dengan Rp0,76 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,92 miliar.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar tahun 2025 sebesar Rp99,81 miliar, mengalami penurunan 53,95% atau setara dengan Rp116,93 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp216,75 miliar.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp92,11 miliar, naik 35,92% atau setara dengan Rp33,08 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp59,03 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

remitted to the state in accordance with applicable tax provisions.

Tax payables in 2025 amounted Rp14.86 billion, a decrease of 25.72% or the equivalent of Rp5.14 billion compared to Rp20.01 billion in 2024.

Lease Liabilities

Rental liabilities in 2025 amounted to Rp1.16 billion, a decrease of 39.58% or the equivalent of Rp0.76 billion compared to Rp1.92 billion in 2024.

Accrued Expenses

Accrued Expenses in 2025 amounted to Rp99.81 billion, a decrease of 53.95% or the equivalent of Rp116.93 billion compared to Rp216.75 billion in 2024.

Other Short-Term Financial Liabilities

Other Short-Term Financial Liabilities in 2025 amounted to Rp92.11 billion, an increase of 35.92% or the equivalent of Rp33.08 billion compared to Rp59.03 billion in 2024.

Non-Current Liabilities

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

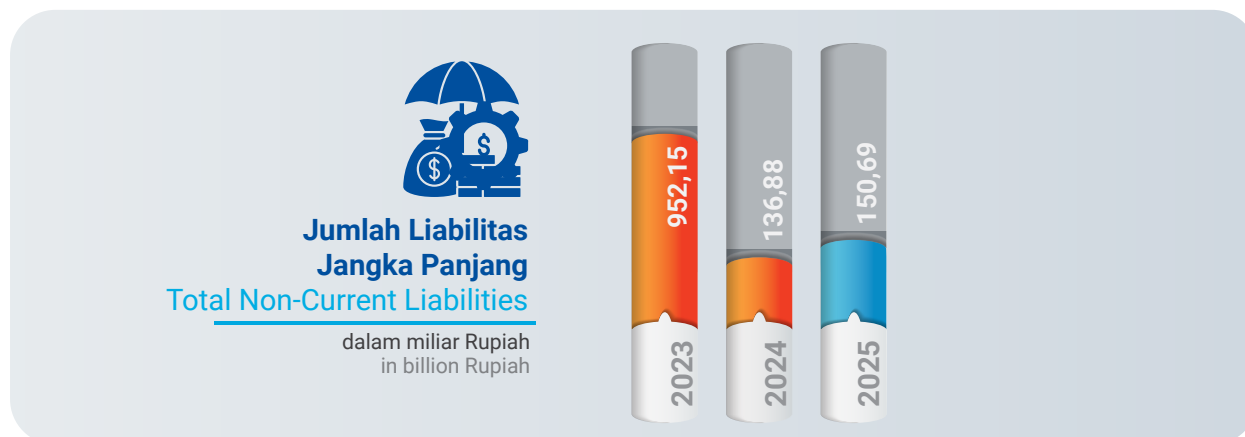
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Liabilitas Jangka Panjang yang Sudah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Non-Current Liabilities - Net of Current Portion					
Utang lain-lain – Pihak Berelasi Other Liabilities – Related Parties	23,69	23,69	898,43	-	0,00%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	3,66	2,28	-	1,38	60,50%
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenues	83,36	65,11	22,40	18,24	28,02%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liability	0,38	45,80	31,32	0,10	36,18%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	150,69	136,88	952,15	13,81	10,09%
*) Disajikan kembali/As restated					

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2025 sebesar Rp150,69 miliar, naik 10,09% atau setara dengan Rp13,81 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 sebesar Rp136,88 miliar. Penurunan ini terutama disumbangkan oleh penurunan yang signifikan pada utang lain-lain pihak berelasi.

Total Long-Term Liabilities in 2025 amounted to Rp150.69 billion, an increase of 10.09% or the equivalent of Rp13.81 billion compared to Total Long-Term Liabilities in of Rp136.88 billion in 2024. This decrease was mainly contributed by a significant decrease in other payables from related parties.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The growth of the Company's Total Long-Term Liabilities can be seen in the chart below.



Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka tahun 2025 sebesar Rp83,36 miliar, meningkat 28,02% atau setara dengan Rp18,04 miliar dibandingkan tahun 2024 dimana pendapatan diterima di muka mencapai Rp65,11 miliar.

Unearned Income

Unearned income in 2025 amounted to Rp83.36 billion, an increase of 28.02% or equivalent to Rp18.04 billion compared to unearned income of Rp65.11 billion in 2024.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2025 sebesar Rp0,38 miliar, meningkat 38,15% atau setara dengan Rp0,10 miliar dibandingkan tahun 2024 dimana liabilitas imbalan kerja mencapai RpRp45,80 miliar.

Employee Benefits Liabilities

Employee benefits liabilities in 2025 amounted to Rp0.38 billion, an increase of 38.15% or the equivalent of Rp0.10 billion compared to employee benefits liabilities of Rp45.80 billion in 2024.

EKUITAS

Jumlah Ekuitas PPI tahun 2025 mencapai Rp10,64 triliun, mengalami kenaikan 195,49% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,60 triliun.

EQUITY

Total PPI Equity in 2025 reached Rp10.64 trillion, an increase of 195.49% compared to Rp3.60 trillion in 2024.

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Ekuitas Equity	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Modal Saham Share Capital	1.826,13	1.826,13	942,74	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid in Capital	(231,04)	(231,04)	(231,04)	-	-
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Retained Earnings Appropriated					
Cadangan Umum General Reserves	132,32	111,89	111,89	20,43	18,26
Cadangan Khusus Specific Reserves	1,53	1,53	1,53	-	-
Belum ditentukan Penggunaannya Unappropriated	2.128,22	1.959,85	1.939,42	168,37	8,59%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Component Equity	6.778,89	(68,89)	(53,30)	6.847,78	-9.940,74%
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Total equity attributable to owner of the Entity	10.857,57	3.599,48	2.711,25	7.258,09	201,64



Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Ekuitas Equity	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	0,08	0,04	0,04	0,04	97,58%
Jumlah Ekuitas Total Equity	10.636,14	3.599,52	2.711,29	7.239,62	195,49%

*) Disajikan kembali/As restated

Dibandingkan tahun 2024, Jumlah Ekuitas tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 195,49%, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Compared to 2024, Total Equity in 2025 has increased by 195.49%, as explained in detail below.

Modal Saham

Modal Saham tahun 2025 sebesar Rp1,83 triliun. Saldo ini berjumlah sama dengan tahun 2024.

Share Capital

Share capital in 2025 is Rp1.83 trillion. This balance is the same as in 2024.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor pada tahun 2025 sebesar Rp231,04 miliar, jumlah ini sama dengan tambahan modal disetor pada tahun 2024.

Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital in 2025 is Rp231.04 billion, this amount is the same as additional paid-in capital in 2024.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas tahun 2025 sebesar Rp10,64 triliun, meningkat 195,49 atau setara dengan Rp7.0036,58 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,60 triliun.

Equity Attributable to Entity Owners

Total Equity Attributable to Entity Owners in 2025 is Rp10.64 trillion, an increase of 195.49 or equivalent to Rp7,0036.58 billion compared to 2024 of Rp3.60 trillion.

Kepentingan Non Pengendali

Pada tahun 2025 Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp79,45 juta, hampir sama dengan tahun 2024 sebesar Rp42,75 juta.

Non-Controlling Interests

In 2025, total equity attributable to non-controlling interests amounted Rp79.45 million, almost the same as in 2024 of Rp42.75 million.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income



Di tahun 2025 PPI mencatatkan peningkatan nilai penjualan yang terutama disumbangkan oleh segmen Produk Strategis

In 2025, PPI recorded an increase in sales value, which was mainly contributed by the Strategic Products segment



Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Laba Rugi Profit or Loss	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Pendapatan Usaha Revenues	6.950,15	3.099,40	2.289,29	3.850,75	124,24%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(6.466,01)	(2.756,51)	(1.986,95)	(3.709,50)	134,57%
Laba Kotor Gross Profit	484,15	342,89	302,34	141,25	41,19%
Beban Penjualan dan Distribusi Distribution and Selling Expenses	(10,04)	(13,65)	(13,51)	3,61	-26,47%
Beban Umum dan administrasi General and Administration Expenses	(316,29)	(294,34)	(317,38)	(21,95)	7,46%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(326,33)	(307,98)	(330,89)	(18,34)	5,96%
Laba Usaha Operating Profit	157,82	34,91	(28,55)	122,91	352,11%
Pendapatan Non-Usaha Non-Operating Income	160,56	100,85	242,25	59,71	59,21%
Beban Non-Usaha Non-Operating Expense	112,48	(61,84)	(106,47)	174,32	281,89%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	205,91	25,30	70,42	61,69	64,62%
Pajak Final Final Tax	(34,93)	(23,87)	(17,11)	(11,06)	46,36%
Pajak Kini Current Tax	43,13	(10,12)	(18,74)	33,01	326,17
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	5,25	11,32	(5,25)	-100,00
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(17,10)	(4,87)	(19,04)	(12,23)	251,10%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	482,00	20,43	51,38	461,57	2.258,98
Penghasilan Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Items that will not be reclassified to Profit or Loss					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Employee Benefits	(20,22)	(16,12)	(5,71)	(4,10)	25,44%
Kerugian yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar Employee Benefits Unrealized loss on Financial assets at fair value	(0,55)	(3,02)	(0,85)	2,48	-81,94%
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Income Tax related to Items that will not be Reclassified to Profit or Losses	4,45	3,55	1,44	0,90	25,44%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	6.847,81	(15,59)	(5,12)	6.863,40	-44.022,74%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	7.036,62	4,84	46,26	7.031,77	145.224,19%



Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Laba Rugi Profit or Loss	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	188,80	20,43	51,38	168,37	824,09%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,44%
Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	7.036,58	4,84	46,25	7.031,74	145.269,36%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0,04	0,00	0,00	0,04	2.299,01%
*) Disajikan kembali/As restated					

*) Disajikan kembali/As restated

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2025 Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp7.036,58 miliar, naik 145.269,36% atau setara dengan Rp7.031,74 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,84 miliar.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2025, Total Comprehensive Income for the Year amounted to Rp7,036.58 billion, an increase of 145,269.36%, equivalent to Rp7,031.74 billion, compared to Rp4.84 billion in 2024.

Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Jumlah Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp7.036,58 miliar, naik 145.269,36% atau setara dengan Rp7.031,74 miliar dibanding tahun 2024 dimana Perseroan mencatatkan Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp4,84 miliar.

Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity

Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity in 2025 was recorded at Rp7,036.58 billion, an increase of 145,269.36%, equivalent to Rp7,031.74 billion, compared to Rp4.84 billion in 2024.

ARUS KAS

Arus Kas menggambarkan jumlah pemasukan dan pengeluaran PPI dalam suatu periode tertentu.

CASH FLOW

Cash Flow describes the amount of PPI income and expenditure in a certain period.

Laporan Arus Kas

Statements of Cash Flows

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Uraian Description	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities					
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	7.397,74	2.766,78	2.431,56	4.630,96	167,38%
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Cash payment to vendors and employees	(6.975,39)	(2.664,03)	(2.455,74)	(4.311,36)	161,84%
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan Cash receipt from corporate income tax	(61,41)	(85,89)	(127,14)	24,47	-28,50%

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Uraian Description	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Pembayaran bunga Payment interest	(15,59)	(23,66)	(18,62)	8,07	-34,12%
Pembayaran Pajak Tax Payment	(32,03)	(33,35)	(20,38)	1,32	-3,95%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash from operating activities	330,70	27,49	(171,18)	303,21	1.103,16%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities					
Pembelian aset tetap Acquisition of fixed assets	(21,73)	(2,97)	(8,61)	-18,76	631,44%
Uang Muka Penjualan Aset yang Dimiliki untuk Dijual Advance of Sales on Assets Held for Sale	-	61,54	-	(61,54)	-100,00%
Pembelian Properti Investasi Proceed from sale of fixed assets	(0,65)	-	-	(0,65)	100,00%
Penjualan Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual Sales of Non-Current Assets held for sale	6,28	-	-	6,28	100,00%
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Proceed From Sale of Fixed Asset	0,10	4,26	0,74	(4,16)	-97,59%
Penambahan aset lain-lain Acquisition of other assets	(2,60)	(28,26)	1,27	25,66	-90,80%
Penambahan aset tidak berwujud Acquisition of intangible assets	(0,97)	(1,16)	(0,99)	0,19	-16,66%
Penerimaan dividen atas aset keuangan Receipt of Dividends on Financial Assets	0,13	-	-	0,13	100,00%
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	(19,43)	33,40	(4,46)	-52,83	-158,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows in Financing Activities					
Penerimaan Utang Bank – Jangka Pendek Proceeds from Bank Loan - Current Portion	1.003,96	595,25	351,14	408,72	68,66%
Pembayaran Utang Bank – Jangka Pendek Payment Bank Loan - Current Portion	(1.227,52)	(551,66)	(266,31)	(675,86)	-122,51%
Pembayaran Utang Bank – Jangka Panjang Payment Bank Loan - Long Term	-	(15,42)	(15,42)	15,42	-100,00%
Penerimaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Proceeds of Financial Liabilities Current Portion	74,01	59,41	10,12	14,59	24,56%
Pembayaran Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Proceeds from Financial Liabilities Current Portion	(75,25)	(53,98)	(8,21)	(21,27)	39,41%
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	(43,05)	(9,66)	(0,38)	(33,39)	345,81%
Kas bersih diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas pendanaan Net cash provided from financing activities	(167,85)	23,95	70,94	(191,80)	-800,82%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	43,42	84,83	(104,70)	(41,41)	-48,81%



Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Uraian Description	2025	2024*)	2023*)	YOY 2025-2024	
				Nominal Amount	%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	146,20	62,71	181,42	83,49	133,14%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	189,62	146,20	62,71	43,42	29,70%

*) Disajikan kembali/As restated

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2025, PPI mencatat kenaikan pada arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi, dari Rp27,49 miliar menjadi Rp330,70 miliar. Hal ini antara lain didorong oleh naiknya penerimaan kas dari pelanggan.

Cash Flow from Operating Activities

In 2025, PPI recorded an increase in net cash flow obtained from operating activities, from Rp27.49 billion to Rp330.70 billion. This was driven, among other things, by the increase in cash receipts from customers.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2025, PPI mencatat kenaikan pada arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, dari Rp33,40 miliar menjadi Rp19,43 miliar. Hal ini antara lain didorong oleh naiknya penerimaan dari penjualan aset tetap.

Cash Flows from Investing Activities

In 2025, PPI recorded an increase in net cash flow used for investment activities, from Rp33.40 billion to Rp19.43 billion. This was driven, among other things, by the increase in receipts from the sale of fixed assets.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2025, terjadi penurunan pada arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan, dari Rp23,95 miliar menjadi Rp(167,85) miliar. Hal ini antara lain disebabkan oleh pembayaran utang bank.

Cash Flow from Financing Activities

In 2025, there will be a decrease in net cash flow obtained from (used for) financing activities, from Rp23.95 billion to Rp(167.85) billion. This is partly due to bank debt payments.

Analisis Rasio Keuangan

PPI menggunakan berbagai rasio keuangan dasar berikut ini guna mengukur tingkat kesehatan dan kinerja Perseroan:

Financial Ratio Analysis

PPI applies the following basic financial ratios to measure the Company's health and performance level:

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2025-2024 (point) Increase (Decrease) 2025- 2024 (points)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	103,0	96,6	84,0	640%
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	54,7	66,7	43,5	-1.200%
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	13,2	11,7	7,9	150%
Modal Kerja Bersih terhadap Penjualan (%) Net Working Capital to Sales (%)	103,0	96,6	84,0	640%
Rasio Leverage Leverage Ratio				
Rasio Utang Terhadap Aset (%) Debt to Assets Ratio (%)	13,0	27,8	39,0	-1.480%

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2025-2024 (point) Increase (Decrease) 2025- 2024 (points)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	14,9	38,5	64,1	-2.360%
Rasio Cakupan Layanan Utang (kali) Debt Service Coverage Ratio (times)	0,12	0,30	0,33	-60%
Rasio Aktivitas Activity Ratio				
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	30,9	79,2	44,8	-4.830%
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	43,2	59,6	46,2	-1.640%
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	2,1	8,4	20,5	-1.640%
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Return on Equity (ROE) (%)	1,8	0,4	0,6	140%
Imbalan Investasi (%) Return on Investment (ROI) (%)	1,3	0,8	(0,8)	50%
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	7,0	10,9	13,2	140%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	2,7	0,5	0,7	140%
Margin EBITDA EBITDA Margin	3,4	2,2	3,0	120%

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Solvency and Receivables Collectibility

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PPI secara konsisten menjaga ketahanan dan fleksibilitas keuangan melalui pengelolaan likuiditas yang *prudent* serta pemantauan kondisi keuangan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan Perseroan memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, secara tepat waktu. Tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya tercermin pada rasio likuiditas berikut:

Short-Term and Long-Term Debt Solvency

PPI consistently maintains financial resilience and flexibility through prudent liquidity management and continuous monitoring of financial conditions. These efforts are made to ensure that the Company has adequate capacity to fulfill all financial obligations, both short and long term, in a timely manner. The level of the Company's ability to fulfill its obligations is reflected in the following liquidity ratio:

Uraian Description	2025	2024	2023
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	103,0	96,6	84,0



Uraian Description	2025	2024	2023
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	54,7	66,7	43,5
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	13,2	11,7	7,9

Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Aktivitas Lainnya

Selain menjaga tingkat likuiditas, PPI juga terus mengoptimalkan efektivitas pengelolaan modal kerja melalui pengendalian piutang, utang, dan persediaan secara *prudent*. Sepanjang tahun 2025, periode perputaran piutang PPI tercatat sebesar 30,9 hari, sementara periode perputaran utang berada pada level 43,2 hari. Adapun tingkat perputaran persediaan tercatat sebesar 2,1 kali, yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengelola persediaan secara efektif sesuai kebutuhan operasional dan dinamika pasar.

Receivables Collectibility Rate and Other Activity Ratios

In addition to maintaining liquidity levels, PPI also continues to optimize the effectiveness of working capital management through prudent control of receivables, payables and inventories. Throughout 2025, PPI's receivable turnover period was recorded at 30.9 days, while the debt turnover period was at 43.2 days. The inventory turnover rate was recorded at 2.1 times, which reflects the Company's ability to manage inventory effectively according to operational needs and market dynamics.

Uraian Description	2025	2024	2023
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	30,9	79,7	44,8
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	43,2	60,1	46,2
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	2,1	8,5	20,5

Kemampuan Menghasilkan Laba

Kemampuan menghasilkan laba Perseroan ditunjukkan dengan rasio-rasio berikut ini.

Profitability

The Company's profitability is represented by the following ratios.

Uraian Description	2025	2024	2023
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Return On Equity (ROE) (%)	1,8	0,6	0,6
Imbalan Investasi (%) Return On Investment (ROI) (%)	1,3	0,7	(0,8)
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	7,0	11,1	13,2
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	2,7	0,7	0,7
Margin EBITDA EBITDA Margin	3,4	2,3	3,0

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal PPI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kebijakan struktur modal PPI bersifat fleksibel serta senantiasa memperhatikan faktor makro ekonomi baik global maupun nasional dan karakteristik risiko aset yang mendasarinya. PPI menilai kebijakan struktur modal yang solid sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasi PPI.

Dalam rangka menjaga fundamental struktur modal yang ada, PPI dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengelola pengembalian modal kepada pemegang saham, atau menjual aset untuk mengurangi utang. PPI memonitor kualitas permodalannya melalui rasio *debt-to-equity* agar nilai utangnya tidak melebihi aset yang dimiliki.

Struktur Permodalan

Tabel di bawah ini memperlihatkan komposisi struktur modal PPI dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Struktur Modal

Uraian Description	2025		2024		2023	
	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.436.747	11,75%	1.247.557	25,03	784.441	17,64
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	150.687	1,23%	136.878	2,75	952.153	21,41
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.587.435	12,99%	1.384.435	27,78	1.736.594	39,04
Jumlah Ekuitas Total Equity	10.636.139	87,01%	3.599.523	72,22	2.711.294	60,96
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	12.223.574	100%	4.983.958	100,00	4.447.889	100,00

Kesesuaian Pengungkapan dengan Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi mengenai struktur modal PPI pada sub-bahasan ini sudah sesuai dengan Laporan Keuangan PPI Tahun Buku 31 Desember 2025.

Management Policy on Capital Structure

Management of PPI's capital structure is carried out in accordance with applicable statutory provisions and the Articles of Association. PPI's capital structure policy is flexible and always takes into account macroeconomic factors, both global and national, and the risk characteristics of the underlying assets. PPI assesses that a solid capital structure policy is very important in supporting the sustainability of PPI's operations.

In order to maintain the fundamentals of the existing capital structure, PPI can adjust the amount of dividends paid to shareholders, manage the return of capital to shareholders, or sell assets to reduce debt. PPI monitors the quality of its capital through the debt-to-equity ratio so that the value of its debt does not exceed the assets it owns.

Capital Structure

The table below shows the composition of PPI's capital structure in the last 3 (three) years:

Capital Structure

Uraian Description	2025		2024		2023	
	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.436.747	11,75%	1.247.557	25,03	784.441	17,64
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	150.687	1,23%	136.878	2,75	952.153	21,41
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.587.435	12,99%	1.384.435	27,78	1.736.594	39,04
Jumlah Ekuitas Total Equity	10.636.139	87,01%	3.599.523	72,22	2.711.294	60,96
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	12.223.574	100%	4.983.958	100,00	4.447.889	100,00

Conformity of Disclosures with Financial Reports

Disclosure of information regarding PPI's capital structure in this sub-discussion is in accordance with PPI's Financial Report for Fiscal Year December 31, 2025.



Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen di PPI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku agar cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada penerapannya, pembagian dividen ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan nominal yang dibayarkan senantiasa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain namun tidak terbatas pada tingkat kesehatan perusahaan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, modal kerja, dan pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memutuskan lain.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2025.

Dividend Policy

PPI's dividend policy is in accordance with applicable statutory provisions, especially Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies where companies are required to set aside a certain amount of net profit each financial year so that the reserve reaches at least 20% of the total issued and paid-up capital.

In practice, dividend distribution is determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) with the nominal amount paid always taking into account several things, including but not limited to the company's health level, capital adequacy level, funding requirements for operational activities, working capital and business development, without reducing the GMS's right to decide otherwise.

The Company did not distribute dividend in the fiscal year 2025.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Sebagai pemegang izin perdagangan besar, PPI memfokuskan kegiatan usahanya pada segmen *Business to Business* (B2B) sebagai pasar utama bagi penjualan produk-produk unggulan Perseroan. Di tengah dinamika industri perdagangan yang terus berkembang, tingkat persaingan usaha di sektor yang dijalankan PPI tergolong kompetitif. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya produk yang hadir di pasar seiring meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas, ketersediaan, serta layanan produk.

Untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar, Perseroan secara konsisten menjalankan berbagai strategi pemasaran dan optimalisasi penjualan melalui beragam saluran distribusi. Upaya tersebut dilakukan melalui jaringan Kantor Cabang PPI, distributor, kios/pengecer, hingga kanal digital melalui aplikasi Warung Pangan. Selain itu, Perseroan juga terus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai instansi guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Tidak hanya berfokus pada pasar domestik, PPI turut memperluas penetrasi pasar internasional melalui *representative office* yang berlokasi di Tiongkok, Mesir, dan Taiwan sebagai bagian dari strategi pengembangan pasar global Perseroan.

Market Segments and Competitive Conditions

As a wholesale trade permit holder, PPI focuses its business activities on the Business to Business (B2B) segment as the main market for sales of the Company's superior products. In the midst of the dynamics of the trade industry which continues to develop, the level of business competition in the sector run by PPI is relatively competitive. This is characterized by the increasing diversity of products appearing on the market along with increasing customer needs and expectations regarding product quality, availability and service.

To strengthen competitiveness and expand market reach, the Company consistently carries out various marketing strategies and optimizes sales through various distribution channels. This effort is carried out through the PPI branch office network, distributors, kiosks/retailers, and digital channels through the Warung Pangan application. Apart from that, the Company also continues to open opportunities for strategic collaboration with various agencies to support sustainable business growth.

Not only focusing on the domestic market, PPI is also expanding international market penetration through representative offices located in China, Egypt and Taiwan as part of the Company's global market development strategy.

Posisi Produk di Pasar

Produk-produk yang diperdagangkan oleh PPI memiliki posisi yang kuat di pasar, didukung oleh pengalaman Perseroan yang telah hadir dan melayani kebutuhan pelanggan selama puluhan tahun. Meskipun pada beberapa lini produk Perseroan menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan PPI yang konsisten di berbagai sektor perdagangan menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan Perseroan.

Sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar yang terus berkembang, PPI terus melakukan inovasi dan penguatan strategi bisnis agar mampu mempertahankan daya saing sekaligus meningkatkan posisinya sebagai mitra usaha pilihan pelanggan.

Positioning Produk terhadap Pasar dan Konsumen

Melalui berbagai produk yang diperdagangkan, PPI membangun *positioning* sebagai perusahaan perdagangan yang berpengalaman, terpercaya, serta mampu memberikan solusi atas kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Kedekatan dengan pelanggan dan kemampuan menyediakan produk secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membentuk citra Perseroan di pasar.

Untuk memperkuat *brand image* tersebut, Perseroan terus mengoptimalkan jaringan distribusi dan layanan penjualan melalui Kantor Cabang, distributor resmi, serta platform digital Aplikasi Warung Pangan. Melalui jaringan Kantor Cabang, PPI menghadirkan berbagai layanan unggulan, salah satunya *one day service delivery*, guna memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan pangan, pupuk dan pestisida, serta farmasi dan alat kesehatan bagi pelanggan secara cepat dan tepat waktu.

Selain itu, melalui distributor terdaftar B2, Perseroan memastikan kebutuhan pelanggan terhadap bahan kimia berbahaya dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, transformasi digital melalui Aplikasi Warung Pangan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan produk PPI secara *online* dengan lebih praktis, cepat, dan efisien.

Product Position in the Market

The products traded by PPI have a strong position in the market, supported by the Company's experience which has been present and serving customer needs for decades. Even though several of the Company's product lines face increasingly competitive competition, PPI's consistent presence in various trade sectors is an added value that strengthens customer confidence in the Company's products and services.

In line with the dynamics of market needs that continue to develop, PPI continues to innovate and strengthen business strategies to be able to maintain competitiveness while increasing its position as the business partner of choice for customers.

Product Positioning towards Markets and Consumers

Through the various products it trades, PPI builds its positioning as a trading company that is experienced, trusted, and able to provide solutions to customer needs as a whole. Closeness to customers and the ability to provide products in a sustainable manner are important parts in shaping the Company's image in the market.

To strengthen this brand image, the Company continues to optimize its distribution network and sales services through Branch Offices, official distributors, as well as the Warung Pangan Application digital platform. Through the Branch Office network, PPI provides various superior services, one of which is one day service delivery, to ensure the availability of supplies of basic commodities and food, fertilizers and pesticides, as well as pharmaceuticals and medical equipment for customers quickly and on time.

In addition, through B2 registered distributors, the Company ensures that customers' needs for hazardous chemicals can be met in accordance with applicable regulations. On the other hand, digital transformation through the Warung Pangan Application makes it easier for customers to order PPI products online more practically, quickly and efficiently.



Pangsa Pasar

Berikut pangsa pasar beberapa komoditas Perseroan:

Market Share

The following is the market share for several of the Company's commodities:

No.	Komoditi Commodity	Penjualan PPI PPI Sales	Market Size	Satuan Unit	Market Share
1	Pupuk Fertilizer	236.908.667	7.167.167.072	KG	3,3%
2	Pestisida Pesticides	793.009	27.037.189	LT	2,9%
3	Ekspor Kopi Coffee Export	883.680	2.865.420	KG	30,8%
4	Farmasi & Alkes Pharmacy & Medical Devices	1.762	40.379	UNIT	4,4%

Rincian Strategi Pemasaran PPI tahun 2025

Selama Tahun 2025 terdapat estimasi kenaikan nilai rata-rata pertumbuhan *market size* komoditi sejumlah 12%-13%. Di tahun yang sama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia juga menargetkan kenaikan nilai rata-rata *market share* atas komoditas-komoditas yang diperdagangkan oleh PT PPI sejumlah 10% - 20%. Sebagai upaya mencapai target tersebut dilakukan beberapa inisiatif strategis antara lain Optimalisasi *Marketing & Sales Process*, memperluas jaringan distribusi melalui kerjasama dengan UMKM, Penguatan *Customer engagement*, optimalisasi penjualan produk non pangan, pengelolaan dan transformasi cabang, serta non inisiatif lainnya, berikut adalah inisiatif strategis yang dilakukan antara lain:

- Program Optimalisasi *Marketing*: yaitu strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* sehingga berakhir kepada penjualan, strategi ini menitikberatkan pada peningkatan *Top of Mind* dari *customer* pada produk-produk dan layanan yang diberikan PPI. Penguatan *Customer Engagement*, *Branding* kios dll.
- Meningkatkan jalur distribusi produk: yaitu strategi membangun rantai perdagangan produk dari hulu hingga hilir produk sehingga produk dapat tersebar secara luas hingga ke tangan konsumen akhir, hal tersebut mendukung strategi Optimalisasi *Marketing* dan *Sales Process*.
- Penguatan *Customer Engagement* : yaitu program untuk meningkatkan jaringan komunikasi pemasaran dengan menciptakan hubungan baik melalui komunikasi pemasaran dengan *Customer* salah satunya melalui personel – personel *Spotworker* yang turun langsung memberikan *knowledge* serta menerima kritik dan saran secara langsung sehingga hubungan penjual dan pembeli lebih terjaga, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, menciptakan

Details of PPI's 2025 Marketing Strategy

In 2025, the average market size of commodities is estimated to increase by 12%-13%. In the same year, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) is also targeting a 10%-20% increase in the average market share of commodities traded by PT PPI. To achieve this target, several strategic initiatives are being implemented, including optimizing the marketing and sales process, expanding the distribution network through collaboration with MSMEs, strengthening customer engagement, optimizing non-food product sales, managing and transforming branches, and other non-initiatives. The following strategic initiatives are being implemented:

- Marketing Optimization Program: This is a marketing strategy aimed at increasing awareness and ultimately leading to sales. This strategy emphasizes improving customer top-of-mind for PPI's products and services. Strengthening Customer Engagement, Kiosk Branding, etc.
- Improving Product Distribution Channels: This strategy involves building a product trade chain from upstream to downstream so that products can be widely distributed to end consumers. This supports the Marketing and Sales Process Optimization strategy.
- Strengthening Customer Engagement: This program aims to improve the marketing communication network by fostering positive relationships through marketing communications with customers, including through *Spotworker* personnel who directly provide knowledge and receive criticism and suggestions. This helps maintain strong buyer-seller relationships, increase customer loyalty and satisfaction, foster word-of-mouth marketing (WOM) that relies on

komunikasi dari mulut ke mulut (*Word of Mouth Marketing*) yang mengandalkan rekomendasi dari percakapan konsumen ke konsumen, serta melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal sehingga tercapainya tujuan dalam membentuk komunitas pelanggan.

- *Market Intelligence* guna mengetahui kebutuhan pasar, kondisi pasar, dan pemetaan pesaing
- Pengadaan personil *Spotworker* untuk melaksanakan dan *monitoring* kegiatan pemasaran secara langsung serta turut serta secara tidak langsung meningkatkan permintaan pembelian produk dari pelanggan.
- Optimalisasi Pemanfaatan *Tools Marketing* seperti *Mobile Event Desk*, *product gift* (topi, *tumbler*, kaos, *goodiebag*) serta pemberian *reward* kepada pelanggan terbaik yang turut serta memberikan kontribusi besar kepada Perusahaan untuk peningkatan pendapatan perusahaan melalui *direct marketing* yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

recommendations from consumer-to-consumer conversations, and collaborate with external parties to achieve the goal of building a customer community.

- *Market Intelligence* to identify market needs, market conditions, and identify competitors.
- Procurement of *Spotworker* personnel to directly implement and monitor marketing activities and indirectly increase customer demand for products.
- Optimizing the use of marketing tools such as *Mobile Event Desk*, product gifts (hats, tumblers, t-shirts, goodie bags) and providing rewards to the best customers who have made a major contribution to the company to increase the company's revenue through higher direct marketing from year to year.

Realisasi dan Capaian Strategi Pemasaran

Realisasi dan capaian strategi pemasaran yang telah dilakukan di tahun 2025 terbagi menjadi:

1. Program Optimalisasi *Marketing* dan *Sales Process*
 - Semarak Diskon Dharmabrand Tahun 2025, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memberikan Diskon atau potongan harga secara langsung sebanyak tiga program dalam rentang waktu penjualan Juni, september, Desember 2025 untuk pembelian produk Pestisida.
 - Dukungan penjualan Dharmabrand tahun 2025 berupa Alat Pemasaran melalui pengadaan dan pendistribusian *Marketing Tools* berupa Kalender Tahunan Dharmabrand, Kaos Dharmabrand, Topi Dharmabrand, Kaos Dharmatomil, dan *Goodiebag* Dharmabrand kepada Kios/Toko/Pelanggan Dharmabrand di seluruh cabang PT PPI.
2. Program *Awareness*
 - Program Vaksinasi berkolaborasi dengan PT Biofarma, PT PPI sebagai distributor dari produk Biofarma juga turut serta memperkenalkan kepada *stakeholder* bahwa PT PPI sudah turut aktif dalam penjualan serta penyaluran produk – produk Biofarma. Beberapa lokasi kegiatan:
 - a. Vaksinasi di kabupaten Bulungan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Vaksinasi *dengue* di Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - c. Vaksinasi influenza bagi jamaah haji Kota Surabaya.

Marketing Strategy Realization and Achievements

The realization and achievements of the marketing strategy carried out in 2025 consist of:

1. Marketing and Sales Process Optimization Program
 - Vibrant Dharmabrand Discounts in 2025, PT Perusahaan Dagang Indonesia provides direct discounts or discounts for three programs within the sales period of June, September, December 2025 for the purchase of pesticide products.
 - Dharmabrand sales support in 2025 in the form of Marketing Tools through the procurement and distribution of Marketing Tools in the form of Dharmabrand Annual Calendars, Dharmabrand T-shirts, Dharmabrand Hats, Dharmatomil T-shirts, and Dharmabrand Goodiebags to Dharmabrand Kiosks/Shops/Customers in all PT PPI branches.
2. Awareness Program
 - The Vaccination Program collaborates with PT Biofarma, PT PPI as a distributor of Biofarma products also participates in introducing stakeholders that PT PPI has been actively involved in the sales and distribution of Biofarma products. Some activity locations:
 - a. Vaccination in Bulungan Tanjung Selor district, North Kalimantan Province.
 - b. Dengue vaccination in North Penajam Paser Regency.
 - c. Influenza vaccination for Hajj pilgrims in Surabaya City.



- Kegiatan SEHATI oleh Tim PT PPI dan Tim dari PT Biofarma terkait Sosialisasi Produk Biofarma serta Pemasaran dan Pendistribusian di RS. Mitra Siaga Tegal.
 - Tahun 2025 dilakukan Penempatan Personel *Spotworker* di wilayah kerja cabang utama PT PPI yaitu Cabang Utama Surabaya dan Cabang Utama Makassar untuk dapat mengaktifasi Kegiatan *Direct Marketing* dalam rangka meningkatkan *brand awareness*, peningkatan pelayanan tim Dharmabrand, maintain dan reaktivasi pelanggan, serta turut serta dalam bekerjasama untuk peningkatan penjualan Dharmabrand.
 - Memberikan *sponsorship* untuk mendukung beberapa kegiatan, seperti :
 - a. Sinkronisasi kegiatan dan malam penganugerahan insan pertanian tahun 2025 dinas pertanian dan perkebunan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
 - b. *Gathering* kios dan petani binaan PT Dewa Tani Grup.
 - c. *Gathering* Kios binaan dari PT Inti Tani Agrokimindo.
 - Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, PPI berpartisipasi menampilkan beberapa produk andalannya PT PPI di pasar *Export* maupun *Domestik*, seperti produk Kopi Arabika dan Robusta, Produk Kemenyan, Produk Gum Damar, Pestisida Dharmabrand, dan Spices.
 - *Demonstration Plot*, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia bekerjasama dengan Petani kunci yang berada di wilayah kerja Jember, Bondowoso, Banten, pada bulan Juni – Desember 2025 melakukan pengaplikasian secara langsung produk Pestisida Dharmabrand di lahan tanaman Padi dan Tembakau.
3. Program *Engagement*
- Program TEMANI (Temu Mitra dan Petani) sebagai kendaraan komunikasi pemasaran pada sektor komoditas Pupuk non subsidi, Pestisida, Benih Pertanian, dan produk lainnya dalam lini bisnis Saprotan. Tahun 2025 program TEMANI sudah dilakukan di 4 (empat) wilayah kerja cabang yaitu di cabang Surabaya, Makassar, Madiun, dan Jakarta, dengan total kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan.
- SEHATI activities by the PT PPI Team and the PT Biofarma Team related to Biofarma Product Socialization as well as Marketing and Distribution in Hospitals. Tegal Alert Partners.
 - In 2025, *Spotworker* personnel will be placed in the working areas of PT PPI's main branches, namely Surabaya Main Branch and Makassar Main Branch to be able to activate *Direct Marketing* Activities in order to increase brand awareness, improve Dharmabrand team service, maintain and reactivate customers, as well as participate in collaborating to increase Dharmabrand sales.
 - Providing *sponsorship* to support several activities, such as:
 - a. Synchronization of activities and awards night for agricultural personnel in 2025, Central Java provincial government's agriculture and plantation services.
 - b. *Gathering* of kiosks and farmers assisted by PT Dewa Tani Group.
 - c. *Gathering* Kiosk built by PT Inti Tani Agrokimindo.
 - Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, PPI participated in showcasing several of PT PPI's flagship products in the *Export* and *Domestic* markets, such as Arabica and Robusta Coffee products, Frankincense Products, Gum Damar Products, Dharmabrand Pesticides, and Spices.
 - *Demonstration Plot*, PT Perusahaan Dagang Indonesia in collaboration with key farmers in the Jember, Bondowoso, Banten work area, in June – December 2025 will carry out direct application of Dharmabrand Pesticide products on Rice and Tobacco plantations.
3. Engagement Program
- TEMANI (Partner and Farmer Meeting) program as a marketing communications vehicle in the non-subsidized Fertilizer, Pesticide, Agricultural Seed and other product commodity sectors in the Saprotan business line. In 2025, the TEMANI program will be implemented in 4 (four) branch work areas, namely the Surabaya, Makassar, Madiun and Jakarta branches, with a total of 11 (eleven) activities.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Bonding for Investment in Capital Goods

Tidak ada Investasi Barang Modal dan Ikatan Material terkait yang direalisasikan pada Tahun Buku 2025.

There were no investment in capital goods and related material commitments will be realized in the fiscal year 2025.

Pencapaian Target Tahun 2025

Target Achievement in 2025

Asumsi-asumsi yang Digunakan serta Proses Perumusan Target Tahun 2025

Penyusunan RKAP Tahun 2025 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, sebagai berikut:

Assumptions and Targets Setting for 2025

The preparation of the 2025 RKAP follows the macroeconomic assumptions used in the preparation of the 2025 State Revenue and Expenditure Budget, as follows:

Pencapaian Realisasi atas Target Tahun 2025 dan Proyeksi Keuangan

Achievement of 2025 Target Achievement and Financial Projection

Indikator Indicator	2024 Outlook	RAPBN 2025 2025 State Budget
Pertumbuhan ekonomi (% yoy) Economic growth (% yoy)	5,2	4,7 - 5,0
Inflasi (% yoy) Inflation (% yoy)	3,1	2,2 - 2,6
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Rupiah Exchange Rate (Rp/USD)	15.100	16.300 - 16.800
Suku Bunga (%) Interest Rate (%)	6,8	6,8 - 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) Indonesian Crude Oil Price (USD/Barrel)	78	68 - 82
Lifting Minyak (ribu barel per hari) Oil Lifting (thousand barrels per day)	614	593 - 597
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	985	976 - 980

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta RKAP 2026

Comparison Between Target, Realization and RKAP 2026

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	RKAP 2026 2026 Annual Work Plan
Jumlah Aset Total Assets	4.560.898	12.513.508	274%	6.369.179
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.785.876	10.857.659	287%	4.032.850
Pendapatan Revenue	3.600.800	6.950.154	193%	10.735.706
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for Current Year	8.102	188.803	2.330%	182.706



Key Performance Indicator (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Indikator Utama Perusahaan (*Key Performance Indicators*/"KPI") Konsolidasian per 31 Desember 2025 tercermin dari matriks penilaian KPI PPI, di mana penetapan perspektif, indikator serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.

Berdasarkan pengukuran Indikator Utama Perusahaan, pada tahun 2025 PPI mendapatkan skor 95,71.

Key Performance Indicators (KPI) and Company Health Level

Consolidated Key Performance Indicators (KPI) as of December 31, 2025 are reflected in the KPI PPI assessment matrix, where the determination of perspectives, indicators and their weighting has been carried out in accordance with BUMN Ministerial Regulation No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Assessment of Superior Performance of BUMN.

Based on measurements of the Company's Main Indicators, in 2025 PPI will get a score of 95.71.

No	KPI PPI 2025 PPI KPI 2025	SATUAN Unit	Target 2025	Bobot Weight	Realisasi Realization 2025 Audited	Capaian Achievement	Skor Score
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Economic and Social Values				59,0			56,38
Financial Financial				26,0			23,65
1	EBITDA Margin	%	1,35	8,00	3,12%	110,00%	8,80
2	Minimum Ending Cashflow	Rp Miliar Rp Billion	49,64	6,00	189,62	110,00%	6,60
3	Penyelesaian Piutang Macet (Kol 4 / Kol 5) Settlement of Non-Performing Receivables (Coll 4/Coll 5)	Rp Miliar Rp Billion	38,02	6,00	18,04	47,44%	2,85
4	Penyampaian Laporan Keuangan Audited 2024 Submission of Audited Financial Statements 2024	Waktu Time	tanggal 30 Maret 2025 March 30, 2025	6,00	28 Juli 2025 July 28, 2025	90,00%	5,40
Operasional Operational				22,0			20,63
5	Inventory Turn Over	Hari Days	17,00	8,00	3	110,00%	8,80
6	Gross Profit Margin	%	10,65	8,00	6,97%	65,41%	5,23
7	SGA to Sales	%	10,03	6,00	4,70%	110,00%	6,60
Sosial Social				11,0			12,10
8	Realisasi Net Profit Margin CPP Realization of CPP Net Profit Margin	%	1,55	7,00	3,72%	110,00%	7,70
9	Jumlah Mitra Petani, Peternak, Nelayan, dan UMKM Total Farmer, Breeders, Fishermen and MSMEs Partners	Jumlah Mitra Total Partners	28.444	4,00	117.540	110,00%	4,40
B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation				17,0			16,89
10	Nilai integrasi perdagangan dan logistik Integration of Trading and Logistic Values	Rp Miliar Rp Billion	35,0	6,00	78,48	110,00%	6,60
11	Penghasilan atas Optimalisasi Aset Revenue on Assets Optimization	Rp Miliar Rp Billion	99,3	8,00	90,51	91,14%	7,29
12	Program Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Improvement Program	%	100%	3,00	100%	100,00%	3,00
C. Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership				5,0			5,25
13	Penilaian Penyelenggaraan TI (Assessment ITML) IT Implementation Assessment (ITML Assessment)	Level	3	2,50	3,38%	110,00%	2,75

No	KPI PPI 2025 PPI KPI 2025	SATUAN Unit	Target 2025	Bobot Weight	Realisasi Realization 2025 Audited	Capaian Achievement	Skor Score
14	Pengembangan Sistem Rekonsiliasi Akuntansi Keuangan Development of Finance Accounting Reconciliation System	%	100%	2,50	100,00%	100,00%	2,50
D. Peningkatan Investasi Investment Growth				14,0			11,69
15	Penyelesaian Status Aset dan Pengamanan Aset Settlement of Assets Status and Assets Security	Objek Aset Assets Object	80,00	5,00	36	43,75%	2,19
16	Penambahan Jumlah Buyer dan Supplier Additional Number of Buyers and Suppliers	Jumlah Principal Total Principals	5,00	5,00	7	110,00%	5,50
17	Pemuktahiran atau Perbaikan SOP terkait Kerja Sama Pengelolaan/ Optimalisasi Aset Updating or improving SOPs related to Asset Management/Optimization Cooperation	%	100%	4,00	100%	100,00%	4,00
E. Pengembangan Talenta Talent Development				5,0			5,50
18	Produktivitas SDM HR Productivity	Rp Juta/ Orang Rp Million/ Person	32,60	2,50	154,92	110,00%	2,75
19	Talent Diversity	%	25%	2,50	42%	110,00%	2,75
Total				100,0			95,71

Laporan Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company's Healthy Level (Soundness Rating) Achievement Report

Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	Peringkat Akhir Final Rating	Tingkat Kesehatan Soundness Level
idBBB(sa) (Triple B; <i>Standalone</i>) Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.	idBBB/Stable (Triple B; <i>Stable Outlook</i>) Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.	Sehat (sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81)
Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>standalone rating</i>).		Sound (in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Article 81)
idBBB(sa) (Triple B; <i>Standalone</i>) An obligor with an idBBB rating has adequate capability compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions.	idBBB/Stable (Triple B; <i>Stable Outlook</i>) An obligor with an idBBB rating has adequate capability compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions.	
The (sa) sign indicates that the rating is a standalone rating.		



Prospek Usaha

Business Prospects

PPI memandang prospek usaha tahun 2026 secara positif seiring dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan nasional, meningkatnya kebutuhan distribusi komoditas strategis, serta penguatan sektor pangan, pertanian, dan industri nasional. Perseroan meyakini bahwa stabilitas ekonomi domestik, transformasi rantai pasok, dan perkembangan teknologi distribusi akan menjadi peluang yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang, PPI akan terus memperkuat strategi pemasaran dan distribusi, mengoptimalkan transformasi digital, serta meningkatkan efektivitas operasional dan *customer engagement*. Melalui langkah tersebut, Perseroan optimis dapat memperkuat daya saing, memperluas penetrasi pasar, dan menjaga pertumbuhan kinerja perusahaan secara berkelanjutan pada tahun 2026.

PPI views the business prospects in 2026 positively in line with the growth of national trade activities, increasing needs for distribution of strategic commodities, as well as strengthening the national food, agricultural and industrial sectors. The Company believes that domestic economic stability, supply chain transformation, and developments in distribution technology will be opportunities that support sustainable business growth.

In facing continuously developing business dynamics, PPI will continue to strengthen marketing and distribution strategies, optimize digital transformation, and increase operational effectiveness and customer engagement. Through these steps, the Company is optimistic that it can strengthen its competitiveness, expand market penetration, and maintain sustainable company performance growth in 2026.

Asumsi Makro 2026

2026 Macro Assumptions

Indikator Indicator	Nilai Value
Pertumbuhan ekonomi Economic growth	5,40%
Tingkat inflasi Inflation rate	2,50%
Tingkat Suku bunga rata-rata Average Interest Rate	6,9%
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Rupiah Exchange Rate to US Dollar	Rp16.500
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) Indonesian Crude Oil Price (USD/Barrel)	70
Lifting Minyak (ribu barel per hari) Oil Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	610
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	984

Asumsi Mikro 2026

2026 Micro Assumptions

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	RKAP 2025 2025 Annual Work Plan	Prognosa 2025 2025 Prognosis	RKAP 2026 2026 Annual Work Plan
Perdagangan Non Bahan Pokok (Rp Miliar) Non Staple Trade (Rp Billion)	651,1	625,84	743,8	882,2
Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	344,9	350,80	204,9	363,7
Produk Strategis Strategic Products	1.145,5	1.364,09	6.798,9	8.086,4
Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	22,1	41,17	65,7	114,3
Transisi Bisnis Business Transition	25,7	18,69	34,0	51,5
Anak Perusahaan Subsidiaries	910,1	1.167,80	976,5	1237,7

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information with Extraordinary and Rare Events

Tidak ada Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi pada tahun 2025 yang dapat/perlu dilaporkan.

There is no Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events in 2025 that can/needs to be reported.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku Terakhir

Changes in Accounting Policies Implemented by The Company in The Last Fiscal Year

Tidak terdapat standar baru, amandemen atau penyesuaian kebijakan akuntansi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tahun buku 2025.

There are no new standards, amendments or adjustments to accounting policies that will have a significant impact on the consolidated financial statements in the fiscal year 2025.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Subsequent Material Information and Facts After Accountant Reporting Date

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Perseroan.

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 43 dated January 26, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the appointment of the Company's President Director and Director of Finance, Risk Management, Human Resources and General Affairs.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054803 tanggal 18 Februari 2026.

The change was acknowledged and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Letter of Receipt of Notification of Changes in the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0054803 dated February 18, 2026.

Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Komisaris Utama Perseroan.

Based on the Shareholders' Resolution No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 dated May 21, 2026, the shareholders approved the appointment of the Company's President Commissioner.



Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah tanggal periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Based on the shareholders' resolution as described above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors subsequent to the reporting period is as follows:

	2026	2025	
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Komisaris Utama	Shahandra Hanitiyo	-	President Commissioner
Komisaris	Setiawan Wangsaatmaja	Setiawan Wangsaatmaja	Commissioner
Komisaris Independen	Gigih Guntoro	Gigih Guntoro	Independent Commissioner
Direksi Board of Directors			
Direktur Utama	Wahyu Sakti Priyonggo	Soegeng Hernowo	President Director
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	Oksan Omas M. Panggabean	Wien Irwanto	Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs
Direktur Komersial & Pengembangan	Edhy Rizwan	Edhy Rizwan	Director of Commercial & Development
Direktur Operasi	Noverita Anggraeny	Noverita Anggraeny	Director of Operations

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

Transaksi Material dengan Pihak Berelasi/ Afiliasi

Dalam aktivitas bisnisnya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang bukan merupakan transaksi benturan kepentingan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai persyaratan komersial normal, sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak berelasi.

Sifat hubungan dan sifat transaksi antara Perseroan dengan pihak berelasi tercantum pada tabel sebagai berikut:

Material Transactions with Related Parties/ Affiliates

In its business activities, the Company carries out various transactions with related parties which do not constitute conflict of interest transactions. All transactions with related parties are carried out fairly in accordance with normal commercial requirements, as are transactions with unrelated parties.

The nature of the relationship and nature of transactions between the Company and related parties are listed in the following table:

Sifat Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi

Nature of Relations and Transactions with Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Induk/Parent Entity	Pemberian Jasa Pergudangan, Logistik dan Dividen/ Rendering of Warehousing, Logistic Services and Dividend
PT Rajawali Nusindo	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Gieb Indonesia	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Berdikari	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Sang Hyang Seri	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Perikanan Indonesia	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Garam	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Jakarta Sereal	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT PLN Nusantara Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pertamina Petrochimal Trading	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
Badan Amil Zakat Nasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT ASDP Indonesia Ferry	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
Dinas Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
Ditjen Migas	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Pupuk Indonesia Niaga	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT LEN Industri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Dahana	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading



Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Wijaya Karya Beton	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Wijaya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Adhi Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Nindya Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Petrokimia Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Sriwidjaya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Iskandar Muda	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Krakatau Pipe Industries	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
Perum BULOG	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Petrosida Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of Warehousing and Logistic Services
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Perijinan untuk Kawasan Perumahan/ Permission for Residential Area
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas, Deposito dan Pinjaman Bank/ Placement of Cash and Cash Equivalents, Time Deposits and Bank Loans

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas/ Placement of Cash and Cash Equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank/ Placement of Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank/ Placement of Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas/ Placement of Cash and Cash Equivalents

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

Balances and Related Party Transactions

In its business activities, the Group carries out transactions with related parties. Group Policy stipulates that the pricing for these transactions is the same as transactions carried out with third parties. The following are significant agreements/transactions with related parties:

(dalam Rupiah/ in Rupiah)		
Pihak Berelasi Related Parties	2025	2024
Gaji dan Imbalan Jangka Pendek Salaries and Rewards Short-Terms		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1.773.414.000	4.369.344.559
Direksi Board of Directors	6.987.692.260	9.824.600.231
Jumlah Total	8.761.106.260	14.193.944.790
Pendapatan Revenues		
PT Pabrik Gula Rajawali I	14.028.070.800	4.838.450.000
PT PG Candi Baru	10.312.116.854	-
PT Pabrik Gula Rajawali II	2.736.819.808	11.388.266.605
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.511.709.081	-
BUMDES Jaya Mulya	1.315.680.512	-
RSUD Arifin Achmad	1.217.493.901	-
BUMDES Tiroso	1.102.835.184	-
PT Rajawali Nusindo	166.352.830	5.810.864.339
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1.710.000	232.690.746.478
Perum BULOG	-	162.660.920.478
PT Petrokimia Gresik	-	146.319.325.950
PT Pupuk Kalimantan Timur	-	111.488.589.845
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	-	47.715.731.882
PT Pupuk Iskandar Muda	-	44.059.398.324
PT Pupuk Kujang	-	17.542.891.533
PT Jakarta Sereal	-	16.789.599.100



(dalam Rupiah/ in Rupiah)

Pihak Berelasi Related Parties	2025	2024
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	-	8.770.697.500
PT PLN Nusantara Power	-	5.882.571.416
PT Wijaya Karya Beton	-	5.867.303.474
Badan Amil Zakat Nasional	-	2.685.618.137
PT ASDP Indonesia Ferry	-	2.003.350.000
Dinas Kesehatan	-	3.111.199.518
PT Dahana	-	1.969.954.858
PT Adhi Karya	-	686.243.735
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	-	252.600.000
PT Perkebunan Nusantara VIII	-	252.600.000
PT Aneka Tambang, Tbk	-	107.340.000
PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)	-	107.340.000
Lainnya (dibawah Rp1 milyar) Others (Below Rp1 billion)	-	32.500.000
Jumlah Pendapatan Total Revenues	36.103.968.894	16.118.532.419
Jumlah Pendapatan Pihak Berelasi Total Revenues from Related Parties	68.496.757.864	848.980.850.137
Pendapatan Usaha Revenues	6.950.154.356.804	3.099.400.878.060
Persentase Percentage	0,99%	27,39%
Pembelian Purchase		
Pupuk dan Pestisida Fertilizer and Pesticides		
PT Pupuk Kalimantan Timur	206.560.885.261	179.618.074.503
PT Petro Kimia Gresik	178.233.896.983	103.742.426.093
PT Pupuk Kujang	42.336.359.658	32.850.615.619
PT Biofarma (Persero)	73.977.324.202	29.099.139.166
PT Pupuk Sriwidjaya	28.393.813.281	24.882.353.251
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	16.904.096.275	23.304.924.630
PT Pupuk Iskandar Muda	35.820.721.426	22.446.201.714
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	22.586.082.158	20.977.139.948
Perum Bulog	6.815.679.461	1.435.000.000
PT Petrosida Gresik	2.695.905.073	2.024.668.000
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	4.928.770.000	-
PT Geo Dipa Energi (Persero)	1.106.200.000	-
PT Rajawali Nusindo	487.887.169	160.193.110
PT Pupuk Indonesia	221.879.071	81.862.053
PT Pupuk Indonesia Niaga	4.849.770	305.166.840
Jumlah Pembelian dari Pihak Berelasi Total Purchase from Related Parties	621.074.349.788	440.927.764.927
Jumlah Pembelian Total Purchase	1.217.166.410.280	1.176.801.046.490
Persentase Percentage	51,03%	37,47%
Management Fee		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	26.676.871.603	7.978.194.506
Jumlah Total	26.676.871.603	7.978.194.506

(dalam Rupiah/ in Rupiah)

Pihak Berelasi Related Parties	2025	2024
Aset Assets		
Kas dan setara kas Cash and equivalents		
Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.882.635.313	23.011.319.203
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	73.216.811.102	65.388.543.550
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.159.823.749	17.433.467.961
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	115.810.824	29.466.481.049
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	28.260.067	-
Subjumlah Subtotal	187.403.341.055	135.299.811.763
USD		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	208.851.990	547.730
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.203.527	185.557.566
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.039.682	178.441.733
Subjumlah Subtotal	250.095.199	364.547.029
Deposito berjangka Time Deposits		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	79.040.000
Subjumlah Subtotal	-	79.040.000
Jumlah Total	187.653.436.254	135.743.398.792
Piutang Usaha Trade Receivables		
Ditjen Migas	88.669.740.008	88.669.740.008
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	27.668.796.210	34.326.702.928
PT Petrokimia Gresik	39.632.890.138	17.976.810.469
PT Pupuk Kalimantan Timur	38.799.674.532	32.674.857.542
PT Pupuk Iskandar Muda	20.951.782.916	11.918.161.330
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20.309.628.728	12.960.732.438
PT Sang Hyang Seri	9.696.970.098	10.778.763.677
PT Pabrik Gula Candi Baru	8.169.393.190	2.992.968.260
PT Pupuk Kujang	8.384.301.023	8.664.664.076
PT Timah Tbk	4.063.888.335	4.343.125.543
PT Len Industri (Persero)	4.091.499.803	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.647.499.712	-
PT Perkebunan Nusantara	2.518.569.000	-
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.310.320.749	-
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2.151.097.786	-
Perum BULOG	5.937.562.861	-
PT Pabrik Gula Rajawali I	-	4.776.815.000
Lainnya (dibawah Rp 2 Milyar)	28.522.995.427	10.161.266.067
Jumlah Total	315.526.610.516	240.244.607.338



(dalam Rupiah/ in Rupiah)

Pihak Berelasi Related Parties	2025	2024
Piutang Lain-Lain Other Receivables		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	23.597.881.125	32.830.519.054
Investasi Pada Saham Investment in Shares		
PT Mitra BUMDes Nusantara	3.704.654.645	4.249.798.487
PT Manajemen CBT Nusantara	250.000.000	250.000.000
Jumlah Total	3.954.654.645	4.499.798.487
Jumlah Aset Total Assets	530.732.582.541	413.318.323.671
Persentase Percentage	4,34%	8,29%
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities		
Utang Usaha Trade Payables		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	39.983.306.148	11.355.443.331
PT Bio Farma (Persero)	15.638.649.319	4.658.169.773
PT Nindya Karya	10.422.120.944	14.575.257.633
PT Pupuk Kalimantan Timur	5.073.765.116	2.158.037.383
PT Petrokimia Gresik	4.832.051.256	2.716.638.718
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	4.313.474.675	-
Perum Bulog	2.126.076.092	-
PT PG Rajawali II	-	9.215.594.400
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	-	1.615.253.422
PT Petrosida Gresik	-	511.710.011
Lainnya (saldo dibawah Rp2 milyar) Others (balance below Rp2 billion)	7.629.060.174	9.556.678.979
Jumlah Total	90.018.503.724	56.362.783.650
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities		
PPA Finance	10.766.418.510	12.228.466.570
Jumlah Total	10.766.418.510	12.228.466.570
Utang Bank - Jangka Pendek Short-Term Bank Loans		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79.700.000.000	83.776.640.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	56.118.465.953
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	69.701.999.997
Jumlah Total	79.700.000.000	209.597.105.950
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities		
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	23.687.544.118	23.687.544.118
Jumlah Total	23.687.544.118	23.687.544.118
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	204.172.466.352	301.875.900.288
Persentase Percentage	12,86%	21,80%

Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Information in The Realization of Use of Public Offering Proceeds

PPI bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sepanjang tahun 2025.

PPI is not a public company and has not yet conducted a public offering so there is no information regarding the total acquisition of funds, plans for using funds, details of the use of funds, the balance of funds on the date of approval by the GMS on the realization of the use of funds from the public offering throughout 2025.

Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara

Taxation and Contributions to The State

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPI berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

Responsibility for tax payment obligations is a reflection of state obligations in the field of taxation in national development. Therefore, PPI is committed to fulfilling its obligations to pay taxes, as a Taxpayer and as a Tax Withholder.

Sampai dengan Desember tahun 2025, Perseroan telah memberikan kontribusi pajak ke Kas Negara sebesar Rp20,79 Miliar atau menurun 3,61% dibandingkan dengan kontribusi pajak periode yang sama tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

As of December 2025, the Company has made a tax contribution to the State Treasury amounting to Rp20.79 billion or a decrease of 3.61% compared to the tax contribution for the same period in 2024, with the following details:

Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah			
No	Uraian Description	31-Dec 2025	31-Dec 2024
1	PPh 21 Income Tax Article 21	334,4	6.704,9
2	PPh 22 Wapu Income Tax Article 22 Wapu	600,1	4.191,0
3	PPh 22 Import Income Tax Article 22 Import	-	1.590,0
4	PPh 23 Income Tax Article 23	411,0	456,8
5	PPh 4(2) Final Income Tax Article 4 (2) Final	95,0	687,5
6	PPh 25 Masa Income Tax Article 25 Period	9.148,1	6.479,9
7	PPh Ps 29 Income Tax Article 29	-	-
Jumlah Total		10.588,5	20.110,1
1	PPN Wapu Value-Added Tax Wapu	3.588,0	16.497,6
2	PPN Keluaran Outgoing Value-Added Tax	6.026,6	39.508,1
3	PPN Masukan Incoming Value-Added Tax	(5.728,1)	(19.754,1)
PK > PM = KB atau PM > PK = (LB)		298,5	19.754,1
Jumlah Total		3.886,5	36.251,7



Dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

No	Uraian Description	31-Dec 2025	31-Dec 2024
1	Bea masuk dan Cukai Customs	1.279,9	9.471,7
2	Nilai Pajak Lain Other Taxes Values	-	
Jumlah Total		1.279,9	9.471,7
PAJAK DAERAH: Regional Tax			
1	PBB Property Tax	5.038,3	4.901,0
Jumlah Total		20.793,2	71.365,9

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Business Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2025 Perseroan tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal sehingga tidak ada informasi yang dapat diungkapkan pada laporan ini.

In 2025, the Company did not undertake any investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions, and/or debt/capital restructuring, and therefore, no information can be disclosed in this report.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Changes in Legal Regulations with Significant Influence on The Company

Pada tahun 2025 tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

In 2025 there will be no laws and regulations that will have a significant impact on the Company's business activities.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Perseroan

Impact of Price Changes on The Company

Tidak ada perubahan harga yang berdampak signifikan terhadap Perseroan pada tahun 2025.

There are no price changes that will have a significant impact on the Company in 2025.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP)

Stock Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by The Company (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2025 PPI belum memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen. Oleh karenanya, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise* di dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

As end of 2025, PPI does not yet have a share ownership program for employees and/or management. Therefore, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, requirements for eligible employees and/or management as well as exercise prices in this 2025 Annual Report.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Hingga tahun 2025, Perseroan terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi dan persaingan industri yang semakin berkembang. Perseroan secara konsisten memperkuat fundamental bisnis melalui optimalisasi operasional, penguatan pengelolaan keuangan dan arus kas, serta peningkatan efektivitas pengelolaan aset guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

As of 2025, the Company continues to demonstrate a strong commitment to maintaining business sustainability amidst growing economic dynamics and industrial competition. The Company consistently strengthens business fundamentals through operational optimization, strengthening financial and cash flow management, as well as increasing the effectiveness of asset management to support sustainable business growth.

Manajemen juga secara aktif melakukan evaluasi dan penyempurnaan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing Perseroan, termasuk melalui penguatan tata kelola perusahaan, transformasi distribusi dan digitalisasi proses bisnis, peningkatan produktivitas, serta pengembangan peluang usaha baru yang selaras dengan kebutuhan pasar dan arah perkembangan industri perdagangan nasional.

Management is also actively evaluating and refining business strategies to increase the Company's competitiveness, including through strengthening corporate governance, distributing distribution and digitizing business processes, increasing productivity, as well as developing new business opportunities that are in line with market needs and the direction of development of the national trade industry.

Dengan pengalaman operasional yang dimiliki, dukungan jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, Perseroan optimistis dapat menjaga kesinambungan usaha dan terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Keyakinan atas kelangsungan usaha tersebut didukung oleh fondasi operasional yang solid serta implementasi berbagai inisiatif strategis yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun berjalan.

With its operational experience, extensive distribution network support, and ability to adapt to changing market conditions, the Company is optimistic that it can maintain business continuity and continue to create sustainable added value for all stakeholders. Confidence in business continuity is supported by a solid operational foundation and the implementation of various strategic initiatives carried out consistently throughout the year.



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORTS REVIEW







Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, dinamika pasar yang berubah, dan praktik bisnis yang terus berkembang PPI dituntut tetap gesit dan adaptif untuk mempertahankan daya saingnya. Untuk secara efektif menghadapi tantangan eksternal dan berkembang di lanskap yang semakin kompetitif, Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan yang muncul dan merangkul inovasi. Dalam hal ini, inisiatif Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran penting dalam membekali karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas dunia bisnis modern dan untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang Perusahaan.

Seiring dengan terus berkembangnya praktik bisnis sebagai respons terhadap pergeseran ekonomi, perkembangan regulasi, dan metodologi yang muncul, Perusahaan menerapkan program pengembangan sumber daya manusia yang tepat yang dirancang untuk memperkuat kemampuan dan kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Berdasarkan kebutuhan pelatihan yang teridentifikasi, Perusahaan menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang utama seperti transformasi digital, analitik data, dan keunggulan layanan pelanggan. Melalui inisiatif ini, Perusahaan juga berupaya untuk menumbuhkan budaya peningkatan berkelanjutan, mendorong karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, beradaptasi dengan tantangan baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan organisasi.

Kebijakan Pengembangan SDM

Program pengembangan sumber daya manusia PPI dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang komprehensif dan dipandu oleh nilai-nilai inti Perusahaan integritas, disiplin, fleksibilitas, kerja tim, dan peningkatan berkelanjutan. Nilai-nilai ini tidak hanya diartikulasikan sebagai prinsip panduan tetapi juga tertanam dalam praktik kerja sehari-hari dan perilaku organisasi di semua tingkatan Perusahaan. Melalui penerapan nilai-nilai ini secara konsisten, PPI memperkuat kesiapan tenaga kerjanya untuk menanggapi tantangan bisnis yang muncul dan beroperasi secara efektif dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif. Pendekatan ini memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk peran mereka tetapi juga karakter dan pola pikir yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang Perusahaan.

In today's dynamic business environment —marked by rapid technological advancement, shifting market dynamics, and evolving business practices — PPI must remain agile and adaptive to sustain its competitiveness. To effectively navigate external challenges and thrive in an increasingly competitive landscape, the Company requires a workforce capable of responding swiftly to emerging changes and embracing innovation. In this regard, Human Resource Development (HRD) initiatives play a crucial role in equipping employees with the competencies needed to address the complexities of the modern business world and to support the Company's long-term strategic objectives.

As business practices continue to evolve in response to economic shifts, regulatory developments, and emerging methodologies, the Company implements appropriate human resource development programs designed to strengthen employees' capabilities and readiness for change. Based on identified training needs, the Company provides a range of education and training programs in key areas such as digital transformation, data analytics, and customer service excellence. Through these initiatives, the Company also seeks to cultivate a culture of continuous improvement, encouraging employees to enhance their skills, adapt to new challenges, and contribute to the sustainable growth of the organization.

Human Resource Development Policy

PPI's human resource development program is designed based on a comprehensive needs analysis and guided by the Company's core values—integrity, discipline, flexibility, teamwork, and continuous improvement. These values are not only articulated as guiding principles but are also embedded in daily work practices and organizational behavior across all levels of the Company. Through the consistent application of these values, PPI strengthens the readiness of its workforce to respond to emerging business challenges and to operate effectively in an increasingly dynamic and competitive business environment. This approach ensures that employees possess not only the technical competencies required for their roles but also the character and mindset necessary to support the Company's long-term sustainability.

Dalam mendukung pencapaian tujuan korporatnya, PPI memastikan bahwa peran dan tanggung jawab karyawan selaras dengan arah strategis keseluruhan Perusahaan. Setiap fungsi dalam organisasi disusun untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap implementasi strategi bisnis Perusahaan, sehingga menciptakan keselarasan yang kuat antara kinerja individu dan tujuan organisasi. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab karyawan dengan prioritas strategis Perusahaan, PPI memastikan bahwa aktivitas operasional sehari-hari secara langsung berkontribusi pada realisasi target kinerja Perusahaan sebagaimana ditentukan oleh para pemegang sahamnya.

PPI juga menyadari bahwa motivasi sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menjaga produktivitas dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Perusahaan terus menerapkan program-program sistematis dan intensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan. Inisiatif ini mencakup berbagai program pelatihan, aktivitas pengembangan profesional, dan *platform* berbagi pengetahuan yang dirancang untuk memperkuat keahlian teknis dan kemampuan kepemimpinan. Melalui program-program ini, PPI berupaya untuk menumbuhkan budaya organisasi yang berorientasi pada pembelajaran yang mendorong karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan mereka dan beradaptasi dengan tuntutan industri yang terus berkembang.

Selain pengembangan kompetensi, PPI menerapkan sistem pengembangan karier terstruktur yang menyediakan jalur yang jelas untuk kemajuan karyawan di dalam organisasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kemajuan berdasarkan prestasi sekaligus memungkinkan karyawan untuk memaksimalkan potensi mereka. Dengan menawarkan peluang karier yang terdefinisi dengan baik, PPI bertujuan untuk memperkuat keterlibatan karyawan, mempertahankan talenta berkinerja tinggi, dan membina pemimpin masa depan yang akan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan.

Melalui inisiatif komprehensif ini, PPI menegaskan kembali komitmennya untuk secara konsisten mengelola dan mengembangkan sumber daya manusianya sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Dengan berinvestasi dalam pertumbuhan dan kesiapan tenaga kerjanya, PPI bertujuan untuk membekali karyawannya dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi industri. Pada akhirnya, upaya-upaya ini mendukung Perusahaan dalam mempertahankan keunggulan operasional dan mewujudkan tujuan strategis jangka panjangnya.

In supporting the achievement of corporate objectives, PPI ensures that the roles and responsibilities of employees are closely aligned with the Company's overall strategic direction. Each function within the organization is structured to contribute meaningfully to the implementation of the Company's business strategy, thereby creating strong alignment between individual performance and organizational goals. By integrating employee responsibilities with the Company's strategic priorities, PPI ensures that daily operational activities directly contribute to the realization of the Company's performance targets as determined by shareholders.

PPI also recognizes that human capital motivation plays a critical role in maintaining productivity and organizational performance. Accordingly, the Company continuously implements systematic and intensive programs aimed at enhancing employee capacity and competency. These initiatives include various training programs, professional development activities, and knowledge-sharing platforms designed to strengthen both technical expertise and leadership capabilities. Through these programs, PPI seeks to foster a learning-oriented organizational culture that encourages employees to continuously improve their skills and adapt to evolving industry demands.

In addition to competency development, PPI implements a structured career development system that provides clear pathways for employee progression within the organization. This system is designed to ensure fairness, transparency, and merit-based advancement while enabling employees to maximize their potential. By offering well-defined career opportunities, PPI aims to strengthen employee engagement, retain high-performing talent, and cultivate future leaders who will contribute to the Company's sustainable growth.

Through these comprehensive initiatives, PPI reaffirms its commitment to consistently managing and developing its human resources in alignment with the Company's vision and mission. By investing in the growth and readiness of its workforce, PPI aims to equip its employees with the capabilities required to navigate the challenges of globalization and industry transformation. Ultimately, these efforts support the Company in sustaining operational excellence and realizing its long-term strategic objectives.



Landasan Hukum Pengelolaan SDM

Kebijakan mengenai pengelolaan SDM di PPI berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUTK);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan Perdagangan Indonesia PT (Persero) dengan Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Periode 2021-2023;
5. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 tentang Penerimaan Pegawai;
6. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 tentang Penilaian Kinerja Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Kebijakan pengelolaan SDM menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penerapan reward and punishment sampai dengan program pensiun.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Divisi SDM menyusun rencana pengembangan dan strategi pengelolaan SDM, serta melaksanakan program SDM untuk mencapai tujuan PPI.

Legal Basis for HR Management

The policy regarding human resources management in PPI is based on the following regulations:

1. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUTK);
2. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment;
3. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 36 of 2021 concerning Wages;
4. Collective Labor Agreement (PKB) between Perusahaan Perdagangan Indonesia PT (Persero) and the Labor Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) for the Period 2021-2023;
5. Decision of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 regarding Employee Recruitment;
6. Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 concerning Guidelines for the Implementation of Education and Training at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 concerning Performance Appraisal of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Employees.

The human resources management policy serves as a guideline for the implementation of human resources planning, recruitment, competence development, performance appraisal, application of rewards and punishments, and retirement programs.

Scope and Responsibilities

The scope and responsibilities of the Human Resources Division include formulating development plans and management strategies for human resources, as well as implementing human resources programs to achieve PPI's objectives.

Struktur Organisasi dalam Pengelolaan SDM

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 06/DU/SKD/PPI/II/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tanggal 12 Februari 2025, jalannya pengelolaan program pengembangan dan strategi pengelolaan SDM di PPI berada di bawah tanggung jawab Divisi Pengembangan SDM dan Umum. Secara struktural, divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Tugas dan tanggung jawab Divisi SDM dan Umum mencakup perencanaan kebijakan, hingga pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.

Per 31 Desember 2025 jumlah personil Divisi SDM dan Umum sebanyak 30 orang .

Berikut adalah struktur organisasi pengelola SDM di PPI:

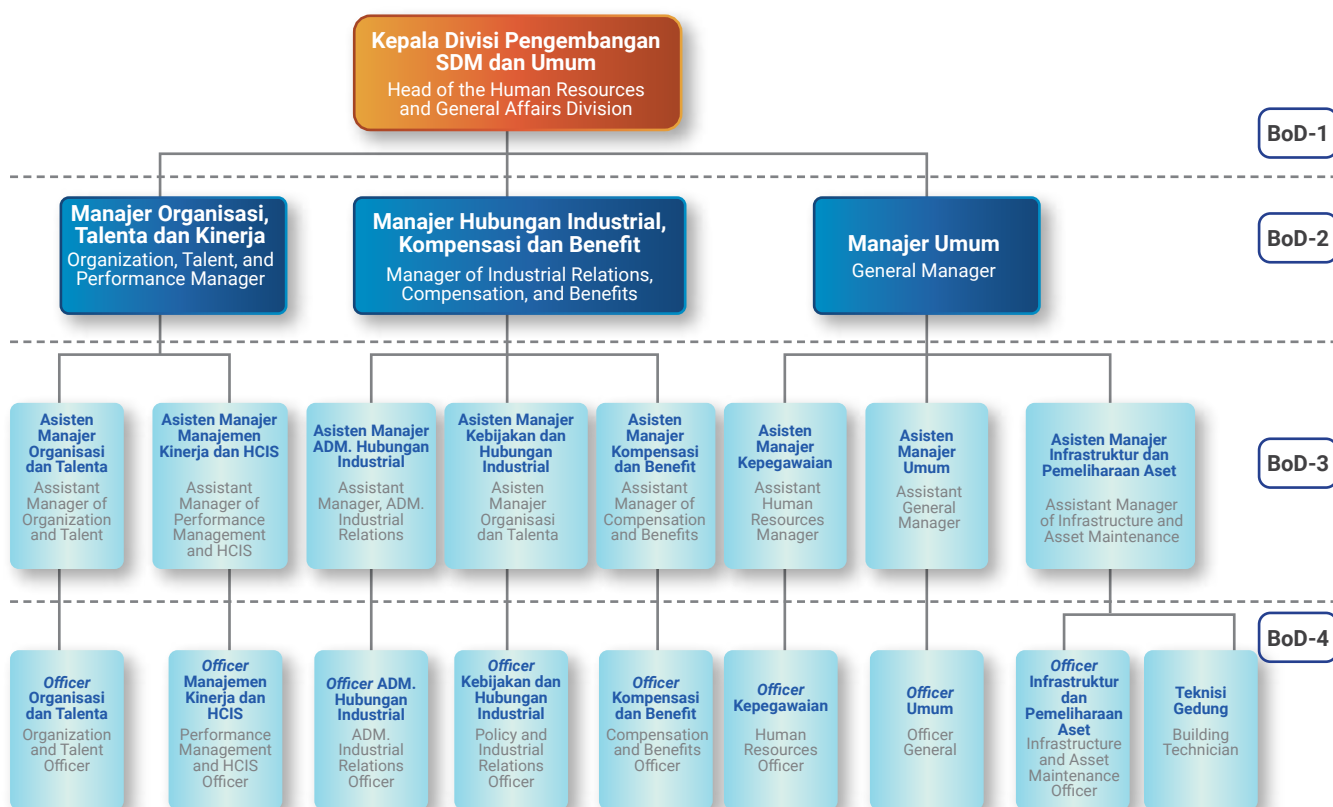
Organization Structure in Human Resources Management

In accordance with Director's Decree No. 06/DU/SKD/PPI/II/2025 regarding the Stipulation of the Organization Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dated February 12, 2025, the management of the human resources development program and management strategy at PPI falls under the responsibility of the Human Resources and General Affairs Division. Structurally, this division reports directly to the Director of Finance, Risk Management, Human Resources, and General Affairs.

The tasks and responsibilities of the Human Resources and General Affairs Division include policy planning and the implementation of human resources development programs aimed at achieving the Company's goals and objectives.

As of December 31, 2025, the number of personnel in the Human Resources and General Affairs Division comprising 30 employees.

Below is the organizational structure of the human resources management at PPI:





Tata Kelola SDM

Perencanaan SDM

Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, keberadaan rencana pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif telah menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi. Rencana tersebut memainkan peran penting dalam membina tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga adaptif dan sangat termotivasi, sehingga memungkinkan Perusahaan untuk menavigasi kompleksitas lanskap bisnis saat ini. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berwawasan ke depan terhadap pengembangan modal manusia, organisasi dapat memperkuat kapasitas mereka untuk merespons secara efektif terhadap perubahan kondisi pasar, kemajuan teknologi, dan praktik bisnis yang berkembang.

Memprioritaskan pertumbuhan dan pengembangan karyawan memberikan manfaat signifikan yang melampaui peningkatan kompetensi individu. Rencana pengembangan sumber daya manusia yang dirancang dengan baik meningkatkan kinerja karyawan dengan membekali personel dengan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan peran mereka secara efektif. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut, investasi berkelanjutan dalam pengembangan karyawan mendorong terciptanya budaya pembelajaran berkelanjutan di dalam organisasi, mendorong inovasi, kreativitas, dan generasi ide-ide baru yang mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Menyadari pentingnya strategis modal manusia, PPI secara konsisten memberikan penekanan kuat pada implementasi perencanaan sumber daya manusia yang tepat dan terstruktur dengan baik. Inisiatif ini bertujuan untuk membina karyawan yang berbakat, kompeten, dan profesional yang mampu mendukung kebutuhan operasional dan strategis Perusahaan. Perencanaan SDM yang efektif merupakan komponen penting dari strategi bisnis PPI, memastikan bahwa Perusahaan siap untuk mencapai visi, misi, dan target kinerja tahunannya sambil mempertahankan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. Dengan menyelaraskan perencanaan tenaga kerja dengan proyeksi pertumbuhan bisnis, PPI memastikan ketersediaan talenta yang tepat pada waktu yang tepat untuk mendukung perkembangan Perusahaan.

Dalam penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, PPI berkoordinasi erat dengan Departemen SDM dan Divisi Umum untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

HR Governance

HR Planning

In the increasingly dynamic and competitive business environment, the presence of a comprehensive human resource development plan has become a fundamental necessity for organizations. Such a plan plays a vital role in cultivating a workforce that is not only skilled but also adaptable and highly motivated, enabling the Company to navigate the complexities of today's business landscape. Through a structured and forward-looking approach to human capital development, organizations can strengthen their capacity to respond effectively to changing market conditions, technological advancements, and evolving business practices.

Prioritizing employee growth and development provides significant benefits that extend beyond the enhancement of individual competencies. A well-designed human resource development plan improves employee performance by equipping personnel with the knowledge, technical capabilities, and professional skills required to perform their roles effectively. This ultimately contributes to increased productivity, operational efficiency, and the achievement of organizational objectives. Furthermore, sustained investment in employee development encourages the creation of a culture of continuous learning within the organization, fostering innovation, creativity, and the generation of new ideas that support long-term business growth.

Recognizing the strategic importance of human capital, PPI consistently places strong emphasis on the implementation of precise and well-structured human resource planning. This initiative is aimed at cultivating talented, competent, and professional employees who are capable of supporting the Company's operational and strategic needs. Effective HR planning serves as an essential component of PPI's business strategy, ensuring that the Company is well-equipped to achieve its vision, mission, and annual performance targets while maintaining the sustainability of its business in the long term. By aligning workforce planning with projected business growth, PPI ensures the availability of the right talent at the right time to support the Company's development.

In the preparation of its human resource development planning, PPI coordinates closely with the HR and General Division Department to ensure a comprehensive and integrated approach. The outcome of this planning

Hasil dari proses perencanaan ini adalah identifikasi kebutuhan tenaga kerja yang terstruktur, yang berfungsi sebagai referensi utama untuk implementasi kegiatan perekrutan karyawan. Proses ini juga memfasilitasi penempatan tenaga kerja yang lebih akurat dan efektif, memastikan bahwa karyawan ditempatkan pada peran yang sesuai dengan kompetensi mereka dan kebutuhan operasional Perusahaan. Melalui pendekatan sistematis ini, PPI berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

Pengelolaan SDM

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) melakukan evaluasi kebutuhan tenaga kerja selama lima tahun, baik dari segi kuantitas maupun keterampilan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam studi kebutuhan sumber daya manusia meliputi anggaran untuk kebutuhan sumber daya manusia, strategi dan kemajuan PPI yang selaras dengan strategi bisnis, jumlah karyawan yang pensiun, sifat pekerjaan, dan ketersediaan keuangan.

Dalam melakukan evaluasi, Perusahaan secara konsisten mempertimbangkan kebutuhan kapasitas tenaga kerja dengan menggunakan metode yang membandingkan jumlah karyawan dengan target penjualan yang diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan, yang mencakup karyawan tetap dan tidak tetap.

Dalam menilai kebutuhan ini, tenaga kerja dikategorikan berdasarkan tingkat jabatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, fungsi pekerjaan, status karyawan, dan masa kerja. Kebutuhan tenaga kerja jangka pendek disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan struktur pekerjaan yang ada.

Rekrutmen Karyawan

Sepanjang sejarah perusahaannya, PPI selalu berupaya merekrut individu berkualitas tinggi yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kompetensi yang unggul. PPI merasa bahwa hal ini sangat penting bagi kinerja dan ketahanan perusahaan dalam iklim bisnis yang dinamis saat ini. Para profesional ini tidak hanya membawa bakat dan keahlian yang hebat, tetapi juga menunjukkan ketangkasan dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menangani tren pasar yang berubah, terobosan teknologi, dan prioritas yang bergeser. Dengan mencari orang-orang dengan rekam jejak adaptasi, ketahanan, dan keinginan untuk merangkul inovasi, PPI dapat menemukan talenta yang dibutuhkan untuk bertahan dalam lanskap bisnis yang selalu berubah.

process is a structured identification of workforce requirements, which serves as a key reference for the implementation of employee recruitment activities. This process also facilitates more accurate and effective workforce placement, ensuring that employees are positioned in roles that align with their competencies and the Company's operational needs. Through this systematic approach, PPI strives to optimize the utilization of its human capital while supporting the Company's sustainable growth.

HR Management

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) conducts a five-year examination of workforce needs, both in terms of quantity and skills. Factors addressed in the study of human resource demands include the budget for human resource requirements, PPI's strategies and advancements matched with the business strategy, the number of retiring employees, the nature of the work, and financial availability.

When conducting evaluations, the Company consistently considers labor capacity needs by using a method that compares the number of employees to sales targets outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long Term Plan (RJP), which includes both permanent and non-permanent employees.

In assessing these needs, the workforce is categorized based on job level, education, age, gender, job function, employee status, and length of service. Short-term workforce needs are adjusted according to organizational requirements and existing job structures.

Employee Recruitment

Throughout its company history, PPI has constantly sought to hire high-quality individuals who can adapt to change and have excellent competencies. PPI feels that it is critical to the Company's performance and resilience in today's dynamic business climate. These professionals not only bring great talents and expertise to the table, but also show the agility and flexibility required to handle changing market trends, technological breakthroughs, and shifting priorities. By looking for people with a track record of adaptation, resilience, and a desire to embrace innovation, PPI may find the talent it needs to survive in an ever-changing business landscape.



Selain itu, karyawan dengan kompetensi yang unggul tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi tetapi juga menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan mereka, menumbuhkan budaya perbaikan dan keunggulan yang berkelanjutan di tempat kerja. Oleh karena itu, berinvestasi dalam perekrutan talenta berkualitas tinggi bukan hanya sebuah keharusan strategis, tetapi juga merupakan pendorong utama kesuksesan dan daya saing jangka panjang.

PPI juga selalu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kewajaran dalam sistem rekrutmen, serta mempertimbangkan kompetensi calon karyawan. Mengadopsi nilai-nilai transparansi, kesetaraan, dan ketidakberpihakan dalam proses rekrutmen menumbuhkan lingkungan yang adil dan inklusif, menarik talenta yang beragam, serta meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan di antara para karyawan.

Program rekrutmen PPI dilaksanakan secara menyeluruh, di mana setiap calon karyawan akan dievaluasi secara ketat dari berbagai aspek latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, media sosial, dan kesehatan. Seleksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan.

PPI melakukan perencanaan SDM untuk mengetahui berapa banyak karyawan baru yang dibutuhkan dan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi kosong. Hal ini bertujuan agar strategi bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik di jangka pendek dan panjang.

Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hal ini, Divisi SDM dan Umum bekerja sama dengan unit-unit kerja terkait untuk memetakan kebutuhan karyawan secara lengkap.

PPI berfokus penjangkaran karyawan dari internal Perusahaan terlebih dahulu melalui promosi atau mutasi dengan memerhatikan kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan. Namun, PPI juga membuka kesempatan untuk merekrut melalui jalur *fresh graduate* dan profesional (*pro-hire*).

Keputusan untuk menerima atau menolak karyawan didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pada setiap kandidat, dengan mempertimbangkan kriteria yang diperlukan untuk mengisi posisi *vacant*.

Setelah dipilih, kandidat karyawan PPI akan diberikan program pengenalan (*induction program*) untuk memperkenalkan siklus bisnis Perusahaan, nilai-nilai budaya dan tata kelola Perusahaan, peluang pengembangan karier, serta tugas dan tanggung jawab mereka sebagai karyawan di PPI.

Moreover, employees with superior competencies not only contribute to the achievement of organizational goals but also inspire and motivate their peers, fostering a culture of continuous improvement and excellence within the workplace. Thus, investing in the recruitment of high-quality talent is not just a strategic imperative but a fundamental driver of long-term success and competitiveness.

PPI also maintains the values of transparency, equality, and impartiality in its recruitment process, taking into account the competencies of potential candidates. Adopting the values of transparency, equality, and impartiality in the recruitment process fosters a fair and inclusive environment, attracting diverse talent and promoting trust and loyalty among employees.

PPI's recruitment program is conducted comprehensively, where each prospective employee is rigorously evaluated based on various aspects including background, education, work experience, social media presence, and health. Selection is made according to the required quantity and qualifications.

PPI conducts human resource planning to determine the number of new employees needed and the criteria to fill vacant positions. This is aimed at ensuring the company's business strategy runs smoothly in both the short and long term.

To gain a complete understanding of this, the HR and General Affairs Division collaborates with relevant units to map out the complete employee requirements.

PPI primarily focuses on sourcing employees internally through promotions or transfers, considering the required quality and capabilities. However, PPI also opens opportunities for recruitment through fresh graduate and professional channels (*pro-hire*).

Decisions to accept or reject employees are based on comprehensive evaluations of each candidate, considering the criteria needed to fill vacant positions.

Once selected, PPI employee candidates are provided with an induction program to introduce the company's business cycle, cultural values, governance, career development opportunities, as well as their roles and responsibilities as employees at PPI.

Sepanjang tahun 2025, PPI merekrut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karyawan baru. Jumlah tersebut telah memadai dengan kebutuhan Perseroan saat ini.

Kebijakan Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

PPI berkeyakinan bahwa program pengembangan karier karyawan merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dihindari di dalam proses pengelolaan SDM agar regenerasi organisasi tetap terjaga. Oleh sebab itu, PPI telah menerapkan sebuah sistem manajemen pengembangan karier berjenjang (*tier-system*) sebagai salah satu upaya retensi yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan berkualitas menempati berbagai posisi strategis di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan mengacu pada Sistem BSC (*Balance Score Card*) untuk setiap tingkatan, mulai dari KPI korporat hingga KPI individu. Selanjutnya hasil penilaian KPI tersebut digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam memberikan *reward and punishment* dan juga digunakan sebagai bahan penilaian dalam menentukan jenjang karier karyawan (*carrier planning*) mengacu pada kompetensi serta bakat yang dimiliki karyawan sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

PPI membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan agar mereka termotivasi untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu di PPI sebagai bagian dari pengembangan karier masing-masing.

Jumlah Karyawan

Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan PPI tercatat sebanyak 1.399 orang, termasuk 893 orang yang diperbantukan ke anak perusahaan. Jumlah karyawan PPI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.396 orang.

Throughout the year 2025, PPI recruited a total of 29 (twenty nine) new employees. This number adequately meets the company's current needs.

Performance Appraisal and Career Development Policy

PPI believes that employee career development programs are one of the important things that cannot be avoided in the HR management process so that organizational regeneration is maintained. Therefore, PPI has implemented a tier-system career development management system as one of the retention efforts aimed at preparing qualified employees to occupy various strategic positions in the future.

Employee performance assessment is conducted by referring to the BSC (*Balance Score Card*) System for each level, ranging from corporate KPIs to individual KPIs. Furthermore, the results of the KPI assessment are used by management as a basis for providing rewards and punishments and are also used as an assessment material in determining employee career paths (*carrier planning*) referring to the competencies and talents of employees so as to create quality human resources and in accordance with the needs of the Company.

PPI provides equal opportunities and opportunities to every employee so that they are motivated to continue to develop their potential so that they can occupy a certain position or position in PPI as part of their respective career development.

Number of Employees

As of December 31, 2025, the number of PPI employees was 1.399 people, including 893 people who were seconded to subsidiaries. The number of PPI employees has increased/decreased compared to the previous year of 1.396 people.



Uraian lengkap mengenai demografi karyawan PPI selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

A complete description of the demographics of PPI employees for the last 3 (three) years can be seen in the following tables:

Jumlah Karyawan | Number of Employees

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Jumlah Karyawan Number of Employees	506	893	1.399	1.396	1.298

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan | Employee Composition by Position

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Kepala Divisi Head of Division	20	15	35	32	31
Kepala Cabang Head of Branch	28	27	55	44	50
Deputy	6	-	6	7	-
Fungsional Utama Main Functional	2	-	2	6	4
Spesialis Specialist	-	21	21	36	-
Spesialis Utama Senior Specialist	-	-	-	-	-
Manager Manager	54	55	109	100	107
Fungsional Madya Intermediate Functional	3	-	3	8	2
Spesialis Madya Middle Specialist	-	-	-	-	-
Kepala Gudang Head of Warehouse	-	337	337	258	255
Asisten Manager Assistant Manager	60	104	164	165	212
Supervisor	30	-	30	32	-
Officer	138	333	471	519	488
Fungsional Muda Young Functional	18	-	18	25	5
Salesman	87	-	87	86	69
Apoteker Pharmacist	32	-	32	31	30
Kasir Cashier	28	1	29	47	44
Management Trainee	-	-	-	-	-
Tenaga Dasar Basic Staff	-	-	-	-	-
Supir Driver	-	-	-	-	1
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298

Komposisi Karyawan Berdasarkan Fungsi Jabatan | Employee Composition by Position Function

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Komersial Commercial	328	644	972	1.102	799
Non-Komersial Non-Commercial	178	249	427	294	499
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin | Employee Composition by Gender

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Pria Male	315	757	1.072	1.074	992
Wanita Female	191	136	327	322	306
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Employee Composition by Education Level

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
< SMA < High School	59	403	462	479	454
Diploma-1 Diploma-1	4	9	13	14	15
Diploma-2 Diploma-2	1	2	3	3	3
Diploma-3 Diploma-3	44	104	148	147	134
Strata-1 Bachelor's Degree	354	349	703	688	630
Strata-2 Master's Degree	44	26	70	65	61
Strata-3 Doctorate	-	-	-	-	-
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian | Employee Composition by Employment Status

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Tetap Permanent	447	762	1.209	1.254	1.230
Tidak Tetap Non-Permanent	59	131	190	142	68
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia | Employee Composition by Age

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
<25 tahun years old	3	28	31	21	6
25 – 36 tahun years old	230	361	591	606	578
37 – 45 tahun years old	166	293	459	434	397
46 – 50 tahun years old	53	81	134	148	148
51 – 55 tahun years old	54	123	177	178	168
>55 tahun years old	-	7	7	9	1
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja | Employee Composition by Length of Service

Keterangan Description	2025			2024	2023
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
<5 tahun years	130	247	377	333	299
5-10 tahun years	174	261	435	502	442
>10-15 tahun years	94	211	305	297	296
>15-25 tahun years	53	86	139	104	94
> 25 tahun years	55	88	143	160	167
Jumlah Total	506	893	1.399	1.396	1.298

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan senantiasa menaruh perhatian besar terhadap program pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan berkesinambungan. Program tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti kegiatan pelatihan dan program sertifikasi karyawan.

Semua model pelatihan yang disiapkan Perseroan dapat dilaksanakan secara internal (*in-house training*) maupun eksternal. Pelatihan internal berarti pelatihan tersebut dilakukan di dalam lingkungan perusahaan.

Pada prinsipnya, program pengembangan kompetensi karyawan dapat diikuti oleh semua karyawan. Kendati demikian, manajemen tetap memperhatikan analisis kebutuhan program pelatihan atau pengembangan potensi SDM masing-masing karyawan (*training need analysis*) untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syaratlah yang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan.

Setelah sesi pelatihan berakhir, manajemen akan mengevaluasi para peserta untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi manajemen untuk menentukan jenjang karier dan tingkat kebutuhan pelatihan lanjutan karyawan.

Dengan adanya program pengembangan kompetensi karyawan, perseroan optimis dapat membentuk generasi karyawan yang memiliki kinerja yang lebih efektif dengan semangat kompetitif, dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi dengan tempat kerja.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

PPI memberikan perhatian penuh terhadap program pengembangan kompetensi karyawan untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas sehingga diharapkan dapat mendukung daya saing perseroan di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Untuk itu, PPI menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang diselenggarakan setiap tahun dimana subjek pelatihan dan peserta yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan kebutuhan pengembangan organisasi. Dengan adanya program dan kegiatan pelatihan tersebut diharapkan seluruh karyawan menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya sesuai bidang profesi masing-masing, serta terpacu untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuannya sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Employee Training and Development

The Company consistently places great emphasis on comprehensive and sustainable human resource competency development programs. These programs are implemented through various means, such as training activities and employee certification programs.

All training models prepared by the Company can be conducted internally (*in-house training*) or externally. Internal training means that the training is conducted within the company's environment.

In principle, employee competency development programs are open to all employees. Nevertheless, management still pays attention to the needs analysis of training programs or the development of each employee's HR potential (*training need analysis*) to ensure that every eligible employee is prioritized to attend the training held.

After the training sessions conclude, management evaluates the participants to measure the effectiveness of the training implementation. The evaluation results serve as the basis for management to determine career advancement and the level of further training needs for employees.

With the employee competency development programs in place, the company is optimistic about shaping a generation of employees with more effective performance, competitive spirit, and higher loyalty to the workplace.

Employee Competency Development

PPI places full attention on employee competency development programs to ensure the availability of competent human resources with broad knowledge, thereby expected to support the company's competitiveness amidst increasingly intense industry competition.

Therefore, PPI provides training and competency development programs for human resources held annually, where the training subjects and participants involved are tailored to the needs of each individual and organizational development requirements. With these training programs and activities in place, it is hoped that all employees will be more motivated to enhance their qualifications in their respective fields of profession and driven to improve their skills, expertise, and knowledge, thus positively impacting the company's performance.



Program Kerja Divisi SDM Tahun 2025

Sesuai RKAP Tahun 2025, Divisi Pengembangan SDM dan Umum PT PPI telah menyusun rencana program kerja terkait pengembangan dan pengelolaan SDM di Perseroan. Berdasarkan perencanaan tersebut, pada tahun 2025, Divisi SDM melaksanakan beberapa program di antaranya mengoptimalkan *Development Program* (*Staff Development Program*, *Young Talent Development Program*, *Group Development Program*) baik dari internal ataupun eksternal PT PPI, tujuan untuk memberikan fasilitas di *level knowledge* Karyawan PT PPI agar dapat mendukung pencapaian target yang diberikan oleh Perusahaan. Hal lain program yang akan dilakukan adalah memberikan sertifikasi kepada Karyawan sesuai dengan arah bisnis PT PPI agar dapat mendukung peningkatan *soft skill* atau *hard skill* pada Karyawan di PT PPI. Selain itu program Divisi Pengembangan SDM dan Umum dalam hal mendukung peningkatan bisnis Perusahaan, *career path* Karyawan, pemenuhan Karyawan perempuan dan *top talent* muda yaitu mempersiapkan *talent* pada masing-masing posisi yang ada di PT PPI.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Secara keseluruhan, realisasi total jam pelatihan apda tahun 2025 mencapai 60.752 jam pelatihan dengan realisasi biaya pengembangan SDM mencapai Rp36.630.000 untuk program *Certified Branch Manager*.

Rincian program pelatihan dan pengembangan SDM yang dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
1	EXTRA - Memahami Penerapan <i>Business Ethics, Governance, Anti-Fraud</i> dan <i>Business Judgement Rule</i> dalam Korporasi untuk Menghindari Jerat Tipikor EXTRA - Understanding the Application of Business Ethics, Governance, Anti-Fraud, and the Business Judgment Rule in Corporations to Avoid Corruption	24 Januari 2025 January 24, 2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	Etika bisnis dan integritas dalam meningkatkan kontribusi pada keberhasilan bisnis operasional dan target pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Business ethics and integrity contribute to the success of the company's operational business and sustainable growth targets.
2	Penyusunan Kamus Kompetensi: Kupas Tuntas Pengembangan Standar Kompetensi Karyawan di Organisasi Compilation of Competency Dictionary: Complete Development Review Employee Competency Standards in Organization	5 Februari 2025 February 5, 2025	6 Februari 2025 February 6, 2025	Memahami penyusunan kamus kompetensi Understanding the compilation of a competency dictionary

HR Division Work Program 2025

In accordance with the 2025 Work and Budget Plan (RKAP), the HR Development and General Affairs Division of PT PPI has prepared a work program plan related to the development and management of human resources within the Company. Based on this plan, in 2025, the HR Division will implement several programs, including optimizing development programs (*Staff Development Program*, *Young Talent Development Program*, *Group Development Program*) both internally and externally at PT PPI. This program aims to facilitate knowledge development at PT PPI employees to support the achievement of Company targets. Another program will include providing certification to employees aligned with PT PPI's business direction to support the development of soft and hard skills within PT PPI. Furthermore, the HR Development and General Affairs Division's programs will support the Company's business growth, employee career paths, and the provision of female employees and young top talent, including preparing talent for each position within PT PPI.

Training and Competency Development Program 2025

Overall, the total number of training hours implemented in 2025 reached 60,752, with human resource development costs achieved Rp36,630,000 for the *Certified Branch Manager* program.

The details of the human resource training and development programs implemented in 2025 are as follows:

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
3	Sosialisasi Penerapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) K3LL Implementation Socialization First Aid on Accidents (P3K) K3LL	4 Februari 2025 February 4, 2025	4 Februari 2025 February 4, 2025	- Karyawan dapat memahami apa itu P3K dan tujuannya - Karyawan dapat memahami apa saja tahapan dalam implementasi P3K - Karyawan dapat mengimplementasikan P3K - Employees can understand what P3K is and its purpose - Employees can understand anything stages in implementing P3K - Employees can implement First Aid
4	Sosialisasi Asuransi Kesehatan 2025 Health Insurance Socialization 2025	14 Februari 2025 February 14, 2025	14 Februari 2025 February 14, 2025	Memahami manfaat asuransi kesehatan tambahan Understand the benefits of health insurance additional
5	EXTRA - Bangun Kesadaran dalam Kesiapsiagaan Gempa Bumi dan Banjir EXTRA - Build Awareness in Earthquake Preparedness Earth and Flood	18 Februari 2025 February 18, 2025	18 Februari 2025 February 18, 2025	- Cepat dan tanggap darurat menghadapi bencana gempa bumi dan banjir - Mampu menghadapi situasi dan dapat melindungi diri saat situasi terjadi - Fast and responsive to emergency situations earthquake and flood disasters - Able to face situations and can protect yourself when a situation occurs
6	Seminar "Kepemimpinan BUMN di Era Disruptif" Seminar "BUMN Leadership in the Disruptive Era"	21 Februari 2025 February 21, 2025	21 Februari 2025 February 21, 2025	Mengembangkan Kapabilitas Kepemimpinan BUMN di Era Disruptif Developing Leadership Capabilities BUMN in the Disruptive Era
7	PPIjar "Tata Cara Pelaporan SPT" 2025 PPIjar "Procedures for Reporting SPT" 2025	24 Februari 2025 February 24, 2025	24 Februari 2025 February 24, 2025	Memahami cara pengisian da pelaporan SPT Understanding how to fill out and report SPT
8	ULTRA (Ulas Transformasi "Menyoal Manajemen Risiko") ULTRA (Transformation Review "Questioning Risk Management")	25 Februari 2025 February 25, 2025	25 Februari 2025 February 25, 2025	- Memahami teknik mengelola peluang dan ancaman - Memahami strategi manajemen risiko - Proses manajemen risiko - Understand techniques for managing opportunities and threat - Understand risk management strategies - Risk management process
9	<i>Winning Consumers in Asia</i>	26 Februari 2025 February 26, 2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
10	<i>Workshop Influencer BUMN dengan penggunaan AI</i> BUMN Influencer Workshop with the use of AI	1 Februari 2025 February 1, 2025	1 Februari 2025 February 1, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
11	<i>Skill Up - Importasi</i> Skill Up - Importation	23 April 2025 April 23, 2025	23 April 2025 April 23, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
12	<i>Talent Mobility Management (Leveraging Leadership, AI Tools & Technology)</i>	22 April 2025 April 22, 2025	22 April 2025 April 22, 2025	Meningkatkan pemahaman dalam perkembangan era digital increase deep understanding development of the digital era
13	<i>Salesmanship (People Management & Sales Skill)</i>	15 April 2025 April 15, 2025	15 April 2025 April 15, 2025	Meningkatkan kemampuan penjualan improve sales capabilities
14	ERP D365	17 April 2025 April 17, 2025	17 April 2025 April 17, 2025	Refresh knowledge
15	AKHLAK TALK SERIES - AMANAH 2025	8 April 2025 April 8, 2025	8 April 2025 April 8, 2025	AKHLAK TALK SERIES



No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
16	EXTRA - Ciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif dan Bebas Diskriminasi melalui Implementasi <i>Respectful Workplace Policy</i> (RWP) EXTRA - Create an Environment Inclusive Work and Free of Discrimination through <i>Respectful Implementation Workplace Policy</i> (RWP)	8 Mei 2025 May 8, 2025	8 Mei 2025 May 8, 2025	Ciptakan Lingkungan Kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi melalui Implementasi <i>Respectful Workplace Policy</i> (RWP) Create an inclusive and work environment free discrimination through <i>Respectful Implementation Workplace Policy</i> (RWP)
17	<i>Workshop</i> Komunikasi Media Sosial melalui Optimasi AI Media Communication Workshop Social through AI Optimization			Pelatihan wajib Mandatory training
18	Sertifikasi BNSP Skema Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat BNSP Certification Scheme Program Implementer Community Empowerment	20 Mei 2025 May 20, 2025	20 Mei 2025 May 20, 2025	Meningkatkan kompetensi profesional dalam pengelolaan TJSL Increasing professional competence in TJSL management
19	Pelatihan Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Corporate Law Training and Industrial Relations	21 Mei 2025 May 21, 2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	Konsep penyelesaian hubungan kerja dengan metod The concept of employment relationship disputes with method
20	AKHLAK TALK SERIES - KOMPETEN	22 Mei 2025 May 22, 2025	22 Mei 2025 May 22, 2025	Agenda Wajib insan PT PPI Akhlak <i>Day Series</i> - kompeten Mandatory agenda for PT PPI Akhlak Day Series people - competent
21	<i>Cold Chain Product</i> Bio Farma (CCP)	26 Mei 2025 May 26, 2025	26 Mei 2025 May 26, 2025	<i>Refreshment</i> CCP
22	<i>Talk with Kadiv</i> : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 Talk with Kadiv : System Anti-Bribery Management (SMAP) ISO 37001	27 Mei 2025 May 27, 2025	27 Mei 2025 May 27, 2025	Memahami macam-macam penyimpangan, memahami sistem manajemen anti penyuapan sesuai ISO 37001 Understand the various types of deviations, understand the anti management system bribery according to ISO 37001
23	Sertifikasi Manajemen Risiko (CRP) Risk Management Certification (CRP)	14 Juni 2025 June 14, 2025	5 Juli 2025 July 5, 2025	Memahami pengelolaan risiko dan implementasi manajemen risiko dengan mengacu pada ISO 31000:2018 Understand risk management and implementation of risk management with refers to ISO 31000:2018
24	Pelatihan CDAKB CDAKB Training	3 Juli 2025 July 3, 2025	4 Juli 2025 July 4, 2025	Kemampuan memahami aspek-aspek Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik sesuai PMK 14 tahun 2021 Ability to understand aspects of Cara Good distribution of Medical Equipment is appropriate PMK 14 of 2021
25	<i>Skill Up - Excel Intermediate</i>	17 Juni 2025 June 17, 2025	17 Juni 2025 June 17, 2025	Mengembangkan kompetensi teknis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan fungsi-fungsi Excel Develop field technical competencies knowledge and skills in apply Excel functions
26	<i>Talk with Kadiv "Accounting for Non Accounting"</i>	20 Juni 2025 June 20, 2025	20 Juni 2025 June 20, 2025	Meningkatkan pengetahuan seputar akuntansi pencatatan keuangan dan jenis-jenis keuangan, jenis kas, sampai laporan pencatatan arus kas. Increase knowledge about financial recording accounting and types finances, types of cash, to reports cash flow recording.

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
27	Health Talk "Mengenal Gejala Stroke Sejak Dini, Pencegahan, dan Penanganan yang Tepat dan Cepat"	25 Juni 2025 June 25, 2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	Pemahaman kesehatan terkait mengenali gejala stroke, cara mencegah, dan penanganan yang tepat Understanding related health recognizes stroke symptoms, how to prevent it, and proper handling
28	Pelatihan Adaptive Mindset Adaptive Mindset Training	22 Juli 2025 July 22, 2025	22 Juli 2025 July 22, 2025	Meningkatkan kesadaran pentingnya adaptasi dalam menghadapi perubahan organisasi, membekali peserta dengan <i>mindset</i> dan <i>skill</i> untuk keluar dari zona nyaman, menumbuhkan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan kerja, dan menanamkan nilai Adaptif, Kompeten, dan Kolaboratif dalam kehidupan kerja sehari-hari. Increase awareness of its importance adaptation in the face of change organization, equip participants with mindset and skills to get out of the zone comfortable, foster a proactive attitude in facing work challenges, and instill the values of Adaptive, Competent, and Collaborative in daily work life.
29	AKHLAK TALK SERIES - HARMONIS	24 Juli 2025 July 24, 2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	Sesi AKHLAK TALK SERIES PT PPI PT PPI AKHLAK TALK SERIES Session
30	SOSIALISASI PROGRAM DAN MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM SOCIALIZATION AND SOCIAL SECURITY BENEFITS EMPLOYMENT	29 Juli 2025 July 29, 2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	Sosialisasi program manfaat dan manfaat tambahan kegunaan dari BPJS Ketenagakerjaan Socialization of benefit programs and additional benefits of using BPJS Employment
31	E-Learning Pemahaman Gratifikasi E-Learning Understanding Gratification	18 Juli 2025 July 18, 2025	15 Agustus 2025 August 15, 2025	Pemahaman terkait gratifikasi Understanding of gratification
32	AKHLAK TALK SERIES LOYAL	8 Agustus 2025 August 8, 2025	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Sesi AKHLAK TALK SERIES PT PPI PT PPI AKHLAK TALK SERIES Session
33	Asesmen CDAKB CDAKB Assessment	14 Agustus 2025 August 14, 2025	14 Agustus 2025 August 14, 2025	Sertifikasi CDAKB CDAKB Certification
34	Skill Up Treasury Management dan Penanganan Piutang Skill Up Treasury Management and Receivables Handling	13 Agustus 2025 August 13, 2025	13 Agustus 2025 August 13, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
35	Skill Up Data Driven Presentation Skill	14 Agustus 2025 August 14, 2025	14 Agustus 2025 August 14, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
36	Skill Up Finance for Non Finance	5 Agustus 2025 August 5, 2025	5 Agustus 2025 August 5, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
37	Workshop Komunikasi BUMN - Balikpapan BUMN Communication Workshop - Balikpapan	17 Juli 2025 July 17, 2025	18 Jul 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
38	Seminar CXO emport series forSOEs Unlocking strategies Advantage with AI CXO import series seminar forSOEs Unlocking strategies Advantage with AI	23 Juli 2025 July 23, 2025	23 Juli 2025 July 23, 2025	Mendukung transformasi digital sektor pemerintah dan BUMN Supporting the digital transformation of the sector government and state-owned companies
39	Apoteker Penanggung Jawab Responsible Pharmacist	27 Juli 2025 July 27, 2025	27 Juli 2025 July 27, 2025	Peningkatan Kompetensi Apoteker Penanggung Jawab sesuai standar CDOB dapat mengidentifikasi/mengkaji risiko/mutu Obat dalam Distribusi Farmasi Increasing Pharmacist Competency Responsible person according to CDOB standards can identify/ assess risk/quality Drugs in Pharmaceutical Distribution



No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
40	<i>Skill Up Training Asesment dan Awareness GCG</i>	20 Agustus 2025 August 20, 2025	20 Agustus 2025 August 20, 2025	Meningkatkan <i>awareness</i> dan kompetensi GCG fungsi tata kelola Increase GCG awareness and competency governance function
41	EXTRA - <i>Mindset</i> Kuat, Perusahaan Hebat EXTRA - Strong Mindset, Great Company	29 Agustus 2025 August 29, 2025	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Mendorong semangat perubahan dan menanamkan pola pikir yang lebih kuat di lingkungan kerja Encourage the spirit of change and instill a stronger mindset in work environment
42	<i>Marketing & Sales Excellence Program</i>	3 September 2025 September 3, 2025	4 September 2025 September 4, 2025	Dalam rangka meningkatkan keterampilan karyawan yang membidangi sales dalam mencapai target penjualan dan memahami etika perusahaan dalam melakukan penjualan, serta karyawan yang membidangi marketing diharapkan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang <i>highimpact</i> , serta menerapkan <i>mindset entrepreneurial marketing</i> untuk pengembangan bisnis In order to improve skills employees in the field of inside sales achieve sales targets and understand company ethics in conducting sales, as well as employees in charge marketing is expected to develop high impact marketing strategy, and apply an entrepreneurial mindset marketing for business development
43	<i>Talk with Kadiv Eps 3 "Aset PT PPI, Mari Insan PPI Jaga"</i> Talk with Head of Division Eps 3 "PT Assets PPI, Let PPI People Take Care"	19 September 2025 September 19, 2025	19 September 2025 September 19, 2025	Memperoleh pemahaman tentang cara pemeliharaan aset PT PPI yang baik agar terjaga dan terpeliharanya aset dalam jangka panjang sehingga dapat melakukan keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan efektifitas dalam mengelola aset bagi karyawan secara pribadi maupun kelompok Gain an understanding of how good maintenance of PT PPI assets safeguarding and maintaining internal assets long term so it can do strategic decisions to achieve goals company and increasing effectiveness in managing assets for employees personal or group
44	<i>Skill Up Warehouse Management System</i>	23 September 2025 September 23, 2025	23 September 2025 September 23, 2025	Pelatihan wajib Mandatory training
45	<i>Skill Up Komoditas Strategis dalam Perdagangan Pangan Indonesia</i> Strategic Commodity Skill Up in Food Trade Indonesia	26 September 2025 September 26, 2025	26 September 2025 September 26, 2025	Untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, analisis, serta daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan peluang pada dua komoditas strategis yaitu minyak sawit dan gula To increase competence, knowledge, skills, analysis, as well as competitiveness in managing and take advantage of opportunities in two commodities strategic, namely palm oil and sugar
46	AKHLAK TALK SERIES - ADAPTIF AKHLAK TALK SERIES - ADAPTIVE	12 September 2025 September 12, 2025	12 September 2025 September 12, 2025	AKHLAK TALK SERIES
47	<i>Mindset Trap at Work : "Mengatasi Self-Sabotage dan Prokrastinasi"</i> Mindset Trap at Work: "Overcoming Self-Sabotage and Procrastination"	14 Oktober 2025 October 14, 2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Memperingati <i>mental health day</i> 10 Oktober 2025 Commemorating mental health day October 10 2025
48	RCC Program (<i>Recognition Current Competency</i>)	22 Oktober 2025 October 22, 2025	22 Oktober 2025 October 22, 2025	Perpanjangan sertifikasi Certification extension

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
49	<i>Skill Up Refreshment ISO 9001 : 2015 SMM dan ISO 37001 : 2016 SMAP serta Internal Audit ISO 19011 : 2018</i> Skill Up Refreshment ISO 9001: 2015 SMM and ISO 37001 : 2016 SMAP and ISO Internal Audit 19011 : 2018	10 Oktober 2025 October 10, 2025	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Audit <i>Surveillance</i> ISO 9001 : 2015 SMM an ISO 37001 : 2016 SMAP tahun 2025 di PT RNI (Persero) serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang membidangi Tata Kelola dan Manajemen Mutu. In preparation for the 2025 ISO 9001:2015 Quality Management System (QMS) and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) surveillance audits at PT RNI (Persero), and to enhance the competencies of employees in the areas of governance and quality management.
50	<i>Skill Up Smartfarming Berbasis AI (Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Industri Pangan ID FOOD)</i>	23 Oktober 2025 October 23, 2025	23 Oktober 2025 October 23, 2025	Dalam rangka membangun kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan dan peluang digitalisasi di sektor pangan, sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian berkelanjutan dan produktif. To build human resource capacity so that it can address the challenges and opportunities of digitalization in the food sector, while also promoting the creation of a sustainable and productive agricultural system.
51	AKHLAK <i>Talk Series</i> KOLABORATIF AKHLAK <i>Talk Series</i> ADAPTIVE	5 November 2025 November 5, 2025	5 November 2025 November 5, 2025	AKHLAK TALK SERIES
52	Internalisasi ESG ESG Internalization	6 November 2025 November 6, 2025	6 November 2025 November 6, 2025	Memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta mempersiapkan PPI menghadapi tuntutan regulasi maupun ekspektasi pemangku kepentingan. Strengthen governance, improve quality of service, as well as preparing PPI faces both regulatory and regulatory demands stakeholder expectations.
53	<i>Communication Business Skill for</i>	22 November 2025 November 22, 2025	22 November 2025 November 22, 2025	Memperkuat kemampuan komunikasi para Pemimpin dalam menyampaikan arahan, mengelola tim, serta membangun hubungan yang efektif dengan customer. Program ini memastikan para pemimpin memiliki gaya komunikasi yang lebih kuat, konsisten, dan mampu mendukung pencapaian hasil bisnis. strengthen the communication skills of para Leader in conveying direction, managing teams, and building relationships effective with customers. this program ensure leaders have style stronger, consistent, and communication able to support the achievement of business results
54	<i>Communication Business Skill for</i>	22 November 2025 November 22, 2025	22 November 2025 November 22, 2025	Memperkuat kemampuan komunikasi para Pemimpin dalam menyampaikan arahan, mengelola tim, serta membangun hubungan yang efektif dengan <i>customer</i> . Program ini memastikan para pemimpin memiliki gaya komunikasi yang lebih kuat, konsisten, dan mampu mendukung pencapaian hasil bisnis. strengthen the communication skills of para Leader in conveying direction, managing teams, and building relationships effective with customers. this program ensure leaders have style stronger, consistent, and communication able to support the achievement of business results
55	<i>Engagement Program 2025</i>	23 November 2025 November 23, 2025	23 November 2025 November 23, 2025	Meningkatkan kualitas kebersamaan dan kekompakan karyawan dalam mencapai target perusahaan Improving the quality of togetherness and employee cohesion in achieving company targets



No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
56	<i>Executive Forum dan Diskusi Hukum "Perlindungan Hukum Pasca UU BUMN Baru : BJR VS Jerat Korupsi" 2025</i> Executive Forum and Discussion Law "Protection Laws After the New BUMN Law: BJR VS The Snares of Corruption" 2025	11 November 2025 November 11, 2025	11 November 2025 November 11, 2025	Webinar
57	<i>Communication for Executives: Business Etiquette</i>	26 November 2025 November 26, 2025	26 November 2025 November 26, 2025	<i>Executive Foundations in Communication, Cultural in a Globalized Business Environment, Strategic Business Negotiation for Executives, Communication Management in Crisis for Executives</i>
58	Masa Persiapan Pensiun	2 Desember 2025 December 2, 2025	2 Desember 2025 December 2, 2025	Memberikan pembekalan Pekerja dalam menjalani persiapan masa Purnabakti Providing internal training for workers undergoing preparations for the retirement period
59	<i>Skill Up OD Clinic Job Analysis & Job Evaluation</i>	3 Desember 2025 December 3, 2025	3 Desember 2025 December 3, 2025	Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dalam melaksanakan <i>Job Analysis & Job Evalua on</i> secara sistematis, akurat, dan sesuai prak k terbaik In order to increase competence HR in carrying out Job Analysis & Job Evalua on systematically, accurately, and according to best practice
60	<i>Finance for Executives</i>	10 Desember 2025 December 10, 2025	10 Desember 2025 December 10, 2025	Pemenuhan KPI Direksi dan komisaris serta kebutuhan peningkatan kompetensi Fulfillment of KPI for Directors and Commissioners as well the need for increased competence
61	<i>Skill Up PSAK</i>	10 Desember 2025 December 10, 2025	10 Desember 2025 December 10, 2025	Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menghasilkan laporan yang lebih menyeluruh kepada peserta pela han mengenai ketentuan baru yang terstruktur dan sesuai dengan PSAK 118 in order to improve participants' competence in producing more comprehensive report to training participants regarding the new provisions which is structured and in accordance with PSAK 118
62	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Penyesuaian Proses dalam Sistem OSS-RBA / PBTSE Implementation of Licensing Risk Based Business as well as internal process adjustments OSS-RBA / PBTSE system	11 Desember 2025 December 11, 2025	12 Desember 2025 December 12, 2025	Memahami dan mendalami perubahan yang berlaku pasca diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2025 serta memperoleh gambaran komprehensif mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) Understand and understand the changes effective after the issuance of PP Number 28 2025 and get an idea comprehensive regarding Business Licensing Electronically Integrated (PBTSE)
63	Sosialisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK) BRI Financial Institution Pension Fund (DPLK) Socialization	19 Desember 2025 December 19, 2025	19 Desember 2025 December 19, 2025	Memberikan edukasi lebih lanjut terkait Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK) bagi Karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) serta sehubungan dengan penunjukan BRI sebagai pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) provide further related education Financial Institution Pension Fund Membership BRI (DPLK) for PT Perusahaan Employees Indonesian trade and related matters with the appointment of BRI as manager Financial Institution Pension Fund (DPLK) PT Indonesian Trading Company

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksana Date of Event		Tujuan Pelatihan Purpose of Training
		Mulai Start	Akhir End	
64	<i>Governance, Risk dan Compliance</i>	22 Desember 2025 December 22, 2025	22 Desember 2025 December 22, 2025	Meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat fondasi tata kelola organisasi yang berkelanjutan dan adaptif Increase competence at the same time strengthen the foundation of organizational governance sustainable and adaptive
65	Seminar Nasional Penegahan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia National Seminar on Prevention and Countering Corruption in Indonesia	18 Desember 2025 December 18, 2025	18 Desember 2025 December 18, 2025	Impelementasi Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perubahannya (Undang-Undang No. 15 Tahun 2015) Implementation of Law no. 17 2003 Concerning State Finances, Law no. 15 of 2004 Concerning Management and Responsibility Examination Responsible for State Finance, Law No. 1 of 2004 concerning the Treasury State, Law no. 30 of 2002 About the Corruption Eradication Commission (KPK) and its amendments (Law No. 15 of 2015)
66	<i>Certified Branch Manager</i>	18 Desember 2025 December 18, 2025	18 Desember 2025 December 18, 2025	Program pengembangan

Promosi, Mutasi, Rotasi, dan Demosi Karyawan

Promosi karyawan merupakan bentuk pengakuan dari Perseroan atas dedikasi dan kontribusi mereka yang berharga bagi perusahaan. Adanya promosi diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk terus berprestasi sesuai peran mereka dan menumbuhkan budaya meritokrasi demi kemajuan karier mereka. Selain itu, promosi internal juga ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas karyawan, dan hal tersebut akan berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan.

Di PPI, promosi karyawan dilakukan dengan berdasarkan pada meritokrasi, di mana individu diakui dan dihargai atas kinerja, keterampilan, dan potensi mereka.

PPI memahami, sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi selama proses promosi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat yang memenuhi syarat. Selain itu, membina komunikasi yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu karyawan memahami kriteria untuk maju dan mendorong peningkatan yang berkelanjutan.

Selama ini, di PPI, promosi karyawan dilakukan dengan memberi mereka peran, tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Employee Promotion, Mutation, Rotation, and Demotion

Promoting employees demonstrates the Company's recognition of their dedication and valuable contributions to the organization. It motivates them to continue excelling in their roles and fosters a culture of meritocracy and career advancement. Additionally, promotions often lead to increased employee engagement and loyalty, contributing to overall organizational success.

At PPI, Promoting employees is based on meritocracy, where individuals are recognized and rewarded for their performance, skills, and potential.

PPI understand, it's essential to ensure fairness and transparency throughout the promotion process, providing equal opportunities for all qualified candidates. Moreover, fostering clear communication and providing constructive feedback can help employees understand the criteria for advancement and encourage continuous improvement.

Up until now, at PPI, employee promotions have been carried out by giving them higher roles, duties and responsibilities.



Sedangkan mutasi adalah perpindahan pegawai antar-cabang atau wilayah kegiatan, di dalamnya termasuk rotasi. Namun, rotasi itu sendiri lebih memfokuskan pemindahan tugas dan tanggung jawab antar fungsi dan/atau unit kerja dalam satu Direktorat dan/atau antar Direktorat.

Di sisi lain, demosi itu sendiri merupakan bentuk pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah dengan disertai penurunan *grade*.

Berikut merupakan detail pegawai demosi, mutasi, rotasi, promosi serta pengangkatan karyawan tetap pada tahun 2025:

Meanwhile, mutation is the movement of employees between branches or areas of activity, including rotation. However, rotation itself focuses more on the transfer of duties and responsibilities between functions and/or work units within one Directorate and/or between Directorates.

On the other hand, demotion itself is a form of transferring employees to lower positions with a decrease in grade.

The following are details of employee demotions, mutations, rotations, promotions and permanent employee appointments in 2025:

Data Rotasi dan/atau Mutasi Tahun 2025 | Rotation and/or Mutation Data for 2025

Kategori Category	Jumlah Karyawan Number of Employee
Demosi / Demotion	2
Mutasi / Mutation	50
Penangkatan Karyawan Tetap / Appointment of Permanent Employees	14
Rotasi / Rotation	5
Promosi / Promotion	23
Total	94

Turnover Karyawan

Menciptakan komposisi karyawan yang proporsional membutuhkan keseimbangan dalam proses perekrutan karyawan baru dan mempertahankan karyawan lama dengan tujuan untuk mengurangi dampak *negative* dari pergantian karyawan. Strategi seperti perencanaan suksesi dan program pengembangan SDM dapat membantu memelihara SDM yang ada, sehingga mengurangi dampak pergantian karyawan pada posisi-posisi kunci.

Hingga akhir 2025, terdapat penambahan/ pengurangan karyawan sebagai berikut:

Employee Turnover

Creating a proportional employee composition involves maintaining a balance between hiring new talent and retaining existing employees to mitigate turnover effects. Strategies such as succession planning and talent development programs can help in nurturing internal talent, reducing the impact of turnover on key positions.

As the end of 2025, there are the following employee additions/reductions:

Alasan Keluar Reason for Leaving	2025	2024	2023	2022	2021
Pensiun Normal / Normal Pension	13	2	20	18	19
Pensiun Dini / Early Retirement	1	0	5	4	5
Habis Kontrak / Contract Expired	4	7	6	9	14
Meninggal / Passed Away	0	1	1	2	2

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Kebijakan upah minimum merupakan aspek kunci dari regulasi pasar tenaga kerja dan kebijakan kesejahteraan sosial di banyak negara, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kompensasi yang adil bagi para pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi dan pertumbuhan

Remuneration and Employee Welfare

Minimum wage policy are a key aspect of labor market regulation and social welfare policy in many countries, aiming to strike a balance between ensuring fair compensation for workers and maintaining economic competitiveness and job growth. Aiming at narrowing

lapangan kerja. Diturunkan untuk mempersempit ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, kebijakan upah minimum ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya hidup, tingkat inflasi, dan tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja.

PPI senantiasa mematuhi perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja terutama dalam hal ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku di wilayah masing-masing unit kerja Perseroan. Namun lebih dari itu, Perseroan juga telah menetapkan seperangkat kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, antara lain:

income inequality and reducing poverty, minimum wage policy is determined by taking into account factors such as cost of living, inflation rates, and prevailing wage levels in the labor market.

PPI always adheres to the laws and regulations governing labor, especially regarding the Provincial/District/City Minimum Wage (UMP/K) provisions applicable in the respective working units of the Company. However, beyond that, the Company has also established a set of compensation, welfare program, and employee facilities to enhance the welfare and productivity of each employee, including:

Uraian Description	Tetap Permanent	Tidak Tetap Contract
Perawatan Pengobatan Treatment Care	✓	✓
Akomodasi & Transportasi Accommodation & Transportation	✓	✓
Kematian & Perhelatan Deaths & Occasions	✓	✓
Transport Lokal Local Transport	✓	✓
Pensiun/Pesangon Pension/Severance	✓	✓
Cuti Tahunan Annual Leave	✓	✓
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan BPJS Health and Employment	✓	✓
THR RFA	✓	✓

Reward dan Punishment

PPI memiliki sistem *reward* dan *punishment* yang diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pemberlakuan *Reward* dan *Punishment* bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. *Reward* diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran PPI. Perseroan memberikan *reward*, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. Insentif performansi adalah salah satu bentuk *reward* yang diberikan perseroan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI). Selain itu, perseroan juga memberikan apresiasi bagi pekerja berkinerja istimewa berupa berupa setiap 3 Bulan mendapatkan Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) di mana penilaian tersebut dapat berdampak kepada besaran pemberian tunjangan kinerja.

Punishment diterapkan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari. Perseroan memberikan *punishment* sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku. Jenis sanksi yang berlaku meliputi teguran, surat peringatan dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Reward and Punishment

PPI has a reward and punishment system clearly outlined in the Collective Labor Agreement (PKB). The implementation of rewards and punishments aims to enhance the performance of every worker. Rewards are provided to motivate workers to achieve optimal performance targets, thereby supporting PPI's objectives. The company provides rewards, both financial and non-financial, tailored to the company's capabilities. Performance incentives are one form of reward given by the company to workers based on monthly performance assessments and the achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets. Additionally, the company also appreciates exceptional performance by workers by conducting KPI assessments every 3 months, which may affect the amount of performance incentives given.

Punishments are applied to prevent any form of misconduct by workers, ensuring that factors hindering or disrupting work activities are avoided. The company administers punishments according to the level and type of sanctions applicable. Types of sanctions include warnings, written warnings, and other sanctions adjusted to the level of violation.



Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan nominal uang kepada karyawan yang memiliki masa kerja 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 Tahun sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atas pengabdian dan dharma bakti karyawan pada perusahaan.

Program Persiapan Masa Pensiun

Program Persiapan Pensiun memberi individu alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk merencanakan secara efektif keamanan finansial dan kebutuhan gaya hidup selama masa pensiun.

Pada saat ini, PPI belum memiliki program Persiapan Masa Pensiun karena tidak terdapat di RKAP. Namun Perseroan memiliki program Pelatihan Masa Persiapan Pensiun. Program ini merupakan salah satu bentuk *reward* perusahaan atas dedikasi para karyawan melalui pembekalan pada aspek psikologis, kesehatan, keuangan, wirausaha dan sebagainya. Pelaksanaan pelatihan Persiapan Masa Pensiun tidak hanya sebatas *virtual class*, namun juga dilengkapi dengan kunjungan *virtual*.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja memastikan bahwa setiap orang, apa pun jenis kelaminnya, memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan, promosi, dan peningkatan karier. Hal ini menumbuhkan budaya tempat kerja yang adil dan inklusif di mana prestasi dan kualifikasi merupakan faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mempromosikan kesetaraan *gender*, Perseroan dapat memanfaatkan potensi penuh tenaga kerja mereka, yang mengarah pada inovasi, produktivitas, dan kesuksesan yang lebih besar.

Dengan tenaga kerja yang beragam, PPI mengedepankan prinsip non-diskriminasi di seluruh aspek manajemen sumber daya manusia, memastikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Secara komprehensif, kebijakan non-diskriminasi ini mencakup proses rekrutmen, evaluasi kinerja, struktur kompensasi, dan inisiatif pengembangan karir, yang menekankan meritokrasi di atas faktor-faktor seperti etnis, agama, ras, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, atau kemampuan fisik. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, PPI menumbuhkan lingkungan yang inklusif di mana setiap karyawan dapat berkembang berdasarkan keterampilan, dedikasi, dan kontribusi mereka, sehingga memaksimalkan keberhasilan organisasi dan dampak sosial.

Throughout the year 2025, the company has awarded certificates of appreciation and monetary rewards to employees who have served for 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35 years, as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB), for their dedication and service to the company.

Retirement Preparation Program

The Retirement Preparation Program provides individuals with the tools and knowledge necessary to plan effectively for their financial security and lifestyle needs during retirement.

Currently, PPI does not have a Retirement Preparation program because it is not included in the RKAP. However, the Company has a Retirement Preparation Period Training program. This program is a form of corporate reward for the dedication of employees through debriefing on psychological aspects, health, finance, entrepreneurship and so on. The implementation of the Retirement Preparation training is not only limited to virtual classes, but also equipped with virtual visits.

Gender Equality and Employment Opportunities

Gender equality in employment opportunities ensures that individuals, regardless of their gender, have equal access to jobs, promotions, and career advancement. It fosters a fair and inclusive workplace culture where merit and qualifications are the primary factors in decision-making processes. By promoting gender equality, the Company can harness the full potential of their workforce, leading to greater innovation, productivity, and overall success.

With a diverse workforce, PPI prioritizes non-discrimination principles across all aspects of human resources management, ensuring fairness and equal opportunities for all employees. Its comprehensive policies encompass recruitment processes, performance evaluations, compensation structures, and career advancement initiatives, emphasizing meritocracy over factors such as ethnicity, religion, race, socio-economic status, gender, or physical ability. By upholding these principles, PPI fosters an inclusive environment where every employee can thrive based on their skills, dedication, and contributions, thereby maximizing organizational success and societal impact.

Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah interaksi dinamis antara pemberi kerja, karyawan, dan perwakilan mereka di tempat kerja. Hubungan ini mencakup proses negosiasi, penyelesaian konflik, dan penetapan kebijakan dan praktik yang mengatur interaksi antara manajemen dan tenaga kerja. Hubungan industrial yang efektif berkontribusi pada lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan mendorong saling pengertian dan kerja sama antara pemberi kerja dan karyawan.

PPI senantiasa berupaya menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil. Untuk melaksanakan hubungan tersebut, PPI membentuk Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai wadah untuk berserikat dalam menyampaikan aspirasinya. Serikat Pekerja PPI memposisikan dirinya sebagai mitra Perseroan dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Secara umum kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan SDM (hubungan industrial) di Perseroan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perseroan melakukan sosialisasi dan melaksanakan program penggajian (remunerasi) serta memberikan fasilitas lainnya di luar remunerasi yang bertujuan untuk mendukung tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Rencana Pengembangan SDM Tahun 2026

Sesuai perencanaan pengembangan usaha di tahun depan, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan SDM untuk tahun 2026, sebagai berikut:

1. HCVA (*Human Capital Value Added*).
2. Program peningkatan kapabilitas SDM.
3. Pemenuhan target sertifikasi organ pengelola risiko.
4. Pemenuhan kebutuhan pekerja sesuai kebutuhan divisi/ cabang yang telah disetujui oleh Manajemen.
5. HCROI (*Human Capital Return on Investment*).
6. Evaluasi atau penyusunan peraturan atau kebijakan baru yang bersumber dari ketentuan Pemerintah atau *holding*.
7. DPLK bagi karyawan PT PPI di induk.
8. Program efisiensi penggunaan utilitas (listrik dan air) gedung Grha PPI.

Industrial relations

Industrial relations refer to the dynamic interactions between employers, employees, and their representatives within the workplace. These relations encompass negotiations, conflict resolution, and the establishment of policies and practices governing labor-management interactions. Effective industrial relations contribute to a harmonious work environment, enhance productivity, and promote mutual understanding and cooperation between employers and employees.

PPI consistently strives to create a conducive, open, positive, and progressive work environment to foster harmonious, dynamic, and fair industrial relations. To facilitate these relations, PPI has formed the Workers Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) as a platform for employees to voice their aspirations collectively. The Workers Union of PPI positions itself as a partner to the company in managing industrial relations.

Overall, the management and implementation of human resources (industrial relations) activities within the company are conducted in accordance with the agreements stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB). PPI conducts socialization and implements remuneration programs, as well as provides additional facilities beyond remuneration aimed at supporting the welfare of employees and their families in line with established policies.

Human Resources Development Plan 2026

In accordance with next year's business development plan, the Company has prepared a human resources development plan for 2026, as follows:

1. Human Capital Value Added (HCVA).
2. Human Resources Capability Improvement Program.
3. Fulfillment of Risk Management Organ Certification Targets.
4. Fulfillment of employee needs according to division/branch requirements approved by Management.
5. Human Capital Return on Investment (HCROI).
6. Evaluation or development of new regulations or policies based on government or holding company regulations.
7. Pension Fund (DPLK) for PT PPI employees at the parent company.
8. Utility Efficiency Program (electricity and water) for the PPI Building.



Rincian pelatihan dan pengembangan SDM di tahun depan, sebagai berikut:

Details of human resources training and development for next year are as follows:

Daftar Pelatihan <i>Soft Competency</i> 2025 List of <i>Soft Competency</i> Training 2025	Daftar Pelatihan <i>Hard Competency</i> 2025 List of <i>Hard Competency</i> Training 2025
1. PPIJar - "Leadership Skill" (BOD atau BOD-1) 2. <i>Public Training</i> - BOD Development Program (Vendor Eksternal) 3. <i>In-House Training</i> - "Pra-Syarat Jabatan" (Vendor Eksternal) 4. <i>Public Training</i> - "Masa Persiapan Pensiun" (Vendor Eksternal) 5. PPIJar - "Pengisian SPT" (Divisi Akuntansi & Perpajakan) 6. PPIJar - "Mental Health" (Divisi Pengembangan SDM dan Umum) 7. <i>In House Training</i> - "Engagement Program Outbound" (Vendor Eksternal) 1. PPIJar - "Leadership Skill" (BOD or BOD-1) 2. <i>Public Training</i> - BOD Development Program (Vendor External) 3. <i>In-House Training</i> - "Pre-Requirements of Position" (External Vendor) 4. <i>Public Training</i> - "Retirement Preparation Period" (Vendor External) 5. PPIJar - "Completing SPT" (Accounting & Taxation Division) 6. PPIJar - "Mental Health" (HR Development and Division General) 7. <i>In House Training</i> - "Outbound Engagement Program" (External Vendor)	1. PPIJar - "Accounting for Non Accounting" (Divisi Akuntansi & Perpajakan) 2. <i>Public Training</i> - "Public Speaking" (Vendor Eksternal) 3. <i>Sharing Session</i> - Salesmanship (Pensiunan PT PPI) 4. <i>Public Training</i> - "Marketing" (Vendor Eksternal) 5. <i>Public Training</i> - "Kefarmasian" (Vendor Eksternal) 6. <i>Public Training</i> - "Pengembangan Aset" (Vendor Eksternal) 7. <i>Public Training</i> - "Digital Marketing" (Vendor Eksternal) 8. <i>Public Training</i> - "Audit" (Vendor Eksternal) 9. <i>In House Training</i> - "Salesman Pestisida" (Vendor Eksternal) 10. <i>Public Training</i> - "Direct Selling" (Vendor Eksternal) 11. PPIJar - "P3K dan K3LL" (Divisi Aset dan K3LL) 12. <i>Public Training</i> - "Manage Your Customer" (Vendor Eksternal) 13. <i>Public Training</i> - "Pengadaan/Logistik" (Vendor Eksternal) 14. <i>Public Training</i> - "Tata Kelola Perusahaan" (Vendor Eksternal) 15. <i>Public Training</i> - "Human Capital" (Vendor Eksternal) 16. <i>In-house Training</i> - "Manajemen Risiko" (Vendor Eksternal) 1. PPIJar - "Accounting for Non Accounting" (Accounting Division & Taxation) 2. <i>Public Training</i> - "Public Speaking" (External Vendor) 3. <i>Sharing Session</i> - Salesmanship (PT PPI Retired) 4. <i>Public Training</i> - "Marketing" (External Vendor) 5. <i>Public Training</i> - "Pharmacy" (External Vendor) 6. <i>Public Training</i> - "Asset Development" (External Vendor) 7. <i>Public Training</i> - "Digital Marketing" (External Vendor) 8. <i>Public Training</i> - "Audit" (External Vendor) 9. <i>In House Training</i> - "Pesticide Salesman" (External Vendor) 10. <i>Public Training</i> - "Direct Selling" (External Vendor) 11. PPIJar - "P3K and K3LL" (Asset and K3LL Division) 12. <i>Public Training</i> - "Manage Your Customer" (Vendor External) 13. <i>Public Training</i> - "Procurement/Logistics" (External Vendor) 14. <i>Public Training</i> - "Corporate Governance" (Vendor External) 15. <i>Public Training</i> - "Human Capital" (External Vendor) 16. <i>In-house Training</i> - "Risk Management" (External Vendor)





TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE







Bagi PPI, tata kelola perusahaan yang baik lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan dan regulasi; namun cerminan dari budaya Perusahaan yang berlandaskan akuntabilitas dan tanggung jawab. Untuk itu dibutuhkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko, sekaligus melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, hal ini juga akan mendorong transparansi, integritas, dan keadilan di setiap tahap proses pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa tindakan perusahaan tetap selaras dengan standar etika dan keberlanjutan jangka panjang.

At PPI, good corporate governance extends beyond mere compliance with rules and regulations; it reflects the cultivation of a culture grounded in accountability and responsibility. It requires a proactive approach to identifying, assessing, and mitigating risks, while safeguarding the interests of all stakeholders. Furthermore, it promotes transparency, integrity, and fairness in every stage of the decision-making process, ensuring that corporate actions remain aligned with ethical standards and long-term sustainability.

Pernyataan Komitmen Penerapan GCG

Statement of GCG Implementation Commitment

Sebagai perusahaan milik negara (BUMN), kami menempatkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai inti dari operasi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi PPI dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Implementasinya tertanam di seluruh aspek organisasi, membentuk budaya kerja yang berlandaskan profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Penerapan GCG bukan sekedar kepatuhan terhadap mandat hukum, namun lebih dari itu, GCG merupakan komitmen Perseroan yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh seluruh komponen perusahaan. Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, *regulator*, mitra kerja, dan lainnya.

As a state-owned enterprise (SOE), our Company places the principles of Good Corporate Governance (GCG) at the core of its operations. These principles serve as the foundation that guides PPI in conducting its day-to-day business activities. Their implementation is embedded across all aspects of the organization, shaping a work culture grounded in professionalism, accountability, and responsibility.

GCG implementation goes beyond mere compliance with legal mandates; rather, it signifies a voluntary commitment undertaken consciously and willingly by all organizational components. This commitment aims to cultivate sustainable value creation for the benefit of shareholders, society at large, and other stakeholders, including employees, regulators, partners, and beyond.

Dalam jangka panjang, implementasi GCG diharapkan dapat memberikan pengembalian ekonomi yang optimal bagi PPI dan para pemegang sahamnya, sekaligus memperkuat citra dan reputasi positif Perusahaan di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, GCG berperan sebagai faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan bisnis.

Untuk mendukung komitmen ini, PPI terus berupaya meningkatkan kualitas implementasi GCG-nya. Seluruh personel PPI menjunjung tinggi standar etika tertinggi dalam membangun hubungan dengan pihak internal dan eksternal, sebagaimana tercermin dalam Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seluruh karyawan.

In the long term, the implementation of GCG is expected to deliver optimal economic returns for PPI and its shareholders, while also strengthening the Company's positive image and reputation among stakeholders. Therefore, GCG serves as a key factor in ensuring business sustainability.

To support this commitment, PPI continuously strives to enhance the quality of its GCG implementation. All PPI personnel uphold the highest ethical standards in building relationships with both internal and external parties, as reflected in the Integrity Pact signed annually by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees.

Landasan Penerapan GCG

Legal Basis of GCG Implementation

Penerapan GCG di lingkungan PPI berpedoman pada sejumlah regulasi normatif, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat KBUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Pelaksanaan Asesmen GCG BUMN Tahun 2023 kepada PT RNI (Persero);
5. Surat PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023;
6. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

The implementation of GCG within the PPI environment is guided by several normative regulations, including the following:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) as amended by Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2023 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies dated August 16, 2007;
3. The Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises ;
4. The Minister of State-Owned Enterprises Letter Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, concerning the Implementation of then 2023 SOE GCG Assessment to PT RNI (Persero);
5. PT RNI (Persero) Letter Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation;
6. Guidelines on Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).



Prinsip-Prinsip GCG dan Implementasinya **GCG Principles and Their Implementation**

No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI
1.	Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perseroan, yang mana pengungkapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Openness in the decision-making process and disclosure of relevant material information regarding the Company, the disclosure of which must still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.	• Penerbitan Laporan Tahunan; • Penerbitan Laporan Keuangan Berkala; dan • Pemanfaatan situs web: www.ptppi.co.id untuk menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. • Issuance of the Annual Report; • Issuance of Periodic Financial Reports; and • Utilization of the website: www.ptppi.co.id to convey information to Shareholders and other Stakeholders.
2.	Akuntabilitas Accountability	Menetapkan pembagian peran, fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas terhadap seluruh organ PPI. Establishing a clear division of roles, functions and implementation of responsibilities for all PPI Organs.	• Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah tercantum di dalam <i>Board Manual</i> PPI; • Perseroan memiliki standar penilaian kinerja dengan indikator dan metode penilaian yang jelas dan objektif untuk seluruh Organ maupun karyawan. • The description of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been listed in PPI's Board Manual; • The Company has performance appraisal standards with clear and objective indicators and assessment methods for all organs and employees.
3.	Pertanggungjawaban Responsibility	Menjamin kesesuaian antara kegiatan operasional bisnis yang dijalankan sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensuring conformity between day-to-day business operations and applicable laws and regulations.	• Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial PPI (<i>corporate social responsibility</i>); dan • Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan. • Complying with the provisions of PPI's Articles of Association and applicable laws and regulations; • Carrying out tax obligations properly and on time; • Carrying out PPI social responsibility activities; and • Carrying out information disclosure obligations in accordance with the applicable regulations.

No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI
4.	Independensi Independency	Pengelolaan PPI dilakukan secara mandiri dan profesional serta terbebas dari segala bentuk tindakan benturan kepentingan dan/ atau pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The management of PPI is carried out independently and professionally and free from any form of conflict of interest and/ or influence or pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations.	• Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara Organ PPI; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan perseroan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengambilan keputusan. • Mutual respect for rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities among PPI's Organs; • Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company; • The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees always avoid conflicts of interest in decision making process.
5.	Kesetaraan Fairness	PPI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. PPI upholds the principles of equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements, laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices of sound business operations.	• Seluruh Pemangku Kepentingan berhak memperoleh manfaat, dan mendapatkan perlakuan yang setara; • Membuka kesempatan yang sama dan setara kepada setiap karyawan untuk berkariir dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. • All Stakeholders are entitled to receive benefits and equal treatment; • Opening equal and fair opportunities for every employee to have a career and carry out their duties regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

Maksud dan Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PPI bertujuan untuk:

1. Memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tata Kelola yang baik.
2. Melaksanakan pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja PPI menuju *well governed company*.
3. Memberikan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran Perseroan dan kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja PPI.

GCG Implementation Purpose and Objective

The implementation of GCG principles in PPI aims to:

1. Provide assurance to all stakeholders that the company is managed and controlled to protect stakeholders' interests in accordance with laws and good governance practices.
2. Fulfilling or complying with regulations is not only a requirement but also a necessity in enhancing PPI's performance towards becoming a well-governed company.
3. Provide guidance in determining the Company's policies and objectives and make a significant contribution to PPI's performance achievements.



Roadmap GCG

Penerapan praktik bisnis korporasi yang baik tercermin dalam pengembangan peta jalan GCG (*Government Governance and Governance*) yang terstruktur dan komprehensif. Peta jalan ini berfungsi sebagai referensi utama bagi manajemen dalam meningkatkan praktik tata kelola dan memperkuat regulasi terkait di PPI.

GCG Roadmap

The implementation of sound corporate business practices is reflected in the development of a structured and comprehensive GCG roadmap. This roadmap serves as a key reference for management in improving governance practices and strengthening related regulations at PPI.



Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas GCG, antara lain:

- Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.

Efforts To Improve The Quality Of GCG Implementation In 2025

By 2025, the Company has implemented efforts to improve the quality of GCG, including:

- The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation achieve its objectives by implementing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.

- Direksi melakukan revidu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil revidu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.
- Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.
- Menyediakan saluran penyebaran informasi yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.
- Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.
- The Board of Directors regularly reviews the design accuracy and operational effectiveness of the corporate governance, risk management, internal control, and compliance systems and reports the implementation and results of these reviews to shareholders through the Corporation's annual report.
- The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.
- Provides equitable, timely, and relatively affordable information dissemination channels for relevant information to users.
- The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including establishing the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management.

Penilaian GCG Oleh Pihak Eksternal

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting dalam mendorong tata kelola yang efektif di dalam BUMN, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Kerangka kerja GCG yang kuat memastikan bahwa BUMN beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, menyelaraskan tindakan mereka dengan kepentingan terbaik para pemangku kepentingan.

Itu sebabnya, dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG, PPI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi mereka, sehingga memaksimalkan potensi kinerja mereka. Kerangka kerja GCG yang mapan mendorong proses pengambilan keputusan yang baik, praktik manajemen risiko, dan perilaku etis di seluruh organisasi.

Lebih lanjut, penekanan yang kuat pada GCG memfasilitasi penyelarasan dan koordinasi organisasi yang lebih baik, menyederhanakan praktik manajemen perusahaan. Penyelarasan ini memungkinkan PPI untuk secara efektif mengejar dan mencapai target kinerja mereka, mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai.

GCG Assessment by External Party

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is paramount for fostering effective governance within state-owned enterprises (SOEs), ultimately aiming to optimize their performance. A robust GCG framework ensures that SOEs operate with transparency, accountability, and integrity, aligning their actions with the best interests of stakeholders.

Therefore, by adhering to GCG principles, PPI can enhance the efficiency and effectiveness of their operations, thereby maximizing their performance potential. A well-established GCG framework promotes sound decision-making processes, risk management practices, and ethical conduct throughout the organization.

Furthermore, a strong emphasis on GCG facilitates better organizational alignment and coordination, streamlining corporate management practices. This alignment enables PPI to effectively pursue and achieve their performance targets, driving sustainable growth and value creation.



Pada intinya, implementasi GCG berfungsi sebagai landasan untuk mendorong praktik tata kelola yang baik di Perseroan, memastikan bahwa mereka beroperasi pada potensi penuh mereka dan memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PPI menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Sesuai peraturan tersebut, PPI wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen.

Penilaian GCG dilakukan sebagai salah satu upaya PPI untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga PPI dapat mengetahui tingkat kecukupan penerapan dan aspek perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dasar Pelaksanaan Penilaian GCG

Penilaian kualitas penerapan GCG di Perseroan mengacu pada sejumlah aturan berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan *Assessment* GCG BUMN Tahun 2023;
3. Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/ CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023.

Kriteria yang Digunakan

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PPI mengacu pada metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024

In essence, the implementation of GCG serves as a cornerstone for fostering good governance practices within the Company, ensuring that they operate at their full potential and deliver value to stakeholders in a responsible and sustainable manner.

PPI implements the principles of GCG based on the Minister of SOE Regulation Number: Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, regarding the Implementation of GCG Practices in SOEs. According to this regulation, PPI is obliged to conduct periodic assessments of GCG implementation, at least once every 2 years, performed by independent assessors.

The GCG assessment is conducted as one of PPI's efforts to enhance the quality of GCG implementation, enabling PPI to determine the sufficiency of implementation levels and identify improvement aspects that need to be addressed by management.

Legal Basis for Conducting GCG Assessment

The assessment of GCG implementation quality in the Company refers to several regulations, including:

1. Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises;
2. Letter from the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and Directors of State-Owned Enterprises Number 52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, concerning the Implementation of the State-Owned Enterprise GCG Assessment for 2023;
3. Letter from the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to the Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024, concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

Criteria Used

The method for measuring GCG implementation in the PPI environment refers to the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter of the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board

tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asessmen GCG BUMN Tahun 2023 dan Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/ RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023.

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi.

and the Board of Directors of SOEs Number S-52/DKU. MBU/10/2024, dated October 15, 2024 concerning the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023 and the Letter of the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to the Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/ RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024 concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

According to the Self Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations.

Skor GCG

GCG Score

Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024

Summary of Good Corporate Governance Assessment in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2024

Prinsip Principles					
Prinsip 1 Principle 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Role and Responsibility of Board of Directors and Board of Commissioners	30	dari of	30	rekomendasi recommendations
Prinsip 2 Principle 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Composition and Remuneration	11	dari of	11	rekomendasi recommendations
Prinsip 3 Principle 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relation between Board of Directors and Board of Commissioners	5	dari of	5	rekomendasi recommendations
Prinsip 4 Principle 4	Perilaku Etis Ethical Conducts	4	dari of	4	rekomendasi recommendations
Prinsip 5 Principle 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	6	dari of	6	rekomendasi recommendations
Prinsip 6 Principle 6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	6	dari of	7	rekomendasi recommendations
Prinsip 7 Principle 7	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	8	dari of	9	rekomendasi recommendations
Prinsip 8 Principle 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan Stakeholders' Rights	4	dari of	4	rekomendasi recommendations
JUMLAH TOTAL		74	dari of	76	rekomendasi recommendations

Struktur dan Mekanisme GCG

GCG Structure and Mechanism

Infrastruktur GCG

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas dalam pengambilan keputusan dan operasional, sehingga mendorong praktik bisnis yang etis dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Komponen kunci dari infrastruktur ini adalah struktur organisasi yang jelas yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab dewan, manajemen, dan pemangku

GCG infrastructure

The infrastructure of Good Corporate Governance (GCG) comprises the frameworks, policies, procedures, and mechanisms established to ensure transparency, accountability, fairness, and integrity in decision-making and operations, thereby fostering ethical business practices and strengthening stakeholder trust. A key component of this infrastructure is a clear organization structure that defines the roles and responsibilities of the board, management, and other stakeholders to



kepentingan lainnya untuk memastikan kewenangan dan akuntabilitas yang tepat. Di PPI, organ tata kelola utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, yang masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung implementasi GCG yang efektif.

Selain organ utama, PPI juga memiliki sejumlah organ pendukung, di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Manajemen Risiko
2. Organ pendukung Direksi:
 - a. Sekretaris Perusahaan
 - b. Satuan Pengawasan Intern

ensure proper authority and accountability. At PPI, the main governance organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, each of which carries out its duties and responsibilities in supporting the effective implementation of GCG.

In addition to the main organs, PPI also has several supporting organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Supporting organs under the Board of Commissioners:
 - a. Secretary to the Board of Commissioners
 - b. Audit Committee
 - c. Risk Management Committee
2. Supporting organs under the Board of Directors:
 - a. Corporate Secretary
 - b. Internal Audit Unit



GCG Soft Structure

Sebagai bagian dari upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di seluruh lini usaha, PPI telah menyusun dan mengesahkan sejumlah *Governance Soft Structure*, antara lain:

Soft Structure GCG

As part of efforts to consistently implement GCG principles across all business lines, PPI has developed and ratified several Soft Structure Governance, including:

No.	Perangkat Kebijakan Policy Instruments	Pengesahan dan/atau Pembaharuan Ratification and/or Amendment
1.	Anggaran Dasar Perseroan Articles of Association of the Company	Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Mkn Notaris di Jakarta beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Deed of Amendment to the Articles of Association of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 12 dated March 21, 2024, made before Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with the approval of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
2.	Panduan Perilaku Code of Conduct	Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 10a/DU/SKD/ PPI/VI/2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policy on Company Information Classification and Management, Policy on Acceptance and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.
3.	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Policy on Violation Reporting Systems	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 59/DK/PT.PPI/XII/2013 dan Nomor 40/DU/SKD/PPI/XII/2013 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) dan terakhir diperbarui melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan(<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan,Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia(Persero)Number59/DK/PT.PPI/XII/2013 and Number 40/DU/SKD/PPI/XII/2013 concerning the Whistleblowing System Policy and last revised through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policy on Company Information Classification and Management, Policy on Acceptance and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.
4.	Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah Policy on Acceptance and Giving of Gifts	Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 24/PERDIR/ PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). The Board of Directors Regulation of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 24/PERDIR/PPI/VII/2024 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
5.	Kebijakan Anti-Penyuapan Anti-Bribery Policy	Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 29/DU/SKD/ PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 concerning the Anti-Bribery Policy of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
6.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Guidelines for Gratification Control	Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 24/PERDIR/ PPI/ VII/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). The Board of Directors Regulation of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 24/PERDIR/PPI/VII/2024 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
7.	<i>Board of Manual</i>	Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 35/DU/ KEPDIR/PPI/X/2021 tentang <i>Board Manual</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 concerning the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).



Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu

Information About Direct and Indirect Majority and Controlling Shareholders Up to the Individual Owner

Komposisi dan informasi mengenai Pemegang Saham PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

The composition and information regarding PPI Shareholders can be seen in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi PPI, yang mempunyai hak dan wewenang melebihi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Dasar PPI. Penyelenggaraan RUPS setiap tahunnya, berfungsi sebagai *platform* akuntabilitas kepada pemegang saham.

Pada dasarnya RUPS merupakan wadah formal bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya, menyampaikan pendapat, mengambil keputusan atas kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, dan memperoleh informasi mengenai kinerja PPI.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu atau membahas hal-hal tertentu, antara lain:

1. Rapat Umum Tahunan (RUPST)
Diselenggarakan setahun sekali sesuai amanat undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPST terutama fokus pada pembahasan dan persetujuan laporan keuangan tahunan, pemilihan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, penetapan pembayaran dividen, dan penyelesaian hal-hal lain yang berkaitan dengan tata kelola dan kinerja perusahaan.
2. Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)
RUPSLB diselenggarakan setiap waktu selain RUPST untuk menangani hal-hal yang mendesak atau luar biasa yang tidak dapat ditunda hingga RUPST berikutnya. Hal-hal tersebut dapat mencakup perubahan signifikan terhadap struktur permodalan perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, merger atau akuisisi, atau keputusan penting lainnya yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the supreme body of PPI, endowed with rights and authorities beyond those granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified by laws, regulations, and PPI's Articles of Association. The GMS convenes annually, serving as a platform for accountability to shareholders.

Fundamentally, the GMS acts as a formal avenue for shareholders to exercise their rights, express opinions, make decisions on strategic policies pertaining to the Company's management, and acquire information regarding PPI's performance.

The General Meeting of Shareholders (GMS) can typically be classified into several types, each serving a specific purpose or addressing particular matters, include:

1. Annual General Meeting (AGM)
Held once a year as mandated by law or the Company's Articles of Association. The AGM is primarily focused on discussing and approving annual financial statements, electing members of the Board of Directors or Board of Commissioners, determining dividend payments, and addressing other matters related to corporate governance and performance.
2. Extraordinary General Meeting (EGM)
EGM is convened at any time other than the AGM to address urgent or extraordinary matters that cannot wait until the next AGM. These matters may include significant changes to the company's capital structure, amendments to the Articles of Association, mergers or acquisitions, or other critical decisions requiring shareholder approval.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki saham suatu perusahaan. Per 31 Desember 2025, kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia (BP BUMN RI). Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (RoS) yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Hak-Hak Pemegang Saham

Berikut ini adalah hak-hak pemegang saham yang harus dan wajib dilindungi oleh PPI, antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
2. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
3. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;
5. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila Perusahaan dilikuidasi;
6. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah);
7. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perusahaan; dan
8. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham

Pemegang saham perseroan adalah kepemilikan tunggal yakni dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Meskipun tidak memiliki struktur kepemilikan saham hingga pemilik individu, PPI tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi pemegang saham sebagai bentuk kesadaran penuh atas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of a company. As of December 31, 2025, the Company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia (BP BUMN RI). The share ownership has been recorded and administered in the Register of Shareholders (RoS) which is managed by the Corporate Secretary.

Shareholder Rights

The following are the rights of shareholders that must be protected by PPI, including:

1. Attending the GMS and voting in accordance with the classification and number of shares owned;
2. Receiving distribution of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares owned;
3. Obtaining material information about the Company in a timely and regular manner;
4. Granting power of attorney with substitution rights to individuals or legal entities to represent them in the GMS;
5. Receiving proportionally the remainder of the liquidation calculation if the Company is liquidated;
6. Filing a lawsuit to the District Court against a member of the Board of Directors whose mistake or negligence has caused a loss to the Company (Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights);
7. Viewing the Register of Shareholders and the Special Register during the Company's office hours; and
8. Holding a GMS in the event that the Board of Directors fails to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Equal Treatment for Shareholders

The Company's shareholders are sole proprietorship which is owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Although it does not have a share ownership structure to individual owners, PPI still upholds the principles of equality and justice for shareholders as a form of full awareness of the implementation of GCG principles.



Kewenangan RUPS

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Adapun yang menjadi area kewenangan RUPS, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
3. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

GMS Authority

Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the GMS is a Company Organ that has authority that cannot be given to either Board of Commissioners or Board of Directors.

The areas of authority of the GMS include:

1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Providing decisions needed to protect the Company's business interests in the long and short term in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
3. Giving approval to the Annual Report including ratifying the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
4. Making decisions through an open, fair and accountable process; and
5. Implementing Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility.

Pelaksanaan RUPS tahun 2025

Pada tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS RKAP Perusahaan Tahun 2025 pada tanggal 30 Januari 2025 dan RUPS Tahunan Laporan Pertanggung Jawaban Manajemen Tahun 2024 tanggal 12 November 2025.

Implementation of GMS in 2025

In 2025, the Company held 2 (two) GMS: GMS on the Company's Work and Budget Plan (RKAP) on January 30, 2025, and GMS on Management Accountability Report on November 12, 2025.

Jenis RUPS Type of GMS	RUPS RKAP Perusahaan Tahun 2025 GMS on RKAP 2025
Hari/Tanggal Day/Date	Kamis, 30 Januari 2025 Thursday, January 30, 2025
Waktu Time	19.13 WIB
Tempat Venue	Waskita Rajawali Tower, Jakarta Selatan, Indonesia
Kehadiran Attendance	• PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham/ Shareholders • Hamli, Komisaris Utama/ President Commissioner • Setiawan Wangsaatmaja, Komisaris/ Commissioner • Soegeng Hernowo, Direktur Utama/ President Director • Wien Irwanto, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum/ Director of Finance, Risk Management, HR and General Affairs • Edhy Rizwan, Direktur Komersial dan Pengembangan/ Director of Commercial and Development • Novita Anggraeny, Direktur Operasi/ Director of Operations

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab

The GMS Resolutions have been stated in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders Ratifying the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Work and Budget Plan for the Social and Environmental

Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2025 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 37 tanggal 30 Januari 2025.

Responsibility Program (RKA TJSL) for 2025 of PT Perusahaan Dagang Indonesia Number 37 dated January 30, 2025.

Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The results of the GMS decisions along with their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2025 are as follows:

Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Hasil Keputusan Follow-up on Resolutions
Agenda 1 Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2025.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025.	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. RKAP 2025 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.
1st Agenda Ratification of the Company Work and Budget Plan (RKAP) 2025, as well as the Board of Commissioners Work and Budget Plan (RKA) 2025.	Ratified the Company Work and Budget Plan (RKAP) 2025, as well as the Board of Commissioners Work and Budget Plan (RKA) 2025.	Results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes. The ratified RKAP 2025 serves as a work guideline for the company's management by the Board of Directors and as a means of monitoring and overseeing for the Board of Commissioners.
Agenda 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Perseroan Tahun 2025.	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. RKA-TJSL 2025 menjadi pedoman kerja program TJSL Perseroan di sepanjang tahun 2025.
2nd Agenda Ratification of the Social and Environmental Responsibility Program Work and Budget Plan (RKA-TJSL) 2025.	Ratified the Company Social and Environmental Responsibility Program Work and Budget Plan (RKA-TJSL) 2025.	Results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes. The RKA-TJSL 2025 serves as a guideline for the Company's TJSL program throughout 2025.
Agenda 3 Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2025.	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2025 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rapat ini.	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. Direksi telah menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai dengan KPI yang telah ditentukan.
3rd Agenda Determination of the Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPI) Target of the Board of Directors collegially and the Board of Commissioners for 2025.	Determined an Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPI) Target of the Board of Directors collegially and the Board of Commissioners for 2025 between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders, which serves as an integral part of this Meeting Resolution.	The results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes. The Board of Directors has carried out the management of the Company in accordance with the pre-determined KPIs.



Jenis RUPS Type of GMS	RUPS Laporan Pertanggung Jawaban Manajemen Tahun 2024 GMS on Management's Accountability Report for 2024
Hari/Tanggal Day/Date	Rabu, 12 November 2025 Wednesday, November 12, 2025
Waktu Time	14.20 WIB
Tempat Venue	Grha PPI, Jakarta Pusat, Indonesia
Kehadiran Attendance	- BP BUMN RI, selaku Pemegang Saham/ Shareholders - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham/ Shareholders - Setiawan Wangsaatmaja, Komisaris/ Commissioner - Gigih Guntoro, Komisaris independen dan Koordinator Komisaris/ Independent Commissioner and Coordinator of Commissioner - Soegeng Hernowo, Direktur Utama/ President Director - Edhy Rizwan, Direktur Komersial dan Pengembangan/ Director of Commercial and Development - Novita Anggraeny, Direktur Operasi/ Director of Operations

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024 Nomor 29 tanggal 12 November 2025.

The GMS Resolutions have been stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Trading Indonesia for Fiscal Year 2024 Number 29 dated November 12, 2025.

Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The results of the GMS decisions along with their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2025 are as follows:

Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Hasil Keputusan Follow-up on Resolutions
Agenda 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, termasuk pengesahan Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. - Mengesahkan: - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 01147/2.1030/AU. 1/05/1154-1/1/VII/2025 tanggal -28 Juli 2025.dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" - Penyajian kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2022, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 01147/2.1030/AU. 1/05/1154-1/1/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 dengan opini "wajar, dalam Semua Hal yang Material," dan	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS.

Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Hasil Keputusan Follow-up on Resolutions
1st Agenda Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024, Approval of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024, including ratification of the Restatement of the Consolidated Financial Report for the Fiscal Year 2023 and Consolidated Financial Report for the Fiscal Year 2022, as well as ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year, as well as granting full settlement and release of responsibility (volledig). acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's management actions and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the Financial Year 2024.	c. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab osial dan Lingkungan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 01187/2.1030/AU.2/12/1154-1/0/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan opini "wajar, dalam semua - hal yang material." 1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year which ended on December 31, 2024. 2. Confirm: a. The Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024 - which ended on December 31, 2024, has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM) as stated in the report Number -01147/2.1030/AU. 1/05/1154-1/1/VII/2025 dated July 28, 2025.with an opinion of "fair, in all material respects" b. Restatement of the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 and Fiscal Year 2022, which ended on December 31, 2023 and December 31, 2022, as contained in report Number 01147/2.1030/AU. 1/05/1154-1/1/VII/2025 dated July 28, 2025 with an opinion of "fair, in all material respects," and c. Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024 ended on December 31, 2024 which is part of the Social and Environmental Responsibility Report, which has been audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM) as stated in report Number 01187/2.1030/AU.2/12/1154-1/0/VIII/2025 dated August 15, 2025 with the opinion "unqualified, fairly presented in all - material respects."	Results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes.
Agenda 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024. 2nd Agenda Determination of the use of the Company's Consolidated Net Profit for the Fiscal Year 2024.	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 seluruhnya ditetapkan sebagai cadangan. Determine the use of the Company's Consolidated Current Year Net Profit for the Fiscal Year 2024 as a reserve.	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. Results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes.



Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Hasil Keputusan Follow-up on Resolutions
Agenda 3 Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 serta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B.	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS.
3rd Agenda Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for 2025 and Tantiem/Performance Incentives for Fiscal Year 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners.	Determination of Tantiem/Performance Incentives for the Fiscal Year 2024 as well as salaries/honorariums along with facilities and allowances for the 2025 Financial Year for the Directors and Board of Commissioners, will be determined separately by the Series B Shareholders.	Results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes.
Agenda 4 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Untuk Tahun Buku 2025.	1. Menunjuk Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Direksi Individual serta Laporan Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa Audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B untuk: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan b. Menetapkan kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.	Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS.

Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Hasil Keputusan Follow-up on Resolutions
4th Agenda Determination of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Report and Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2025.	1. Appoint the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Accounting Firm as the Public Accounting Firm that will carry out the Consolidated Financial Report Audit, PSA 62 Compliance Audit, Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report Audit related to the Social and Environmental Responsibility Program, and implement agreed procedures on the Corporate KPI and Individual Director KPI Performance Evaluation Reports as well as the 2025 Financial Year Composite Risk Evaluation Report. 2. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services of the Public Accounting Firm that has been approved and additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm. 3. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners after first obtaining written approval from Series B Shareholders to: a. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason; and b. Determine the conditions for the appointment and honorarium for the substitute Public Accounting Firm.	Results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perusahaan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat atau rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memastikan penerapan GCG PPI telah berjalan efektif dan berkelanjutan pada setiap tingkatan organisasi.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris PPI dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. *Level Performance*: Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta menyampaikan masukan/rekomendasi kepada RUPS.
2. *Level Conformance*: Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan tahap lanjut untuk memastikan nasihat yang diberikan telah dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan telah dipatuhi dengan baik.

Dasar Hukum

Keberadaan dan prosedur pengangkatan ataupun pemberhentian Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The Board of Commissioners is the principal organ of the company collectively responsible for overseeing the general and/or specific management functions of the company in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations. Additionally, the Board of Commissioners also advises or recommends to the Board of Directors regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Directors, and ensures that the implementation of GCG at PPI has been effective and sustainable at every level of the organization.

The supervisory function of the PPI Board of Commissioners is carried out in two (2) levels:

1. *Performance Level*: The Board of Commissioners provides guidance and instructions to the Board of Directors and conveys input/recommendations to the General Meeting of Shareholders (RUPS).
2. *Conformance Level*: The Board of Commissioners conducts advanced supervisory activities to ensure that the advice given has been implemented and that the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association have been properly complied with.

Legal Basis

The existence and procedures for the appointment or dismissal of PPI Board of Commissioners refer to several applicable regulations, including:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. PPI's Articles of Association;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG khususnya terkait pemisahan tugas dan wewenang secara jelas, maka Dewan Komisaris senantiasa menjadikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Secara umum, isi pokok *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan Dewan Komisaris
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Komisaris Independen
7. Etika Jabatan Dewan Komisaris
8. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
9. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris
13. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya sudah berakhir maka dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.

Board of Commissioners' Manual

In order to uphold the principles of GCG, especially regarding clear separation of duties and authorities, the Board of Commissioners consistently refers to the Manual of the Board of Commissioners in carrying out its duties. The Manual of the Board of Commissioners is regulated in the Board Manual established based on Board of Directors Decree No. 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policies on Classification and Management of Company Information, Policies on Receipt and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

In general, the content of the Board Manual as guidelines and rules of the Board of Commissioners' work regulates the following:

1. Functions of the Board of Commissioners
2. Requirements for the Board of Commissioners
3. Composition and Membership
4. Term of Office
5. Introduction and Capability Enhancement Program
6. Independent Commissioners
7. Board of Commissioners' Code of Ethics
8. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
9. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
10. Board of Commissioners' Meetings
11. Board of Commissioners' Performance Evaluation
12. Supporting Organs of the Board of Commissioners
13. Board of Commissioners' Accountability.

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office for members of the Board of Commissioners is five (5) years from the date set by the General Meeting of Shareholders (RUPS) that appoints them and ends at the closing of the 5th Annual GMS after their appointment date, but this provision does not diminish the GMS's right to dismiss Board of Commissioners members at any time before their term ends.

For members of the Board of Commissioners whose terms have ended, they may be reappointed by the GMS for one (1) subsequent term.



Per 31 Desember 2025, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PPI berjumlah 3 (empat) orang di mana 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen, atau setara 25% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi keanggotaan Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

As of December 31, 2025, the number and composition of PPI's Board of Commissioners amounted to 4 (four) individuals, with 1 (one) of them being an Independent Commissioner, or equivalent to 25% of the total number of Board of Commissioners members. Thus, the composition of the membership of PPI's Board of Commissioners has complied with applicable laws and regulations.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara.

The positions of each member of the Board of Commissioners, including the Chief Commissioner, are equal.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025:

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Komisaris Commissioner	Setiawan Wangsaatmaja	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Minister of State-Owned Enterprises with number: SK 385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	2 Desember 2021 s.d. 2 Desember 2026. December 2, 2021 to December 2, 2026.	Ke-1. First.
Komisaris Independen Independent Commissioner	Gigih Guntoro	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: SK-228/MBU/10/2024 dan Nomor: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholder of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: SK-228/MBU/10/2024 and Number: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	18 Oktober 2024 s.d. 18 Oktober 2029. October 18, 2024 to October 18, 2029.	Ke-1. First.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegial, antara lain:

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

As stated in the Board Manual of the Board of Commissioners, the following is a collegial description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. 2. Mematuhi Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Complying with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders resolutions and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. 3. Memantau dan memastikan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di Perusahaan. Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably in the Company. 4. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan. Ensuring that the Board of Directors has established an effective internal control system to secure the Company's assets. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation these policies.	1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company; 2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi; Researching and reviewing as well as signing the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors; 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP; Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP; 4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company; 3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance; 5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan termasuk memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta; Researching and reviewing periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report including providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if requested; 6. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Preparing the annual work plan and budget for the Board of Commissioners and including it in the Company's Work Plan and Budget (RKAP); 7. Membentuk Komite Audit; Establishing an Audit Committee;



Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
6. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ditetapkan Direksi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut dan penerapannya. Supervising the policies on the management of subsidiaries/ joint ventures that have been determined by the Board of Directors, including providing input on these policies and their implementation. 7. Melakukan penilaian dengan memberikan tanggapan tertulis terkait proses pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS. Conducting an assessment by providing written responses related to the appointment process of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/ Joint Ventures to be further submitted to the GMS. 8. Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Ensuring that the Board of Directors has disclosed important company information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner. 9. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maintaining the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.	7. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut; Proposing the determination of the External Auditor to the GMS based on the proposal from the Audit Committee, including submitting to the GMS the reasons for the nomination and the proposed amount of honorarium/ remuneration for the External Auditor; 8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; Making the minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping a copy thereof; 9. Membuat Daftar Khusus yang di dalamnya memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada PPI maupun perusahaan lain; Making a Special Register which contains information regarding the share ownership of Members of the Board of Commissioners and their families in PPI and other companies; 10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; Providing a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS; 11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Carrying out other obligations to carry out the function of supervision and providing advice, as long as it does not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Komisaris

Division of Scope of Duties Between the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Lingkup Tugas Scope of Duties
Setiawan Wangsaatmaja Komisaris Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Committee
Gigih Guntoro Komisaris Commissioner	Koordinator Bidang Teknik, Umum dan Pengembangan dan Anggota Pengawasan 3 (tiga) bidang lainnya, serta Ketua Komite Audit. Coordinator for Engineering, General Affairs and Development and Supervisory Members for 3 (three) other fields, as well as Chairman of the Audit Committee.

Hak dan Kewenangan

Secara garis besar, Dewan Komisaris PPI mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan, melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Menetapkan pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan komite-komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
5. Dewan Komisaris melalui keputusan yang diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
6. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rights and Authorities

In general terms, the Board of Commissioners of PPI carries out tasks and responsibilities to:

1. Enter the premises, buildings, and offices used by the Company, inspect books, documents, and other papers, examine cash for verification purposes, and other valuable securities, as well as inspect the Company's assets.
2. If deemed necessary, the Board of Commissioners may, at the Company's expense and for a limited period, seek assistance from experts to conduct examinations in accordance with their duties and authorities.
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to the management of the Company.
4. Determine the division of tasks and committee membership among the Members of the Board of Commissioners, and for the smooth functioning of the Board of Commissioners, may be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and committees appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense.
5. The Board of Commissioners, through decisions made in accordance with the procedures for decision-making by the Board of Commissioners, has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if they act contrary to the Company's Articles of Association, or if there are indications of causing losses to the Company, or neglecting their duties, or if there are urgent reasons for the Company.
6. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have any Directors, then temporarily the Board of Commissioners is obliged to manage the Company. In such cases, the Board of Commissioners has the right to temporarily delegate authority to one or more of its members, at the expense of the Board of Commissioners.
7. Each Member of the Board of Commissioners is entitled to receive remuneration and allowances/ facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by the General Meeting of Shareholders, taking into account the provisions stipulated in the Company's regulations and applicable laws and regulations.



Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan dan kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar PPI.

Kriteria Dewan Komisaris PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PPI; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Dewan Komisaris PPI mengacu pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 14 hingga ayat 20.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

Criteria for Members of the Board of Commissioners

All members of the PPI Board of Commissioners have met the provisions and qualifications as individuals to serve as Commissioners as stipulated in the Articles of Association of PPI.

The criteria for PPI's Board of Commissioners include:

1. Competent/able to perform legal actions.
2. Within 5 (five) years before appointment, has never:
 - a. Been declared bankrupt;
 - b. Served as a Director or Member of the Board of Commissioners or Supervisory Board deemed guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
 - c. Been convicted of crimes detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
3. Committed to compliance with laws and regulations;
4. Have knowledge and/or expertise in the fields required by PPI; and
5. Meet other requirements as stipulated in the Company Law, capital market regulations, and other applicable laws and regulations.

Mechanism for Appointment, Dismissal, and Resignation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by shareholders through the General Meeting of Shareholders (RUPS). The procedures for the appointment, dismissal, and resignation of the PPI Board of Commissioners refer to Articles 14 to 20 of the PPI Articles of Association.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, with due observance of the provisions in the Articles of Association, in which the General Meeting of Shareholders is attended by Series A Dwiwarna Shareholders, and the meeting resolutions must be approved by Series A Dwiwarna Shareholders. This provision also applies to the General Meeting of Shareholders held to revoke or strengthen the decision to temporarily dismiss members of the Board of Commissioners.

Dismissal of members of the Board of Commissioners is executed if based on existing reality, the members of the Board of Commissioners concerned, among others:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri.

Di samping alasan di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Program Orientasi/ Pengenalan bagi Komisaris Baru

Sebagai organ utama yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengenal seluruh aktivitas bisnis PPI dari hulu ke hilir. Untuk itu, perseroan menyediakan Program Orientasi/Pengenalan bagi anggota Komisaris baru agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai karakteristik, proses bisnis, serta kondisi-kondisi yang terjadi di PPI.

Dengan begitu, PPI berharap setiap anggota Komisaris baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana di amanahkan di dalam *Board Manual*. Program Orientasi bagi anggota Komisaris baru, meliputi:

- a. Program Pengenalan Mempertimbangkan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham dan *stakeholders*, maka sangat dimungkinkan diantara Anggota Dewan Komisaris tersebut belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Dengan demikian, perseroan menilai keberadaan Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan.
- b. Program Peningkatan Kapabilitas Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

1. Unable to perform his/her duties properly;
2. Not implementing the provisions of laws and/or provisions of the Articles of Association;
3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Carrying out actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise;
5. Being found guilty by a court decision with permanent legal force;
6. Resigning.

In addition to the reasons above, the General Meeting of Shareholders may dismiss members of the Board of Commissioners for other reasons deemed appropriate for the Company's interests and objectives.

Orientation/Introduction Program for New Commissioners

As the main body overseeing the management of the company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is required to understand all of PPI's business activities from upstream to downstream. Therefore, the company provides an Orientation/Introduction Program for new Commissioners so that they gain a deeper and comprehensive understanding of the characteristics, business processes, and conditions occurring in PPI.

In this way, PPI hopes that each new Commissioner can fulfill their duties and responsibilities to the best of their ability as outlined in the Board Manual. The Orientation Program for new Commissioners includes:

- a. Introduction Program Considering the diverse backgrounds of the Board of Commissioners' members representing shareholders and stakeholders, it is highly likely that these members may not know each other or have never worked together before. Therefore, the company deems the presence of an Introduction (Orientation) Program crucial.
- b. Capability Enhancement Program The Capability Enhancement Program is essential to ensure that Board of Commissioners members are always updated on the latest developments in the company's business activities and other relevant knowledge related to their duties.



Kebijakan Rangkap Jabatan

Merujuk pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 32, anggota Dewan Komisaris PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/ atau calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

PPI melarang setiap Insan perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis perseroan yang berdampak pada objektivitas serta pertimbangan komersial.

Dewan Komisaris diamanatkan untuk menjaga profesionalisme dan independensinya sehingga wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan saat melaksanakan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Mengacu pada kebijakan *Board Manual*, anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/ atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan

Policy on Holding Concurrent Positions

Referring to Article 13 of the PPI Articles of Association paragraph 32, members of the PPI Board of Commissioners are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Membership in the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions as stipulated by laws and regulations, political party officials and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and
3. Other positions that may cause conflicts of interest.

Disclosure of information regarding concurrent positions held by all members of the PPI Board of Commissioners has been made in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection, in this Annual Report.

Management of Conflicts of Interest by the Board of Commissioners

PPI prohibits any individual within the company from being in a situation that creates a conflict of interest, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The company defines a conflict of interest as a conflict between personal economic interests and the company's economic interests that affect objectivity and commercial considerations.

The Board of Commissioners is mandated to maintain professionalism and independence, thus requiring the management of conflicts of interest while performing oversight functions.

Therefore, the Board of Commissioners should always avoid activities or actions that may trigger conflicts of interest, both now and in the future. Referring to the Board Manual policy, members of the Board of Commissioners are not allowed to hold concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions as stipulated by laws and regulations, political party officials and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and

3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan PPI yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memegang jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Independensi Dewan Komisaris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang dapat memengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris tahun 2025.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmaja	Gigih Guntoro
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee.	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/ atau pemegang saham utama yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan terbaik perusahaan.

3. Other positions that may cause conflicts of interest.

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by PPI regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to hold concurrent positions as stipulated by the applicable laws and regulations in an effort to avoid potential conflicts of interest.

Independency of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners carries out their supervisory function independently or free from pressure, influence, and/or conflicts of interest with other parties. This commitment is reflected in the Board of Commissioners' independence statement, which is regularly updated. Members of the Board of Commissioners are obligated to report any changes in status that may affect their independence.

Throughout the year 2025, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners as stated in the Board of Commissioners' independence statement for the year 2025.

Declaration of Independence of the Board of Commissioners

Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmaja	Gigih Guntoro
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee.	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓

Independent Commissioner

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Directors, other Commissioners, and/or major shareholders that could affect their ability to act independently in the best interests of the company.



Melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: SK-228/MBU/10/2024 dan Nomor: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Perseroan mengangkat Gigih Guntoro sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan demikian, PPI telah memenuhi ketentuan UU PT yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib menempatkan minimal satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen PPI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi perseorangan sebagai Komisaris Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PPI dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PPI pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PPI;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPI, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama PPI; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PPI.

Profil Komisaris Independen

Profil lengkap Gigih Guntoro selaku Komisaris Independen PPI dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komisaris

Komisaris independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menghindari benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak.

Through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholder of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: SK 228/MBU/10/2024 and Number: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), the Company appointed Gigih Guntoro as the Independent Commissioner.

As a result, PPI has fulfilled the provisions of the Company Law, which requires that every company shall position at least one Independent Commissioner or at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.

Criteria for Determining Independent Commissioners

All members of the Independent Commissioners of PPI have met the individual requirements and qualifications as Independent Commissioners, including the following:

1. Not being a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PPI in the last six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of PPI in the following period;
2. Does not own shares, either directly or indirectly, in PPI;
3. Does not have any affiliation with PPI, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of PPI; and
4. Does not have any direct or indirect business relationships related to PPI's business activities.

Profile of Independent Commissioners

The complete profile of Gigih Guntoro as the Independent Commissioner of PPI can be seen in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Statement of Independence of Independent Commissioners

Independent Commissioners are committed to upholding independence, objectivity, and fairness in carrying out their duties and responsibilities by avoiding conflicts of interest or preferences for the interests of any party.

Komisaris independen senantiasa menjaga reputasi Perusahaan melalui penerapan prinsip GCG yang benar, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan kebijakan yang diambil baik secara individual maupun mufakat. Komisaris independen juga berkewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan), serta Rapat Dewan Komisaris bersama komite-komite.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Mengacu pada Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar PPI, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan mengikuti rapat, maka rapat tetap dapat berlangsung dan Ketua Rapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling lama atau anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam hal usia.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan mekanisme tersebut disebut keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 18 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%Kehadiran %Attendance
Hamli	Komisaris Utama President Commissioners	3	3	100%
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioners	18	18	100%
Gigih Guntoro	Komisaris Independen Independent Commissioners	18	18	100%

Independent Commissioners always maintain the Company's reputation through the application of correct GCG principles, reflected in their attitudes, actions, and policies taken individually or collectively. Independent Commissioners also have an obligation to report any changes in their status that affect their independence.

Meeting of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' meetings consist of Internal Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with invited Directors (Joint Meetings), and Board of Commissioners meetings with committees.

Board of Commissioners Meeting Policy

Referring to Article 16 Paragraph (7) of PPI's Articles of Association, Board of Commissioners meetings must be held at least once every month and chaired by the Chairman of the Commissioners. If the Chairman of the Commissioners is unable to attend or is unable to participate in the meeting, the meeting may still proceed, and the Chairmanship shall be assumed by another member of the Board of Commissioners designated by the Chairman of the Commissioners and/or the member of the Board of Commissioners with the longest tenure or the oldest member of the Board of Commissioners in terms of age.

The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting provided that all members of the Board of Commissioners have given written approval to the proposed motion and have signed such approval. Decisions made using this mechanism are called circular decisions. Decisions made in this manner have the same force as decisions made validly in a Board of Commissioners meeting.

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout the year 2025, the Board of Commissioners has held 18 internal meetings with the following details:



Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris disampaikan dalam tabel dibawah ini :

The Agenda of the Board of Commissioners' Internal Meetings are presented in the following table:

Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang tidak hadir & alasan ketidakhadiran Board of Commissioners Absence and their reason
21 Januari 2025 January 21, 2025	- Pembahasan Draft RKAP 2025; - Pembahasan Kinerja s.d Bulan Desember 2024; - Lain-lain. - Discussion of the 2025 Draft Work Plan and Budget (RKAP); - Discussion of Performance as of December 2024; - Others.	Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
21 Februari 2025 February 21, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Januari 2025; - Lain-lain. - Discussion of Performance as of January 2025; - Others.	Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
24 Maret 2025 March 24, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Februari 2025; - Lain-lain. - Performance Discussion as of February 2025; - Others.	Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
10 April 2025 April 10, 2025	Pembahasan Koordinator Komisaris Discussion on Coordinator Commissioner	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
22 April 2025 April 22, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Maret 2025; - Lain-lain. - Performance Discussion as of March 2025; - Others.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
14 Mei 2025 May 14, 2025	Rapat Tematik Aset dan Piutang Thematic Meeting on Assets and Receivables	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
22 Mei 2025 May 22, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan April 2025; - Lain-lain. - Discussion of Performance as of April 2025; - Others.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
23 Juni 2025 June 23, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Mei 2025; - Lain-lain. - Discussion of Performance as of May 2025; - Others.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
22 Juli 2025 July 22, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juni 2025 (Kinerja Semester I Tahun 2025); - Lain-lain. - Discussion of Performance as of June 2025 (Performance as of 1st Semester 2025); - Others.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
13 Agustus 2025 August 13, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli 2025; - Lain-lain. - Discussion of Performance as of July 2025; - Others.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-

Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang tidak hadir & alasan ketidakhadiran Board of Commissioners Absence and their reason
15 September 2025 September 15, 2025	- Finalisasi dokumen untuk RUPS - Tanggapan Dekom atas KL 2024 <i>audited</i> - Usulan KAP untuk audit 2025 - Usulan Remunerasi Direksi & Dekom - Update dari Komite terkait surat Dirut No 0463/DU/EKS/PPI/IX/2025 terkait Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sewa oleh PT BLI	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
19 September 2025 September 19, 2025	- Pembahasan respon Dekom atas Surat Direktur Utama PT PPI, sebagai berikut: - Nomor 0463/DU/EKS/PPI/IX/2025 terkait Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sewa oleh PT BLI; - Nomor 0470/DU/EKS/PPI/IX/2025 terkait Permohonan Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap untuk Perpanjangan di BNI; - Nomor 0471/DU/EKS/PPI/IX/2025 terkait Permohonan Tanggapan atas Kepemilikan Saham PT MBI. Discussion of the Board of Commissioners' response to the Letter from the President Director of PT PPI, as follows: - Number 0463/DU/EKS/PPI/IX/2025 regarding the Application Approval of Lease Extension by PT BLI; - Number 0470/DU/EKS/PPI/IX/2025 regarding the Application Approval to Collateralize Fixed Assets for Extension at BNI; - Number 0471/DU/EKS/PPI/IX/2025 regarding the Application Feedback to PT MBI Share Ownership.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
26 September 2025 September 26, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus 2025; - Lain-lain.	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
20 Oktober 2025 October 20, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d bulan September 2025; - Lain-lain	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-



Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang tidak hadir & alasan ketidakhadiran Board of Commissioners Absence and their reason
23 Oktober 2025 October 23, 2025	Pembahasan respon Dekom atas Surat Direktur Utama PT PPI, sebagai berikut: - Nomor 0463/DU/EKS/PPI/IX/2025 terkait Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sewa oleh PT BLI; - Nomor 0507/DU/EKS/PPI/X/2025 terkait Permohonan Persetujuan Perpanjangan Aset – Medan; - Nomor 0508/DU/EKS/PPI/X/2025 terkait Permohonan Persetujuan Perpanjangan Aset – Palembang; - Nomor 0509/DU/EKS/PPI/X/2025 terkait Permohonan Persetujuan Perpanjangan Aset – Lampung Discussion of the Board of Commissioners' response to the Letter from the President Director of PT PPI, as follows: - Number 0463/DU/EKS/PPI/IX/2025 regarding the Application Approval of Lease Extension by PT BLI; - Number 0507/DU/EKS/PPI/X/2025 regarding the Application Asset Extension Approval – Medan; - Number 0508/DU/EKS/PPI/X/2025 regarding the Application Asset Extension Approval – Palembang; - Number 0509/DU/EKS/PPI/X/2025 regarding the Application Asset Extension Approval - Lampung	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
4 November 2025 November 4, 2025	Finalisasi surat tanggapan atas penyajian Kembali (<i>restatement</i>) laporan keuangan tahun buku 2023 dan tahun buku 2022 Finalization of the response letter to the restatement for the fiscal year 2023 and 2022	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
19 November 2025 November 19, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d bulan Oktober 2025; - Lain-lain - Performance Discussion as of October 2025; - Others	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-
19 Desember 2025 December 19, 2025	- Pembahasan Kinerja s.d bulan November 2025; - Lain-lain - Performance Discussion as of November 2025; - Others	Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro	-

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang Tahun 2025, Dewan Komisaris memfokuskan pengawasan pada area-area strategis yang merupakan kelanjutan dari perhatian Dewan Komisaris pada tahun sebelumnya, dengan penekanan pada upaya penguatan fundamental perusahaan dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners focused its oversight on strategic areas, a continuation of the Board's focus in the previous year, with an emphasis on strengthening the company's fundamentals and strengthening its business sustainability.

Area fokus utama pengawasan Dewan Komisaris meliputi:

a. Penyelesaian Piutang dan Penguatan *Cash Collection*

Dewan Komisaris memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan piutang usaha dan piutang lain-lain, khususnya piutang yang telah berlangsung lama dan berdampak terhadap kualitas arus kas perusahaan. Dewan menilai bahwa perputaran piutang masih perlu ditingkatkan agar ketergantungan Perseroan terhadap fasilitas kredit modal kerja dapat dikurangi.

Dewan secara konsisten mendorong Direksi untuk:

- Mempercepat penyelesaian piutang bermasalah;
- Meningkatkan efektivitas penagihan;
- Menetapkan target perbaikan DSO secara realistis dan terukur; serta
- Memastikan kualitas pelanggan dan disiplin pembayaran dalam setiap transaksi usaha.

b. Legalitas, Pengamanan, dan Optimalisasi Aset

Dewan Komisaris juga memfokuskan pengawasan pada percepatan legalitas aset, pengamanan aset perusahaan, dan optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan kontribusi yang lebih produktif terhadap kinerja Perseroan.

Dalam hal ini, Dewan menilai bahwa:

- Program sertifikasi dan pengamanan aset perlu dipercepat;
- Pemanfaatan aset harus memperhatikan prinsip tata kelola dan mitigasi risiko hukum;
- Optimalisasi aset harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi perusahaan.

Dewan juga menekankan bahwa seluruh pengelolaan aset yang melibatkan pihak ketiga wajib memperhatikan aspek *governance*, kepatuhan, dan *legal standing* perusahaan.

c. Kinerja Produk Non-Penugasan

Dewan Komisaris menaruh perhatian besar terhadap pengembangan bisnis non-penugasan dan produk-produk dengan *margin* yang lebih sehat. Dewan menilai bahwa struktur usaha Perseroan masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap penugasan dan komoditas dengan *margin* relatif rendah.

The Board of Commissioners' primary areas of focus for oversight include:

a. Settlement of Receivables and Strengthening Cash Collection

The Board of Commissioners pays serious attention to the management of accounts receivable and other receivables, particularly those that have long-standing liabilities and impact the quality of the company's cash flow. The Board assesses that receivables turnover still needs to be improved to reduce the Company's dependence on working capital credit facilities.

The Board consistently encourages the Board of Directors to:

- Accelerate the resolution of problem receivables;
- Improve collection effectiveness;
- Set realistic and measurable DSO improvement targets; and
- Ensure customer quality and payment discipline in all business transactions.

b. Asset Legality, Security, and Optimization

The Board of Commissioners also focuses its oversight on accelerating asset legality, securing company assets, and optimizing asset utilization to contribute more productively to the Company's performance.

In this regard, the Board assesses that:

- Asset certification and security programs need to be accelerated;
- Asset utilization must adhere to the principles of good governance and legal risk mitigation;
- Asset optimization must be directed towards increasing the company's revenue and efficiency.

The Board also emphasizes that all asset management involving third parties must consider aspects of governance, compliance, and the company's legal standing.

c. Non-Assignment Product Performance

The Board of Commissioners places significant emphasis on the development of non-assignment businesses and products with healthier margins. The Board assesses that the Company's business structure still relies heavily on assignments and commodities with relatively low margins.



Oleh karena itu, Dewan secara aktif mendorong Direksi untuk:

- Meningkatkan kontribusi produk non-penugasan;
- Mengembangkan portofolio usaha bernilai tambah tinggi;
- Mengevaluasi kontrak-kontrak dengan *margin* rendah; serta
- Memperbaiki struktur profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan.

d. Kinerja Penugasan Pemerintah

Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penugasan Pemerintah, terutama terkait komoditas strategis dan pangan. Dewan memahami bahwa penugasan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tekanan terhadap modal kerja, likuiditas, dan *margin* usaha.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris menekankan agar:

- Setiap penugasan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian;
- Terdapat kajian bisnis dan risiko yang memadai sebelum pelaksanaan;
- Pengendalian biaya dan *cash flow* dilakukan secara disiplin;
- Perseroan menjaga posisi legal dan perlindungan kontraktual dalam setiap transaksi dengan *supplier* maupun *buyer*.

e. Kinerja Kantor Cabang

Dewan Komisaris juga memfokuskan pengawasan pada peningkatan efektivitas operasional dan produktivitas kantor cabang. Dewan menilai bahwa kinerja cabang harus lebih diarahkan pada kontribusi profitabilitas dan *cash collection*, bukan semata-mata volume penjualan.

Oleh karena itu, Dewan mendorong:

- Evaluasi produktivitas cabang secara menyeluruh;
- Penguatan kualitas SDM dan tenaga pemasaran;
- Penerapan KPI berbasis *profit contribution*;
- Peningkatan inovasi dan kemampuan cabang dalam menangkap peluang bisnis di wilayah masing-masing.

f. Penguatan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris memberikan perhatian serius terhadap *backlog* rekomendasi audit internal yang masih cukup tinggi, termasuk konsentrasi

Therefore, the Board actively encourages the Board of Directors to:

- Increase the contribution of non-assignment products;
- Develop a portfolio of high-value-added businesses;
- Evaluate low-margin contracts; and
- Sustainably improving the company's profitability structure.

d. Government Assignment Performance

The Board of Commissioners pays special attention to the implementation of government assignments, particularly those related to strategic commodities and food. The Board understands that assignments contribute significantly to the company's revenue growth, but at the same time also put pressure on working capital, liquidity, and operating margins.

In this regard, the Board of Commissioners emphasizes that:

- Each assignment must be carried out with prudence;
- Adequate business and risk assessments must be conducted prior to implementation;
- Disciplined cost and cash flow controls must be implemented;
- The Company maintains legal standing and contractual protection in every transaction with suppliers and buyers.

e. Branch Office Performance

The Board of Commissioners also focuses its oversight on improving the operational effectiveness and productivity of branch offices. The Board believes that branch performance should be more focused on profitability and cash collection contributions, rather than solely on sales volume.

Therefore, the Board encourages:

- Comprehensive evaluation of branch productivity;
- Strengthening the quality of human resources and marketing personnel;
- Implementation of profit contribution-based KPIs;
- Increasing innovation and branch capacity in capturing business opportunities in their respective regions.

f. Strengthening Internal Control and Risk Management

The Board of Commissioners is paying serious attention to the still-high backlog of internal audit recommendations, including the concentration of

temuan pada beberapa cabang dan fungsi tertentu. Dewan menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan *issue governance*, kedisiplinan penyelesaian temuan, dan verifikasi efektivitas tindak lanjut audit.

Selain itu, Dewan juga menekankan perlunya penguatan implementasi manajemen risiko, khususnya:

- Penetapan *risk appetite*;
- Penguatan *Key Risk Indicator* (KRI);
- *Monitoring* risiko secara lebih kuantitatif dan terukur;
- Penguatan mitigasi risiko di seluruh unit kerja dan kantor cabang.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penguatan pengendalian internal dan budaya risiko menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha Perseroan di tengah dinamika bisnis dan ketidakpastian eksternal yang semakin tinggi.

Selama Tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Direksi sebagai bagian dari upaya penguatan fundamental perusahaan dan peningkatan kualitas kinerja Perseroan.

Rekomendasi tersebut antara lain:

a. Penguatan Bisnis Non-Penugasan

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan kontribusi usaha non-penugasan dan usaha dengan *margin* lebih sehat guna mengurangi ketergantungan terhadap penugasan Pemerintah dan komoditas *bermargin* rendah.

b. Evaluasi Kontrak dan Kegiatan Usaha Bermargin Rendah

Dewan Komisaris merekomendasikan evaluasi terhadap kontrak-kontrak usaha dengan *margin* rendah, termasuk pengendalian HPP, biaya logistik, dan biaya operasional lainnya agar profitabilitas perusahaan dapat lebih optimal.

c. Penguatan Modal Kerja dan Cash Flow

Dewan Komisaris menekankan pentingnya pengelolaan modal kerja secara lebih disiplin, termasuk:

- Percepatan *cash collection*;
- Pengendalian piutang;
- Evaluasi pemanfaatan fasilitas kredit bank;
- Penguatan likuiditas perusahaan.

d. Optimalisasi dan Pengamanan Aset

Dewan Komisaris merekomendasikan percepatan legalitas aset, pengamanan aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan kontribusi yang lebih produktif terhadap perusahaan.

findings in certain branches and functions. The Board believes this situation indicates the need to strengthen governance, discipline in resolving findings, and verify the effectiveness of audit follow-up.

Furthermore, the Board also emphasizes the need to strengthen risk management implementation, specifically:

- Determining risk appetite;
- Strengthening Key Risk Indicators (KRI);
- More quantitative and measurable risk monitoring;
- Strengthening risk mitigation across all work units and branch offices.

The Board of Commissioners believes that strengthening internal control and risk culture is a critical factor in maintaining the Company's business sustainability amidst increasingly dynamic business conditions and external uncertainty.

In 2025, the Board of Commissioners provided strategic recommendations to the Board of Directors as part of efforts to strengthen the company's fundamentals and improve the quality of the Company's performance.

These recommendations include:

a. Non-Assignment Business Strengthening

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to increase the contribution of non-assignment businesses and businesses with healthier margins to reduce dependence on Government assignments and low-margin commodities.

b. Evaluation of Low Margin Contracts and Business Activities

The Board of Commissioners recommends evaluating business contracts with low margins, including controlling COGS, logistics costs and other operational costs so that company profitability can be optimized.

c. Strengthening Working Capital and Cash Flow

The Board of Commissioners emphasizes the importance of managing working capital in a more disciplined manner, including:

- Acceleration of cash collection;
- Control of receivables;
- Evaluate the utilization of bank credit facilities;
- Strengthening company liquidity.

d. Asset Optimization and Security

The Board of Commissioners recommends accelerating asset legality, securing assets, and optimizing asset utilization in order to provide a more productive contribution to the company.



e. Penguatan Produktivitas Kantor Cabang

Dewan Komisaris mendorong evaluasi kinerja cabang secara menyeluruh dengan penekanan pada:

- Profit contribution;
- Efektivitas operasional;
- Produktivitas SDM;
- Peningkatan kemampuan pemasaran dan penjualan.

f. Penguatan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris juga merekomendasikan:

- Percepatan penyelesaian *backlog* audit internal;
- Penguatan *issue governance* berbasis SLA;
- Peningkatan implementasi manajemen risiko dan monitoring risiko residual secara lebih terukur.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penyesuaian strategi tersebut penting untuk memastikan pertumbuhan usaha Perseroan tidak hanya tinggi secara volume, tetapi juga sehat, berkualitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

e. Strengthening Branch Office Productivity

The Board of Commissioners encourages overall branch performance evaluation with emphasis on:

- Profit contribution;
- Operational effectiveness;
- HR productivity;
- Increased marketing and sales capabilities.

f. Strengthening Internal Control and Risk Management

The Board of Commissioners also recommends:

- Accelerating completion of internal audit backlog;
- Strengthening SLA-based issue governance;
- Increasing the implementation of risk management and monitoring residual risk in a more measurable manner.

The Board of Commissioners is of the view that adjusting this strategy is important to ensure that the Company's business growth is not only high in volume, but also healthy, high quality and sustainable in the long term.

Surat-Surat Keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PPI mengemban 2 (dua) tugas pokok, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan dan/atau laporan tertulis atas laporan manajemen yang disusun pada basis triwulanan/semesteran serta memberikan usulan kepada Menteri BUMN.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite penunjang di bawah organ Dewan Komisaris, antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menggunakan kriteria dan indikator penilaian yang telah disepakati bersama dengan komite-komite dalam memberikan penilaian tahunan, seperti efektivitas pelaksanaan rapat komite, peran dan dukungan komite-komite terhadap implementasi tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Mengacu pada kriteria penilaian sebagaimana disebutkan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2025.

Decrees of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PPI has two main tasks, namely carrying out supervisory functions and providing advice to the Board of Directors. In carrying out these duties, the Board of Commissioners provides feedback and/or written reports on management reports prepared on a quarterly/semi-annual basis and submits proposals to the Minister of State-Owned Enterprises.

Assessment of the Performance of Committees under the Board of Commissioners

The execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is supported by 2 (two) supporting committees under the organ of the Board of Commissioners, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Management Committee

The Board of Commissioners utilizes criteria and assessment indicators agreed upon with the committees in providing annual evaluations, such as the effectiveness of committee meeting implementations, the roles and support of the committees towards the implementation of corporate governance, and compliance with applicable regulations.

Referring to the assessment criteria as mentioned above, the Board of Commissioners assesses that the committees under the Board of Commissioners have performed their duties and responsibilities well throughout the year 2025.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ utama GCG yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan, dan demi kepentingan terbaik Perseroan, serta bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi wajib menjalankan keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan PPI sehingga visi, misi dan sasaran yang telah digariskan di dalam Anggaran Dasar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi wajib mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Masing-masing anggota Direksi memikul tugas dan tanggung jawab secara kolektif, akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk menjalankan tugas dan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pembedaan tugas dan kewenangannya.

Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

The Board of Directors is the main GCG organ authorized and fully responsible for managing the Company in accordance with the purpose, objectives, and best interests of the Company, as well as representing the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws.

The Board of Directors is required to carry out resolutions taken at the General Meeting of Shareholders (RUPS), and is responsible for the implementation and management of the Company's strategic plan (PPI) so that the vision, mission, and objectives outlined in the Articles of Association can be realized effectively.

In carrying out their duties and obligations, the Board of Directors must devote all their energy, thoughts, attention, and dedication fully while considering the interests of shareholders and other stakeholders.

Each member of the Board of Directors bears collective duties and responsibilities, but they are still allowed to perform tasks and make decisions according to their assigned responsibilities and authorities.

In principle, the execution of duties performed by each Director remains a collective responsibility.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP- 211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;

Legal Basis:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number: 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises (BUMN);
4. Articles of Association of PT PPI;
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises/ Head of the State-Owned Enterprises Steering Committee Number: KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Management Report of State-Owned Enterprises;
6. Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN);



8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN); and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of State-Owned Enterprises (BUMN).

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi wajib bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, dan independen dengan mengindahkan *Board Manual* yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: dirubah menjadi: 35/DU/ KEPDIR/ PPI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang *Board Manual* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pada prinsipnya, *Board Manual* mengatur tentang tata laksana kerja yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perseroan.

Board Manual antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Direksi
2. Persyaratan Direksi
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan Direksi
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Rapat Direksi
11. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi
12. Rapat Direksi
13. Organ Pendukung Direksi
14. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
15. Pertanggungjawaban Direksi

Manual of the Board of Directors

All members of the Board of Directors are required to act and carry out their duties and responsibilities in a professional, accountable, and independent manner, adhering to the Manual of the Board of Directors, established based on Board Decision Number: 35/DU/ KEPDIR/PPI/X/2021 dated October 28, 2021, regarding the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

In principle, the Board Manual regulates effective work procedures between the Board of Commissioners and the Board of Directors, explaining structured, systematic, easily understandable, and consistently executable activity stages, serving as a reference for the Board of Directors in carrying out their respective tasks to achieve the company's vision and mission.

The Board Manual, among other things, regulates the following:

1. Function of the Board of Directors
2. Director Requirements
3. Composition and Membership
4. Term of Office
5. Introduction and Capability Enhancement Programs
6. Independence of the Board of Directors
7. Board of Directors' Code of Ethics
8. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Board of Directors Meetings
11. Delegation of Authority Among Board Members
12. Board of Directors Meetings
13. Supporting Organs of the Board of Directors
14. Relationships with Subsidiaries and Affiliated Companies
15. Accountability of the Board of Directors

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Periode menjabat Direksi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah dan komposisi Direksi PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah mempertimbangkan kebutuhan dan skala bisnis PPI demi terealisasinya visi, misi, dan rencana strategis PPI.

Pada tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, sehingga susunan Direksi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Board of Directors

The term of office for the Board of Directors is 5 (five) years starting from the date set by the General Meeting of Shareholders (RUPS) that appointed them and ending at the closure of the 5th Annual RUPS after their appointment date, without prejudice to the right of the RUPS to dismiss member of the Board of Directors at any time before their term expires.

Directors whose terms have ended may be reappointed for 1 (one) subsequent term according to the decision of the RUPS.

The number and composition of the PPI Board of Directors comply with applicable laws and regulations and have taken into account the needs and business scale of PPI to realize the vision, mission, and strategic plans of PPI.

In 2025, there were no changes to the composition of the Board of Directors. Thus, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor SIC-169/M8U/06/2023 dan Nomor GS PS/1.01/ V1/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number SIC169/M8U/06/2023 and Number GS PS/1.01/V1/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	26 Juni 2023 s.d. 26 Juni 2028 June 26, 2023 to June 26, 2028	Ke-1 First
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK 221/MBU/07/2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	Juli 2021 s.d 1 Juli 2026 July 1, 2021 to July 1, 2026	Ke-1 First



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No: SK 169/MBU/06/2023 dan No: 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No:SK-169/MBU/06/2023 and No: 66/KEP.PS/ RNI.01/VI/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	26 Juni 2023 s.d. 26 Juni 2028 June 26, 2023 to June 26, 2028	Ke-1 First
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor SK-362/MBU/06/2023 dan Nomor 153/KEP.PS/ RNI.01/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number SK-362/MBU/06/2023 and Number153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	18 Desember 2023 s.d. 18 Desember 2028 December 18, 2023 to December 18, 2028	Ke-1 First

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolektif telah diamanatkan di dalam *Board Manual* dan Pasal 11 Anggaran Dasar PPI, antara lain:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
3. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
4. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The collective description of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been mandated in the Board Manual and Article 11 of the Articles of Association of PPI, including:

1. Carrying out all actions related to the management of the Company for the Company's interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within the limitations as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the RUPS.
2. Endeavoring to ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives.
3. Preparing the Company's Long-Term Plan.
4. Devoting full energy, thoughts, attention, and dedication to the tasks, duties, and goals of the Company.

- Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

- Adhering to the Company's Articles of Association and laws and regulations, and obliged to uphold the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
- Preparing the complete organizational structure of the Company with details and its tasks.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masing-masing anggota Direksi diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara individu dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi tersebut, antara lain sebagai berikut:

Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Direktur Utama President Director	Melaksanakan koordinasi tugas anggota-anggota Direksi lainnya dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satuan Pengawas Intern, Legal, Sekretaris Perusahaan, <i>Strategic Planning</i> , <i>Business Development</i> dan staf ahli/penasihat Perusahaan. Coordinating the duties of other members of the Board of Directors and being responsible for the activities of the Internal Audit Unit, Legal, Corporate Secretary, Strategic Planning, Business Development and expert staff/advisors of the Company.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Menangani Pengembangan Bisnis dan mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling Business Development and developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Menangani bidang Produksi, Pengembangan Bisnis, mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling the Production, Business Development, developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Direktur Operasi Director of Operations	Melakukan bidang IT, Manajemen Aset dan pengendalian operasional PPI Carrying out IT, Asset Management and operational control of PPI.

Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Each member of the Board of Directors is entrusted to carry out individual tasks and responsibilities considering their background of experience and competencies, including but not limited to:

Hak dan Kewenangan

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja PPI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rights and Authorities

- Establishing management policies of the Company.
- Regulating the delegation of authority of the Board of Directors to one or more Directors to make decisions on behalf of the Board or represent the Company in and out of court.
- Regulating the delegation of authority of the Board of Directors to one or more employees of PPI, either individually or jointly, or to others, to represent the Company in and out of court.
- Regulating provisions regarding Company personnel, including the determination of salaries, pensions, or old-age benefits, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations.
- Appointing and dismissing Company employees based on Company employment regulations and applicable laws and regulations.



6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Memberi penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan.
8. Melakukan aktivitas di luar Perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perusahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
9. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempergunakan saran profesional.
11. Menerima gaji berikut tunjangan/fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
12. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
13. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

6. Appointing and dismissing the Company Secretary.
7. Granting awards and imposing sanctions (rewards and punishments) on Company employees based on Company employment regulations.
8. Engaging in activities outside the Company that are not directly related to the Company's interests, such as teaching, serving on business association boards, and similar activities, within reasonable time and with the knowledge of the CEO or other Directors.
9. Taking leave according to applicable regulations.
10. Utilizing professional advice.
11. Receiving salary along with allowances/facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by the RUPS.
12. If the Company achieves a profit, the Board of Directors may receive incentives as a reward for their performance, the amount of which is determined by the RUPS.
13. Carrying out all other actions and deeds regarding the management or ownership of Company assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company in and out of court regarding all matters and events within the limitations as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the RUPS.

Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan orang perseorangan sebagai anggota Direksi sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI.

Kriteria Direksi PPI, antara lain:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit; atau
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan; dan

Criteria for Board of Directors Members

All members of the Board of Directors have fulfilled the individual requirements as Board members as stipulated in the Articles of Association of PPI.

Criteria for PPI Directors include:

1. Capable of performing legal acts.
2. Within the last 5 (five) years before appointment, has never:
 - a. Been declared bankrupt; or
 - b. Served as a Director or member of the Board of Commissioners or Board of Supervisors who has been found guilty of causing a Company or State-Owned Enterprise (BUMN) to be declared bankrupt; or
 - c. Been convicted of offenses detrimental to the state's finances and/or related to the financial sector.
3. Committed to complying with laws and regulations.
4. Possesses knowledge and/or expertise in fields required by the Company.

5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri Direksi

Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi PPI mengacu pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 13 hingga ayat 22.

Program Orientasi/Pengenalan bagi Direksi Baru

PPI memiliki kebijakan orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi yang baru menjabat agar mereka mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai Perseroan, aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, serta panduan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi baru.

Program Orientasi/ Pengenalan bagi anggota Direksi baru PPI, meliputi:

1. Program Pengenalan
Dalam rangka membentuk suatu tim kerja yang solid, maka Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh Anggota Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat lebih saling mengenal.
2. Program Peningkatan Kapabilitas
Program Peningkatan Kapabilitas ditujukan agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perseroan di bidang perdagangan dan selalu siap mengantisipasi perubahan di industri demi menjaga keberlangsungan dan kemajuan usaha Perseroan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Merujuk pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 34, anggota Direksi PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

5. Meets other requirements as determined in the Company Law, capital market regulations, and other applicable laws and regulations.

Mechanism of Appointment, Termination, and Resignation of Directors

The procedures for the appointment, termination, and resignation of PPI Directors refer to Articles 10, paragraphs 13 to 22 of the Articles of Association of PPI.

Orientation/Induction Program for New Directors

PPI has an orientation/induction policy for newly appointed Directors to provide them with a comprehensive understanding and knowledge of the Company, its business activities, future company plans, and the guidelines and responsibilities of the Board of Directors.

The Company Secretary is in charge of implementing the orientation/induction program for newly appointed Directors.

The orientation/introduction program for new PPI Directors includes:

1. Introduction Program
To form a cohesive team, the Introduction Program is crucial to enable all Directors from various backgrounds to get to know each other better.
2. Capability Enhancement Program
The Capability Enhancement Program aims to ensure that the Directors are always updated on the latest developments in the Company's core business in the trading sector and are ready to anticipate industry changes for the Company's sustainability and progress.

Policy on Holding Concurrent Position for Directors

Referring to Article 10, paragraph 34 of the Articles of Association of PPI, PPI Directors are allowed to hold multiple directorships, except for the following criteria:

1. Directorship in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Membership in the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies;



4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Informasi rangkap jabatan seluruh anggota Direksi PPI telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi wajib menjaga profesionalisme dan independensinya agar seluruh tindakan dan keputusan strategis yang diambil senantiasa demi kepentingan terbaik PPI. Berpedoman pada *Board Manual* PPI, Direksi hendaknya menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maka anggota Direksi PPI tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
5. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan perseroan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

4. Other positions as stipulated in laws and regulations, party officials and/or legislative candidates and/or candidates for Regional Heads/Vice Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

Information on concurrent position of all PPI Directors has been disclosed in the Company Profile section, Director Profile subsection, in this Annual Report.

Management of Conflicts of Interest for the Board of Directors

The Board of Directors are obliged to maintain professionalism and independence so that all strategic actions and decisions taken are always in the best interests of PPI. Guided by the PPI Board Manual, Directors should avoid activities or actions that may trigger conflicts of interest, both now and in the future.

To prevent conflicts of interest, PPI Directors are not allowed to hold other positions as:

1. Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies;
4. Other positions as stipulated in laws and regulations, political party officials and/or legislative candidates and/or candidates for Regional Heads/Vice Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

PPI requires members of the Board of Commissioners and Directors to comply with the Company's regulations regarding prohibitions on holding multiple directorships as per applicable laws and regulations in order to avoid potential conflicts of interest.

Independensi Direksi

Independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga agar masing-masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/ atau benturan kepentingan dengan pihak lain.

Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Direksi yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Direksi berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Dalam rangka menjaga independensi Direksi, maka PPI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
4. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.
5. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap Anggota Direksi juga membuat Daftar Khusus yang di dalamnya dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi di dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Direksi tahun 2025.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Aspek Independensi Aspect of Independency
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.

Independency of the Board of Directors

Independency of the Board of Directors is a crucial factor that must be preserved so that each member of the Board can carry out their duties and responsibilities independently, free from pressure, influence, and/or conflicts of interest with other parties.

This commitment is formalized in the statement of independence of the Board of Directors, which is regularly updated. Directors are obligated to report any changes in their status that may affect their Independency.

To maintain the Independency of the Board of Directors, PPI establishes the following provisions:

1. Apart from the Directors, any other party is prohibited from interfering in the management of the Company.
2. Directors must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest, and free from any pressure from any party.
3. Directors are prohibited from engaging in activities that may disrupt their independence in managing the Company.
4. Each Director is required to make a conflict of interest declaration and report any changes in their status that may affect their independence.
5. All Directors do not hold positions that are prohibited by applicable laws and regulations.
6. Each Director also creates a Special List that includes information about the ownership of shares by Directors and their families in the Company and other companies, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

As of the end of 2025, there were no situations with potential conflicts of interest faced by the Board of Directors in the decision-making process, as stated in the statement of independence of the Board of Directors for the year 2025.

Declaration of Independence of the Board of Directors

Soegeng Hernowo	Wien Irwanto	Edhy Rizwan	Noverita Anggraeny
-----------------	--------------	-------------	--------------------

√ √ √ √



Aspek Independensi Aspect of Independency	Soegeng Hernowo	Wien Irwanto	Edhy Rizwan	Noverita Anggraeny
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓	✓	✓

Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi berfungsi sebagai salah satu mekanisme formal bagi sesama anggota Direksi untuk berdiskusi, merencanakan, dan memantau penerapan strategi dan kebijakan PPI.

Kebijakan Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, namun dalam hal Direktur Utama berhalangan menghadiri rapat maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Panggilan rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Meeting of the Board of Directors

The Board of Directors meetings must be held regularly at least 1 (one) time every month. The Board meetings serve as a formal mechanism for fellow Directors to discuss, to plan, and to monitor the implementation of PPI's strategies and policies.

Board Meeting Policy

Board meetings can be held at any time deemed necessary by one or more Directors, upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners, or upon a written request from 1 (one) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total voting shares.

The Board meetings are chaired by the Chief Executive Officer (CEO), but in the event that the CEO is unable to attend the meeting, one of the Directors designated in writing by the CEO shall chair the Board meeting. If the CEO does not make any designation, then the longest-serving Director shall chair the Board meeting. In the event that there are more than 1 (one) Director who has served the longest as a Board member, the oldest Director in age shall act as the meeting chair.

The notice of the Board meeting is provided in writing to each Director at least 3 (three) days before the meeting is held, or in a shorter period if urgent, without considering the notice date and meeting date.

Pengambilan keputusan di dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat.

Decisions at the Board meeting are made based on consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made by a majority vote. If the number of votes in favor and against is equal, the decision of the meeting is the same as the opinion of the meeting chair.

Selain melalui rapat Direksi, Direksi juga dapat mengambil keputusan strategis melalui keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Direksi.

In addition to the Board meetings, the Board can also make strategic decisions through circular resolutions. Decisions made in this manner have the same legal force as decisions made in a regular Board meeting.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 108 kali dengan uraian sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout the year 2025, Board meetings have been held 108 times, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%Kehadiran %Attendance
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	108	108	100,00%
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	108	107	99,08%
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	108	107	99,08%
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations	108	108	100,00%
Rata-rata Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors				99,54%

Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2025

Details of Meeting Implementation, Agenda and Attendance of the Board of Directors at the Board of Directors Meeting in 2025

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	001/Ris.Radir/PPI/I/2025	8 Januari 2025 January 8, 2025	1. Persetujuan Perpanjangan Pendayagunaan Aset Inventaris dan Inventaris <i>Software</i> 2. Rencana Penyewaan Ruang Kantor Grha PPI Lantai 1 kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1. Approval of the Extension of the Utilization of Inventory Assets and Software Inventory 2. Plan to Lease Office Space on the 1st Floor of Grha PPI to the Coordinating Ministry for Human Development and Culture	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny



No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
2	002/Ris.Radir/ PPI/I/2025	8 Januari 2025 January 8, 2025	- Pembahasan Kasus Pekerja atas nama Sdr. Esha Anggaran (EA) - Pembahasan Kasus Surabaya (Mojokerto, Probolinggo, dan Jember atas nama: - Sdr. Singgih Dwi Kurniawan (SDK) - Sdr. Haidzer Ali Al Azizi (HAA) - Sdr. Reza DZ Gobel (RDG) - Sdr. Mahmudi (MHI) - Pembahasan Kasus Madiun atas nama: - Sdri. Ninin Wahyuni (NW) - Sdr. Gunawan (GNW) - Sdr. Yohanes Paulus Suharto (YPS) - Sdri. Surya Aminah (SA) - Sdri. Duri Priandhani (DP)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
3	003/Ris.Radir/ PPI/I/2025	16 Januari 2025 January 16, 2025	- Pencatatan Omzet Daging pada Laporan Keuangan PT PPI Tahun 2024 - Pembebanan Tantiem/Jasa Produksi dan Insentif Kinerja - Pengembalian Uang <i>Down Payment</i> Daging - Tagihan <i>Management Fee</i> PT RNI (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
4	004/Ris.Radir/ PPI/I/2025	22 Januari 2025 January 22, 2025	- Tagihan <i>Management Fee</i> PT RNI (Persero) - Update RKAP 2025	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
5	005/Ris.Radir/ PPI/I/2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	- Tindak Lanjut Aset Temuan BPK <i>Management Fee</i> Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
6	006/Ris.Radir/ PPI/I/2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	Persetujuan Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 PT BGR Logistik Indonesia Approval of the Agenda and Resolutions of the General Meeting of Shareholders Regarding the 2025 Work Plan and Budget of PT BGR Logistik Indonesia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
7	007/Ris.Radir/ PPI/I/2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	Persetujuan Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 PT PPI Industri Approval of the Agenda and Resolutions of the General Shareholders' Meeting Regarding the 2025 Work and Budget Plan of PT PPI Industri	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	008/Ris.Radir/ PPI/I/2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) 2024 Disbursement of the 2024 Year-End Bonus (TAT)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
9	009/Ris.Radir/PPI/ II/2025	4 Februari 2025 February 4, 2025	Pembahasan Rencana Audit dan/atau Reviu Terhadap Pegawai PT PPI atas nama Sdr. HJ yang dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas dugaan tindak pidana Discussion of the Audit and/or Review Plan for PT PPI Employee Mr. HJ, who has been reported to law enforcement authorities on suspicion of a criminal offense	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
10	010/Ris.Radir/PPI/ II/2025	4 Februari 2025 February 4, 2025	Pembahasan Mutasi (Rotasi, Promosi) Pekerja di Lingkungan PT PPI Discussion on Employee Transfers (Rotations, Promotions) within PT PPI	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
11	011/Ris.Radir/PPI/ II/2025	4 Februari 2025 February 4, 2025	1. Penyelesaian Kewajiban PT PPI kepada PT Nindya Karya 2. Lawyer untuk Pendampingan Persidangan Bapak Charles Sitorus 3. KJPP untuk Pelelangan Aset Jaminan Piutang Banda Aceh 1. Settlement of PT PPI's Obligations to PT Nindya Karya 2. Legal Counsel for Mr. Charles Sitorus's Court Proceedings 3. KJPP for the Auction of Collateral Assets Related to Banda Aceh Receivables	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
12	012/Ris.Radir/PPI/ II/2025	4 Februari 2025 February 4, 2025	1. Revaluasi Aset Tetap Tanah ID FOOD Group Tahun Buku 2024 2. Update Aset Terkait Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 1. Revaluation of ID FOOD Group's Land Fixed Assets for Fiscal Year 2024 2. Update on Assets Related to the Asset Management Information System (SIMA)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
13	013/Ris.Radir/PPI/ II/2025	12 Februari 2025 February 12, 2025	Pembahasan Penempatan Pekerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) serta melakukan Optimalisasi Struktur Organisasi Kantor Pusat Discussion on the Placement of Employees at the Headquarters and Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and Optimization of the Headquarters' Organization Structure	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
14	014/Ris.Radir/PPI/ II/2025	12 Februari 2025 February 12, 2025	Penetapan 20% Top Talent PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada Holding Pangan Talent Committee (HPTC) Tahun 2025 Designation of 20% of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)'s Top Talent to the Holding Pangan Talent Committee (HPTC) for 2025	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
15	015/Ris.Radir/PPI/ II/2025	14 Februari 2025 February 14, 2025	Persetujuan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) Aset PT PPI di Jalan HM Yamin No.3, Medan Approval of the Signing of the Deed of Sale (AJB) for PT PPI's Asset at Jalan HM Yamin No. 3, Medan	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
16	016/Ris.Radir/PPI/ II/2025	21 Februari 2025 February 21, 2025	Persetujuan Perwakilan PT PPI dalam Program Reward Distributor Prioritas dari PT Pupuk Kalimantan Timur Approval of PT PPI's Representation in the Priority Distributor Reward Program from PT Pupuk Kalimantan Timur	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
17	017/Ris.Radir/PPI/ II/2025	28 Februari 2025 February 28, 2025	Pembahasan Hasil Reviu Dokumen Transaksi Pengadaan Beras di PT PPI kepada KSO Buana Artha Bhakti Utama Tahun 2024 Discussion of the Results of the Review of Rice Procurement Transaction Documents at PT PPI for KSO Buana Artha Bhakti Utama in 2024	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny



No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
18	018/Ris.Radir/PPI/ II/2025	28 Februari 2025 February 28, 2025	1. Penunjukan <i>Lawyer</i> untuk Persidangan Bapak Charles Sitorus 2. Tindak Lanjut Tagihan <i>Law Firm</i> Hendrayanto & Partners 3. Pengisian Posisi Dewan Komisaris PT BGR Logistik Indonesia 4. Perbaikan Gudang Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Medan oleh PT BGR Logistik Indonesia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
19	019/Ris.Radir/PPI/ III/2025	5 Maret 2025 March 5, 2025	1. Appointment of a Lawyer for the Trial of Mr. Charles Sitorus 2. Follow-up on the Invoice from the Law Firm Hendrayanto & Partners 3. Filling of Positions on the Board of Commissioners of PT BGR Logistik Indonesia 4. Renovation of the Medan Fertilizer Bagging Unit (UPP) Warehouse by PT BGR Logistik Indonesia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
20	020/Ris.Radir/PPI/ III/2025	5 Maret 2025 March 5, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Cuti Tahunan Appointment of an Acting Director of Operations for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) During Annual Leave	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
21	021/Ris.Radir/PPI/ III/2025	5 Maret 2025 March 5, 2025	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2025 Approval of the Extension of the Working Capital Loan (KMK) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for 2025	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
22	022/Ris.Radir/PPI/ III/2025	10 Maret 2025 March 10, 2025	Penilaian Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2024 Valuation of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Shares as of December 31, 2024	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
23	023/Ris.Radir/PPI/ III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Approval of the Extension of the Working Capital Loan (KMK) from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for 2025	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
24	024/Ris.Radir/PPI/ III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	1. Aset Jalan Untung Suropati Nomor 5 Surabaya 2. Tindak Lanjut Permasalahan Aset Temuan BPK	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
25	025/Ris.Radir/PPI/ III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	1. Asset at Jalan Untung Suropati No. 5, Surabaya 2. Follow-up on Asset Issues Identified by the BPK	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
26	026/Ris.Radir/PPI/ III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	Tindak Lanjut Perihal Penetapan Status Pekerja Pjs BOD-1 an. Bayu Adhi Wardhana, Dennis E. M. Sipayung, dan Syukri Ajhari. Follow-up Regarding the Determination of the Status of Interim BOD-1 Members: Bayu Adhi Wardhana, Dennis E. M. Sipayung, and Syukri Ajhari.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
27	027/Ris.Radir/PPI/ III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	Penyelesaian PPI Property Resolution of PPI Property	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
28	028/Ris.Radir/PPI/ III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	Tindak Lanjut Pembayaran PT Nindya karya (Persero) terkait Pembangunan Revitalisasi Gudang UPP Medan PT BGR (Persero) Tahun 2019 Follow-up on Payment to PT Nindya Karya (Persero) Regarding the 2019 Revitalization of the UPP Medan Warehouse of PT BGR (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
29	029/Ris.Radir/PPI/ III/2025	26 Maret 2025 March 26, 2025	Update tindak lanjut temuan BPK terkait salah transfer dalam transaksi pengadaan sodium sianida Update on Follow-up to BPK Findings Regarding an Incorrect Transfer in the Sodium Cyanide Procurement Transaction	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
29	029/Ris.Radir/PPI/ III/2025	26 Maret 2025 March 26, 2025	Potensi Restatement Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Potential Restatement of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)'s Financial Statements	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
30	030/Ris.Radir/PPI/ IV/2025	17 April 2025 April 17, 2025	Pemenuhan posisi jabatan di Lingkungan PT PPI Filling of Vacant Positions within PT PPI	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
31	031/Ris.Radir/PPI/ IV/2025	17 April 2025 April 17, 2025	- Jaminan Uang Muka Untuk Pengadaan Jasa Notaris Pengurusan Pembaharuan SHGB Aset di Pangkalpinang - Biaya Kerohiman Aset di Jalan Untung Suropati Surabaya - Rencana Renovasi Gudang <i>Stock Point</i> Kalimas - Surat Menyurat PT PPI pada Non Hari Kerja untuk Komoditi Penugasan Impor dan Ekspor - Advance Payment Guarantee for Notary Services Related to the Renewal of SHGB Assets in Pangkalpinang - Goodwill Expenses for Assets on Untung Suropati Street, Surabaya - Renovation Plan for the Kalimas Stock Point Warehouse - PT PPI Correspondence on Non-Business Days Regarding Assigned Import and Export Commodities	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
32	032/Ris.Radir/PPI/ IV/2025	25 April 2025 April 25, 2025	Pembahasan Evaluasi Jabatan Fungsional dan Penyesuaian Rumusan KPI Discussion on the Evaluation of Functional Positions and Adjustments to KPI Formulations	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
33	033/Ris.Radir/PPI/ IV/2025	5 Mei 2025 May 5, 2025	Pembahasan Biaya <i>Storage</i> Pengiriman Daging dari <i>Supplier</i> Discussion on Storage Costs for Meat Shipments from Suppliers	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
34	034/Ris.Radir/PPI/ IV/2025	6 Mei 2025 May 6, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bank Garansi PT Bank Central Asia oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI Approval for the Use of Bank Guarantee Facilities from PT Bank Central Asia by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
35	035/Ris.Radir/PPI/ IV/2025	8 Mei 2025 May 8, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk <i>Reimbursement</i> kepada <i>Vendor</i> yaitu Nur Said, Rakhmadi, Andy Liem, Ronald Gosali, Budy Chandra, Yohannes Bernady, PT Banjar Industrial Complex, Lang Hartoyo, H. Nia Kurnia, Felix Putra Astaman, Sudiyanto, dan Tohari. Approval for the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendors, namely Nur Said, Rakhmadi, Andy Liem, Ronald Gosali, Budy Chandra, Yohannes Bernady, PT Banjar Industrial Complex, Lang Hartoyo, H. Nia Kurnia, Felix Putra Astaman, Sudiyanto, and Tohari.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
36	036/Ris.Radir/ PPI/V/2025	19 Mei 2025 May 19, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk <i>Reimbursement</i> kepada <i>vendor</i> yakni Erick Darseno, Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri, Mulyanto, Umi Khoeriyatul Umah, Muchtar Wira, Deny Fajar Suryawan, Sugianto Tandiar, Sri Mullyana Siem, Surya Kartono, Gunawan Kusumo, Sugiyanto, M.Suwardi dan ABD Wachid Approval for the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to vendors, namely Erick Darseno, the Wonogiri Regency Department of Trade and SMEs, Mulyanto, Umi Khoeriyatul Umah, Muchtar Wira, Deny Fajar Suryawan, Sugianto Tandiar, Sri Mullyana Siem, Surya Kartono, Gunawan Kusumo, Sugiyanto, M. Suwardi, and ABD Wachid	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
37	037/Ris.Radir/ PPI/V/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Cuti Tahunan Appointment of the Acting Director of Operations at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) during Annual Leave	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
38	038/Ris.Radir/ PPI/V/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	Pembahasan Mutasi (Rotasi, Promosi), Penempatan dan Penugasan Karyawan di Lingkungan PT PPI Group Discussion of Employee Transfers (Rotations, Promotions), Placements, and Assignments within the PT PPI Group	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
39	039/Ris.Radir/ PPI/V/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	Pembahasan Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun 2024 Discussion of the 2024 Financial Statement of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny



No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
40	041/Ris.Radir/ PPI/V/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	Rekomendasi Perbaikan dan Pengembangan Gedung Kantor PT PPI Cabang Utama Makassar Recommendations for Improvements and Development of the PT PPI Main Branch Office Building in Makassar	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
41	042/Ris.Radir/ PPI/V/2025	26 Mei 2025 May 26, 2025	- Pembahasan Kasus Karyawan atas nama Sdr. Hemly Jambo; - Pembahasan Kasus Surabaya (Mojokerto, Probolinggo, dan Jember) atas nama: - Sdr. Singgih Dwi Kurniawan (SDK) - Sdr. Haidzer Ali Al Azizi (HAA) - Sdr. Reza DZ Gobel (RDG) - Sdr. Mahmudi (MHI) - Discussion of the case involving an employee named Mr. Hemly Jambo; - Discussion of the Surabaya case (Mojokerto, Probolinggo, and Jember) involving: - Mr. Singgih Dwi Kurniawan (SDK) - Mr. Haidzer Ali Al Azizi (HAA) - Mr. Reza DZ Gobel (RDG) - Mr. Mahmudi (MHI)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
42	044/Ris.Radir/ PPI/V/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	- Penempatan <i>Law Firm</i> Hendrayanto & Partners di salah satu ruangan di Grha PPI (Ruang 407 Lantai 4 Grha PPI. - Tagihan <i>success fee</i> atas penyelesaian penanganan perkara daging impor tahun 2018 dari <i>Law Firm</i> Hendrayanto & Partners sebesar Rp425.000.000,. - Permohonan Bantuan Pembayaran Denda dari Bapak M Kuncoro Wiobowo (Eks Direktur Utama PT BGR Logistik Indonesia) tahun 2018 s/d 2021. - Assignment of the Hendrayanto & Partners Law Firm to an office in Grha PPI (Room 407, 4th Floor, Grha PPI). - Invoice for a success fee from the Hendrayanto & Partners Law Firm in the amount of Rp425,000,000 for the resolution of the 2018 imported meat case. - Request for assistance with the payment of fines by Mr. M Kuncoro Wiobowo (former CEO of PT BGR Logistik Indonesia) for the period 2018 through 2021	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
43	045/Ris.Radir/ PPI/V/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	Pembahasan Aset PT PPI yang terletak di Jalan Tamblong Nomor 46 Kota Bandung Jawa Barat Discussion of PT PPI's assets located at Jalan Tamblong No. 46, Bandung City, West Java	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
44	046/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	4 Juni 2025 June 4, 2025	Permohonan Persetujuan Penarikan Fasilitas Kredit (<i>Reimbursement</i>) oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI kepada <i>vendor</i> yakni Randy Susanto, Henny Ongga Hlim dan PT Gudang Industri Cikande, Frenkie Suryacitra, Marini, CV Mulya Mandiri Sejahtera, Rikky Tjiauwry, PT Sumber Gemilang Lestari, Tjioe Kwie Dhing. Request for approval of the withdrawal of a credit facility (<i>Reimbursement</i>) by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI to vendors, namely Randy Susanto, Henny Ongga Hlim, PT Gudang Industri Cikande, Frenkie Suryacitra, Marini, CV Mulya Mandiri Sejahtera, Rikky Tjiauwry, PT Sumber Gemilang Lestari, and Tjioe Kwie Dhing.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
45	047/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	4 Juni 2025 June 4, 2025	Pembahasan Adendum Perjanjian Pengadaan Jasa Penataan dan Pembersihan <i>Chemical</i> Kadaluarsa PAD 12 antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Discussion of the Addendum to the Agreement for the Procurement of Services for the Disposal and Cleanup of Expired Chemicals PAD 12 between PT Geo Dipa Energi (Persero) and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
46	048/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	4 Juni 2025 June 4, 2025	Persetujuan Pembuatan Akta Cabang Bandar Lampung sebagai Kelengkapan Perizinan Pedagang Besar Farmasi Approval of the Deed of Establishment of the Bandar Lampung Branch as part of the licensing requirements for a Wholesale Pharmaceutical Distributor	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
47	049/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	5 Juni 2025 June 5, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Cuti Tahunan Appointment of the Acting Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General Affairs at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) during Annual Leave	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
48	050/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	17 Juni 2025 June 17, 2025	Persetujuan Penjualan Saham PT Mitra BUMDes Nusantara di PT Mitra Jembaran Bahagia Approval of the Sale of PT Mitra BUMDes Nusantara's Shares in PT Mitra Jembaran Bahagia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
49	051/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	23 Juni 2025 June 23, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk <i>Reimbursement</i> oleh PT BLI kepada <i>Vendor</i> Epifania, PT Putrabali Adyamulia, PT Berkah Pangan Mandiri, Rocky Yonathan, Wahyudi Wibowo, Dian Lukito, H. Harun Rahim, Pelindo Multi Terminal, Ichsan Fauzi, Rikky Tjiauwry, dan CV Mulya Mandiri Sejahtera Approval of the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement by PT BLI to Vendors Epifania, PT Putrabali Adyamulia, PT Berkah Pangan Mandiri, Rocky Yonathan, Wahyudi Wibowo, Dian Lukito, H. Harun Rahim, Pelindo Multi Terminal, Ichsan Fauzi, Rikky Tjiauwry, and CV Mulya Mandiri Sejahtera	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
50	052/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	4 Juni 2025 June 24, 2025	Pembahasan Penilaian Karyawan Fungsional Kantor Pusat dan Penetapan Jabatan Rinald Rubiawan Discussion on the Performance Evaluation of Functional Employees at the Head Office and the Appointment of Rinald Rubiawan	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
51	053/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	Pembahasan Lokasi Aset terkait Kerjasama Optimalisasi Aset Untuk Pembangunan <i>Cold Storage</i> di Komplek Pergudangan Kelapa Gading antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan Nanjing HZLH Supply Chain Management Co.,Ltd Discussion on Asset Locations Related to the Asset Optimization Partnership for the Construction of a Cold Storage Facility at the Kelapa Gading Warehouse Complex between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and Nanjing HZLH Supply Chain Management Co., Ltd.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeny
52	054/Ris.Radir/PPI/ VI/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	Pembahasan SDM - <i>Trainee</i> Discussion on Human Resources – Trainees	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
53	055/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	4 Juli 2025 July 4, 2025	<i>Update Progress</i> Pengosongan Aset Jalan Joyoboyo No.32i Surabaya (a.n Suhartatik) Progress Update on the Vacating of the Property at Jalan Joyoboyo No. 32i, Surabaya (on behalf of Suhartatik)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
54	056/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	4 Juli 2025 July 4, 2025	1. <i>Regrouping</i> Cabang Palembang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT BGR Logistik Indonesia 2. <i>Regrouping</i> Cabang Aceh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Rajawali Nusindo 1. Restructuring of the Palembang Branch of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT BGR Logistik Indonesia 2. Restructuring of the Aceh Branch of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT Rajawali Nusindo	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
55	057/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	7 Juli 2025 July 7, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk <i>Reimbursement</i> kepada <i>Vendor</i> Hetty, Mulyanto dan PT Krakatau Sarana Properti Approval of the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendors Hetty, Mulyanto, and PT Krakatau Sarana Properti	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny



No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
56	059/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	10 Juli 2025 July 10, 2025	Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Piutang Macet Unit Operasional Tulang Bawang dan Unit Operasional Bandar Jaya. Terdapat 3 temuan sebagai berikut : 1. Terdapat pengambilan Jasa Perantara (Jasper) tim dari PT Unilever untuk Unit Operasional Tulang Bawang dan Bandar Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 2. Terdapat Kelemahan Pengendalian Dalam Penjualan Komoditas Unilever Unit Operasional Tulang Bawang dan Bandar Jaya. 3. Terdapat pengambilan Jasa Perantara (Jasper) tim dari PT Unilever untuk Unit Operasional Tulang Bawang dan Bandar Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan. Special Purpose Review Report on Non-Performing Receivables of the Tulang Bawang and Bandar Jaya Operating Units. There were 3 findings as follows: 1. The Tulang Bawang and Bandar Jaya Operating Units engaged a brokerage service (Jasper) team from PT Unilever in a manner inconsistent with Company regulations. 2. There were control weaknesses in the sales of Unilever commodities at the Tulang Bawang and Bandar Jaya Operational Units. 3. There was the use of intermediary services (Jasper) provided by a team from PT Unilever for the Tulang Bawang and Bandar Jaya Operational Units that did not comply with Company regulations.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
57	060/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	10 Juli 2025 July 10, 2025	Hasil Audit Khusus Cabang Utama Surabaya Results of the Special Audit of the Surabaya Main Branch	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
58	061/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	8 Juli 2025 July 8, 2025	Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Selisih Persediaan Minyak Goreng Minyakkita Periode Tahun 2023 pada Cabang Jakarta Results of a Special-Purpose Examination of the Minyakkita Cooking Oil Inventory Discrepancy for the 2023 Period at the Jakarta Branch	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
59	062/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	11 Juli 2025 July 11, 2025	Update Progress Pengosongan Aset Jalan Cipunegara No.44, Surabaya (a.n Bagoes Nusoputro) Progress Update on the Vacating of the Property at Jalan Cipunegara No. 44, Surabaya (on behalf of Bagoes Nusoputro)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
60	063/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	Tindak Lanjut Perihal Penetapan Status Pekerja BOD-1 an Syukri Ajhari Follow-up Regarding the Determination of the Employee Status of BOD-1, Syukri Ajhari	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
61	064/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	Pemberian Natura Berupa Kebutuhan Dasar Rumah Tangga kepada Seluruh Karyawan PT PPI Distribution of In-Kind Benefits in the Form of Basic Household Necessities to All Employees of PT PPI	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
62	065/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	Persetujuan Pembukaan Kantor Area PT BGR Logistik Indonesia di Sumenep Approval for the Opening of a Regional Office of PT BGR Logistik Indonesia in Sumenep	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
63	066/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	Konversi Piutang Eks PT Bhanda Ghara Rekso/PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) menjadi Penyertaan Modal/Saham Pada PT Waskita Beton Precast Tbk. Conversion of Receivables from Former PT Bhanda Ghara Rekso/PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) into Equity/Shares in PT Waskita Beton Precast Tbk.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
64	067/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk <i>Reimbursement</i> kepada Vendor PT CK Pakan Indonesia, Herman Wijaya, Pusat KUD NTB, Zazuli Budi Rahman, Marini, Bonifasius Angkawijaya, Dian Lukito, Sri Mulyana Siem, Surya Kartono dan Stenly Yonardi Approval for the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendors PT CK Pakan Indonesia, Herman Wijaya, Pusat KUD NTB, Zazuli Budi Rahman, Marini, Bonifasius Angkawijaya, Dian Lukito, Sri Mulyana Siem, Surya Kartono, and Stenly Yonardi	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
65	068/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	<i>Regrouping</i> Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Rajawali Nusindo Regrouping of the Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT Rajawali Nusindo	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
66	069/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	Permasalahan Insiden Vaksin Beku Pada PT PPI Cabang Madya Madiun Issues Regarding the Frozen Vaccine Incident at the PT PPI Madya Madiun Branch	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
67	070/Ris.Radir/PPI/ VII/2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	Perubahan Struktur dan Skala Upah Karyawan Changes to the Employee Pay Structure and Pay Scale	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
68	072/Ris.Radir/PPI/ VIII/2025	4 Agustus 2025 August 4, 2025	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT PPI Industri/PT PPII untuk Penebusan <i>Potassium Chlorate</i> ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Approval of the Use of BCA Credit Facilities by PT PPI Industri/PT PPII for the Redemption of Potassium Chlorate from PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
69	073/Ris.Radir/PPI/ VIII/2025	7 Agustus 2025 August 7, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Dinas ke Australia Appointment of an Acting Director of Operations for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) During a Business Trip to Australia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
70	074/Ris.Radir/PPI/ VIII/2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	1. Permohonan PT BLI atas Perpanjangan Sewa Gudang untuk <i>Customer</i> PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL); 2. Permohonan PT BLI atas Perpanjangan Pinjam Pakai Aset Milik PT PPI di Jalan Merak Nomor 8-9 Semarang; 3. Pembahasan Sewa Menyewa Aset PT PPI yang terletak di Jalan Tamblong Nomor 46 Kota Bandung Jawa Barat; 4. Pembahasan Sewa Menyewa Aset Jalan Diponegoro Nomor 211 Surabaya. 1. Request from PT BLI for the extension of a warehouse lease for PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) customers; 2. Request from PT BLI for the extension of the loan-for-use of assets owned by PT PPI at Jalan Merak Nos. 8-9, Semarang; 3. Discussion on the lease of PT PPI assets located at Jalan Tamblong No. 46, Bandung, West Java; 4. Discussion on the lease of assets at Jalan Diponegoro No. 211, Surabaya.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
71	075/Ris.Radir/PPI/ VIII/2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	Struktur Organisasi Divisi Aset dan K3LL Organization Structure of the Assets and K3LL Division	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
72	076/Ris.Radir/PPI/ VIII/2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	Pembahasan Pengadaan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) PPI Discussion on the Procurement of the PPI Disaster Recovery Center (DRC)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
73	077/Ris.Radir/PPI/ VIII/2025	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama sakit Appointment of the Acting Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General Affairs at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) during illness	Soegeng Hernowo Edhy Rizwan Noverita Anggraeny



No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
74	078/Ris.Radir/PPI/ IX/2025	1 September 2025 September 1, 2025	<i>Update Progress Pengosongan Aset Jalan Joyoboyo No.38i, Surabaya (a.n M. Silka/Achmad Soekemi)</i> Progress Update on the Vacating of the Asset at Jalan Joyoboyo No. 38i, Surabaya (on behalf of M. Silka/Achmad Soekemi)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
75	079/Ris.Radir/PPI/ IX/2025	2 September 2025 September 2, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Komersial dan Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Dinas Dalam Negeri Appointment of the Acting Director of Commercial and Development at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) during the Ministry of Home Affairs' visit	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
76	080/Ris.Radir/PPI/ IX/2025	4 September 2025 September 4, 2025	<i>Regrouping Kantor Cabang ID FOOD Group:</i> A. Rencana Regrouping Kantor Cabang PPI Semarang B. Rencana Regrouping Kantor Cabang PPI Yogyakarta C. Rencana Regrouping Kantor Cabang PPI Makassar D. Rencana Regrouping Kantor Cabang PPI Denpasar Regrouping of ID FOOD Group Branch Offices: A. Plan for the Regrouping of the PPI Semarang Branch Office B. Plan for the Regrouping of the PPI Yogyakarta Branch Office C. Plan for the Regrouping of the PPI Makassar Branch Office D. Plan for the Regrouping of the PPI Denpasar Branch Office	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
77	081/Ris.Radir/PPI/ IX/2025	4 September 2025 September 4, 2025	<i>Update Percepatan Struktur Korporasi ID FOOD Group</i> Update on the Acceleration of the ID FOOD Group Corporate Structure	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
78	082/Ris.Radir/PPI/ IX/2025	9 September 2025 September 9, 2025	Pemberian Persetujuan dan Kewenangan kepada Direktur Utama untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/PT BNI (Persero), Tbk. Granting of Approval and Authority to the President Director for the Extension of Working Capital Credit from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/PT BNI (Persero), Tbk.	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
79	083/Ris.Radir/PPI/ IX/2025	1 Oktober 2025 October 1, 2025	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Central Asia,Tbk tahun 2026 Approval of the Extension of the Working Capital Loan (KMK) from PT Bank Central Asia, Tbk for 2026	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
80	084/Ris.Radir/ PPI/X/2025	1 Oktober 2025 October 1, 2025	Persetujuan atas Pemusnahan Barang Rusak di Cabang Madya Balikpapan, Bandung dan Banda Aceh Approval for the Disposal of Damaged Goods at the Madya Branches in Balikpapan, Bandung, and Banda Aceh	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
81	085/Ris.Radir/ PPI/X/2025	1 Oktober 2025 October 1, 2025	Tindak Lanjut Sisa Persediaan Barang Dagang, Perlengkapan dan Kendaraan Milik PT PPI di 3 Titik Aset Wilayah Jakarta : • Jalan Lodan Raya Nomor 32 Jakarta; • Jalan Lodan Raya Nomor 9 Jakarta; dan • Jalan Kencur Nomor 39 A-B, Jakarta Follow-up on Remaining Inventories of Merchandise, Equipment, and Vehicles Belonging to PT PPI at 3 Asset Locations in the Jakarta Area: • Jalan Lodan Raya No. 32, Jakarta; • Jalan Lodan Raya No. 9, Jakarta; and • Jalan Kencur No. 39 A-B, Jakarta	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
82	086/Ris.Radir/ PPI/X/2025	6 Oktober 2025 October 6, 2025	1. Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Tetap PT PPI di Jawa Timur 2. Update Tindak Lanjut Penyelesaian PT Bisma Belis 1. Follow-up on the Settlement of PT PPI's Fixed Assets in East Java 2. Update on the Follow-up to the Settlement of PT Bisma Belis	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
83	087/Ris.Radir/ PPI/X/2025	6 Oktober 2025 October 6, 2025	- Rencana Pelepasan Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada PT Mitra Bumdes Nusantara - Rencana <i>Merger</i> PT PPI Industri dan PT Berdikari Meubel Nusantara - Plan to Divest PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Shares in PT Mitra Bumdes Nusantara - Plan for the Merger of PT PPI Industri and PT Berdikari Meubel Nusantara	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
84	088/Ris.Radir/ PPI/X/2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Sertifikasi CDOB-BPOM Discussion on Follow-Up Actions Regarding the Findings of the CDOB-BPOM Certification Audit	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
85	089/Ris.Radir/ PPI/X/2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Penetapan 20% <i>Top Talent</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada Holding Pangan Talent Committee (HPTC) Tahun 2025 Semester 2 Designation of 20% of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Top Talent to the Holding Pangan Talent Committee (HPTC) for the Second Semester of 2025	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
86	090/Ris.Radir/ PPI/X/2025	18 Oktober 2025 October 18, 2025	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sumatera Utara Perkasa Semen Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Sumatera Utara Perkasa Semen	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
87	091/Ris.Radir/ PPI/X/2025	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Penyelesaian Aset Wilayah Jawa Timur dengan Pendampingan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Settlement of Assets in the East Java Region with Assistance from the East Java High Prosecutor's Office	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
88	092/Ris.Radir/ PPI/X/2025	24 Oktober 2025 October 24, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Komersial dan Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Cuti Tahunan Appointment of the Acting Director of Commercial and Development at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) During Annual Leave	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
89	093/Ris.Radir/ PPI/X/2025	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Penetapan Jabatan Pjs Kepala Divisi Perdagangan Non Pangan an. Agis Setiawan Appointment of Agis Setiawan as Acting Head of the Non-Food Trading Division	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
90	094/Ris.Radir/ PPI/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Permohonan Opini Hukum terkait Status Kepemilikan Aset PT PPI (Aset di Jalan Kramat Raya Nomor 172A Jakarta Pusat dan Jalan Kramat Raya Nomor 69-71,71 A Jakarta Pusat) Request for a Legal Opinion Regarding the Ownership Status of PT PPI Assets (Properties at Jalan Kramat Raya No. 172A, Central Jakarta, and Jalan Kramat Raya Nos. 69-71, 71A, Central Jakarta)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
91	095/Ris.Radir/ PPI/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Progres Program Cold Chain Kementerian Pertanian Progress of the Ministry of Agriculture's Cold Chain Program	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
92	096/Ris.Radir/ PPI/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT BGR Logistik Indonesia Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders Regarding the 2024 Fiscal Year Annual Report of PT BGR Logistik Indonesia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
93	097/Ris.Radir/ PPI/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT PPI Industri Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders Regarding the 2024 Fiscal Year Annual Report of PT PPI Industri	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
94	098/Ris.Radir/ PPI/X/2025	31 Oktober 2025 October 31, 2025	Update Penyusunan RKAP 2026 dan <i>Roadmap</i> Bisnis PT PPI Tahun 2026-2030 Update on the Preparation of the 2026 Budget Plan and PT PPI's 2026-2030 Business Roadmap	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
95	099/Ris.Radir/PPI/ XI/2025	3 November 2025 November 3, 2025	Tindak Lanjut Pengisian Kekosongan Jabatan Dewan Komisaris PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI Follow-up on Filling Vacancies on the Board of Commissioners of PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny



No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
96	100/Ris.Radir/PPI/ XI/2025	12 November 2025 November 12, 2025	Pembahasan Pemberhentian Komisaris Non Independen dan Pelaksana Tugas Komisaris Utama serta Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisaris PT BGR Logistik Indonesia Discussion on the Dismissal of the Non-Independent Commissioner and the Acting Chairman of the Board of Commissioners, as well as the Appointment of the Acting Commissioner of PT BGR Logistik Indonesia	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
97	101/Ris.Radir/PPI/ XI/2025	14 November 2025 November 14, 2025	- Pemberian Bonus/Jasa Produksi bagi Karyawan Tetap, Karyawan Tidak Tetap dan Insentif bagi Karyawan OS Non Dasar Tahun Buku 2024 PT PPI - Pengali Pemberian Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2024 - Pemberian Insentif bagi Karyawan OS Non Dasar Tahun Buku 2024 - Awarding of Bonuses/Production Incentives to Permanent and Non-Permanent Employees and Incentives for Non-Core OS Employees for PT PPI's Fiscal Year 2024 - Bonus/Production Incentive Multipliers for Fiscal Year 2024 - Awarding of Incentives to Non-Core OS Employees for Fiscal Year 2024	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
98	103/Ris.Radir/PPI/ XI/2025	20 November 2025 November 20, 2025	Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Pengembangan Cold Chain Formation of a Working Group (Pokja) for the Cold Chain Development Plan	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
99	104/Ris.Radir/PPI/ XI/2025	28 November 2025 November 28, 2025	Rencana Pelepasan Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada PT Sumatera Utara Perkasa Semen Plan to Divest PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Shares in PT Sumatera Utara Perkasa Semen	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
100	105/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	3 December 2025 December 3, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Cuti Tahunan Appointment of an Acting President Director (PLH) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) During Annual Leave	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
101	106/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	3 December 2025 December 3, 2025	Pembahasan Pemberian Bantuan Pada Cabang PT PPI Terdampak Bencana Banjir Area Sumatra Discussion on Providing Assistance to PT PPI Branches Affected by Flooding in the Sumatra Region	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
102	107/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	8 December 2025 December 8, 2025	- Rencana Penyelesaian Hutang Gula Kristal Putih Ex RNI ke PT PG Rajawali 2 - Rencana Penyelesaian Hutang-Piutang Stunting dan Management Fee antara PT PPI dan PT RNI (Persero). - Plan for Settling the Debt for White Crystal Sugar (formerly RNI) to PT PG Rajawali 2 - Plan for Settling Accounts Receivable and Payable Related to Stunting and Management Fees between PT PPI and PT RNI (Persero).	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
103	108/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	9 December 2025 December 9, 2025	Penetapan Laporan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Penentuan Aspek Penilaian Calon Konsultan Kajian Feasibility Study Cold Chain Approval of the Self-Estimated Price Report (HPS), Terms of Reference (KAK), and Determination of Evaluation Criteria for Prospective Consultants for the Cold Chain Feasibility Study	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
104	109/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	9 December 2025 December 9, 2025	Pembahasan Tunjangan Akhir Tahun (TAT) Discussion on Year-End Bonuses (TAT)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
105	110/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	12 December 2025 December 12, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama sakit Appointment of an Acting President Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) during illness	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
106	111/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	22 Desember 2025 December 22, 2025	Penempatan Jabatan Baru untuk Karyawan di Lingkungan PT PPI New Position Assignments for Employees within PT PPI	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
107	112/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	23 Desember 2025 December 23, 2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selama Cuti Tahunan Appointment of an Acting Director of Finance, Risk Management, Human Resources, and General Affairs at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) during Annual Leave	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny
108	113/Ris.Radir/PPI/ XII/2025	23 Desember 2025 December 23, 2025	Pengadaan Kendaraan Niaga PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Procurement of Commercial Vehicles for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Soegeng Hernowo Wien Irwanto Edhy Rizwan Noverita Anggraeny

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2025

Pada tahun 2025, anggota Direksi berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, yaitu *Sustainability Reporting : Impact & Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals* yang diselenggarakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tanggal 30 September 2025 di Jakarta.

Competency Development Program of Board of Directors in 2025

In 2025, members of the Board of Directors participated in training activities as part of continuous competency development, namely *Sustainability Reporting: Impact & Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals* which was held by IAI (Indonesian Accountants Association) on September 30, 2025 in Jakarta.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2025

Terkait pelaksanaan tugas di tahun 2025, Direksi telah menjalankan agenda sebagai berikut:

- Menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), meliputi profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan efisiensi dalam seluruh aspek operasional.
- Menetapkan dan menyesuaikan strategi bisnis Perseroan dengan kondisi ekonomi global dan nasional, termasuk menghadapi tantangan fluktuasi nilai tukar, inflasi global, serta kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi dan ekspor.
- Mengembangkan dan memperkuat jaringan distribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Klaster BUMN Pangan.
- Menjamin kelangsungan usaha dan pencapaian target Perseroan, termasuk realisasi pendapatan Rp6,95 triliun atau 193% dari target RKAP tahun 2025.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan, serta menyimpan dan memelihara dokumen penting seperti Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi.
- Menyusun dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tepat waktu untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
- Melaksanakan pengembangan SDM melalui pelatihan, manajemen kinerja, serta penataan organisasi agar selaras dengan tujuan strategis Perseroan.

Report on the Implementation of the Board of Directors' Duties in 2025

Regarding the duties implementation in 2025, the Board of Directors has implemented the following agenda:

- Managing the company in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), encompassing professionalism, transparency, accountability, integrity, and efficiency in all operational aspects.
- Establishing and adapting the Company's business strategy to global and national economic conditions, including addressing the challenges of exchange rate fluctuations, global inflation, and government policies related to subsidized fertilizer and exports.
- Developing and strengthening the distribution network to support national food security as part of the Food SOE Cluster.
- Ensuring business continuity and achieving the Company's targets, including achieving revenue of Rp6.95 trillion, or 193% of the 2025 RKAP target.
- Holding General Meetings of Shareholders (GMS) in accordance with regulations, and storing and maintaining important documents such as the Minutes of the GMS, the Minutes of the Board of Commissioners Meetings, and the Board of Directors Meetings.
- Prepared and submitted the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) on time to support the achievement of strategic targets.
- Implemented human resource development through training, performance management, and organizational restructuring to align with the Company's strategic objectives.



- Optimalisasi ERP sesuai proses bisnis dan *report analysis* telah berhasil dilaksanakan 100% untuk aspek financial dalam Optimalisasi Digitalisasi Sistem pada Fungsi Utama (ERP).
- Pengembangan pemasukan tambahan melalui penajakan kerjasama kedistributoran dengan sektor FMCG
- Melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkontribusi terhadap 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), termasuk kemitraan dengan pelaku UMK.
- Melakukan manajemen risiko secara aktif melalui *stress test*, skenario *planning*, dan penilaian risiko untuk memastikan keberlangsungan usaha.
- ERP optimization based on business processes and report analysis has been 100% successful for the financial aspect in the Optimization of System Digitalization in Core Functions (ERP).
- Developed additional revenue by exploring distributor collaborations with the FMCG sector.
- Implemented Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs that contribute to the 8 Sustainable Development Goals (SDGs), including partnerships with MSEs.
- Actively managed risk through stress testing, scenario planning, and risk assessments to ensure business continuity.

Keputusan Direksi Tahun 2025

Decision of the Board of Directors in 2025

No.	Nomor SK Decree Number	Perihal Concern
1	01/DU/SKD/PPI/I/2025	Penugasan Rangkap Jabatan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) <i>Region Manager</i> Cabang Madya Palu Concurrent Assignment as Acting Tasks (PLT) Region Manager for Palu Middle Branch
2	02/DU/SKD/PPI/I/2025	Rotasi Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Permanent Worker Rotation within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
3	03/DU/SKD/PPI/I/2025	Tunjangan Akhir Tahun untuk Tahun Buku 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) End of Year Allowance for the 2024 Financial Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
4	04/DU/SKD/PPI/II/2025	Rotasi Alih Jabatan Fungsional Ke Jabatan Struktural di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rotation of Transfer from Functional Positions to Structural Positions in the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Environment
5	05/DU/SKD/PPI/II/2025	Promosi Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Promotion of Permanent Workers in the Environment of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
6	06/DU/SKD/PPI/II/2025	Penetapan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of the Organizational Structure of the Head Office and Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
7	12/DU/SKD/PPI/II/2025	Pembentukan Tim Operasi Pasar di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Formation of a Market Operations Team within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
8	13/DU/SKD/PPI/III/2025	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Religious Holiday Allowance for 2025 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
9	14/DU/SKD/PPI/III/2025	Penugasan Pekerja Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ke Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Yaitu PT PPI Industri Assignment of permanent workers from PT Perusahaan Perdagangan Indonesia to a subsidiary of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, namely PT PPI Industri
10	15/DU/SKD/PPI/III/2025	Penempatan Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Permanent Employee Placement in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Environment
11	16/DU/SKD/PPI/III/2025	Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Formation of the Gratification Control Unit (UPG) Team at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
12	17/DU/SKD/PPI/III/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of Daily Executive (PLH) Director of Operations of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
13	18/DU/SKD/PPI/III/2025	Penetapan <i>Risk Owner</i> dan <i>Key Risk Register</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of Risk Owner and Key Risk Register of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
14	19/DU/SKD/PPI/IV/2025	Penetapan Jabatan di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of Positions within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
15	20/DU/SKD/PPI/IV/2025	Penetapan <i>Person in Charge</i> (PIC) Verifikator Data Penjualan, Harga Pokok Penjualan (HPP) dan <i>Stock on Hand</i> PT PPI Determination of Person in Charge (PIC) Verifier of Sales Data, Cost of Goods Sold (HPP) and Stock on Hand PT PPI
16	21/DU/SKD/PPI/V/2025	Penugasan Pekerja Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ke Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Assignment of Permanent Employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia to the Subsidiary Company of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

No.	Nomor SK Decree Number	Perihal Concern
17	22/DU/SKD/PPI/IV/2025	Penugasan Rangkap Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SBU WIS Assignment of Dual Position as Acting Head of SBU WIS
18	23/DU/SKD/PPI/V/2025	Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri Saudara Agus Hartanto Termination of Employment Due to the Resignation of Agus Hartanto
19	24/DU/SKD/PPI/V/2025	Penugasan Rangkap Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL Assignment of Dual Position as Acting Head of Corporate Secretariat and TJSL
20	25/DU/SKD/PPI/V/2025	Rotasi Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rotation of Permanent Employees at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
21	26/DU/SKD/PPI/V/2025	Rotasi Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Permanent Worker Rotation within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
22	27/DU/SKD/PPI/V/2025	Promosi Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Promotion of Permanent Employees at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
23	28/DU/SKD/PPI/V/2025	Penugasan Rangkap Jabatan sebagai Pelaksana tugas (PLT) Manajer Manajemen Risiko Divisi Manajemen Risiko dan Mutu Concurrent Assignment as Acting Risk Management Manager (PLT) for the Risk and Quality Management Division
24	29/DU/SKD/PPI/V/2025	Penetapan Tim Pembaruan Data Aset Tanah dan/atau Bangunan PT PPI Determination of the PT PPI Land and/or Building Asset Data Update Team
25	33/DU/SKD/PPI/V/2025	Penetapan Wakil Manajemen Alat Kesehatan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of the Medical Device Management Representative of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
26	34/DU/SKD/PPI/V/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Appointment of Acting Director of Operations of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
27	36/DU/SKD/PPI/VI/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of the Daily Executive (PLH) Director of Finance, Risk Management, Human Resources and General Affairs of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
28	37/DU/SKD/PPI/VI/2025	Perubahan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT PPI Changes to the PT PPI Non-Commercial Goods and Services Procurement Committee
29	39/DU/SKD/PPI/VII/2025	Penetapan Tim Asesmen Internal Standarisasi CDAKB PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Establishment of the Internal Assessment Team for CDAKB Standardization of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
30	40/DU/SKD/PPI/VII/2025	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 PT PPI Formation of PT PPI's 2026 Company Work and Budget Plan (RKAP) Preparation Team
31	41/DU/SKD/PPI/VII/2025	Pemberian Natura Berupa Kebutuhan Dasar Rumah Tangga bagi Karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Natura Support in the Form of Basic Household Needs for Employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
32	42/DU/SKD/PPI/VIII/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Appointment of Acting Director of Operations of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
33	44/DU/SKD/PPI/VIII/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum PT PPI Determination of Daily Executive (PLH) Director of Finance, Risk Management, HR and General Affairs of PT PPI
34	45/DU/SKD/PPI/IX/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Komersial dan Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of the Daily Executive (PLH) Director of Commercial and Development of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
35	46/DU/SKD/PPI/IX/2025	Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) PT PPI Information Technology Steering Committee (IT Steering Committee) of PT PPI
36	47/DU/SKD/PPI/IX/2025	Penetapan Tim Asesmen IT Maturity Level PT PPI Determination of the IT Maturity Level Assessment Team at PT PPI
37	49/DU/SKD/PPI/IX/2025	Tim Asesor Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2024 PT PPI PT PPI Good Corporate Governance (GCG) Assessor Team for Fiscal Year 2024
38	50/DU/SKD/PPI/X/2025	Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Establishment of the Procurement Committee for Non-Trade Goods and Services of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
39	52/DU/SKD/PPI/X/2025	Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2025-2028 PT PPI PT PPI's Collective Labor Agreement (PKB) Negotiation Team for the 2025-2028 Period
40	54/DU/SKD/PPI/XI/2025	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Komersial dan Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Determination of the Daily Executive (PLH) Director of Commercial and Development of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)



Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memikul tanggung jawab penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang operasional Perseroan. Bersama-sama, Dewan Komisaris dan Direksi berkolaborasi secara erat untuk membangun kerangka kerja tata kelola yang kuat, mendorong transparansi, dan menjunjung tinggi standar etika di seluruh organisasi. Dengan menjalankan perannya masing-masing secara efektif, mereka berkontribusi dalam menjaga ketahanan, daya saing, dan keberlanjutan Perseroan di tengah lanskap bisnis yang terus berkembang. Hal ini akan tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen risiko;
2. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
3. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
5. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Rapat Gabungan

Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk koordinasi guna membahas isu dan hal-hal strategis terkait pengelolaan perseroan, serta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi.

Di dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dan Direksi umumnya membahas laporan kinerja PPI, mengambil keputusan strategis yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan Dewan komisaris, serta mendiskusikan masalah atau isu terkini yang sedang dihadapi PPI.

Kebijakan Rapat Gabungan

Pelaksanaan rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat gabungan dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat gabungan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

According to their specific roles and responsibilities, both the Board of Commissioners and the Board of Directors bear the crucial responsibility of ensuring the long-term continuity and success of the Company's operations. Together, the Board of Commissioners and the Board of Directors collaborate closely to establish a robust governance framework, promote transparency, and uphold ethical standards throughout the organization. By fulfilling their respective roles effectively, they contribute to maintaining the Company's resilience, competitiveness, and sustainability in the ever-evolving business landscape. This will be reflected in:

1. Implementation of good internal control and risk management;
2. Achievement of reasonable returns for shareholders;
3. The interests of Stakeholders are reasonably protected;
4. Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
5. Fulfillment of GCG implementation.

Joint Meeting

The Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors periodically as a form of coordination to discuss issues and strategic matters related to the management of the company, as well as a form of implementation of the direct supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors.

In the joint meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors generally discuss PPI's performance reports, make strategic decisions that require the approval or consideration of the Board of Commissioners, and discuss current problems or issues facing PPI.

Joint Meeting Policy

The implementation of the joint meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the joint meeting is chaired by another Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

The decision-making mechanism in the joint meeting is carried out by deliberation for consensus.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat gabungan bersama Direksi.

Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di dalam rapat gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 14 (fourteen) joint meetings with the Board of Directors.

The agenda and attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the joint meetings are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%Kehadiran %Attendance
DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS				
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioners	14	14	100%
Gigih Guntoro	Komisaris Independen Independent Commissioners	14	14	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of the Board of Commissioners				
DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS				
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	14	14	100%
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	14	14	100%
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	14	14	100%
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations	14	14	100%
Rata-rata Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors		14	14	100%

Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2025

Details of the Implementation of Meetings, Agendas and Attendance of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors in 2025

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	01/Ris.Ragab/PPI/I/2025	22 Januari 2025 January 22, 2025 Ruang VIP Lantai 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI Zoom Meeting	1. Pembahasan Draft RKAP 2025 2. Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Desember 2024 3. Lain-lain 1. Discussion of the 2025 Draft Annual Work Plan 2. Discussion of PT PPI's Performance through December 2024 3. Others	Komisaris: Commissioners: Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeny Edhy Rizwan



**Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris
dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2025**

Details of the Implementation of Meetings, Agendas and Attendance of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors in 2025

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
2	02/Ris.Ragab/PPI/II/2025	13 Februari 2025 February 13, 2025 <i>Zoom Meeting</i>	Pembahasan Penugasan Impor Daging PT PPI Discussion on PT PPI Meat Import Assignment	Komisaris: Commissioners: Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
3	03/Ris.Ragab/PPI/II/2025	26 Februari 2025 February 26, 2025 Ruang VIP Lantai 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI <i>Zoom Meeting</i>	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Februari 2025 Discussion of PT PPI's Performance through February 2025	Komisaris: Commissioners: Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
4	04/Ris.Ragab/PPI/III/2025	25 Maret 2025 March 25, 2025 Covare WRT	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Maret 2025 Discussion of PT PPI's Performance through March 2025	Komisaris: Commissioners: Hamli Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
5	05/Ris.Ragab/PPI/IV/2025	23 April 2025 April 23, 2025 Ruang VIP Lantai 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI <i>Zoom Meeting</i>	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d April 2025 Discussion of PT PPI's Performance through April 2025	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
6	06/Ris.Ragab/PPI/V/2025	23 Mei 2025 May 23, 2025 Ruang VIP Lantai 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI <i>Zoom Meeting</i>	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Mei 2025 Discussion of PT PPI's Performance through May 2025	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan

Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2025

Details of the Implementation of Meetings, Agendas and Attendance of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors in 2025

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
7	07/Ris.Ragab/PPI/VI/2025	24 Juni 2025 June 24, 2025 Ruang VIP Lantai 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI <i>Zoom Meeting</i>	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Juni 2025 Discussion of PT PPI's Performance through June 2025	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
8	08/Ris.Ragab/PPI/VII/2025	28 Juli 2025 July 28, 2025 Ruang Meeting VIP Aroem Resto VIP Meeting Room, Aroem Resto	1. Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Juni 2025 2. Lain-lain 1. Discussion of PT PPI's Performance through June 2025 2. Others	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
9	09/Ris.Ragab/PPI/VIII/2025	14 Agustus 2025 August 14, 2025 Ruang VIP Lt. 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI	1. Tindak lanjut hasil rapat bulan Juli 2025 2. Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Juli 2025 1. Follow-up on the July 2025 meeting 2. Discussion of PT PPI's Performance through July 2025	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
10	10/Ris.Ragab/PPI/IX/2025	29 September 2025 September 29, 2025 Ruang VIP Lt. 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI	1. Tindak lanjut hasil rapat bulan Agustus 2025 2. Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Agustus 2025 1. Follow-up on the August 2025 meeting 2. Discussion of PT PPI's Performance through August 2025	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
11	11/Ris.Ragab/PPI/X/2025	20 Oktober 2025 October 20, 2025 <i>Zoom Meeting</i>	1. Tindak lanjut hasil rapat bulan September 2025 2. Pembahasan Kinerja PT PPI s.d September 2025 1. Follow-up on the September 2025 meeting 2. Discussion of PT PPI's Performance through September 2025	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan



Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2025

Details of the Implementation of Meetings, Agendas and Attendance of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors in 2025

No	Nomor Risalah Surat Meeting Minutes Number	Tanggal & Tempat Date & Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
12	12/Ris.Ragab/PPI/XI/2025	13 November 2025 November 13, 2025 Ruang VIP Lt. 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI	1. Pembahasan draft awal RJP 2026-2020 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 2. Pembahasan RKAP 2026 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 1. Discussion of the preliminary draft of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 2026–2020 Long-Term Business Plan 2. Discussion of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 2026 Annual Budget Plan (RKAP)	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
13	13/Ris.Ragab/PPI/XI/2025	20 November 2025 November 20, 2025 Ruang VIP Lt. 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI	1. Pembahasan Kinerja s.d. bulan Oktober 2025 2. Lain-lain 1. Discussion of Performance through October 2025 2. Others	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan
14	14/Ris.Ragab/PPI/XII/2025	23 Desember 2025 December 23, 2025 Ruang VIP Lt. 3 Grha PPI VIP Room, 3rd Floor, Grha PPI	1. Pembahasan Kinerja s.d. bulan November 2025 2. Lain-lain 1. Discussion of Performance through November 2025 2. Others	Komisaris: Commissioners: Setiawan Wangsaatmaja Gigih Guntoro Direksi: Board of Directors: Soegeng Hernowo Wien Irwanto Noverita Anggraeni Edhy Rizwan

Rekomendasi dan Arahan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Tahun 2025

Selama Tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Direksi sebagai bagian dari upaya penguatan fundamental perusahaan dan peningkatan kualitas kinerja Perseroan.

Rekomendasi tersebut antara lain:

a. Penguatan Bisnis Non-Penugasan

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan kontribusi usaha non-penugasan dan usaha dengan *margin* lebih sehat guna mengurangi

Recommendations and Direction from the Board of Commissioners at the Joint Meeting in 2025

In 2025, the Board of Commissioners provided strategic recommendations to the Board of Directors as part of efforts to strengthen the company's fundamentals and improve the quality of the Company's performance.

These recommendations include:

a. Non-Assignment Business Strengthening

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to increase the contribution of non-assignment businesses and businesses with healthier

ketergantungan terhadap penugasan Pemerintah dan komoditas bermargin rendah.

b. Evaluasi Kontrak dan Kegiatan Usaha Bermargin Rendah

Dewan Komisaris merekomendasikan evaluasi terhadap kontrak-kontrak usaha dengan *margin* rendah, termasuk pengendalian HPP, biaya logistik, dan biaya operasional lainnya agar profitabilitas Perusahaan dapat lebih optimal.

c. Penguatan Modal Kerja dan Cash Flow

Dewan Komisaris menekankan pentingnya pengelolaan modal kerja secara lebih disiplin, termasuk:

- Percepatan *cash collection*;
- Pengendalian piutang;
- Evaluasi pemanfaatan fasilitas kredit bank;
- Penguatan likuiditas perusahaan.

d. Optimalisasi dan Pengamanan Aset

Dewan Komisaris merekomendasikan percepatan legalitas aset, pengamanan aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan kontribusi yang lebih produktif terhadap perusahaan.

e. Penguatan Produktivitas Kantor Cabang

Dewan Komisaris mendorong evaluasi kinerja cabang secara menyeluruh dengan penekanan pada:

- *Profit contribution*;
- Efektivitas operasional;
- Produktivitas SDM;
- Peningkatan kemampuan pemasaran dan penjualan.

f. Penguatan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris juga merekomendasikan:

- Percepatan penyelesaian *backlog* audit internal;
- Penguatan *issue governance* berbasis SLA;
- Peningkatan implementasi manajemen risiko dan monitoring risiko residual secara lebih terukur.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penyesuaian strategi tersebut penting untuk memastikan pertumbuhan usaha Perseroan tidak hanya tinggi secara volume, tetapi juga sehat, berkualitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan keberagaman komposisi dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman berkarier dari masing-masing kandidat, serta memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompleksitas pengembangan bisnis perseroan.

margins to reduce dependence on Government assignments and low-margin commodities.

b. Evaluation of Low Margin Contracts and Business Activities

The Board of Commissioners recommends evaluating business contracts with low margins, including controlling COGS, logistics costs and other operational costs so that the Company profitability can be optimized.

c. Strengthening Working Capital and Cash Flow

The Board of Commissioners emphasizes the importance of managing working capital in a more disciplined manner, including:

- Acceleration of cash collection;
- Control of receivables;
- Evaluate the utilization of bank credit facilities;
- Strengthening company liquidity.

d. Asset Optimization and Security

The Board of Commissioners recommends accelerating asset legality, securing assets, and optimizing asset utilization in order to provide a more productive contribution to the company.

e. Strengthening Branch Office Productivity

The Board of Commissioners encourages overall branch performance evaluation with emphasis on:

- Profit contribution;
- Operational effectiveness;
- HR productivity;
- Increased marketing and sales capabilities.

f. Strengthening Internal Control and Risk Management

The Board of Commissioners also recommends:

- Accelerating completion of internal audit backlog;
- Strengthening SLA-based issue governance;
- Increasing the implementation of risk management and monitoring residual risk in a more measurable manner.

The Board of Commissioners is of the view that adjusting this strategy is important to ensure that the Company's business growth is not only high in volume, but also healthy, high quality and sustainable in the long term.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors consistently considers diversity in composition, taking into account the expertise, knowledge, and career experiences of each candidate, as well as the organizational needs and business development complexity of the company.



Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, dan pemahaman mengenai sistem manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang cakap pada bidang yang dibutuhkan PPI serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberagaman komposisi menjadi hal penting karena berperan besar dalam mendukung kepemimpinan, pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya latar belakang keberagaman tersebut diharapkan alternatif dan perspektif pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan aspek yang lebih luas sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan solutif bagi perseroan.

Uraian lebih lengkap mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PPI berdasarkan latar belakang pendidikan dan karier profesional dapat dilihat pada profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dalam bentuk evaluasi atas pencapaian target-target KPI Dewan Komisaris untuk periode 1 (satu) tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pihak Penilai

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PPI dilakukan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam hal pemberian skema kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta untuk menentukan keputusan pengangkatan kembali ataupun pemberhentian terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

The appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is made considering integrity, dedication, understanding of corporate management systems, expertise in fields required by PPI, and the ability to dedicate sufficient time to fulfill their duties, as well as other requirements based on legal regulations.

Diversity in composition is essential as it significantly contributes to supporting the management, administration, departmentalization, and execution of duties of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. With diverse backgrounds, it is expected that decision-making alternatives and perspectives will consider broader aspects, leading to well-informed and solution-oriented decisions for the company.

A more detailed description of the diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI based on educational backgrounds and professional careers can be found in the profiles of each Board member in the Company Profile section of this Annual Report.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

1. THE BOARD OF COMMISSIONERS

In practice, the Board of Commissioners measures and evaluates the performance of the Board of Commissioners collectively through an evaluation of the achievement of KPI targets for the Board of Commissioners for the 1 (one) fiscal year period as outlined in the Board of Commissioners' Oversight Task Report.

Assessor Party

The appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI is conducted by shareholders through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Assessment Results

The results of the appraisal of the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors are used as a basis for consideration in providing compensation schemes for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as to determine decisions regarding reappointment or termination of the respective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

2. DIREKSI

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi.

Dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025, Dewan Komisaris telah menetapkan rencana kegiatan secara umum untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas kinerja Direksi.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegal berdasarkan evaluasi atas kinerja perusahaan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RKAP di antaranya sebagaimana tergambar dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/II/2026

Penilaian kinerja Direksi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, analisis Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta melalui kunjungan langsung Dewan Komisaris ke cabang. Di samping itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga melakukan penilaian terhadap berbagai aspek terkait kegiatan usaha perseroan. Hal tersebut tercermin di dalam laporan-laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Aspek Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Indikator Indicator Achievement	
		2025	2024
Dewan Komisaris Board of Commissioners	100	99,58	94,58
Direksi Board of Directors	100	95,71	90,4

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh pihak penilai.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan salah satu kriteria untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi.

2. BOARD OF DIRECTORS

Evaluation of the performance of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners as part of their oversight and advisory responsibilities to the Board of Directors.

In their Work Program for 2025, the Board of Commissioners has outlined a general plan to evaluate and assess the performance of the Board of Directors.

In practice, the Board of Commissioners collectively evaluates the performance of the Board of Directors based on an assessment of the company's performance and the achievement of targets set in the RKAP, as reflected in the Board of Commissioners' Letter No. 05/Dk.Eks/PTPPI/II/2026

The Board of Commissioners indirectly evaluates the performance of the Board of Directors through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, analysis of reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and through direct visits by the Board of Commissioners to branches. Additionally, the Board of Commissioners, through the Audit Committee and the Risk Oversight Committee, also evaluates various aspects related to the company's business activities, as reflected in the reports of the Audit Committee and the Risk Oversight Committee submitted to the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are fully committed to continuously improving the quality of GCG implementation by following up on every improvement recommendation provided by the evaluator.

Disclosure of Affiliate Relationships of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders

The affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders is one of the criteria for measuring independency of the Board of Commissioners and Board of Directors.



Tabel di bawah ini mengungkapkan hal-hal berikut ini:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/ pengendali.

The table below discloses the following:

1. Affiliation relationships among members of the Board of Directors;
2. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Majority and/or Controlling Shareholders;
4. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and
5. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and the Majority and/or Controlling Shareholders.

In the table of disclosure of affiliation relationships below, it can be seen that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI do not have family relationships and financial relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Majority and/or Controlling Shareholders.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders
Setiawan Wangsaatmaja	X	X	X	X	X	X
Gigih Guntoro	X	X	X	X	X	X
Soegeng Hernowo	X	X	X	X	X	X
Wien Irwanto	X	X	X	X	X	X
Edhy Rizwan	X	X	X	X	X	X
Noverita Anggraeny	X	X	X	X	X	X
√ : ada/exist X : tidak ada/none						

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pada periode tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

During 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company did not own any shares in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan skema remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI menjadi kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS dengan tetap mengindahkan pedoman dan prosedur yang berlaku secara umum.

Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris terlebih dahulu mengajukan rekomendasi terkait struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk ditinjau dan diputuskan dalam RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Indikator utama dalam penentuan remunerasi Direksi, yaitu:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain mengacu pada regulasi di atas, pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan sejumlah indikator berikut ini, antara lain:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perdagangan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya; dan
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PPI.

Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors

Policy and Procedures for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

The determination of remuneration schemes for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is the authority of shareholders through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (RUPS) while adhering to applicable guidelines and procedures.

In its practice, the Board of Commissioners first submits their recommendations regarding the structure and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be reviewed and decided upon in the RUPS.

The Indicators for Remuneration Determination refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 concerning Guidelines for Determining Income for Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

The main indicators in determining director remuneration are:

1. Scale of business factors;
2. Complexity of business factors;
3. Inflation rate;
4. Company financial condition and capability;
5. Other relevant factors, and must not contradict laws and regulations.

In addition to referring to the above regulations, the provision of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors also considers several of the following indicators, among others:

1. Remuneration is given when the company makes a profit in the respective fiscal year;
2. Remuneration is given based on market developments in the trading industry;
3. Remuneration is given through the measurement of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of *Key Performance Indicators* (KPIs) of the Company;
5. Individual work performance;
6. Fairness compared to peer companies; and
7. Consideration of long-term goals and strategies of PPI.



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PPI, adalah sebagai berikut:

Structure of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 concerning Guidelines for Determining Income for Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises (SOEs), the structure of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Directors
- Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama - Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama - The salary of the President Commissioner is 45% of the President Director - The salary of the Commissioner is 90% of the President Commissioner	- Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama - Perhitungan gaji Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama - The salary of the President Director is as the main reference - The salary of the Director is 90% of the President Director
Tunjangan Allowance Rp12.015.000	Tunjangan Allowance Rp12.015.000
Fasilitas Facility Asuransi Kesehatan / Medical Insurance	Fasilitas Facility Asuransi Kesehatan / Health Insurance
Tantiem Dewan Komisaris Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.	Tantiem Dewan Komisaris Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Pada tahun 2025, PPI telah membagikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun buku 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Transparency on the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

In 2025, PPI provided remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors for the performance of the 2024 fiscal year with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan (dalam 1 tahun) Monthly Remuneration (in 1 year)		Tunjangan Hari Raya (THR) Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2024 (Bersih) Tantiem for the 2024 Fiscal Year	Remunerasi Total Tahun 2024 Total Remuneration in 2025
		Honorarium	Tunjangan Transportation/ Tunjangan Perumahan Transportation Allowance/ Housing Allowance			
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS						
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	Rp648.810.000	Rp129.762.000	Rp54.067.500		Rp832.639.500
Gigih Guntoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp648.810.000	Rp129.762.000	Rp24.293.342		Rp802.865.342

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan (dalam 1 tahun) Monthly Remuneration (in 1 year)		Tunjangan Hari Raya (THR) Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2024 (Bersih) Tantiem for the 2024 Fiscal Year	Remunerasi Total Tahun 2024 Total Remuneration in 2025
		Honorarium	Tunjangan Transportation/ Tunjangan Perumahan Transportation Allowance/ Housing Allowance			
DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS						
Soegeng Hernowo	President Director	Rp1.602.000.000	Rp330.000.000	Rp133.500.000		Rp2.065.500.000
Wien Irwanto	Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Rp1.361.700.000	Rp330.000.000	Rp113.475.000		Rp1.805.175.000
Edhy Rizwan	Director of Commercial & Development	Rp1.361.700.000	Rp330.000.000	Rp113.475.000		Rp1.805.175.000
Noverita Anggraeny	Director of Operations	Rp1.361.700.000	Rp330.000.000	Rp113.475.000		Rp1.805.175.000

Bonus Kerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020, ketentuannya sebagai berikut:

1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
 - a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
 - b. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Opini yang diterbitkan oleh *auditor* adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
 - i. Laba Setelah Pajak;
 - ii. Pencapaian KPI;
 - iii. BUMN yang melakukan investasi jangka Panjang secara agresif;
 - iv. BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau
 - v. Faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

Incentive

Provision of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/11/2014 as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020. The conditions are as follows:

1. Tantiem/Incentives can be given to the Board of Directors and the Board of Commissioners if:
 - a. Realization of the lowest soundness level score of 70;
 - b. Minimum KPI achievement of 80% (eighty percent);
 - c. The opinion issued by the auditor is at least Qualified (WDP);
 - d. The condition of the Company is not losing more than the previous year for the Company in a loss condition, or the company is not at a loss than before in a profit condition. The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.
2. Calculation of Tantiem/Incentives uses internal guidelines set by the Minister of SOEs with the following provisions:
 - a. The determination of Tantiem takes into account:
 - i. Profit After Tax;
 - ii. Achievement of KPIs;
 - iii. SOEs that make aggressive long-term investments;
 - iv. SOEs that carry out government assignments; and/or
 - v. Other factors that can be accounted for in a professional manner.



- b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan PPI.
3. Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
 - b. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.

- b. Determination of Performance Incentives takes into account the improvement of PPI's performance and financial capability.
3. The composition of the amount of Tantiem/Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners follows the position factors as follows:
 - a. Other members of the Board of Directors: 85% of the President Director;
 - b. President Commissioner: 45% of the President Director; and
 - c. Members of the Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs under the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat-nasihat dan membantu jalannya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan jalannya pengurusan PPI oleh Direksi dan segenap jajarannya serta melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Sekretaris Dewan Komisaris PPI diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut ini:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Periode jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam masa waktu tertentu namun akan berakhir apabila Dewan Komisaris memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau bila yang bersangkutan

Secretary to the Board of Commissioners

In order to facilitate the smooth execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established a Board of Commissioners Secretariat, accountable to the Board of Commissioners to assist in the smooth implementation of their duties. The Secretary to the Board of Commissioners assists the Board in providing advices and in facilitating supervisory functions related to the management of PPI by the Board of Directors and all its staff, as well as carrying out administrative and secretarial tasks related to the activities of the Board of Commissioners.

Legal Basis

The appointment of the Secretary to the Board of Commissioners at PPI is based on the following applicable regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs;
3. Company Articles of Association.

Term of Office of the Secretary to the Board of Commissioners

The term of office of the Secretary to the Board of Commissioners is not specified for a specific period but will end if the Board of Commissioners dismisses the Secretary of the Board of Commissioners and/or if the

mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

person concerned resigns as Secretary to the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary to the Board of Commissioners

Dadang Nurzaman Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners	
Periode Jabatan Term of Office	11 Agustus 2025 - sekarang August 11, 2025 - now
Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Indonesian citizens Usia 41 tahun 41 years old Kelahiran Bandung, 14 April 1985 Born in Bandung, April 14, 1985
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Pendidikan Education	- S1 Manajemen, Universitas Sahid Jakarta (2003) Bachelor's degree of Management, Sahid University Jakarta (2003) - D1 Kebendaharaan, Sekolah Akuntansi Negara (2005) D1 of Treasury, State College of Accountancy (2005)
Riwayat Profesi Professional Experience	- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Analis Keuangan (2019 – 2025) Ministry of State-Owned Enterprises, Financial Analyst (2019 – 2025) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Verifikator Keuangan (2014 – 2019) Ministry of State-Owned Enterprises, Financial Verifier (2014 – 2019)

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, Sekretaris Dewan Komisaris PPI memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, antara lain:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
3. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
5. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
6. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.
7. Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.

Duties and Responsibilities

Based on Board of Commissioners Decree No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, the Secretary of the Board of Commissioners has primary duties and responsibilities, including:

1. Providing information for the needs of the Board of Commissioners for the purpose of decision-making.
2. Preparing necessary materials related to routine reports of the Board of Directors in managing the Company such as RKAP, Annual Reports, Quarterly Reports, Internal Audit Inspection Reports, and other required reports.
3. Preparing materials or content related to matters requiring decisions from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities conducted by the Board of Directors and all its staff.
4. Preparing and coordinating meeting agendas with attendees.
5. Preparing and sending meeting invitations to attendees.
6. Confirming the time, place, attendance, and other necessary aspects for the smooth conduct of meetings.
7. Organizing Board of Commissioners meetings, both internal meetings and with the Board of Directors and their staff, as well as other parties.



- | | |
|--|--|
| <p>8. Membuat risalah rapat atas pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun non-rutin Dewan Komisaris.</p> <p>9. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>10. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.</p> <p>11. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya. b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya. c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait. <p>12. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris maupun komite-komitennya.</p> <p>13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan.</p> <p>14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumen-dokumen yang berada dalam penguasaan atau lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil rapat-rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya. b. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah rapat Dewan Komisaris, baik internal maupun rapat bersama Direksi. c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris. e. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan-bahan/ dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. | <p>8. Documenting meeting minutes for both routine and non-routine Board of Commissioners meetings.</p> <p>9. Distributing meeting minutes to relevant parties.</p> <p>10. Preparing considerations, opinions, recommendations, and other decisions from the Board of Commissioners for Shareholders, the Board of Directors, and related parties regarding Company management.</p> <p>11. Following up on every decision of the Board of Commissioners as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Recording every decision made in decision-making forums and their responsibilities. b. Monitoring and checking the progress stages of implementing meeting decisions/considerations, recommendations, opinions, and other decisions of the Board of Commissioners. c. Encouraging the implementation of follow-up actions from meeting decisions, considerations, opinions, recommendations, and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant responsible parties. <p>12. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, both for the Board of Commissioners' needs and its committees.</p> <p>13. Conducting and coordinating document management and archiving activities.</p> <p>14. Conducting and coordinating data and document security within the scope of the Board of Commissioners' control or work, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Administering meeting results within the Board of Commissioners, both with the Board of Directors and other parties. b. Administering Board of Commissioners meeting minutes, both internal and joint meetings with the Board of Directors. c. Coordinating the scheduling of Board of Commissioners activities to fulfill the required functions and necessities for carrying out those activities. d. Leading, directing, and coordinating the implementation of existing systems and procedures within the Board of Commissioners' work environment. e. Administering documents/materials/reports provided by the Directors to the Board of Commissioners. |
|--|--|

Hak dan Kewenangan

Berdasarkan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Dewan Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Mengingat serta meminta penjelasan dari satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/laporan/dokumen yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
5. Memasuki pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perusahaan.
6. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris.
7. Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsifungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perusahaan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan.
9. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, mengundang Direksi/pejabat-pejabat Perusahaan lainnya (dengan sepengetahuan Direksi), Komite-komite Dewan Komisaris/ pihak-pihak di luar Perusahaan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
10. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Rights and Authorities

Based on the approval and assignment from the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners is delegated the following rights and authorities:

1. Establishing letter and archive systems and procedures within the Board of Commissioners' environment.
2. Reviewing records, meeting minutes of the Board of Directors, Company documents, and reports for the provision of necessary information to the Board of Commissioners.
3. Requesting data/information/explanations needed by the Board of Commissioners from relevant parties within or outside the Company for the performance of the Board of Commissioners' duties.
4. Reminding and requesting explanations from relevant units/parties about delays in providing materials/reports/documents needed by the Board of Commissioners.
5. Accessing the Company's premises and buildings.
6. Representing the Board of Commissioners in dealing with external and/or internal parties according to the assigned tasks and policies set by the Board of Commissioners.
7. Proposing work plans/programs for the Board of Commissioners regarding secretarial functions within the Company.
8. Proposing meeting agendas for Board of Commissioners meetings with parties within or outside the Company.
9. In accordance with the direction of the Board of Commissioners, invite the Board of Directors/ other Company officials (with the knowledge of the Board of Directors), Board of Commissioners Committees/parties outside the Company to attend meetings held by the Board of Commissioners.
10. Attending meetings with parties inside or outside the Company in accordance with policies previously determined by the Board of Commissioners.
11. Using the secretarial facilities of the Board of Commissioners to carry out its duties.



Realisasi Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas pengawasannya dengan baik dan efektif, di antaranya, mengadakan rapat-rapat guna meninjau perkembangan kinerja serta masalah-masalah aktual yang dihadapi PPI.

Sekretaris Dewan Komisaris juga membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi penasehatan, yakni dalam hal penyusunan surat-surat rekomendasi Dewan Komisaris baik yang ditujukan kepada Direksi maupun Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. Surat-surat Dewan Komisaris senantiasa meminta pendapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Komite Audit

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan khususnya terkait proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG serta pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perseroan.

Secara struktural, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan kedudukannya setara dengan komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Dasar Hukum

Komite Audit PPI dibentuk dengan mengacu peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP- 211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;

Implementation of the Secretary of the Board of Commissioners' Work Program in 2025

Throughout 2025, the Secretary of the Board of Commissioners has effectively carried out supervisory tasks, including holding meetings to review PPI's performance progress and current issues faced.

The Secretary of the Board of Commissioners also assists the Board of Commissioners in its advisory function, particularly in drafting recommendation letters from the Board of Commissioners to both the Directors and the Ministry of SOEs as the Shareholder. These letters always seek input from the Audit Committee and the Risk Management Committee.

Audit Committee

Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners tasked with assisting in the implementation of supervisory duties, particularly related to financial reporting processes, internal control systems, audit processes, GCG implementation, and monitoring compliance with applicable laws and regulations in the company.

Structurally, the Audit Committee is directly accountable to the Board of Commissioners and its position is equal to other committees under the Board of Commissioners. However, in carrying out its duties, the Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit (IAU).

Legal Basis

The PPI Audit Committee is established in accordance with the following regulations:

1. Law Number: 19 Year 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law Number: 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number: 45 Year 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Articles of Association of PT PPI;
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises/ Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP- 211/M-PBUMN/1999 concerning the Management Report of State-Owned Enterprises;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;

7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK- 16/S.MBU/2012 concerning the Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Piagam Komite Audit

Komite Audit PPI bekerja mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Piagam Komite Audit, di mana mengatur Dasar Hukum, Visi dan Misi, Pembentukan dan Struktur, Persyaratan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Rapat, Masa Tugas Anggota Komite Audit dan Kode Etik Kerahasiaan.

Audit Committee Charter

The PPI Audit Committee serves in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 dated March 26, 2021 concerning the Audit Committee Charter, which regulates the Legal Basis, Vision and Mission, Establishment and Structure, Membership Requirements, Duties and Responsibilities, Authority, Rights and Obligations, Meetings, Term of Office of Audit Committee Members and Confidentiality Code of Conduct.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Audit dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin

Qualifications and/or Criteria of the Audit Committee

All members of the PPI Audit Committee have met the requirements or qualifications of individuals as members of the Audit Committee with the following general criteria:

1. Having high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and capable of communicating effectively.
2. Having the ability and experience in the field of supervision and/or accounting audit, finance, and understanding risk management.
3. Having knowledge of PPI's business processes.
4. Having sufficient time to carry out their duties.
5. Not being an insider of an External Auditor, Legal Consultant Office, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not being a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control PPI within



atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI.

Periode menjabat anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Saat ini, Komite Audit PPI terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya adalah pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan perseroan.

Composition and Term of Office

The term of office of Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of PPI.

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or the Chairman of the Audit Committee who concurrently hold positions as members of the Board of Commissioners, their term of office is the same as their tenure as members of the Board of Commissioners.

Currently, the PPI Audit Committee consists of 3 (three) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) others who are independent or external parties (non-Commissioners) with backgrounds, experience, and other qualifications required by the company.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Gigih Guntoro	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner	KEP-03/DK/PTPPI/XI/2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners	Ke-1 First
Baban Sudarman	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-02/DK/PTPPI/IX/2024	27 September 2024 s.d. 27 September 2027 September 27, 2024 to September 27, 2027	Ke-1 First
Reinhard Harianja	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020	02 Juni 2020 s.d. 02 Juni 2023 02 Juni 2023 s.d. 02 Juni 2026 - June 02, 2020 to June 02, 2023 - June 02, 2023 to June 02, 2026	Ke-2 Second

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Nama Name	Jabatan Position	Profil Singkat Brief Profile
Gigih Guntoro	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner	Profil Ketua Komite Audit Gigih Guntoro dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan. The profile of the Chairman of the Audit Committee, Gigih Guntoro, is available in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter.

Nama Name	Jabatan Position	Profil Singkat Brief Profile
Baban Sudarman	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Warga negara Indonesia. Usia 60 tahun. Kelahiran Jakarta, 8 Desember 1965. Domisili di DKI Jakarta. Merain gelar Sarjana (S1) Statistika Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko, PT Mandiri Manajemen Investasi (2021 - 2024), <i>Chief Risk Officer (Senior Executive Vice President)</i>, PT Mandiri Manajemen Investasi (2020 - 2021), Anggota Dewan Pengawas, Perkumpulan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) (2020 - 2023), <i>Senior Vice President - Chief Auditor (Group Head)</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, <i>Wholesale and Corporate Center Audit Group (2015-2020)</i>, <i>Vice President - Risk Manager</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Hongkong (2010 - 2014), <i>Vice President - Department Head</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, <i>Market & Operational Risk Group - Trading Risk Dept.</i> (1999 - 2010), <i>Senior Dealer</i>, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Kantor Cabang Paris (1996 - 1999), dan <i>FX Dealer</i>, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Biro Pengelolaan Dana, bagian Bina Dana (<i>Treasury</i>) (1991 - 1996) Indonesian citizens. 60 years old. Born in Jakarta on December 8, 1965. Lives in DKI Jakarta. Earned Bachelor's Degree in Statistics of Bogor Agricultural University. Previously, he was appointed as Director of Risk Management, PT Mandiri Manajemen Investasi (2021 - 2024), Chief Risk Officer (Senior Executive Vice President), PT Mandiri Manajemen Investasi (2020 - 2021), Member of the Supervisory Board, Bank Internal Auditor Association (IAIB) (2020 - 2023), Senior Vice President - Chief Auditor (Group Head), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale and Corporate Center Audit Group (2015-2020), Vice President - Risk Manager, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hong Kong Branch Office (2010 - 2014), Vice President - Department Head, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Market & Operational Risk Group - Trading Risk Dept. (1999 - 2010), Senior Dealer, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Paris Branch Office (1996 - 1999), and FX Dealer, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Fund Management Bureau, Fund Development Department (Treasury) (1991 -1996)
Reinhard Harianja	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Warga negara Indonesia. Usia 62 tahun. Domisili di DKI Jakarta. Kelahiran Tarutung, 12 April 1963. Meraih gelar S2 Manajemen Perbankan Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini juga berprofesi sebagai Asesor Kompetensi Ikatan Bankir Indonesia (April 2023-sekarang), Pengajar Program <i>Branch Manager</i> dan Sespi Bank Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2018-sekarang), dan Anggota Komite Audit PT PPI (2021-Sekarang) Indonesian citizens. 62 years old. Lives in DKI Jakarta. Born in in Tarutung on April 12, 1963. Earned Master of Banking Management, Gadjah Mada University. He is also concurrently serving as Competency Assessor of the Indonesian Bankers Association (April 2023-present), Lecturer of the Branch Manager Program and Sespi Indonesian Banking Development Institute (2018-present), and Member of the PT PPI's Audit Committee (2021-present)

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan

Duties and Responsibilities

The Audit Committee is tasked with and in charge of:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditor and internal auditor's duties;
2. Assessing the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensuring that adequate evaluation procedures exist for all information issued by the Company; and



5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

5. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Hak dan Kewenangan

Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun auditor eksternal Perusahaan.
4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit internal maupun eksternal Perusahaan bilamana diperlukan.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
6. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melaksanakan fungsi audit eksternal.
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Rights and Authorities

The Audit Committee has the authority to:

1. Access documents, data, and information of the Company regarding employees, funds, assets, and corporate resources as needed.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties responsible for internal audit functions, risk management, and Accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Obtain necessary information from the Company's internal and external auditors.
4. Conduct special examinations of the Company's internal and external audit results when necessary.
5. Involve independent parties outside of the Audit Committee members to assist in carrying out its duties (if necessary).
6. Propose to the Board of Commissioners the Public Accounting Firm to be selected to perform external audit functions.
7. Exercise other authorities delegated by the Board of Commissioners based on a mandate letter from the Board of Commissioners.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perseroan, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independence of Audit Committee Members

All members of the PPI Audit Committee are independent parties who do not have financial, managerial, shareholding, and/or familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholders, or relationships with the company. They also do not hold concurrent positions either within or outside the company in accordance with the provisions of laws and regulations.

Aspek Independensi Aspect of Independency	Gigih Guntoro	Maria Andriyani
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee.	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Pada tahun 2025, Komite Audit mengadakan 17 rapat, yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi, dan Remunerasi.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds regular meetings at least once every month. In 2025, the Audit Committee held 17 meetings, attended by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee.

Risalah Rapat Komite Audit
Audit Committee Minutes of Meeting

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (persons)	Komite Audit yang Tidak Hadir dan Alasan Ketidakhadiran Audit Committee Absence and The Reason
22 Januari 2025 January 22, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Desember 2024 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of December 2024	10	Tidak ada None
5 Februari 2025 February 5, 2025	Rapat Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan SPI 4th Quarter 2025 Performance Meeting with SPI	7	Tidak ada None
26 Februari 2025 February 26, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Januari 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of January 2025	10	Tidak ada None
24 Maret 2025 March 24, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Februari 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of February 2025	10	Tidak ada None
17 April 2025 April 17, 2025	Update Progress Audit Laporan Keuangan PT PPI Tahun 2024 PT PPI Financial Statements 2024 Audit Progress Update	12	Tidak ada None
23 April 2025 April 23, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Maret 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of March 2025	10	Tidak ada None
2 Mei 2025 May 2, 2025	Rapat Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan SPI 1st Quarter 2025 Performance Meeting with SPI	8	Tidak ada None
23 Mei 2025 May 23, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja April 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of April 2025	10	Tidak ada None
24 Juni 2025 June 24, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Mei 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of May 2025	10	Tidak ada None
28 Juli 2025 July 28, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Juni 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of June 2025	10	Tidak ada None
29 Juli 2025 July 29, 2025	Rapat Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan SPI 2nd Quarter 2025 Performance Meeting with SPI	7	Tidak ada None
13 Agustus 2025 August 13, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Juli 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of July 2025	10	Tidak ada None



Risalah Rapat Komite Audit
Audit Committee Minutes of Meeting

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (persons)	Komite Audit yang Tidak Hadir dan Alasan Ketidakhadiran Audit Committee Absence and The Reason
18 September 2025 September 18, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Agustus 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of August 2025	10	Tidak ada None
21 Oktober 2025 October 21, 2025	Rapat Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan SPI 3rd Quarter 2025 Performance Meeting with SPI	7	Tidak ada None
18 Oktober 2025 October 21, 2025 18, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja September 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of September 2025	10	Tidak ada None
17 November 2025 November 17, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja Oktober 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of October 2025	10	Tidak ada None
17 Desember 2025 December 17, 2025	Rapat Gabungan Komite dengan BOD-1 Kinerja November 2025 Committee and BOD-1 Joint Meeting for Performance as of November 2025	10	Tidak ada None

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Komite Audit

Audit Committee Attendance Recapitulation and Frequency in the Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran % Attendance
Gigih Guntoro	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of the Audit Committee/ Independent Commissioner	17	17	100%
Baban Sudarman	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	17	13	76,47%
Reinhard Harianja	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	17	7	41,18%
Maria Andriyani	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	17	7	41,18%
Rata-Rata Kehadiran Average Attendance				64,71%

Remunerasi Komite Audit

Besaran honorarium bagi Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Audit Committee Remuneration

The honorarium for Audit Committee members who do not serve as members of the Board of Commissioners amounts to 20% of the salary of the President Director, as stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

1. Kegiatan Rutin Komite Audit, meliputi:
 - a. Membahas dan memberi pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI yang tujuannya agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI, yaitu agar Komite Audit memahami pelaksanaan pekerjaan SPI yang akan dilakukan selama setahun ke depan.
 - b. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.
 - c. Melakukan kegiatan pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP) yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Manajemen, SPI dan KAP.
 - d. Menelaah hasil capaian kinerja Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit dan kontribusi Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kegiatan Non-Rutin Komite Audit, meliputi: Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Audit Tahun 2025

Pada tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup kegiatan rutin berupa pembahasan dan pemberian pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI, yang bertujuan agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI tersebut selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.

Audit Committee Task Implementation Report for the Year 2025

Throughout the year 2025, the Audit Committee has carried out its main tasks as stipulated in the Audit Committee Charter, including:

1. Routine Activities of the Audit Committee, which include:
 - a. Discussing and providing views on the Annual Work Plan of the Internal Audit Unit (SPI) to ensure that the SPI's Annual Work Plan is aligned with the oversight directives from the Board of Commissioners, and as part of the audit function performed by the Audit Committee regarding the tasks of the SPI, to ensure that the Audit Committee understands the implementation of SPI's work for the coming year.
 - b. Reviewing the Results of Internal Audit Examination Reports followed by a Coordination Meeting between the Audit Committee and the SPI.
 - c. Conducting oversight activities on the performance achievements of the external auditors (KAP) followed by a Coordination Meeting between the Audit Committee, Management, SPI, and KAP.
 - d. Reviewing the results of the company's performance achievements followed by an Internal Audit Committee Meeting and the contribution of the Audit Committee in the Internal Board of Commissioners Meeting or Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors.
2. Non-Routine Activities of the Audit Committee, including: Conducting domestic business trips in the context of official duties performed by the Audit Committee from the place of work to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Assessment and Evaluation of the Audit Committee's Performance for the Year 2025

In 2025, the Audit Committee has effectively carried out its tasks in accordance with applicable provisions, including routine activities such as discussing and providing views on the Annual Work Plan of the Internal Audit Unit (SPI), aimed at ensuring that the SPI's Annual Work Plan is aligned with the oversight directives from the Board of Commissioners, and as part of the audit function performed by the Audit Committee regarding the tasks of the SPI.

Throughout 2025, the Audit Committee has also reviewed the Results of Internal Audit Examination Reports, followed by the organization of a Coordination Meeting between the Audit Committee and the SPI.



Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Hingga akhir tahun 2025, tidak ada Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan Suksesi Direksi

Ketentuan dan kriteria seleksi bagi calon anggota Direksi PPI termasuk pengusulan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham secara umum telah dimuat di dalam *Board Manual*. Proses nominasi tersebut dimulai dengan melakukan *assessment* terhadap pejabat satu tingkat di bawah Direksi oleh lembaga independen yang telah direkomendasikan oleh pemegang saham.

Secara umum, Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap proses nominasi calon anggota Direksi PPI melalui pembahasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan *top talent* kepada Kementerian BUMN.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen risiko pada lingkup PPI.

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada setiap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di perseroan.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023

Nomination and Remuneration Functions

As end of 2025, PT Perusahaan Dagang Indonesia has not yet established Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration functions are carried out by the Board of Commissioners.

Director Succession Policy

The provisions and selection criteria for candidates for the PPI Board of Directors, including the nomination of candidates for the Board of Directors to the Shareholders in general, are included in the Board Manual. The nomination process begins with an assessment of officials one level below the Board of Directors by an independent institution recommended by the shareholders.

Generally, the Board of Commissioners reviews the nomination process for candidates for the PPI Board of Directors through discussions held during Board of Commissioners meetings. Subsequently, considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners presents top talent to the Ministry of State-Owned Enterprises.

Risk Management Committee

Risk Management Committee is one of the committees formed by and directly accountable to the Board of Commissioners, and plays a role in supporting the implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners related to the effectiveness of implementing risk management principles and policies within PPI's scope.

The Risk Management Committee is authorized to fully, freely, and without limitation access any company policies related to risk management in the company.

Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Risk Management Committee includes:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Articles of Association of PPI;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

PER-2/MBU/ 03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

Piagam Komite Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko PPI bekerja mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko, di mana mengatur Organisasi, Keanggotaan, Masa Jabatan, Remunerasi dan Kode etik, Peran dan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang, Hak dan Kewajiban, Mekanisme Kerja, Anggaran dan Penilaian Kinerja.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseroan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Charter of the Risk Management Committee

The PPI Risk Oversight Committee serves in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 dated March 26, 2021 concerning the Risk Oversight Committee Charter, which regulates the Organization, Membership, Term of Office, Remuneration and Code of Conduct, Roles and Functions, Duties and Responsibilities and Authorities, Rights and Obligations, Work Mechanisms, Budget and Performance Appraisal.

Qualifications and/or Criteria for the Risk Management Committee

All members of the PPI Risk Management Committee have met the requirements or qualifications as individual members of the Risk Management Committee with the following general criteria:

1. Having high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and good communication skills.
2. Having the ability and experience in the field of supervision and/or accounting audit, finance, and understanding risk management.
3. Having knowledge of PPI's business processes.
4. Having sufficient time to perform their duties.
5. Not being an insider of External Auditors, Legal Consultant Offices, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not being a person with authority and responsibility to plan, lead, or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.



Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Periode menjabat Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Adapun masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan PPI.

Composition and Term of Office

The term of office for the Risk Management Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of PPI. The term of office for members of the Risk Management Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or the Chairman of the Risk Management Committee who concurrently serve as members of the Board of Commissioners, their term of office is the same as their term of office as members of the Board of Commissioners.

The Risk Management Committee shall consist of at least 3 (three) members, of which 1 (one) member is a Commissioner and 2 (two) others are independent or external (non-Commissioner) parties who have the expertise, experience, and other qualifications required by PPI.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Ketua Komite Pemantau Risiko/ Komisaris Chairman of the Risk Oversight Committee/Commissioner	Setiawan Wangsaatmadja	KEP-10/DK/PTPPI/ XII/2021	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners	Ke-1 First
Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	Hertanta	KEP-01/DK/PTPPI/ II/2021	02 Februari 2021 s.d. 02 Februari 2024 February 02, 2021 to February 02, 2024	Ke-2 Second
Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	Eko Setiawan	KEP-01/DK/ PTPPI/V/2023	02 Mei 2023 s.d.02 Mei 2026 May 02, 2023 to May 02, 2026	Ke-1 First

Profil Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Oversight Committee

Nama Name	Jabatan Position	Profil Singkat Brief Profile
Setiawan Wangsaatmadja	Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Chairman of the Risk Oversight Committee/Commissioner	Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Setiawan Wangsaatmadja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan. The profile of the Chairman of the Risk Oversight Committee, Setiawan Wangsaatmadja, is available in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter.

Nama Name	Jabatan Position	Profil Singkat Brief Profile
Hertanta	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	Data Pribadi Personal Data Warga negara Indonesia Indonesian citizens Usia 59 tahun 59 years old Kelahiran Yogyakarta, 19 Januari 1965 Born in Yogyakarta, January 19, 1965 Domisili Domicile DI Yogyakarta Pendidikan Education S2 Keuangan Universitas Padjajaran Master of Finance, Padjajaran University Riwayat Profesi Professional History • Anggota Komite Pemantau Risiko PT PPI (2021 – sekarang) Member of the Risk Oversight Committee of PT PPI (2021 – present) • <i>Senior Management</i> di BTN (2015-2021) Senior Management at BTN (2015-2021) • <i>Kadiv Enterprise Risk Management</i> Head of Enterprise Risk Management Division • <i>Kadiv Commercial Credit Risk</i> Head of Commercial Credit Risk Division • <i>Kadiv Human Capital Strategy</i> Head of Human Capital Strategy Division • Kepala SPI Head of Internal Audit
Eko Setiawan	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	Data Pribadi Personal Data Warga negara Indonesia Indonesian citizens Usia 52 tahun 52 years old Kelahiran Jakarta, 30 April 1972 Born in Jakarta, April 30, 1972 Domisili Domicile Tangerang Selatan South Tangerang Pendidikan Education S2 Hukum Universitas Indonesia Master of Law, University of Indonesia Riwayat Profesi Professional History • Anggota Komite Pemantau Risiko PT PPI (2023-sekarang) Member of the Risk Oversight Committee of PT PPI (2023-present) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Garam (2021-2023) Secretary of the Board of Commissioners of PT Garam (2021-2023) • Dir Komersial PT ASABRI (Persero) (Jan 2020-Maret 2021) Commercial Director of PT ASABRI (Persero) (Jan 2020-March 2021)



Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan, menilai dan meningkatkan struktur, mekanisme, proses dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas tata kelola manajemen risiko (*risk management governance*), termasuk risiko hukum (*legal risk*) perusahaan;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas penerapan proses manajemen risiko oleh perusahaan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kemampuan manajemen risiko perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menemukan hubungan antara risiko yang telah ditetapkan perusahaan;
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan tata kelola manajemen risiko, termasuk risiko hukum dan proses manajemen risiko perusahaan;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai risiko-risiko utama, termasuk risiko hukum yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor unsur ketidakpastian dari risiko berupa adanya berbagai perubahan lingkungan di luar perusahaan yang berdampak kepada perusahaan;
9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko atas usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan dan kegiatan lain perusahaan sebagai bahan analisis dan evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan Direksi tersebut;
10. Membuat laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penugasan;

Selain melaksanakan tugas-tugas di atas, Komite Pemantau Risiko juga menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

The Risk Oversight Committee is assigned with the following responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners in developing, assessing, and improving the structure, mechanisms, processes, and practices of sustainable good corporate governance (GCG);
2. Assisting the Board of Commissioners in assessing risk management governance, including the legal risks of the Company;
3. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the implementation of risk management processes by the Company;
4. Assisting the Board of Commissioners in assessing the Company's risk management capabilities;
5. Assisting the Board of Commissioners in identifying the relationship between the Company's established risks;
6. Providing input to the Board of Commissioners for the improvement and development of risk management governance, including legal risks and the Company's risk management processes;
7. Assisting the Board of Commissioners in assessing key risks, including the legal risks faced by the Company, and ensuring that the Board has taken necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks;
8. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the uncertainty elements of risks arising from various external environmental changes impacting the Company;
9. Assisting the Board of Commissioners in identifying risks related to proposals from the Board of Directors regarding investment cooperation, capital participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, divestment of company assets, and other company activities for analysis and evaluation by the Board of Commissioners to provide recommendations and approval for such proposals from the Board of Directors;
10. Providing reports, both written and oral, to the Board of Commissioners on matters related to the assignment.

In addition to performing the above duties, the Risk Oversight Committee also carries out specific assignments assigned by the Board of Commissioners.

Hak dan Kewenangan

Komite Pemantau Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat Manajemen khususnya fungsi yang menangani Manajemen Risiko, dan Unit-Unit Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris serta atas biaya Perseroan (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Independensi Komite Manajemen Risiko

Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko diharuskan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Untuk itu, masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko telah menyatakan sikap independensinya dalam pakta integritas yang sudah disepakati bersama.

Rights and Authorities

The Risk Oversight Committee has rights and authorities, including:

1. Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee may access records or information about employees, funds, assets, and other resources owned by the Company related to the performance of its duties.
2. In carrying out its authority, the Risk Oversight Committee may collaborate with other Board Committees, relevant teams at the Management level, especially functions handling Risk Management, and Company Units related to following working procedures and in accordance with applicable regulations.
3. The Risk Oversight Committee may engage experts and/or consultants/independent parties to assist in the performance of its duties with the written approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense (if necessary).
4. Carrying out other authorities granted by the Board of Commissioners based on a letter of assignment from the Board of Commissioners.

Independence of Risk Management Committee

Each member of the Risk Management Committee is required to maintain professionalism and independence while carrying out their duties and responsibilities as stipulated in the Risk Management Committee Charter. To that end, each member of the Risk Management Committee has stated their independence in the integrity pact that has been mutually agreed upon.

Pernyataan Independensi Anggota Pemantau Risiko

Declaration of Independence of Risk Oversight Committee Members

Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmadja	Hertanta	Eko Setiawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee.	✓	✓	✓



Pernyataan Independensi Anggota Pemantau Risiko

Declaration of Independence of Risk Oversight Committee Members

Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsantmadja	Hertanta	Eko Setiawan
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓	✓

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Pemantau Risiko selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait perkembangan Perseroan, Komite Pemantau Risiko mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko.

Competency Development Program

To ensure the Risk Oversight Committee remains abreast of developments related to the Company's development, the Risk Oversight Committee participates in competency development programs, including seminars, workshops, and other activities that enhance the Risk Oversight Committee's knowledge and competency.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Risk Management Committee Meeting

The Risk Management Committee holds meetings regularly, at least once a month.

Rapat yang telah dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko di tahun 2025 sebanyak 12 pertemuan adalah sebagai berikut:

The meetings conducted by the Risk Management Committee in 2025 amounted to 12 sessions and are as follows:

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee Minutes of Meeting

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (persons)	Komite Pemantau Risiko yang Tidak Hadir dan Alasan Ketidakhadiran Risk Oversight Committee Absence and The Reason
1.	21 Februari 2025 February 21, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Januari 2025 PPI Key Risk Monitoring as of January 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
2.	24 Maret 2025 March 24, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Februari 2025 PPI Key Risk Monitoring as of February 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
3.	23 April 2025 April 23, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Maret 2025 PPI Key Risk Monitoring as of March 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
4.	22 Mei 2025 May 22, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan April 2025 PPI Key Risk Monitoring as of April 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
5.	23 Juni 2025 June 23, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Mei 2025 PPI Key Risk Monitoring as of May 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
6.	22 Juli 2025 July 22, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Juni 2025 PPI Key Risk Monitoring as of June 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee Minutes of Meeting

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (persons)	Komite Pemantau Risiko yang Tidak Hadir dan Alasan Ketidakhadiran Risk Oversight Committee Absence and The Reason
7.	13 Agustus 2025 August 13, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Juli 2025 PPI Key Risk Monitoring as of July 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
8.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Rapat tematik piutang Thematic Meeting on Receivables	11 orang/persons	Hadir lengkap dengan Dekom dan Komite Audit All Present with BOC and Audit Committee
9.	26 September 2025 September 26, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Agustus 2025 PPI Key Risk Monitoring as of August 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
10.	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan September 2025 PPI Key Risk Monitoring as of September 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
11.	19 November 2025 November 19, 2025	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Oktober 2025 PPI Key Risk Monitoring as of October 2025	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present
12.	28 Januari 2026 January 28, 2026	Monitoring Risiko Utama PPI bulan Nov dan Des 2025 (disatukan karena padat dengan penyusunan RKAP) PPI Key Risk Monitoring as of Nov and Dec 2025 (combined due to tight schedule with RKAP preparation)	7 orang dengan tim Divisi Manajemen Risiko 7 persons with Risk Management Division Team	Hadir lengkap All Present

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee Attendance Recapitulation and Frequency in the Risk Oversight Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran % Attendance
Setiawan Wangsaatmadja	Ketua Komite Pemantau Risiko/ Komisaris Chairman of the Risk Oversight Committee/Commissioner	12	12	100%
Hertanta	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	12	12	100%
Eko Setiawan	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	12	12	100%
Rata-Rata Kehadiran				100%



Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Besaran honorarium bagi Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2025

Kegiatan Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap: bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu: implementasi *Blue Print*/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
2. Melaksanakan kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa rapat internal Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan Monitoring Kegiatan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG berupa pemberian masukan, nasehat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi; dan
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja Perusahaan yang menekankan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2025.

Kegiatan Non-Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Meninjau Ketentuan Internal PT PPI seperti *Standard Procedure Operational* (SOP), Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko melalui Diklat, *Workshop* atau Seminar terkait Implementasi GCG; dan
3. Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Manajemen Risiko dari kedudukan tempat kerja

Risk Oversight Committee Remuneration

The honorarium for members of the Risk Management Committee who do not serve as members of the Board of Commissioners amounts to 20% of the salary of the President Director, as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 concerning the Risk Management Committee Charter of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Report on the Implementation of the Risk Management Committee's Duties in 2025

Routine Activities of the Risk Management Committee include:

1. Assisting the Board of Commissioners in supervising: the implementation of the Blue Print/Long-Term Plan (RJPP), implementation of the Annual Work Plan and Budget (RKAP), internal control system of the company, company risk management, company information technology system, human resources policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), legislation and agreements with third parties;
2. Conducting coordination activities of the Risk Management Committee for the Implementation of its Tasks and Functions in the form of internal meetings of the Risk Management Committee and the Board of Commissioners;
3. Monitoring Company Activities to align with the principles of Good Corporate Governance (GCG) by providing input, advice, recommendations, or suggestions upon request for approval from the Board of Directors; and
4. Conducting performance evaluations of the Company emphasizing the implementation of the Annual Work Plan and Budget or RKAP for 2025.

Non-Routine Activities of the Risk Management Committee include:

1. Reviewing Internal Regulations of PT PPI such as Standard Operational Procedures (SOPs), Implementation Guidelines, and others;
2. Conducting Capacity Building Activities for the Risk Management Committee through Training, Workshops, or Seminars related to GCG Implementation; and
3. Undertaking domestic business trips as part of official duties performed by the Risk Management Committee from their workplace to other

ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi *Blue Print/RJPP*, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan PPI agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Assessment and Evaluation of the Risk Management Committee's Performance in 2025

Throughout 2025, the Risk Management Committee has assisted in the effective implementation of the Board of Commissioners' oversight functions regarding the implementation of the *Blue Print/RJPP*, implementation of the RKAP, internal control system of the company, company risk management, company information technology system, human resources policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), legislation and agreements with third parties, as well as monitoring all PPI activities to consistently align with the principles of GCG.

Organ Pendukung di Bawah Direksi

Supporting Organs Under the Board of Directors

Sekretariat Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang mengatur operasi dan proses tata kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan biasanya berperan sebagai penasihat utama bagi Direksi dan Manajemen Senior dalam hal tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan urusan regulasi.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi vital sebagai penghubung (*liasion*) antara Perseroan dengan pihak eksternal. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Sekretaris Perusahaan wajib menjaga persepsi publik atas citra perusahaan, menjamin pemenuhan tanggung jawab perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan Sekretaris Perusahaan setingkat dengan Kepala Divisi.

Corporate Secretariate

Corporate Secretary is a senior executive who is responsible for ensuring that the Company complies with all legal and regulatory requirements governing its operations and governance processes. Corporate Secretary typically serve as a key advisor to the Board of Directors and Senior Management on matters of corporate governance, compliance, and regulatory affairs.

In addition, the Corporate Secretary also has a vital function as a liaison between the Company and external parties. In relation to this duty, the Corporate Secretary shall maintain public perception of the Company's image, ensure the fulfillment of corporate responsibilities and ensure the Company's compliance with laws and regulations relevant to the Company's line of business.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director. The position of Corporate Secretary is at the same level as the Head of Division.



Dasar Hukum

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada:

- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
- PER-03/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Direksi PT PPI Nomor:14/PERDIR/PPI/V/2024 tentang *Manual Book* Sekretariat Perusahaan PT PPI.
- Peraturan Direksi 05/DU/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI.

Legal Basis

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to:

- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.
- PER-03/MBU/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
- Regulation of the Board of Directors of PT PPI Number: 14/PERDIR/PPI/V/2024 concerning the Manual Book of the Corporate Secretary of PT PPI.
- Regulation of the Board of Directors 05/DU/PERDIR/PPI/II/2023 concerning Guidelines for the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program of PT PPI.

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Sesuai struktur organisasi, Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*) berada di bawah koordinasi Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Organization Structure of the Corporate Secretariat

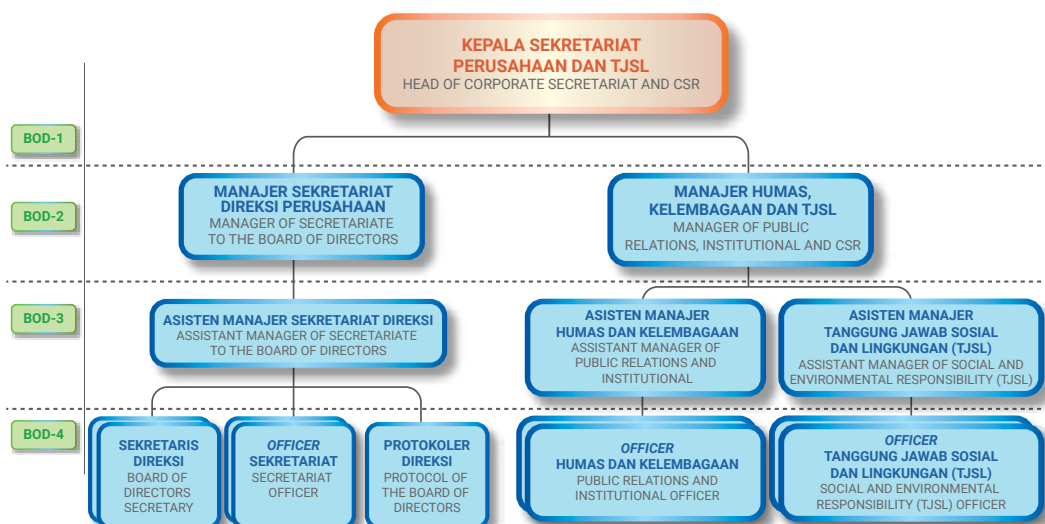
In accordance with the organization structure, the Corporate Secretary is under the coordination of the President Director and directly responsible to the President Director. The appointment of the Corporate Secretary is made by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Berdasarkan struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan membawahi:

1. Humas, Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan;
2. Sekretariat Direksi dan BOD Support.

Based on the organization structure, the Corporate Secretary oversees:

1. Public Relations, Institutional and Social & Environmental Responsibility;
2. Secretary of the Board of Directors and BOD Support.



Humas dan Kelembagaan

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan.

Bagian kehumasan mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Diseminasi informasi internal dan eksternal perusahaan.
2. Meningkatkan citra positif dan penghubung komunitas antar lembaga.
3. *Liaison Officer*.
4. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola bagi Perseroan.
5. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah.
6. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.

Sekretariat Direksi

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Perusahaan.

Bagian Sekretariat Direksi mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya :

1. Mengatur ketertiban administrasi perusahaan.
2. Pemutakhiran dokumen Perseroan dan administrasi perizinan berusaha melalui *system Online Single Submission*.
3. Memastikan terlaksananya agenda rapat rutin Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 25/DU/SKD/PPI/V/2025 tentang Rotasi Pekerja Tetap di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Sekretaris Perusahaan dipercayakan untuk dijabat oleh Ibu Ira Berlianty Aziz.

Public Relations and Institutional Affairs

This department is led by a Department Head who reports directly to the Corporate Secretary.

The Department of Public Relations carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Dissemination of internal and external company information.
2. Enhance positive image and community liaison between institutions.
3. *Liaison Officer*.
4. Provide benefits for economic, social, environmental, as well as legal and governance development for the Company.
5. Contribute to the creation of added value.
6. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent.

Board of Directors Secretariate

This section is led by a Manager who reports directly to the Head of Corporate Secretary.

Secretary of the Board of Directors carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Managing the Company's administrative order.
2. Updating Company documents and business licensing administration through the Online Single Submission system.
3. Ensuring the implementation of the Company's regular meeting agendas.

Corporate Secretary Profile

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Dagang Indonesia (Persero) Number 25/DU/SKD/PPI/V/2025 concerning Permanent Worker Rotation within PT Perusahaan Trade Indonesia, the Corporate Secretary is entrusted to the position of Mrs. Ira Berlianty Aziz.



Ira Berlianty Aziz

Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL
Head of Corporate Secretary and CSR

Periode Jabatan | Term of office:
Menjabat sejak 14 Mei 2025 | Serving since May 14, 2025



Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Indonesian citizens Usia 48 tahun 48 years old Kelahiran Cianjur, 25 April 1977 Born in Cianjur, April 25, 1977
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat Depok, West Java
Pendidikan Education	Akuntansi, Universitas Pakuan Bogor Accounting, Pakuan University Bogor
Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku Valid Professional Certification	1. Sertifikat Kompetensi Public Relations Manager 2. Sertifikasi Kompetensi dalam Skema Public Relations Manager 1. Public Relations Manager Competency Certificate 2. Competency Certification in Public Relations Manager Scheme
Bergabung di PPI Joined at PPI	2021
Riwayat Profesi Professional Experience	2023 - 2024: Kepala Divisi Manajemen Perubahan, Mutu, dan Sistem Tata Kerja 2024 - 2025: Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Transformasi 2025 : Plt. Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL 2025 - sekarang: Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL 2023 - 2024: Head of Change Management, Quality and Work System Division 2024 - 2025: Head of Business Development and Transformation Division 2025 : Plt. Head of Company Secretariat and TJSL 2025 - present: Head of Company Secretariat and TJSL

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekretariat Perusahaan

Kepala Sekretariat Perusahaan mengemban tugas pokok yang berkaitan dengan jalannya kesekretariatan perusahaan dan administrasi serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan, promosi dan kemitraan perusahaan.

Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk:

1. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan divisinya.
2. Membuat rencana program TJSL.
3. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
4. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
5. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
6. Memastikan Perseroan mematuhi ketentuan tentang keterbukaan dan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
7. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
8. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perseroan serta peng-administrasiannya.
9. Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan komersil dan non-komersil.
10. Menyelenggarakan database dan penyimpanan dokumen perusahaan.
11. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholder*.

Duties and Responsibilities of the Head of Corporate Secretariate

The Head of Corporate Secretary is tasked with responsibilities related to the Company's secretarial and administrative functions, as well as other activities associated with community engagement, corporate promotion, and partnerships.

In general, the Corporate Secretary is responsible for:

1. Creating the division's annual work plan and budget.
2. Developing the Corporate Social Responsibility (CSR) program plan.
3. Periodically creating and updating the Special List.
4. Periodically creating and updating the Shareholder List.
5. Overseeing the organization of General Meetings of Shareholders (GMS).
6. Ensuring the Company complies with regulations regarding disclosure and information transparency in the Annual Report.
7. Conducting meetings within the Directorate environment, both routine and non-routine.
8. Organizing secretarial activities within the Board of Directors and the Company, including their administration.
9. Coordinating the processing of commercial and non-commercial business permits.
10. Managing the Company's database and document storage.
11. Establishing mutually beneficial partnerships with various stakeholders.

12. Mengkoordinasikan proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
13. Mengkomunikasikan kebijakan Perseroan dan/atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
14. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi.
15. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi termasuk menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
16. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
17. Melakukan update website Perseroan.
18. Membina hubungan baik dengan media massa.
19. Melaksanakan kegiatan sponsorship perusahaan.

12. Coordinating the development process of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), Management Reports, and Annual Reports.
13. Communicating corporate and/or government policies to internal and external parties.
14. Coordinating report materials for the Board of Directors' Meetings.
15. Ensuring the smooth execution of the Board of Directors agendas, including attending the Board of Directors Meetings and drafting the Board of Directors Meeting Minutes.
16. Conducting corporate secretarial activities.
17. Updating the Company's website.
18. Maintaining good relations with the mass media.
19. Implementing corporate sponsorship activities.

Hak dan Kewenangan

Sekretaris Perusahaan memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perseroan.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh *person in charge*.
4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perseroan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perseroan dan atau di dalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perseroan.

Rights and Authorities

The Corporate Secretary has the rights and authority to:

1. Establish systems and procedures for correspondence and archiving within the Board of Directors and the Company.
2. Access records, meeting minutes, company documents, and reports to provide necessary information to the DirectorateBoard of Directors.
3. Request a progress report on the implementation of the Board of Directors' decisions carried out by the person in charge.
4. Request data/information/explanations needed by the Board of Directors from relevant parties within and outside the Company for the purpose of carrying out the Board of Directors' duties.
5. Improve and request explanations from responsible parties within the Company experiencing delays in the implementation process of the Board of Directors' decisions.
6. Remind and request explanations from departments/related parties for delays in providing materials/information/data required by the Board of Directors.
7. Represent the Board of Directors in dealings with parties outside the Company and/or within the Company as assigned and according to established policies.
8. Propose meeting agendas with parties within/ outside the Company.



9. Menghadiri rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

9. Attend meetings with parties within/outside the Company according to previously established policies.
10. Utilize secretarial facilities to perform its duties.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Training and Competency Development Programs for the Corporate Secretary

A complete description of the list of competency training and development programs participated in by the Corporate Secretary in 2025 is available in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Di sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Corporate Secretary Duties in 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary has conducted several activities as follows:

Bidang Kesekretariatan

1. Mengkoordinir pembuatan laporan triwulan, semester dan tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT PPI;
2. Pemutakhiran pedoman tata naskah dinas perusahaan. Telah terbit Peraturan Direksi Nomor: 13/PERDIR/PPI/IV/2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tanggal 30 April 2025.
3. Mengkoordinir pelaporan dan sosialisasi pengisian LHKPN bersama dengan Divisi Pengembangan SDM dan Umum;
4. Supporting tim bisnis di kantor pusat dan kantor cabang dalam hal pengurusan sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sertifikat *Cold Chain Product* (CPP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Sertifikat Standar dan lain sebagainya melalui sistem OSS-RBA;
5. Berkoordinasi dengan Kepala Divisi terkait dan notaris dalam pembuatan Berita Acara RUPS RKAP PT PPI Tahun 2025 dan RUPS Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024;
6. Penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Kepala Divisi dan RUPS Perusahaan selama tahun 2025;
7. Pengelolaan arsip perusahaan dilaksanakan secara lebih terstruktur melalui penyempurnaan penataan ruang arsip fisik serta penguatan sistem pengelolaan arsip digital. Pada tahun ini, Sekretariat Perusahaan dan TJSL dengan dukungan Divisi TI

Secretarial Aspect

1. Coordinate the preparation of quarterly, semester and annual reports of PT Perusahaan Dagang Indonesia/PT PPI to the Board of Commissioners and Shareholders of PT PPI;
2. Updating company official document management guidelines. Directors' Regulation Number: 13/PERDIR/PPI/IV/2025 concerning Guidelines for the Administration of Official Documents at Indonesian Trading Company dated 30 April 2025 has been issued.
3. Coordinate reporting and socialization of LHKPN filling together with the Human Resources and General Development Division;
4. Supporting the business team at the head office and branch offices in arranging Good Medicine Distribution Method (CDOB) certificates, Cold Chain Product (CPP) certificates, Warehouse Registration Certificates (TDG), Standard Certificates and so on through the OSS-RBA system;
5. Coordinate with the Head of the relevant Division and the notary in preparing the Minutes of the 2025 PT PPI RKAP GMS and the 2024 PT PPI Annual GMS Report.
6. Organizing Directors' Meetings, Joint Meetings of Directors and Board of Commissioners, Coordination Meetings of Division Heads and Company GMS during 2025;
7. Management of company archives is carried out in a more structured manner by improving the spatial arrangement of physical archives and strengthening the digital archive management system. This year, the Company Secretariat and

dan ERP mulai mengembangkan aplikasi DARA (*Digital Archive and Record Administration*).

TJSL with the support of the IT and ERP Division began developing the DARA (*Digital Archive and Record Administration*) application.

Bidang Humas, Kelembagaan dan TJSL

1. Monitoring media, kebijakan – kebijakan *stakeholder* melalui media elektronik dan media cetak, serta memberikan laporan *monitoring* kepada Direksi, Kepala Divisi, dan/atau *Branch Manager* setiap hari melalui WAG (*Whatsapp Group*);
2. Diseminasi informasi perusahaan melalui program agenda *setting* yang mencakup *corporate action*, *corporate issue*, serta *CSR action* yang disampaikan melalui berbagai kanal media oleh tim Satuan Komunikasi Bersama (SKB) Kementerian BUMN. Sepanjang tahun 2025, perusahaan menargetkan penerbitan sebanyak 23 judul rilis pemberitaan untuk media massa;
3. Telah diterbitkan dokumen *Annual Report* dan *Sustainability Report 2024* yang dapat diunduh pada link *website* <https://www.ptppi.co.id/investor-relations/company-performance> ;
4. Sepanjang tahun 2025 hingga bulan Agustus, PPI berpartisipasi aktif dalam program Social Media Ranger (SMR) Kementerian BUMN. Hingga periode tersebut, tercatat sebanyak 21 SMR PPI yang tersebar di kantor pusat dan cabang. Selain itu, PPI secara rutin mengikutsertakan *In-Change* BUMN, yaitu *influencer internal* dari PPI yang memproduksi dan membagikan konten melalui akun media sosial pribadi, dengan jumlah sebanyak 3 orang. Program ini dihentikan pada Agustus 2025;
5. PPI mendapatkan 3 penghargaan eksternal sampai dengan Desember 2025, yaitu Anugerah BUMN 2025 (BUMN Track) untuk *Best Corporate for Product Portofolio Development*, Infobank Isentia Digital Brand Awards ke 14 Tahun 2025 (Infobank) untuk *The 2nd Best SOE Sub Holding - Asset Rp2,5-5 Triliun*, Distributor Award 2024 (PT Bio Farma) untuk *Highest Sales Growth and Achievement*. Selanjutnya 3 penghargaan internal yaitu *Company Culture Award 2024* (ID FOOD), Juara 2 *Best Culture Leader*, Juara 2 *Best Culture Booster*, dan Juara 2 *Best Culture Squad*;
6. Pemeliharaan dan penyempurnaan desain *user interface* (UI), *user experience* (UX), serta konten *website* korporasi oleh tim Humas dan Kelembagaan secara internal sebagai upaya menjaga konsistensi citra dan meningkatkan *brand awareness* perusahaan;
7. Buletin internal – PPINews, merupakan wadah informasi terdokumentasi agenda-agenda

Public Relations, Institutional and TJSL Aspect

1. Monitoring media, stakeholder policies through electronic media and print media, as well as providing monitoring reports to the Board of Directors, Division Heads, and/or Branch Managers every day via WAG (*Whatsapp Group*);
2. Dissemination of company information through an agenda setting program which includes corporate actions, corporate issues, and CSR actions delivered through various media channels by the Joint Communication Unit (SKB) team of the Ministry of BUMN. Throughout 2025, the company targets publishing 23 news releases for mass media;
3. The 2024 Annual Report and Sustainability Report documents have been published which can be downloaded at the website link <https://www.ptppi.co.id/investor-relations/company-performance>;
4. Throughout 2025 until August, PPI actively participates in the Ministry of BUMN's Social Media Ranger (SMR) program. Until that period, there were 21 PPI SMRs spread across the head office and branches. Apart from that, PPI routinely includes *In-Change* BUMN, namely internal influencers from PPI who produce and share content via personal social media accounts, with a total of 3 people. This program is discontinued in August 2025;
5. PPI received 3 external awards until December 2025, namely Anugerah BUMN 2025 (BUMN Track) for Best Corporate for Product Portfolio Development, 14th Infobank Isentia Digital Brand Awards 2025 (Infobank) for The 2nd Best SOE Sub Holding - Assets Rp2.5-5 Trillion, Distributor Award 2024 (PT Bio Farma) for Highest Sales Growth and Achievement. Furthermore, there were 3 internal awards, namely Company Culture Award 2024 (ID FOOD), 2nd place Best Culture Leader, 2nd place Best Culture Booster, and 2nd place Best Culture Squad;
6. Maintaining and improving the design of the user interface (UI), user experience (UX), and corporate website content by the PR and Institutional teams internally as an effort to maintain image consistency and increase the company's brand awareness;
7. Internal bulletin - PPINews, is a forum for documented information on company agendas



perusahaan dan/atau feeding informasi serta arahan BOD dan/atau BOC serta pemangku kepentingan lainnya yang terbit setiap bulan di rentang tanggal 25-31. Sampai dengan akhir Desember 2025 telah terbit sebanyak 12 edisi [MI1] PPINews yang diterbitkan setiap tanggal 25 setiap bulan;

8. Laporan pelaksanaan TJSL selama tahun 2025 melalui portal TJSL Kementerian BUMN telah dilaksanakan mulai dari Laporan RKA, Laporan Audited Tahun 2024, Laporan TJSL Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Prognosa Tahun Berjalan, dan Triwulan IV (Tahunan *Unaudited*) dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu.

and/or feeding information as well as directions from the BOD and/or BOC and other stakeholders which is published every month between 25-31. Until the end of December 2025, 12 editions of [MI1] PPINews have been published every 25th of every month;

8. Reports on the implementation of TJSL for 2025 through the Ministry of BUMN's TJSL portal have been implemented starting from the RKA Report, Audited Report for 2024, TJSL Report for Quarter I, Quarter II, Quarter III, Prognosis for the Current Year, and Quarter IV (Annual Unaudited) reported completely and on time.

Akses Data dan Informasi Perusahaan

Pengelolaan informasi korporasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dilakukan secara profesional di bawah pengawasan Sekretaris Perusahaan guna mencegah terjadinya misleading information yang dapat berdampak negatif bagi citra perusahaan. Dalam hal ini, PPI membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan keterbukaan informasi dalam batasan yang diatur oleh perundang-undangan dan kebijakan internal perseroan.

Situs Web PPI

PPI telah menyediakan kanal informasi melalui situs web www.ptppi.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan investor. PPI mengoptimalkan pemanfaatan situs web tersebut sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal yang memuat berbagai informasi umum mengenai Perseroan, seperti Profil Perusahaan, Struktur Organisasi, Laporan Keuangan, dan informasi korporasi lainnya. Seluruh informasi tersebut disajikan secara faktual, serta ditinjau dan diperbaharui secara berkala relevansinya untuk meningkatkan kualitas distribusi informasi PPI. Sementara untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai PPI, publik ataupun investor dapat mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi ataupun mengunjungi kantor pusat secara langsung yang beralamat di:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160
Tel : +6221 3862141
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id

Media Lainnya

Selain mengkomunikasikan kebijakan dan informasi penting melalui situs web, penyebaran informasi

Access to Company Data and Information

The management of corporate information at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) is carried out professionally under the supervision of the Corporate Secretary to prevent the dissemination of misleading information that could negatively impact the Company's reputation. In this regard, PPI provides access to information as widely as possible to the public while still adhering to confidentiality requirements and information transparency within the limits set by laws and internal company policies.

PPI Website

PPI has provided an information channel through the website www.ptppi.co.id, which can be easily accessed by the public and investors. PPI optimizes the use of this website as a communication medium with external parties containing various general information about the Company, such as Company Profile, Organizational Structure, Financial Statements, and other corporate information. All such information is presented factually and is regularly reviewed and updated for relevance to enhance the quality of PPI's information distribution. For more comprehensive information about PPI, the public or investors can submit written requests addressed to the Board of Directors or visit the headquarters directly at:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160
TelPhone: +6221 3862141
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id

Other Media

In addition to communicating policies and important information through the website, the dissemination of

Perseroan juga dilakukan melalui buletin PPI, *press release*, media sosial, dan papan-papan pengumuman yang terdapat di lingkungan Perseroan. Selain itu, PPI juga mengadakan pertemuan (*gathering*) bersama *stakeholders* yang diselenggarakan secara berkala.

Company information is also carried out through PPI bulletins, press releases, social media, and notice boards located within the Company premises. Furthermore, PPI also holds gatherings with stakeholders regularly.

Siaran Pers Tahun 2025

Penyebarluasan informasi Perseroan kepada publik salah satunya dilakukan melalui siaran pers. Selama tahun 2025, siaran pers yang telah diterbitkan Perseroan, antara lain:

Press Releases in 2025

The dissemination of Company information to the public is done through press releases. Throughout 2025, press releases issued by the Company, including:

No.	Tanggal Rilis Release Date	Headline
1.	1/16/2025	PT PPI Ekspor 15 MT Gum Damar ke India PT PPI Exports 15 MT of Gum Damar to India
2.	1/24/2025	Dukung Ketahanan Pangan, PT PPI Distribusikan Pupuk Subsidi Supporting Food Security, PT PPI Distributes Subsidized Fertilizer
3.	2/18/2025	PT PPI Latih 165 UMKM untuk Tembus Pasar Ekspor PT PPI Trains 165 MSMEs to Penetrate Export Markets
4.	2/20/2025	Perkuat Pasar di Timur Tengah, PT PPI Kembali Ekspor 79,2 MT Kopi ke Mesir Strengthening the Market in the Middle East, PT PPI Returns to Exporting 79.2 MT of Coffee to Egypt
5.	2/24/2025	Jelang Ramadan, PPI Bersama Pemerintah Gelar Operasi Pasar di Berbagai Titik Ahead of Ramadan, PPI and the Government are holding market operations at various points
6.	3/8/2025	Pastikan Harga Sesuai HET, PT PPI Bersama Menteri Pertanian Tinjau Operasi Pasar di Jakarta Timur Ensure Prices Match HET, PT PPI Together with Minister of Agriculture Review Market Operations in East Jakarta
7.	3/10/2025	Operasi Pasar di Semarang, PT PPI Siapkan Daging Kerbau Rp75.000/kg Market Operations in Semarang, PT PPI Prepares Buffalo Meat Rp75,000/kg
8.	3/25/2025	Perkuat Pasar Kopi, PT PPI Ekspor 79,2 MT Kopi ke Mesir Strengthening the Coffee Market, PT PPI Exports 79.2 MT of Coffee to Egypt
9.	3/27/2025	PT PPI bersama ID Food Berangkatkan 214 Pemudik Program Mudik Gratis BUMN PT PPI collaborates with ID Food Depart 214 Homecomers from the BUMN Free Homecoming Program
10.	4/24/2025	Perluas Pasar Asia Selatan, PT PPI Kembali Ekspor 15 MT Gum Damar ke India Expanding the South Asian Market, PT PPI Returns to Exporting 15 MT of Gum Damar to India
11.	4/29/2025	PT PPI Ekspor 80 MT Damar Batu ke India PT PPI Exports 80 MT of Damar Batu to India
12.	5/5/2025	Konsisten Laksanakan Upaya Pengamanan Aset, PT Kembali Kuasai Aset Tetap Rumah Dinas di Surabaya Consistently Implementing Efforts to Secure Assets, PT PPI Returns to Control of Fixed Assets at Official Homes in Surabaya
13.	6/25/2025	Dukung Pertanian Berkelanjutan, PT PPI Edukasi Petani Lewat Program TEMANI di Pacitan Supporting Sustainable Agriculture, PT PPI Educates Farmers Through the TEMANI Program in Pacitan
14.	7/8/2025	Berdayakan Perekonomian Masyarakat, PT PPI Beri Bantuan 9.000 Bibit Lele di Kulon Progo To Boost the Local Economy, PT PPI Donates 9,000 Catfish Fry in Kulon Progo
15.	7/10/2025	Tingkatkan Ekspor, PT PPI Kirim 79,2 MT Kopi Robusta ke Mesir To Increase Exports, PT PPI Sends 79.2 MT of Robusta Coffee to Egypt
16.	7/11/2025	Dorong Peningkatan Komoditas Nasional, PT PPI Ekspor 32 MT Damar Batu ke India Encouraging National Commodity Improvement, PT PPI Exports 32 MT of Batu Damar to India



No.	Tanggal Rilis Release Date	Headline
17.	7/21/2025	PT PPI Sediakan Komoditas Pangan dan Produk Pertanian untuk Koperasi Desa Merah Putih PT PPI Provides Food Commodities and Agricultural Products for the Red and White Village Cooperative
18.	8/12/2025	Sambut Hari Kemerdekaan, PPI dan ID FOOD Gelar Bazar Pangan di 80 Titik To Celebrate Independence Day, PPI and ID FOOD Hold Food Bazaars at 80 Locations
19.	9/27/2025	PPI Perkuat Kolaborasi Bersama Petani melalui Program TEMANI di Makassar dan Surabaya PPI Strengthens Collaboration with Farmers through the TEMANI Program in Makassar and Surabaya
20.	9/27/2025	Tingkatkan Usaha Mitra, PT PPI Salurkan Bantuan Sarana Kios Dharmabrand di Makassar To Boost Partner Businesses, PT PPI Distributes Dharmabrand Kiosk Equipment in Makassar
21.	10/6/2025	PT PPI Ekspor 131,28 MT Kopi Robusta ke Mesir PT PPI Exports 131.28 MT of Robusta Coffee to Egypt
21.	10/15/2025	PT PPI Tanda Tangan Dua MoU Strategis di Trade Expo Indonesia 2025 PT PPI Signs Two Strategic MoUs at Trade Expo Indonesia 2025
22.	12/13/2025	PT PPI Salurkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian di Padang PT PPI Distributes Agricultural Facilities and Infrastructure Assistance in Padang

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

PPI memiliki organ Satuan Pengawas Intern (SPI) yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap unit-unit kerja lainnya. SPI menjalankan fungsi pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, sistem manajemen dan tata kelola Perusahaan.

Dasar Hukum

Keberadaan, pembentukan, dan komposisi SPI di Perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi lainnya berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan-Perseroan (Persero);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang *Internal Audit Charter* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Internal Audit Unit (IAU)

PPI has an Internal Audit Unit (SPI) which structurally reports directly to the Chief Executive Officer and operates independently from other units. SPI performs assurance and consulting functions independently and objectively to management in order to enhance the quality of risk management processes, internal controls, management systems, and corporate governance.

Legal Basis

The establishment, formation, and composition of SPI in the Company refer to the following laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero);
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and
4. Decree of the Board of Directors Number: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 dated February 28, 2024, concerning the Internal Audit Charter of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Kedudukan SPI dalam Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, SPI merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, sehingga Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun pada praktiknya, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Audit Charter*.

Position of SPI in the Organizational Structure

In terms of organizational structure, IAU is a functional unit that operates under the direct supervision of the President Director, with the Head of IAU reporting directly to the President Director. However, in practice, IAU also coordinates with the Audit Committee in carrying out its duties as outlined in the Board Manual and Audit Charter.



Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Flow of Appointment and Dismissal of the Head of IAU

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners with due consideration of a recommendation from the Audit Committee.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 39/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Kepala Satuan Pengawasan Intern dipercayakan untuk dijabat oleh Cahyadi.

Head of Internal Audit Unit Profile

Pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 39/DU/SKD/PPI/VIII/2024, dated August 30, 2024, Cahyadi is appointed as the Head of Internal Audit Unit.



Cahyadi

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Periode Jabatan | Term of office:
Menjabat sejak 30 Agustus 2024 | Serving since August 30, 2024

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Indonesian citizens Usia 42 tahun 42 years old Kelahiran 18 Mei 1983 Born in May 18, 1983
Domisili Domicile	Jl. H. Shibi 2 Kav. Belimbing, RT. 06 RW. 02 No.37 Srengseng Sawah Jakarta Selatan DKI Jakarta
Pendidikan Education	Strata 1 Akuntansi, 2007 Universitas Pancasila Bachelor's degree in Accounting, 2007 Pancasila University



Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku - *Certified Risk Professional (CRP)*
- *Certified Fraud Examiner (CFE)*
Valid Professional Certification - *Professional Internal Auditor*

Bergabung di PPI 18 Januari 2021 | January 18, 2021
Joined at PPI

Riwayat Profesi | Professional Experience

Nomor Keputusan Direksi Board of Directors Decree Number	Posisi Position	Periode Period
125/DKSU/Int.K/PPI/XII/2020	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	18 Januari 2021 – 17 Juli 2021 January 18, 2021 – July 17, 2021
11/DU/SKD/PPI/VII/2021	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	19 Juli 2021 – 1 Agustus 2021 July 19, 2021 – August 1, 2021
14/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	2 Agustus 2021 – 13 Desember 2021 August 2, 2021 – December 13, 2021
52/DU/SKD/PPI/XII/2021	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	14 Desember 2021 – 5 Maret 2023 December 14, 2021 – March 5, 2023
19/DU/SKD/PPI/III/2023	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	6 Maret 2023 – 1 September 2024 March 6, 2023 – September 1, 2024
39/DU/SKD/PPI/VIII/2024	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	2 September 2024 – Sekarang September 2, 2024 - Present

Keanggotaan Personil SPI

Kecukupan jumlah auditor internal atau personil SPI yang profesional dan memiliki kompetensi andal sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. Penentuan jumlah dan komposisi auditor perseroan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan ideal organisasi SPI dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga auditor.

Per 31 Desember 2025, jumlah auditor internal perseroan tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas Pengawasan Intern meliputi seluruh unit kerja PT PPI dan Anak Perusahaan sesuai Tata Kelola yang berlaku untuk menilai kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan dalam rangka membantu Perusahaan mencapai Visi, Misi, dan tujuannya.

Sertifikasi Personil SPI

SPI menyusun rencana kerja pengembangan profesi secara berkelanjutan baik dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal ataupun sebagai wujud implementasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi auditor yang merupakan bagian dari kegiatan rutin SPI sebagaimana tertuang di dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Membership of SPI Personnel

Sufficient numbers of internal auditors or SPI personnel who are professional and have reliable competence are highly needed to assist in the implementation of SPI functions and tasks. Determining the number and composition of company auditors always considers the ideal needs of the SPI organization, taking into account the auditor workforce requirements.

As of December 31, 2025, the number of company internal auditors recorded 10 (ten) individuals, including the Head of Internal Audit Unit, responsible for carrying out Internal Audit activities covering all work units of PT PPI and Subsidiaries in accordance with the applicable Governance to assess the adequacy of the quality of internal control, risk management, and Corporate Governance processes to support the Company achieve its Vision, Mission, and objectives.

Certification of SPI Personnel

SPI develops a continuous professional development work plan both to obtain relevant professional certifications in the field of internal auditing and as an implementation of capacity development programs for auditors, which is part of SPI's routine activities as outlined in the Annual Audit Work Program (PKPT).

Pada akhir 2025, SPI memiliki sejumlah sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal perseroan, antara lain:

At the end of 2025, SPI holds several relevant certifications to support the implementation of its duties and responsibilities as the company's internal auditors, including:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Cahyadi	Kepala Divisi Head of Division	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE) 3. <i>Professional Internal Auditor</i>
David Nicholson	<i>Manager Assurance 1</i> Assurance Manager 1	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Chartered Accountant</i> (CA)
Daeng Achmad Ardiansyah	<i>Manager Consulting</i> Consulting Manager	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Certified Risk Management Officer</i> (CRMO)
Dedy Alamsyah	Fungsional Madya Intermediate Functional	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Certified Cyber Security Associate</i> (CCSA) 3. <i>Certified Ethical Hacker</i> (CEH) 4. <i>Computer Hacking Forensic Investigator</i> (CHFI) 5. <i>Ec-Council Certified Incident Handler</i> (ECIH) 6. <i>PMI Project Management Ready</i> (PMI PM Ready)
Dian Auliawati Purnama	Asisten <i>Manager Assurance 1</i> Assurance Assistant Manager 1	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)
R. Aditya Indra Pratama	Asisten <i>Manager Assurance 2</i> Assurance Assistant Manager 2	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)
Bani Gusti Pradini	<i>Officer</i>	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)

Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas dan tanggung jawab SPI, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern sesuai dengan Standar Profesional Pengawasan Intern dan Kode Etik Pengawasan Intern;
2. Melakukan penyusunan dan pengkajian *Internal Audit Charter* secara periodik;
3. Melakukan penyusunan rencana pengawasan tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
4. Merancang mekanisme penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) termasuk jadwal dan mekanisme pembahasan dengan Anak Perusahaan yang selaras dengan penyusunan RKAP;
5. Memastikan pelaksanaan Pengawasan Intern sesuai dengan rencana;
6. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan Proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
7. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
8. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;

Duties and Responsibilities

The scope of duties and responsibilities of IAU, among others, is as follows:

1. Ensure the implementation of the Internal Audit function in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Conduct;
2. Conduct periodic preparation and review of the Internal Audit Charter;
3. Conduct preparation of the annual audit plan and budget allocation for the implementation of the Internal Audit function;
4. Develop a mechanism for preparing the Annual Audit Work Program (PKPT), including the schedule and mechanism for discussion with Subsidiaries that align with the preparation of the RKAP;
5. Ensure the implementation of the Internal Audit runs according to the plan;
6. Evaluate the effectiveness of the implementation of Internal Control, Risk Management and Corporate Governance Process, in accordance with laws and regulations and Company policies;
7. Examine and assess the efficiency and effectiveness in the fields of finance, commercial, operations, human capital, information technology, and other activities;
8. Provide consultation and assurance regarding strategic matters both during planning and during the implementation of operational activities;



9. Melaporkan temuan signifikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu cepat;
 10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
 12. Sebagai SPI PT PPI Induk Perusahaan:
 - a. Menentukan strategi pelaksanaan Pengawasan Intern Anak Perusahaan yang belum mempunyai Unit Satuan Pengawasan Intern;
 - b. Merumuskan prinsip Pengawasan Intern yang mencakup metodologi pemeriksaan dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 - c. Memantau pelaksanaan Pengawasan Intern pada masing-masing Anak Perusahaan.
 13. Memantau pelaksanaan Pengawasan Intern pada masing-masing Anak Perusahaan dalam kelompok usaha Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, SPI melakukan antara lain:
 - a. Monitoring dan evaluasi rencana atau kebijakan Pengawasan Intern Anak Perusahaan dalam PPI Group dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Induk Perusahaan;
 - b. Evaluasi (pengukuran kinerja audit dan pengelolaan risiko) pelaksanaan PKPT oleh unit Pengawasan Intern Anak Perusahaan beserta tindak lanjutnya.
 14. Melaksanakan pengawasan:
 - a. Kepada Anak Perusahaan yang tidak mempunyai SPI;
 - b. Melakukan audit bersama (*joint audit*) dengan SPI Anak Perusahaan;
 - c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari SPI Anak Perusahaan.
 15. SPI melaporkan hasil monitoring dan evaluasi PKPT di lingkungan PPI Group kepada Direksi PT PPI setiap tiga bulan dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi bahan rapat Direksi dan/atau bahan *Business Review* bersama Direksi Anak Perusahaan;
 16. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan, seminar, sertifikasi dan aktivitas pengembangan kompetensi lainnya yang sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan;
 17. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Pengawasan Intern:
 - a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
9. Report significant findings in accordance with applicable mechanisms to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee for immediate corrective action;
 10. Monitor corrective actions on significant findings;
 11. Report the follow-up monitoring of improvements to significant findings to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee;
 12. As IAU of PT PPI Parent Company:
 - a. Determine the strategy for implementing Internal Audit of Subsidiaries with no Internal Audit Unit;
 - b. Formulate Internal Audit principles that include inspection methodology and Implementation steps for quality control; and
 - c. Monitor the implementation of Internal Audit in each Subsidiary.
 13. Monitor the implementation of Internal Audit in each Subsidiary in the Company's business group. In its practice, IAU carries out, among others:
 - a. Monitoring and evaluating the Internal Audit plan or policy of the Subsidiary in the PPI Group to align with the policies established by the Parent Company;
 - b. Evaluation (measurement of audit performance and risk management) of the PKPT implementation by the Subsidiary's Internal Audit unit, with its follow-up.
 14. Conduct Supervision:
 - a. To Subsidiaries with no Internal Audit Unit;
 - b. Conduct joint audits with the Subsidiary's IAU;
 - c. Based on the supervision report from the Subsidiary's IAU.
 15. IAU reports the results of monitoring and evaluation of PKPT within the PPI Group to the Board of Directors of PT PPI every three months and/or as required, which serves as the material for the Board of Directors meeting and/or material for Business Review with the Board of Directors of Subsidiaries;
 16. Ensure that IAU members participate in continuous professional development as well as training, seminars, certification and other competency development activities in accordance with the development of the complexity and business activities of the Company;
 17. Ensure that in the event of the use of external party services for Internal Audit activities:
 - a. Ensure knowledge transfer from external parties to IAU members, given that the engagement of external experts is temporary;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI; dan c. Pihak eksternal mematuhi <i>Internal Audit Charter</i> Perusahaan; <p>18. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;</p> <p>19. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat yang lamanya sesuai sebagaimana disepakati pada dokumen <i>non-disclosure agreement</i> (NDA) atau peraturan yang berlaku.</p> | <ul style="list-style-type: none"> b. The use of external party services does not affect the independence and objectivity of the IAU function; and c. External parties comply with the Company's Internal Audit Charter; <p>18. Maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of Internal Audit duties and responsibilities unless permitted by laws and regulations and/or court decisions;</p> <p>19. Maintain confidential information obtained during their term, for a period as agreed in the non-disclosure agreement (NDA) document or applicable regulations.</p> |
|---|--|

Hak dan Kewenangan

SPI PT PPI memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SPI;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
3. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal;
5. Melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SPI.

Independensi, Objektivitas, Kecakapan dan Profesionalisme

Pengawas Intern harus independen, objektif, cakap dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Untuk lebih terlaksananya independensi Pengawas Intern, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.

1. Independensi

Pengawas Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Pengawasan Intern dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Kepala SPI bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran kegiatan pengawasan serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka

Rights and Authorities

All SPI personnel are authorized to perform the following:

1. Access all relevant information about the Company related to the duties and functions of the SPI;
2. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee;
3. Convening regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee;
4. Coordinating activities with the External Auditor;
5. Through the Human Resources and General Affairs Division, selecting competent personnel in accordance with the needs for the performance of the SPI's duties.

Independence, Objectivity, Competence and Professionalism

Internal Auditors are required to be independent, objective, competent, and professional in carrying out their duties. This allows them to express their opinions and thoughts without influence or pressure from other parties and deliver added value to the Company. To encourage the implementation of the Internal Auditors' independence, the President Director must fully support it, and the Audit Committee must supervise and guide its implementation.

1. Independency

Internal Auditors have independence in carrying out Internal Audit activities and investigative activities, expressing opinions and thoughts according to their profession and applicable standards. The Head of IAU is responsible to the President Director. To support independence and ensure smooth supervision activities and authority in monitoring follow-up, the Head of IAU may communicate directly with



Kepala SPI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Audit. Unit SPI harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas Pengawasan Intern dan aktivitas investigasi.

Dalam menegakkan independensinya:

- a. Pengawas Intern mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- b. Pengawas Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, lingkup, cara, teknik dan pendekatan pengawasan yang akan dilakukan.
- c. Pengawas Intern dan Investigator tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas Pengawasan Intern dan aktivitas investigasi.
- d. Pengawas Intern dan *Investigator* tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan dan afiliasinya maupun Anak Perusahaan.

2. Objektivitas

- a. Pengawas Intern dan *Investigator* harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas Pengawasan Intern dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- b. Pengawas Intern dan *Investigator* bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Pengawas Intern dan *Investigator* mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap objek atau kegiatan dimaksud.
- c. Untuk menjaga objektivitas, Pengawas Intern dan *Investigator* yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas Pengawasan Intern di *area* yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun (*cooling-off period*).

3. Kompetensi

Pengawas Intern harus memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas Pengawasan Intern, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kecakapan merupakan istilah kolektif yang menunjukkan kompetensi (pengetahuan,

the Board of Commissioners and/or through the Audit Committee. The IAU Unit must be free from interference from any party in determining the scope, implementation and reporting of the results of Internal Audit and investigative activities.

In upholding its independency:

- a. Internal Auditors are capable of expressing their opinions and thoughts without influence or pressure from any other party.
- b. Internal Auditors are free to determine the method, scope, technique, and approach of supervision to be conducted.
- c. Internal Auditors and Investigators do not carry out operational activities outside of their Internal Auditor and investigation activities.
- d. Internal Supervisors and Investigators do not carry out concurrent duties and positions in the Company's operational activities and its affiliates or Subsidiaries.

2. Objectivity

- a. Internal Auditors and Investigators must have an independent mental attitude in conducting Internal Audit and investigation activities. This mental attitude is reflected in complete, objective reports that are carefully and impartially analysis-based.
- b. Internal Auditors and Investigators are free from conflicts of interest regarding the examined objects or activities. Suppose they have conflicts of interest. In that case, the person concerned must declare their involvement and not be assigned to supervise the objects or activities in question.
- c. To maintain objectivity, newly recruited Internal Auditors and Investigators from certain units must avoid Internal Audit activities in areas that were previously their responsibility for at least one year (*cooling-off period*).

3. Competency

Internal Auditors shall have other competencies (knowledge, skills, attitudes) to carry out their duties and responsibilities. Internal Audit Activities must collectively have or obtain other competencies (knowledge, skills, attitudes) required to carry out their responsibilities. Competence is a collective term that indicates other competencies (knowledge, skills, attitudes) required by Internal Auditors to carry out their responsibilities effectively. This

keterampilan, sikap) lain yang diperlukan Pengawas Intern untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas saat ini, tren dan permasalahan-permasalahan yang berkembang untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan.

- a. Kepala SPI harus memberikan bantuan saran dan asistensi yang kompeten apabila Pengawas Intern tidak memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan.
- b. Pengawas Intern harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat mengevaluasi risiko kecurangan (*fraud risk*), dan cara organisasi mengelola risiko tersebut, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti layaknya seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.
- c. Pengawas Intern harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian kunci/utama, serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Namun tidak seluruh Pengawas Intern diharapkan memiliki keahlian sebagaimana layaknya Pengawas Intern yang tanggung jawab utamanya adalah mengaudit teknologi informasi.
- d. Kepala SPI harus menolak penugasan pengawasan atau mendapatkan saran dan bantuan yang kompeten, jika auditor internalnya tidak memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut.

4. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Pengawas Intern dan *Investigator* dalam melaksanakan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi. Untuk itu Pengawas Intern dan *Investigator* secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai:

- a. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Pengawas Intern termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan (*confidentiality code*).
- b. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
- c. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- d. Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis.

includes consideration of current activities, trends and emerging issues to make relevant advice and recommendations.

- a. The Head of IAU must provide competent advice and assistance in the event that the Internal Auditors lack adequate competence (knowledge, skills, attitude) to carry out all or part of the assignment.
- b. The Internal Auditor must have adequate knowledge to evaluate the fraud risk, and how the organization manages the risk, but is not expected to have the expertise of someone who is mainly responsible for detecting and investigating fraud.
- c. The Internal Auditor must have adequate knowledge of key/main risks and controls, as well as information technology-based audit techniques to carry out his/her duties. However, not all Internal Auditors are expected to have the expertise of those who are mainly responsible for auditing information technology.
- d. If the internal auditor lacks the competence (knowledge, skills, attitude) to carry out all or part of the supervisory assignment, the head of IAU must reject it or obtain competent advice and assistance.

4. Professionalism

Professionalism serves as a reference for Internal Auditors and Investigators in internal audit and investigation activities. Thus, Internal Auditors and Investigators individually or collectively have:

- a. Integrity, an independent, honest, objective, diligent mental attitude, and upholding the ethics and profession of Internal Auditors, including being wise and prudent in using information obtained in carrying out duties and not using confidential information for personal gain or other matters that cause losses to the Company (*confidentiality code*).
- b. Competence in accordance with the required competency profile.
- c. Ability to interact and communicate effectively both verbally and in writing.
- d. Willingness and ability to improve the quality of competence, both behavioral and technical.



- e. Kewajiban mematuhi Kode Etik Pengawas Intern dan Standar Profesi Pengawas Intern bagi Pengawas Intern serta Kode Etik *Investigator* dan Standar Profesi Investigator bagi *Investigator*.
- f. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

5. Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas

Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik dan Standar yang mempengaruhi ruang lingkup operasi aktivitas Pengawasan Intern secara umum, Kepala SPI Perusahaan harus mengungkapkan langsung dan/atau melalui Komite Audit atas ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Kode Etik

Seluruh personil SPI wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan pokok-pokok Kode Etik profesi auditor internal sebagaimana telah ditetapkan Perseroan, antara lain:

1. Integritas (*Integrity*)

Pengawas Intern memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang andal.

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berhati-hati, dan penuh tanggung jawab;
- b. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan/atau dapat melanggar hukum;
- c. Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum atau tindakan yang dapat merugikan citra profesi Pengawas Intern maupun Perusahaan;
- d. Memiliki sikap hormat dan berperan dalam pencapaian tujuan Perusahaan.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Pengawas Intern menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Pengawas Intern melakukan penilaian (*professional judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

- e. Obligation to comply with the Internal Audit Code of Ethics and Internal Audit Professional Standards for Internal Auditor and the Investigator Code of Conduct and Investigator Professional Standards for Investigators.
- f. Obligation to maintain the confidentiality of the Company's information and/or data related to the implementation of the Internal Auditor's duties and responsibilities unless required by laws and regulations or Court decision/ determination.

5. Obstacles to the Principles of Independence and Objectivity

Suppose there is a non-conformity with the Code of Conduct and Standards that affects the scope of operations of Internal Audit activities in general. In that case, the Head of IAU must disclose directly and/or through the Audit Committee on the non-conformity and its impact to the President Director and the Board of Commissioners.

Code of Ethics

All SPI personnel must act and behave in accordance with the core principles of the internal auditor's professional code of ethics as determined by the Company, including:

1. Integrity

Internal Auditors have integrity by building trust as the basis for making reliable judgments.

- a. Performing duties in an honest, careful, cautious, and responsible manner;
- b. Comply with applicable laws and regulations, reveal the truth according to existing facts, and do not hide any issues that harm the Company and/or violate the law;
- c. Not being involved in activities that can violate the law or actions that harm the image of the Internal Audit or the Company;
- d. Having a respectful attitude and playing a role in achieving the Company's objectives.

2. Objectivity

Internal Auditors demonstrate high objectivity in accordance with professional standards in collecting, evaluating, and communicating information about the examined activities or processes. Internal Auditors make balanced professional judgments with due consideration of all relevant circumstances and are not influenced by personal/other people's interests.

- a. Pengawas Intern tidak boleh terlibat dalam penugasan, apabila ditengarai akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Apabila terlibat maka harus membuat dokumen Pakta Integritas;
 - b. Pengawas Intern harus mengungkapkan semua fakta penting yang dimiliki, yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah isi maupun interpretasi laporan hasil penugasan;
 - c. Pengawas Intern tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
Pengawas Intern menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
 - a. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi serta data yang diperoleh selama melaksanakan tugas;
 - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi perusahaan;
 - c. Tidak mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas sebagai Pengawas Intern kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 4. Kompetensi (*Competency*)
Pengawas Intern menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.
 - a. Aktivitas Pengawasan Intern harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya;
 - b. Pengawas Intern senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan serta efektivitas dan pelaksanaan tugasnya.
- a. Internal Auditors may not be involved in assignments if they are suspected of causing a conflict of interest, or they must create an Integrity Pact document;
 - b. Internal Auditors shall disclose all important facts they have; otherwise, the content or interpretation of the assignment report could be changed;
 - c. Internal Auditors may not receive anything in any form that could be suspected of influencing their professional judgment.
 3. Confidentiality
Internal Auditors respect the value and ownership of information received and do not disclose it without proper authorization unless there is a legal or professional obligation to do so.
 - a. Be careful in using and maintaining information and data obtained while carrying out duties;
 - b. Do not use information obtained for personal interests or benefits or for any other reason that may cause material or non-material losses to the Company;
 - c. Refrain from disclosing any information acquired during Internal Audit duties to any unauthorized party, except as mandated by applicable regulations and procedures.
 4. Competency
Internal Auditors use the necessary knowledge, skills, and experience to perform their audit responsibilities.
 - a. Internal Audit activities must be executed with professional expertise and proficiency, encompassing the required knowledge, skills, and other competencies to fulfill their duties;
 - b. Internal Auditors continuously enhance their competency through continuous professional education and the effectiveness and execution of their duties.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar SPI selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, perkembangan Perseroan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait, PPI memfasilitasi SDM yang tergabung dalam SPI untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Competency Development Program

To ensure IAU keep abreast of developments related to the business world, the Company's development, and relevant laws and regulations, PPI facilitates IAU personnel to participate in competency development programs, such as seminars, workshops, or other activities that improve their knowledge and competence.



Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala SPI di sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The competency development activities participated in by the Head of IAU throughout 2025 are available in the Company Profile chapter of this annual report.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan yang tergabung dalam unit SPI di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The competency development programs participated in by employees who are members of the IAU in 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Cahyadi	Pelatihan Anti Korupsi Tematik Investigatif bagi SPI BUMN Tahun 2025	a. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat c. Teknik Investigasi d. Wawancara Investigatif e. Studi Kasus dan Dinamika Kelompok f. Materi Integritas dan Gratifikasi sebagai Akar Korupsi g. Penulisan Rencana Aksi dan Posttest	Yogyakarta, 21 - 25 Juli 2025	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK
	Thematic Investigative Anti-Corruption Training for SOE Internal Control Units (SPI) in 2025	a. Corruption Crimes Act b. Public Complaint Management System c. Investigation Techniques d. Investigative Interviews e. Case Studies and Group Dynamics f. Integrity and Gratification as the Roots of Corruption g. Action Plan Development and Posttest	Yogyakarta, July 21-25, 2025	KPK Directorate of Anti-Corruption Education and Training
David Nicholson	Pelatihan Anti Korupsi Tematik Investigatif bagi SPI BUMN Tahun 2025	a. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat c. Teknik Investigasi d. Wawancara Investigatif e. Studi Kasus dan Dinamika Kelompok f. Materi Integritas dan Gratifikasi sebagai Akar Korupsi g. Penulisan Rencana Aksi dan Posttest	Yogyakarta, 21 - 25 Juli 2025	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK
	Thematic Investigative Anti-Corruption Training for SOE Internal Control Units (SPI) in 2025	a. Corruption Crimes Act b. Public Complaint Management System c. Investigation Techniques d. Investigative Interviews e. Case Studies and Group Dynamics f. Integrity and Gratification as the Roots of Corruption g. Action Plan Development and Posttest	Yogyakarta, July 21-25, 2025	KPK Directorate of Anti-Corruption Education and Training
Daeng Achmad Ardiansyah	Pelatihan Anti Korupsi Tematik Investigatif bagi SPI BUMN Tahun 2025	a. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat c. Teknik Investigasi d. Wawancara Investigatif e. Studi Kasus dan Dinamika Kelompok f. Materi Integritas dan Gratifikasi sebagai Akar Korupsi g. Penulisan Rencana Aksi dan Posttest	Yogyakarta, 21 - 25 Juli 2025	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK
	Thematic Investigative Anti-Corruption Training for SOE Internal Control Units (SPI) in 2025	a. Corruption Crimes Act b. Public Complaint Management System c. Investigation Techniques d. Investigative Interviews e. Case Studies and Group Dynamics f. Integrity and Gratification as the Roots of Corruption g. Action Plan Development and Posttest	Yogyakarta, July 21-25, 2025	KPK Directorate of Anti-Corruption Education and Training

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Karnika Sari	Sertifikasi Manajemen Risiko	a. Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko b. Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko c. Mengukur Risiko d. Melakukan Pengendalian Risiko e. Melakukan Pemantauan Risiko f. Mengomunikasikan Risiko	Jakarta, 14 Juni - 5 Juli 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)
	Risk Management Certification	a. Establishing Risk Management Policies b. Developing a Risk Management Work Plan c. Measuring Risk d. Implementing Risk Controls e. Risk Monitoring f. Communicating Risk	Jakarta, June 14 – July 5, 2025	Capital Market Professional Certification Institute (LSPPM)
Karnika Sari	Implementasi PSAK 118: Dampak, Strategi, dan penerapan	Pembaruan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan	Daring-Jakarta, 10 Desember 2025	Skill Up by PT RNI (Persero)
	Implementation of PSAK 118: Impact, Strategies, and Application	Updates to the Presentation and Disclosure in Financial Statements	Online—Jakarta, December 10, 2025	
Anggi Maharani	BSE Program Masterclass I - Creating Business Ecosystem	a. <i>Building Legacy Through Business Ecosystem</i> b. <i>Business Architectures Option</i> c. <i>The Journey</i> d. <i>Risk and Challenges</i> e. <i>Organizational Focus</i>	Jakarta, 21 Februari 2025	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN RI)
			Jakarta, February 21, 2025	Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN RI)
Anggi Maharani	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	a. Gratifikasi, Suap dan pemerasan b. Dampak Gratifikasi c. Pelaporan Gratifikasi d. Peran Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam Pengendalian Gratifikasi e. Nilai-nilai Antigratifikasi dalam Perspektif Budaya dan Agama	Jakarta, 4 Februari 2025	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)
	E-Learning to Enhance Understanding of Gratification	a. Gratification, Bribery, and Extortion b. The Impact of Gratification c. Reporting Gratification d. The Role of Civil Servants/Government Officials in Controlling Gratification e. Anti-Gratification Values from Cultural and Religious Perspectives	Jakarta, February 4, 2025	Corruption Eradication Commission (KPK RI)
Anggi Maharani	Sertifikasi Manajemen Risiko CRP (<i>Certified Risk Professional</i>)	a. Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko b. Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko c. Mengukur Risiko d. Melakukan Pengendalian Risiko e. Melakukan Pemantauan Risiko f. Mengomunikasikan Risiko	Jakarta, 8-10 Juli 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)
	CRP (Certified Risk Professional) Risk Management Certification	a. Defining Risk Management Policies b. Developing a Risk Management Work Plan c. Measuring Risk d. Implementing Risk Controls e. Risk Monitoring f. Communicating Risk	Jakarta, July 8–10, 2025	Capital Market Professional Certification Institute (LSPPM)



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Anggi Maharani	Sertifikasi Internal Audit CPIA (<i>Certified Practitioner of Internal Audit</i>)	a. Menyiapkan Informasi yang Diperlukan Untuk Penyusunan Program Penugasan b. Menyusun Program Penugasan dan Alokasi Sumber Daya c. Melaksanakan Penugasan d. Mengkomunikasikan Hasil Penugasan e. Memantau Pelaksanaan Tindakan Perbaikan a. Preparing the Information Required for Developing an Audit Assignment Program b. Developing an Audit Assignment Program and Allocating Resources c. Conducting Audit Assignments d. Communicating Audit Findings e. Monitoring the Implementation of Corrective Actions	Jakarta, 22-26 September 2025 Jakarta, September 22–26, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi CIAR Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) CIAR Professional Certification Institute, Internal Audit Education Foundation (YPIA)
Bani Gusti Pradini	Implementasi PSAK 118: Dampak, Strategi, dan penerapan Implementation of PSAK 118: Impact, Strategies, and Application	Pembaruan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan Updates to the Presentation and Disclosure in Financial Statements	Daring-Jakarta, 10 Desember 2025 Online—Jakarta, December 10, 2025	Skill Up by PT RNI (Persero)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2025

Sampai dengan akhir tahun 2025 SPI merencanakan akan melaksanakan 52 kegiatan pengawasan. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 56 kegiatan pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Assurance

Salah satu tugas pokok dan fungsi SPI adalah melaksanakan kegiatan *assurance*, aktivitas kegiatan assurance yang telah dilaksanakan Divisi SPI pada tahun 2025 antara lain adalah dengan melakukan kegiatan audit operasional kantor cabang, audit khusus, audit tematik, audit kinerja/operasional anak perusahaan, *desk audit*/reviu dan evaluasi manajemen risiko perusahaan. Sampai dengan akhir Tahun 2025 telah terlaksana 23 (dua puluh tiga) kegiatan *assurance*, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Telah terlaksana 5 (lima) kegiatan audit kantor cabang antara lain:
 - Audit Kantor Cabang Bandar Lampung;
 - Audit Kantor Cabang Malang;
 - Audit Kantor Cabang Banjarmasin;
 - Audit Kantor Cabang Makassar; dan
 - Audit Kantor Cabang Medan.
- Telah terlaksana 4 (empat) kegiatan audit khusus yaitu:

Brief Report on the Implementation of IAU Duties in 2025

By the end of 2025, SPI plans to conduct 52 supervisory activities. As of the end of 2025, a total of 56 supervisory activities have been carried out, with the following details:

1. Implementation of Assurance Activities

One of SPI's primary duties and functions is to conduct assurance activities. The assurance activities carried out by the SPI Division in 2025 included operational audits of branch offices, special audits, thematic audits, performance/operational audits of subsidiaries, desk audits/reviews, and evaluations of the company's risk management. As of the end of 2025, 23 (twenty-three) assurance activities had been carried out, with the following breakdown:

- Five (5) branch office audits were conducted, including:
 - Audit of the Bandar Lampung Branch Office;
 - Audit of the Malang Branch Office;
 - Audit of the Banjarmasin Branch;
 - Audit of the Makassar Branch; and
 - Audit of the Medan Branch.
- Four (4) special audit activities were conducted, namely:

- 1) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Piutang Usaha Macet Unit Operasional Tulang Bawang dan Unit Operasional Bandar Jaya;
- 2) Audit Khusus Angkutan Pupuk Subsidi Cabang Madya Balikpapan;
- 3) Audit Khusus atas Dugaan Penggunaan Data Pribadi Karyawan untuk Melakukan Pinjaman Koperasi Pegawai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- 4) Audit Khusus atas atas Selisih Persediaan Minyak Goreng Minyakita Periode Tahun 2023 pada Cabang Jakarta.
- c. Telah terlaksana 1 (satu) kegiatan audit tematik yaitu Audit Tematik Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan serta Inventaris Kantor di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- d. Telah terlaksana 11 (sebelas) kegiatan desk audit atau reviu, yaitu:
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Utama Medan;
 - 2) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Madya Palu;
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Madya Banjarmasin;
 - 4) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Madya Malang;
 - 5) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Utama Bandar Lampung;
 - 6) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Utama Makassar;
 - 7) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Madya Mataram;
 - 8) Evaluasi Pelaksanaan RKAP Cabang Madya Padang;
 - 9) Reviu atas atas Dokumen Transaksi Pengadaan Beras di PT PPI kepada KSO Buana Artha Bhakti Utama tahun 2024;
 - 10) Telaah Piutang Macet Unit Operasional Tulang Bawang dan Unit Operasional Bandar Jaya;
 - 11) Reviu Pendahuluan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025.
- e. Telah terlaksana 2 (dua) kegiatan evaluasi manajemen risiko perusahaan, yaitu:
 - 1) Validasi *Risk Management Index* (RMI);
 - 2) Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko.

2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi

Selain kegiatan *assurance*, salah satu tugas pokok dan fungsi Divisi SPI yang lain adalah melaksanakan kegiatan konsultasi. Aktivitas kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Divisi SPI antara lain adalah pemberian

- 1) Special-Purpose Examination of Non-Performing Trade Receivables at the Tulang Bawang and Bandar Jaya Operational Units;
- 2) Special Audit of Subsidized Fertilizer Transportation at the Balikpapan Madya Branch;
- 3) Special Audit of Alleged Use of Employee Personal Data to Obtain Loans from the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Employee Cooperative;
- 4) Special Audit of the Discrepancy in Minyakita Cooking Oil Inventory for the 2023 Period at the Jakarta Branch.
- c. One (1) thematic audit was conducted, namely the Thematic Audit of Land and Building Asset Management and Office Inventory at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- d. Eleven (11) desk audits or reviews were conducted, namely:
 - 1) Evaluation of the Implementation of the Annual Work Plan and Budget (RKAP) for the Medan Main Branch;
 - 2) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Palu Regional Branch;
 - 3) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Banjarmasin Regional Branch;
 - 4) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Malang Regional Branch;
 - 5) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Bandar Lampung Main Branch;
 - 6) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Makassar Main Branch;
 - 7) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Mataram Intermediate Branch;
 - 8) Evaluation of the Implementation of the RKAP for the Padang Intermediate Branch;
 - 9) Review of the Documentation for Rice Procurement Transactions by PT PPI with KSO Buana Artha Bhakti Utama in 2024;
 - 10) Analysis of Non-Performing Receivables at the Tulang Bawang and Bandar Jaya Operational Units;
 - 11) Preliminary Review of the First-Half Financial Statements for 2025.
- e. Two (2) corporate risk management evaluation activities were carried out, namely:
 - 1) Validation of the Risk Management Index (RMI);
 - 2) Review of Risk Management Implementation.

2. Implementation of Consulting Activities

In addition to assurance activities, another core duty and function of the SPI Division is to conduct consulting activities. Consulting activities carried out by the SPI Division include providing consulting



jasa konsultasi dan pendampingan kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah terlaksana 16 (enam belas) kegiatan konsultasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Telah terlaksana 11 (sebelas) kegiatan konsultasi, yaitu:

- 1) Konsultasi terkait Rencana Kerjasama Sewa Menyewa Aset Jln. Mataram No. 78, Yogyakarta;
- 2) Konsultasi terkait Hasil Putusan Pengadilan Atas Jaminan Sertifikat a/n Hardi Suptadi;
- 3) Konsultasi terkait Piutang Warung Pangan;
- 4) Konsultasi terkait Rekonsiliasi Piutang Kantor Pusat (SBU Property);
- 5) Konsultasi terkait Tindak Lanjut Piutang Bermasalah CV Adi Jaya;
- 6) Konsultasi terkait Permohonan Permintaan Bantuan Dokumen Pemeriksaan Piutang atas Debitur Eks PT BGR (Persero);
- 7) Konsultasi terkait Tindak Lanjut Temuan Koreksi Verval PT PPI Cabang Pratama Bengkulu;
- 8) Konsultasi terkait Usulan Penghapusbukuan Aset Bangunan Milik PT PPI di Sibolga;
- 9) Konsultasi terkait Timbulnya Piutang atas Biaya Demurage dan *Storage* PT Beli Jual Oentung;
- 10) Konsultasi terkait Pedoman *Whistleblowing System* dan *Conflict of Interest*;
- 11) Konsultasi terkait Pengadaan Konsultan Penyusun *Feasibility Study Cold Chain*.

b. Telah terlaksana 5 (lima) kegiatan pendampingan, yaitu:

- 1) Pendampingan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT PPI Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik RSM;
- 2) Pendampingan Penyusunan Perdir *Whistleblowing System*;
- 3) Pendampingan *Stock Opname* Gudang GSP Surabaya Semester I Tahun 2025;
- 4) Pendampingan *kick off meeting* Permintaan Bantuan Hukum kepada Jamdatun terkait Penyelesaian Piutang Sewa Ditjen Migas;
- 5) Pendampingan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT PPI Tahun 2025 oleh Kantor Akuntan Publik RSM.

3. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan, maka Divisi SPI

services and activity support. As of the end of 2025, 16 (sixteen) consulting activities have been carried out, with the following details:

a. Eleven (11) consulting activities have been carried out, namely:

- 1) Consultation regarding the Asset Lease Cooperation Plan for Jl. Mataram No. 78, Yogyakarta;
- 2) Consultation regarding the Court's Ruling on the Certificate of Title held by Hardi Suptadi;
- 3) Consultation regarding Warung Pangan's receivables;
- 4) Consultation regarding the reconciliation of receivables at the Head Office (SBU Property);
- 5) Consultation regarding follow-up on CV Adi Jaya's non-performing receivables;
- 6) Consultation regarding a request for assistance with documents related to the review of receivables from a former debtor of PT BGR (Persero);
- 7) Consultation regarding follow-up on findings from the verification correction at PT PPI's Pratama Bengkulu Branch;
- 8) Consultation regarding the proposal to write off building assets owned by PT PPI in Sibolga;
- 9) Consultation regarding the emergence of receivables for demurrage and storage fees at PT Beli Jual Oentung;
- 10) Consultation regarding the *Whistleblowing System* and *Conflict of Interest* Guidelines;
- 11) Consultation regarding the procurement of a consultant to prepare a Cold Chain Feasibility Study.

b. Five (5) assistance activities have been carried out, namely:

- 1) Assistance with the General Audit of PT PPI's 2024 Financial Statements by the RSM Public Accounting Firm;
- 2) Assistance with the drafting of the *Whistleblowing System* Director's Regulation;
- 3) Assistance with the first-semester 2025 stock take at the GSP Surabaya warehouse;
- 4) Assistance with the kick-off meeting for the Request for Legal Assistance to Jamdatun regarding the Settlement of Rental Receivables of the Directorate General of Oil and Gas;
- 5) Assistance with the General Audit of PT PPI's 2025 Financial Statements by RSM Public Accounting Firm.

3. Implementation of Follow-Up Monitoring Activities on Audit Findings

To ensure that the recommendations from audit findings have been implemented, the SPI Division

melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan monitoring tindak lanjut, yaitu:

- a. Monitoring hasil pemeriksaan Divisi SPI (internal) sebanyak 4 (empat) kegiatan;
- b. Monitoring hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 4 (empat) kegiatan.

4. Kegiatan Pengembangan Manajemen Divisi SPI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi SPI, maka Divisi SPI melakukan kegiatan pengembangan manajemen Divisi SPI. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah dilakukan 4 (empat) kegiatan pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyusunan Pedoman Umum Pengawasan Internal;
- b. Ratifikasi Pedoman *Anti Fraud*;
- c. Penyusunan Pedoman Tuntutan Ganti Rugi;
- d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2026.

5. Penugasan Khusus Manajemen

Dalam rangka berpartisipasi dalam program pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka PT PPI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan program pengendalian gratifikasi di Perusahaan. Untuk itu, Divisi SPI melaksanakan program pengendalian gratifikasi di lingkungan PT PPI. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah dilakukan 5 (lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelatihan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
- b. Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. Sosialisasi Penolakan Gratifikasi;
- d. Reviu Pedoman Pemberian Hadiah bukan Gratifikasi;
- e. Ratifikasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi ID Food Group.

Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI Tahun 2025

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berfungsi sebagai landasan dan acuan kerja bagi seluruh personil SPI dalam menjalankan kegiatan audit internal. PKPT yang disusun oleh SPI harus mendapat persetujuan Direktur Utama dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum resmi ditetapkan.

conducts follow-up monitoring of both internal and external audit findings. As of the end of 2025, 8 (eight) follow-up monitoring activities have been carried out, namely:

- a. Monitoring of SPI Division audit findings (internal) comprising 4 (four) activities;
- b. Monitoring of audit findings from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI), the Financial and Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPKP RI), and Public Accounting Firms (KAP)—4 (four) activities.

4. SPI Division Management Development Activities

To support the implementation of the SPI Division's duties and functions, the SPI Division conducts management development activities. As of the end of 2025, 4 (four) development activities have been carried out, with the following details:

- a. Drafting of General Guidelines for Internal Oversight;
- b. Ratification of Anti-Fraud Guidelines;
- c. Drafting of Guidelines on Claims for Damages;
- d. Drafting of the 2026 Annual Oversight Work Program.

5. Special Management Assignments

To participate in government programs related to the prevention and eradication of corruption, PT PPI established a Gratification Control Unit as part of the Company's gratification control program. To that end, the SPI Division implements the gratuity control program within PT PPI. As of the end of 2025, 5 (five) activities have been carried out, with the following details:

- a. Training on the Gratuity Control Program (PPG);
- b. Formation of the Gratuity Control Unit (UPG) Team;
- c. Awareness Campaign on Refusing Gratuities;
- d. Review of the Guidelines for Giving Gifts That Are Not Gratuities;
- e. Ratification of the ID Food Group Gratuity Control Guidelines.

Annual Audit Program of SPI for 2025

The Annual Audit Work Program (PKPT) serves as the foundation and reference for all SPI personnel in conducting internal audit activities. The PKPT prepared by SPI must be approved by the CEO and submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee for consideration and advice before being officially established. The framework for PKPT development



Penyusunan kerangka PKPT dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau *risk-based* sehingga dalam hal ini SPI berkoordinasi aktif dengan Komite Manajemen Risiko.

is done using a risk-based approach, so SPI actively coordinates with the Risk Management Committee.

Berikut ini adalah uraian realisasi PKPT SPI Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

The following is a description of the realization of the SPI PKPT for the year 2025, including:

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Rencana vs Realisasi Plan vs. Realization		
		Rencana Plan	Realisasi Realization	%
1	Kegiatan Assurance (Audit/Reviu/Evaluasi) Assurance Activities (Audit/Review/Evaluation)	23	23	100%
2	Kegiatan Consultancy (Konsultasi/Pendampingan/Fasilitasi) Consultancy Activities (Consulting/Coaching/Facilitation)	13	16	123%
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (Internal/Eksternal) Monitoring of Follow-Up Actions on Audit Findings (Internal/External)	8	8	100%
4	Pengembangan Manajemen SPI SPI Management Development	4	4	100%
5	Penugasan Khusus Manajemen Special Management Assignments	4	5	125%
Jumlah Total		52	56	108%

Program Kerja Pengawasan Tahunan

Annual Supervisory Work Program

No.	Kegiatan Activities	Waktu Date	Realisasi Pelaksanaan Realization
Kegiatan Audit Activity Audit			
1	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Utama Medan Performance Audit of Business Activities at Medan Main Branch	Januari – Februari 2025 January – February 2025	1 kegiatan/activity
2	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Utama Bandar Lampung Performance Audit of Business Activities at Bandar Lampung Main Branch	Oktober 2025 October 2025	1 kegiatan/activity
3	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Utama Jakarta Performance Audit of Business Activities at Jakarta Main Branch	Juli 2025 July 2025	1 kegiatan/activity
4	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Madya Banjarmasin Performance Audit of Business Activities at Banjarmasin Regional Branch	April – Mei 2025 April – May 2025	1 kegiatan/activity
5	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Madya Malang Performance Audit of Business Activities at Malang Regional Branch	April – Mei 2025 April – May 2025	1 kegiatan/activity
6	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Utama Makassar Performance Audit of Business Activities at the Makassar Main Branch	Juli 2025 July 2025	1 kegiatan/activity
7	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Madya Palu Performance Audit of Business Activities at the Palu Regional Branch	Januari – Februari 2025 January – February 2025	1 kegiatan/activity
8	Audit Tematik Optimalisasi dan Pengelolaan Aset Thematic Audit on Asset Optimization and Management	Februari – Maret 2025 February – March 2025	1 kegiatan/activity
9	Audit Tematik Perizinan Usaha Thematic Audit on Business Licensing	Mei – Juni 2025 May – June 2025	1 kegiatan/activity

No.	Kegiatan Activities	Waktu Date	Realisasi Pelaksanaan Realization
10	Audit Tematik SDM/IT Thematic Audit on HR/IT	November – Desember 2025 November – December 2025	1 kegiatan/activity
11	Audit Kinerja/Operasional PT PPI Industri Performance/Operational Audit of PT PPI Industri	Agustus – September 2025 August – September 2025	1 kegiatan/activity
12	Pendampingan Audit KAP Audit Assistance for Public Accounting Firms	Januari – Februari 2025, November – Desember 2025 January – February 2025, November – December 2025	2 kegiatan/activity
13	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Evaluation of Risk Management Implementation	Maret & Juli 2025 March & July 2025	2 kegiatan/activity
14	Validasi Data P3DN P3DN Data Validation	Desember 2025 December 2025	1 kegiatan/activity
15	Pengembangan Manajemen SPI SPI Management Development	Januari – Desember 2025 January – December 2025	4 kegiatan/activity
16	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Monitoring of Follow-Up Actions on Internal Audit Findings	Januari, April, Juli, Oktober 2025 January, April, July, October 2025	4 kegiatan/activity
17	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Monitoring of Follow-Up Actions on External Audit Findings	Januari, April, Juli, Oktober 2025 January, April, July, October 2025	4 kegiatan/activity
18	Kegiatan Konsultasi Consulting Activities	Januari – Desember 2025 January – December 2025	10 kegiatan/activity
19	Desk Reviu Kegiatan Cabang Usaha Desk Review of Branch Operations	Januari, April, Juli, Oktober 2025 January, April, July, October 2025	8 kegiatan/activity
20	Penugasan Khusus dari Manajemen Special Assignments from Management	Januari – Desember 2025 January – December 2025	6 kegiatan/activity

Komite di Bawah Direksi

Pada tahun 2025, PPI tidak memiliki komite-komite di bawah Direksi. Semua tugas dan kewenangan yang umumnya ada pada komite direksi dapat ditangani langsung oleh Direksi. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi transparansi, etika, dan kepatuhan dalam pengambilan keputusan Perusahaan. Selain itu, PPI juga memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap menjadi prioritas utama.

Committees Under the Board of Directors

In 2025, PPI did not have committees under the Board of Directors. All tasks and authorities typically vested in directorial committees could be handled directly by the Board of Directors. However, this does not diminish transparency, ethics, and compliance in the Company's decision-making. Additionally, PPI ensures that shareholder interests remain the top priority.



Akuntan Publik

Public Accountant

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Akuntan Publik dan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS Tahunan.

Mekanisme penunjukan KAP dimuat di dalam *Board Manual* serta sudah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pembahasan terkait penunjukan calon Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan perusahaan dengan melibatkan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang telah melakukan audit pada tahun buku sebelumnya untuk selanjutnya diusulkan kembali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Fungsi Audit Eksternal

Penetapan KAP dan Akuntan Publik Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komunikasi yang terjalin di antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen senantiasa berjalan efektif dan efisien. Selama proses audit berlangsung, KAP berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Oleh karena itu, auditor eksternal dan Komite Audit secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Mechanism of Appointment of Public Accountant Firm (KAP)

The Company utilizes the services of a Public Accountant Firm ("KAP") as an independent external party to provide opinions regarding the compliance of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Public Accountants and the KAP that will audit the Consolidated Financial Statements and the PKBL Financial Statements are proposed by the Board of Commissioners and subsequently submitted for approval by shareholders through the mechanism of the Annual General Meeting (RUPS).

The mechanism for appointing the KAP is included in the Board Manual and has been established as part of the Board of Commissioners' Work Program. In practice, the Board of Commissioners discusses the appointment of potential External Auditors who will audit the company's financial statements involving the Audit Committee and the Risk Management Committee.

The Audit Committee has evaluated the performance of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, which audited the previous fiscal year, and is proposed again to audit the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and the PKBL Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2025.

External Audit Function

The appointment of the Company's Public Accountant Firm and Public Accountants refers to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, article 3 paragraph 1, which states that general audit services for financial statements of an entity are conducted by a Public Accountant Firm for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

Coordination between External Auditor and Audit Committee

Communication between the Public Accountant Firm (KAP), the Audit Committee, and Management always runs effectively and efficiently. During the audit process, the KAP coordinates with the Audit Committee to request input/advice on areas of special concern from the Audit Committee. Therefore, the external auditor and the Audit Committee regularly hold meetings to discuss significant important issues.

Pada saat menjalankan kegiatan audit, Komite Audit dan KAP melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan menyampaikan hasil auditnya saat *exit meeting*.

During the audit activities, the Audit Committee and the KAP discuss the findings obtained by the KAP and present the audit results during the exit meeting.

Lingkup Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Eksternal

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Scope of Responsibilities of Management and External Auditor

Management is responsible for preparing and presenting financial statements in accordance with the principles of SAK as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). Meanwhile, the external auditor is responsible for providing an audit opinion on the financial statements prepared by management based on audit standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Akuntan Publik tahun 2025

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseoran tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan PKBL tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Public Accountant in 2025

The Public Accounting Firm appointed by the Company to audit the Company's consolidated financial statements for the fiscal year 2025 and the PKBL Financial Statement for the fiscal year ended on December 31, 2025, was Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Akuntan Publik Tahun 2025 Public Accountant in 2025	
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No Registrasi: KMK No.477/KM.1/2015 Registration No.: KMK No.477/KM.1/2015
Akuntan Accountant	Dewi Novita Sari No.Izin: AP.1154 Permission No.: AP.1154
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2025 2025 Fiscal Year
Periode Penugasan Assignment Period	8 Januari 2026 s.d 15 April 2026 January 8, 2026 to April 15, 2026
Tanggal Laporan Report Date	17 Juni 2026 June 17, 2026
Jasa Service	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2025 Audit of Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PKBL Financial Statements for the 2025 Fiscal Year
Jasa Lainnya Other Services	Audit umum atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur yang disepakati, terhadap laporan capaian <i>key performance indikator</i> (KPI), audit umum atas laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK) General audit of compliance with laws and regulations, implementation of agreed-upon procedures, and reports on the achievement of key performance indicators (KPIs); general audit of the financial statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK)
Biaya Fee	Rp800.000.000

Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2024 "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PPI dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

The audit results stated that the Financial Statements and PKBL Financial Statements for the 2024 Fiscal Year "Present fairly, in all material respects, the financial position of PPI and its subsidiaries as of December 31, 2024, as well as the financial performance and cash flows for the year ended on those date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".



Daftar Akuntan Publik

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perseroan 5 (lima) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2017 hingga 2025 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

List of Public Accountants

To prioritize transparency, the following is the Public Auditor of the Company's Financial Statement for 5 (five) consecutive years for the 2017 to 2025 fiscal years can be seen in the table below:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)
2025	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No Registrasi: KMK No.477/KM.1/2015 Registration No.: KMK No.477/ KM.1/2015	Dewi Novita Sari No. Izin: AP.1154 Permission No.: AP.1154	a. Audit umum Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 b. Audit umum atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) c. Audit umum atas laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK) a. General audit of the Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year b. General audit of compliance with laws and regulations, application of agreed procedures for Key Performance Indicator (KPI) achievement reports c. General audit of financial statement of micro and small business funding (PUMK) programs	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Present fairly, in all material respects	800.000.000
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Registrasi: KMK No.477/KM.1/2015 Registration No.: KMK No.477/ KM.1/2015	Dewi Novita Sari No. Izin: AP.1154 Permission No.: AP.1154	a. Audit umum Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 b. Audit umum atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) c. Audit umum atas laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK) a. General audit of the Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year b. General audit of compliance with laws and regulations, application of agreed procedures for Key Performance Indicator (KPI) achievement reports c. General audit of financial statement of micro and small business funding (PUMK) programs	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Present fairly, in all material respects	750.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) No. Registrasi: B55/ KM.1/2017 Registration No.: B55/KM.1/2017	Sikanto Pawiroatmodjo No. Izin: AP.1655 Permission No.: AP.1655	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern c. Evaluasi Capaian Key Performance Indicator (KPI) d. Audit Laporan Program Pendanaan Mikro dan Kecil (PUMK)	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	750.000.000
2002	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) No. Registrasi: B55/ KM.1/2017 Registration No.: B55/KM.1/2017	Bandana No. Izin: AP.1655 Permission No.: AP.1655	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern c. Evaluasi Capaian Key Performance Indicator (KPI) d. Audit Laporan Program Pendanaan Mikro dan Kecil (PUMK)	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	874.090.000
2021	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) No. Registrasi: B55/ KM.1/2017 Registration No.: B55/KM.1/2017	Bandana No. Izin: AP.1655 Permission No.: AP.1655	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern c. Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja d. Audit Laporan Keuangan PKBL	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	485.000.000

Jasa Lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik

Selama pelaksanaan audit, KAP tidak memberikan jasa lain kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selain jasa audit. Pelaksanaan proses audit berjalan independen dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Other Services Provided by the Public Accounting Firm

During the audit, KAP did not provide other services to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) other than audit services. The implementation of the audit process is independent and there is no conflict of interest.



Manajemen Risiko

Risk Management

Kebijakan Manajemen Risiko

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, PT PPI menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko disetiap aktivitas kegiatan Perusahaan, maka identifikasi dan penanganan terhadap tantangan, hambatan maupun kendala – kendala dalam pelaksanaan dalam rencana kerja perusahaan dapat termitigasi dengan baik agar dampak dari risiko yang timbul terhadap aktivitas Perusahaan dapat diminimalisasi. Dalam penerapannya, PT PPI mengacu pada prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 : 2018, sebagai upaya untuk memastikan proses pengelolaan risiko yang sistematis, terstruktur, dan efektif. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berkelanjutan, dalam mendukung integritas, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Dengan demikian, misi Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan visi Perusahaan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Direksi telah menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan konteks dan kriteria risiko, melakukan penilaian risiko, monitoring, evaluasi hingga pelaporan manajemen risiko yang bertujuan untuk mencapai sasaran Perusahaan sebagai wujud komitmen penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi. Pedoman manajemen risiko tersebut tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT PPI.

Pedoman Manajemen Risiko dituangkan secara umum sebagai berikut:

- Semua unit kerja di lingkungan PT PPI wajib melaksanakan manajemen risiko untuk semua aktivitas bisnis dan untuk kepentingan Perusahaan;
- Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan wajib menerapkan manajemen risiko secara terpadu (*Enterprise Risk Management*);
- Manajemen risiko merupakan bagian dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik;
- Semua unit kerja agar terlibat dalam proses penyusunan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian serta monitoring risiko, yang diintegrasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada setiap tahun anggaran;

Risk Management Policy

As a company engaged in the trading sector, PT PPI recognizes that risk is an integral part of every operational activity and can impact the Company's business results and performance. By implementing risk management in every activity of the Company, the identification and handling of challenges, obstacles, and constraints in the implementation of the Company's work plan can be properly mitigated, enabling the impact of risks that arise in the Company's activities to be minimized. In its practice, PT PPI refers to the principles, frameworks, and processes of risk management based on ISO 31000: 2018, as part of an effort to ensure a systematic, structured, and effective risk management process. In addition, the implementation of risk management is also an essential part of the implementation of sustainable Good Corporate Governance (GCG), in supporting integrity, accountability, and the achievement of the Company's strategic objectives. Thus, the Company's mission can be effectively implemented, and its vision can be achieved according to the set targets.

The Board of Directors has established the Corporate Risk Management Guidelines, which are intended to guide the establishment of risk contexts and criteria, conduct risk assessments, monitor, evaluate, and report on risk management, aimed at achieving the Company's objectives, as a form of its commitment to implementing risk management across the organization in a comprehensive and integrated manner. These risk management guidelines are outlined in Board of Directors Regulation Number 36/PERDIR/PPI/XII/2024 concerning Strategic Management Guidelines for PT PPI's Risk Management.

The Risk Management Guidelines are generally outlined as follows:

- All work units within PPI are required to implement risk management for all business activities and for the benefit of the Company;
- The Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees are required to implement integrated risk management (*Enterprise Risk Management*);
- Risk Management is an integral part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG);
- All work units are to be involved in the process of identifying, analyzing, evaluating, controlling, and monitoring risks, integrated with the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for each fiscal year;

- e. Pengelolaan risiko merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) semua unit kerja di lingkungan PT PPI.

- e. Risk Management is one of the Key Performance Indicators (KPIs) for all work units within PT PPI.

Kebijakan Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2018.

Risk Management Policy

The Risk Management Principles applied by PPI refer to ISO 31000:2018.

01

TERINTEGRASI - INTEGRATED

Manajemen Risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan aktivitas Perusahaan.
Risk Management is an integrated part of all Company activities.



02

TERSTRUKTUR DAN KOMPREHENSIF - STRUCTURED AND COMPREHENSIVE

Dalam pelaksanaannya Perusahaan melakukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.
In its practice, the Company takes a structured and comprehensive approach to deliver consistent and comparable outcomes.



03

DAPAT DISESUAIKAN - CUSTOMIZABLE

Kerangka kerja Manajemen Risiko dan prosesnya dapat disesuaikan dan menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal Perusahaan terkait sasarnya.
The Risk Management framework and processes can be tailored and adapted to the Company's external and internal context related to its objectives.



04

INKLUSIF - INCLUSIVE

Kesesuaian waktu dan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan terkait dengan pengetahuan, pandangan, persepsi harus selalu dipertimbangkan. Hasil dari kegiatan ini adalah perbaikan kesadaran dan terinformasinya kegiatan pengelolaan risiko.
The appropriateness of time and the involvement of each stakeholder in terms of knowledge, perspectives, and perceptions shall always be considered. The result of this activity is improved awareness and information on risk management activities.



05

DINAMIS - DYNAMIC

Risiko yang dapat muncul, berubah, dan hilang seiring dengan perubahan konteks serta kondisi lingkungan internal dan eksternal Perusahaan. Penerapan pengelolaan risiko harus dipastikan mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon terhadap perubahan dengan cara yang sesuai dan waktu yang tepat.
Risks that are able to arise, change, and disappear as the Company's internal and external context and environmental conditions change. Risk management implementation must ensure that it anticipates, detects, acknowledges, and responds to changes appropriately and in a timely manner.



06

BERDASARKAN PADA INFORMASI TERBAIK YANG TERSEDIA BASED ON THE BEST AVAILABLE INFORMATION

Pelaksanaan Manajemen Risiko telah menerima masukan dan informasi berdasarkan data historis dan informasi saat ini dan juga harapan di masa mendatang. Penerapan pengelolaan risiko secara eksplisit mengambil informasi terkait batasan dan ketidakpastian terkait dengan informasi dan ekspektasi secara tepat waktu, jelas dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.
Risk Management implementation has received input and information based on historical data, current information, and future expectations. The implementation of risk management explicitly incorporates information regarding limitations and uncertainties related to information and expectations in a timely, clear and available manner to relevant stakeholders.





07

FAKTOR MANUSIA DAN BUDAYA - HUMAN AND CULTURAL FACTORS

Perilaku manusia dan faktor budaya bisa secara signifikan memberi pengaruh terhadap seluruh aspek dalam Manajemen Risiko pada setiap tingkatan Perusahaan.

Human behavior and cultural factors can significantly affect all aspects of Risk Management at every level of the Company.



08

PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN - CONTINUOUS IMPROVEMENT

Kegiatan Manajemen Risiko secara berkesinambungan diperbaiki melalui pembelajaran dan Langkah terbaik yang harus diambil.

Risk Management activities are continuously improved through learning and by taking the best steps.



Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2009

The Risk Management Principles Applied by PPI refer to ISO 31000: 2009

Prinsip Manajemen Risiko Principles of Risk Management	Penjelasan Description
Menciptakan Nilai Tambah Creating Added Value	Manajemen Risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan performansi perusahaan. Risk management contributes to achieving goals and improving company's performance.
Bagian Terpadu dari Proses Organisasi Integrated Part of the Organizational Process	Manajemen Risiko bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, terpisah dari aktivitas dan proses utama perusahaan, namun menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian penting dari perusahaan. Risk management is not a stand-alone activity, separate from the company's main activities and processes, but is a part of management responsibility and an important part of the company.
Bagian dari Pengambilan Keputusan As a Part of Decision Making	Manajemen Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan yang terinfo, memprioritaskan aksi dan membedakan antar beberapa pilihan jalur alternatif. Risk Management helps decision makers get informed choices, prioritize actions and differentiate between alternative pathway options.
Secara Eksplisit Menangani Ketidakpastian Dealing with Uncertainty Explicitly	Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat ketidakpastian tersebut dan cara menangani ketidakpastian tersebut. Risk Management explicitly takes into account uncertainty, the nature of the uncertainty and the way it is handled.
Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Tepat Waktu Systematic, Structured and in Timely Manner	Pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu pada manajemen risiko membantu efisiensi dan mendapatkan hasil yang konsisten, komparabel dan reliabel. A systematic, structured and timely approach to risk management helps efficiency and produces consistent, comparable and reliable results.
Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia Based on the Best Available Information	Masukan proses manajemen risiko berdasarkan pada sumber informasi seperti data historis, pengalaman umpan balik <i>stakeholders</i> , pengamatan, perkiraan, dan pertimbangan pakar. Input of the risk management process based on sources of information such as historical data, stakeholder feedback experiences, observations, estimates, and expert judgment.
Disesuaikan Customized	Manajemen Risiko diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal perusahaan, beserta profil risiko perusahaan. Risk management is aligned with the company's internal and external context, as well as the company's risk profile.
Mempertimbangkan Faktor Manusia dan Budaya Considering Human and Cultural Factors	Manajemen Risiko mempertimbangkan kemampuan persepsi dan tujuan manusia, baik di dalam maupun di luar perusahaan, baik yang dapat memudahkan maupun menyulitkan pencapaian tujuan perusahaan. Risk Management considers the ability of perceptions and human goals, both inside and outside the company, which can facilitate or complicate the achievement of company's goals.

Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2009

The Risk Management Principles Applied by PPI refer to ISO 31000: 2009

Prinsip Manajemen Risiko Principles of Risk Management	Penjelasan Description
Bersifat Transparan dan Inklusif Be Transparent and Inclusive	Keterlibatan secara tepat waktu <i>stakeholder</i> dan khususnya pengambil keputusan pada seluruh tingkatan perusahaan memasukan manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Timely involvement of stakeholders and particularly decision makers at all levels of the company to make risk management remains relevant and current.
Bersifat Dinamis, Berulang, dan Responsif terhadap Perubahan Be Dynamic, Repetitive, and Responsive to Change	Manajemen Risiko terus-menerus merasakan dan merespon perubahan. Risk Management is continually sensing and responding to change.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerja manajemen risiko. Untuk itu, Perusahaan telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif.

Kerangka kerja manajemen risiko diperlukan sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas manajemen risiko di semua tingkatan perusahaan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerangka kerja manajemen untuk menyediakan pedoman yang diterapkan pada keseluruhan level perusahaan.

Kerangka kerja memastikan informasi tentang risiko yang diturunkan dari proses manajemen risiko dilaporkan secara layak dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta akuntabilitas pada seluruh tingkatan perusahaan.

Adapun skema kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risk Management Framework

The success of implementing risk management depends on the effectiveness of risk management work. Therefore, the Company has developed a risk management framework to ensure that risk management implementation can proceed effectively.

The risk management framework is needed as the basis for implementing all risk management activities at all levels of the company. The success of risk management implementation depends on the effectiveness of the management framework to provide guidelines applied at all levels of the company.

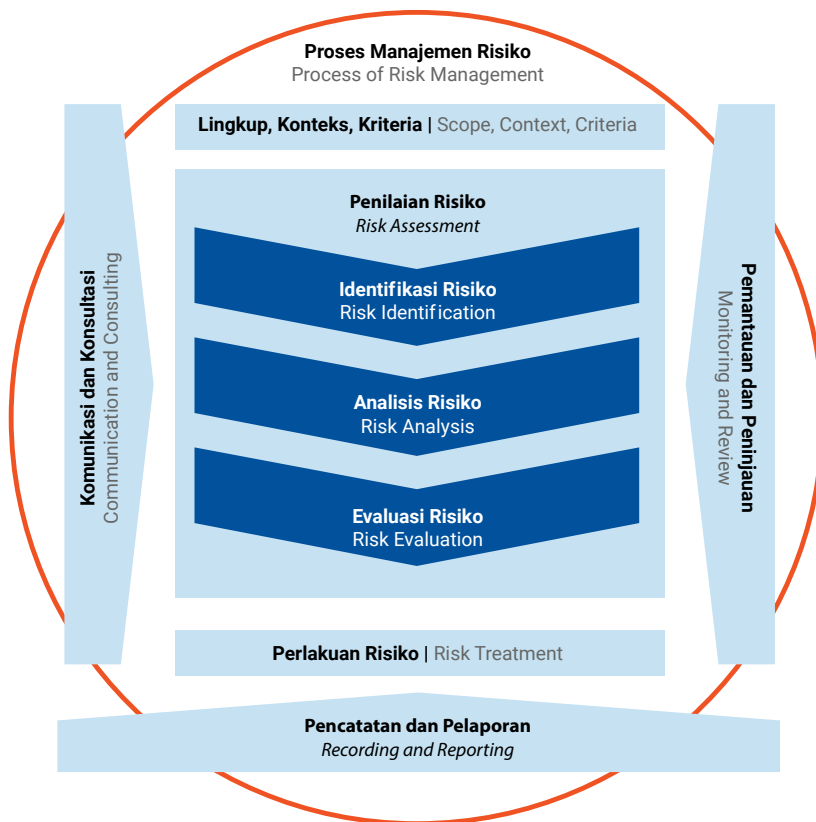
The framework ensures that information about risks derived from the risk management process is reported appropriately and used as the basis for decision-making and accountability at all levels of the company.

The Company's Risk Management Framework scheme is as follows:



Proses Manajemen Risiko

Process of Risk Management



Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko di PPI dimulai dari penetapan konteks dengan mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan sekitar sasaran yang akan dicapai, *stakeholder* yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko. Kemudian dilakukan asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko serta perlakuan risiko yang dilakukan dengan perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Adapun proses komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Selanjutnya, proses monitoring dan *review* dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan serta dengan audit manajemen risiko. Proses monitoring dan *review* dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari kebijakan pelaksanaan manajemen sehingga Manajemen dapat melakukan pembaharuan terhadap kebijakan manajemen risiko.

Strategi Risiko

A. Risk Appetite Statement

Selera risiko (*risk appetite*) adalah keputusan penerimaan/penolakan terhadap risiko yang masih ada setelah dilakukannya suatu penanganan risiko tertentu (*residual risk*). Keputusan terkait selera risiko (*risk appetite*) adalah kewenangan Direksi yang didelegasikan kepada para *risk owner*. *Risk appetite statement* terdiri dari:

Process of Risk Management

The risk management process at PPI starts from setting the context by identifying and disclosing organizational goals, the environment around the targets to be achieved, interested stakeholders and the diversity of risk criteria. Then it is conducted a risk assessment consisting of identification, analysis and evaluation of risks and risk treatment done by planning for mitigating risks to obtain alternative solutions so that they can be applied effectively and efficiently.

The process of communication and consultation is conducted to ensure the availability of adequate support for each risk management activity and to enable each activity to achieve its targets precisely.

Furthermore, the monitoring and review process is performed through evaluation and examination of ongoing business processes as well as by risk management audits. The monitoring and review process can be done by internal and external parties with the aim of finding out the weaknesses of management implementation policies so that management can make updates to risk management policies.

Risk Strategy

A. Risk Appetite Statement

Risk appetite is the decision to accept or reject risks that remain after certain risk management (*residual risk*) has been implemented. Decisions regarding risk appetite are the responsibility of the Board of Directors and delegated to the risk owners. The risk appetite statement consists of:

Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Pernyataan Selera Risiko PT PPI Risk Appetite Statement PT PPI
Tidak Toleran Intolerant	Perusahaan tidak memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kerusakan terhadap lingkungan dan perlindungan data pribadi. The Company does not provide room for violations of laws and regulations including damage to the environment and protection of personal data.
Konservatif Conservative	- Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. - Perusahaan menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik. - Perusahaan berhati-hati dalam mengambil risiko keuangan dan operasional. - The Company fulfills its financial obligations and maintains a healthy financial structure and maintains sustainable business continuity. - The Company carries out its main business activities in a timely manner, on target and in good faith. - The Company is careful in taking financial and operational risks.



Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Pernyataan Selera Risiko PT PPI Risk Appetite Statement PT PPI
Moderat Moderate	- Perusahaan melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur. - Perusahaan mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersama dan dapat menanggung beban yang sedang. - Perusahaan menjalankan penugasan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak risiko keuangan, operasional dan legal & kepatuhan. - The Company optimizes the management of market and macroeconomic volatility by accepting the consequences of the burden in a measurable manner. - The Company considers growth opportunities and risk impacts together and can bear moderate burdens. - The Company carries out government assignments by considering the impact of financial, operational and legal & compliance risks.
Strategis Strategic	- Perusahaan mengambil risiko yang lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar. - Perusahaan melakukan peningkatan optimalisasi aset untuk perbaikan likuiditas. - Keputusan bisnis didasarkan pada analisa risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar. - Companies take higher risks in order to achieve greater growth and innovation. - The company is increasing asset optimization to improve liquidity. - Business decisions are based on risk analysis and potential long-term investment returns and can bear large burdens.

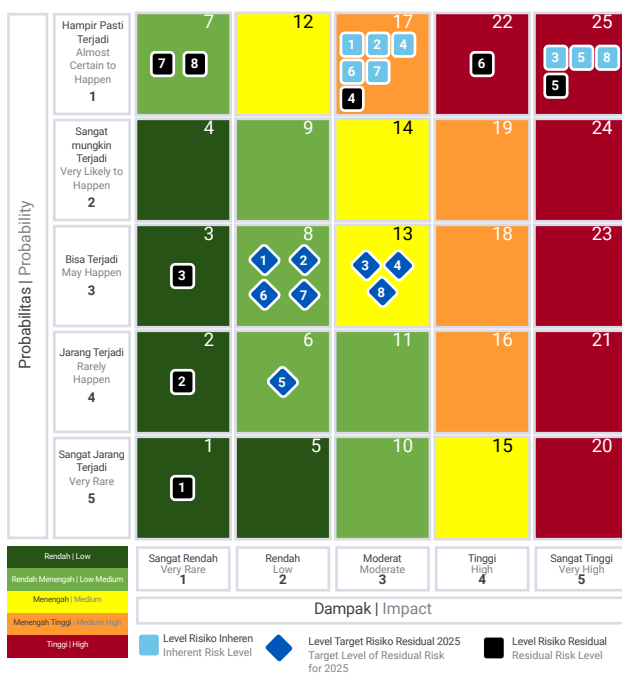
Peta Risiko

Terdapat 8 (delapan) risiko utama perusahaan pada tahun 2025 yang dituangkan dalam peta risiko sebagaimana penilaian risiko sampai dengan bulan Desember 2025 sebagai berikut:

- 01** Kegagalan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan portofolio produk. | Company failure in managing product portfolio.
- 02** Kontribusi laba kotor komoditi tidak dapat mencapai target RKAP. | Gross profit contribution from commodities is below the RKAP target.
- 03** Kegagalan perusahaan mendanai kebutuhan jangka pendek. | The Company's failure to increase short-term needs.
- 04** Pencapaian optimalisasi aset melalui skema kerja sama di bawah target. | Achievement of asset optimization through cooperation schemes is achieved below the target.
- 05** Kehilangan hak atas aset tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang dimiliki oleh Perusahaan. | Loss of rights to fixed assets (land and buildings) owned by the Company.
- 06** Pembekuan atau tidak terbitnya perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. | Suspending or non-issuance of permits related to the Company's business activities.
- 07** Kurangnya kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas SDM. | Inadequate human resource capacity, competence, and capability.
- 08** Belum optimalnya sistem ERP untuk menghasilkan *dashboard data analytic* yang akurat dan tepat waktu. | ERP system is less optimal in producing accurate and timely data analytics dashboards.

Risk Map

There were 8 (eight) main risks of the Company in 2025, outlined in the risk map, as outlined in the risk assessment as of December 2025, as follows:



Risiko Utama dan Mitigasinya

1. Kegagalan Perusahaan dalam melakukan Pengelolaan Portofolio Produk

Perusahaan memiliki berbagai macam kategori produk yang diperdagangkan, kategori produk yang berbeda tersebut memiliki karakteristik bisnis yang tidak saling terkait di masing – masing kategori usahanya. Hal tersebut berpotensi bahwa Perusahaan akan gagal dalam melakukan portofolio produk yang disebabkan oleh belum adanya strategi bisnis yang memadai di masing – masing kategori produk. Per triwulan IV tahun 2025, Perusahaan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp6.950,33 M (enam triliun sembilan ratus lima puluh koma tiga tiga miliar rupiah) atau 193,02% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada periode yang sama.

Perusahaan telah menyusun rencana penanganan dengan tujuan kendala yang ada dapat dimitigasi dengan baik agar risiko dapat diminimalisasi seperti di antaranya menyusun strategi bisnis pada setiap komoditi, pengembangan kedistributoran komoditi di kantor cabang, penguatan sinergi klaster pangan, pengembangan *channel* penjualan, penguatan analisa data pasar.

Per triwulan IV tahun 2025, penanganan yang telah dilakukan oleh Perusahaan untuk memitigasi kendala yang ada adalah sebagai berikut:

- Telah mendapatkan persetujuan Direksi atas *pilot project program spot worker* untuk *regional* Jakarta, Makassar, dan Surabaya, saat ini telah dilakukan pengikatan kontrak kerja *outsourcing* untuk *spot worker* di Cabang Makassar dan Surabaya. Untuk cabang Jakarta, akan di-*carry over* ke tahun 2026 dengan penambahan kembali di 4 *regional*, sehingga direncanakan pada tahun 2026 masing – masing regional memiliki 1 *spot worker*;
- Telah terealisasi penjualan produk kaporit di Cabang Makassar dan produk tawas di Cabang Madiun sebagai produk kimia umum non sakarin;
- Proses penyusunan skema harga kedistributoran pestisida Dharmabrand untuk saluran distribusi melalui R1 dan R2 akan di-*carry over* ke tahun 2026;
- Telah mendapatkan persetujuan penambahan kedistributor-an produk infus Satoria dari 15 cabang menjadi 27 cabang di tahun 2025;
- Status ke-distributor-an produk vaksin Biofarma bertambah dari 14 cabang menjadi 17 cabang;
- Telah dilakukan penyaluran produk herbisida Dharmabrand kepada PT PG Rajawali II dan masih

Main Risks and Mitigation

1. Company failure in managing product portfolio

The Company has various product categories that are traded, these different product categories have business characteristics that are not related to each other in each business category. This has the potential that the Company will fail in implementing its product portfolio due to the lack of an adequate business strategy in each product category. As of the fourth quarter of 2025, the Company recorded consolidated revenue of Rp6,950.33 billion (six trillion nine hundred fifty point three three billion rupiah) or 193.02% compared to the target set for the same period.

The company has prepared a handling plan with the aim that existing obstacles can be properly mitigated so that risks can be minimized, including developing business strategies for each commodity, developing commodity distributorships in branch offices, strengthening food cluster synergies, developing sales channels, strengthening market data analysis.

As of the fourth quarter of 2025, the actions taken by the Company to mitigate existing obstacles are as follows:

- Having received approval from the Board of Directors for the spot worker program pilot project for the Jakarta, Makassar and Surabaya regions, currently outsourcing work contracts have been signed for spot workers in the Makassar and Surabaya Branches. For the Jakarta branch, it will be carried over to 2026 with additional additions in 4 regions, so that in 2026 it is planned that each region will have 1 spot worker;
- Sales of chlorine products have been realized in the Makassar Branch and alum products in the Madiun Branch as non-saccharin general chemical products;
- The process of preparing the Dharmabrand pesticide distribution price scheme for distribution channels via R1 and R2 will be carried over to 2026;
- Has received approval to increase distribution of Satoria infusion products from 15 branches to 27 branches in 2025;
- Biofarma vaccine product distribution status increased from 14 branches to 17 branches;
- Dharmabrand herbicide products have been distributed to PT PG Rajawali II and are still in the



dalam proses peninjauan sinergi penyaluran pupuk dan pestisida lainnya untuk kebutuhan pabrik gula PT PG Rajawali II;

- g. Dalam proses pembahasan yang diinisiasi oleh *Holding ID FOOD* terkait dengan penyaluran gula dari pabrik gula ID FOOD Group dengan skema *dropship*;
- h. Telah dilakukan pengembangan saluran penjualan untuk men-*supply* program Pemerintah makan sehat bergizi untuk komoditi beras, minyak goreng, sabun cuci piring, dan tepung;
- i. Telah dilakukan ekspor produk gum damar dan damar batu ke India, produk kopi ke Mesir, serta produk Kemenyan ke Sudan;
- j. Telah dilakukan kegiatan Operasi Pasar di 11 cabang dan saat ini sudah tidak terdapat kegiatan Operasi Pasar;
- k. Telah memasok bahan pokok ke KDKMP yang ada di 24 cabang;
- l. Telah bekerja sama dengan PT Mitra Dagang Madani untuk *supply* produk PPI ke Warung Mekaar di Cabang Cirebon;
- m. Seluruh cabang telah ditunjuk oleh Bulog untuk menyalurkan beras SPHP;
- n. Telah dilakukan *update* setiap bulan yang dapat ditampilkan pada *dashboard* Samantha terkait fluktuasi harga pasar untuk produk bahan pokok;
- o. Laporan *update* fluktuasi harga produk pesaing pestisida direncanakan dilaporkan kepada divisi yang membidangi penjualan pestisida setiap 3 bulan oleh Divisi Perdagangan Internasional dan Pemasaran.

process of exploring synergies in the distribution of fertilizers and other pesticides for the needs of the PT PG Rajawali II sugar factory;

- g. In the discussion process initiated by Holding ID FOOD regarding the distribution of sugar from the ID FOOD Group sugar factory using a dropship scheme;
- h. Sales channels have been developed to supply the Government's healthy nutritious eating program for the commodities rice, cooking oil, dishwashing soap and flour;
- i. Exports of gum resin and stone resin products have been carried out to India, coffee products to Egypt, and Frankincense products to Sudan;
- j. Market Operation activities have been carried out in 11 branches and currently there are no Market Operation activities;
- k. Has supplied basic materials to KDKMP in 24 branches;
- l. Has collaborated with PT Mitra Dagang Madani to supply PPI products to Warung Mekaar in the Cirebon Branch;
- m. All branches have been appointed by Bulog to distribute SPHP rice;
- n. Updates have been made every month which can be displayed on Samantha's dashboard regarding market price fluctuations for basic commodity products;
- o. Updated reports on price fluctuations of competing pesticide products are planned to be reported to the division in charge of pesticide sales every 3 months by the International Trade and Marketing Division.

2. Kontribusi Laba Kotor Komoditi tidak dapat mencapai Target RKAP

Perusahaan telah menetapkan target atas kegiatan usaha, namun berpotensi tidak tercapainya target tersebut sehingga penilaian kinerja Perusahaan akan berdampak kurang baik. Hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya kegiatan operasional Perusahaan atas pencapaian target *gross profit* yang telah ditetapkan. Pada triwulan IV tahun 2025, realisasi gross profit Perusahaan sebesar Rp482,08 M (empat ratus delapan puluh dua koma nol delapan miliar rupiah) atau 125,70% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada periode yang sama.

Perusahaan telah menyusun rencana penanganan apabila terjadi kendala pada waktu berjalan yaitu penyusunan *pricing strategy*, penyusunan program perbaikan harga pokok penjualan dan *sourcing strategic* untuk menjaga kontinuitas *supply*, penambahan SKU dan pengembangan produk.

2. Commodity Gross Profit Contribution cannot reach the RKAP Target

The Company has set targets for business activities, but there is a potential that these targets will not be achieved so that the Company's performance assessment will have an unfavorable impact. This is influenced by the Company's less than optimal operational activities in achieving the gross profit targets that have been set. In the fourth quarter of 2025, the Company's gross profit realization was Rp482.08 billion (four hundred eighty-two point zero eight billion rupiah) or 125.70% compared to the target set in the same period.

The company has prepared a handling plan if problems occur during running time, namely preparing a pricing strategy, preparing a program to improve the cost of goods sold and strategic sourcing to maintain continuity of supply, adding SKUs and product development.

Pada triwulan IV tahun 2025, penanganan yang telah dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penyesuaian harga jual untuk tahun 2025 dengan memperhatikan fluktuasi harga pasar kompetitor di tahun 2024;
- b. Pemanfaatan diskon maksimal dari *principal* untuk menetapkan harga jual;
- c. Penyusunan standarisasi ongkos angkut komoditi Dalam Negeri serta biaya operasional berdasarkan FGD dalam rapat kerja Perusahaan dan akan di-*carry over* pada tahun 2026;
- d. Telah bekerja sama untuk *supply* minyak goreng kemasan Minyakita dengan beberapa pemasok untuk memasok di beberapa wilayah;
- e. Dalam proses penjjajakan dengan PT Garam untuk stok garam industri;
- f. Telah bekerja sama dengan PT Bintang Timur Pasifik untuk produk pupuk non subsidi (dolomite);
- g. Telah terdapat penambahan wilayah kerja sama dengan PT Doa Bangsa Agrobisnis untuk produk benih jagung di wilayah Gorontalo;
- h. Telah bekerja sama dengan PT Home Carbon Indonesia untuk *supply* produk karbon aktif.

3. Kegagalan Perusahaan Mendanai Kebutuhan Jangka Pendek

Dalam kondisi tertentu, proses pembayaran dari customer kepada Perusahaan dilakukan secara kredit. Namun masih kurangnya *customer* yang melakukan pelunasan hutang sesuai dengan tempo pembayaran yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan terkait penjualan secara kredit tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan adanya keterlambatan koleksi piutang/piutang tak tertagih.

Perusahaan telah menyusun rencana penanganan untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi bisnis pada setiap kelompok komoditi;
- b. Pengembangan *channel* penjualan;
- c. Penyusunan program perbaikan harga pokok penjualan;
- d. Melakukan evaluasi kecukupan kebijakan pengelolaan piutang usaha menyesuaikan kondisi lingkungan bisnis;
- e. Penurunan tingkat piutang usaha dengan melakukan *soft* dan *hard collection* atas piutang jatuh tempo;
- f. Melakukan *business matching* komoditi dengan fasilitas perbankan atau lembaga keuangan sebagai upaya mendapatkan fasilitas perbankan;
- g. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan termin kredit pembayaran yang optimal terhadap termin kredit penjualan Perusahaan;

In the fourth quarter of 2025, the handling carried out by the Company is as follows:

- a. Selling prices have been adjusted for 2025 by taking into account fluctuations in competitors' market prices in 2024;
- b. Utilization of maximum discounts from the principal to determine the selling price;
- c. Preparation of standardization of domestic commodity transportation costs and operational costs based on FGDs at Company work meetings and will be carried over in 2026;
- d. Has collaborated to supply Minyakita packaged cooking oil with several suppliers to supply in several regions;
- e. In the process of exploring with PT Garam for industrial salt stock;
- f. Has collaborated with PT Bintang Timur Pasifik for non-subsidized fertilizer products (dolomite);
- g. There has been an additional cooperation area with PT Doa Bangsa Agrobisnis for corn seed products in the Gorontalo area;
- h. Has collaborated with PT Home Carbon Indonesia to supply active carbon products.

3. Company Failure to Fund Short Term Needs

Under certain conditions, the payment process from customers to the Company is carried out on credit. However, there is still a lack of customers who pay off their debts according to the predetermined payment period. This was caused by the provisions relating to sales on credit not being implemented properly and delays in collecting receivables/uncollectible receivables.

The company has prepared a handling plan to overcome these obstacles as follows:

- a. Develop business strategies for each commodity group;
- b. Sales channel development;
- c. Preparation of cost of goods sold improvement program;
- d. Evaluate the adequacy of business receivables management policies according to business environmental conditions;
- e. Reducing the level of trade receivables by carrying out soft and hard collections on overdue receivables;
- f. Carry out business matching of commodities with banking facilities or financial institutions in an effort to obtain banking facilities;
- g. Negotiating to obtain optimal payment credit terms for the Company's sales credit terms;



- h. Penyelesaian kewajiban perbankan dengan penjualan aset.

Per triwulan IV tahun 2025, penanganan yang telah dilakukan untuk memitigasi risiko sebagai berikut:

- a. Telah mendapatkan persetujuan Direksi atas *pilot project program spot worker* untuk *regional* Jakarta, Makassar, dan Surabaya, saat ini telah dilakukan pengikatan kontrak kerja *outsourcing* untuk *spot worker* di Cabang Makassar dan Surabaya. Untuk cabang Jakarta, akan di-*carry over* ke tahun 2026 dengan penambahan kembali di 4 *regional*, sehingga direncanakan pada tahun 2026 masing-masing *regional* memiliki 1 *spot worker*;
- b. Telah terealisasi penjualan produk kaporit di Cabang Makassar dan produk tawas di Cabang Madiun sebagai produk kimia umum non sakarin;
- c. Telah dilakukan pengembangan saluran penjualan untuk men-*supply* program Pemerintah makan sehat bergizi untuk komoditi beras, minyak goreng, sabun cuci piring, dan tepung;
- d. Telah dilakukan ekspor produk gum damar dan damar batu ke India, produk kopi ke Mesir, serta produk Kemenyan ke Sudan;
- e. Telah dilakukan kegiatan Operasi Pasar di 11 cabang dan saat ini sudah tidak terdapat kegiatan Operasi Pasar;
- f. Telah memasok bahan pokok ke KDKMP yang ada di 24 cabang;
- g. Telah bekerja sama dengan PT Mitra Dagang Madani untuk *supply* produk PPI ke Warung Mekaar di Cabang Cirebon;
- h. Penyusunan standarisasi ongkos angkut komoditi Dalam Negeri serta biaya operasional berdasarkan FGD dalam rapat kerja Perusahaan dan akan di-*carry over* pada tahun 2026;
- i. Memastikan penerapan SE Direksi Nomor 014/DKMRSU/SE/PPI/XI/2024 perihal standarisasi formulir penagihan piutang dan penerimaan jaminan piutang, guna memaksimalkan proses penagihan piutang pelanggan;
- j. Strategi penanganan piutang yang dilakukan di antaranya:
 - 1) *Soft Collection* dilakukan untuk aging piutang lancar (0 – 60 hari) dengan melakukan desk call bersama tim penagihan Kantor Cabang guna me-monitor progres penyelesaian penagihan piutang, untuk aging piutang dalam perhatian khusus (61 – 180 hari) *desk call* dilakukan secara aktif kepada konsumen agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran atas piutang yang terbentuk;

- h. Settlement of banking obligations by selling assets.

As of the fourth quarter of 2025, the following measures have been taken to mitigate risks:

- a. Having received approval from the Board of Directors for the spot worker program pilot project for the Jakarta, Makassar and Surabaya regions, currently outsourcing work contracts have been signed for spot workers in the Makassar and Surabaya Branches. For the Jakarta branch, it will be carried over to 2026 with additional additions in 4 regions, so that in 2026 it is planned that each region will have 1 spot worker;
- b. Sales of chlorine products have been realized in the Makassar Branch and alum products in the Madiun Branch as non-saccharin general chemical products;
- c. Sales channels have been developed to supply the Government's healthy nutritious eating program for the commodities rice, cooking oil, dishwashing soap and flour;
- d. Exports of gum resin and stone resin products have been carried out to India, coffee products to Egypt, and Frankincense products to Sudan;
- e. Market Operation activities have been carried out in 11 branches and currently there are no Market Operation activities;
- f. Has supplied basic materials to KDKMP in 24 branches;
- g. Has collaborated with PT Mitra Dagang Madani to supply PPI products to Warung Mekaar in the Cirebon Branch;
- h. Preparation of standardization of domestic commodity transportation costs and operational costs based on FGDs at Company work meetings and will be carried over in 2026;
- i. Ensure the implementation of Directors' SE Number 014/DKMRSU/SE/PPI/XI/2024 regarding standardization of receivables collection forms and receipt of receivable guarantees, in order to maximize the customer receivables collection process;
- j. Receivables handling strategies include:
 - 1) Soft Collection is carried out for current aging receivables (0 – 60 days) by making a desk call with the Branch Office billing team to monitor the progress of receivables collection settlement, for aging receivables under special attention (61 – 180 days) desk calls are made actively to consumers to immediately complete payment obligations for the receivables formed;

2) <i>Hard Collection</i> dilakukan untuk <i>aging</i> piutang diragukan (181 – 365 hari) sampai dengan <i>aging</i> Piutang Macet (>365 hari) maupun untuk nasabah pada <i>aging</i> sebelumnya yang sudah tidak kooperatif. Kegiatan <i>hard collection</i> dilakukan oleh kolektor Kantor Pusat yang berkoordinasi dengan unit kerja Kantor Cabang; k. Telah ditandatangani persetujuan perpanjangan kredit antara Bank BCA dengan PT PPI; l. Dalam proses negosiasi terkait termin pembayaran kepada <i>supplier-supplier</i> untuk kerja sama di tahun 2026; m. Belum terdapat proses penyelesaian kewajiban perbankan dengan opsi penjualan aset untuk melunasi kewajiban.	2) <i>Hard Collection</i> is carried out for <i>aging</i> doubtful receivables (181 – 365 days) up to <i>aging</i> Bad Debts (>365 days) as well as for customers in the previous <i>aging</i> who are no longer cooperative. <i>Hard collection</i> activities are carried out by Head Office collectors in coordination with Branch Office work units; k. A credit extension agreement has been signed between BCA Bank and PT PPI; l. In the negotiation process regarding payment terms to suppliers for cooperation in 2026; m. There is no process for resolving banking obligations with the option of selling assets to pay off obligations.
4. Pencapaian Optimalisasi Pendapatan Properti melalui Skema Kerja Sama di bawah target Pada triwulan IV tahun 2025, Perusahaan mencatatkan pendapatan dari optimalisasi properti sebesar Rp23,23 Miliar (dua puluh tiga koma dua tiga miliar rupiah) atau 63,61% dibandingkan dengan target periode yang sama triwulan IV tahun 2025. Rencana penanganan yang ditetapkan Perusahaan yaitu optimalisasi aset dengan skema jangka pendek dengan melakukan pemasaran aset – aset idle melalui program desentralisasi cabang dan kerja sama dengan agen properti serta melakukan optimalisasi aset jangka panjang dengan skema <i>Build, Operate, Transfer</i> (BOT); <i>Build, Transfer, Operate</i> (BTO) atau skema lain yang relevan dengan memperhatikan kondisi aset Perusahaan.	4. Achievement of Optimization of Property Income through Cooperation Schemes below the target In the fourth quarter of 2025, the Company recorded revenue from property optimization of Rp23.23 billion (twenty three point two three billion rupiah) or 63.61% compared to the target for the same period in the fourth quarter of 2025. The handling plan set by the Company is optimizing assets using a short-term scheme by marketing idle assets through a branch decentralization program and collaborating with property agents as well as optimizing long-term assets using a Build, Operate, Transfer (BOT) scheme; Build, Transfer, Operate (BTO) or other relevant schemes taking into account the condition of the Company's assets.
Per triwulan IV tahun 2025, penanganan yang telah dilakukan untuk memitigasi risiko sebagai berikut: a. Telah dilakukan penandatanganan sewa menyewa aset di 23 titik; b. Penjajakan kerja sama dengan Waringin Group Hotel untuk pengembangan Aset CTC di Jl. Kramat Raya No. 94-06 Jakarta Pusat di-<i>hold</i> dikarenakan pihak Waringin sedang fokus pengembangan lainnya; c. Dalam proses pengosongan lahan Jl. Kramat Raya No. 69,71,71A, Jakarta Pusat yang saat ini masih diduduki pihak ketiga, dimana lahan tersebut akan digunakan untuk kerja sama pembangunan SPBU.	As of the fourth quarter of 2025, the following measures have been taken to mitigate risks: a. Asset leases have been signed at 23 points; b. Exploring cooperation with Waringin Group Hotel to develop CTC assets on Jl. Kramat Raya No. 94-06 Central Jakarta is on hold because Waringin is focusing on other developments; c. In the process of clearing land on Jl. Kramat Raya No. 69,71,71A, Central Jakarta which is currently still occupied by a third party, where the land will be used for cooperation in building gas stations.
5. Kehilangan Hak atas Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) yang dimiliki oleh Perusahaan Perusahaan memiliki ratusan titik aset yang tersebar di seluruh Indonesia, beberapa di antaranya diperuntukkan sebagai kantor dan juga gudang penyimpanan. Namun banyak juga aset yang dimiliki	5. Loss of rights to immovable assets (land and buildings) owned by the company The company has hundreds of asset points spread throughout Indonesia, some of which are designated as offices and storage warehouses. However, many of the assets owned are not occupied or controlled by



tersebut tidak ditempati maupun dikuasai oleh pihak ketiga, di antaranya mantan karyawan, masyarakat, dan juga instansi Pemerintahan. Hal tersebut berpotensi bahwa Perusahaan akan kehilangan hak atas aset yang dimiliki apabila tidak dilakukan pengamanan terhadap aset tersebut, terutama yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Perusahaan telah menyusun rencana penanganan untuk meminimalisasi dampak atas keterjadian risiko dengan melaksanakan program pengamanan administrasi dan fisik aset. Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan penanganan dengan melakukan:

- a. Sedang dalam proses rekonsiliasi antara data yang dikelola oleh Divisi Aset dan K3LL dengan data pencatatan akuntansi baik *on balance sheet* dan *off balance sheet* untuk menjadi database induk yang valid;
- b. Telah selesai dilakukan pengembangan dan penyempurnaan fitur yang ada di Monalisa sesuai dengan kebutuhan *user*, hal ini mempermudah *user* pada saat mengakses dan mengelola data aset dalam memberikan laporan database yang *update* meliputi:
 - 1) *Dashboard Summary* (Informasi aset secara umum);
 - 2) *Mapping Aset* (Persebaran aset tanah di seluruh cabang PT PPI);
 - 3) *Monitoring progress* sertifikasi aset (Pembaharuan, Perpanjangan dan Ganti Nama);
- c. *Progress* pengamanan aset (16 titik):
 - 1) Persiapan berkas: 1 titik
 - 2) Surat klarifikasi ke penghuni/instansi terkait: 3 titik
 - 3) Sosialisasi/audiensi: 5 titik
 - 4) Mediasi: 6 titik
 - 5) Pengosongan: 0 titik
 - 6) Selesai: 1 titik;
- d. *Progress* sertifikasi aset (64 titik):
 - 1) Persiapan berkas pengukuran: 11 titik
 - 2) Pendaftaran izin PKKPR: 13 titik
 - 3) Pembuatan sporadik/ Pernyataan bidang: 14 titik
 - 4) Pendaftaran pengukuran: 7 titik
 - 5) Pengukuran: 5 titik
 - 6) Terbit peta bidang: 9 titik
 - 7) Permohonan SK Hak: 1 titik
 - 8) *Survey* panitia A: 1 titik
 - 9) Terbit SK Hak: 1 titik
 - 10) Pendaftaran SK Hak untuk penerbitan sertifikat: 0 titik
 - 11) Pembayaran BPHTB/BNBP: 1 titik
 - 12) Terbit sertifikat: 1 titik

third parties, including former employees, the public and also government agencies. This has the potential that the Company will lose rights to the assets it owns if these assets are not secured, especially those controlled by third parties.

The company has prepared a handling plan to minimize the impact of risks by implementing an administrative and physical asset security program. Up to the fourth quarter of 2025, handling has been carried out by carrying out:

- a. Currently in the process of reconciling data managed by the Asset and K3LL Division with accounting data both on balance sheet and off balance sheet to become a valid master database;
- b. The development and refinement of existing features in Monalisa has been completed according to user needs, this makes it easier for users to access and manage asset data in providing updated database reports including:
 - 1) *Dashboard Summary* (general asset information);
 - 2) *Asset Mapping* (Distribution of land assets in all PT PPI branches);
 - 3) *Monitoring the progress* of asset certification (Renewal, Extension and Name Change);
- c. *Asset security progress* (16 locations):
 - 1) *File preparation*: 1 locations
 - 2) *Clarification letter to residents/relevant agencies*: 3 locations
 - 3) *Socialization/audience*: 5 locations
 - 4) *Mediation*: 6 locations
 - 5) *Discharging*: 0 locations
 - 6) *Finish*: 1 locations;
- d. *Asset certification progress* (64 locations):
 - 1) *Preparation of measurement files*: 11 locations
 - 2) *PKKPR permit registration*: 13 locations
 - 3) *Making sporadic/field statements*: 14 locations
 - 4) *Measurement registration*: 7 locations
 - 5) *Measurement*: 5 locations
 - 6) *Published field map*: 9 locations
 - 7) *Application for Decree of Rights*: 1 locations
 - 8) *Survey committee A*: 1 locations
 - 9) *Issue of Rights Decree*: 1 locations
 - 10) *Registration of the Right Decree for the issuance of the certificate*: 0 locations
 - 11) *BPHTB/BNBP payment*: 1 locations
 - 12) *Certificate issued*: 1 locations

6. Pembekuan atau Tidak Terbitnya Perizinan yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perusahaan

Realisasi pencapaian *gross profit* per triwulan IV 2025 atas komoditi yang membutuhkan perizinan atas pengadaannya yaitu sebesar Rp43,79 M (empat puluh tiga koma tujuh sembilan miliar rupiah) atau sebesar 42,65% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Perusahaan telah menyusun rencana penanganan risiko dengan mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan dalam regulasi yang diatur pada tata niaga komoditi yang diperdagangkan di antaranya:

- a. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Alat Kesehatan;
- b. Perizinan terkait TDG, SLF, NIB sesuai yang dipersyaratkan dalam melakukan kegiatan usaha Perusahaan;
- c. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kategori *Cold Chain Product* (CCP) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB);
- d. Penguatan infrastruktur pergudangan (perbaikan gudang sesuai ISO) untuk standarisasi pergudangan;
- e. Perizinan terkait SPI dan seluruh persyaratan dalam melakukan kegiatan importasi komoditi.

Pada triwulan IV tahun 2025, Perusahaan telah melakukan aktivitas untuk meminimalisasi kejadian risiko sebagai berikut:

- a. Proses pengajuan baru izin PBF untuk Cabang Cirebon;
- b. Dalam proses pengurusan perpanjangan NIB untuk cabang Banda Aceh, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Jambi, Kendari, Bandar Lampung, Madiun, Manado, Medan, Palembang, Palu, Parepare, Pontianak, dan Surabaya;
- c. Telah dilakukan pemetaan cabang berpotensi untuk dilakukan sertifikasi, selanjutnya dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana sebagai persyaratan sertifikasi;
- d. Dalam proses sertifikasi CDOB untuk 6 cabang;
- e. Dalam proses sertifikasi CCP untuk 9 cabang;
- f. Telah terbit sertifikat CDOB untuk 10 cabang;
- g. Telah terbit sertifikat CCP untuk 9 cabang;
- h. Dalam proses pengadaan *vendor* renovasi GSP Surabaya;
- i. Posisi pengajuan SPI Bahan Kimia Berbahaya:
 - 1) Telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan untuk 4 produk;
 - 2) Dalam proses evaluasi oleh Kementerian

6. Suspension or non-issuance of permits relating to the company's business activities

The realization of achieving gross profit per quarter IV 2025 for commodities that require licensing for procurement is Rp43.79 billion (forty-three point seven nine billion rupiah) or 42.65% compared to the target that has been set.

The company has prepared a risk management plan by complying with and fulfilling all requirements in the regulations set out in the trading system for traded commodities, including:

- a. Pharmaceutical Wholesaler License (PBF) and Medical Devices;
- b. Licensing related to TDG, SLF, NIB as required in carrying out the Company's business activities;
- c. Certification of Good Medicine Distribution Methods (CDOB) in the Cold Chain Product (CCP) category and Good Medical Device Distribution Methods (CDAKB);
- d. Strengthening warehousing infrastructure (warehouse improvements according to ISO) for warehousing standardization;
- e. Licensing related to SPI and all requirements for carrying out commodity import activities.

In the fourth quarter of 2025, the Company has carried out activities to minimize risk events as follows:

- a. New PBF permit application process for Cirebon Branch;
- b. In the process of processing the NIB extension for the Banda Aceh, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Jambi, Kendari, Bandar Lampung, Madiun, Manado, Medan, Palembang, Palu, Parepare, Pontianak and Surabaya branches;
- c. Mapping of potential branches for certification has been carried out, then in the process of fulfilling the facilities and infrastructure as certification requirements;
- d. In the CDOB certification process for 6 branches;
- e. In the CCP certification process for 9 branches;
- f. CDOB certificates have been issued for 10 branches;
- g. CCP certificates have been issued for 9 branches;
- h. In the process of procuring GSP Surabaya renovation vendors;
- i. Position of SPI application for Hazardous Chemicals:
 - 1) Have obtained import approval from the Ministry of Trade for 4 products;
 - 2) In the evaluation process by the Ministry of



- Perdagangan untuk satu produk;
- 3) Dalam proses evaluasi oleh Kementerian Perindustrian untuk 6 produk;
 - 4) Dalam proses evaluasi oleh surveyor untuk 2 produk.
- j. Telah mendapatkan persetujuan impor beras khusus dan satu produk Non B2.

- Trade for one product;
- 3) In the evaluation process by the Ministry of Industry for 6 products;
 - 4) In the evaluation process by surveyors for 2 products.
- j. Has received approval to import special rice and one Non B2 product.

7. Kurangnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas SDM

Salah satu faktor penting dalam pencapaian target Perusahaan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang ahli atau terampil. Ketidakmampuan Perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan pegawai yang ahli atau terampil dan/atau kegagalan untuk mengembangkan talenta internal serta struktur organisasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas dan efisiensi kerja.

Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja pegawai, Perusahaan mengalami kendala untuk mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh:

- a. Sudah terdapat *mapping* kebutuhan kompetensi spesifik di setiap jabatan namun perlu disempurnakan;
- b. Sudah terdapat kamus kompetensi teknis maupun non teknis namun perlu disesuaikan kembali;
- c. *Man power planning* 2025 belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- d. Sudah terdapat program pelatihan keahlian namun perlu disesuaikan kembali untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di setiap level jabatan guna meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan.

Memperhatikan beberapa kendala atas pencapaian tersebut, maka Perusahaan menyusun rencana penanganan sebagai berikut:

- a. Menyusun kamus kompetensi untuk setiap level jabatan;
- b. Melakukan pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan *Man Power Planning*;
- c. Menyusun program pelatihan keahlian sesuai dengan kamus kompetensi yang telah ditetapkan.

Per triwulan IV tahun 2025, Perusahaan telah melakukan penanganan untuk memitigasi risiko seperti:

- a. Pada bulan Januari telah dilakukan FGD tata Kelola organisasi dan *job description* bersama, Direksi, Kepala Divisi dan GM Cabang Utama yang bertujuan untuk memutakhirkan & harmonisasi pedoman tata kelola organisasi Perusahaan;

7. Lack of HR Capacity, Competency and Capability

One important factor in achieving the Company's targets is the availability of skilled or skilled human resources. The Company's inability to recruit or retain skilled or skilled employees and/or failure to develop internal talent as well as inadequate organizational structures can result in low productivity and work efficiency.

To increase employee productivity and work efficiency, the Company experienced obstacles in achieving the targets that had been set due to:

- a. There is already a mapping of specific competency requirements for each position but it needs to be refined;
- b. There are already technical and non-technical competency dictionaries but they need to be readjusted;
- c. Man power planning 2025 has not been fulfilled according to needs;
- d. There is already a skills training program but it needs to be readjusted to meet competency needs at each position level in order to increase employee competency and capability.

Considering several obstacles to this achievement, the Company has prepared a handling plan as follows:

- a. Compile competency dictionaries for each position level;
- b. Fulfillment of employees according to Man Power Planning requirements;
- c. Develop skills training programs in accordance with the established competency dictionary.

As of the fourth quarter of 2025, the Company has taken measures to mitigate risks such as:

- a. In January, an FGD on organizational governance and job descriptions was carried out with the Directors, Division Heads and Main Branch GMs with the aim of updating & harmonizing the Company's organizational governance guidelines;

- | | |
|--|--|
| <p>b. Pada bulan Februari telah terbit Pedoman Tata Kelola Organisasi PT PPI Nomor: 01/PERDIR/PPI/I/2025 dan Keputusan Direksi tentang Penetapan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT PPI Nomor: 06/DU/SKD/PPI/II/2025;</p> <p>c. Telah terbit kamus kompetensi untuk karyawan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang;</p> <p>d. Pada bulan Januari telah dilaksanakan kegiatan <i>Extra (Expert Berbicara)</i>: Memahami Penerapan <i>Business Ethics, Governance, Anti-Fraud</i> dan <i>Business Judgement Rule</i> dalam Korporasi untuk Menghindari Jerat Tipikor;</p> <p>e. Pada bulan Februari telah dilaksanakan kegiatan <i>Ultra (Ulas Transformasi)</i>: Sosialisasi Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko serta <i>refreshment</i> tata cara penyusunan profil risiko unit kerja;</p> <p>f. Telah dilaksanakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Extra</i>: Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif dengan Respectful Workplace Policy (RWP); - <i>Extra</i>: Refreshment Training Cold Chain Product; <p>g. Telah dilaksanakan kegiatan sharing session tentang <i>Accounting for Non Accounting</i>;</p> <p>h. Telah dilaksanakan pelatihan dengan tema "<i>Adaptive Mindset</i>";</p> <p>i. Telah dilaksanakan pelatihan Asesmen Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) guna memastikan distribusi alat kesehatan berjalan sesuai regulasi dan standar mutu yang berlaku;</p> <p>j. Telah dilaksanakan Pelatihan <i>Marketing</i> dan <i>Sales</i> secara <i>hybrid</i> dengan peserta dari Tim Penjualan dan Pemasaran Kantor Pusat dan Kantor Cabang;</p> <p>k. Pada bulan Oktober telah dilakukan <i>sharing session</i> dengan tema "<i>Mengatasi Self Sabotage dan Prokastinasi</i>";</p> <p>l. Pada bulan November telah dilakukan pelatihan <i>Communication Skill for Business</i> dengan peserta dari Kantor Cabang.</p> | <p>b. In February, the issuance of PT PPI Organization Governance Guidelines Number: 01/PERDIR/PPI/I/2025 and the Directors' Decree regarding Determining the Organizational Structure of PT PPI Head Office and Branch Offices Number: 06/DU/SKD/PPI/II/2025;</p> <p>c. A competency dictionary has been published for employees at both the Head Office and Branch Offices;</p> <p>d. In January, Extra activities (Expert Speaking) were carried out: Understanding the Application of Business Ethics, Governance, Anti-Fraud and Business Judgment Rules in Corporations to Avoid the Snare of Corruption;</p> <p>e. In February, Ultra activities (Transformation Review) were carried out: Socialization of Strategic Management Guidelines for Risk Management and refreshment of procedures for preparing work unit risk profiles;</p> <p>f. Activities have been carried out:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra: Create an Inclusive Work Environment with Respectful Workplace Policy (RWP); - Extra: Refreshment Training Cold Chain Product; <p>g. Sharing session activities regarding Accounting for Non-Accounting have been carried out;</p> <p>h. Training has been carried out with the theme "Adaptive Mindset";</p> <p>i. Training on Assessment of Good Medical Device Distribution Methods (CDAKB) has been carried out to ensure that the distribution of medical devices is carried out in accordance with applicable regulations and quality standards;</p> <p>j. Hybrid Marketing and Sales Training has been carried out with participants from the Head Office and Branch Office Sales and Marketing Teams;</p> <p>k. In October a sharing session was held with the theme "Overcoming Self-Sabotage and Procastination";</p> <p>l. In November, Communication Skills for Business training was conducted with participants from Branch Offices.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>8. Belum Optimalnya Sistem ERP untuk Menghasilkan Dashboard Data Analytic yang Akurat dan Tepat Waktu</p> <p>Sistem informasi digunakan untuk dapat meningkatkan kapabilitas perdagangan yang terdigitalisasi. Namun apabila tingkat akurasi dan/atau kehandalan data pada sistem informasi tersebut masih rendah, maka akan berpotensi terjadinya kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen.</p> | <p>8. ERP System is Less Optimal in Producing Accurate and Timely Data Analytics Dashboards</p> <p>Information systems are used to enhance digitalized trade capabilities. However, if the level of data accuracy and/or reliability in these information systems remains low, there is the potential for errors in planning and decision-making by Management.</p> |
|--|--|



Untuk meminimalisasi dampak atas keterjadian risiko, maka Perusahaan menyusun rencana penanganan sebagai berikut:

- a. Integrasi sistem ERP dengan sistem pendukung PPI untuk meningkatkan akurasi data;
- b. Peningkatan performa jaringan serta penguatan infrastruktur pendukung IT di Kantor Pusat dan Cabang agar sistem ERP dapat berjalan optimal;
- c. Melakukan penyempurnaan ERP mengacu kepada *change request* (CR);
- d. *Refreshment training* dan *coaching* untuk pengguna;
- e. Integrasi sistem ERP dengan sistem pendukung untuk meningkatkan akurasi data.

Per triwulan IV tahun 2025, penanganan yang telah dilakukan untuk memitigasi risiko sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan integrasi *database customer* antara ERP dan Salma;
- b. Penyempurnaan UAT Integrasi Arlita VA dan ERP;
- c. Telah dilakukan integrasi *database vendor* antara ERP dan ELMIRA;
- d. Telah dilakukan pengadaan perangkat kerja di Cabang dan Kantor pusat berdasarkan kebutuhan pengguna;
- e. Telah dilakukan instalasi aplikasi *shopos endpoint protection* di seluruh perangkat kerja di Kantor Pusat dan 9 Cabang;
- f. Sampai dengan bulan Juni:
 - Dalam proses persiapan *renewal shopos* KP & Cabang dan pengadaan *shopos* Cabang Makassar;
 - Dalam proses migrasi layanan internet KP dari ICONS ke Moratel;
- g. Telah dilakukan penyesuaian modul ERP Tax Indonesia berdasarkan ketentuan pajak terbaru;
- h. Telah dilakukan penyempurnaan *template XML* ke aplikasi Coretax milik DJP;
- i. *Go live* integrasi VA *back to back* (2 arah) sesuai dengan data piutang di ERP dan penerapan penambahan *open payment* pada salah satu provider Bank;
- j. Telah dilakukan pemenuhan permintaan user berupa penambahan *field type* penjualan pada form SO dan PO;
- k. Pada bulan Juni telah dilakukan *development* pengembangan untuk Uang Muka Penjualan, *Invoice number is invalid* dan *Grouping* dokumen transaksi retur;
- l. Telah melakukan *setup* konfigurasi mencatat *charges* pada saat *Received* di PO;

To minimize the impact of these risks, the Company has prepared the following mitigation plan:

- a. Integration of the ERP system with the PPI supporting system to improve data accuracy;
- b. Improving network performance and strengthening the IT support infrastructure at the Head Office and Branches to ensure optimal ERP system operation;
- c. Improving the ERP system based on change requests (CR);
- d. Refresher training and coaching for users;
- e. Integration of the ERP system with supporting systems to improve data accuracy.

As of the fourth quarter of 2025, the following measures have been implemented to mitigate the risks:

- a. Integration of the customer database between ERP and Salma;
- b. Improving the UAT for the integration of Arlita VA and ERP;
- c. Vendor database integration between ERP and ELMIRA has been implemented;
- d. Work equipment has been procured at the Branch Office and Head Office based on user needs;
- e. The ShopOS endpoint protection application has been installed on all work equipment at the Head Office and 9 Branch Offices;
- f. As of June:
 - In the process of preparing for the renewal of the KP & Branch ShopOS and the procurement of the Makassar Branch ShopOS;
 - In the process of migrating the KP internet service from ICONS to Moratel;
- g. The ERP Tax Indonesia module has been adjusted based on the latest tax regulations;
- h. The XML template for the DGT's Coretax application has been refined;
- i. Back-to-back (2-way) VA integration has gone live in accordance with the accounts receivable data in the ERP and the implementation of the addition of open payments to one of the bank providers;
- j. User requests have been met by adding sales type fields to the SO and PO forms;
- k. In June, development work has been carried out for Sales Advances, Invalid Invoice Numbers, and Return Transaction Document Grouping;
- l. Setup configuration for recording charges upon receipt at the PO;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> m. Telah melakukan <i>setup</i> integrasi <i>payment journal customer</i> dari <i>form</i> general <i>journal</i>; n. Telah dilakukan <i>training</i> personil PIC ERP yang baru terhadap perubahan STO (Mutasi Pekerja); o. Rutin melakukan konsultasi dengan pengguna ERP di Cabang dan Kantor Pusat; p. <i>Transfer knowledge</i> terhadap penarikan data rincian piutang usaha ke Divisi Perdagangan Kimia Non B2; q. Penanganan kendala pada Divisi akuntansi mengenai proses Arlita pada sistem ERP; r. Penanganan kendala pada Divisi akuntansi mengenai proses Arlita pada sistem ERP; s. <i>Supporting</i> konsul pada PIC Cabang Bandar Lampung dan Palembang terkait penyelesaian HPP; t. Telah dilakukan penambahan fitur monitoring data pada <i>Dashboard</i> untuk setiap komoditas dan <i>Dashboard Asset Management</i> pada aplikasi Samantha. | <ul style="list-style-type: none"> m. Setup integration of customer payment journals from the general journal form; n. Training for new ERP PIC personnel regarding changes to STO (Worker Transfers); o. Routine consultations with ERP users at branches and the head office; p. Knowledge transfer regarding the retrieval of detailed accounts receivable data to the Non-B2 Chemical Trading Division; q. Handling issues in the Accounting Division regarding the Arlita process in the ERP system; r. Handling issues in the Accounting Division regarding the Arlita process in the ERP system; s. Supporting consultants at the Bandar Lampung and Palembang Branch PICs regarding the completion of COGS; t. Data monitoring features have been added to the Dashboard for each commodity and the Asset Management Dashboard in the Samantha application. |
|---|---|

Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pernyataan Direksi terkait kecukupan sistem manajemen risiko yang disampaikan melalui Peraturan Direksi Nomor 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) adalah bahwa Perusahaan telah memetakan risiko, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*, melakukan monitoring risiko yang dilakukan setiap bulan, melakukan pengukuran tingkat kematangan risiko perusahaan, dan menambahkan kompetensi terkait manajemen risiko *top to bottom* pelatihan manajemen. Perihal pelatihan manajemen risiko ini juga ditunjukkan dengan penerapan pelatihan bersertifikasi kepada Kepala Divisi dan *Manager* bagian Manajemen Risiko serta Kepala Divisi dan *Manager* Satuan Pengawas Internal, hal ini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko di dalam perusahaan.

Adequacy of Risk Management System

The statement from the Board of Directors regarding the adequacy of the risk management system, as conveyed through Board Regulation Number 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 concerning Risk Management Guidelines of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), is that the Company has mapped risks, established risk appetite and risk tolerance, conducted monthly risk monitoring, measured the maturity level of corporate risks, and enhanced competence in top-to-bottom risk management through management training. Regarding risk management training, this is also demonstrated by the implementation of certified training for Division Heads and Managers of the Risk Management department as well as Heads of Divisions and Managers of the Internal Supervisory Units, reflecting management's commitment to implementing Risk Management within the company.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif sangat penting bagi Perseroan karena sistem ini melindungi aset, memitigasi risiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan berkelanjutan sambil meminimalkan potensi ancaman dan kerentanan.

Salah satu upaya perseroan dalam mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur perseroan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.

Aktivitas pengendalian internal pada lingkup Perseroan secara garis besar bertujuan untuk membantu manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja perseroan, memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Komitmen Direksi dan manajemen akan hal tersebut tercantum di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan telah memiliki Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal, disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tanggal 15 September 2017. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja perseroan dalam menjalankan tata laksana sistem pengendalian internal pada lingkup perseroan serta dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab dan sistem deteksi dini perseroan.

Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada semua level, baik dalam hal penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta pengelolaan risiko. Bagi perseroan, hasil evaluasi pengendalian internal tersebut berguna sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang harus dilakukan Perseroan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan PPI mengadopsi pendekatan standar internasional - COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) yang dirancang untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

Internal Control System Policy

Implementing a comprehensive Internal Control System is vital for the Company as it safeguards assets, mitigates risks, ensures compliance, enhances operational efficiency, and fosters trust and confidence among stakeholders. This system enables organizations to effectively and sustainably achieve their objectives while minimizing potential threats and vulnerabilities.

One of the company's efforts to support the achievement of operational effectiveness and efficiency is by implementing a comprehensive Internal Control System involving elements of the company, such as the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees.

Internal control activities within the scope of the Company broadly aim to assist management in supporting the achievement of the company's performance objectives, providing adequate assurance regarding the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, risk management, operational effectiveness and efficiency, and to safeguard company assets at every level of the organization. The commitment of the Board of Directors and management to this matter is stated in the Company's Corporate Governance Guidelines.

The Company has a General Internal Control System Guideline, ratified through Director's Decree Number: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 dated September 15, 2017. This guideline serves as a reference for all company units in implementing the internal control system within the company's scope and to encourage the enhancement of the company's responsibility implementation and early detection systems.

The Company regularly evaluates the effectiveness of internal controls at all levels, both in terms of policy implementation, procedures, internal supervision, and risk management. For the company, the results of these internal control evaluations are useful as one of the bases for determining the improvement and refinement measures that the Company must undertake.

Alignment of the Internal Control System with the COSO Framework

The internal control activities implemented by PPI adopt an international standard approach - COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) designed to achieve 3 (three) main objectives, namely:

1. Efektivitas dan Efisiensi Operasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perseroan dalam rangka mencapai tujuan PPI.
2. Keandalan Pelaporan Keuangan
PPI menjamin ketersediaan laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepatuhan Terhadap Perundangan- Undangan
PPI memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prosedur internal yang ditetapkan oleh PPI.

Berlandaskan pada kerangka COSO, maka unsur- unsur pengendalian internal perseroan mencakup 5 (lima) komponen berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian
Komponen ini menjadi landasan utama bagi komponen pengendalian yang lain karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal serta mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian internal.
2. Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan Risiko
Kegiatan ini mengawali proses pengendalian internal secara keseluruhan karena sangat menentukan bentuk design sistem pengendalian yang dibutuhkan serta menentukan apakah suatu pengendalian diperlukan atau tidak bagi perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian
Pada lingkup aktivitas pengendalian, manajemen memastikan bahwa perseroan telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko. Aktivitas pengendalian ini dituangkan dalam dokumen tertulis baik berupa kebijakan ataupun prosedur yang harus ditaati oleh seluruh insan PPI. Aktivitas pengendalian melibatkan semua tingkatan manajemen mulai level Direksi sampai dengan individu (*first line of defence*) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi
PPI menjamin ketersediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi *first line of defense*. Selain itu, komponen ini juga mendorong perseroan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian internal PPI secara keseluruhan.

1. Effectiveness and Efficiency of Operations
These activities are intended to enhance the effectiveness and efficiency of the company's resource management in order to achieve PPI's objectives.
2. Reliability of Financial Reporting
PPI ensures the availability of fair, timely, and relevant reports as the basis for making appropriate and accountable decisions.
3. Compliance with Laws and Regulations
PPI ensures that all activities carried out consistently comply with applicable laws and regulations, as well as internal procedures established by PPI.

Based on the COSO framework, the elements of the company's internal control comprise the following 5 (five) components:

1. Control Environment
This component serves as the primary foundation for other control components as it significantly influences the effectiveness of internal control and reflects the commitment, behavior, and awareness of the Board of Commissioners and Directors in implementing the internal control system.
2. Identification, Measurement and Management of Risk
These activities initiate the overall internal control process as they determine the design of the required control system and determine whether a control is necessary for the company.
3. Control Activities
In the scope of control activities, management ensures that the company has taken appropriate actions to prevent a risk event. These control activities are documented in written form, either as policies or procedures to be followed by all PPI personnel. Control activities involve all levels of management from the Director level to individuals (first line of defense) responsible for carrying out daily operational activities.
4. Information and Communication Systems
PPI ensures the availability of relevant, accurate, and timely information for all levels of management down to individuals in the first line of defense. Additionally, this component also encourages the company to ensure the reliability of financial reporting and compliance with regulations. The information and communication component is a vital part of PPI's overall internal control system.



5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian internal perseroan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh *first line of defence* dan atasannya maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Auditor Internal/ Eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal senantiasa berjalan efektif.

5. Monitoring

Monitoring activities are a crucial component of the company's overall internal control system. These activities are carried out routinely by the first line of defense and their superiors, as well as separate evaluations by the Directors, Board of Commissioners, or Internal/External Auditors. This is done to ensure that the internal control system operates effectively at all times.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PPI mencakup aspek Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan. Implementasi pengendalian internal dari sisi operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan baik berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja. Selain itu, PPI juga melakukan pemeriksaan fisik aset secara ketat guna mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan. Sementara itu, upaya pengendalian internal pada aspek Akuntansi/Keuangan dilakukan dengan melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pemborosan.

PPI juga menggunakan software Akuntansi yang dapat diandalkan untuk menjamin akurasi pencatatan atas transaksi yang terjadi serta menyiapkan dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

Selain menguji pengendalian pada aspek Operasional dan Akuntansi / Keuangan, PPI juga menjaga derajat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan lini bisnisnya sebagai entitas BUMN yang bergerak di sektor perdagangan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan perseroan.

Financial and Operational Control System

The internal control activities carried out by PPI cover Operational, Accounting/Financial, and Compliance aspects. The implementation of internal controls from the operational perspective is further detailed in various policies such as Guidelines, Operational Procedures, and Work Instructions. Additionally, PPI also conducts strict physical asset inspections to secure and protect the company's assets. Meanwhile, internal control efforts in the Accounting/Financial aspect are performed by segregating functions, tasks, and responsibilities to prevent fraud and wastage.

PPI also utilizes reliable Accounting software to ensure the accuracy of transaction recording and to prepare good documentation of control events and transactions.

In addition to testing controls in Operational and Accounting/Financial aspects, PPI also maintains its compliance with relevant laws and regulations pertaining to its business line as a state-owned enterprise operating in the trading sector.

Financial and Operational Controls

Financial Domain

The implementation of internal financial controls focuses on accounting and reporting financial transactions, including commitments, authorizations, as well as receipts and disbursements of funds.

Operational Domain

The implementation of internal operational controls focuses on examining the use of unit resources to evaluate whether these resources are used in the most effective and efficient manner to fulfill the company's mission and objectives.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

Compliance with Legislation

The implementation of internal compliance controls focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies, and procedures.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025 dan Tindak Lanjutnya

Pada tahun 2025, Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif pada setiap jenjang organisasi.

Evaluation of the Implementation of Internal Control Systems in 2025 and Follow-up

In 2025, the Internal Audit Unit (SPI) conducted comprehensive testing of the adequacy of the reliable and effective Internal Control System at every level of the organization.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan SPI telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan di sepanjang tahun 2025.

Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors assesses that the units under its supervision have performed their functions and roles well and have achieved effective and efficient performance outcomes. The Corporate Secretary and Internal Audit Unit (SPI) have carried out their duties effectively as support units for the Board of Directors and have assisted the Board in managing and administering the company throughout the year 2025.

Perkara Penting Tahun 2025

Legal Cases in 2025

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

Demikian pula Entitas Anak PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

Legal Issues

Throughout 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI were not involved in any legal cases, whether civil or criminal.

Thus, PPI's subsidiary was not involved in any legal cases, whether civil or criminal.

Sanksi Administratif

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat sanksi administrasi dalam bentuk apa pun yang dikenakan pihak *regulator* kepada PPI.

Administrative Sanctions

As of the end of 2025, there was no administrative sanctions of any kind imposed by the regulator on PPI.



Pedoman Etika Perusahaan

Corporate Ethics Guidelines

Komitmen Pelaksanaan Kode Etik

Komitmen Perusahaan untuk menerapkan kode etik bermanfaat dalam banyak hal, berdampak pada segala hal mulai dari budaya internal dan semangat kerja karyawan hingga reputasi eksternal dan kepercayaan pelanggan. Kode etik yang terdefinisi dengan baik menetapkan harapan dan pedoman yang jelas bagi perilaku karyawan, menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Hal ini mengarah pada lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Memiliki kerangka perilaku etis membantu karyawan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang menantang. Hal ini dapat mengurangi risiko perilaku tidak etis dan konsekuensinya.

PPI telah menyusun Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Code of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan standar perilaku bagi setiap insan PPI yang disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur dan mengarahkan tingkah laku termasuk saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga tercapai *outcome* yang diharapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya PPI.

Pokok-Pokok Kode Etik

Secara garis besar, pokok-pokok Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis PPI memuat hal-hal berikut ini:

Commitment to Implementing Code of Ethics

The Company's commitment to implementing a code of ethics is beneficial in many ways, impacting everything from its internal culture and employee morale to its external reputation and customer trust. A well-defined code of ethics establishes clear expectations and guidelines for employee behavior, fostering a culture of honesty, integrity, and respect. This leads to a more positive and productive work environment. Having a framework for ethical behavior helps employees make informed and responsible decisions, even when faced with challenging situations. This can reduce the risk of unethical conduct and its consequences.

PPI has formulated a Business Ethics and Code of Conduct Guidelines, established through Board of Directors Decree Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018, concerning the First Amendment to the Board Manual, Policies on Classification and Management of Company Information, Gift Acceptance and Provision Policy, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

The Code of Conduct comprises a set of commitments consisting of business ethics and behavioral standards for every individual within PPI, designed to influence, shape, regulate, and direct behavior, including interactions with stakeholders, to achieve desired outcomes in line with PPI's cultural values.

Key Points of the Code of Ethics

In essence, the main points of PPI's Business Ethics and Conduct Policy include the following:

BAB CHAPTER	ASPEK YANG DIATUR ASPECTS	PENJELASAN DESCRIPTION
I	Pendahuluan Introduction	Bab ini berisikan: 1. Latar Belakang 2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan 3. Pengertian 4. Maksud dan Tujuan 5. Daftar Istilah This chapter contains: 1. Background 2. Vision, Mission and Corporate Values 3. Understanding 4. Purpose and Objective 5. Glossary

BAB CHAPTER	ASPEK YANG DIATUR ASPECTS	PENJELASAN DESCRIPTION
II	Etika Usaha Perusahaan Company Business Ethics	Bab ini mengatur hubungan dan komitmen Perseroan dalam berhubungan dengan <i>stakeholders</i>, yaitu: 1. Hubungan dengan Pemegang Saham 2. Hubungan dengan Pekerja 3. Hubungan dengan Pelanggan 4. Hubungan dengan Pesaing 5. Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa 6. Hubungan dengan Mitra Kerja 7. Hubungan dengan Kreditur 8. Hubungan dengan Investor 9. Hubungan dengan Pemerintah 10. Hubungan dengan Masyarakat 11. Hubungan dengan Media Massa 12. Hubungan dengan Organisasi Profesi. This chapter regulates the Company's relationship and commitment in dealing with stakeholders, namely: 1. Relations with Shareholders 2. Relations with Employees 3. Relations with Costumers 4. Relations with Competitors 5. Relations with Goods and Service Providers 6. Relations with Partners 7. Relations with Creditors 8. Relations with Investors 9. Relations with the Government 10. Relations with Community 11. Relations With Mass Media 12. Relations With Professional Organizations.
III	Standar Tata Perilaku Code of Conduct	Bab ini menjelaskan standar perilaku terbaik bagi Insan PPI yang berlandaskan pada prinsip - prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya Budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan. Bab ini antara lain memuat: 1. Hubungan Kerja - Hubungan dan Kerjasama Antar Pekerja - Hubungan Atasan dan Bawahan 2. Integritas dan Komitmen 3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Kerahasiaan Data dan Informasi 5. Penggunaan Komunikasi Elektronik 6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan 7. Hadiah/Cinderamata, Jamuan Bisnis/Hiburan dan Lainnya (Gratifikasi) 8. Penyuapan 9. Aktivitas Politik 10. Aktivitas Sosial 11. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan 12. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3I) 13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi 14. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian 15. Citra Perusahaan This chapter describes the best standard of behavior for PPI's personnel based on the principles of GCG to encourage the establishment of a Corporate Culture which is expected to, either directly or indirectly, increase the value of the Company.



BAB CHAPTER	ASPEK YANG DIATUR ASPECTS	PENJELASAN DESCRIPTION
		- Working Relationship - Relations and Cooperation among Employees - Boss and Subordinate Relationship - Integrity and Commitment - Compliance with Laws and Legislation - Confidentiality of Data and Information - Use of Electronic Communication - Conflict of Interest and Abuse of Position - Gifts/Souvenirs, Business Meals/Entertainment and Others (Gratuities) - Bribery - Political Activities - Social Activities - Protection and Use of Company Assets - Occupational Health and Safety (OHS) - Data Recording, Reporting and Documentation - Abuse of Narcotics, Drugs, Alcohol and Gambling - Company Image
IV	Pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku Implementation of business ethics and code of conduct	Bab ini mengatur Organisasi, Penegakan Pedoman Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelaporan, Penanganan dan Sanksi Pelanggaran. This chapter regulates the Organization, Code of Conduct Enforcement, Dissemination and Internalization, Reporting, Handling and Sanctions for Violations.
V	Penutup Closing	Berisikan penjelasan terkait pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku dan Penjelasan Pernyataan Pegawai. This provides an explanation regarding the update/ revision of business ethics and code of conduct and an explanation of employee statements.

Penerapan *Code of Conduct*

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, penerapan dan pengawasan atas penegakan *Code of Conduct* di lingkungan perseroan, namun dalam praktiknya, penerapan *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab seluruh karyawan PPI.

Sementara, para Kepala Divisi, Kepala Cabang, *Manager* dan pejabat setingkatnya bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pernyataan bahwa *Code of Conduct* Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

PPI menegaskan bahwa pokok-pokok *Code of Conduct* berlaku setara bagi seluruh insan PPI, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Dengan adanya *Code of Conduct*, PPI berharap setiap individu semakin memiliki kesadaran tinggi untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik sehingga dapat mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan membawa dampak positif terhadap citra PPI.

Implementation of the *Code of Conduct*

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the formulation, implementation, and oversight of the enforcement of the *Code of Conduct* within the company's environment. However, in practice, the implementation of the *Code of Conduct* becomes the responsibility of all PPI employees.

Meanwhile, Division Heads, Branch Managers, Managers, and their equivalents are responsible for implementing the *Code of Conduct* within their respective work units.

Statement that the *Code of Conduct* Applies to All Organization Levels

PPI asserts that the principles of the *Code of Conduct* apply equally to all individuals within PPI, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees. With the existence of the *Code of Conduct*, PPI hopes that each individual will have a heightened awareness to behave in accordance with good ethical values, thereby supporting the creation of harmonious work relationships and positively impacting PPI's image.

Komitmen Perseroan akan hal ini ditunjukkan dengan mewajibkan setiap karyawan untuk membaca, memahami, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *Code of Conduct* dan menandatangani Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang dilakukan secara berkala atau setiap tahun.

Pada tahun 2025, penandatanganan lembar pernyataan tersebut telah dilakukan pada periode tanggal 7 Februari 2025 – 14 Februari 2025.

Sosialisasi dan Internalisasi

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi pokok-pokok *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab Tim GCG. PPI berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Insan Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja serta melakukan penyegaran secara berkala;
2. Setiap Pejabat dan Pegawai Perseroan mendapatkan sosialisasi dan menerima satu salinan *Code of Conduct*, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct*;
3. *Code of Conduct* diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh Pejabat dan Pegawai Perseroan, serta didokumentasikan oleh Tim GCG sebagai koordinator dan penanggung jawab;
4. Mengevaluasi pencapaian atau pemahaman seluruh Insan Perseroan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja; dan
5. Mengkaji *Code of Conduct* secara berkala dalam rangka mengembangkan *Code of Conduct* dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.

Informasi lebih lanjut mengenai *Code of Conduct* perseroan dapat diunduh pada situs web PPI: [https:// www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/](https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/).

Pelaporan, Penanganan, dan Sanksi Pelanggaran

PPI mendorong seluruh karyawan ataupun pihak eksternal apabila mereka menemukan adanya tindakan ataupun dugaan terjadinya pelanggaran terhadap (yang dikembangkan oleh perseroan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses penegakan *Code of Conduct* di PPI.

The Company's commitment to this is demonstrated by requiring every employee to read, understand, and comply with the provisions set forth in the Code of Conduct and to sign the Commitment Statement Sheet of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)'s Individuals, which is done periodically or annually.

In 2025, the declaration forms were signed between February 7, 2025, and February 14, 2025.

Socialization and Internalization

The socialization and internalization of the key points of the Code of Conduct are the responsibility of the GCG Team. PPI is committed to conducting effective and comprehensive socialization activities with the following provisions:

1. Conducting Code of Conduct socialization for all Company Individuals, Customers, and Business Partners and conducting periodic refreshers;
2. Each Officer and Employee of the Company receives socialization and a copy of the Code of Conduct, and signs a commitment form to comply with and implement the Code of Conduct;
3. The Code of Conduct is renewed and re-signed annually by Officers and Employees of the Company, and documented by the GCG Team as the coordinator and responsible party;
4. Evaluating the achievement or understanding of all Company Individuals during both the orientation and working periods; and
5. Reviewing the Code of Conduct periodically to develop it further and, if necessary, elaborate it further in various company policies and regulations.

Further information about the company's Code of Conduct can be downloaded from the PPI website: <https://www.ptppi.co.id/governance/good-corporate-governance/>.

Reporting, Handling, and Sanctions for Violations

PPI encourages all employees or external parties to report any actions or suspected violations of (developed by the company as an integral part of the Code of Conduct enforcement process at PPI.



Perseroan telah menetapkan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar pokok-pokok *Code of Conduct*. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di perseroan.

The Company has established strict sanctions for anyone found to violate the principles of the Code of Conduct. The types of sanctions and the mechanism for imposing sanctions refer to the company's personnel policies in force.

Jumlah Pelanggaran Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menemukan adanya laporan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh insan perseroan.

Number of Violations in 2025

Throughout 2025, the Company did not receive any reports of complaints regarding violations of the Code of Ethics committed by company individuals.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Latar Belakang dan Kebijakan WBS

Sebagai badan usaha milik negara yang berkomitmen menegakkan tata kelola perusahaan yang kuat, Perseroan terus berupaya meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap peraturan dan standar etika yang relevan, sekaligus secara proaktif mencegah potensi pelanggaran.

Oleh karena itu, Perseroan telah mengembangkan dan menerapkan mekanisme pelaporan yang disebut *Whistleblowing System* (WBS), yang dituangkan dalam kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/ 2018 tanggal 4 Juni 2018 yang mencakup perubahan *Board Manual*, Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi, Penerimaan dan Pemberian Hadiah, Kode Etik, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Pada dasarnya, *Whistleblowing System* (WBS) menjadi *platform* untuk melaporkan setiap pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Kode Etik, kebijakan perusahaan, dan undang-undang terkait, yang dilakukan oleh insan PPI, yang berpotensi merugikan Perusahaan dan pemangku kepentingannya. Penerapannya menegaskan dedikasi teguh PPI dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tanpa praktik tata kelola yang tidak etis

Secara umum, Kebijakan WBS Perusahaan mengatur hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran;
2. Kebijakan Perlindungan Pelapor;
3. Apresiasi Pelapor;

WBS Background and Policy

As a state-owned enterprise committed in upholding robust corporate governance, the Company is dedicated to perpetually enhancing employees' adherence to relevant regulations and ethical standards, while proactively averting potential violations.

Thus, the Company has developed and implemented a reporting mechanism called the *Whistleblowing System* (WBS), as outlined in a policy established by the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018, which includes amendments to the Board Manual, Policies on Information Classification and Management, Gift Acceptance and Provision, Code of Conduct, *Whistleblowing System*, and GCG Guidelines.

Essentially, the *Whistleblowing System* (WBS) serves as a platform for reporting any breaches of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Code of Conduct, company policies, and relevant laws by PPI personnel that could potentially harm the Company and its stakeholders. Its implementation underscores PPI's unwavering dedication to fostering a conducive work environment devoid of unethical governance practices.

In general, the Company's WBS Policy regulates the following:

1. Policy on Receiving and Resolving Violation Reports;
2. Whistleblower Protection Policy;
3. Whistleblower Appreciation;

4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran;
5. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran;
6. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran;
7. Administrasi Pelaporan;
8. Pemantauan Tindak Lanjut;
9. Penyampaian Tanggapan; dan
10. Publikasi dan Sosialisasi.

Melalui penerapan WBS, PPI berupaya mendorong seluruh karyawan untuk menjadi lebih berani dan proaktif dalam mencegah/melaporkan pelanggaran, atau dugaan atas pelanggaran etika/peraturan, tanpa ada rasa takut atau keragu-raguan. Tentunya, pelaporan tersebut harus didukung dengan kecukupan bukti awal yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan WBS PPI dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.ptppi.co.id/tatakelola/good-corporate-governance/>.

Lingkup Pelaporan WBS PPI

Sebagaimana diatur dalam Kebijakan WBS, berikut ini adalah jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain:

- Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- *Code of Conduct*.
- Prinsip-prinsip GCG.
- Kecurangan.
- Gratifikasi.
- Peraturan Perusahaan.
- Peraturan Perundang-Undangan.
- Regulasi ormativ lain yang relevan dengan bidang usaha PPI.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

PPI secara konsisten melakukan berbagai upaya agar sosialisasi Kebijakan WBS dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan *stakeholders* eksternal.

Internalisasi Kebijakan WBS bagi karyawan dilakukan dengan membagikan buku saku mengenai Kebijakan WBS kepada seluruh Unit Kerja. Sementara, sosialisasi kebijakan WBS bagi *stakeholder* eksternal dilakukan dengan mencantumkan kebijakan WBS di dalam situs perseroan serta mengoptimalkan fungsi media sosial perseroan sebagai *tools* untuk meningkatkan *awareness* para pemangku kepentingan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja ditujukan kepada Direksi.

4. Whistleblowing Team;
5. Receipt of Violation Reports;
6. Process for Handling Violation Reports;
7. Reporting Administration;
8. Follow-up Monitoring;
9. Submission of Feedback; and
10. Publication and Outreach.

Through the implementation of the WBS, PPI strives to encourage all employees to be more courageous and proactive in preventing/reporting violations, or allegations of ethical breaches/regulations, without fear or hesitation. Naturally, such reports must be substantiated with sufficient strong and accountable initial evidence.

Further information regarding the WBS Policy of PPI can be downloaded from the Company's website: <https://www.ptppi.co.id/tatakelola/good-corporate-governance/>.

Scope of the Company's WBS System

As stipulated in the WBS Policy, the following are the types of alleged violations that can be reported through WBS, including:

- Corruption, Collusion, Nepotism (KKN).
- Code of conduct.
- GCG principles.
- Cheating.
- Gratuities.
- Company regulations.
- Legislation.
- Other normative regulations relevant to PPI's line of business.

Dissemination of Violation Reporting System

PPI consistently undertakes various efforts to ensure that the WBS Policy is well-received and understood by all employees and external stakeholders.

Internalization of the WBS Policy for employees is carried out by distributing pocketbooks regarding the WBS Policy to all Work Units. Meanwhile, the dissemination of the WBS policy for external stakeholders is conducted by including the WBS policy on the company's website and optimizing the company's social media functions as tools to enhance stakeholders' awareness.

Violation Reporting Mechanism

1. Reports of suspected violations committed by Employees are directed to the Board of Directors.



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris. 3. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (<i>stakeholders</i>) baik secara lisan maupun tertulis. 4. Perseroan dalam hal ini melalui Tim GCG, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pihak eksternal (<i>stakeholders</i>) mengajukan pelaporan pelanggaran. 5. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Disampaikan melalui: PO BOX 1195 b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
up. Tim <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160 6. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada <i>poin</i> 2 di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Disampaikan melalui: PO BOX 1195 b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
up. Tim <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160 7. Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan. 8. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelanggaran yang akan disampaikan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Reports of suspected violations committed by Directors, the Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are directed to the Board of Commissioners. 3. The Company accepts any reports of violations submitted by external parties (<i>stakeholders</i>), whether verbally or in writing. 4. The Company, through the GCG Team, provides explanations regarding the policy and procedures for resolving violation reports when external parties (<i>stakeholders</i>) submit violation reports. 5. Reports of suspected violations committed by Employees as referred to in point 1 above can be made using the following mechanism: <ol style="list-style-type: none"> a. Submitted through: PO BOX 1195 b. Sending an official letter addressed to the Board of Directors by hand delivery or by mail to the following address:
Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
c/o Good Corporate Governance (GCG) Team
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160 6. Reports of suspected violations committed by Directors, the Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners as referred to in point 2 above can be made using the following mechanism: <ol style="list-style-type: none"> a. Submitted through: PO BOX 1195 b. Sending an official letter addressed to the Board of Directors by hand delivery or by mail to the following address:
Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
c/o Good Corporate Governance (GCG) Team
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160 7. Written reports of violations should preferably be accompanied by photocopies of identification and supporting evidence such as documents related to the actions/transactions in question and/or the violations being reported. 8. Written reports of violations without identification (anonymous) must be supplemented with supporting evidence such as documents related to the actions/transactions in question and/or the violations being reported. |
|---|--|

Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran

1. Tim GCG melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Selanjutnya, Tim GCG akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan

Violation Reporting Handling Process

1. The GCG Team verifies incoming reports. Subsequently, the GCG Team will decide whether an investigation into the reported violation is necessary

pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana disebut pada poin 1 di atas menunjukkan bahwa pelaporan yang disampaikan terbukti tidak benar dan tidak memiliki kecukupan bukti maka laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Sementara itu, pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja akan ditindaklanjuti diinvestigasi oleh Tim GCG melalui jalur Direksi.
5. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh Tim Pengelola Pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.
9. Skema proses pelaporan pelanggaran sebagaimana terlampir.

Perlindungan bagi Pelapor

PPI berkomitmen akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya.

Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, faximili, surat, *email*) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
2. Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.

within 30 (thirty) days, extendable up to a maximum of 30 (thirty) working days.

2. If the verification results as mentioned in point 1 above indicate that the reported violation is unsubstantiated and lacks sufficient evidence, the report will not be further processed.
3. If the verification results indicate indications of a violation accompanied by sufficient evidence, the report may proceed to the investigation stage.
4. Meanwhile, reports of violations involving Employees will be investigated by the GCG Team through the Director's channel.
5. Regarding reports of violations involving Directors, the Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners that require investigation, they will be followed up and investigated by the Violation Management Team through the Board of Commissioners' channel.
6. Violators proven guilty based on investigation results will be processed according to applicable regulations.
7. If a violation report occurs at the Branch Office level, the Branch Office's role is limited to verification, while further processing is handled by the GCG Team.
8. If the investigation results reveal violations that lead to criminal acts, legal proceedings may be pursued with law enforcement agencies.
9. The violation reporting process scheme is attached.

Protection for Whistleblower

PPI is committed to maintaining the confidentiality of the Whistleblower identity and providing assurance of protection to well-intentioned Whistleblower and their families.

Protection for Whistleblower includes:

1. Assurance of reporting channels (telephone, facsimile, mail, email) or an independent, free, and confidential Ombudsman.
2. Assurance of confidentiality of the reporter's identity and the contents of the report. This protection is provided if the Whistleblower provides their identity and information that can be used to contact them. While allowed, anonymous reporting is not recommended. Anonymous reporting complicates communication for follow-up actions.



3. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau PPI. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga Pelapor.
4. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
3. Assurance of protection against retaliation from the accused or PPI. Protection from pressure, delayed promotions, dismissal, legal action, asset seizure, to physical harm and other detrimental treatment. This protection is not only for the Whistleblower but can also extend to the Reporter's family members.
4. Assurance of confidentiality of communication/information channels with the Whistleblower. Information on the follow-up actions, including when and how and to which institution the follow-up actions are submitted, is communicated confidentially to the Whistleblower who provides complete identification.

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

1. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pekerja:
 - a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.
 - c. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja PPI.
2. Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.

Violation Reporting Management Team

1. Authority of the Board of Directors and the Alleged Employee Violation Reporting Management Team:
 - a. The Board of Directors is responsible for the implementation of the Policy on Alleged Employee Violation Reporting Management as stipulated in this Decision.
 - b. The Board of Directors appoints the GCG Team as the Alleged Employee Violation Reporting Management Team. This team is also referred to as the Alleged Employee Violation Reporting Management Team through the Director's channel.
 - c. The Alleged Employee Violation Reporting Management Team through the Director's channel is responsible for following up on reports of violations allegedly committed by PPI Employees.
2. The authorities of the Board of Commissioners and Whistleblowing Team for Reporting Violations Allegedly Committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are as follows:
 - a. The Board of Commissioners is responsible for the implementation of the Management Policy for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners, as stipulated in this Decree.
 - b. The Board of Commissioners establishes a Management Team for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, consisting of representatives from the Audit Committee and other parties as needed in accordance with their competence and expertise based on the decisions of the Board of Commissioners. This team is also known as the Whistleblowing Team for Board of Commissioners.

- c. Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.
- d. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

- c. The Chairman of the Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is the Chairman of the Audit Committee.
- d. The Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is tasked with following up on reports of violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Jenis Sanksi yang Diberikan

Apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PPI, maupun secara umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Types of Sanctions Imposed

If the Accused is found guilty of committing a violation, the sanctions imposed will refer to the regulations applicable to PPI, as well as generally in accordance with prevailing laws and regulations.

Jumlah Pelaporan dan Hasil Penanganan Pengaduan WBS Tahun 2025

Selama tahun 2025, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media *Whistleblowing System* sehingga tidak terdapat proses penanganan atau tindak lanjut.

Number of Reports and Results of WBS Complaint Handling in 2025

During the year 2025, there were no reports of alleged violations submitted through the Whistleblowing System, thus there were no processing or follow-up actions.

Evaluasi Penerapan WBS

PPI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap implementasi WBS untuk memastikan bahwa fungsi WBS senantiasa berjalan dengan baik demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta terbebas dari tindak kecurangan atau hal-hal lain yang berpotensi merugikan Perseroan di kemudian hari. PPI juga terus memperkuat kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyosialisasikan pilar-pilar WBS kepada seluruh karyawan.

Evaluation of WBS Implementation

PPI consistently evaluates the implementation of the WBS to ensure that the WBS functions effectively to create a safe and comfortable working environment and is free from fraudulent activities or other potential harm to the Company in the future. PPI also continues to strengthen cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) in disseminating the pillars of the WBS to all employees.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Control Policy

Dalam pengelolaan bisnisnya, PPI tetap teguh berupaya memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini ditegakkan melalui peningkatan praktik bisnis sehat yang mengedepankan persaingan sehat, sportivitas, dan profesionalisme, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

In its business management, PPI remains steadfast in its pursuit to eliminate all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This commitment is upheld through the promotion of sound business practices that champion fair competition, sportsmanship, and professionalism, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PPI telah menyusun Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang

To actualize this commitment, PPI has devised a Gratuity Control Policy outlined in the Decree of the Board of



dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020. Kebijakan ini menegaskan dedikasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memegang teguh pedoman utama pengendalian gratifikasi di lingkungan PPI.

Ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan tersebut menguraikan parameter pengelolaan gratifikasi antara karyawan dan entitas eksternal terkait dengan aktivitas bisnis, yang mencakup penerimaan, penyediaan, dan permintaan gratifikasi, serta pembentukan unit manajemen dan mekanisme pelaporan.

Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PPI berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan KPK No. 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 06 tahun 2015;
4. Surat KPK No. B.143/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
5. Surat Edaran No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang bersih melalui implementasi pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern; Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); dan
6. Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PPI telah memuat ketentuan-ketentuan di antaranya yaitu:

1. Ruang Lingkup Gratifikasi
2. Kategori Gratifikasi (Penolakan Gratifikasi, Penerimaan Gratifikasi, Pemberian Gratifikasi, Permintaan Gratifikasi, dan Alternatif Pemanfaatan

Directors Number: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 3, 2020. This policy underscores the dedication of both the Board of Commissioners and the Board of Directors to uphold the primary guidelines for controlling gratuities within PPI.

Signed on July 10, 2020, by the Board of Commissioners and the Board of Directors, the policy delineates the parameters for managing gratuities between employees and external entities in relation to business activities, encompassing the receipt, provision, and solicitation of gratuities, alongside the establishment of management units and reporting mechanisms.

Legal Basis

The preparation of PPI's Gratuity Control Guidelines refers to the following laws and regulations:

1. Law no. 28 of 2009 concerning Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
3. KPK Regulation No. 02 of 2014 concerning Guidelines for Reporting and Determination of Gratification Status as amended by KPK Regulation No. 06 of 2015;
4. KPK Letter No. B.143/01-13/03/2017 dated March 15, 2017 concerning Guidelines and Limitations of Gratuity;
5. Circular No. SE-2/MBU/07/2019 dated 29 July 2019 concerning Clean Management of State-Owned Enterprises through the implementation of preventing Corruption, Collusion, Nepotism, and handling conflicts of interest as well as strengthening internal supervision; Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); and
6. Statement of Commitment to Implementing Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Guidelines for Gratification Control

The Gratuity Control Policy of PPI encompasses provisions including:

1. Scope of Gratification
2. Categories of Gratification (Rejection of Gratification, Acceptance of Gratification, Provision of Gratification, Solicitation of Gratification, and

- Penerimaan Gratifikasi)
- 3. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
- 4. Implementasi
- 5. Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan
- 6. Sanksi atas Pelanggaran
- 7. Perlindungan Pelaporan
- 8. Ketentuan Tambahan.

- Alternative Utilization of Gratification Receipt)
- 3. Management of Gratuity Control
- 4. Implementation
- 5. Mechanisms and Procedures for Reporting
- 6. Sanctions for Violations
- 7. Protection of Reporting
- 8. Additional Provisions.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

PPI telah mengatur batasan pemberian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diterima oleh insan PPI sehubungan dengan kegiatan penugasan dan jabatannya. Uraian lengkap mengenai kriteria dan ketentuan tersebut sudah diungkapkan secara jelas di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/>. Di samping itu, perseroan juga sudah memiliki Kebijakan ISO Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016.

Management of Gratification Control

PPI has defined limits on permissible and impermissible provisions to be received by PPI personnel in relation to their assignments and positions. A comprehensive description of these criteria and provisions has been clearly articulated in the Guidelines for Gratuity Control, accessible through the PPI website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/>. Additionally, the company has implemented the ISO Anti-Bribery Management System Policy ISO 37001:2016.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Setiap tahun, PPI mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan PPI, di antaranya dengan memuat imbauan mengenai larangan gratifikasi dalam bentuk pull up banner dan poster yang dipasang di lingkungan PPI. Selain itu, PPI juga membagikan buku saku tentang Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah kepada seluruh karyawan sebagai salah satu upaya internalisasi pedoman pengendalian gratifikasi pada lingkup PPI.

Gratification Policy Dissemination

Annually, PPI communicates and disseminates the gratuity control policy to all PPI personnel, including by displaying reminders about the prohibition of gratuities in the form of pull-up banners and posters placed within the PPI premises. Moreover, PPI distributes pocketbooks on the Policy for Receiving and Giving Gifts to all employees as part of the internalization efforts for the gratuity control guidelines within PPI's scope.

Kebijakan *Kickbacks* dan Anti-Penyuapan

Kickbacks and Anti-Bribery Policy

Kebijakan Suap dan Anti Penyuapan adalah seperangkat pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk mencegah karyawan, kontraktor, dan agen terlibat dalam praktik korupsi seperti penyuapan, sogokan, atau bentuk perilaku tidak etis lainnya. Kebijakan Anti-Suap menguraikan sikap Perusahaan terhadap penyuapan dan korupsi, dengan menekankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini biasanya mencakup ketentuan yang melarang karyawan menawarkan, meminta, atau menerima suap dalam bentuk apa pun, baik uang maupun non uang.

A Kickbacks and Anti-Bribery Policy is a set of guidelines and rules established by the Company in order to prevent employees, contractors, and agents from engaging in corrupt practices such as bribery, kickbacks, or other forms of unethical behavior. An Anti-Bribery Policy outlines the Company's stance against bribery and corruption, emphasizing compliance with applicable laws and regulations. It usually includes provisions prohibiting employees from offering, soliciting, or accepting bribes in any form, whether monetary or non-monetary.

PPI telah memiliki kebijakan Anti-Penyuapan yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020. Penyusunan

The PPI has adopted an Anti-Bribery Policy as ratified through Director's Decision Letter No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 6, 2020. The formulation of the Anti-



Kebijakan Anti-Penyuapan berpedoman pada perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Anti-Penyuapan ini menjadi salah satu bentuk upaya dan mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. PPI berharap seluruh karyawan dengan kesadaran penuh dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalamnya.

Bribery Policy is guided by the following legislation and regulations:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and
3. Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

This Anti-Bribery Policy serves as one of the Company's efforts and mitigations to prevent undesirable actions. PPI hopes that all employees will fully comply with the provisions outlined therein.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Provision of Funds for Social and Political Activities

PPI tidak pernah memberikan dana atau hibah untuk kepentingan kegiatan politik atau kepada partai politik, namun bersedia memberikan dana untuk kepentingan sosial selama hal itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

PPI has never provided funds or grants for political activities or to political parties, but is willing to provide funds for social purposes as long as it is done in accordance with applicable regulations.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Management of State Officials Wealth Reports

LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, adalah laporan wajib yang harus disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaannya pada awal masa jabatan, saat pergantian, kenaikan pangkat, dan pada saat pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah pernyataan harta kekayaan dan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan harta kekayaan. Tujuan dibuatnya LHKPN adalah sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya melalui pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

LHKPN, or Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, is a mandatory report to be submitted by state officials regarding their wealth at the beginning of their term, during any changes, promotions, and upon retirement. Another obligation accompanying the LHKPN is the declaration of wealth and willingness to undergo examinations of their assets. The purpose of creating the LHKPN is as part of the authority held by the Corruption Eradication Commission (KPK) to take preventive measures against corruption, including by registering and examining the LHKPN.

Definisi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut undang-undang ini, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham mewajibkan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Surat Keputusan Direksi PT RNI (Persero) Nomor: 13/SK/RNI.01/III/2018 tanggal 16 Maret 2024 perihal Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Direksi PT RNI (Persero) Nomor 3/SPMB/PA.09/ RNI.01/27/XII/2024 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024.

Wajib Laporan LHKPN

Berdasarkan dasar hukum di atas, pejabat yang wajib laporan LHKPN adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Per 31 Desember 2025, jumlah pejabat yang wajib laporan sebanyak 6 orang, dan sebanyak 6 orang telah melakukan pelaporan LHKPN.

The definition of state officials is regulated in Article 1 paragraph 1 of Law No. 28 of 1999 concerning the Administration of the State Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. According to this law, state officials are government officials who perform executive, legislative, or judicial functions, as well as other officials whose main functions and duties are related to the administration of the state in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Shareholders require the Board of Commissioners and the Board of Directors to submit their asset reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.

Legal Basis

The legal basis for submitting LHKPN consists of:

1. Law Number 28 of 1999 concerning Clean and Corruption, Collusion, and Nepotism-Free State Administrators.
2. Decree of the Board of Directors of PT RNI (Persero) Number: 13/SK/RNI.01/III/2018 dated March 16, 2024 concerning the State Officials' Wealth Report Management Unit (LHKPN) within PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
3. Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
4. KPK Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports.
5. Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter Number: SE-12/MBU/10/2021 concerning the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises.
6. Letter from the Board of Directors of PT RNI (Persero) Number 3/SPMB/PA.09/RNI.01/27/XII/2024 concerning the Mandatory Reporting of State Officials' Wealth (LHKPN) for 2024.

LHKPN Mandatory Reporting

Based on the legal basis above, officials required to report their Report on Wealth and Treasures of the State Officer (LHKPN) are the Board of Commissioners and the Board of Directors.

As of December 31, 2025, there were 6 officials required to report, and all of them had already submit their reports.



Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Dalam kegiatan operasionalnya, PPI senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, dan memastikan tidak pernah terjadi praktik tata kelola perusahaan yang buruk di lingkup perusahaan, yang berkaitan dengan:

1. Pencemaran lingkungan;
2. Pelanggaran hukum;
3. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak;
4. Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; dan
5. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

In its operational activities, PPI always complies with applicable rules and regulations, and ensures that there are no bad corporate governance practices occurring within the Company, which relates to:

1. Environmental pollution;
2. Violation of the law;
3. Non-compliance with tax obligations;
4. Violation of employee rights; and
5. Non-compliance of financial reporting with applicable regulations.

Laporan Mengenai Pencemaran Lingkungan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pencemaran lingkungan yang disebabkan, atau terkait dengan aktivitas PPI.

Report on Environmental Pollution

Throughout 2025, there were no reports of environmental pollution caused by, or related to PPI activities.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PPI seantiasa mematuhi perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal perpajakan sehingga sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan PPI tidak pernah memiliki kasus yang berkaitan dengan pepajakan.

Fulfillment of Tax Obligations

PPI always complies with applicable laws including in terms of taxation so that until this Annual Report is published PPI has never had a case related to taxation.

Pada tahun 2025, Perseroan telah memberikan kontribusi pajak ke Kas Negara sebesar Rp20,79 Miliar atau menurun 3,61% dibandingkan dengan kontribusi pajak periode yang sama tahun 2024.

In 2025, in total, the Company has made a tax contribution to the State Treasury amounting to Rp20.79 billion or a decrease of 3.61% compared to the tax contribution for the same period in 2024.

Kontribusi Perpajakan Tahun 2025 & 2024 | Tax Contribution in 2025 & 2024

No	Uraian Description	31-Dec 2025	31-Dec 2024
1	PPh 21 Income Tax Article 21	334,4	6.704,9
2	PPh 22 Wapu Income Tax Article 22 Wapu	600,1	4.191,0
3	PPh 22 Import Income Tax Article 22 Import	-	1.590,0
4	PPh 23 Income Tax Article 23	411,0	456,8
5	PPh 4(2) Final Income Tax Article 4 (2) Final	95,0	687,5
6	PPh 25 Masa Income Tax Article 25 Period	9.148,1	6.479,9
7	PPh Ps 29 Income Tax Article 29	-	-
Jumlah Total		10.588,5	20.110,1
1	PPN Wapu Value-Added Tax Wapu	3.588,0	16.497,6
2	PPN Keluaran Outgoing Value-Added Tax	6.026,6	39.508,1

No	Uraian Description	31-Dec	31-Dec
		2025	2024
3	PPN Masukan Incoming Value-Added Tax	(5.728,1)	(19.754,1)
	PK > PM = KB atau PM > PK = (LB)	298,5	19.754,1
Jumlah Total		3.886,5	36.251,7
1	Bea masuk dan Cukai Customs	1.279,9	9.471,7
2	Nilai Pajak Lain Other Taxes Values	-	-
Jumlah Total		1.279,9	9.471,7
PAJAK DAERAH: Regional Tax			
1	PBB Property Tax	5.038,3	4.901,0
Jumlah Total		20.793,2	71.365,9

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi, analisa dan pembahasan kinerja di dalam laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan PPI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All information presentation, analysis, and performance discussions within this annual report are based on the PPI Financial Statements for the years ending December 31, 2025, and December 31, 2024, which have been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

The Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Financial Accounting Standards Statement (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Standards Board ("DSAK") and applicable Capital Market Regulations, including Regulation No. VIII.G.7 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) regarding Financial Statements Presentation Guidelines, Chairman of Bapepam-LK Decree No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan

Policy on Corporate Information Classification and Management

PPI telah menerapkan Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan yang bertujuan untuk mengkategorikan informasi dan menetapkan mekanisme pengungkapan internal dan eksternal. Inisiatif ini selaras dengan kepentingan PPI, persyaratan pemegang saham, dan harapan para pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan informasi PPI dilakukan secara profesional dan prudent oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat. Divisi ini yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Namun demikian, seluruh Pejabat PPI tetap bertanggung jawab terhadap keamanan informasi PPI yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan atas informasi perseroan di unit kerja masing-masing.

Perseroan memiliki Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi yang ditujukan sebagai panduan yang jelas bagi seluruh Insan PPI. Panduan ini mengatur klasifikasi dan mekanisme dalam memperlakukan informasi perusahaan agar pengungkapan informasi perusahaan dilakukan dengan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan Perseroan.

Uraian lengkap mengenai Pedoman Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance>.

PPI has implemented a Corporate Information Classification and Management Policy aimed at categorizing information and establishing mechanisms for internal and external disclosure. This initiative aligns with PPI's interests, the requirements of shareholders, and the expectations of other stakeholders associated.

PPI's information management is carried out professionally and prudently by the Corporate Secretary and Public Relations Division. This division is directly responsible to the President Director.

However, all PPI Officers remain responsible for PPI's information security which includes the arrangement, implementation and management of company information in their respective work units.

The Company has an Information Classification and Management Policy which serves as a clear guide for all PPI personnel. This guideline regulates the classification and mechanism in treating corporate information so that the disclosure of corporate information is carried out by always complying with applicable laws and regulations and does not harm the Company.

A complete description of the Information Classification and Management Policy Guidelines can be found on PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance>.

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Governance

Kebijakan

PPI memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan Surat Peraturan Direksi nomor 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan. SOP tersebut menjelaskan hal-hal mengenai ketentuan, prosedur dan proses pengadaan.

Policy

PPI has established formal policies concerning the procurement of goods and services, in accordance with the Board of Directors Decree Number: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 dated July 29, 2011, concerning the Guidelines for the Implementation of Company Operational Activities based on Company Standard Operating Procedures (SOP), as well as the Board of Directors Regulation Letter number 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 concerning Guidelines for Procurement of Trade Goods. The SOP provides detailed information regarding provisions, procedures, and the procurement process.

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang

PPI senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel dalam proses pengadaan.

Principles of Procurement

PPI consistently upholds formal principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, reasonableness, and accountability throughout the procurement process.

Pelaksanaan Proses Pengadaan Tahun 2025

Secara umum proses pengadaan barang dan jasa Perseroan selama tahun buku 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Perseroan tidak ditemukan adanya temuan terkait aspek pengadaan barang dan jasa oleh auditor internal dan eksternal yang signifikan.

Implementation of the Procurement Process in 2025

In general, the Company's procurement process for goods and services during the fiscal year 2025 has proceeded in accordance with established regulations. No significant findings pertaining to the procurement of goods and services were identified by either internal or external auditors.

Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditor

Commitment to Fulfilling The Rights of Creditors

Perseroan memiliki kebijakan terkait hubungan dengan kreditor sebagaimana telah dijelaskan di dalam:

1. Pedoman GCG, pada bagian Pedoman bagi *Stakeholder*, aspek Kreditor; dan
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) pada bagian Etika Usaha Perusahaan, aspek Hubungan dengan Kreditor.

Dalam kebijakan tersebut antara lain dijelaskan bahwa Perseroan memenuhi hak-hak kreditor sesuai perjanjian yang telah disepakati. PPI melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukannya serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal dalam upaya menjaga kepercayaan kreditor.

The Company has policies regarding relationships with creditors as described in:

1. GCG Guidelines, in the Stakeholder Guidelines section, regarding Creditors; and
2. Business Ethics and Code of Conduct in the Company's Business Ethics section, regarding Relationships with Creditors.

These policies outline the Company's commitment to honoring creditors' rights as stipulated in the agreed-upon agreements. PPI manages loan funds effectively according to their purposes and strives for optimal repayment rates in an effort to maintain creditor trust.

Kebijakan Seleksi Pemasok

Supplier Selection Policy

PPI memiliki kebijakan dan pedoman yang digunakan sebagai panduan untuk menjalin hubungan dengan pemasok, antara lain diatur dalam:

- 1) Peraturan Direksi Nomor: 036/DU/SKD/PPI/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Ketentuan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan; dan
- 2) Surat Keputusan Direksi Nomor: 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan.

PPI has policies and guidelines that are used as guidance for building relationships with suppliers, including those regulated in:

- 1) The Board of Directors Regulation Number: 036/DU/SKD/PPI/IV/2016 dated April 13, 2016, regarding Changes to the Provisions and Procedures for the Procurement of Non-Trade Goods and Services; and
- 2) The Board of Director's Decree Number: 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 regarding Guidelines for the Procurement of Merchandise.



Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PPI, mulai dari analisa kebutuhan, proses dan tahapan pengadaan barang/jasa sampai dengan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Dalam praktiknya, pelaksanaan hubungan dengan pemasok/rekanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seleksi pemasok/rekanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persyaratan yang terukur dan jelas.
- 2) PPI memberikan informasi yang sama kepada setiap rekanan terkait peluang atau rencana pengadaan, persyaratan, tata cara serta melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka sampai dengan penetapan calon pemenang penyedia barang dan/atau jasa. Akses informasi peluang pengadaan barang/jasa dimuat dalam *website* Perseroan.
- 3) PPI memberikan peluang yang sama bagi calon pemasok sepanjang aturan dan ketentuan yang telah ditentukan diikuti oleh calon pemasok. Pemilihan calon pemasok dilakukan PPI berdasarkan proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

PPI melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemasok/rekanan (*vendor performance*) untuk melihat keterlibatan pemasok/rekanan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas dan kebutuhan Perseroan serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perseroan untuk menggunakan kembali rekanan/pemasok yang bersangkutan.

The procurement for goods and services are carried out in accordance with the provisions and procedures applicable at PPI, starting from needs analysis, the procurement process, and stages of goods/services procurement up to payment in accordance with the requirements in the agreement. In practice, the implementation of relationships with suppliers/vendors can be explained as follows:

- 1) Supplier/vendor selection is carried out in accordance with applicable regulations with measurable and clear requirements.
- 2) PPI provides the same information to each vendor regarding procurement opportunities or plans, requirements, procedures, and conducts the procurement process for goods and services openly until the determination of the prospective winning provider of goods and/or services. Information access for procurement opportunities for goods/services is posted on the company's website.
- 3) PPI provides equal opportunities for prospective suppliers as long as the rules and regulations established are followed by the prospective suppliers. The selection of prospective suppliers is carried out by PPI based on the processes or stages established in the Procurement Procedures for Goods and Services.

PPI conducts assessments and evaluations of suppliers/vendors (*vendor performance*) to observe the involvement of suppliers/vendors in supporting the company's activities and needs and is used as consideration for the Company to reuse the respective vendors/suppliers.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara optimal sangat penting bagi perusahaan, antara lain untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Untuk itu, PPI terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi di Perseroan guna mempercepat pertumbuhan bisnis, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di industri di mana PPI menjalankan kegiatan usahanya.

Information Technology Policy and Governance

Optimal utilization of Information Technology (IT) is very important for the Company, among others, to increase its competitiveness in the market. For this reason, PPI continues to strive to develop the Information Technology infrastructure in the Company to accelerate business growth, as well as accommodate various changes in the industry in which PPI conducts its business activities.

Selain itu, PPI juga memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi dengan efektif. Memanfaatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan pemberian layanan dan memitigasi risiko operasional secara efisien. Dengan memanfaatkan perangkat dan sistem TI, organisasi dapat merampingkan proses, meningkatkan saluran komunikasi, dan memastikan akses tepat waktu ke data penting, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan daya tanggap. Selain itu, solusi TI menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat dan protokol manajemen data, mengurangi kemungkinan gangguan dan meningkatkan ketahanan secara keseluruhan terhadap potensi ancaman dan kerentanan.

PPI telah memiliki kebijakan dan tata kelola Teknologi Informasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi perusahaan. Acuan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan Teknologi Informasi telah sesuai dengan pencapaian tujuan PPI. Tata kelola Teknologi Informasi terdiri dari struktur kebijakan dan kumpulan proses yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan Teknologi Informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya Teknologi Informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait Teknologi Informasi.

Landasan Hukum Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

Secara garis besar, pengelolaan sistem Teknologi Informasi PPI mengacu pada:

- 1) PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi informasi BUMN;
- 2) PER-03/MBU/02/2018 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
- 3) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 07/DO/SE/PPI/ IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- 4) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor 08/DO/SE/PPI/ IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

In addition, PPI utilizes Information Technology to provide the best service and minimize business operational risks faced effectively. Utilizing Information Technology (IT) infrastructure enables businesses to optimize service delivery and mitigate operational risks efficiently. By leveraging IT tools and systems, organizations can streamline processes, enhance communication channels, and ensure timely access to critical data, thereby improving service quality and responsiveness. Furthermore, IT solutions offer robust security measures and data management protocols, reducing the potential disruptions and enhancing overall resilience against potential threats and vulnerabilities.

PPI has an Information Technology policy and governance that serves as a reference in managing and developing the Company's Information Technology. The reference aims to ensure that the application of Information Technology is in accordance with the achievement of PPI's objectives. Information Technology governance consists of a policy structure and a collection of processes that are useful for optimizing Information Technology benefits and opportunities, controlling the use of Information Technology resources, and managing Information Technology-related risks.

Legal Basis for Information Technology System Management

Broadly speaking, the management of the PPI Information Technology system refers to:

- 1) PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of SOE Information Technology Management;
- 2) PER-03/MBU/02/2018 on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises on the Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2013 on Guidelines for the Preparation of Information Technology Management of State-Owned Enterprises;
- 3) Circular Letter of the Board of Directors (SE) Number: 07/DO/SE/PPI/ IV/2022 dated April 20, 2022 concerning the General Policy of Information Technology Governance (IT Governance) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- 4) Circular Letter of the Board of Directors (SE) Number 08/DO/SE/PPI/ IV/2022 dated April 20, 2022 concerning Information Technology Policies and Procedures of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);



- 5) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor 10/DO/SE/PPI/ VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Tentang Penerbitan Prosedur Operasi Baku Tata Kelola Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

- 5) Circular of the Board of Directors (SE) Number 10/DO/SE/PPI/ VII/2022 dated July 27, 2022 concerning the Issuance of Standard Operating Procedures for the Governance of the Information Technology Management Work Unit of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pengembangan Kompetensi SDM Teknologi Informasi

Perkembangan dunia Teknologi Informasi yang sangat dinamis harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Teknologi Informasi sehingga dapat menunjang perkembangan Teknologi Informasi di dalam perusahaan. Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan internal dan eksternal, khususnya pelatihan yang bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki.

Selain keterampilan teknis, Perseroan menekankan pembelajaran mandiri dan pencarian informasi sebagai kompetensi dasar bagi sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi (TI). Pendekatan ini menumbuhkan budaya perbaikan dan kemampuan beradaptasi yang berkelanjutan, memberdayakan para profesional TI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri. Dengan memprioritaskan kemampuan belajar mandiri dan mencari informasi, Perseroan memastikan tenaga kerja TI tetap gesit, inovatif, dan siap menghadapi tantangan yang terus berkembang di bidang teknologi yang dinamis.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Di tengah dinamika lanskap bisnis modern, Teknologi Informasi (TI) berfungsi sebagai katalisator penting, atau *business enabler*, bagi kesuksesan bisnis suatu perusahaan, dengan memungkinkan perusahaan tersebut untuk berinovasi, merampingkan proses, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Infrastruktur dan solusi TI harus terintegrasi secara mulus dengan operasi bisnis, memfasilitasi komunikasi yang efisien, manajemen data, dan proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, peran TI sebagai penggerak bisnis terletak pada kemampuannya untuk menyelaraskan kemampuan teknologi dengan tujuan strategis, mendorong pertumbuhan dan menumbuhkan ketahanan di dunia yang semakin terdigitalisasi.

Menyadari hal tersebut, PPI memberi perhatian serius dalam pemilihan dan pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang tepat agar dapat mendukung kelancaran bisnisnya. Seluruh kegiatan pengelolaan TI mulai dari

Information Technology HC Competency Development

The rapid development of the Information Technology world must be accompanied by an enhancement of the quality and competence of IT human resources to support the Company's Information Technology advancements. Therefore, PPI is committed to continuously providing internal and external training, especially technical training tailored to the Company's needs, with the aim of enhancing the competence of its IT workforce.

In addition to technical skills, the Company emphasizes self-learning and information-seeking as fundamental competencies for Information Technology (IT) human resources. This approach fosters a culture of continuous improvement and adaptability, empowering IT professionals to stay abreast of emerging technologies and industry trends. By prioritizing self-learning and information-seeking abilities, the Company ensures its IT workforce remains agile, innovative, and equipped to tackle evolving challenges in the dynamic field of technology.

Scope and Responsibility

Amidst the dynamic business landscape, Information Technology (IT) serves as a critical catalyst, or *business enabler*, for business success, enabling the Company to innovate, streamline processes, and gain competitive advantages. IT infrastructure and solutions should seamlessly integrate with business operations, facilitating efficient communication, data management, and decision-making processes. Ultimately, IT's role as a business enabler lies in its ability to align technological capabilities with strategic objectives, driving growth and fostering resilience in an increasingly digitalized world.

Recognizing this, PPI pays serious attention to the selection and management of Information Technology (IT) to ensure smooth business operations. All IT management activities, from planning & organizing,

plan & organize, acquire & implement, delivery & support, sampai dengan monitor & evaluate senantiasa dikelola dengan baik agar memberikan kontribusi maksimal bagi PPI.

Teknologi Informasi & ERP (Divisi TI & ERP) memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan strategi implementasi sistem informasi yang mendukung tujuan jangka panjang PPI. Selain itu, Divisi TI & ERP juga memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan, implementasi sistem informasi jangka panjang, dan inovasi dalam pengelolaan sistem informasi PPI.

acquiring & implementing, delivering & supporting, to monitoring & evaluating, are consistently managed properly to provide maximum contribution to PPI.

Information Technology & ERP (IT & ERP Division) is responsible for planning and developing the implementation strategy of information systems that support PPI's long-term goals. Additionally, the IT & ERP Division provides guidance in formulating policies, implementing long-term information systems, and innovating in the management of PPI's information systems.





Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Information Technology Development Roadmap

AREA STRATEGIS Strategic Area	KONSOLIDASI Consolidation	PENGUATAN Enforcement	PERTUMBUHAN Growth	PENGUASAAN Mastery	EKSPANSI Expansion
	2025	2026	2027	2028	2029
Proses Bisnis / Operasional	A. Proses Bisnis - Penguatan sistem operasional eksisting (Sinur, Monalisa, Website Corporate, Adinda dll) - Pengembangan sistem baru sesuai dengan kebutuhan user - Implementasi sistem Mygps pada armada cabang sebagai monitoring tracking armada. - Pengembangan integrasi sistem Elmira dan ERP berupa data master vendor - Pengembangan integrasi sistem Arlita VA dan ERP berupa otomatisasi settlement pembayaran. - Integrasi sistem ERP dan Samantha untuk pengelolaan data ERP. - Support pengembangan sistem bagi anper untuk kepegawaian dan surat elektronik. - Pemenuhan kebutuhan layanan TI melalui helpdesk/CR/SR - Optimalisasi sistem finance dan operation ERP - Penyajian data analytic sebagai dasar pengambilan keputusan. B. Pemasaran/ Penjualan - Pengembangan Warung pangan dalam mendukung program pangan. - Penguatan aplikasi sales force (Salma). - Pengembangan modul tracing dan pembayaran Unilever. - Penguatan sistem arlita virtual account untuk kemudahan pembayaran. - Pengembangan integrasi sistem Salma dan ERP berupa data master pelanggan	A. Proses Bisnis - Penguatan dan evaluasi sistem operasional eksisting - Pengembangan sistem baru sesuai dengan kebutuhan user. - Implementasi sistem monitoring dan tracking armada. - Pengembangan integrasi sistem Sinur dan ERP - Pengembangan WMS untuk mendukung pengelolaan pergudangan. - Optimalisasi Monalisa untuk inventarisir asset TI dan umum. - Support pengembangan sistem bagi anper. - Pemenuhan kebutuhan layanan TI melalui helpdesk/CR/SR - Optimalisasi sistem finance dan operation ERP - Pengembangan dashboard sebagai dasar pengambilan keputusan. - Pengembangan sistem pengelolaan arsip. - Penguatan sistem helpdesk B. Pemasaran/ Penjualan - Mengembangkan dan memperkuat aplikasi Warung Pangan untuk kebutuhan cluster pangan. - Pengembangan fitur aplikasi komersil eksisting (Salma, PPI Property, Arlita B2, Monita dll). - Penguatan modul tracing dan pembayaran Unilever. - Penguatan sistem Virtual Account untuk skema alokasi pembayaran. - Pengembangan CRM untuk layanan pelanggan.	A. Proses Bisnis - Penguatan dan evaluasi sistem operasional eksisting - Pengembangan sistem baru sesuai dengan kebutuhan user - Mengintegrasikan sistem di PT PPI dengan environment IT di anper / holding. - Pengembangan integrasi sistem ERP dengan aplikasi pendukung atau sistem eksternal. - Penguatan WMS untuk mendukung pengelolaan pergudangan. - Peningkatan Sistem Monalisa untuk mengelola seluruh asset holding PPI. - Pengembangan Sistem Supply Demand. - Support pengembangan sistem bagi anper. - Pemenuhan kebutuhan layanan TI melalui helpdesk/CR/SR - Optimalisasi sistem finance dan operation ERP - Pengembangan dashboard sebagai dasar pengambilan keputusan. B. Pemasaran/ Penjualan - Meningkatkan implementasi aplikasi Warung Pangan untuk komersialisasi pangan. - Pengembangan fitur aplikasi komersil eksisting (Salma, PPI Property, Arlita B2, Monita dll). - Penguatan CRM dengan menerapkan Customer Self-Service Portal - Pengembangan aplikasi e-commerce untuk komoditas non pangan. - Integrasi Salma dan CRM	A. Proses Bisnis - Penyempurnaan sistem operasional eksisting sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi - Pengembangan sistem baru sesuai dengan kebutuhan user - Pengembangan integrasi sistem ERP dengan aplikasi pendukung atau sistem eksternal. - Pengembangan fitur WMS untuk mendukung pengelolaan pergudangan. - Implementasi dan Penguatan Sistem Supply Demand. - Support pengembangan sistem bagi anper. - Pemenuhan kebutuhan layanan TI melalui helpdesk/CR/SR - Evaluasi dan Penguatan sistem ERP. - Penguatan data analytic sebagai dasar pengambilan keputusan. - Implementasi dan Penguatan aplikasi Pengelolaan Armada. B. Pemasaran/ Penjualan - Evaluasi dan Penyempurnaan aplikasi komersil (Warung Pangan, Salma, PPI Property, Arlita B2 dan Monita dll) sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. - Implementasi dan Penguatan E-Commerce untuk komoditas non pangan. - Implementasi omnichannel service - Competitive Intelligence Dashboard Terpadu	A. Proses Bisnis - Penyempurnaan sistem operasional eksisting sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi - Pengembangan sistem baru sesuai dengan kebutuhan user - Integrasi sistem PPI end to end. - Integrasi atau otomasi sistem WMS untuk meningkatkan pengelolaan pergudangan. - Penguatan Sistem Supply Demand. - Support pengembangan sistem bagi anper. - Pemenuhan kebutuhan layanan TI melalui helpdesk/CR/SR - Evaluasi dan Penguatan sistem ERP. - Penguatan data analytic sebagai dasar pengambilan keputusan. - Implementasi dan Penguatan aplikasi Pengelolaan Armada. B. Pemasaran/ Penjualan - Evaluasi dan Penyempurnaan aplikasi komersil (Warung Pangan, Salma, PPI Property, Arlita B2 dan Monita dll) sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. - Implementasi dan Penguatan E-Commerce untuk komoditas non pangan. - Implementasi omnichannel service - Competitive Intelligence Dashboard Terpadu

AREA STRATEGIS Strategic Area	KONSOLIDASI Consolidation	PENGUATAN Enforcement	PERTUMBUHAN Growth	PENGUASAAN Mastery	EKSPANSI Expansion
	2025	2026	2027	2028	2029
Proses Bisnis / Operasional	A. Business Processes - Strengthening existing operational systems (Sinur, Monalisa, Corporate Website, Adinda, etc.) - Developing new systems according to user needs - Implementing the MyGPS system in branch fleets for fleet tracking monitoring. - Developing integration of the Elmira and ERP systems in the form of vendor master data. - Developing integration of the Arlita VA and ERP systems in the form of payment settlement automation. - Integrating the ERP and Samantha systems for ERP data management. - Supporting system development for personnel and email administration. - Meeting IT service needs through helpdesk/CR/SR - Optimizing the ERP finance and operations system - Presenting analytical data as a basis for decision-making. B. Marketing/Sales - Developing food stalls to support the food program. - Strengthening the sales force application (Salma). - Developing the Unilever tracing and payment module. - Strengthening the Arlita virtual account system for payment convenience. - Developing integration of the Salma and ERP systems in the form of customer master data.	A. Business Processes - Strengthening and evaluating existing operational systems - Development of new systems according to user needs. - Implementation of a fleet monitoring and tracking system. - Development of Sinur and ERP system integration - WMS development to support warehouse management. - Optimization of Monalisa for IT and general asset inventory. - Support system development for ANPER. - Fulfillment of IT service needs through helpdesk/CR/SR - Optimization of ERP finance and operations systems - Development of dashboards as a basis for decision making. - Development of archive management system. - Strengthening the helpdesk system B. Marketing/Sales - Develop and strengthen the Warung Pangan application for food cluster needs. - Development of existing commercial application features (Salma, PPI Property, Arlita B2, Monita etc.). - Strengthening Unilever's tracing and payment modules. - Strengthening the Virtual Account system for payment allocation schemes. - CRM development for customer service.	A. Business Processes - Strengthening and evaluating existing operational systems - Development of new systems according to user needs - Integrating the system at PT PPI with the IT environment at the company/holding. - Development of ERP system integration with supporting applications or external systems. - Strengthening WMS to support warehouse management. - Improvement of the Monalisa System to manage all PPI holding assets. - Supply Demand System Development. - Support system development for ANPER. - Fulfillment of IT service needs through helpdesk/CR/SR - Optimization of ERP finance and operations systems - Development of dashboards as a basis for decision making. B. Marketing/Sales - Increasing the implementation of the Warung Pangan application for food commercialization. - Development of existing commercial application features (Salma, PPI Property, Arlita B2, Monita etc.). - Strengthening CRM by implementing the Customer Self-Service Portal - Development of e-commerce applications for non-food commodities. - Salma and CRM integration.	A. Business Processes - Improvement of existing operational systems in accordance with developments in needs and technology - Development of new systems according to user needs - Development of ERP system integration with supporting applications or external systems. - Development of WMS features to support warehouse management. - Implementation and Strengthening of the Supply Demand System. - Support system development for ANPER. - Fulfillment of IT service needs through helpdesk/CR/SR - Evaluation and Strengthening of the ERP system. - Strengthening analytical data as a basis for decision making. - Fleet Management application development. B. Marketing/Sales - Strengthening existing commercial applications (Warung Pangan, Salma, PPI Property, Arlita B2, Monita etc.). - Implementation and Strengthening of E-Commerce for non-food commodities. - Virtual Assistant or Chatbot Development - Integration of commercial systems with ERP - Implementation of ML-based Predictive Pricing	A. Business Processes - Improvement of existing operational systems in accordance with developments in needs and technology - Development of new systems according to user needs - End to end PPI system integration. - Integration or automation of WMS systems to improve warehouse management. - Strengthening the Supply Demand System. - Support system development for ANPER. - Fulfillment of IT service needs through helpdesk/CR/SR - Evaluation and Strengthening of the ERP system. - Strengthening analytical data as a basis for decision making. - Implementation and Utilization of Fleet Management applications. B. Marketing/Sales - Evaluation and improvement of commercial applications (Warung Pangan, Salma, PPI Property, Arlita B2 and Monita etc.) in accordance with developments in needs and technology. - Implementation and Strengthening of E-Commerce for non-food commodities. - Implementation of omnichannel service - Integrated Competitive Intelligence Dashboard



AREA STRATEGIS Strategic Area	KONSOLIDASI Consolidation	PENGUATAN Enforcement	PERTUMBUHAN Growth	PENGUASAAN Mastery	EKSPANSI Expansion
	2025	2026	2027	2028	2029
SDM, Organisasi & Teknologi	A. SDM, Organisasi & Tata Kelola - Pembaharuan tim <i>steering committee</i> - Pembuatan prosedur BCP (<i>Business Continuity Plan</i>) - Pembentukan tim <i>Business Continuity Plan</i> - Menerapkan dan pembaharuan kebijakan standarisasi TI - Kepatuhan <i>management IT</i> dengan implementasi <i>maturity level</i>, <i>IT Governance</i> dan <i>Framework COBIT 19</i> - Pelatihan atau sertifikasi SDM di bidang IT untuk meningkatkan <i>knowledge</i> dan keterampilan dibidang teknologi dengan cara sertifikasi maupun <i>benchmark trend</i> teknologi - Penguatan sistem kepegawaian Mysiska B. Teknologi - Implementasi DRC untuk mendukung BCP - Monitoring dan <i>maintenance</i> terhadap infrastruktur dan sistem - Pengembangan Sistem PPI Access sebagai <i>Platform Digital trade Logistics</i>. - Penguatan Infrastruktur dan keamanan data - Digitalisasi Gudang <i>Stockpoint</i>	A. SDM, Organisasi & Tata Kelola <i>Review</i> dan Pembaharuan kebijakan TI - Pembuatan prosedur PDP. - Pembuatan prosedur penanganan insiden keamanan siber. - Pelatihan atau sertifikasi SDM di bidang IT untuk meningkatkan <i>knowledge</i> dan keterampilan dibidang teknologi dengan cara sertifikasi maupun <i>benchmark trend</i> teknologi - Melakukan evaluasi dan pemenuhan terhadap struktur organisasi TI - Implementasi modul <i>payroll</i> pada Aplikasi MYSISKA B. Teknologi - Optimalisasi jaringan internet di Pusat dan Cabang. - Penguatan <i>data center</i> dan <i>up-sizing</i> untuk mendukung stabilitas sistem IT Perusahaan. - Pemenuhan IT <i>security</i> untuk tercapainya pengamanan data yang handal. - Penerapan IoT di pergudangan PPI - Digitalisasi GSP dan Gudang Cabang. - Implementasi <i>Multi Factor Authentication</i> (MFA) untuk akses kritis - Pemenuhan perangkat kerja Cabang dan Kantor Pusat	A. SDM, Organisasi & Tata Kelola <i>Review</i> dan Pembaharuan kebijakan TI - Pelatihan atau sertifikasi SDM di bidang IT untuk meningkatkan <i>knowledge</i> dan keterampilan dengan cara sertifikasi maupun <i>benchmark trend</i> teknologi - Melakukan evaluasi dan pemenuhan terhadap struktur organisasi TI - Membangun sistem <i>Knowledge Management System</i> untuk mendukung <i>trade logistics</i> - Penambahan modul <i>E-Assesment</i> pada Aplikasi MYSISKA - Pengembangan Arsitektur Perusahaan (EA) B. Teknologi - Penguatan infrastruktur jaringan internet di Pusat dan Cabang. - Migrasi sistem kritis ke <i>cloud</i> - Penerapan IoT di pergudangan dan armada PPI - Digitalisasi Gudang Cabang. - Pengembangan katalog layanan TI - Pemanfaatan AI untuk kebutuhan <i>data analytic</i>. - Pemenuhan perangkat kerja Cabang dan Kantor Pusat - Pemasangan tools deteksi ancaman siber	A. SDM, Organisasi & Tata Kelola - Penyelarasan STO TI baik IT pusat maupun IT anak usaha dengan mengadopsi standar <i>framework</i> dalam penerapannya. <i>Review</i> dan Pembaharuan kebijakan TI - Pelatihan atau sertifikasi SDM di bidang IT untuk meningkatkan <i>knowledge</i> dan keterampilan dibidang teknologi dengan cara sertifikasi maupun <i>benchmark trend</i> teknologi - Kepatuhan dalam penerapan <i>cyber security</i> dalam penerapan dan <i>assessment</i> ISO 270001 berupa setandar keamanan. - Membangun sistem aplikasi monitoring kinerja berupa KPI <i>Management System</i> yang terintegrasi dengan <i>holding</i> B. Teknologi - Penguatan infrastruktur jaringan internet dan <i>security</i> - Membangun konektivitas data saling terhubung antar aplikasi. - Peningkatan IT <i>security</i> untuk tercapainya pengamanan data yang handal untuk mendukung kegiatan operasional aplikasi. - Penerapan IoT di pergudangan dan armada PPI - Optimalisasi sumber daya <i>cloud</i> - Pemanfaatan AI untuk kebutuhan <i>data analytic</i>.	A. SDM, Organisasi & Tata Kelola <i>Review</i> dan Pembaharuan kebijakan TI - Pelatihan atau sertifikasi SDM di bidang IT untuk meningkatkan <i>knowledge</i> dan keterampilan dengan cara sertifikasi maupun <i>benchmark trend</i> teknologi - Melakukan evaluasi dan pemenuhan terhadap struktur organisasi TI - Memperkuat Budaya dan GCG dalam peningkatan GCG pada IT serta memperkuat Optimalisasi IT <i>Service Management</i> B. Teknologi - Penguatan infrastruktur jaringan internet dan <i>security</i> yang handal disetiap Cabang dan terintegrasi dengan Kantor Pusat - Membangun big data komoditi pangan nasional yang berkolaborasi dengan provider berskala internasional - Peningkatan IT <i>security</i> untuk tercapainya pengamanan data yang handal untuk mendukung kegiatan operasional aplikasi. - Upgrade sisytem IoT pada <i>warehouse</i> dan armada - Revitalisasi infrastruktur teknologi Informasi untuk penguatan sistem. - Pemanfaatan AI untuk kebutuhan <i>data analytic</i>.

AREA STRATEGIS Strategic Area	KONSOLIDASI Consolidation	PENGUATAN Enforcement	PERTUMBUHAN Growth	PENGUASAAN Mastery	EKSPANSI Expansion
	2025	2026	2027	2028	2029
HR, Organization & Technology	A. HR, Organization & Governance - Renewal of the steering committee team - Creation of BCP (Business Continuity Plan) procedures - Formation of the Business Continuity Plan team - Implementing and updating IT standardization policies - IT management compliance with the implementation of maturity levels, IT Governance and the COBIT 19 Framework - HR training or certification in the IT sector to increase knowledge and skills in the technology sector by means of certification and benchmarking technology trends - Strengthening Mysiska's personnel system B. Technology - Implementation of DRC to support BCP - Monitoring and maintenance of infrastructure and systems - Development of the PPI Access System as a Digital Trade Logistics Platform. - Strengthening infrastructure and data security - Stockpoint Warehouse Digitalization	A. HR, Organization & Governance - Review and Update IT policies - Creation of PDP procedures. - Creation of procedures for handling cyber security incidents. - HR training or certification in the IT sector to increase knowledge and skills in the technology sector by means of certification and benchmarking technology trends - Evaluate and fulfill the IT organizational structure - Implementation of the payroll module in the MYSISKA Application B. Technology - Optimizing the internet network at the Center and Branches. - Data center strengthening and up-sizing to support the stability of the Company's IT system. - Fulfillment of IT security to achieve reliable data security. - Implementation of IoT in PPI warehouses - Digitalization of GSP and Branch Warehouse. - Implement Multi-Factor Authentication (MFA) for critical access - Fulfillment of work equipment for Branches and Head Office.	A. HR, Organization & Governance - Review and Update IT policies - HR training or certification in the IT sector to increase knowledge and skills in the technology sector by means of certification and benchmarking technology trends - Evaluate and fulfill the IT organizational structure - Building a Knowledge Management System to support trade logistics - Addition of the E Assessment module to the MYSISKA Application - Enterprise Architecture (EA) Development B. Technology - Strengthening internet network infrastructure at the Center and Branches. - Migrate critical systems to the cloud - Application of IoT in PPI warehouses and fleets - Branch Warehouse Digitalization. - Development of IT service catalogue - Utilization of AI for data analytic needs. - Fulfillment of work equipment for Branches and Head Office - Installation of cyber threat detection tools	A. HR, Organization & Governance - Alignment of STO IT for both central IT and subsidiary IT by adopting framework standards in its implementation. - Review and Update IT policies - HR training or certification in the IT sector to increase knowledge and skills in the technology sector by means of certification and benchmarking technology trends - Compliance in implementing cyber security in implementing and assessing ISO 270001 in the form of security standards. - Building a performance monitoring application system in the form of a KPI Management System that is integrated with the holding B. Technology - Strengthening internet network infrastructure and security - Building interconnected data connectivity between applications. - Improved IT security to achieve reliable data security to support application operational activities. - Application of IoT in PPI warehouses and fleets - Cloud resource optimization - Utilization of AI for data analytic needs.	A. HR, Organization & Governance - Review and Update IT policies - HR training or certification in the IT sector to increase knowledge and skills in the technology sector by means of certification and benchmarking technology trends - Evaluate and fulfill the IT organizational structure - Strengthening Culture and GCG in improving GCG in IT and strengthening IT Service Management Optimization B. Technology - Strengthening reliable internet network infrastructure and security in each branch and integrating with the Head Office - Building big data on national food commodities in collaboration with international scale providers - Improved IT security to achieve reliable data security to support application operational activities. - Upgrade the IoT system in the warehouse and fleet - Revitalization of information technology infrastructure to strengthen the system. - Utilization of AI for data analytic needs.
Investasi	A. Investasi Rutin - Aktiva Tidak Berwujud : Rp14 M - Inventaris Kantor: Rp3,7 M	A. Investasi Rutin - Aktiva Tidak Berwujud : Rp14,9 M - Pengembangan Inventaris: Rp1,2 M - Inventaris Kantor: Rp3,8 M	A. Investasi Rutin - Aktiva Tidak Berwujud : Rp15,5 M - Pengembangan Inventaris: Rp2 M - Inventaris Kantor: Rp4 M	A. Investasi Rutin - Aktiva Tidak Berwujud : Rp13,5 M - Pengembangan Inventaris: Rp1,1 M - Inventaris Kantor: Rp3,5 M	A. Investasi Rutin - Aktiva Tidak Berwujud : Rp13,5 M - Pengembangan Inventaris: Rp1,1 M - Inventaris Kantor: Rp3,5 M
Investment	A. Routine Investment - Intangible Assets: Rp14 Bio - Office Inventory: Rp3.7 Bio	A. Routine Investment - Intangible Assets: Rp14.9 Bio - Inventory Development: Rp1.2 Bio - Office Inventory: Rp3.8 Bio	A. Routine Investment - Intangible Assets: Rp15.5 Bio - Inventory Development: Rp2 Bio - Office Inventory: Rp4 Bio	A. Routine Investment - Intangible Assets: Rp13.5 Bio - Inventory Development: Rp1.1 Bio - Office Inventory: Rp3.5 Bio	A. Routine Investment - Intangible Assets: Rp13.5 Bio - Inventory Development: Rp1.1 Bio - Office Inventory: Rp3.5 Bio

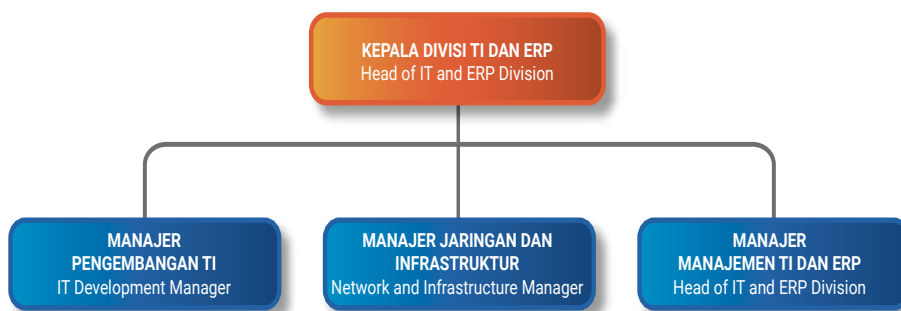


Penanggung Jawab Pengelola Teknologi Informasi

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 perihal Penetapan Struktur Organisasi ditetapkan bahwa Divisi Teknologi Informasi adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi PPI. Divisi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi.

Per 31 Desember 2025, jumlah personil Divisi Teknologi Informasi adalah sebanyak 8 orang PKWTT dan 4 orang PKWT.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi di Perseroan:



Head of Information Technology Management

Referring to the Board of Director's Decree No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 regarding the Determination of Organizational Structure, it is stipulated that the Information Technology Division is the unit responsible for the development and implementation of PPI's Information Technology development programs. The Information Technology Division is led by a Division Head who reports directly to the Director of Operations.

As of December 31, 2025, the number of personnel in the Information Technology Division is 8 permanent employees and 4 contract employees.

Below is the organizational structure of the Information Technology management in the Company:

Investasi di Bidang Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2025, Divisi Teknologi Informasi & ERP telah merealisasikan sejumlah investasi yang bertujuan untuk menunjang Bisnis proses di PPI, di antaranya:

1. Pemenuhan perangkat kerja.
2. Pemenuhan infrastruktur TI untuk GSP DKI Jakarta.

Investments in the Field of Information Technology

Throughout 2025, the Information Technology & ERP Division has implemented several investments aimed at supporting business processes at PPI, including:

1. Fulfillment of work equipment.
2. Fulfillment of IT infrastructure for GSP DKI Jakarta.

Pengeluaran TI IT Spending	Rencana Tahun 2025 2025 Plan	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 Results for the Fourth Quarter of 2025	%Realisasi terhadap Rencana % of Plan Achieved
CAPEX TI	16.905.507.787	500.425.100	3%

Keterangan :

- a. Untuk menjaga efisiensi dan melindungi arus kas perusahaan, penyerapan belanja modal (capex) pada tahun 2025 dilakukan secara selektif sehingga penyerapan belum optimal.
- b. Investasi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan layanan TI, khususnya penyediaan perangkat kerja bagi pegawai, guna mendukung kelancaran operasional Perusahaan.

Notes:

- a. To maintain efficiency and protect the Company's cash flow, capital expenditures (capex) in 2025 were implemented selectively, resulting in suboptimal utilization.
- b. Investments were made solely to meet IT service needs, particularly the provision of work equipment for employees, in order to support the Company's smooth operations.

Realisasi Program Teknologi Informasi tahun 2025

1. Realisasi Program Penyelenggaraan TI

- 1). Implementasi DRC untuk mendukung BCP
 - a. Penjelasan Program
Rencana pemenuhan *Disaster Recovery Center* (DRC) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis dan meminimalkan dampak negatif akibat terjadinya bencana atau gangguan signifikan terhadap infrastruktur TI utama Perusahaan.
 - b. Pencapaian *Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program: 100% dari 100% yang terdiri dari:
 - a. Pengajuan Proposal DRC 100%;
 - b. Pengadaan DRC 100%;
 - c. Implementasi DRC 100%;
 - d. Pengujian DRC 100%.
 - 2) Persentase realisasi anggaran program DRC *Cloud* Sebesar Rp199.998.000,- dari total anggaran sebesar Rp210.000.000,-.
 - c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - 1) Kategori Dampak: *Regulatory* dan *System Improvement*;
 - 2) Evaluasi Efektivitas: Persiapan yang matang dalam menghadapi bencana, kemudahan pemulihan data dan sistem serta Kepatuhan terhadap regulasi.
- 2) Optimalisasi ERP
 - a. Penjelasan Program
Untuk memaksimalkan manfaat dari sistem ERP dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas data dan penyempurnaan ERP berdasarkan *change request* atas kebutuhan *user*.
 - b. Pencapaian *Progress*
 - 1) Persentase capaian program: 92% dari 100%
 - a. Pemenuhan terhadap ITCR 100% Terdapat 27 permintaan ITCR terkait ERP dan telah selesai dikembangkan sebanyak 23 permintaan.
 - b. Pemenuhan lisensi ERP 100%.
 - 2) Persentase realisasi anggaran program sebesar 36%. Realisasi biaya lisensi dan *mandays maintenance* ERP sebesar Rp691.894.600 dari total anggaran sebesar Rp1.903.883.000,-.
 - c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - 1) Kategori Dampak: *Process* dan *System Improvement*;

Realization of Information Technology Programs in 2025

1. IT Implementation Program Implementation

- 1). DRC Implementation to Support BCP
 - a. Program Description
Plan for the implementation of PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia's Disaster Recovery Center (DRC) to ensure business continuity and minimize the negative impacts of disasters or significant disruptions to the Company's core IT infrastructure.
 - b. Progress Achievement
Progress achievement summary:
 - 1) Program achievement percentage: 100% of 100%, consisting of:
 - a. DRC Proposal Submission 100%;
 - b. DRC Procurement 100%;
 - c. DRC Implementation 100%;
 - d. DRC Testing 100%.
 - 2) Percentage of DRC Cloud program budget realization: Rp199,998,000 out of a total budget of Rp210,000,000.
 - c. Evaluation of IT Implementation Effectiveness
 - 1) Impact Category: Regulatory and System Improvement;
 - 2) Effectiveness Evaluation: Thorough disaster preparation, ease of data and system recovery, and regulatory compliance.
- 2) ERP Optimization
 - a. Program Explanation
To maximize the benefits of the ERP system in increasing productivity, improving data quality, and improving the ERP based on change requests and user needs.
 - b. Progress Achievement
 - 1) Program achievement percentage: 92% of 100%
 - a. ITCR Compliance: 100%. There were 27 ERP-related ITCR requests, and 23 of them have been developed.
 - b. ERP license compliance: 100%.
 - 2) Program budget realization percentage: 36%. ERP license and daily maintenance costs amounted to Rp691,894,600 out of a total budget of Rp1,903,883,000.
 - c. IT Implementation Effectiveness Evaluation
 - 1) Impact Category: Process and System Improvement;



- 2) Evaluasi Efektivitas:
 - a. Kategori Dampak: *System Improvement*;
 - b. Evaluasi Efektivitas: Pemenuhan terhadap kebutuhan pengguna dengan indeks kepuasan layanan Unit Kerja ERP sebesar 84,8%.

- 3) Penguatan Infrastruktur dan keamanan data
 - a. Penjelasan Program
Implementasi *internet gateway* di Cabang Makassar dan Bandung untuk menciptakan infrastruktur jaringan yang aman, mendukung kelancaran operasional, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, serta memungkinkan pengelolaan terpusat.
 - b. Pencapaian *Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program 100% dari 100%
 - a. Implementasi Cabang Makassar 100%;
 - b. Implementasi Cabang Malang 100%;
 - 2) Persentase realisasi anggaran program besar: belum ada realisasi.
 - c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - 1) Kategori Dampak: *System Improvement*;
 - 2) Evaluasi Efektivitas: kemudahan pengelolaan dan pemantauan jaringan di Cabang serta peningkatan keamanan data.

- 4) Integrasi Sistem
 - a. Penjelasan Program Proses
integrasi antara sistem utama ERP dengan sistem pendukung lainnya (non ERP) untuk menciptakan alur kerja yang seamless, mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi data. Integrasi akan dilakukan antara ERP dengan aplikasi Samantha, Arlita VA, Elmira dan Sinur.
 - b. Pencapaian *Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program: 95% dari 100%
 - a) Integrasi *database customer* antara ERP dan Salma 100%;
 - b) Integrasi *database Vendor* antara ERP dan ELMIRA 100%;
 - c) Integrasi *settlement invoice* Arlita VA dengan sistem ERP 100%;
 - d) Integrasi SINUR dan ERP 80%.
 - 2) Persentase realisasi anggaran program sebesar 61% dengan realisasi biaya mandays sebesar Rp92.400.000 dari total anggaran Rp152.200.000.
 - c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - 1) Kategori Dampak : *Process* dan *System Improvement*;

- 2) Effectiveness Evaluation:
 - a. Impact Category: *System Improvement*;
 - b. Effectiveness Evaluation: Fulfillment of user needs with an ERP Work Unit service satisfaction index of 84.8%.

- 3) Strengthening Infrastructure and Data Security
 - a. Program Explanation
Implementation of internet gateways at the Makassar and Bandung Branches to create a secure network infrastructure, support smooth operations, facilitate communication and collaboration, and enable centralized management.
 - b. Progress Achievement
Progress achievement summary:
 - 1) Percentage of program achievement: 100% of 100%
 - a. Makassar Branch Implementation: 100%;
 - b. Malang Branch Implementation: 100%;
 - 2) Percentage of large program budget realization: not yet realized.
 - c. IT Implementation Effectiveness Evaluation
 - 1) Impact Category: *System Improvement*;
 - 2) Effectiveness Evaluation: Ease of network management and monitoring at the Branch, as well as improved data security.

- 4) System Integration
 - a. Program Process Explanation
Integration between the main ERP system and other supporting systems (non-ERP) to create a seamless workflow, reduce data duplication, and improve data accuracy. Integration will be carried out between the ERP and the Samantha, Arlita VA, Elmira, and Sinur applications.
 - b. Progress Achievements
Progress achievement summary:
 - 1) Program achievement percentage: 95% of 100%
 - a) Customer database integration between ERP and Salma 100%;
 - b) Vendor database integration between ERP and ELMIRA 100%;
 - c) Arlita VA invoice settlement integration with the ERP system 100%;
 - d) SINUR and ERP integration 80%.
 - 2) Program budget realization percentage is 61%, with realized man-day costs of Rp92,400,000 out of a total budget of Rp152,200,000.
 - c. Evaluation of IT Implementation Effectiveness
 - 1) Impact Category: *Process* and *System Improvement*;

- | | |
|--|--|
| <p>2) Evaluasi Efektivitas: Pengurangan waktu siklus proses bisnis, pengurangan kesalahan data dan pengurangan duplikasi data.</p> <p>5) Pengembangan dan Penguatan Aplikasi</p> <p>a. Penjelasan Program
Pengembangan aplikasi baru dan penguatan aplikasi eksisting untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna atau proses bisnis Perusahaan.</p> <p>b. Pencapaian <i>Progress</i>
1) Rekap pencapaian <i>progress</i>:
Persentase capaian program sebesar 100% dari 100% yang terdiri dari:
a. Pengembangan sistem kearsipan (DARA) 100%;
b. Pengembangan sistem Adinda_NG untuk PPI Industri 100%;
c. Pengembangan sistem PPI Authenticator 100%;
d. Penguatan dan penambahan modul pada aplikasi eksisting (Sinur, MySiska, Monalisa, <i>Website Corporate</i>, Adinda, Elmira, Salma, Arko, WP, Arlita VA) 100%.</p> <p>2) Persentase realisasi anggaran program: tidak ada anggaran</p> <p>c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
1) Kategori Dampak: <i>Business dan Process Improvement</i>.
2) Evaluasi Efektivitas:
a. Indeks kepuasan layanan Unit Kerja Pengembangan TI sebesar 85,2%;
b. Efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan skalabilitas.</p> <p>6) Digitalisasi GSP</p> <p>a. Penjelasan Program
Pemenuhan infrastruktur IT (cctv, jaringan internet dan perangkat kerja) untuk Gudang <i>Stock Point</i> Medan dan Surabaya).</p> <p>b. Pencapaian <i>Progress</i>
Rekap pencapaian <i>progress</i>:
1) Persentase capaian program sebesar 55% dari 100% :
a. Digitalisasi GSP Surabaya 80% (Proses penyelesaian digitalisasi GSP di <i>hold</i> karena kendala perizinan);
b. Digitalisasi GSP Medan 30% (Proses penyelesaian di <i>hold</i> karena dalam proses pemulihan pasca banjir).</p> <p>2) Persentase realisasi Anggaran: realisasi menggunakan anggaran divisi logistik.</p> | <p>2) Effectiveness Evaluation: Reduction of business process cycle time, reduction of data errors, and reduction of data duplication.</p> <p>5) Application Development and Strengthening</p> <p>a. Program Explanation
Development of new applications and strengthening of existing applications to meet user specifications or the Company's business processes.</p> <p>b. Progress Achievement
1) Summary of progress achievement:
Program achievement percentage of 100% of 100%, consisting of:
a. Development of the archiving system (DARA) 100%;
b. Development of the Adinda_NG system for Industrial PPI 100%;
c. Development of the PPI Authenticator system 100%;
d. Strengthening and adding modules to existing applications (Sinur, MySiska, Monalisa, Corporate Website, Adinda, Elmira, Salma, Arko, WP, Arlita VA) 100%.</p> <p>2) Percentage of program budget realization: no budget</p> <p>c. IT Implementation Effectiveness Evaluation
1) Impact Category: Business and Process Improvement.
2) Effectiveness Evaluation:
a. IT Development Work Unit service satisfaction index of 85.2%;
b. Operational efficiency, improved data accuracy, improved decision-making, and scalability.</p> <p>6 GSP Digitalization</p> <p>a. Program Description
Provision of IT infrastructure (CCTV, internet network, and work equipment) for Stock Point Warehouses in Medan and Surabaya.</p> <p>b. Progress Achievement
Progress achievement summary:
1) Program achievement percentage of 55% of 100%:
a. Surabaya GSP digitalization 80% (GSP digitalization completion process on hold due to licensing issues);
b. Medan GSP digitalization 30% (Completion process on hold due to post-flood recovery).</p> <p>2) Percentage of budget realization: realization Using the logistics division budget.</p> |
|--|--|



- c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - 1) Kategori Dampak: *Process* dan *System Improvement*;
 - 2) Evaluasi Efektivitas: Peningkatan keamanan gudang, kemudahan dalam pencatatan stock dan pemantauan aktivitas gudang.
- 7) Penyusunan tata kelola teknologi
 - a. Penjelasan Program
Penerapan tata kelola yang efektif terhadap kepatuhan regulasi industri dan pemerintah melalui pemenuhan Tata Kelola Teknologi Informasi yang terstandarisasi berdasarkan *best practice* serta mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan.
 - b. Pencapaian *Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program: 97% dari 100% yang terdiri dari
 - a) Penyusunan kebijakan *DRP* 100%;
 - b) Penyusunan Rencana Strategis TI 90% (Dalam proses finalisasi penyelarasan dengan *RJPP PPI*);
 - c) Penyusunan *Business Continuity Plan* 100%
 - d) Penyusunan Tim kerja yang bersifat Teknologi *BCP* 100%;
 - e) Penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 100%
 - f) Pembaharuan Tim Kerja yang bersifat teknologi Informasi 100%;
 - g) Penyusunan Kebijakan Perusahaan mengenai Perlindungan Data Pribadi 90%.
 - 2) Persentase realisasi anggaran program: tidak ada anggaran.
 - c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - a) Kategori Dampak: *Regulatory*;
 - b) Evaluasi Efektivitas: Keselarasan dengan tujuan bisnis, pemenuhan terhadap standar tata kelola TI yang ditetapkan dan kepatuhan terhadap regulasi.
- 8) Monitoring dan *maintenance* terhadap infrastruktur dan sistem
 - a. Penjelasan Program
Pemantauan berkala terhadap kinerja infrastruktur dan sistem serta melakukan tindakan pemeliharaan secara berkala untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan, meliputi :
 - 1) Mengelola Jaringan Internet dan Intranet;
 - 2) Mengelola Instalasi OS, *Hardware* dan aplikasi untuk perangkat IT laptop/komputer;
 - 3) Monitoring dan *Controlling operasional Server, Backup* dan *Mail Server*;

- c. Evaluation of IT Implementation Effectiveness
 - 1) Impact Category: *Process* and *System Improvement*;
 - 2) Effectiveness Evaluation: Improved warehouse security, ease of stock recording, and monitoring of warehouse activities.
- 7) Technology Governance Development
 - a. Program Explanation
Implementation of effective governance to ensure compliance with industry and government regulations through standardized Information Technology Governance based on best practices and supporting the achievement of sustainable business goals.
 - b. Progress Achievement
Progress achievement summary:
 - 1) Percentage of program achievement: 97% of 100%, consisting of:
 - a) Development of the *DRP* policy 100%;
 - b) Development of the IT Strategic Plan 90% (In the process of finalizing alignment with the *PPI RJPP*);
 - c) Development of the *Business Continuity Plan* 100%
 - d) Development of a Technology-Based *BCP* Team 100%;
 - e) Development of an Information Security Management System 100%
 - f) Renewal of the Information Technology Work Team 100%;
 - g) Development of a Company Policy on Personal Data Protection 90%.
 - 2) Percentage of program budget realization: no budget available.
 - c. IT Implementation Effectiveness Evaluation
 - a) Impact Category: *Regulatory*;
 - b) Effectiveness Evaluation: Alignment with business objectives, compliance with established IT governance standards, and regulatory compliance.
- 8) Monitoring and maintenance of infrastructure and systems
 - a. Program Description
Periodic monitoring of infrastructure and system performance and conducting regular maintenance to prevent disruptions or damage, including:
 - 1) Managing Internet and Intranet Networks;
 - 2) Managing OS, Hardware, and Application Installations for IT laptops/computers;
 - 3) Monitoring and Controlling Server, Backup, and Mail Server Operations;

- 4) *Controlling Operasional Active Directory dan Security (Endpoint Security, Gateway Security, etc)* terhadap jaringan dan data.
 - 5) Monitoring dan *Controlling* operasional *Server* serta instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan infrastruktur IT;
 - 6) Monitoring dan *Controlling* operasional *Firewall*;
 - 7) *Layanan Support Kantor Pusat dan Cabang*;
 - 8) Monitoring dan *maintenance* terhadap infrastruktur dan sistem - *Backup data*;
 - 9) Monitoring dan *Controlling* operasional *Server* serta *security* jaringan dan data;
 - 10) Monitoring dan *Controlling* operasional Anti Virus.
- b. *Pencapaian Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
- 1) Persentase capaian program 100% dari 100%;
 - 2) Persentase realisasi anggaran program sebesar 99,44%.
- c. *Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI*
- 1) Kategori Dampak: *Process dan System Improvement*;
 - 2) Evaluasi Efektivitas:
 - a. Indeks kepuasan layanan Unit Kerja Infrastruktur dan Jaringan sebesar 84,0%;
 - b. Downtime TW IV Tahun 2025 0.18%.
- 9) *Pemenuhan kebutuhan Help Desk*
- a. *Penjelasan Program Pemenuhan dan tindak lanjut terhadap kebutuhan layanan TI melalui aplikasi helpdesk TI.*
 - b. *Pencapaian Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program: 99,94% dari 100%. Terdapat 1.539 tiket layanan helpdesk s/d TW IV yang telah diselesaikan dan 1 tiket yang masih dalam proses;
 - 2) Persentase realisasi anggaran program: tidak ada anggaran.
 - c. *Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI*
 - 1) Kategori Dampak: *System Improvement*;
 - 2) Evaluasi Efektivitas: Pemenuhan kebutuhan layanan IT dengan Indeks kepuasan layanan Divisi TI dan ERP TW IV tahun 2025 sebesar 84,67%.
- 4) *Controlling Active Directory and Security Operations (Endpoint Security, Gateway Security, etc.)* for networks and data;
 - 5) Monitoring and controlling server operations, as well as the installation, configuration, and maintenance of IT infrastructure;
 - 6) Monitoring and controlling firewall operations;
 - 7) Headquarters and branch office support services;
 - 8) Monitoring and maintaining infrastructure and systems - data backup;
 - 9) Monitoring and controlling server operations, network and data security;
 - 10) Monitoring and controlling antivirus operations.
- b. *Progress Achievement*
Progress achievement summary:
- 1) Program achievement percentage: 100% of 100%;
 - 2) Program budget realization percentage: 99.44%.
- c. *IT Implementation Effectiveness Evaluation*
- 1) Impact Category: Process and System Improvement;
 - 2) Effectiveness Evaluation:
 - a. Infrastructure and Network Work Unit service satisfaction index: 84.0%;
 - b. Downtime in Q4 2025: 0.18%.
- 9) *Fulfilling Help Desk Needs*
- a. *Explanation of the Program: Fulfilling and following up on IT service needs through the IT helpdesk application.*
 - b. *Progress Achievement*
Progress achievement summary:
 - 1) Program achievement percentage: 99.94% of 100%. As of Q4, 1,539 helpdesk service tickets have been resolved, and 1 ticket is still in progress;
 - 2) Program budget realization percentage: No budget allocated.
 - c. *IT Implementation Effectiveness Evaluation*
 - 1) Impact Category: System Improvement;
 - 2) Effectiveness Evaluation: Fulfillment of IT service needs, with the IT and ERP Division's service satisfaction index for Q4 2025 being 84.67%.



2. Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham

1) Pengembangan Sistem Rekonsiliasi Akuntansi Keuangan

- a. Penjelasan Program Proses pengembangan atau pembaharuan sistem yang digunakan untuk Rekonsiliasi Akuntansi Keuangan Antar Perusahaan di lingkungan ID FOOD Group.
- b. Pencapaian *Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program: 100% dari 100%;
 - 2) Persentase realisasi anggaran program: Tidak ada anggaran.
- c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 - 1) Kategori Dampak: *Process dan System Improvement*;
 - 2) Evaluasi Efektivitas: Proses konsolidasi berjalan efektif, efisiensi proses, peningkatan akurasi data.

2) Penilaian Penyelenggaraan TI (Asesmen ITML)

- a. Penjelasan Program Proses penilaian yang dilakukan untuk menilai level atau tingkat kematangan dalam pengelolaan teknologi informasi suatu organisasi.
- b. Pencapaian *Progress*
Rekap pencapaian *progress*:
 - 1) Persentase capaian program: 100% dari 100% yang terdiri dari:
 - a) Identifikasi calon asesor untuk pelaksanaan asesmen ITML meliputi *price*, ruang lingkup, *requirement* dll) 100%;
 - b) Pengadaan Asesor 100%;
 - c) Pelaksanaan Asesmen 100% dengan skor 3,33.
 - 2) Persentase realisasi anggaran program sebesar Rp190.000.000 atau Efisiensi sebesar 68,33% dari anggaran Rp600.000.000.
- c. Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan TI
 1. Kategori Dampak: *Process dan System Improvement*;
 2. Evaluasi Efektivitas: pemahaman terhadap kondisi TI saat ini dan perbaikan kedepannya, membantu mengidentifikasi potensi dan kerentanan.

2. Shareholder Aspiration Program Realization

1) Development of a Financial Accounting Reconciliation System

- a. Program Explanation: The process of developing or updating the system used for Intercompany Financial Accounting Reconciliation within the ID FOOD Group.
- b. Progress Achievement
Progress achievement summary:
 - 1) Program achievement percentage: 100% of 100%;
 - 2) Program budget realization percentage: No budget allocated.
- c. IT Implementation Effectiveness Evaluation
 - 1) Impact Category: Process and System Improvement;
 - 2) Effectiveness Evaluation: The consolidation process is effective, process efficiency is improved, and data accuracy is increased.

2) IT Implementation Assessment (ITML Assessment)

- a. Program Description: An assessment process conducted to assess the level of maturity in an organization's information technology management.
- b. Progress Achievement
Progress achievement summary:
 - 1) Program achievement percentage: 100% of 100%, consisting of:
 - a) Identification of potential assessors for the ITML assessment (including price, scope, requirements, etc.) 100%;
 - b) Procurement of Assessors 100%;
 - c) Assessment Implementation 100% with a score of 3.33.
 - 2) Percentage of program budget realization of Rp190,000,000, or 68.33% efficiency of the Rp600,000,000 budget.
- c. IT Implementation Effectiveness Evaluation
 1. Impact Category: Process and System Improvement;
 2. Effectiveness Evaluation: Understanding the current IT condition and future improvements, helping to identify potential and vulnerabilities.

Rencana Fokus Pengembangan Teknologi Informasi tahun 2026

Focus Plan for Information Technology Development in 2026

Program Kerja Teknologi Informasi Information Technology Work Program	Program Aspirasi Pemegang Saham Shareholder Aspiration Program
Implementasi DRC untuk mendukung BCP Implementation of the DRC to Support the BCP	Pengembangan Sistem Rekonsiliasi Akuntansi Keuangan Development of a Financial Accounting Reconciliation System
Optimalisasi ERP ERP Optimization	Penilaian Penyelenggaraan TI (Asesmen ITML) IT Implementation Assessment (ITML Assessment)
Penguatan Infrastruktur dan keamanan data Strengthening Infrastructure and Data Security	
Integrasi Sistem System Integration	
Pengembangan dan Penguatan Aplikasi Application Development and Enhancement	
Digitalisasi GSP GSP Digitization	
Penyusunan tata kelola teknologi Development of technology governance	
Monitoring dan <i>maintenance</i> terhadap infrastruktur dan sistem Monitoring and maintenance of infrastructure and systems	
Pemenuhan kebutuhan <i>Help Desk</i> Meeting Help Desk Needs	





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY







Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Dengan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, Perseroan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan. Namun demikian, Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan Perseroan.

Dengan mengacu pada GRI Standard, Laporan Keberlanjutan 2025 yang diterbitkan Perseroan memuat berbagai informasi yang elaboratif dan komprehensif mengenai kinerja keberlanjutan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Perseroan pada tahun 2025. Selain itu, Laporan Keberlanjutan Perseroan juga memuat pernyataan komitmen dan strategi keberlanjutan Perseroan. Melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkannya, PPI ingin membuktikan komitmennya atas transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta untuk membantu Perseroan dalam mengelola risiko keberlanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Laporan Keberlanjutan Perseroan tersedia pada situs web Perseroan <https://www.ptppi.co.id/> yang merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan ini.

Referring to POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports, the Company also publishes a Sustainability Report in a separate book from the Annual Report. However, the Sustainability Report is an integral part of the Company's Annual Report.

In accordance with GRI Standards, the Company's 2025 Sustainability Report contains various elaborative and comprehensive information regarding sustainability performance and the implementation of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs in 2025. Additionally, the Company's Sustainability Report also includes statements of commitment and sustainability strategies. Through the publication of its Sustainability Report, the Company aims to demonstrate its commitment to transparency, accountability, and responsible business practices, as well as to assist the Company in managing sustainability risks and creating long-term value for all stakeholders.

The Company's Sustainability Report is available on the Company's website <https://www.ptppi.co.id/>, which serves as an integral part of this Annual Report.





LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS







**PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA
(PERSERO)**

member of  **ID FOOD**

**PT PERUSAHAAN
PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

***PT PERUSAHAAN
PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		<i>Additional Information</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	i	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	ii	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	iii	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	iv	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Pengungkapan Lainnya (Entitas Induk)	v	<i>Other Disclosures (Parent Entity)</i>

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama/ Name
Alamat Kantor/ Office Address
Alamat Domisili / Domicile Address

Nomor Telepon/ Phone number
Jabatan/ Position

b. Nama/ Name
Alamat Kantor / Office Address
Alamat Domisili/ Domicile Address
Nomor Telepon/ Phone number
Jabatan/ Position

We the undersigned :

: Wahyu Sakti
: Jl. Abdul Muis NO. 8-10, Jakarta Pusat. 10160
: Komp. Villa Sukarame Permai Blok B.19
RT/RW 059/001 Kel/Desa Kebun Bunga
Sukarami
: +62 21 386 2141- 42
: **Direktur Utama / President Director**

: Oksan Omas M Panggabean
: Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta Pusat, 10160
: Jl Lap Roos I/18 C Kelurahan Bukit Duri Tebet
: +62 21 286 2141 – 42
: **Direktur Keuangan, Manajemen Risiko,
SDM & Umum / Director of Finance, Risk
Management, Human Resources & General**

Menyatakan bahwa :

- 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anak;
- 2 Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak.

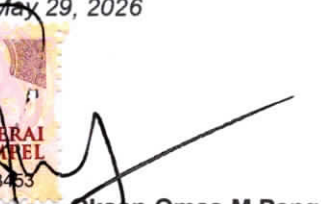
Stated that :

- 1 We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("the Company") and subsidiaries;
- 2 The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- a. All information contained in the consolidated financial statements in complete and correct;
- b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material information and fact;
- 4 We are responsible for the Company's and subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 29 Mei 2026/ May 29, 2026


Wahyu Sakti
Direktur Utama/ President Director


Oksan Omas M Panggabean
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum / Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 01061/2.1030/AU.1/05/1154-2/1/V/2026

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Penekanan atas Hal-hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengungkapkan nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp8.632.505.626.796. Nilai buku tersebut termasuk:

- Tanah dan bangunan yang tidak memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga sebesar Rp119.664.045.951.
- Tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa dan secara fisik dikuasai pihak ketiga sebesar Rp555.364.898.677.

Kami juga membawa perhatian ke Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengungkapkan nilai buku aset lain-lain (aset tetap yang tidak dimanfaatkan) pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp374.444.623.200. Nilai buku tersebut termasuk:

- Tanah dan bangunan yang tidak memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga sebesar Rp68.814.726.800.
- Tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa dan secara fisik dikuasai pihak ketiga sebesar Rp198.321.687.754.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang

Emphasis of Matters

We draw attention to Note 12 to the attached consolidated financial statements which discloses the book value of fixed assets as at 31 December 2025 amounting to Rp8,632,505,626,796. The book value includes:

- *Land and buildings which do not have Right to Use certificates or other proof of ownership documents and are physically controlled by third parties amounting to Rp119,664,045,951.*
- *Land and buildings which Right to Use certificates had expired and are physically controlled by third parties amounting to Rp555,364,898,677.*

We also draw attention to Note 16 to the consolidated financial statement which discloses the book value of other assets (unused fixed assets) as at 31 December 2024 amounting to Rp374,444,623,200. The book value includes:

- *Land and buildings which do not have Right to Use certificates or other proof of ownership documents and are physically controlled by third parties amounting to Rp68,814,726,800.*
- *Land and buildings which Right to Use certificates had expired and are physically controlled by third parties amounting to Rp198,321,687,754.*

Our opinion is not modified in respect of those above matters.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as at December 31, 2025, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as at December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying



mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami, membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

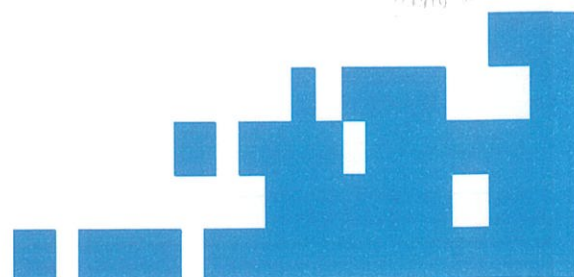
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance on the conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by IAPI.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu level keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

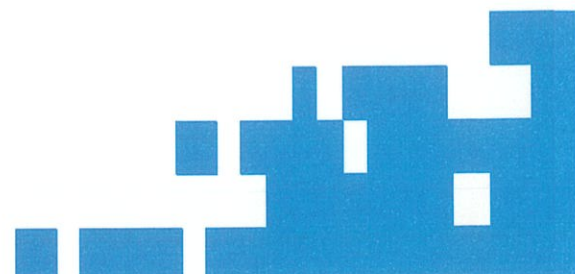
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

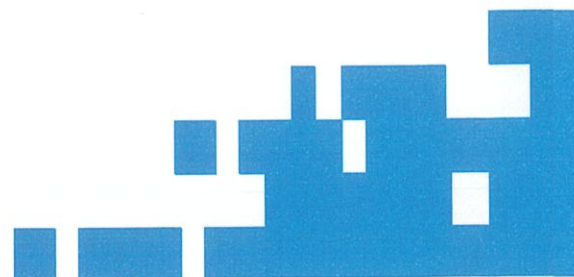
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*



- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dewi Novita Sari

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1154/
Public Accountant License Number: AP.1154

Jakarta, 29 Mei 2026/May 29, 2026



**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	189.621.008.563	146.198.113.646
Piutang Usaha:			
Pihak Berelasi	5,35	154.246.349.059	126.598.541.070
Pihak Ketiga	5	442.368.159.992	559.361.387.519
Piutang Lain-lain	6	25.652.086.014	31.904.568.882
Persediaan	7	38.144.048.712	64.918.130.840
Uang Muka	9	482.086.821.260	148.204.793.457
Pajak Dibayar di Muka	23.a	46.545.683.400	34.724.031.551
Biaya Dibayar di Muka	10	100.638.443.527	33.694.436.051
Aset Tidak Lancar			
yang Dimiliki untuk Dijual	8	--	59.259.000.000
Jumlah Aset Lancar		1.479.302.600.527	1.204.863.003.016
Aset Tidak Lancar			
Investasi pada Saham	11	3.954.654.645	4.499.798.487
Aset Tetap	12	8.632.505.626.796	1.887.173.516.844
Aset Takberwujud	13	18.124.680.810	21.712.294.385
Properti Investasi	14	1.509.381.114.750	1.279.969.600.000
Aset Hak Guna	15	28.768.004.617	13.311.686.840
Aset Pajak Tangguhan	23.c	174.247.457.954	169.199.727.539
Aset Lain-lain	16	377.289.897.405	403.228.869.664
Jumlah Aset Tidak Lancar		10.744.271.436.977	3.779.095.493.759
JUMLAH ASET		12.223.574.037.504	4.983.958.496.775
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha:			
Pihak Berelasi	17,35	90.018.503.724	56.362.783.650
Pihak Ketiga	17	685.454.498.596	403.825.903.316
Utang Pajak	23.b	14.860.626.052	20.005.583.297
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Jangka Panjang:			
Liabilitas Sewa	19	1.157.438.745	1.915.701.719
Beban yang Masih Harus Dibayar	20	99.811.224.892	216.745.415.674
Pendapatan Diterima di Muka	21	373.255.902.079	186.140.528.282
Utang Bank Jangka Pendek	22	79.700.000.000	303.255.452.211
Liabilitas Imbalan Kerja	25	376.805.151	276.693.052
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	18	92.112.309.030	59.028.769.971
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.436.747.308.269	1.247.556.831.172
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi	24	23.687.544.118	23.687.544.118
Liabilitas Sewa	19	3.661.697.584	2.281.446.783
Pendapatan Diterima di Muka	21	83.355.309.995	65.110.601.765
Liabilitas Imbalan Kerja	25	39.982.795.587	45.798.667.049
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		150.687.347.284	136.878.259.715
Jumlah Liabilitas		1.587.434.655.553	1.384.435.090.887

ASSETS	
Current Assets	
Cash and Cash Equivalents	
Trade Receivables:	
Related Parties	
Third Parties	
Other Receivables	
Inventories	
Advances	
Prepaid Taxes	
Prepaid Expenses	
Non-Current Assets Held for Sale	
Total Current Assets	
Non-Current Assets	
Investment in Shares	
Fixed Assets	
Intangible Assets	
Investment Properties	
Right of Use Assets	
Deferred Tax Assets	
Other Assets	
Total Non-Current Assets	
TOTAL ASSETS	
LIABILITIES	
Current Liabilities	
Trade Payables:	
Related Parties	
Third Parties	
Taxes Payable	
Short Term Liabilities	
Net of Non-Current Portion:	
Lease Liabilities	
Accrued Expenses	
Unearned Revenues	
Short-Term Bank Loan	
Employee Benefits Liabilities	
Other Current Financial Liabilities	
Total Current Liabilities	
Non-Current Liabilities	
Other Payables - Related Parties	
Lease Liabilities	
Unearned Revenues	
Employee Benefits Liabilities	
Total Non-Current Liabilities	
Total Liabilities	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.826.131, 942.745 dan 942.745 Saham Masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham	26	1.826.131.000.000	1.826.131.000.000	Authorized, Issued and Fully Paid - 1,826,131, 942,745 and 942,745 Shares in December 31, 2025, and 2024, Respectively, with Par Value of Rp1,000,000 Per Share
Tambahan Modal Disetor		(231.041.634.346)	(231.041.634.346)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya				Appropriated
Cadangan Umum	27	132.323.037.613	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	28	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum Ditentukan Penggunaannya		2.128.224.045.921	1.959.854.946.025	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		6.778.891.569.554	(68.886.006.531)	Other component equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada pemilik Entitas		10.636.059.930.911	3.599.480.652.611	Total Equity Attributable to Owner of the Entity
Kepentingan Non-pengendali	29	79.451.040	42.753.277	Non-controlling Interests
Jumlah Ekuitas		10.636.139.381.951	3.599.523.405.888	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12.223.574.037.504	4.983.958.496.775	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024*)	
Pendapatan Usaha	30	6.950.154.356.804	3.099.400.878.060	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	31	(6.466.008.887.112)	(2.756.509.261.380)	Cost of Revenues
LABA KOTOR		484.145.469.692	342.891.616.680	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi		(10.035.051.445)	(13.647.354.927)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	32	(316.291.001.657)	(294.337.214.633)	General and Administration Expenses
Jumlah Beban Usaha		(326.326.053.102)	(307.984.569.560)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		157.819.416.590	34.907.047.120	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA				NON OPERATING INCOME (EXPENSE)
Penghasilan Lain-lain	33	157.149.507.044	95.463.900.281	Other Income
Pendapatan Keuangan	34	3.412.205.326	350.897.639	Finance Income
Beban Lain-lain	33	(63.759.269.485)	(57.505.433.119)	Other Expenses
Beban Keuangan	34	(13.787.808.496)	(24.047.436.665)	Finance Expenses
Pajak Final	23.c	(34.928.661.729)	(23.865.152.080)	Final Tax
LABA SEBELUM PAJAK		205.905.389.250	25.303.823.176	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	23.c	(17.102.825.889)	(4.871.220.857)	Income Tax Expenses
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		188.802.563.361	20.432.602.319	NET PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Kerugian yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar	11	(545.693.841)	(3.020.873.852)	Unrealized loss on Financial assets at fair value
Surplus Revaluasi Aset Tetap	12	6.864.126.996.860	--	Revaluation surplus of Fixed Assets
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	25	(20.215.243.996)	(16.115.019.967)	Remeasurement of Employee Benefits
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	23.c	4.447.353.679	3.545.304.393	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		6.847.813.412.702	(15.590.589.426)	Other Comprehensive Income for The Year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		7.036.615.976.063	4.842.012.893	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada:				Net Profit Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		188.801.702.215	20.431.079.866	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali		861.146	1.522.453	Non-controlling Interest
		188.802.563.361	20.432.602.319	
Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				Comprehensive Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		7.036.579.278.300	4.840.483.187	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non pengendali		36.697.763	1.529.706	Non-controlling Interest
		7.036.615.976.063	4.842.012.893	

*) Direklasifikasi, lihat (Catatan 43)

*) Reclassification, see (Note 43)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended
 December 31, 2025 and 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo Laba/ Retained Earnings											
Telah Ditentukan Penggunaanya/											
Appropriated											
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Shares Capital	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Khusus/ Spesific Reserve	Belum Ditentukan Penggunaanya/ Unappropriated	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Component Equity	Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah/ Total		
Saldo per 1 Januari 2024		942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.939.423.866.159	(53.295.409.852)	2.711.253.393.218	41.223.571	2.711.294.616.789	Balance as of January 1, 2024
Penerbitan Modal Saham	25,27	883.386.000.000	776.206	--	--	--	--	883.386.776.206	--	883.386.776.206	Issued of Shares
Laba bersih Tahun Berjalan		--	--	--	--	20.431.079.866	--	20.431.079.866	1.522.453	20.432.602.319	Net Profit for the Year
Rugi Komprehensif Lain		--	--	--	--	--	(15.590.596.679)	(15.590.596.679)	7.253	(15.590.589.426)	Other Comprehensive Loss
Saldo per 31 Desember 2024		1.826.131.000.000	(231.041.634.346)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.959.854.946.025	(68.886.006.531)	3.599.480.652.611	42.753.277	3.599.523.405.888	Balance as of December 31, 2024
Pembentukan Cadangan Umum	27	--	--	20.432.602.319	--	(20.432.602.319)	--	--	--	--	Appropriation for general reserves
Laba bersih Tahun Berjalan		--	--	--	--	188.801.702.215	--	188.801.702.215	861.146	188.802.563.361	Net Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--	--	--	--	6.847.777.576.085	6.847.777.576.085	35.836.617	6.847.813.412.702	Other Comprehensive Income
Saldo per 31 Desember 2025		1.826.131.000.000	(231.041.634.346)	132.323.037.613	1.531.912.169	2.128.224.045.921	6.778.891.569.554	10.636.059.930.911	79.451.040	10.636.139.381.951	Balance as of December 31, 2025

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		7.397.743.944.149	2.766.782.180.464	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan		(6.975.387.131.348)	(2.664.026.493.639)	Cash Payment to Vendors and Employees
Pembayaran Kas untuk Beban Operasional dan Lainnya		(61.414.709.347)	(85.889.558.012)	Cash Payment to Operational Expenses and Others
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan	23.d	17.370.993.729	20.307.505.514	Cash Receipts from Corporate Income Taxes
Pembayaran Bunga		(15.585.923.962)	(23.659.145.353)	Payment Interest
Pembayaran Pajak		(32.030.903.000)	(33.347.155.749)	Tax Payment
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		330.696.270.221	27.485.623.931	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap	12	(21.728.036.035)	(2.970.567.868)	Acquisition of Fixed Assets
Uang Muka Penjualan Aset yang Dimiliki untuk Dijual	21	--	61.538.461.538	Advance of Sales on Assets held for sale
Pembelian Properti Investasi	14	(645.102.750)	--	Purchase Investment Properties
Penjualan Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	8	6.281.538.462	--	Sales on Non-Current Assets held for sale
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	12	102.702.703	4.258.075.000	Proceed From Sale of Fixed Asset
Penambahan Aset Lain-lain		(2.601.461.362)	(28.264.466.108)	Additional of Other Assets
Penambahan Aset Takberwujud	13	(969.301.526)	(1.163.120.070)	Acquisition of Intangible Assets
Penerimaan Dividen atas Aset Keuangan	33	132.519.750	--	Receipt of Dividens on Financial Assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(19.427.140.758)	33.398.382.492	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS				CASH FLOWS IN
PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Utang Bank - Jangka Pendek	22	1.003.963.465.991	595.247.600.091	Proceeds from Bank Loan - Current Portion
Pembayaran Utang Bank - Jangka Pendek	22	(1.227.518.918.202)	(551.660.897.028)	Payment Bank Loan - Current Portion
Pembayaran Utang Bank - Jangka Panjang	22	--	(15.417.371.970)	Payment Bank Loan - Long Term
Penerimaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	18	74.007.449.178	59.414.581.013	Proceeds of Financial Liabilities Current Portion
Pembayaran Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	18	(75.249.573.238)	(53.977.781.110)	Proceeds from Financial Liabilities Current Portion
Pembayaran Liabilitas Sewa	15,19,40	(43.048.657.683)	(9.656.313.003)	Payment of Lease Liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(267.846.233.954)	23.949.817.993	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		43.422.895.509	84.833.824.416	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS - PADA AWAL TAHUN		146.198.113.646	62.709.091.702	CASH AND CASH EQUIVALENTS - AT THE BEGINNING OF THE YEAR
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		(592)	(1.344.802.472)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		189.621.008.563	146.198.113.646	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("Perusahaan") atau Indonesia Trading Company ("ITC") merupakan hasil penggabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan ekspor, impor, dan distribusi. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Pasal 34 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang penggabungan PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero) ke dalam PT Cipta Niaga (Persero) yang berganti nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Penggabungan PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Dharma Niaga (Persero) ke dalam PT Cipta Niaga (Persero) disepakati melalui rancangan penggabungan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing perusahaan tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2003 yang dikukuhkan dengan akta notaris Betsail Untajana, S.H., No. 4 tanggal 9 Juni 2003. Penggabungan ketiga perusahaan tersebut disahkan dengan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H., No. 3 tanggal 9 Juni 2003 yang antara lain mengesahkan perubahan nama perusahaan menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, perubahan anggaran dasar serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-14008HT.04-TH.2003 tanggal 19 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75 Tambahan No. 8784 tanggal 19 Juni 2003.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-922/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksha (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H.,

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("the Company") or Indonesia Trading Company ("ITC") is the merger of three State-Owned Enterprises (BUMN), PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) and PT Cipta Niaga (Persero), which engaged in export trade, import and distribution. The merger was conducted under Act No. 1 Year 1995 concerning Limited Companies and Government Regulation No. 27 Year 1998 Article 34 regarding Merger, Consolidation and Takeover of Limited Company and Government Regulation No. 22 Year 2003 dated March 31, 2003 regarding merger of PT Dharma Niaga (Persero) and PT Pantja Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) which was renamed PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The merger of PT Pantja Niaga (Persero) and PT Dharma Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) was agreed through the draft merger in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the respective company held on February 4, 2003 as certified by notarial deed of Betsail Untajana, S.H., No. 4 dated June 9, 2003. The merger of the three companies was approved by deed of Extraordinary Shareholders Meeting of Notary Public Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H., No. 3 dated June 9, 2003 which among others legalized the change of company's name to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, amendment of articles of association and increase of authorized capital, issued and paid-up capital. The amendment of the articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights through its Decision Letter No. C-14008HT.04-TH.2003 dated June 19, 2003 and published in State Gazette No. 75 Supplement No. 8784 dated June 19, 2003.

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-922/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Reksha (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which was notarized under Deed No. 3 dated December 2, 2021 by Aulia

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan No. 12 tanggal 22 Maret 2024 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Para Pemegang Saham telah menyetujui dan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan (Catatan 26). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0060887.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2002.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ("RNI") merupakan entitas induk utama Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya melalui kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang yang terbagi dalam wilayah regional dengan pengklasifikasian sebagai berikut: 7 cabang utama, 14 cabang madya, 8 cabang pratama, dan 5 unit operasional.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No: 3 / SPMB / GC.01.05 / RNI.02 / 27/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, telah diputuskan bahwa masa jabatan Komisaris Utama berakhir efektif pada tanggal 1 April 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Taufani, S.H., the Ministry of State Owned Enterprises agreed to restructure State Owned Enterprises through the merger of PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The Company's Articles of Association have been amended several times and the last was based on Deed No. 12 dated March 22, 2024 by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, concerning the Statement of Shareholders' Resolutions in accordance with the Company's Articles of Association with the provisions of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007. The Shareholders have approved and decided to increase the Company's authorized capital (Note 26). This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights with his Decree No. AHU-0060887.AH.01.11.Tahun 2024 dated March 22, 2024.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association the purpose and objectives and business activities of the Company are to carry out business in the fields of agriculture, fisheries, processing industry, and wholesale trade. The Company started its commercial business activities in 2002.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ("RNI") is the ultimate parent entity of the Company.

The Company's head office is located at Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

The Company carries out its business activities through its head office in Jakarta and branch offices divided into regional areas with the following classifications: 7 main branches, 14 middle branches, 8 pratama branches, and 5 operational units.

1.b. Boards of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Letter of the Director of Human Resources of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 3 / SPMB / GC.01.05 / RNI.02 / 27/III/2025 dated March 27, 2025, it was resolved that the term of office of the President Commissioner ended effectively on April 1, 2025. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2025 and 2024 was as follows:

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	--	Hamli	President Commissioner
Komisaris	Setiawan Wangsaatmaja	Setiawan Wangsaatmaja	Commissioner
Komisaris Independen	Gigih Guntoro	Gigih Guntoro	Independent Commissioner
Dewan Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Soegeng Hernowo	Soegeng Hernowo	President Director
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	Wien Irwanto	Wien Irwanto	Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs
Direktur Komersial & Pengembangan	Edhy Rizwan	Edhy Rizwan	Director of Commercial & Development
Direktur Operasi	Noverita Anggraeny	Noverita Anggraeny	Director of Operation

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak masing-masing sebanyak 1.127 dan 1.266 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2025 and 2024 the Company and subsidiaries had a total of 1,127 and 1,266 employees (unaudited), respectively.

1.c. Komite Audit

Berdasarkan Surat Dewan Direksi Perusahaan No. 0221/DU/EKS/PPI/IV/025 pada tanggal 16 April 2025, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1.c. Audit Committee

Based on the Board of Directors' Letter No. 0221/DU/EKS/PPI/IV/2025 dated April 16, 2025, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 was as follows:

	2025	2024	
Komite Audit			Audit Committee
Ketua Komite	Gigih Guntoro	Gigih Guntoro	President Committee
Anggota	Maria Andriyani	Reinhard Harianja	Member
Anggota	Baban Sudarman	Helman Arief	Member

1.d. Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

1.d. Subsidiaries

The Company has control over the consolidated subsidiaries as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas/ Activity	Domisili/ Domicile	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Asset 31 Desember 2025/ Total Assets December 31, 2025 Rp	Jumlah Pendapatan 31 Desember 2025/ Total Revenues December 31, 2025 Rp
PT PPI Industri	Manufaktur dan Perdagangan/ Manufacturing and Trading	Palembang	18 September 1986/ September 18, 1986	99,90%	57.166.864.782	31.619.792.586
PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai/ formerly known as PT Trisari Veem) *)	Jasa Logistik/ Logistic Services	Jakarta	19 November 1963/ November 19, 1963	100,00%	670.846.110.366	986.432.925.660
PT PPI Property **)	Tidak aktif/ Dormant	Jakarta	1 November 2010/ November 1, 2010	99,96%	--	--

*) 0.04% kepemilikan tidak langsung melalui PT PPI Industri/Indirectly Ownership through PT PPI Industri

**) Saat ini dalam proses pembatalan Akta Pendirian/Currently in the process of cancelling the Deed of Establishment

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas/ Activity	Domisili/ Domicile	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Asset 31 Desember 2024/ Total Assets December 31, 2024 Rp	Jumlah Pendapatan 31 Desember 2024/ Total Revenues December 31, 2024 Rp
PT PPI Industri	Manufaktur dan Perdagangan/ Manufacturing and Trading	Palembang	18 September 1986/ September 18, 1986	99,90%	51.640.583.557	44.846.632.540
PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai/ formerly known as PT Trisari Veem) *)	Jasa Logistik/ Logistic Services	Jakarta	19 November 1963/ November 19, 1963	100,00%	527.153.932.267	901.734.243.697
PT PPI Property **)	Tidak aktif/ Dormant	Jakarta	1 November 2010/ November 1, 2010	99,96%	--	--

*) 0.04% kepemilikan tidak langsung melalui PT PPI Industri/Indirectly Ownership through PT PPI Industri

**) Saat ini dalam proses pembatalan Akta Pendirian/Currently in the process of cancelling the Deed of Establishment

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred as "the Group".

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan dihitung berdasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. Material Accounting Policy Information

2.a. Compliance to the Financial Accounting Standards (SAK)

The Group's consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") which include the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") which issued by the Financial Accounting Standard Board-Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI").

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is recalculated based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah (Rp) penuh, kecuali dinyatakan lain.

The consolidated financial statements are presented in full amount of Rupiah (Rp), unless otherwise stated.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

New standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, are as follows:

- PSAK 117: Insurance Contract;
- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability; and
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236: Impairment of Assets;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.d.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yaitu hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, pendapatan/penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi anta-entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

A subsidiary is an entity controlled by the Group that is the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements contain the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date that the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the

jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group loses control, the Group:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

- (a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) *Derecognize the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) *Recognize the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- (d) *Recognize any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) *Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) *Recognize any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs *spot* antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

2.e. Transactions and Balances in Foreign Currencies

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting year, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2025 and 2024 as follows:

	2025	2024	
USD	16.782	16.162	USD

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran mata uang asing diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

The net foreign exchange gains or losses arising from translation are recognized in the current year's profit or losses.

2.f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Entitas yang menyiapkan laporan keuangan (dalam hal ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas

2.f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity related to the entity that prepares financial statements (in this case referred to as the "reporting entity").

- a) *A person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Having significant influence over the reporter or reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - vii. *The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is*

entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham dari entitas.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa Pemegang Saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

2.g. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur

a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

- viii. The entity, or any member of a group of which the entity is a part of, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Related party to the Government entities are entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. Government in this case is defined within the scope of the Ministry of Finance which are the Shareholder of the entity.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government which are the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a Shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

2.g. Financial instruments Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial assets or a financial liability in the consolidated statements of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

At initial recognition, the Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value

pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest-SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas

through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be immaterial in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are Solely Payments of

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest-SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Principal and Interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana perubahan nilai wajar awalnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan dan kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value, where changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- c. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
- d. Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- a. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- b. Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- a. *Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- b. *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- c. *Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
 - i. *The amount of the loss allowance; and*
 - ii. *The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 115.*
- d. *Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.*

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- a. *It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- b. *A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.*

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas
Keuangan**

Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan

**Derecognition of Financial Assets and
Liabilities**

Financial Assets

The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Financial Liabilities

The Group removes a financial liability from its consolidated statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses on financial asset measured at amortized cost, financial asset measured at FVTOCI, contract asset or loan commitment and financial guarantee contract.

At the end of each reporting date, the Group measure any loss allowance for financial instruments at an amount equal to the lifetime expected credit loss if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since its initial recognition. However, if the credit risk has not increased significantly since initial recognition, then the Group measure the

sejak pengakuan awal, maka Grup mengukur penyisihan kerugian tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Grup mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai yang merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan dan disajikan sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. nilai waktu atas uang; dan
- iii. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk

loss allowance for at an amount equal to 12-month expected credit losses.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

The Group recognizes the amount of the expected credit loss (or recovery of credit loss) in profit or loss, as an impairment gain or loss which is an adjustment to the loss allowance at the reporting date and is presented as a deduction from the carrying amount of financial assets, except for financial assets measured at FVTOCI where the loss allowance is recognized in other comprehensive income.

Measurement of the expected credit losses of financial instruments is conducted in a way that reflects:

- i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. the time value of money; and*
- iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit

memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Perusahaan mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan yang tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Persediaan

Persediaan dibukukan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan ditentukan menggunakan metode FIFO. Barang dalam perjalanan dinyatakan sebesar FOB *Shipping Point*. Barang dalam proses dinyatakan sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pemrosesan.

Persediaan yang rusak dikelompokkan ke dalam persediaan barang rusak (aset lain-lain), yang merupakan barang-barang yang menurut kondisi fisiknya tidak sesuai lagi dengan isi dan bentuk aslinya dan barang-barang yang masa pemakaiannya sudah melebihi masa yang ditetapkan oleh pabrik (kedaluwarsa). Atas persediaan barang yang rusak disisihkan seluruhnya.

2.j. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode manfaat yang diharapkan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan di muka untuk barang atau jasa.

Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2.k. Aset Tidak Lancar yang dimiliki Untuk Dijual

Aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ketika besar kemungkinan bahwa aset tersebut akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut.

Aset tersebut pada umumnya diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan. Setelah diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, aset tetap tersebut untuk selanjutnya tidak lagi disusutkan.

2.l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan

2.h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all-time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not restricted.

2.i. Inventories

Inventories are recorded at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories is determined using FIFO method. The goods in transit are stated at FOB *Shipping Point*. Processed goods are expressed at the costs incurred in the processing phase.

Damaged inventories are grouped into inventory of damaged goods (other assets), which are goods which, according to their physical condition, are no longer in accordance with the original contents and forms and goods whose use has exceeded the period specified by the manufacturer (expired). Full provision is made on the damaged goods.

2.j. Prepaid Expense and Advances

Prepaid expense is amortized on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances are part of contractually due that is paid in advance for goods or services.

Advances are recorded as asset on the consolidated statement of financial position.

2.k. Non-Current Assets Held for Sale

Assets are classified as held for sale if it is highly probable that they will be recovered primarily through sale rather than through continuing use.

Such assets are generally measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell. Once classified as assets held for sale, such fixed assets are no longer depreciated.

2.l. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to

lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diukur menggunakan model revaluasi. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Jika jumlah tercatat tanah meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan menggunakan metode garis lurus, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tarif per Tahun/ Rate per Year	
Bangunan	2,5% - 10%	Building
Mesin/Instalasi	6,5%	Machine / Instalation
Inventaris kantor	12,5% - 25%	Office plant & equipment
Kendaraan	12,5% - 25%	Vehicle

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "aset tetap dalam penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya.

Nilai residu dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Land is measured using the revaluation model. The land appraisal was carried out by an external independent appraiser. Valuation of these assets is carried out periodically to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from their carrying value.

If the carrying amount of land increases as a result of revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus. The revaluation surplus of property, plant, and equipment included in equity is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized. The transfer of the revaluation surplus to retained earnings is not made through profit or loss.

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method, after calculating residual value based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Self-constructed of fixed assets are presented as part of the fixed assets under "construction in progress" and are stated at its cost.

The residual value and useful lives of the assets are reviewed and adjusted, if necessary, at each statement of financial position date.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Grup dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal.

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laba rugi tahun terjadinya.

2.m. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Costs after the initial acquisition is recognized as part of the carrying value of fixed assets or as a separate asset only when it is possible that economic benefits with respect to those assets in the future will flow to the Group and its cost can be measured reliably.

The cost of maintenance and repairs is recognized as an expense at the time of collection. Expenditures that extend the useful life of an asset or that provide an economic benefit in the form of capacity building, production quality, or performance are capitalized and depreciated in accordance with the useful life of the assets.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the consolidated financial statements and the resulting gains or losses are recognized in the consolidated statements of income.

2.m. Investment Property

Investment property are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses the fair value model and measures all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property shall be recognised in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

- Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.n. Aset Takberwujud

Aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis berikut ini:

2.n. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured at cost at initial recognition. After initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized using the straight-line method over the estimated useful lives as follows:

	Tarif per Tahun/ Rate per Year	
Perangkat lunak	10%-100%	Software
Hak atas tanah	2,5%	Landrights

2.o. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian

2.o. Provision

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu memengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban ini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2.p. Perpajakan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak berlaku atau

the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Where some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.p. Taxation

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan waktu kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan waktu kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: bukan kombinasi bisnis; pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a) Bukan kombinasi bisnis; dan
- b) Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
- c) Pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable timing differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) The initial recognition of goodwill; or*
- b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not: a business combination; at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and at the time transaction does not give equal taxable temporary difference and temporary difference is deductible in the same amount.*

Deferred tax assets recognized for all temporary differences are deductible to the extent that it is likely that taxable profits will be available so that temporary differences can be utilized to reduce such profits, unless deferred tax assets arise from early recognition of assets or early recognition of liabilities in transactions that:

- a) Is not a business combination; and*
- b) At the time the transaction does not affect accounting profit or taxable profit (tax loss); and*
- c) At the time transaction, does not give equal taxable temporary difference and temporary difference is deductible in the same amount.*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.q. Liabilitas Imbalan Kerja
Imbalan kerja jangka pendek

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan pensiun

Grup memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan kebijakan Grup.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. The same taxable entity; or*
 - ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) Has a legally enforceable right to offset the recognized amounts; and*
- b) Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.q. Employment Benefits Liabilities
Short-term employee benefit

The Group recognises short-term employee benefit liabilities when services are rendered and the compensation for such services is to be paid within 12 months after such services have been rendered.

Pension benefits

The Group has various pension schemes in accordance with prevailing Law and Group's policy.

Program pensiun imbalan pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang di mana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program pensiun pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Defined benefit plan

A defined pension benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually depending on one or more factors, such as age, years of service or compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Law or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation as at the consolidated statement of financial position date, less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in profit or loss in employee benefit expense, which reflects the increase in the defined obligations resulting from employee service in the current period.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

Remeasurement gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Program pensiun iuran pasti

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun di mana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan program iuran pasti, Perusahaan mengakui iuran terutang sebagai:

- a. liabilitas setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka Perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas; dan
- b. beban kecuali PSAK lain mensyaratkan iuran tersebut dimasukkan dalam biaya perolehan aset.

Ketika iuran pada program iuran pasti tidak diharapkan akan selesai sebelum 12 bulan setelah program pelaporan maka iuran tersebut didiskontokan.

Perusahaan memiliki program tabungan pensiun karyawan untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Para karyawan berkontribusi persentase tertentu dari gaji dasar dan sisa kontribusi ditanggung oleh Perusahaan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti insentif retensi dan cuti besar.

Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui di laba rugi.

Defined contribution plan

A defined pension contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal nor constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

In relation to defined contribution plans, the Company recognizes contributions payable as:

- a. liability after deducting contributions already paid. If the contributions already paid exceed the contributions payable for services before the end of the reporting period, the Company recognizes the excess as an asset to the extent that the excess will reduce future contribution payments or repayment in cash; and*
- b. an expense unless another PSAK requires the contributions to be included in the cost of the asset.*

When contributions to a defined contribution plan are not expected to be completed before 12 months after the reporting plan, the contributions are discounted.

The Company has a contributory employee savings programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by Pension Fund ("DPLK"). The employees contribute a certain percentage of their basic salary and the Company contributes the remaining balance of the required amount.

Other long-term employee benefits

The Company also provides other long-term employee benefits, such as merit pay and service leave.

The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the qualifying family members pass away. The reward is based on the Company's regulations. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau Ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

2.r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak.
 - (a) Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - (b) Kontrak memiliki substansi komersial;
 - (c) Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

2.r. Revenue and expense Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *The contract has been agreed by the parties involved in the contract.*
 - (a) *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - (b) *The contract has commercial substance;*
 - (c) *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer different goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- (a) Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- (b) Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- (a) Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- (b) Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- (c) Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

2.s. Pendapatan Diterima di Muka

Sewa dan biaya layanan yang diterima di muka dari penyewa dikreditkan ke "Pendapatan Diterima di Muka" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

A performance obligation may be satisfied at the following:

- (a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- (b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that can be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- (a) The Group simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- (b) The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- (c) The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Company and the Company has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Expense Recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

2.s. Unearned Revenue

Space rental and service charge received in advance from tenant are credited to "Unearned Revenue" in the consolidated statements of financial position and recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

2.t. Sewa

Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Grup menilai apakah:

- (a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- (b) Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- (c) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks liabilitas sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti

2.t. Leases

The Group as Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- (a) The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- (b) The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits of the use of assets during the period of use; and*
- (c) The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
 - The Group has the right to operate the asset; or*
 - The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option,

penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- (a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- (b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;

optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right of use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After the commencement date, the Group measures the right of use assets under the cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right of use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right of use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, The Group incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- (a) Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- (b) Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- (c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi *revision*.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup Sebagai Pesewa (Lessor)

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset sebagai sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

- (c) *Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Lease liabilities is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in The Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if The Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right of use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right of use asset has been reduced to zero.

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

The Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principle payments and finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

The Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.u. Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

2.v. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

2.w. Modal Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan dengan penerbitan saham biasa diakui sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pengaruh pajak.

2.u. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the noncontrolling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

2.v. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

2.w. Share Capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects.

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
Signifikan yang Digunakan Manajemen**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3.a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat penilaian berikut, selain dari yang termasuk estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan komponen pembayaran sewa, apakah pembayaran tersebut mengandung komponen pembayaran tetap atau variabel. Bila Grup wajib melakukan pembayaran

3. Management's Use of Significant Judgements, Estimates and Assumption

The preparation of the consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3.a. Judgement

In the process of applying the accounting policies, management has made the following judgements, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Management perform assessment on determining lease payment component, whether the payments contain fixed or variable payment component. If the Group is required to make a minimum payments, the Group

minimum maka Grup perlu melakukan pencatatan atas aset hak guna dan liabilitas sewa.

Sebaliknya, jika tidak terdapat pembayaran minimum maka sewa mengandung komponen pembayaran variabel dan dibukukan sebagai biaya dalam laba rugi. Hal ini memerlukan penilaian dan pertimbangan manajemen yang perlu diperbaharui dari waktu ke waktu.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, faktor-faktor berikut biasanya paling relevan:

- jika ada denda signifikan untuk membatalkan (atau tidak memperpanjang), Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Jika ada *leasehold improvement* yang diperkitakan memiliki nilai sisa yang signifikan, Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Selain dari itu, Grup mempertimbangkan faktor mencakup sejarah durasi sewa dan biaya serta halangan bisnis untuk menggantikan aset sewa.

Nilai tercatat atas aset hak guna dan liabilitas sewa masing-masing diungkapkan dalam Catatan 15 dan 19.

3.b. Asumsi dan Estimasi

Asumsi penting mengenai masa depan dan sumber utama lainnya dalam ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan

should record right of use assets and lease liabilities.

In the other hand, if there is no minimum payments, then the lease contain variable payment component and should be booked as expense at profit or loss. These need management's assessment and consideration which require periodical updates from time to time.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

For leases of properties and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

The carrying amounts of right of use assets and lease liabilities are disclosed in Notes 15 and 19, respectively.

3.b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a

penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan dijabarkan di bawah ini.

Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, Manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

Nilai Tercatat Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar diungkapkan pada Catatan 36

Revaluasian aset tetap tanah

Perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetap tanah untuk mencerminkan nilai wajar berdasarkan penilaian dari penilai independen yang kompeten. Proses ini melibatkan pertimbangan signifikan, termasuk frekuensi perubahan nilai pasar, kondisi fisik aset, serta ketersediaan data pasar yang dapat diandalkan. Revaluasi dicatat dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi, kecuali jika terjadi penurunan nilai yang harus diakui dalam laba rugi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan dalam revaluasi mencakup tingkat kapitalisasi, harga pasar terkini dari aset sejenis, serta proyeksi risiko ekonomi dan pasar properti. Perubahan dalam asumsi tersebut dapat berdampak material terhadap jumlah tercatat aset tetap dan posisi ekuitas perusahaan. Nilai tercatat aset tetap tanah diungkapkan pada Catatan 12.

Estimasi Masa Manfaat atas Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan pada ekspektasi dari penggunaan aset seperti yang dituangkan di dalam rencana dan strategi

material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below.

Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

The carrying amount of financial assets measured at fair value is disclosed in Note 36.

Revaluation of land fixed assets

The Company revalued its land fixed assets to reflect fair value based on the assessment of a qualified independent appraiser. This process involves significant judgment, including the frequency of changes in market value, the physical condition of the assets, and the availability of reliable market data. The revaluation is recorded in equity as a revaluation surplus, except in cases where an impairment must be recognized in profit or loss.

The estimates and assumptions used in the revaluation include capitalization rates, current market prices of comparable assets, as well as projections of economic and property market risks. Changes in these assumptions may have a material impact on the carrying amount of fixed assets and the Company's equity position. The carrying amount of land fixed assets disclosed in Note 12.

Estimating Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and intangible assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also

bisnis serta juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pelaku pasar yang diharapkan di masa yang akan datang. Estimasi mengenai masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penilaian kolektif Grup terhadap praktik industri. Evaluasi teknik internal dan pengalaman pada aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya akibat pemakaian dan kerusakan fisik. Teknis atau usang dan adanya keterbatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Hal ini dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat terpengaruh secara material oleh perubahan atas perkiraan yang timbul yang diakibatkan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode dipengaruhi oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud Grup akan meningkatkan biaya operasi yang dicatat dan menurunkan nilai dari aset tidak lancar. Perpanjangan masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud Grup akan menurunkan biaya operasi yang dicatat dan meningkatkan nilai dari aset tidak lancar. Nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud diungkapkan pada Catatan 12 dan 13.

Nilai wajar properti investasi

Grup mengukur nilai wajar properti investasi berdasarkan pendekatan nilai pasar dan pendapatan, dengan mempertimbangkan data transaksi properti sejenis, kondisi fisik aset, lokasi, serta potensi pendapatan masa depan. Manajemen menggunakan jasa penilai independen yang memiliki kompetensi dan pengalaman relevan untuk memastikan bahwa nilai wajar yang digunakan mencerminkan kondisi pasar terkini secara andal. Penentuan nilai wajar ini memerlukan pertimbangan profesional, terutama dalam memilih metode penilaian yang paling sesuai dan dalam menafsirkan data pasar yang tersedia.

Estimasi dan asumsi utama yang digunakan dalam penilaian wajar meliputi tingkat kapitalisasi, proyeksi arus kas, tingkat hunian, serta risiko pasar dan ekonomi yang dapat memengaruhi nilai properti. Perubahan terhadap asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan terhadap jumlah tercatat properti investasi dan laba rugi periode

consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets and intangible assets is based on the Group collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets increases the recorded operating expenses and decreases non-current assets. An extension in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets decreases the recorded operating expenses and increases non-current assets. The carrying amounts of fixed assets and intangible assets as disclosed in Notes 12 and 13.

Fair value of investment property

The Group measures the fair value of investment properties using the market and income approaches, taking into account comparable property transaction data, the physical condition of the assets, location, and future income potential. Management engages independent appraisers with relevant competence and experience to ensure that the fair value applied reliably reflects current market conditions. The determination of fair value requires professional judgment, particularly in selecting the most appropriate valuation method and in interpreting the available market data.

The key estimates and assumptions used in fair value measurement include capitalization rates, cash flow projections, occupancy rates, as well as market and economic risks that may affect the value of the properties. Changes in these assumptions could have a significant impact on the carrying amount of investment properties and the profit or loss for the period.

berjalan. Oleh karena itu, manajemen secara berkala meninjau kembali asumsi dan metodologi yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai wajar yang diakui tetap relevan dan dapat diandalkan. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan pada Catatan 14.

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan pasca kerja. Tingkat diskonto merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan estimasi nilai kini atas arus kas keluar di masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Untuk tingkat kenaikan gaji, Grup mengumpulkan semua data historis yang berhubungan dengan perubahan dasar gaji dan mengoreksinya di dalam rencana bisnis di masa yang akan datang.

Asumsi utama liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan telah dipaparkan di Catatan 25.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian (ECL), manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Therefore, management periodically reviews the assumptions and methodologies used to ensure that the recognized fair value remains relevant and reliable. The carrying amount of investment properties has been disclosed in Note 14.

Estimation of Pension and Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on factors that are determined on an actuarial basis using several assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for benefit obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 25.

Allowance for Impairment Losses on Receivables

The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses (ECL), management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

Grup mengevaluasi akun-akun tertentu yang diketahui bahwa beberapa pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah terutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas ECL piutang usaha (Catatan 5).

Realisasi Aset Pajak Tangguhan dan estimasi pajak penghasilan

Dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang signifikan. Transaksi dan perhitungan tertentu dalam penentuan pajak yang pada akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

Grup menelaah nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgements, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount of allowance for ECL of trade receivables (Note 5).

Realization of Deferred Tax Assets and Estimation of income tax

Determining provision for corporate income tax requires significant judgement by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

The Group reviews the carrying amount of a deferred tax asset at each reporting date and the carrying amount of the deferred tax asset is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

fiskal pada masa yang akan datang tersedia untuk pemulihannya.

recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Provisi dan Kontinjensi

Grup, dalam menjalankan bisnis biasa, menetapkan ketentuan yang sesuai untuk kewajiban hukum atau kewajiban konstruktifnya saat ini, jika ada, sesuai dengan kebijakannya tentang ketentuan dan kontinjensi. Dalam mengakui dan mengukur provisi, manajemen memperhitungkan risiko dan ketidakpastian.

Provisions and Contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2025	2024	
Kas			Cash on hand
Rupiah	574.734.532	8.929.342.163	Rupiah
Dolar AS	1.694.982	--	US Dollar
Subjumlah	576.429.514	8.929.342.163	Subtotal
Bank			Bank
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Rupiah	187.403.341.055	135.299.811.763	Rupiah
Dolar AS	250.095.199	364.547.029	US Dollar
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	921.054.281	106.654.060	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	422.195.487	348.968.928	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	17.612.944	69.568.926	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	14.384.861	26.567.268	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank Permata Tbk	4.850.242	962.524.462	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DKI	2.075.000	2.305.000	PT Bank DKI
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Permata Tbk	8.969.980	8.784.047	PT Bank Permata Tbk
Subjumlah	189.044.579.049	137.189.731.483	Subtotal
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Rupiah	--	79.040.000	Rupiah
Jumlah	189.621.008.563	146.198.113.646	Total
	2025	2024	
Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun	--	2,25%	Interest of time deposit per annum
Jangka waktu	--	3 Bulan/Months	Maturity period

5. Piutang Usaha

5. Trade Receivables

Piutang usaha merupakan tagihan yang telah difakturkan dengan rincian sebagai berikut:

Trade receivables represent invoices that have been billed in the following details:

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024
Piutang Usaha -		
Pihak Berelasi (Catatan 35)	315.526.610.516	240.244.607.338
Dikurangi: Cadangan Kerugian		
Penurunan Nilai	(161.280.261.458)	(113.646.066.268)
Jumlah Piutang Usaha - Pihak Berelasi - Bersih	154.246.349.059	126.598.541.070
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	905.477.337.184	1.061.493.724.721
Dikurangi: Cadangan Kerugian		
Penurunan Nilai	(463.109.177.192)	(502.132.337.202)
Jumlah Piutang Usaha - Pihak Ketiga - Bersih	442.368.159.992	559.361.387.519
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	596.614.509.051	685.959.928.589

Trade Receivables -
Related Parties (Note 35)
Less: Allowance for
Impairment Losses
Total Trade Receivable - Related Parties - Net
Trade Receivables - Third Parties
Less: Allowance for
Impairment Losses
Total Trade Receivables - Third Parties - Net
Total Trade Receivables - Net

Rincian per pelanggan sebagai berikut:

The details of the customer are as follows:

	2025	2024
Pihak berelasi (Catatan 35)	315.526.610.516	240.244.607.338
Dikurangi: Cadangan Kerugian		
Penurunan Nilai	(161.280.261.458)	(113.646.066.268)
Jumlah Piutang Usaha Pihak Berelasi - Bersih	154.246.349.059	126.598.541.070
Pihak ketiga:		
PT Artha Cipta Saudara	165.537.102.712	4.785.480.000
PT Pembangunan Kota Tua		
Jakarta / JOTRC	81.326.055.344	78.199.685.785
CV Cilacap Pangan Sejahtera	76.821.736.806	7.373.422.000
PT Telepoin Nusantara	75.546.921.225	75.546.921.225
PT Boga Citra Langgeng	29.298.836.000	3.355.360.000
PT Agrochemindo Niagatama	28.697.388.316	28.697.388.316
Haggag Import Company	22.734.360.000	8.496.180.000
PT Estika Tata Tiara	17.119.334.206	37.320.760.000
PT Hijrah Gizi Hewani	15.120.420.000	4.334.928.894
PT Aneka Pupuk Compon	9.881.740.553	9.881.740.553
PT Beli Jual Oentung	6.377.482.373	6.429.563.545
PT Pab. Pipa Indonesia	6.157.556.628	6.157.556.628
PT Falcon Cargo	4.256.500.000	4.256.500.000
PT Sari Gunung Polowijo	3.349.130.837	3.349.130.837
Koperasi Produksi Ternak		
Terpadu Indonesia	3.142.795.400	3.142.795.400
One Time BP	2.974.183.370	3.369.102.287
Eastindo Utama Ind Corp	2.765.538.106	2.765.538.106
PT Anugrah Sinar Samudra	2.559.500.000	2.559.500.000
CV Rifaby Gustham	2.525.500.000	2.525.500.000
PT Berkah Pangan Mandiri	2.502.480.569	4.257.678.972
PT Cipta Andhika Teladan	2.443.280.000	2.443.280.000
PT Winar Anugerah Pribadi	2.433.375.391	--
PT Surya Lintas Gemilang	2.386.225.000	2.386.225.000
PT Niarta Putra Logistik	2.357.352.500	2.870.043.750
PT Tanah Selaras Mandiri	2.344.450.000	2.344.450.000
CV Putra Kutaraja	2.336.191.500	--
PT Soroja Niaga Boga	2.328.186.000	2.722.280.000
Tripatra Engineers and Constructions	2.263.296.375	--
PT Pro Teknologi Internasional	2.229.131.804	--
PT Virgo Sari	2.131.731.860	2.131.731.860
PT Semen Jawa	2.064.919.241	2.064.919.241
PT Bintang Daud Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Len Industri (Persero)	--	4.921.697.016
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	--	2.151.097.786
Badan Nasional Penanggulangan		
Bencana	--	2.310.320.749
Lainnya (saldo		
di bawah Rp 2 milyar)	308.065.582.894	280.607.002.284
Jumlah piutang usaha pihak ketiga	905.477.337.184	1.061.493.724.721
Dikurangi: Cadangan Kerugian		
Penurunan Nilai	(463.109.177.192)	(502.132.337.202)
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga - Bersih	442.368.159.992	559.361.387.519
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	596.614.509.051	685.959.928.589

Related parties (Note 35)
Less: Allowance for
Impairment Losses
Total Trade Receivables related parties - net
Third parties:
PT Artha Cipta Saudara
PT Pembangunan Kota Tua
Jakarta / JOTRC
CV Cilacap Pangan Sejahtera
PT Telepoin Nusantara
PT Boga Citra Langgeng
PT Agrochemindo Niagatama
Haggag Import Company
PT Estika Tata Tiara
PT Hijrah Gizi Hewani
PT Aneka Pupuk Compon
PT Beli Jual Oentung
PT Pab. Pipa Indonesia
PT Falcon Cargo
PT Sari Gunung Polowijo
Koperasi Produksi Ternak
Terpadu Indonesia
One Time BP
Eastindo Utama Ind Corp
PT Anugrah Sinar Samudra
CV Rifaby Gustham
PT Berkah Pangan Mandiri
PT Cipta Andhika Teladan
PT Winar Anugerah Pribadi
PT Surya Lintas Gemilang
PT Niarta Putra Logistik
PT Tanah Selaras Mandiri
CV Putra Kutaraja
PT Soroja Niaga Boga
Tripatra Engineers and Constructions
PT Pro Teknologi Internasional
PT Virgo Sari
PT Semen Jawa
PT Bintang Daud Indonesia
PT Len Industri (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
Others (balance
below Rp 2 billion)
Total trade receivables third parties
Less: Allowance for
Impairment Losses
Trade Receivables Third Parties - Net
Total Trade Receivables - Net

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian umur piutang usaha berdasarkan usia jatuh tempo piutang usaha, sebagai berikut:

Details of the aging of trade receivables based on the maturity of trade receivables, are as follows:

	2025	2024	
Belum Jatuh Tempo	199.897.714.267	616.357.938.574	Not Yet Due
1 - 30 Hari	329.810.107.301	39.069.391.722	1 - 30 Days
31 - 60 Hari	42.648.678.703	8.930.964.204	31 - 60 Days
61 - 180 Hari	14.954.533.075	16.301.501.463	61 - 180 Days
181 - 366 Hari	48.291.018.697	37.987.435.317	181 - 366 Days
367 - 730 Hari	35.594.865.437	30.237.734.798	367 - 730 Days
Lebih dari 2 Tahun	549.807.030.220	552.853.365.981	More than 2 Years
Subjumlah	1.221.003.947.700	1.301.738.332.059	Subtotal
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(624.389.438.649)	(615.778.403.470)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	596.614.509.051	685.959.928.589	Total Trade Receivables - Nett

Piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

Trade receivable are denominated in Rupiah.

Mutasi pada saldo cadangan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

Changes in the allowance for impairment losses on trade receivables is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	615.778.403.470	600.080.361.375	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 33)	8.611.035.179	15.698.042.095	Current year provision (Note 33)
Saldo akhir	624.389.438.649	615.778.403.470	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugianpenurunan nilai piutang di atas cukup untukmenutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses on accounts receivable made above is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.

6. Piutang Lain-lain

6. Other Receivables

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2025	2024	
Piutang distributor atas SPKPBM Minol	117.709.880.717	117.709.880.717	Distributors receivables for SPKPBM Minol
Perum Pembangunan Perumahan Nasional	58.280.615.659	58.280.615.659	Perum Pembangunan Perumahan Nasional
PT Ficorp	20.556.276.100	20.556.276.100	PT Ficorp
Piutang rekening penampungan proyek <i>stunting</i>	23.597.881.125	32.830.519.054	Receivable from escrow account from <i>stunting</i> project
Piutang pegawai	9.752.041.712	9.225.640.093	Employee receivable
Piutang klaim	6.806.814.113	4.395.191.213	Claims receivable
PT Berkat Manunggal Jaya	5.196.270.874	5.196.270.874	PT Berkat Manunggal Jaya
PT Agrochemindo Niagatama	2.868.699.532	2.868.699.532	PT Agrochemindo Niagatama
Piutang penggantian biaya-biaya Lainnya (saldo di bawah Rp 1 milyar)	1.394.513.690	534.258.964	Reimbursement receivable Others (balance below Rp 1 billion)
Jumlah	257.511.256.557	263.943.099.725	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(231.859.170.543)	(232.038.530.843)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	25.652.086.014	31.904.568.882	Net Amount

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi pada saldo cadangan penurunan nilai piutang lain-lain sebagai berikut:

Changes in the allowance for impairment losses on other receivables is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	232.038.530.843	231.225.755.843	Beginning balance
(Pemulihan) Penyisihan tahun berjalan (Catatan 33)	(179.360.300)	812.775.000	(Reversal) Current year provision (Note 33)
Saldo akhir	231.859.170.543	232.038.530.843	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses on accounts receivable made above is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.

Piutang distributor atas SPKPBM Minol

Merupakan tagihan kepada para distributor yang timbul dari terbitnya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), Cukai Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pendistribusian Minuman Beralkohol antara Perusahaan dengan para distributor yang terkait dengan importasi Minuman Mengandung *Ethyl* Alkohol (MMEA) tahun 2006.

Distributors receivables for SPKPBM Minol

Represent receivables from distributors arising from the issuance of the Letter of Import Duty Shortage Notification (SPKPBM), Excise of Administration Fines and Taxes in the Framework of Imports and in accordance with the Distribution Agreement of Alcoholic Drinks between the Company and the distributors related to the import of Beverages Containing Ethyl Alcohol (MMEA) in 2006.

Piutang distributor atas SPKPBM Minol telah disisihkan secara penuh.

Receivables from distributor SPKPBM Minol had been fully provisioned.

Piutang rekening penampungan proyek stunting

Rekening penampungan *escrow* merupakan piutang yang disebabkan oleh pelaksanaan program *stunting* antara Perusahaan dengan RNI (Catatan 35).

Receivable from escrow account from stunting project

The escrow account receivable represents a receivable arising from the implementation of the stunting program between the Company and RNI (Catatan 35).

7. Persediaan

7. Inventories

	2025	2024	
Barang dalam gudang:			Goods in warehouse:
Produk pupuk dan pestisida	16.463.638.948	19.875.346.689	Fertilizer and pesticide products
Produk farmasi dan alat kesehatan	8.654.809.837	8.278.568.154	Pharmaceutical products and medical devices
Produk Unilever	5.524.927.369	4.823.027.533	Unilever products
Produk konsumsi dan bahan pokok	4.552.316.111	2.265.295.755	Consumption and basic commodity products
Produk kimia berbahaya	986.863.278	27.710.653.730	Hazardous chemical products
Produk bahan bangunan lainnya	601.919.206	717.570.726	Other building material products
Produk lainnya	540.632.005	328.844.291	Other products
Subjumlah	37.325.106.754	63.999.306.878	Subtotal
Perlengkapan:			Supplies:
Suku cadang kendaraan	818.941.958	613.268.692	Vehicle spare parts
Alat tulis kantor	--	305.555.270	Office stationery
Subjumlah	818.941.958	918.823.962	Subtotal
Jumlah Persediaan	38.144.048.712	64.918.130.840	Total Inventory

Pada tahun 2025 dan 2024, persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp139.472.303.402 dan Rp217.229.755.074 terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusakan dan risiko lainnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko yang mungkin dialami Perusahaan.

Persediaan usang dan rusak dipindahkan dari persediaan ke persediaan barang rusak pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.251.172.908 dan Rp9.178.178.494 (Catatan 16).

In 2025 and 2024 the inventories were insured to PT Asuransi Tri Pakarta with total insured amounting to Rp139,472,303,402 and Rp217,229,755,074, respectively, against the risk of losses that might occur as a result of fire, loss, natural disasters, riots and other risks.

Management believes that total amount insured is adequate to cover possible losses arising from risks which may be suffered by the the Company.

Obsolete and damaged inventory is transferred from inventory to inventory of damaged goods as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp2,251,172,908 and Rp9,178,178,494, respectively (Note 16).

8. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

8. Non-Current Assets Held for Sale

2025					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Nilai Wajar					<i>Fair Value</i>
Tanah	58.787.600.000	--	58.787.600.000	--	Land
Bangunan	471.400.000	--	471.400.000	--	Building
Jumlah	59.259.000.000	--	59.259.000.000	--	Total
2024					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Nilai Wajar					<i>Fair Value</i>
Tanah	--	58.787.600.000	--	58.787.600.000	Land
Bangunan	--	471.400.000	--	471.400.000	Building
Jumlah	--	59.259.000.000	--	59.259.000.000	Total

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) No. 06 tanggal 14 November 2024 Perusahaan telah menyetujui penjualan atas tanah dan bangunan dengan total nilai sebesar Rp67.820.000.000 dari total nilai tercatat aset sebesar Rp59.259.000.000 (Catatan 14) dan Perusahaan telah menerima pembayaran tahap pertama senilai Rp61.538.461.538 pada tanggal 15 November 2024 (Catatan 21).

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifah Tifany, S.H., M.Kn., telah dinyatakan bahwa pembayaran tahap kedua sebesar Rp6.281.538.462 telah dilunasi, sehingga aset tanah dan bangunan tersebut secara sah telah diserahkan oleh Perusahaan kepada pembeli aset.

Based on the Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB) No. 06 dated November 14, 2024, the Company has agreed to sell land and buildings with a total selling value of Rp67,820,000,000, from a total carrying amount of Rp59,259,000,000 (Note 14), and has received the first installment payment amounting to Rp61,538,461,538 on November 15, 2024 (Note 21).

Based on Sale and Purchase Deed Number 14/2025 dated March 20, 2025, of Notary Syarifah Tifany, S.H., M.Kn., the second payment amounting to Rp6,281,538,462 was confirmed to have been fully settled; accordingly, the land and building assets were legally transferred by the Company to the purchaser.

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The calculation of gain on sale of fixed assets in profit or loss are as follows:

	2025	
Harga Jual Aset Tetap	67.820.000.000	Selling Price of Fixed Asset
Nilai Tercatat	(59.259.000.000)	Carrying Amount
Keuntungan atas Penjualan Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk Dijual (Catatan 33)	8.561.000.000	Gain on Sale of Non Current Asset Held For Sale (Note 33)

9. Uang Muka

9. Advances

	2025	2024	
Uang muka pembelian	426.187.861.039	117.583.915.698	Purchase advances
Uang muka lain-lain	51.754.492.738	5.952.212.637	Other advances
Uang muka operasional	4.144.467.483	24.668.665.122	Operating advance
Jumlah	482.086.821.260	148.204.793.457	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025, uang muka pembelian merupakan pembayaran dari Perusahaan atas pembelian CPP Daging Ruminansia atas penunjukan langsung dari Kementerian Perdagangan, barang dagang dan operasional lainnya.

As of December 31, 2025, advances for purchases represent payments made by the Company for the purchase of CPP Ruminant Meat under a direct appointment from the Ministry of Trade, inventories, and other operational needs.

Uang muka operasional sebagian besar merupakan pembayaran kepada vendor terkait dengan proyek *stunting* yang dilaksanakan oleh BGRLI, entitas anak selama tahun 2025.

Operational advances are mostly payments to vendors related to stunting projects implemented by BGRLI, a subsidiary during 2025.

Sementara uang muka lain-lain sebagian besar merupakan pembayaran kepada vendor terkait dengan biaya pengiriman dan bongkar muat atas impor daging selama tahun 2025

Meanwhile, other advances mainly represent payments made to vendors related to shipping and loading/unloading costs for meat imports during 2025.

10. Biaya Dibayar di Muka

10. Prepaid Expenses

	2025	2024	
Biaya operasi dalam proses	67.760.116.551	26.395.687.852	Operation cost in process
Sewa gudang/ kantor/ rumah Umum dan administrasi	30.024.493.412	5.281.472.853	Warehouse/ office/ home rentals
Asuransi	1.080.404.456	846.070.229	General and administration
Lain-lain	949.777.374	817.719.840	Insurance
	823.651.734	353.485.277	Others
Jumlah	100.638.443.527	33.694.436.051	Total

Biaya operasi dalam proses merupakan biaya terkait jasa yang ditangguhkan pengakuannya sebagai bagian dari penerapan konsep matching cost terhadap pendapatan yang belum diakui. Biaya tersebut akan dibebankan ke laporan laba rugi pada periode pengakuan pendapatan terkait.

Operating costs in progress represent costs related to services for which recognition has been deferred as part of the application of the matching cost principle against revenue that has not yet been recognized. These costs will be charged to the statement of profit or loss in the period when the related revenue is recognized.

11. Investasi Dalam Saham

11. Investment in Shares

2025				
Penyertaan Saham/ <i>Investment in Shares</i>	% Kepemilikan/ <i>Ownership</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi/ <i>Unrealized Gain (Loss)</i>
Aset keuangan diukur pada <i>FVTOCI/ The financial assets are measured at FVTOCI</i>				
Pihak Berelasi/Related Parties				
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	10.000.000.000	3.392.529.645	(6.607.470.355)
PT Manajemen CBT Nusantara	6,10	250.000.000	250.000.000	--
Pihak Ketiga/Third Parties				
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	160.000.000	--	(160.000.000)
BV Nederland Unipro	1,70	45.936.640	--	(45.936.640)
PT Tropican Utama Furniture	10,00	38.251.125	--	(38.251.125)
Unipro Amsterdam	2,84	32.125.754	--	(32.125.754)
PT Djengger Tour	3,38	3.385.000	--	(3.385.000)
Unipro Singapore	2,84	1.605.450	--	(1.605.450)
PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	--	550.000	312.125.000	311.575.000
Multi Niaga, Amsterdam	--	18	--	(18)
Jumlah/Total		10.531.853.987	3.954.654.645	(6.577.199.342)
2024				
Penyertaan Saham/ <i>Investment in Shares</i>	% Kepemilikan/ <i>Ownership</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Kerugian yang Belum Direalisasi/ <i>Unrealized Loss</i>
Aset keuangan diukur pada <i>FVTOCI/ The financial assets are measured at FVTOCI</i>				
Pihak Berelasi/Related Parties				
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	10.000.000.000	4.249.798.487	(5.750.201.513)
PT Manajemen CBT Nusantara	6,10	250.000.000	250.000.000	--
Pihak Ketiga/Third Parties				
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	160.000.000	--	(160.000.000)
BV Nederland Unipro	1,70	45.936.640	--	(45.936.640)
PT Tropican Utama Furniture	10,00	38.251.125	--	(38.251.125)
Unipro Amsterdam	2,84	32.125.754	--	(32.125.754)
PT Djengger Tour	3,38	3.385.000	--	(3.385.000)
Unipro Singapore	2,84	1.605.450	--	(1.605.450)
Multi Niaga, Amsterdam	--	18	--	(18)
Jumlah/Total		10.531.303.987	4.499.798.487	(6.031.505.500)

Perubahan nilai wajar atas penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp545.693.841 dan Rp3.020.873.852 dibukukan sebagai penghasilan komprehensif lain.

Investasi pada Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, BV Nederland Unipro dan PT Sumatera Utara Perkasa Semen nilainya disisihkan secara permanen karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

Grup memiliki keyakinan bahwa, tidak ada kewajiban dalam bentuk *constructive obligation* di masa datang terkait kepemilikan tersebut.

Changes in fair value of investment in shares as at December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp545,693,841 and Rp3,020,873,852, respectively, are recorded as other comprehensive income.

Investments in Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, BV Nederland Unipro and PT Sumatera Utara Perkasa Semen were impaired permanently as these companies are longer in operation.

The Group believes that there is no obligation in the form of future constructive obligations related to such ownership.

12. Aset Tetap

12. Fixed Assets

2025							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Decrease	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan							Acquisition Cost
Tanah	1.572.483.008.760	13.045.602.400	--	(112.999.108.000)	6.864.126.996.860	8.336.656.500.020	Land
Bangunan	447.521.722.461	1.091.446.194	--	(5.075.271.000)	--	443.537.897.655	Buildings
Kendaraan	218.368.791.221	57.580.000	--	--	--	218.426.371.221	Vehicle
Inventaris Kantor	122.937.705.896	6.662.362.591	--	--	--	129.600.068.487	Office Equipment
Mesin/ Instalasi	6.341.387.060	--	(550.630.313)	--	--	5.790.756.747	Machine/ Instalation
Aset Dalam Konstruksi	12.812.962.556	871.044.850	--	--	--	13.684.007.406	Asset in Construction
Jumlah Harga Perolehan	2.380.465.577.954	21.728.036.035	(550.630.313)	(118.074.379.000)	6.864.126.996.860	9.147.695.601.536	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan	(124.189.655.060)	(8.236.259.849)	--	1.198.786.814	--	(131.227.128.095)	Buildings
Kendaraan	(159.487.073.434)	(8.797.859.110)	--	--	--	(168.284.932.544)	Vehicle
Inventaris Kantor	(109.908.208.582)	(6.249.325.720)	--	--	--	(116.157.534.302)	Office Equipment
Mesin/ Instalasi	(983.309.426)	(363.886.078)	550.630.313	--	--	(796.565.191)	Machine/ Instalation
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(394.568.246.502)	(23.647.330.757)	550.630.313	1.198.786.814	--	(416.466.160.132)	Total Accumulated Depreciation
Akumulasi Penurunan Nilai							Accumulated Impairment
Tanah	(89.913.397.621)	--	--	--	--	(89.913.397.621)	Land
Bangunan	(8.810.416.987)	--	--	--	--	(8.810.416.987)	Buildings
Jumlah Akumulasi Penurunan Nilai	(98.723.814.608)	--	--	--	--	(98.723.814.608)	Total Accumulated Impairment
Nilai Buku Bersih	1.887.173.516.844					8.632.505.626.796	Net Book Value
2024							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Decrease	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan							Acquisition Cost
Tanah	1.572.968.188.760	--	(485.180.000)	--	--	1.572.483.008.760	Land
Bangunan	355.214.902.551	4.275.953.139	--	88.030.866.771	--	447.521.722.461	Buildings
Kendaraan	218.668.507.330	65.283.891	(365.000.000)	--	--	218.368.791.221	Vehicle
Inventaris Kantor	120.857.888.394	2.039.817.502	--	40.000.000	--	122.937.705.896	Office Equipment
Mesin/ Instalasi	6.280.493.060	60.894.000	--	--	--	6.341.387.060	Machine/ Instalation
Aset Dalam Konstruksi	100.766.829.327	117.000.000	--	(88.070.866.771)	--	12.812.962.556	Asset in Construction
Jumlah Harga Perolehan	2.374.756.809.422	6.558.948.532	(850.180.000)	--	--	2.380.465.577.954	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan	(134.619.794.674)	(8.735.475.969)	--	333.579.701	18.832.035.882	(124.189.655.060)	Buildings
Kendaraan	(148.696.090.084)	(10.231.502.937)	365.000.000	--	(924.480.413)	(159.487.073.434)	Vehicle
Inventaris Kantor	(100.420.332.290)	(7.640.752.356)	--	--	(1.847.123.936)	(109.908.208.582)	Office Equipment
Mesin/ Instalasi	(786.051.382)	(385.333.363)	--	--	188.075.319	(983.309.426)	Machine/ Instalation
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(384.522.268.430)	(26.993.064.625)	365.000.000	333.579.701	16.248.506.852	(394.568.246.502)	Total Accumulated Depreciation
Akumulasi Penurunan Nilai							Accumulated Impairment
Tanah	(89.913.397.621)	--	--	--	--	(89.913.397.621)	Land
Bangunan	(8.476.837.286)	--	--	(333.579.701)	--	(8.810.416.987)	Buildings
Jumlah Akumulasi Penurunan Nilai	(98.390.234.907)	--	--	(333.579.701)	--	(98.723.814.608)	Total Accumulated Impairment
Nilai Buku Bersih	1.891.844.306.085					1.887.173.516.844	Net Book Value

Pada 31 Desember 2025, Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap yang disewakan ke dalam aset properti investasi sebesar Rp116.875.592.186 (Catatan 14).

Aset tetap bangunan dan kendaraan diasuransikan dengan keseluruhan nilai pertanggungan sebesar Rp857.513.292.300 dan Rp491.137.554.767, masing-masing untuk tahun 2025 dan 2024. Grup berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Beban penyusutan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp23.647.330.757 dan Rp26.993.064.625 diakui sebagai Beban Administrasi dan Umum (Catatan 32).

Aset tetap dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman bank (Catatan 22 dan 24).

On December 31, 2025, the Company reclassified fixed assets into investment property assets amounting to Rp116,875,592,186 (Note 14).

Fixed assets of building and vehicles are insured with total sum insured amounting Rp857,513,292,300 and Rp491,137,554,767, respectively for years 2025 and 2024. The Group believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

Depreciation in 2025 and 2024 statement amounting to Rp23,647,330,757 and Rp26,993,064,625, respectively, is General and Administration Expenses (Note 32).

Fixed assets are pledged as collaterals for bank loan facilities (Notes 22 and 24).

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai buku aset tetap pada 31 Desember 2025 sebesar Rp8.632.505.626.796, termasuk Rp119.664.045.951 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau sertifikat bukan atas nama Perusahaan dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, sebesar Rp23.784.975.350 merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau sertifikat bukan atas nama Perusahaan dan secara fisik dikuasai oleh Perusahaan, serta Rp1.450.183.100.967 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa (termasuk didalamnya sebesar Rp555.364.898.677 secara fisik dikuasai oleh pihak ketiga). Manajemen telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan penguasaan secara fisik dan sertifikat kepemilikan atas aset-aset tersebut.

Book value of fixed assets as at December 31, 2025 amounting to Rp8,632,505,626,796, including Rp119,664,045,951 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or are not registered under the Company's name and are physically occupied by third parties, including amounting to Rp23,784,975,350 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or are not registered under the Company's name and physically occupied by the Company, also Rp1,450,183,100,967 of land and buildings which Right to Use certificates had expired (including Rp556,364,898,677 physically is controlling by third parties). Management has taken measures and will continue its effort to ensure that it secures the physical possession and the ownership certificates of the assets concerned.

Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2025 didasarkan pada laporan penilai KJPP Muhammad Taufik dan Rekan, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 26 Juni 2025 dengan Nomor Laporan 00197/2.0175-00/PI/11/0194/1/VII/2025.

The Carrying value as of December 31, 2025 is based on the appraisal report by KJPP Muhammad Taufik dan Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, based on Appraisal Report Date on June 26, 2025 and No. 00197/2.0175-00/PI/11/0194/1/VII/2025.

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The calculation of gain on sale of fixed assets in profit or loss are as follows:

	2025	2024	
Harga Jual Aset Tetap	102.702.703	4.258.075.000	Selling Price of Fixed Asset
Nilai Tercatat	--	(485.180.000)	Carrying Amount
Keuntungan atas Penjualan Aset Tetap (Catatan 33)	102.702.703	3.772.895.000	Gain on Sale of Fixed Assets (Note 33)

13. Aset Takberwujud

13. Intangible Assets

	2025					
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Perangkat Lunak	31.210.862.912	--	--	--	31.210.862.912	Software
Hak atas Tanah	44.123.742.697	969.301.526	--	(686.210.486)	44.406.833.737	Landrights
Goodwill	3.300.000.000	--	--	--	3.300.000.000	Goodwill
Hak atas Tanah Dalam Proses	--	--	--	686.210.486	686.210.486	Land Rights Under Process
Jumlah	78.634.605.609	969.301.526	--	--	79.603.907.135	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	28.008.007.450	1.937.448.781	--	--	29.945.456.231	Software
Hak atas Tanah	28.914.303.774	2.619.466.320	--	--	31.533.770.094	Landrights
Jumlah	56.922.311.224	4.556.915.101	--	--	61.479.226.325	Total
Nilai Buku Bersih	21.712.294.385				18.124.680.810	Net Book Value

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Perangkat Lunak	31.210.862.912	--	--	--	31.210.862.912	Software
Hak atas tanah	42.960.622.627	1.163.120.070	--	--	44.123.742.697	Landrights
Goodwill	3.300.000.000	--	--	--	3.300.000.000	Goodwill
Jumlah	77.471.485.539	1.163.120.070	--	--	78.634.605.609	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	22.613.338.646	5.394.668.804	--	--	28.008.007.450	Software
Hak atas Tanah	23.101.651.494	5.812.652.280	--	--	28.914.303.774	Landrights
Jumlah	45.714.990.140	11.207.321.084	--	--	56.922.311.224	Total
Nilai Buku Bersih	31.756.495.399				21.712.294.385	Net Book Value

Beban amortisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.556.915.101 dan Rp11.207.321.084 diakui sebagai Beban Administrasi dan Umum (Catatan 32).

Amortization in 2025 and 2024 amounting to Rp4,556,915,101 and Rp11,207,321,084, respectively, is charged to General and Administration Expenses (Note 32).

14. Properti Investasi

14. Investment Properties

	2025					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Perubahan Nilai Wajar/ <i>Changes in Fair Value</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Nilai Wajar						Fair Value
Tanah	1.218.559.800.047	645.102.750	96.079.104.000	112.999.108.000	1.428.283.114.797	Land
Bangunan	61.409.799.953	--	15.811.715.814	3.876.484.186	81.097.999.953	Building
Jumlah	1.279.969.600.000	645.102.750	111.890.819.814	116.875.592.186	1.509.381.114.750	Total
	2024					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Perubahan Nilai Wajar/ <i>Changes in Fair Value</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Nilai Wajar						Fair Value
Tanah	1.224.350.488.047	--	52.996.912.000	(58.787.600.000)	1.218.559.800.047	Land
Bangunan	61.108.511.953	--	772.688.000	(471.400.000)	61.409.799.953	Building
Jumlah	1.285.459.000.000	--	53.769.600.000	(59.259.000.000)	1.279.969.600.000	Total

Pendapatan sewa yang diterima Grup dari properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.692.584.969 dan Rp22.109.802.115 (Catatan 30).

The Group received rental income from investment properties for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp22,692,584,969 and Rp22,109,802,115, respectively (Note 30).

Perubahan nilai wajar atas properti investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp111.890.819.814 dan Rp53.769.600.000 dicatat sebagai bagian dari Penghasilan dan Beban Lain-lain (Catatan 33).

Changes in fair value of property investment as at December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp111,890,819,814 and Rp53,769,600,000, respectively, are recorded as part of Income and Other Expenses (Note 33).

Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2025 didasarkan pada laporan penilai KJPP Muhammad Taufik dan Rekan, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2026.

The Carrying value as of December 31, 2025 is based on the appraisal report by KJPP Muhammad Taufik dan Rekan, as stated in its reports dated May 8, 2026.

Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Muhammad Taufik dan Rekan, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 9 April 2025.

The Carrying value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Muhammad Taufik dan Rekan, as stated in its reports dated April 9, 2025.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2025 Perusahaan mereklasifikasi aset tetap ke Properti Investasi sebesar Rp116.875.592.186 (Catatan 12).

In 2025, the Company reclassified fixed assets to investment properties amounting to Rp116,875,592,186 (Note 12).

15. Aset Hak Guna

15. Right of Use Assets

2025				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Bangunan	20.488.174.109	41.499.487.683	13.250.078.297	48.737.583.495 Building
Kendaraan	3.825.207.765	1.761.124.789	--	5.586.332.554 Vehicle
Peralatan Kantor	1.069.677.474	--	--	1.069.677.474 Office Equipment
Jumlah	25.383.059.348	43.260.612.472	13.250.078.297	55.393.593.523 Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	10.126.285.782	26.131.982.285	13.250.078.297	23.008.189.770 Building
Kendaraan	1.231.968.413	1.315.753.249	--	2.547.721.662 Vehicle
Peralatan Kantor	713.118.313	356.559.161	--	1.069.677.474 Office Equipment
Jumlah	12.071.372.508	27.804.294.695	13.250.078.297	26.625.588.906 Total
Nilai Buku Bersih	13.311.686.840		28.768.004.617	Net Book Value
2024				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Bangunan	32.662.469.699	12.338.495.784	24.512.791.374	20.488.174.109 Building
Kendaraan	4.271.343.833	747.635.068	1.193.771.136	3.825.207.765 Vehicle
Peralatan Kantor	1.069.677.474	--	--	1.069.677.474 Office Equipment
Jumlah	38.003.491.006	13.086.130.852	25.706.562.510	25.383.059.348 Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	16.485.985.238	18.153.091.918	24.512.791.374	10.126.285.782 Building
Kendaraan	1.578.467.723	847.271.826	1.193.771.136	1.231.968.413 Vehicle
Peralatan Kantor	356.559.157	356.559.156	--	713.118.313 Office Equipment
Jumlah	18.421.012.118	19.356.922.900	25.706.562.510	12.071.372.508 Total
Nilai Buku Bersih	19.582.478.888		13.311.686.840	Net Book Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan masing-masing ke beban pokok pendapatan dengan nilai sebesar Rp27.804.294.695 dan Rp19.356.922.900 (Catatan 31).

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 were allocated to cost of revenue in the amounts of Rp27,804,294,695 and Rp19,356,922,900, respectively (Note 31), respectively.

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sehubungan dengan penambahan aset hak guna atas sewa gudang sebesar Rp41.499.487.683.

On 2025, the Company made payments to third parties in relation to additions of right-of use assets for warehouse leases amounting to Rp41,499,487,683.

16. Aset Lain-Lain

16. Other Assets

	2025	2024	
Penyertaan pada Asosiasi - PT Kias Intertrada	20.000.000	20.000.000	Investment in Associate - PT Kias Intertrada
Investasi Pada Obligasi RI tahun 1959	33	33	Investment in RI Bonds in 1959
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(20.000.033)	(20.000.033)	Allowance for Impairment Losses
Subjumlah	--	--	Subtotal

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Aset Tetap yang Tidak Dimanfaatkan	374.444.623.200	374.727.361.185	Unused Fixed Assets
Uang Jaminan	2.836.932.081	28.440.768.608	Deposits
Lain-lain	8.342.124	60.739.871	Others
Jumlah	377.289.897.405	403.228.869.664	Total

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan merupakan reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Unused fixed assets

Unused fixed assets are reclassification of fixed assets which are not used in business, with details as follows:

	2025	2024	
Tanah	415.093.494.662	415.093.494.662	Land
Bangunan	28.786.191.201	28.786.191.201	Building
Dikurangi: Penurunan Nilai	(45.793.609.507)	(45.793.609.507)	Less: Impairment
Subjumlah	398.086.076.356	398.086.076.356	Subtotal
Akumulasi Penyusutan:			Accumulated Depreciation:
Saldo Awal	(23.358.715.171)	(24.339.029.576)	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 32)	(282.737.985)	(282.737.986)	Addition (Note 32)
Penyesuaian (Catatan 33)	--	1.263.052.391	Adjustment (Note 33)
Saldo Akhir	(23.641.453.156)	(23.358.715.171)	Ending Balance
Jumlah	374.444.623.200	374.727.361.185	Total

Nilai buku aset tetap yang tidak dimanfaatkan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp374.444.623.200, termasuk di dalamnya sebesar Rp68.814.726.800 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau sertifikat bukan atas nama Perusahaan dan secara fisik dikuasai oleh pihak ketiga, sebesar Rp18.648.397.500 merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan dan secara fisik dikuasai oleh Perusahaan, serta sebesar Rp225.113.310.533 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa (termasuk didalamnya sebesar Rp198.321.687.754 secara fisik dikuasai oleh pihak ketiga). Manajemen telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan penguasaan secara fisik dan sertifikat kepemilikan atas aset-aset tersebut.

Book value of unused fixed assets as of December 31, 2025 amounting to Rp374,444,623,200 including Rp68,814,726,800 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or are not registered under the Company's name and physically occupied by third parties, including amounting to Rp18,648,397,500 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates and physically occupied by the Company, as well as Rp225,113,310,533 of land and buildings which Right to Use certificates had expired (Including Rp198,321,687,754 physically is controlling by third parties). Management has taken measures and will continue to take necessary actions to obtain physical control and legal ownership certificates for these assets.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Lain-lain

Others

	2025	2024	
Persediaan Barang Rusak	37.031.712.306	34.780.539.398	Inventory of Damaged Goods
Penurunan Nilai:			Allowance for Impairment:
Saldo Awal	(34.780.539.398)	(25.602.360.904)	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 33)	(2.251.172.908)	(9.178.178.494)	Addition (Note 33)
Saldo Akhir	(37.031.712.306)	(34.780.539.398)	Ending Balance
Pos dalam Penyelesaian	34.133.150.235	34.133.150.235	Posts in Progress
Penurunan Nilai:			Allowance for Impairment:
Saldo Awal	(34.133.150.235)	(33.431.674.936)	Beginning Balance
Penambahan	--	(701.475.299)	Addition
Saldo Akhir	(34.133.150.235)	(34.133.150.235)	Ending Balance
Lainnya	8.342.124	60.739.871	Others
Jumlah	8.342.124	60.739.871	Total

17. Utang Usaha

17. Trade Payables

	2025	2024	
Pihak Berelasi (Catatan 35)	90.018.503.724	56.362.783.650	Related Parties (Note 35)
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Sure Good Foods Ltd	386.440.913.428	--	Sure Good Foods Ltd
Fayman International Group Pty Ltd	30.832.799.924	--	Fayman International Group Pty Ltd
PT Bumi Gemahripah Lohjinawi	9.251.071.952	--	PT Bumi Gemahripah Lohjinawi
Samex Australian Meat Co Pty Ltd	7.885.461.651	--	Samex Australian Meat Co Pty Ltd
PT Satoria Aneka Industri	7.381.323.055	3.614.991.309	PT Satoria Aneka Industri
PT Industri Nabati Lestari	6.229.002.308	13.277.865.389	PT Industri Nabati Lestari
Xiamen Ditai Import Export Co Ltd	5.195.594.820	--	Xiamen Ditai Import Export Co Ltd
PT LDC Indonesia	4.646.684.390	4.646.684.390	PT LDC Indonesia
UPC Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd	3.948.071.099	44.012.331.836	UPC Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd
CV Delton	3.612.911.600	--	CV Delton
PT Prima Karya Sarana Sejahtera	3.150.598.846	4.420.330.346	PT Prima Karya Sarana Sejahtera
PT Siwitek	3.030.382.400	--	PT Siwitek
PT Permata Hijau Palm Oleo	2.554.020.000	7.389.543.030	PT Permata Hijau Palm Oleo
5-Continent Phosphorus Co., Limited	2.504.301.900	2.504.301.900	5-Continent Phosphorus Co., Limited
PT Angkasa Biru Laut	2.480.325.112	3.203.202.486	PT Angkasa Biru Laut
PT Bisma Belis	2.267.382.184	--	PT Bisma Belis
PT Lyono Transportasi Logistik	1.757.450.115	--	PT Lyono Transportasi Logistik
Fujian ChuangYuan Environmental Protection Co.,Ltd	1.680.848.000	--	Fujian ChuangYuan Environmental Protection Co.,Ltd
PT Karya Putra Dumai Mandiri	1.671.858.879	--	PT Karya Putra Dumai Mandiri
PT Multi Bangun Abadi	1.625.097.405	2.318.490.915	PT Multi Bangun Abadi
PT Unilever Indonesia	1.475.685.176	2.685.177.698	PT Unilever Indonesia
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.451.307.823	--	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Yuntik Rahayu	1.444.444.444	--	Yuntik Rahayu
PT Delta Artha Bahari Nusantara	1.382.242.319	--	PT Delta Artha Bahari Nusantara
PT Nawa Agna	1.376.644.500	--	PT Nawa Agna
PT Krakatau Bandar Samudera	1.354.370.807	--	PT Krakatau Bandar Samudera
Cong Ty Tnhh Mtv Cong Thanh	1.354.068.400	--	Cong Ty Tnhh Mtv Cong Thanh
PT Sarana Logitama Lestari	1.300.005.360	--	PT Sarana Logitama Lestari
Borochemie International PTe, Ltd	1.220.667.264	--	Borochemie International PTe, Ltd
PT Sari Dumai Sejati	1.189.843.356	2.183.999.680	PT Sari Dumai Sejati
PT Smartindo Integrasi System	1.177.231.000	--	PT Smartindo Integrasi System
PT Mitra Gemilang Pasifik	1.153.315.645	--	PT Mitra Gemilang Pasifik
PT Otto Pharmaceutical Industries	1.145.148.206	--	PT Otto Pharmaceutical Industries
PT Lotte Global Logistics Indonesia	1.113.391.050	--	PT Lotte Global Logistics Indonesia
PT Multimas Nabati Asahan	1.090.000.000	--	PT Multimas Nabati Asahan
PT Mitra Maharta	1.037.837.838	--	PT Mitra Maharta
PT Multi Reksa Abadi	719.474.376	2.012.738.790	PT Multi Reksa Abadi
PT Sinar Prapanca	564.799.888	2.103.503.868	PT Sinar Prapanca
PT Sigma Cipta Caraka	380.805.360	1.413.658.760	PT Sigma Cipta Caraka
PT Inti Everspring Indonesia	318.847.500	7.654.541.690	PT Inti Everspring Indonesia

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Primus Sanus Cooking Oil Industrial	250.297.253	3.604.000.122	Primus Sanus Cooking Oil Industrial
Marhaba Frozen Foods	172.132.538	50.706.418.560	Marhaba Frozen Foods
PT Emjebe Pharma	108.119.320	5.277.548.764	PT Emjebe Pharma
PT Delapan Delapan Logistics	6.737.810	5.045.034.126	PT Delapan Delapan Logistics
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir	4.017.714	50.469.665.508	PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir
Mash Agro Food Ltd	19.681	28.509.768.000	Mash Agro Food Ltd
Al-Quresh Exports	--	14.209.630.400	Al-Quresh Exports
Fuzhou Dong Fang Hai Pai			Fuzhou Dong Fang Hai Pai
Chemicals Trading Co., Ltd	--	5.652.142.156	Chemicals Trading Co., Ltd
PT LDC East Indonesia	--	5.484.341.817	PT LDC East Indonesia
PT Pelindo Multi Terminal	--	4.896.093.388	PT Pelindo Multi Terminal
Fair Exports India Private Limited	--	4.561.562.880	Fair Exports India Private Limited
PT Kereta Commuter Indonesia	--	3.536.037.094	PT Kereta Commuter Indonesia
Mengtai Rice Co., Ltd	--	3.141.493.000	Mengtai Rice Co., Ltd
PT Suri Nusantara Jaya Logistik	--	3.135.640.400	PT Suri Nusantara Jaya Logistik
PT CKL Indonesia Raya	--	2.827.573.397	PT CKL Indonesia Raya
Long An Food Company	--	2.647.937.500	Long An Food Company
Beecom Inc Corporation	--	2.598.265.950	Beecom Inc Corporation
PT Smart	--	2.273.112.697	PT Smart
PT Pelabuhan Tanjung Priok	--	2.050.205.000	PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Kebula Raya Bestari	--	2.000.000.000	PT Kebula Raya Bestari
PT Samaco Karkasindo Utama	--	292.210.000	PT Samaco Karkasindo Utama
CV Arjuna Group	--	175.768.200	CV Arjuna Group
PT Widodo Makmur Unggas	--	41.000.000	PT Widodo Makmur Unggas
Lainnya (saldo di bawah Rp 1 milyar)	174.516.944.900	97.249.092.270	Others (balance below Rp 1 billion)
Subjumlah	685.454.498.596	403.825.903.316	Subtotal
Jumlah	775.473.002.320	460.188.686.966	Total

18. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

18. Other Current Financial Liabilities

	2025	2024	
Penerimaan dalam Konfirmasi	54.029.231.864	24.835.096.470	Receipts in Confirmation
Utang Non-Usaha	9.618.360.849	11.155.684.110	Non-Trade Payables
Uang Titipan	6.259.456.153	5.718.273.578	Deposit
<u>Pinjaman Jangka Pendek:</u>			<u>Short Term Loans:</u>
PT PPA Finance	10.766.418.510	12.228.466.570	PT PPA Finance
PT Sarana Kaltim Ventura	219.924.000	--	PT Sarana Kaltim Ventura
Lainnya	11.218.917.654	5.091.249.243	Others
Jumlah	92.112.309.030	59.028.769.971	Total

Penerimaan dalam Konfirmasi

Penerimaan dalam konfirmasi adalah pembayaran yang telah diterima oleh Grup dari pelanggan atas transaksi penjualan barang dagang dan jasa, namun belum dilakukan kesesuaian atas penerimaan dan tagihan terkait.

Utang Non-Usaha

Utang non-usaha sebagian besar merupakan kewajiban kepada PT Golden Coffee Bean sebesar Rp4.995.181.818 atas pembelian bahan baku kopi untuk usaha kedai kopi Covare.

Receipts under Confirmation

Receipt under confirmation refers to payments received by the Group from customers for the sale of merchandise and services, for which the matching between the receipt and the related invoice has not yet been finalized.

Non-Trade Payables

Non-trade payables mainly represent liabilities to PT Golden Coffee Bean amounting to Rp4,995,181,818 for the purchase of coffee raw materials for the Covare coffee shop business.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman

Pinjaman tersebut merupakan fasilitas pendanaan yang diperoleh BGRLI dari beberapa lembaga pembiayaan. Pada tanggal 31 Desember 2025, BGRLI menerima pencairan pembiayaan dari PT PPA Finance dan PT Sarana Kaltim Ventura dengan total sebesar 74.007.449.178. Selama tahun berjalan, BGRLI juga melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp75.249.573.238.

Tambahan informasi mengenai pinjaman milik BGRLI adalah sebagai berikut:

Loans

The loans represent financing facilities obtained by BGRLI from several financing institutions. During the year ended December 31, 2025, BGRLI received loan disbursements from PT PPA Finance and PT Sarana Kaltim Ventura totaling Rp74,007,449,178 and made principal repayments amounting to Rp75,249,573,238.

Additional information regarding BGRLI's loan is as follows:

	2025	2024	
PT PPA Finance			PT PPA Finance
Pagu Kredit	25.000.000.000	25.000.000.000	Credit Limit
Tingkat Bunga	12,5%	12,50%	Interest Rate
Jangka Waktu	2 bulan/months	12 bulan/months	Tenor
Jatuh Tempo	4 Februari/ Februari 4, 2026	27 Desember/ December 2025	Due Date
PT Sarana Kaltim Ventura			PT Sarana Kaltim Ventura
Pagu Kredit	2.500.000.000	--	Credit Limit
Tingkat Bunga	12%	--	Interest Rate
Jangka Waktu	12 bulan/months	--	Tenor
Jatuh Tempo	2 Januari/ January 2026	--	Due Date

19. Liabilitas Sewa

19. Lease Liabilities

	2025	2024	
Pihak Ketiga	4.819.136.329	4.197.148.502	Third Party
Dikurangi: Bagian Lancar	(1.157.438.745)	(1.915.701.719)	Less: Current Portion
Bagian Jangka Panjang	3.661.697.584	2.281.446.783	Long-Term Portion

Nilai kini liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The present value of lease liabilities as of December 31, 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Kurang dari 1 Tahun	1.933.148.571	1.841.586.984	Less than 1 year
Antara 1 sampai 5 Tahun	3.073.688.745	2.731.210.981	Between 1 to 5 years
Jumlah	5.006.837.316	4.572.797.965	Total
Dikurangi: Biaya Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(187.700.987)	(375.649.463)	Less: Future Finance Cost on Lease
Nilai Kini Liabilitas Sewa	4.819.136.329	4.197.148.502	Present Value of Lease Liabilities

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarize the component of changes in the liabilities arising from lease:

	2025	2024	
Saldo Awal	4.197.148.502	379.039.341	Beginning Balance
Penambahan Liabilitas Sewa	43.503.287.240	13.086.130.852	Additional Lease Liabilities
Pembayaran Bunga	(43.048.657.683)	(9.656.313.003)	Payment Interest
Jumlah	4.819.136.329	4.197.148.502	Total

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Beban bunga, biaya sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Interest expense, short-term rental expenses and low-value rentals for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follow:

	2025	2024	
Bunga atas Liabilitas Sewa (Catatan 34)	167.358.271	388.291.312	<i>Interest of Leases Liabilities (Note 34)</i>
Biaya Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah			<i>Short-Term Rental Fees and Low-Value Asset Leases</i>
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 31)	43.486.329.125	51.933.700.920	<i>Cost of Revenue (Note 31)</i>
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 32)	4.351.255.228	3.811.287.863	<i>General and Administration Expenses (Note 32)</i>

20. Beban yang Masih Harus Dibayar

20. Accrued Expenses

	2025	2024	
Beban Operasi	66.508.383.875	193.385.955.325	<i>Operating Expenses</i>
Beban Kantor	25.860.148.192	11.464.307.240	<i>Office Expenses</i>
Beban Pegawai	6.384.398.065	10.377.245.385	<i>Employee Expenses</i>
Beban Lainnya	1.058.294.760	1.517.907.724	<i>Other Expenses</i>
Jumlah	99.811.224.892	216.745.415.674	<i>Total</i>

Beban operasi sebagian besar merupakan biaya yang terjadi di BGRLI atas aktivitas logistik dan sewa gudang kepada pihak ketiga.

Operating expenses primarily consist of costs incurred by BGRLI for logistics activities and warehouse rental to third parties.

21. Pendapatan Diterima di Muka

21. Unearned Revenues

	2025	2024	
Jasa Pergudangan	119.089.968.420	45.663.673.894	<i>Warehouse Services</i>
Uang Muka Penjualan Produk	218.958.394.252	78.423.025.349	<i>Advance for Product Sales</i>
Uang Muka Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual (Catatan 8)	--	61.538.461.538	<i>Advance of Non-Current Assets Held for Sale (Note 8)</i>
Pendapatan Sewa	117.294.104.007	65.110.601.765	<i>Rental Income</i>
Lainnya	600.045.101	515.367.501	<i>Others</i>
Jumlah	455.942.511.780	251.251.130.047	<i>Total</i>
Bagian Jangka Pendek	373.255.902.079	186.140.528.282	<i>Current Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	83.355.309.995	65.110.601.765	<i>Non-Current Portion</i>

22. Utang Bank - Jangka Pendek

22. Short Term - Bank Loan

	2025	2024	
Pihak Berelasi (Catatan 35)	79.700.000.000	209.597.105.950	<i>Related Parties (Note 35)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
PT Bank Permata Tbk	--	50.995.116.275	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	--	42.663.229.986	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Sub Jumlah	--	93.658.346.261	<i>Subtotal</i>
Jumlah	79.700.000.000	303.255.452.211	<i>Total</i>

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

The terms and conditions are as follows:

Jenis Fasilitas/ Type of Facilities	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum Gabungan/ Maximum Credit Join Limit	Jadwal Pelunasan/ Schedule of Credit Repayments	Tingkat Suku Bunga/ Interest Rate	Jumlah/ Amount	
				2025	2024
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving	80.000.000.000	Hingga Mei 2026/ until May 2026	7,75% per tahun/p.a	79.700.000.000	79.700.000.000
Fasilitas Non Cash Loan (NCL)	40.000.000.000	Maksimum 1 tahun/ Maximum 1 year	0,5% per tahun/p.a	--	407.664.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk					
Fasilitas Modal Kerja	70.000.000.000	Maksimum 1 tahun hingga Mei 2025/ Maximum 1 year until May 2025	10,25% per tahun/p.a	--	69.701.999.997
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Fasilitas Modal Kerja	100.000.000.000	Maksimum 1 tahun hingga Oktober 2025/ Maximum 1 year until October 2025	10,00% per tahun/p.a	--	56.118.465.953
PT Bank Permata Tbk					
Fasilitas Omnibus Letter of Credit	50.000.000.000	Hingga Desember 2024/ Until December 2024	10,75% per tahun/p.a	--	50.995.116.275
PT Bank Central Asia Tbk					
Fasilitas Time Loan Revolving ("TL")	80.000.000.000	Setiap 3 bulan hingga Januari 2025/ Every 3 months until Januari 2025	8,5% per tahun/p.a	--	31.367.428.800
Fasilitas Kredit Lokal ("KL")	10.000.000.000	Maksimum 3 bulan/ Maximum 3 months	8,5% per tahun/p.a	--	4.720.549.843
Entitas Anak/ The Subsidiaries					
PT Bank Central Asia Tbk					
Fasilitas Time Loan Revolving ("TL")	65.000.000.000	Setiap 3 bulan hingga Januari 2025/ Every 3 months until Januari 2025	8,5% per tahun/p.a	--	10.244.227.343
Jumlah/ Total				79.700.000.000	303.255.452.211

Berikut rincian atas penerimaan, pembayaran dan beban bunga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of proceeds, payments and interest expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Kreditur/ Creditors	2025		
	Penerimaan Tahun Berjalan/ Additional for the Current Year	Pembayaran Tahun Berjalan/ Repayments for the Current Year	Bunga/ Interest
Pihak Berelasi (Catatan 35)/ Related Parties (Note 35)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.304.707.597	30.381.347.597	6.289.460.988
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.888.729.953	105.007.195.906	1.551.523.482
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	673.854.392.691	743.556.392.688	2.360.680.255
Pihak Ketiga/Third Parties			
PT Bank Permata Tbk	53.726.401.351	104.721.517.626	--
PT Bank Central Asia Tbk	201.189.234.399	243.852.464.385	1.123.847.621
Jumlah/ Total	1.003.963.465.991	1.227.518.918.202	11.325.512.347

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2024			
Kreditor/ Creditors	Penerimaan Tahun Berjalan/ Additional for the Current Year	Pembayaran Tahun Berjalan/ Repayments for the Current Year	Bunga/ Interest
Pihak Berelasi (Catatan 35)/ Related Parties (Note 35)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.147.697.575	8.722.175.474	7.089.176.071
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	175.599.652.953	201.720.200.340	4.118.855.067
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	107.189.524.853	107.329.469.523	6.672.308.719
Pihak Ketiga/Third Parties			
PT Bank Permata Tbk	49.942.721.832	20.197.584.000	--
PT Bank Central Asia Tbk	256.368.002.878	213.691.467.691	1.829.276.336
Jumlah/ Total	595.247.600.091	551.660.897.028	19.709.616.193

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan surat penawaran pemberian kredit No. HBK.G11/SPPK.010/2025 tanggal 30 April 2025, PT Bank Mandiri (Persero) telah menyetujui perpanjangan fasilitas kredit. Terdapat beberapa perubahan atas pinjaman bank tersebut, diantaranya adalah terkait jaminan dan fasilitas sebagai berikut:

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the credit offer letter No. HBK.G11/SPPK.010/2025 dated April 30, 2025, PT Bank Mandiri (Persero) has approved the extension of the credit facility. Several changes were made to the bank loan, including adjustments to the collateral and facility, as follows:

Jenis Fasilitas/ Type of Facilities	Sebelum Amendemen/ Before Addendum	Sesudah Amendemen/ After Addendum
Perusahaan/ The Company		
Fasilitas Kredit Modal Kerja	80.000.000.000	80.000.000.000
Fasilitas Kredit Transaksional	15.000.000.000	10.000.000.000
Supplier Financing	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembiayaan Piutang	10.000.000.000	10.000.000.000
Non Cash Loan:		
Bank Garansi	10.000.000.000	40.000.000.000
LC/SKBDN	30.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah/ Total	150.000.000.000	150.000.000.000

Jaminan atas fasilitas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Kantor dan Pergudangan di Medan seluas 190.239 m² bangunan seluas 42.665 m², SHGB No. 737/ Rengas Pulau Medan (Catatan 14).

The collateral for the above-mentioned facility is as follows:

Office and warehouse in Medan with a land area of 190,239 sqm and a building area of 42,665 sqm, under Land Use Rights Certificate (SHGB) No. 737/ Rengas Pulau, Medan (Note 14).

Ketentuan keuangan yang terdapat dalam perjanjian ini antara lain:

1. *Current ratio* minimal 105%.
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 120%.
3. Rasio total kas + piutang usaha (≤ 360 hari) + persediaan + uang dibayar di muka dibandingkan total pinjaman jangka pendek + utang usaha + pendapatan diterima di muka, minimal 120%.
4. *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar 200%.

The financial covenants stipulated in this agreement include the following:

1. Minimum current ratio of 105%.
2. Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 120%.
3. The ratio of total cash + trade receivables (≤ 360 days) + inventories + prepaid expenses to total short-term loans + trade payables + unearned revenues must be at least 120%.
4. Maximum Debt-to-Equity Ratio (DER) of 200%.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024,
Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian kredit.

As of December 31, 2025 and 2024, the
Company has complied all covenant with
credit terms.

23. Perpajakan

23. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2025	2024
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.445.805.470	--
PPH pasal 28A:		
2023	--	16.740.080.503
2024	9.645.298.575	9.960.232.363
2025	14.490.054.726	--
Subjumlah	31.581.158.771	26.700.312.866
Entitas Anak		
PPH pasal 28A		
2023	--	795.866.552
2024	502.777.964	502.777.965
2025	9.571.868	--
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.802.945.136	2.385.626.438
PPH pasal 21	43.099.621	18.609.355
PPH pasal 4 (2)	9.606.130.040	4.320.838.375
Subjumlah	14.964.524.629	8.023.718.685
Jumlah	46.545.683.400	34.724.031.551

The Company
Value Added Tax (VAT)
Income tax article 28A:
2023
2024
2025

Subtotal

The Subsidiaries
Income tax article 28A
2023
2024
2025

Value Added Tax (VAT)
Income tax article 21
Income Tax Art 4 (2)

Subtotal

Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2025	2024
Perusahaan		
PPN Keluaran	--	6.012.420.752
PPN Masukan (WAPU)	6.652.684.720	5.503.892.352
PPH pasal 21	334.402.269	386.005.602
PPH pasal 22	600.062.860	432.501.771
PPH pasal 23	411.026.847	52.847.947
PPH pasal 25	762.339.854	381.169.927
PPH pasal 4 (2)	4.780.706.465	4.908.460.563
Sub Jumlah	13.541.223.015	17.677.298.914
Entitas Anak		
PPN Keluaran	67.024.859	--
PPH 15	14.521.693	11.099.937
PPH pasal 21	4.181.284	1.247.954.746
PPH pasal 23	424.520.718	319.752.761
PPH pasal 29	5.694.496	8.293.471
PPH pasal 4 (2)	803.459.987	741.183.468
Sub Jumlah	1.319.403.037	2.328.284.383
Jumlah	14.860.626.052	20.005.583.297

The Company
VAT Out
VAT In (WAPU)
Income Tax Art 21
Income Tax Art 22
Income Tax Art 23
Income Tax Art 25
Income Tax Art 4 (2)

Subtotal

The Subsidiaries
VAT out
Income Tax Art 15
Income Tax Art 21
Income Tax Art 23
Income Tax Art 29
Income Tax Art 4 (2)

Subtotal

Total

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Taxes

	2025	2024	
Perusahaan			The Company
Pajak kini	(1.736.293.899)	--	Current tax
Pajak kini - penyesuaian dari tahun sebelumnya - 2021	--	(1.220.671.832)	Current tax - prior year adjustment - 2021
Pajak tangguhan	2.325.891.216	3.162.309.292	Deferred tax
Sub Jumlah	589.597.317	1.941.637.460	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak kini	(15.801.955.400)	(8.899.700.717)	Current tax
Pajak tangguhan	(1.725.514.479)	2.086.842.400	Deferred tax
Penyesuaian pajak kini	(164.953.327)	--	Adjustment of Current Tax
Sub Jumlah	(17.692.423.206)	(6.812.858.317)	Subtotal
Jumlah	(17.102.825.889)	(4.871.220.857)	Total

i) Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian menurut laba komersial dengan rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

i) Current Tax

Reconciliation between consolidated profit before income tax between commercial income with tax loss for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak dalam laba rugi konsolidasi	205.905.389.250	25.303.823.176	Profit before tax in the consolidated of profit loss
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak anak Perusahaan	(35.160.510.169)	(20.897.911.604)	Income before tax of subsidiaries
Laba komersil sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	170.744.879.081	4.405.911.572	Commercial income before income tax - the Company
Beda Waktu			Timing Difference
Penyisihan persediaan	2.251.172.909	8.874.278.032	Provision for inventories
Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	8.331.192.068	13.651.271.609	Allowance for account receivables and other receivable - nett
Penyusutan aset lain-lain	13.632.218.186	(6.813.294.641)	Depreciation of other assets
Penyusutan aset tetap	13.213.841.423	947.413.327	Depreciation of fixed assets
Liabilitas Sewa	(1.019.238.305)	(458.046.382)	Lease Liability
Beban imbalan pascakerja	(25.836.953.482)	(1.827.488.800)	Post-employment benefits obligations
Jumlah Beda Waktu	10.572.232.799	14.374.133.145	Total Timing Difference
Beda Tetap:			Permanent Difference:
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	11.311.453.289	29.155.858.872	Non deductible expense
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	24.214.375.882	25.295.391.300	Expense of revenue subjects to final tax
Beban pajak final	2.840.173.257	4.858.840.368	Final tax expenses
Pendapatan bunga - final	(2.464.754.606)	(135.998.682)	Interest income - final
Pendapatan sewa - final	(48.142.382.402)	(44.594.025.310)	Rental income - final
Pendapatan final - lain	(8.561.000.000)	(3.772.895.000)	Other Income
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	(109.946.819.814)	(51.232.600.000)	Increase in fair value of investment properties
Jumlah Beda Tetap	(130.748.954.394)	(40.425.428.452)	Total Permanent Difference
Laba (rugi) fiskal perusahaan - dibulatkan	50.568.157.485	(21.645.383.735)	The Company's taxable profit (loss)- rounded

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Kompensasi Rugi Fiskal:			Tax Losses Compensation:
Tahun 2022	(11.846.278.242)	--	Year 2022
Tahun 2023	(9.184.250.512)	--	Year 2023
Tahun 2024	(21.645.383.737)	--	Year 2024
Taksiran laba (rugi) fiskal	7.892.244.994	(21.645.383.735)	Estimated taxable income (loss)
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	1.736.293.899	--	Estimated Current Tax of the Company
Dikurangi kredit pajak dibayar dimuka:			Less tax credit:
PPh Pasal 22	(6.692.541.136)	(3.069.818.532)	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	(385.729.241)	(29.355.145)	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	(9.148.078.248)	(6.861.058.686)	Income Tax Article 25
Lebih Bayar Pajak Penghasilan	(14.490.054.726)	(9.960.232.363)	Over Payment of Corporate Income Tax

ii) Pajak Final

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan dan Entitas Anak membayar Pajak Final yang timbul atas pendapatan sewa jasa properti dan jasa pergudangan masing-masing sebesar Rp4.685.742.469 dan Rp30.242.919.259. Pajak Final tersebut dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") masing-masing sebesar Rp46.857.424.694 untuk pendapatan sewa jasa properti dan Rp302.429.192.565 untuk pendapatan sewa jasa pergudangan.

ii) Final Tax

As of December 31, 2025, the Company and its Subsidiaries had paid Final Tax on property rental service income and warehousing service income amounting to Rp4,685,742,469 and Rp30,242,919,259, respectively. The Final Tax was imposed based on the Tax Base (Dasar Pengenaan Pajak or "DPP") of Rp46,857,424,694 for property rental service income and Rp302,429,192,565 for rent warehousing service income.

iii) Aset Pajak Tangguhan

iii) Deferred Tax Assets

2025					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Penyisihan persediaan	7.565.965.329	495.258.040	--	8.061.223.369	Provision for inventories
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	133.714.525.508	1.832.862.255	--	135.547.387.763	Allowance for impairment of trade receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	51.009.017.518	--	--	51.009.017.518	Allowance for impairment of others receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(34.857.059.528)	2.907.045.113	--	(31.950.014.415)	Accumulated depreciation of fixed assets
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(1.498.924.821)	2.999.088.001	--	1.500.163.180	Accumulated depreciation of other assets
Liabilitas sewa	(100.770.204)	(224.232.427)	--	(325.002.631)	Lease liabilities
Imbalan kerja	9.830.330.188	(5.684.129.766)	4.574.297.222	8.720.497.644	Employee benefits
Sub jumlah	165.663.083.990	2.325.891.216	4.574.297.222	172.563.272.428	Subtotal
Entitas anak					Subsidiaries
Penyusutan dan amortisasi	(513.525.919)	77.322.612	--	(436.203.307)	Depreciation and amortization
Imbalan kerja	245.376.565	(42.715.634)	(126.943.543)	75.717.388	Employee benefit
Liabilitas sewa	1.997.006.278	(1.821.686.942)	--	175.319.335	Lease liabilities
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	1.796.182.517	61.565.485	--	1.857.748.002	Allowance for impairment of trade receivables
Penurunan nilai investasi	11.604.108	--	--	11.604.108	Impairment of investment
Sub jumlah	3.536.643.549	(1.725.514.479)	(126.943.543)	1.684.185.526	Subtotal
Jumlah aset pajak tangguhan	169.199.727.539			174.247.457.954	Total deferred tax assets

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Penyisihan persediaan	5.613.624.162	1.952.341.167	--	7.565.965.329	Provision for inventories
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	130.890.056.254	2.824.469.254	--	133.714.525.508	Allowance for impairment of trade receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	50.830.207.018	178.810.500	--	51.009.017.518	Allowance for impairment of others receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(35.065.490.460)	208.430.932	--	(34.857.059.528)	Accumulated depreciation of fixed assets
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	--	(1.498.924.821)	--	(1.498.924.821)	Accumulated depreciation of other assets
Liabilitas sewa	--	(100.770.204)	--	(100.770.204)	Lease liabilities
Imbalan kerja	6.701.122.237	(402.047.536)	3.531.255.487	9.830.330.188	Employee benefits
Sub jumlah	158.969.519.211	3.162.309.292	3.531.255.487	165.663.083.990	Subtotal
Entitas anak					Subsidiaries
Penyusutan dan amortisasi	(84.856.420)	(428.669.499)	--	(513.525.919)	Depreciation and amortization
Imbalan kerja	337.966.244	(106.638.585)	14.048.906	245.376.565	Employee benefit
Liabilitas sewa	--	1.997.006.278	--	1.997.006.278	Lease liabilities
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	1.072.982.576	723.199.941	--	1.796.182.517	Allowance for impairment of trade receivables
Penurunan nilai investasi	11.604.108	--	--	11.604.108	Impairment of investment
Sub jumlah	1.435.752.243	2.086.842.400	14.048.906	3.536.643.549	Subtotal
Jumlah aset pajak tangguhan	160.405.271.454			169.199.727.539	Total deferred tax assets

**d. Surat Ketetapan Pajak
Perusahaan**

Pada tahun 2025, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sebagai berikut:

**d. Tax Assessment Letters
The Company**

In 2025, the Company received several tax assessment letters and tax collection letters as follows:

No/ Num	Jenis Surat/ Tax Letter	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letters No	Tanggal Surat/ Date Issued	Periode/ Period	Jumlah/ Total
1	Kurang Bayar PPh 21/ Underpayment Income Tax 21	00029/201/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	2023	51.488.283
2	Kurang Bayar PPh 22/ Underpayment Income Tax 22	00010/202/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	2023	139.852.929
3	Kurang Bayar PPh 23/ Underpayment Income Tax 23	00041/203/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	2023	132.794.123
4	Kurang Bayar Pasal 4(2)/ Underpayment Income Tax 4(2)	00014/240/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	2023	19.708.732
5	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00140/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Februari/ February 2023	72.416.998
6	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00141/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Maret/ March 2023	79.791.250
7	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00142/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	April/ April 2023	230.409
8	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00143/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Mei/ May 2023	33.618.998
9	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00144/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Juli/ July 2023	13.315.992
10	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00145/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Agustus/ August 2023	125.974
11	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00146/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	September/ September 2023	314.024
12	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00147/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Oktober/ October 2023	401.861.370
13	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00148/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	November/ November 2023	67.090.087
14	Kurang Bayar PPN/ Underpayment VAT	00149/207/23/051/25	28 April 2025/ Apr 28, 2025	Desember/ December 2023	1.172.141.874
Jumlah/ Total					2.184.751.043

Pada tanggal 3 Juni 2024, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2022 sebesar Rp20.307.505.514. Perusahaan sudah menerima pengembalian lebih bayar tersebut pada tanggal 10 Juni 2024.

Pada tanggal 28 April 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2023 sebesar Rp16.740.080.503. Perusahaan sudah menerima pengembalian lebih bayar tersebut pada tanggal 27 Juni 2025.

Pada tanggal 29 September 2025, Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2024 kepada otoritas pajak, dan dalam SPT tersebut dinyatakan laba kena pajak sebesar Rp51.753.904.469 dan lebih bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp9.645.298.575. SPT tersebut disampaikan setelah penerbitan laporan.

Entitas Anak

PPI Industri

Pada tanggal 6 Mei 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2023. Perusahaan sudah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp630.913.226 pada tanggal 26 Mei 2025, sedangkan sisanya sebesar Rp164.953.327 dibebankan ke penyesuaian pajak kini (Catatan 23).

On June 3, 2024, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp20,307,505,514. The Company received the refund of the overpaid amount on June 10, 2024.

On April 28, 2025, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax for the 2023 fiscal year amounting to Rp16,740,080,503. The Company received the refund of the overpaid amount on June 27, 2025.

On September 29, 2025 the Company submitted its yearly 2024 tax return to the tax authorities, and in the tax return stated that the taxable profit of Rp51,753,904,469 and overpayment of corporate income tax of Rp9,645,298,575. The tax return was submitted after the issuance of the report.

Entitas Anak

PPI Industri

On May 6, 2025, the Company received the Corporate Income Tax Overpayment Assessment Letter for the 2023 fiscal year. The Company had received a refund of Rp630,913,226 on May 26, 2025, while the remaining amount of Rp164,953,327 was expensed in the adjustment current tax (Note 23).

24. Utang Jangka Panjang

	2025	2024
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi (Catatan 35)	23.687.544.118	23.687.544.118
Jumlah	<u>23.687.544.118</u>	<u>23.687.544.118</u>

Utang Jangka Panjang merupakan Utang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berasal dari pemanfaatan sebagian dana *Non-Project Type Grand Assistance* (NPTGA) 2001 sebesar JPY3.000.000.000 dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimpor kedelai yang disalurkan oleh distributor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 2005, Grup tidak melakukan angsuran lagi.

Pada tahun 2024, pembayaran pokok utang bank kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp15.417.371.970.

24. Long Term Loans

Other Loans - Related Parties (Note 35)

Total

Long-term debt represents a payable to the National Development Planning Agency arising from the utilization of a portion of the *Non-Project Type Grant Assistance* (NPTGA) 2001 funds amounting to JPY3,000,000,000 from the Government of Japan to the Government of Indonesia for soybean imports distributed through distributors appointed by the Government of Indonesia.

Since 2005, the Group has not made any further installments.

As of 2024, payment of principal on bank loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp15,417,371,970.

25. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan melakukan penilaian atas liabilitas imbalan kerja pada setiap tanggal pelaporan. Estimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 6/2023 serta Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan Peraturan Perusahaan yang mencakup Karyawan Tetap dan Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tentu (Karyawan PKWT). Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah 1.127 dan 1.266 karyawan.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin dan Rekan, dengan laporannya No. 260600/LAA-AAR/IV/2026 dan No. 250692/LAA-AAR/VI/2025 masing-masing bertanggal 15 April 2026 dan 13 Juli 2025, sedangkan untuk Entitas Anak didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nurichwan.

a. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui dan dibukukan pada saat terutang pada karyawan. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek terutama terdiri atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk karyawan.

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Perusahaan:		
Saldo Awal Liabilitas	276.693.052	280.880.451
Biaya Jasa Kini	203.380.451	47.249.168
Biaya Jasa Lalu	(112.295.002)	(55.917.945)
Biaya Bunga	9.026.650	4.481.378
Saldo Liabilitas Akhir	376.805.151	276.693.052

25. Employee Benefits Liabilities

The Company assesses its employee benefits liabilities at each reporting date. The estimated liabilities for employee benefits at December 31, 2025 and 2024 in accordance with Labor Law No. 6/2023 and Government Regulation No. 35/2021 and Company Regulations covering Permanent Employees and Employees with Fixed Time Work Agreements (PKWT Employees). The number of employees entitled for the benefits in 2025 and 2024 are 1,127 and 1,266, respectively.

The calculation of employee benefits liabilities as of December 31, 2025 and 2024 was calculated by independent actuary, Actuarial Consulting Office Azwir Arifin and Partners with its report No. 260600/LAA-AAR/IV/2026 and No. 250692/LAA-AAR/VI/2025 dated on April 15, 2026 and July 13, 2025, respectively, while the subsidiaries are based on calculation by Actuarial Consulting Office (KKA) Nurichwan.

a. Short-Term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefit liabilities are recognized and recorded when they become payable to employees. These short-term employee benefit liabilities primarily consist of Fixed-Term Employment Contracts (PKWT) for employees.

This account consists of:

The Company:
Beginning Balance of Liabilities
Current Service Cost
Past Service Cost
Interest Expenses
Ending Balance of Liabilities

b. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

b. Long-Term Employee Benefits Liability

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Perusahaan			The Company
Usia Pensiun Normal	56 Tahun/ Years		Normal Retirement Age
Tingkat Mortalitas	TMI IV Tahun 2019/ TMI IV Years 2019		Mortality Rate
Tingkat Cacat	5,00% dari Mortalitas/ of Mortality		Rate of Disability
Tingkat Pengunduran diri	2,50% sampai usia 40 Tahun dan menurun secara linier sampai 0,5% pada usia 50 Tahun dan 0,00% pada usia lebih dari 50 Tahun/ 2,50% until the age of 40 Years and decreases linierly until age of 50 Years and 0,00% at the age more than 50 Years		Rate of Resignation
Tingkat Diskonto	4,81% - 7,06%	6,88% - 7,13%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	6,00%	6,00%	Salary Increase Rate
Entitas Anak			Subsidiaries
Usia Pensiun Normal	56 Tahun/ Years	56 Tahun/ Years	Normal Retirement Age
Tingkat Diskonto	6,72%	7,10%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji Per Tahun	10,00%	10,00%	Salary Increase Rate per Year
Tingkat Kematian	TMI IV Tahun 2019/ TMI IV Years 2019		Death Rate
Tingkat Cacat	5,00% dari Mortalitas / from Mortality		Rate of Disability
Tingkat Pengunduran diri	3% sampai usia 40 Tahun dan menurun secara linier sampai 1% pada usia 50 Tahun dan 0,00% pada usia lebih dari 50 Tahun/ 3% until the age of 40 Years and decreases linierly until age of 50 Years and 0,00% at the age more than 50 Years		Rate of Resignation
Proporsi Pensiun Normal	100,00%	100,00%	Proporsion of Normal Retirement

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Insentif Retensi/ Merit Pay	Jumlah/ Total	
Perusahaan:					The Company:
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	91.133.947.433	3.447.017.291	4.033.495.482	98.614.460.206	Present Value of Defined Benefits Obligation
Nilai wajar aset program	(58.975.834.559)	--	--	(58.975.834.559)	Fair value of program assets
Subjumlah	32.158.112.874	3.447.017.291	4.033.495.482	39.638.625.647	Subtotal
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	344.169.940	--	--	344.169.940	Present Value of
Subjumlah	344.169.940	--	--	344.169.940	Subtotal
Jumlah	32.502.282.814	3.447.017.291	4.033.495.482	39.982.795.587	Total
	2024				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Insentif Retensi/ Merit Pay	Jumlah/ Total	
Perusahaan:					The Company:
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	78.504.394.921	3.478.252.621	3.378.592.732	85.361.240.274	Present Value of Defined Benefits Obligation
Nilai wajar aset program	(40.677.921.242)	--	--	(40.677.921.242)	Fair value of program assets
Subjumlah	37.826.473.679	3.478.252.621	3.378.592.732	44.683.319.032	Subtotal
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	1.115.348.017	--	--	1.115.348.017	Present Value of Defined Benefits Obligation
Subjumlah	1.115.348.017	--	--	1.115.348.017	Subtotal
Jumlah	38.941.821.696	3.478.252.621	3.378.592.732	45.798.667.049	Total

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of defined benefits obligation are as follows:

2025					
	Program Pensiun/ <i>Pension Plan</i>	Cuti Besar/ <i>Service Leave</i>	Insentif Retensi/ <i>Merit Pay</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Perusahaan:					The Company:
Saldo Awal Liabilitas	78.504.394.921	3.478.252.621	3.378.592.732	85.361.240.274	<i>Beginning Balance of Liabilities</i>
Biaya Jasa Kini	7.229.250.323	1.037.380.534	1.279.506.237	9.546.137.094	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	--	195.389.718	--	195.389.718	<i>Past Service Cost</i>
Biaya Bunga	5.255.537.883	--	195.448.807	5.450.986.690	<i>Interest Expenses</i>
Pembayaran Manfaat	(7.709.181.306)	--	(579.827.635)	(8.289.008.941)	<i>Benefits Payments</i>
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	7.853.945.612	(1.264.005.582)	(240.224.659)	6.349.715.371	<i>Recognized Actuarial (Gain) Losses</i>
Subjumlah	91.133.947.433	3.447.017.291	4.033.495.482	98.614.460.206	Subtotal
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Saldo Awal Liabilitas	1.115.348.017	--	--	1.115.348.017	<i>Beginning Balance of Liabilities</i>
Biaya Jasa Kini	51.667.116	--	--	51.667.116	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	--	--	--	--	<i>Past Service Cost</i>
Biaya Bunga	79.192.186	--	--	79.192.186	<i>Interest Expenses</i>
Pembayaran Manfaat	(325.021.276)	--	--	(325.021.276)	<i>Benefits Payments</i>
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	(577.016.104)	--	--	(577.016.104)	<i>Recognized Actuarial (Gain) Losses</i>
Subjumlah	344.169.939	--	--	344.169.939	Subtotal
Jumlah Liabilitas Akhir	32.502.282.813	3.447.017.291	4.033.495.482	39.982.795.586	Total Ending Balance of Liabilities

2024					
Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Insentif Retensi/ Merit Pay	Jumlah/ Total		
Perusahaan:				The Company:	
Saldo Awal Liabilitas	74.576.927.425	3.091.816.110	3.498.922.711	81.167.666.246	Beginning Balance of Liabilities
Biaya Jasa Kini	6.842.078.995	221.438.188	293.014.264	7.356.531.447	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(2.138.482.935)	164.998.323	180.972.062	(1.792.512.550)	Past Service Cost
Biaya Bunga	4.406.917.758	--	--	4.406.917.758	Interest Expenses
Pembayaran Manfaat	(8.108.641.411)	--	(594.316.305)	(8.702.957.716)	Benefits Payments
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	2.925.595.089	--	--	2.925.595.089	Recognized Actuarial (Gain) Losses
Subjumlah	78.504.394.921	3.478.252.621	3.378.592.732	85.361.240.274	Subtotal
Entitas Anak:				Subsidiaries:	
Saldo Awal Liabilitas	1.140.251.151	--	--	1.140.251.151	Beginning Balance of Liabilities
Biaya Jasa Kini	144.923.335	--	--	144.923.335	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	11.383.406	--	--	11.383.406	Past Service Cost
Biaya Bunga	78.558.036	--	--	78.558.036	Interest Expenses
Pembayaran Manfaat	(323.626.575)	--	--	(323.626.575)	Benefits Payments
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	63.858.664	--	--	63.858.664	Recognized Actuarial (Gain) Losses
Subjumlah	1.115.348.017	--	--	1.115.348.017	Subtotal
Jumlah	79.619.742.938	3.478.252.621	3.378.592.732	86.476.588.291	Total

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of plan assets are as follows:

2025		2024		
Program Pensiun/ Pension Plan	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Pensiun/ Pension Plan	
Perusahaan:				The Company:
Saldo awal	94.158.525.436	78.107.364.133		Beginning balance
Kerugian komprehensif tahun berjalan	20.792.260.100	16.051.161.303		Other comprehensive loss current year
Jumlah	114.950.785.536	94.158.525.436		Total
Entitas Anak:				Subsidiaries:
Saldo awal	312.850.246	124.495.791		Beginning balance
Kerugian komprehensif tahun berjalan	577.016.104	188.354.455		Other comprehensive loss current year
Jumlah	889.866.350	312.850.246		Total

Rincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expense recognized in the profit or loss are as follows:

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2025					
Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Insentif Retensi/ Merit Pay	Jumlah/ Total		
Perusahaan:					The Company:
Biaya Jasa Kini	7.229.250.323	1.037.380.534	1.279.506.237	9.546.137.094	Current Service Cost
Biaya Bunga	1.511.176.690	195.389.718	195.448.807	1.902.015.215	Interest Expenses
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	--	(1.264.005.582)	(240.224.659)	(1.504.230.241)	Interest Expenses
Beban Periode Berjalan Diakui di Laba Rugi	8.740.427.013	(31.235.330)	1.234.730.385	9.943.922.068	Expense for the Period Recognized in Profit Loss
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Biaya Jasa Kini	51.667.116	--	--	51.667.116	Current Service Cost
Biaya Bunga	79.192.186	--	--	79.192.186	Interest Expenses
Beban Periode Berjalan Diakui di Laba Rugi	8.871.286.315	(31.235.330)	1.234.730.385	10.074.781.370	Expense for the Period Recognized in Profit Loss
2024					
Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Insentif Retensi/ Merit Pay	Jumlah/ Total		
Perusahaan:					The Company:
Biaya Jasa Kini	6.842.078.995	221.438.188	293.014.264	7.356.531.447	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(2.138.482.935)	164.998.323	180.972.062	(1.792.512.550)	Past Service Cost
Biaya Bunga	1.592.330.469	--	--	1.592.330.469	Interest Expenses
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Biaya Jasa Kini	144.923.335	--	--	144.923.335	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	11.383.406	--	--	11.383.406	Past Service Cost
Biaya Bunga	78.558.036	--	--	78.558.036	Interest Expenses
Beban Periode Berjalan Diakui di Laba Rugi	6.530.791.306	386.436.511	473.986.326	7.391.214.143	Expense for the Period Recognized in Profit Loss

Mutasi penghasilan komprehensif lain
adalah sebagai berikut:

*Movements of other comprehensive income
are as follows:*

2025		2024		
Program Pensiun/ Pension Plan		Program Pensiun/ Pension Plan		
Perusahaan:				The Company:
Saldo awal	94.158.525.436	78.107.364.133		Beginning balance
Kerugian komprehensif tahun berjalan	20.792.260.100	16.051.161.303		Other comprehensive loss current year
Jumlah	114.950.785.536	94.158.525.436		Total
Entitas Anak:				Subsidiaries:
Saldo awal	312.850.246	124.495.791		Beginning balance
Kerugian komprehensif tahun berjalan	577.016.104	188.354.455		Other comprehensive loss current year
Jumlah	889.866.350	312.850.246		Total

Risiko tingkat bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest rate risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated using a discount rate determined by reference to the yield definite results of high-quality corporate bonds. Lower interest rates would increase the liability bond program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Risk of salary

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase of program participants will increase the liabilities of the program.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan.

Significant actuarial assumptions to determine the defined benefit obligation is a discount rate and expected salary increases.

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

2025					
	Tingkat diskonto/ Discount rates		Kenaikan gaji di masa depan/ Future salary increases		
	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja/ Effect on present value of employee benefits obligation		Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja/ Effect on present value of employee benefits obligation		
	Persentase/ Percentage		Persentase/ Percentage		
Perusahaan:					
Kenaikan	1%	84.495.810.493	1%	98.664.864.218	Increase
Penurunan	-1%	98.691.024.851	-1%	84.397.895.192	Decrease
Entitas Anak:					
Kenaikan	1%	289.459.414	1%	408.187.184	Increase
Penurunan	-1%	418.450.712	-1%	295.369.451	Decrease

26. Modal Saham

26. Share Capital

Kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's share ownership as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	2025 dan/and 2024		
	Lembar Saham/ Shares	Nilai per Lembar Saham/ Value per Share	Nilai Nominal/ Par Value
Saham Seri A/ A Series Shares			
Negara Republik Indonesia	1	1.000.000	1.000.000
Saham Seri B/ B Series Shares			
PT Rajawali Nusantara Indonesia	1.826.130	1.000.000	1.826.130.000.000
Jumlah/ Total	1.826.131		1.826.131.000.000

Pada tanggal 21 Maret 2024, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dari Rp942.745.000.000 menjadi Rp1.826.131.000.000 dengan penambahan modal senilai Rp883.386.000.000 melalui konversi utang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp883.386.776.206 dengan menerbitkan 883.386 lembar saham. Selisih sebesar Rp776.206 diakui sebagai Agio Saham (Tambahan Modal Disetor). Perubahan ini telah disahkan melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 12 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018757.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 Maret 2024.

On March 21, 2024, there was a changes in the Company's Article of Association in relation with an increase in authorised share capital and issued and fully paid capital from Rp942,745,000,000 to Rp1,826,131,000,000 with additional paid in capital amounting to Rp883,386,000,000 through loan conversion from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) amounting to Rp883,386,776,806 to issued of 883,386 new shares. The difference amount Rp776,206 recognized as Share Premium (Additional Paid in Capital). This change was authorised through the Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 12 and was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decision Letter No. AHU-0018757.AH.01.02.TAHUN 2024 dated March 22, 2024.

27. Cadangan Umum

27. General Reserves

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 November 2025, ditetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun 2024 sebesar Rp20.432.602.319 sebagai cadangan.

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders dated November 10, 2025, it was determined that the Company's net profit for the year 2024 amounting to Rp20,432,602,319 would be appropriated as reserves.

28. Cadangan Khusus

Utang dividen yang hingga sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan belum diselesaikan sebesar Rp1.531.912.169 dan oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 73 jumlah tersebut direklasifikasi ke cadangan khusus.

28. Specific Reserves

Debt of dividends up to the date of this report has not yet been finalized amounting to Rp1,531,912,169 and therefore in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company article 73 the said amount is reclassified to specific reserves.

29. Kepentingan Non Pengendali

Akun ini merupakan hak pemegang saham non-pengendali atas aset bersih dan bagian rugi bersih entitas anak yang dikonsolidasikan.

- a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebagai berikut:

	2025	2024
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri	79.451.040	42.753.277

*PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia Industri*

- b. Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali:

	2025	2024
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri	36.697.763	1.529.706

*PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia Industri*

30. Pendapatan Usaha

	2025	2024
Kewajiban Pelayanan Publik	4.555.760.272.446	874.186.054.734
Perdagangan	1.433.543.962.168	1.308.149.268.354
Jasa Pergudangan	513.693.977.812	322.810.035.229
Jasa Logistik	422.783.116.641	568.632.542.253
Jasa Penyewaan Properti (Catatan 14)	22.692.584.969	22.109.802.115
Jasa <i>Waste Integrated System</i>	1.680.442.768	3.513.175.375
Jumlah	6.950.154.356.804	3.099.400.878.060

*Public Service Obligation
Trading
Warehousing Services
Logistic Services
Rental Property Services
(Note 14)
Waste Integrated System
Total*

30. Revenues

31. Beban Pokok Pendapatan

	2025	2024
Kewajiban Pelayanan Publik	4.434.912.398.324	848.029.713.475
Perdagangan	1.217.166.410.280	1.176.801.046.490
Jasa Logistik	375.880.145.283	430.454.860.174
Jasa Pergudangan	365.447.558.970	215.385.799.357
Beban Sewa (Catatan 16)	43.486.329.125	51.933.700.920
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 15)	27.804.294.695	19.356.922.900
Jasa <i>Waste Integrated System</i> dan Jasa Lainnya	1.311.750.435	14.547.218.064
Jumlah	6.466.008.887.112	2.756.509.261.380

*Public Service Obligation
Trading
Logistic Services
Warehousing Services
Rent Expenses (Note 16)
Depreciation of Right of Use Asset
(Note 15)
Waste Integrated System
and Other Services
Total*

31. Cost of Revenues

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. Beban Umum dan Administrasi

32. General and Administration Expenses

	2025	2024	
Pegawai	190.259.551.916	170.404.529.686	Employees
Perlengkapan dan utilitas	38.269.790.382	34.473.035.986	Equipment and utilities
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	23.647.330.757	26.993.064.625	Depreciation of fixed assets (Note 12)
Perjalanan dinas	11.014.530.352	8.255.687.559	Business travel
Imbalan kerja	10.174.060.721	2.679.386.783	Employee benefits
Jasa profesional	7.681.368.867	5.096.377.666	Professional fee
Hiburan	6.997.559.123	6.107.956.914	Entertainment
Transportasi	6.421.673.781	6.119.816.629	Transportation
Beban pajak	4.709.254.650	10.170.635.499	Tax expense
Sewa	4.351.255.228	3.811.287.863	Rent
Penyusutan aset takberwujud (Catatan 13)	4.556.915.101	11.207.321.084	Amortization of intangible assets (Note 13)
Amortisasi	2.619.466.320	2.950.195.544	Amortization
Biaya berlangganan	1.573.373.854	2.781.963.874	Subscription fee
Penyusutan aset tidak dimanfaatkan (Catatan 16)	282.737.985	282.737.986	Depreciation of unused fixed assets (Note 16)
Lainnya	3.732.132.620	3.003.216.935	Others
Jumlah	316.291.001.657	294.337.214.633	Total

33. Penghasilan dan Beban Lain-lain

33. Income and Other Expenses

a. Penghasilan Lain-lain

a. Other Income

	2025	2024*)	
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 14)	111.890.819.814	53.769.600.000	Investment property fair value increase (Note 14)
Penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (Catatan 8)	8.561.000.000	--	Sale of Non-Current Asset held for Sale (Note 8)
Pendapatan telepon dan listrik	1.693.917.886	193.880.151	Telephone and electricity income
Keuntungan selisih kurs	4.889.915.758	--	Gain on Foreign Exchanges
Denda klaim	275.916.265	4.854.753.612	Claim penalty
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 6)	179.360.300	--	Recovery allowance for other receivables (Note 6)
Pendapatan dividen	132.519.750	--	Dividend income
Penjualan aset tetap (Catatan 12)	102.702.703	3.772.895.000	Sale of fixed assets (Note 12)
Penyesuaian aset lain-lain (Catatan 16)	--	1.263.052.391	Adjustment of other assets (Note 16)
Penyesuaian penyusutan aset tetap	--	16.248.506.852	Adjustment of fixed asset depreciation
Lainnya	29.423.354.567	15.361.212.275	Others
Jumlah	157.149.507.044	95.463.900.281	Total

*) Direklasifikasi, lihat (Catatan 43)

*) Reclassification, see (Note 43)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Beban Lain-lain

	2025	2024*)
Management fee (Catatan 35)	(26.676.871.603)	(7.978.194.506)
Penyisihan cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(8.611.035.179)	(15.698.042.095)
Beban klaim barang rusak (Catatan 16)	(6.358.201.205)	(1.746.405.637)
Rugi selisih kurs	(2.251.172.908)	(10.227.243.801)
Penyisihan cadangan penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 6)	--	(1.344.802.472)
Lainnya	--	(812.775.000)
Jumlah	(19.861.988.590)	(19.697.969.608)
	(63.759.269.485)	(57.505.433.119)

*) Direklasifikasi, lihat (Catatan 43)

b. Other Expenses

Management fee (Note 35)
Provision for impairment trade receivables (Note 5)
Claim expense damaged inventory (Note 16)
Losses on foreign exchanges
Provision for impairment other receivables (Note 6)
Others
Total

*) Reclassification, see (Note 43)

34. Penghasilan dan Beban Keuangan

34. Income and Financial Expenses

a. Penghasilan Keuangan

a. Finance Income

	2025	2024
Pendapatan Jasa Giro	3.412.205.326	350.897.639

Current Account Income

b. Biaya Keuangan

b. Finance Expenses

	2025	2024
Bunga dan Provisi Bank	(11.809.633.429)	(22.414.197.468)
Bunga atas Liabilitas Sewa (Catatan 19)	(167.358.271)	(388.291.312)
Bunga dan Provisi Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	(1.810.816.796)	(1.244.947.885)
Jumlah	(13.787.808.496)	(24.047.436.665)

Interest and Bank Provision
Interest on Lease Liabilities (Note 19)
Interest and Provision Other Current Financial Liabilities
Total

35. Transaksi dengan Pihak Berelasi

35. Transactions with Related Parties

a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

a. The nature relationship of related parties

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Nature of Transactions
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Induk/Parent Entity	Pemberian Jasa Pergudangan, Logistik dan Dividen/ Rendering of Warehousing, Logistic Services and Dividend
PT Rajawali Nusindo	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Permberian Jasa dan Barang/ Rendering of Trading
PT Gieb Indonesia	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT Berdikari	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT Sang Hyang Seri	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT Perikanan Indonesia	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT Garam	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ Entity under common control	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT Jakarta Sereal	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Perdagangan/ Rendering of Trading
PT PLN Nusantara Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ Rendering of

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi / <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan / <i>Nature of Relationship</i>	Jenis Transaksi / <i>Nature of Transactions</i>
PT Pertamina Petrochimal Trading	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of</i>
Badan Amil Zakat Nasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
PT ASDP Indonesia Ferry	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
Dinas Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
Ditjen Migas	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
PT Pupuk Indonesia Niaga	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Warehousing and Logistic Services Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of</i>
PT LEN Industri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Warehousing and Logistic Services Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of</i>
PT Pupuk Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Warehousing and Logistic Services Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of</i>
PT Dahana	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
PT Wijaya Karya Beton	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
PT Wijaya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Perdagangan/ <i>Rendering of Trading</i>
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Adhi Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Nindya Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Petrokimia Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Pupuk Sriwidjaya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Pupuk Iskandar Muda	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Krakatau Pipe Industries	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
Perum BULOG	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
PT Petrosida Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik/ <i>Rendering of Warehousing and Logistic Services</i>
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Perijinan untuk kawasan perumahan/ <i>Permission for residential area</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Kas dan Setara Kas, Deposito dan Pinjaman Bank/ <i>Placement Cash and Cash Equivalents, Time Deposits</i>

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi / <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan / <i>Nature of Relationship</i>	Jenis Transaksi / <i>Nature of Transactions</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Kas dan Setara Kas/ <i>Placement Cash and Cash Equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank/ <i>Placement Cash and Cash Equivalents and Bank Loans</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank/ <i>Placement Cash and Cash Equivalents and Bank Loans</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Kas dan Setara Kas/ <i>Placement Cash and Cash Equivalents</i>

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

In its business activities, the Group entered into transactions with related parties. The Group's policy stipulates that the pricing of these transactions is the same as for transactions made with third parties. The following are significant agreements/ transactions with related parties:

b. Transaksi dan saldo pihak berelasi

b. Transactions and balance of related parties

	2025	2024	
Gaji dan imbalan jangka pendek			Salaries and rewards short-term
Dewan Komisaris	1.773.414.000	4.369.344.559	Board of Commissioner
Dewan Direksi	6.987.692.260	9.824.600.231	Board of Directors
Jumlah	8.761.106.260	14.193.944.790	Total
Pendapatan (Catatan 30)			Revenues (Note 30)
PT Pabrik Gula Rajawali I	14.028.070.800	4.838.450.000	PT Pabrik Gula Rajawali I
PT PG Candi Baru	10.312.116.854	--	PT PG Candi Baru
PT Pabrik Gula Rajawali II	2.736.819.808	11.388.266.605	PT Pabrik Gula Rajawali II
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.511.709.081	--	Dinas Pertanian dan Perkebunan
BUMDES Jaya Mulya	1.315.680.512	--	BUMDES Jaya Mulya
RSUD Arifin Achmad	1.217.493.901	--	RSUD Arifin Achmad
BUMDES Tiroso	1.102.835.184	--	BUMDES Tiroso
PT Rajawali Nusindo	166.352.830	5.810.864.339	PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1.710.000	232.690.746.478	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Perum BULOG	--	162.660.920.478	Perum BULOG
PT Petrokimia Gresik	--	146.319.325.950	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	--	111.488.589.845	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	--	47.715.731.882	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Iskandar Muda	--	44.059.398.324	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kujang	--	17.542.891.533	PT Pupuk Kujang
PT Jakarta Sereal	--	16.789.599.100	PT Jakarta Sereal
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	--	8.770.697.500	PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT PLN Nusantara Power	--	5.882.571.416	PT PLN Nusantara Power
PT Wijaya Karya Beton	--	5.867.303.474	PT Wijaya Karya Beton
Badan Amil Zakat Nasional	--	2.685.618.137	Badan Amil Zakat Nasional
PT ASDP Indonesia Ferry	--	2.003.350.000	PT ASDP Indonesia Ferry
Dinas Kesehatan	--	3.111.199.518	Department of Health
PT Dahana	--	1.969.954.858	PT Dahana
PT Adhi Karya	--	686.243.735	PT Adhi Karya
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	--	252.600.000	PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi
PT Perkebunan Nusantara VIII	--	188.154.546	PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Aneka Tambang, Tbk	--	107.340.000	PT Aneka Tambang, Tbk
PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)	--	32.500.000	PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)
Lainnya (dibawah Rp1 milyar)	36.103.968.894	16.118.532.419	Others (below Rp1 billion)
Jumlah Pendapatan Pihak Berelasi (a)	68.496.757.864	848.980.850.137	Total Revenues from Related Parties (a)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024
Pendapatan Usaha (b)	6.950.154.356.804	3.099.400.878.060
Persentase (a): (b)	0,99%	27,39%
Pembelian		
Pupuk dan Pestisida		
PT Pupuk Kalimantan Timur	206.560.885.261	179.618.074.503
PT Petro Kimia Gresik	178.233.896.983	103.742.426.093
PT Pupuk Kujang	42.336.359.658	32.850.615.619
PT Biofarma (Persero)	73.977.324.202	29.099.139.166
PT Pupuk Sriwidjaya	28.393.813.281	24.882.353.251
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	16.904.096.275	23.304.924.630
PT Pupuk Iskandar Muda	35.820.721.426	22.446.201.714
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	22.586.082.158	20.977.139.948
Perum Bulog	6.815.679.461	1.435.000.000
PT Petrosida Gresik	2.695.905.073	2.024.668.000
PT Rajawali Nusantara Indonesia (P (Persero))	4.928.770.000	--
PT Geo Dipa Energi (Persero)	1.106.200.000	--
PT Rajawali Nusindo	487.887.169	160.193.110
PT Pupuk Indonesia	221.879.071	81.862.053
PT Pupuk Indonesia Niaga	4.849.770	305.166.840
Jumlah Pembelian dari Pihak Berelasi (a)	621.074.349.788	440.927.764.927
Jumlah Pembelian (b)	1.217.166.410.280	1.176.801.046.490
Persentase (a): (b)	51,03%	37,47%
Management Fee (Catatan 33)		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	26.676.871.603	7.978.194.506
Total	26.676.871.603	7.978.194.506
Aset		
Kas dan setara kas (Catatan 4)		
Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.882.635.313	23.011.319.203
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	73.216.811.102	65.388.543.550
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.159.823.749	17.433.467.961
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	115.810.824	29.466.481.049
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	28.260.067	--
Subjumlah	187.403.341.055	135.299.811.763
USD		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	208.851.990	547.730
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.203.527	185.557.566
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.039.682	178.441.733
Subjumlah	250.095.199	364.547.029
Deposito berjangka		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	79.040.000
Subjumlah	--	79.040.000
Jumlah	187.653.436.254	135.743.398.792

Revenues (b)
Percentage (a): (b)
Purchase
Fertilizer and Pesticides
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Petro Kimia Gresik
PT Pupuk Kujang
PT Biofarma (Persero)
PT Pupuk Sriwidjaya
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Perum Bulog
PT Petrosida Gresik
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Geo Dipa Energi (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia Niaga
Total Purchases from Related Parties (a)
Total Purchases (b)
Percentage (a): (b)
Management Fee (Note 33)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Total
Assets
Cash and cash equivalents (Note 4)
Bank
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Subtotal
USD
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal
Time deposits
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal
Total

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024
Piutang usaha (Catatan 5)		
Ditjen Migas	88.669.740.008	88.669.740.008
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	27.668.796.210	34.326.702.928
PT Petrokimia Gresik	39.632.890.138	17.976.810.469
PT Pupuk Kalimantan Timur	38.799.674.532	32.674.857.542
PT Pupuk Iskandar Muda	20.951.782.916	11.918.161.330
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20.309.628.728	12.960.732.438
PT Sang Hyang Seri	9.696.970.098	10.778.763.677
PT Pabrik Gula Candi Baru	8.169.393.190	2.992.968.260
PT Pupuk Kujang	8.384.301.023	8.664.664.076
PT Timah Tbk	4.063.888.335	4.343.125.543
PT Len Industri (Persero)	4.091.499.803	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.647.499.712	--
PT Perkebunan Nusantara	2.518.569.000	--
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.310.320.749	--
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2.151.097.786	--
Perum BULOG	5.937.562.861	--
PT Pabrik Gula Rajawali I	--	4.776.815.000
Lainnya (dibawah Rp 2 Miliar)	28.522.995.427	10.161.266.067
Jumlah	315.526.610.516	240.244.607.338
Piutang lain-lain (Catatan 6)		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	23.597.881.125	32.830.519.054
Investasi pada Saham (Catatan 11)		
PT Mitra BUMDes Nusantara	3.704.654.645	4.249.798.487
PT Manajemen CBT Nusantara	250.000.000	250.000.000
Jumlah	3.954.654.645	4.499.798.487
Jumlah Aset	530.732.582.541	413.318.323.671
Persentase	4,34%	8,29%
Liabilitas jangka pendek		
Utang usaha (Catatan 17)		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	39.983.306.148	11.355.443.331
PT Bio Farma (Persero)	15.638.649.319	4.658.169.773
PT Nindya Karya	10.422.120.944	14.575.257.633
PT Pupuk Kalimantan Timur	5.073.765.116	2.158.037.383
PT Petrokimia Gresik	4.832.051.256	2.716.638.718
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	4.313.474.675	--
Perum Bulog	2.126.076.092	--
PT PG Rajawali II	--	9.215.594.400
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	--	1.615.253.422
PT Petrosida Gresik	--	511.710.011
Lainnya (saldo dibawah Rp 2 milyar)	7.629.060.174	9.556.678.979
Jumlah	90.018.503.724	56.362.783.650
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya		
PPA Finance	10.766.418.510	12.228.466.570
Jumlah	10.766.418.510	12.228.466.570

Trade receivables (Note 5)
Ditjen Migas
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Sang Hyang Seri
PT Pabrik Gula Candi Baru
PT Pupuk Kujang
PT Timah Tbk
PT Len Industri (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
Perum BULOG
PT Pabrik Gula Rajawali I
Others (below Rp 2 billion)
Total
Other receivables (Note 6)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Investments in Shares (Note 11)
PT Mitra BUMDes Nusantara
PT Manajemen CBT Nusantara
Total
Total Assets
Percentage
Short-term liabilities
Trade payables (Note 17)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Nindya Karya
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Petrokimia Gresik
PT PG Rajawali II
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
PT Petrosida Gresik
Others (Balance below Rp 2 billion)
Total
Other current financial liabilities
PPA Finance
Total

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Utang Bank - Jangka Pendek (Catatan 22)			Short Term Bank Loan (Note 22)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79.700.000.000	83.776.640.000	PT Bank Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	56.118.465.953	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	69.701.999.997	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	79.700.000.000	209.597.105.950	Total
Liabilitas jangka Panjang (Catatan 24)			Long-term liabilities (Note 24)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	23.687.544.118	23.687.544.118	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jumlah	23.687.544.118	23.687.544.118	Total
Jumlah Liabilitas	204.172.466.352	301.875.900.288	Total Liabilities
Persentase	12,86%	21,80%	Percentage

36. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

36. Fair Value of Financial Instrument

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	2025		2024	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan/ Financial Assets				
Pinjaman dan Piutang/ Loans and Receivables:				
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents	189.621.008.563	189.621.008.563	146.198.113.646	146.198.113.646
Piutang Usaha/ Trade Receivables:				
Pihak Berelasi/ Related Parties	154.246.349.059	154.246.349.059	126.598.541.070	126.598.541.070
Pihak Ketiga/ Third Parties	442.368.159.992	442.368.159.992	559.361.387.519	559.361.387.519
Piutang Lain-lain/ Other Receivables	25.652.086.014	25.652.086.014	31.904.568.882	31.904.568.882
Investasi Saham/ Investment in Shares	3.954.654.645	3.954.654.645	4.499.798.487	4.499.798.487
Uang Jaminan/ Deposits	2.836.932.081	2.836.932.081	28.440.768.608	28.440.768.608
Jumlah/ Total	818.679.190.354	818.679.190.354	897.003.178.212	897.003.178.212
Liabilitas Keuangan Lain-lain/ Other Financial Liabilities:				
Utang Usaha/ Trade Payable:				
Pihak Berelasi/ Related Parties	90.018.503.724	90.018.503.724	56.362.783.650	56.362.783.650
Pihak Ketiga/ Third Parties	685.454.498.596	685.454.498.596	403.825.903.316	403.825.903.316
Utang Bank Jangka Pendek/ Short-Term Bank Loan	79.700.000.000	79.700.000.000	303.255.452.211	303.255.452.211
Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Accrued Expenses	99.811.224.892	99.811.224.892	216.745.415.674	216.745.415.674
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Current Financial Liabilities	92.112.309.030	92.112.309.030	59.028.769.971	59.028.769.971
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi/ Other Payables - Related Parties	23.687.544.118	23.687.544.118	23.687.544.118	23.687.544.118
Utang Sewa/ Leases Liabilities	4.819.136.329	4.819.136.329	4.197.148.502	4.197.148.502
Jumlah/ Total	1.075.603.216.689	1.075.603.216.689	1.067.103.017.442	1.067.103.017.442

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Management believes that the book value of financial assets and financial liabilities approaching the fair value of the financial assets and financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024 as the impact of discounting is not significant.

37. Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen risiko Grup adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh personil Grup sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa atau keadaan yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan korporasi dan mengelola risiko tersebut agar masuk dalam risk appetite (risiko yang dapat diterima) Grup untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan Grup.

Dalam melaksanakan manajemen risiko, Grup melakukan identifikasi, penaksiran, respon, pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atas risiko Perusahaan

Secara ringkas, risiko yang dihadapi Grup dan langkah-langkah mitigasinya sebagai berikut:

a) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari kegagalan pelanggan memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut (rincian umur piutang usaha). Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Berdasarkan pada penilaian Grup, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk dan jasa kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan uang muka/jaminan pelanggan sebagai pembayaran atas gagal bayar tersebut.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum risiko kredit Grup atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan:

37. Financial Risk Management

Corporate risk management is a process that is carried out by the personnel of the Group as a basis in determining the strategy, designed to identify potential events or circumstances that negatively affect the achievement of corporate goals and manage these risks in order to enter in risk appetite by the Group to ensure the achievement of Group's goals rationally.

In carrying out the risk management, the Group made the identification, assessment, response, control, information and communication and monitoring of the Company's risk.

In summary, the risks faced by the Group and its mitigation measures are:

a) Credit Risk

Credit risk is the loss arising from failure to fulfill contractual obligations of their customers. The Group's financial instruments that have the potential credit risk consist of cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables. Total maximum exposure to credit risk is equal to the carrying value of these accounts (details of the age of accounts receivable). As of December 31, 2025 and 2024 the Group's accounts receivable are not concentrated on a particular customer.

Based on the Group's valuation, a specific allowance may be made if the receivables are considered uncollectible. To mitigate credit risk, the Group will terminate the distribution of all products and services to the customer in the event of a delay and/or default and will use the advance/customer guarantee as payment for the default.

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk of financial instruments on the statements of financial position:

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025		2024	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalent	189.621.008.563	189.621.008.563	146.198.113.646	146.198.113.646
Piutang Usaha/ Trade Receivables:				
Pihak Berelasi/ Related Parties	154.246.349.059	154.246.349.059	126.598.541.070	126.598.541.070
Pihak Ketiga/ Third Parties	442.368.159.992	442.368.159.992	559.361.387.519	559.361.387.519
Piutang Lain-lain/ Other Receivables	25.652.086.014	25.652.086.014	31.904.568.882	31.904.568.882
Investasi Saham/ Investment in Shares	3.954.654.645	3.954.654.645	4.499.798.487	4.499.798.487
Uang Jaminan/ Deposits	2.836.932.081	2.836.932.081	28.440.768.608	28.440.768.608
Jumlah/ Total	818.679.190.354	818.679.190.354	897.003.178.212	897.003.178.212

Grup telah mencatat penyisihan penurunan nilai atas penurunan piutang usaha yang telah jatuh tempo (Catatan 4).

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Aset keuangan yang belum jatuh tempo yang terindikasi risiko kredit terutama dari kas dan setara kas dan piutang usaha.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Manajemen berpendapat bahwa risiko kredit merupakan kerugian yang timbul dari kegagalan pelanggan yang memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

b) Risiko Likuiditas

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Grup dalam memenuhi liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Grup diharapkan dapat membayar seluruh liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Agar dapat memenuhi liabilitas tersebut, Grup harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.

The Group has recorded allowance for impairment loss of accounts receivables which overdue (Note 4).

Credit quality of financial assets that is either not yet due or impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or with reference to historical information about the debtor default rates

Financial assets which are not yet due, as indicated credit risk primarily of cash and cash equivalents and accounts receivable.

Management believes that there is no significant credit risk on placement of funds in the bank, because of the placement of funds is only placed on banks that are predicated as good.

Management believes that credit risk represents losses arising from customers' failure to fulfill their contractual obligations. The Group's financial instruments that potentially expose the Group to credit risk consist of cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables.

b) Liquidity Risk

Liquidity risk exposures include difficulty in meeting the Group's financial liabilities that must be paid with cash or other financial assets. The Group is expected to pay all of its liabilities in accordance with contractual maturity. In order to meet these obligations, the Group must generate sufficient cash inflows.

In managing liquidity risk, the Group monitors and maintains the level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to overcome the impact of fluctuations in cash flows.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

The table below analyses financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity period.

	2025		2024	
	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ Over 1 Year	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ Over 1 Year
Utang Bank Jangka Pendek/ Short-Term Bank Loan	79.700.000.000	--	303.255.452.211	--
Utang Usaha/ Trade Payables:				
Pihak Berelasi/ Related Parties	90.018.503.724	--	56.362.783.650	--
Pihak Ketiga/ Third Parties	685.454.498.596	--	403.825.903.316	--
Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Accrued Expenses	99.811.224.892	--	216.745.415.674	--
Utang Jangka Pendek Lainnya/ Other Current Financial Liabilities	92.112.309.030	--	59.028.769.971	--
Utang Jangka Panjang/ Long-Term Loans	--	23.687.544.118	--	23.687.544.118
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	1.157.438.745	3.661.697.584	1.915.701.719	2.281.446.783
Jumlah/Total	1.048.253.974.987	27.349.241.702	1.041.134.026.541	25.968.990.901

c) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/ pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/ pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Grup harus menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing secara pelaporan terutama berasal dari transaksi impor komoditi dalam mata uang asing, ketidakseimbangan dalam hal waktu pembelian dan penjualan akan mempengaruhi harga jual.

c) Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is defined as a decrease in asset/ income or increase in value of liabilities/ expenses caused by fluctuations in foreign currency exchange rates. The Group should face foreign exchange risk exposure by reporting mainly from the transactions on imports of commodities in foreign currency, an imbalance in terms of time of purchase and sale will affect the selling price.

Kebijakan berkaitan dengan risiko nilai tukar yang saat ini dijalankan adalah secara natural (tanpa lindung nilai), yaitu:

- Grup melakukan pembelian komoditi impor dalam mata uang asing, dimana saat transaksi penjualan komoditi tersebut dilakukan, penetapan harga selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup.
- Grup mengatur risiko dengan berusaha menyelaraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

Policies relating to exchange rate risk currently being executed are natural (without hedging), namely:

- *The Group purchases imported commodities in foreign currency, whereby when the sale of the commodity is executed, the pricing shall always take into account the rates favorable to the Group.*
- *The Group manages risk by trying to harmonize receipts and payments for each type of currency.*

Tabel berikut menunjukkan instrumen keuangan Grup dalam mata uang asing:

The following table shows the financial instruments of the Group in foreign currency:

	2025		2024	
	Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents Dolar Amerika Serikat/ US Dollar	260.760.161	15.538	373.331.076	22.246

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat pada denominasi aset Grup dalam Rupiah dengan semua variabel lainnya dianggap tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in currency exchange rates on the US Dollar denominated assets of the Group in Rupiah with all other variables held constant as of December 31, 2025 and 2024:

2025		2024	
Perubahan Terhadap Dolar Amerika Serikat/ <i>Changes to US Dollar</i>	Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak/ <i>Effect on Income Before Tax</i>	Perubahan Terhadap Dolar Amerika Serikat/ <i>Changes to US Dollar</i>	Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak/ <i>Effect on Income Before Tax</i>
+1%	2.607.602	+1%	3.733.311
-1%	(2.607.602)	-1%	(3.733.311)

d) Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

d) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

	2025			Jumlah/ <i>Total</i>
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>	Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non interest bearing</i>	
Liabilitas/Liabilities				
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loan</i>	79.700.000.000	--	--	79.700.000.000
Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i> :				
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	--	--	90.018.503.724	90.018.503.724
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	--	--	685.454.498.596	685.454.498.596
Beban Yang Masih Harus Dibayar/ <i>Accrued Expenses</i>	--	--	99.811.224.892	99.811.224.892
Utang Jangka Pendek Lainnya/ <i>Other Current Financial Liabilities</i>	--	10.986.342.510	--	10.986.342.510
Liabilitas Sewa/ <i>Lease Liabilities</i>	--	4.819.136.329	--	4.819.136.329
Jumlah/Total	79.700.000.000	15.805.478.839	875.284.227.212	970.789.706.051
	2024			Jumlah/ <i>Total</i>
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>	Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non interest bearing</i>	
Liabilitas/Liabilities				
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loan</i>	303.255.452.211	--	--	303.255.452.211
Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i> :				
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	--	775.473.002.320	56.362.783.650	831.835.785.970
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	--	--	403.825.903.316	403.825.903.316
Beban Yang Masih Harus Dibayar/ <i>Accrued Expenses</i>	--	--	216.745.415.674	216.745.415.674
Utang Jangka Pendek Lainnya/ <i>Other Current Financial Liabilities</i>	--	12.228.466.570	--	12.228.466.570
Liabilitas Sewa/ <i>Lease Liabilities</i>	--	4.197.148.502	--	4.197.148.502
Jumlah/Total	303.255.452.211	791.898.617.392	676.934.102.640	1.772.088.172.243

Eksposur terhadap suku bunga Kelompok Usaha terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, Kelompok Usaha memiliki liabilitas keuangan sebesar Rp79.700.000.000 dan Rp303.255.452.211 yang dikenakan suku bunga mengambang.

The Group's exposure to interest rate is monitored continuously by analyzing financial liabilities's. For the year ended December 31, 2025 and 2024, Group has outstanding financial liabilities amounting to Rp79,700,000,000 and Rp303,255,452,211 which are borne floating interest rate.

Pada 31 Desember 2025, jika suku bunga atas liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 1 basis poin, dengan asumsi variabel lain konstan, maka laba sebelum pajak dan ekuitas akan meningkat/menurun sebesar Rp7.970.000.

On December 31, 2025, if the interest rate on financial liabilities with floating rates increases/decreases by 1 basis point, assuming other variables remain constant, the profit before tax and equity will increase/decrease by Rp7,970,000.

38. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada stakeholder lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

38. Capital Management

The objectives of the Group in managing capital are to ensure the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns to Shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to Shareholders, return capital to Shareholders or issue new shares to reduce debt.

	2025	2024	
Manajemen Permodalan			Capital Management
Total Liabilitas	1.587.434.655.553	1.384.435.090.887	Total Liability
Dikurangi : Kas dan Setara Kas	189.621.008.563	146.198.113.646	Less : Cash and Cash Equivalent
Utang Neto	1.397.813.646.990	1.238.236.977.241	Net Debt
Total Ekuitas	12.223.574.037.504	4.983.958.496.775	Total Equity
Rasio Uang Terhadap Modal	0,11	0,25	Debt to Equity Ratio

39. Kontinjensi

a) Gugatan perdata PT Wisanggeni Mitra Sejahtera

Perusahaan saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak atas pekerjaan pembangunan cold storage dengan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera telah menggugat perdata Group (Ex-BGR), Pemerintah Republik Indonesia Cq Walikota Jakarta Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan gugatan nilai kerugian sebesar Rp11.868.720.000. Group (Eks-BGR) mengajukan gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) senilai Rp9.798.546.000. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 46/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 8 Oktober 2018 gugatan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera tersebut ditolak.

39. Contingencies

a) Civil lawsuit af PT Wisanggeni Mitra Sejahtera

The Company currently is facing a lawsuit on the contract regarding cold storage construction work with PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed a civil lawsuit against the Group (Ex-BGR), Government of Republic of Indonesia Cq Mayor of North Jakarta, Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) with total compensation amounting to Rp11,868,720,000. The Group (Ex-BGR), filed a lawsuit for Reconvention (Counterclaim) amounting to Rp9,798,546,000. Based on decision of the District Court of West Jakarta No 546/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT dated October 8, 2018, the lawsuit of PT Wisageni Mitra Sejahtera was rejected.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 15 Oktober 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tanggal 19 Oktober 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. MA3634K/Pdt/2023 menyatakan para tergugat secara bersama-sama antara Perusahaan dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membayar Ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp1.345.500.000 ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai lunas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 731 PK/Pdt/2025 tanggal 16 Desember 2025, Mahkamah Agung memutuskan antara lain:

- a. membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3634 K/Pdt/2023 tanggal 22 November 2023; dan
- b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Sehubungan dengan putusan tersebut, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Wisanggeni kepada PT BGR (saat ini PT PPI) tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada PT Wisanggeni sebagaimana dimaksud dalam gugatan tersebut.

b) Gugatan perdata Agrocorp International Pte Ltd

Perusahaan saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak tripartit atas pekerjaan *Collateral Management Services* dengan para pihak, yaitu Agrocorp International Pte Ltd, PT Coffindo dan LH Asia.

Agrocorp International Pte Ltd telah menggugat perdata PT Coffindo dan Grup (Eks-BGR) di *Singapore International Arbitration Center* (SIAC). Berdasarkan putusan SIAC No. 086 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 telah memutuskan bahwa PT Coffindo harus membayar ganti rugi sebesar USD4.566.697 kepada Agrocorp International Pte Ltd. Jika PT Coffindo gagal melakukan pembayaran

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

On October 15, 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera filed an appeal against the court's decision. Based on the Decision of the Jakarta High Court No. 336/Pdt/2020/PTDKI, the ruling of the West Jakarta District Court was upheld. On October 19, 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera filed a cassation with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Based on the Supreme Court Decision No. MA3634K/Pdt/2023, the defendants, jointly including the Company, the North Jakarta City Government, and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), were ordered to pay compensation to the plaintiff amounting to Rp1,345,500,000 plus 6% annual interest calculated from the date the lawsuit was filed until fully settled.

Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 731 PK/Pdt/2025 dated December 16, 2025, the Supreme Court ruled, among others, to:

- a. revoke the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3634 K/Pdt/2023 dated November 22, 2023; and
- b. declare that the District Court had no authority to examine and adjudicate the a quo case.

In connection with the aforementioned decision, the compensation claim filed by PT Wisanggeni against PT BGR (currently PT PPI) can no longer be enforced. Accordingly, the Company no longer has any obligation to compensate PT Wisanggeni as referred to in the lawsuit.

b) Civil lawsuit of Agrocorp International Pte Ltd

The Company currently is facing a lawsuit on the tri-partite contract regarding *Collateral Management Services* whose parties are Agrocorp International Pte Ltd, PT Coffindo and LH Asia.

Agrocorp International Pte Ltd filed a civil lawsuit against PT Coffindo and the Group (Formerly BGR) at the *Singapore International Arbitration Center* (SIAC). Based on SIAC Award No. 086 of 2016 dated June 1, 2016, it was decided that PT Coffindo must pay compensation amounting to USD4,566,697 to Agrocorp International Pte Ltd. If PT Coffindo fails to make this payment, the obligation will

ganti rugi tersebut, maka akan menjadi beban Grup (Eks-BGR). Grup (Eks-BGR) juga harus membayar kerugian Agrocorp International Pte Ltd sebesar USD98.464. Selain itu, Grup (Eks-BGR) dan PT Coffindo secara bersama-sama harus menanggung biaya perkara sebesar USD75.036.

Permohonan Agrocorp International Pte Ltd, untuk melakukan eksekusi keputusan SIAC di atas, telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 28 Januari 2019. Karena putusan tersebut belum bersifat final dan mengikat (*inkracht*), Grup (Eks-BGR) telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan eksekusi.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui PN Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2023, dan telah menyerahkan memori kasasi serta diterima oleh PN Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 2023. Pekara tersebut kemudian teregister di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara No. 6340 K/PDT/2025. Sampai dengan saat ini Perusahaan belum menerima putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan.

fall to the Group (Formerly BGR). The Group (Formerly BGR) is also required to pay losses to Agrocorp International Pte Ltd amounting to USD98,464. In addition, the Group (Formerly BGR) and PT Coffindo are jointly liable for arbitration costs amounting to USD75,036.

The request by Agrocorp International Pte Ltd to execute the SIAC's ruling had been granted by the District Court of Central Jakarta on January 28, 2019. As the court's decision is not final and binding yet (inkracht), the Group (Ex-BGR) is taking legal action by lodging a request to revoke the execution approval.

Subsequently, on March 29, 2023, the Company filed a cassation appeal to the Supreme Court through the Central Jakarta District Court on March 16, 2023, and submitted the memorandum of cassation, which was received by the Central Jakarta District Court on March 29, 2023. The case was subsequently registered with the Supreme Court under Case No. 6340 K/PDT/2025. As of the date of this report, the Company has not yet received the Supreme Court's decision regarding the cassation appeal filed.

40. Informasi Tambahan Untuk Arus Kas

Aktivitas signifikan yang tidak memengaruhi arus kas:

	2025	2024
Perolehan Aset Tetap yang melalui Utang Usaha	--	3.588.380.664
Penambahan modal saham melalui konversi liabilitas jangka panjang	--	883.386.000.000

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

40. Additional Information for Cash Flows

Significant activities that do not affect to the cash flows:

<i>Acquisitions of Fixed Assets through Trade Payables</i>	
<i>Additional capital through conversation of long-term loans</i>	

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2025 and 2024, as follows:

2025							
	Arus kas/ Cash flows			Perubahan nonkas/ Non-cash changes			
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payments	Penambahan/ Addition	Efek perubahan nilai tukar/ Foreign exchange effects		31 Desember/ December 31,
					Lainnya/ Others		
Liabilitas Sewa	4.197.148.502	--	(43.048.657.683)	43.503.287.240	--	167.358.271	4.819.136.329
Utang Bank	303.255.452.211	1.003.963.465.991	(1.227.518.918.202)	--	--	--	79.700.000.000
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	12.228.466.570	74.007.449.178	(75.249.573.238)	--	--	--	10.986.342.510
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	319.681.067.283	1.077.970.915.169	(1.345.817.149.123)	43.503.287.240	--	167.358.271	95.505.478.839
2024							
	Arus kas/ Cash flows			Perubahan nonkas/ Non-cash changes			
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payments	Penambahan/ Addition	Efek perubahan nilai tukar/ Foreign exchange effects		31 Desember/ December 31
					Lainnya/ Others		
Liabilitas Sewa	379.039.341	--	(9.656.313.003)	13.086.130.852	--	388.291.312	4.197.148.502
Utang Bank	274.047.031.880	595.247.600.091	(567.078.269.002)	--	1.039.089.242	--	303.255.452.211
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.791.666.667	59.414.581.013	(53.977.781.110)	--	--	--	12.228.466.570
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi	883.386.776.202	--	--	--	--	(883.386.776.202)	--
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	1.164.604.514.090	654.662.181.104	(630.712.363.115)	13.086.130.852	1.039.089.242	(882.998.484.890)	319.681.067.283

41. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Perseroan.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054803 tanggal 18 Februari 2026.

Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Komisaris Utama Perseroan.

Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah tanggal periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	2026
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Shahandra Hanitiyo
Komisaris	Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris Independen	Gigih Guntoro
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Wahyu Sakti Priyonggo
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	Oksan Omas M Panggabean
Direktur Komersial & Pengembangan	Edhy Rizwan
Direktur Operasi	Noverita Anggraeny

41. Events After Reporting Period

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 43 dated January 26, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the appointment of the Company's President Director and Director of Finance, Risk Management, Human Resources and General Affairs.

The change was acknowledged and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Letter of Receipt of Notification of Changes in the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0054803 dated February 18, 2026.

Based on the Shareholders' Resolution No. 88/Kep.PS/RNI.01/V/2026 dated May 21, 2026, the shareholders approved the appointment of the Company's President Commissioner.

Based on the shareholders' resolution as described above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors subsequent to the reporting period is as follows:

	2025
Board of Commisioner	
President Commissioner	--
Commissioner	Setiawan Wangsaatmaja
Independent Commissioner	Gigih Guntoro
Board of Director	
President Director	Soengeng Hernowo
Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs	Wien Irwanto
Director of Commercial & Development	Edhy Rizwan
Director of Operation	Noverita Anggraeny

42. Standar dan Amendemen Standar yang Efektif Setelah Periode Berakhir

Standar baru dan amendemen yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Amandemen PSAK 109 dan PSAK 107 tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam;

42. Standard and Improvement to Standards Effective After Ending Period

New standard and amendments which are effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption are as follows:

- Amendments PSAK 109 and PSAK 107 regarding Classification and Measurement of Financial Instruments;
- Amendments PSAK 109 and PSAK 107 regarding Contracts Referencing Nature-dependent Electricity;

- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali terkait ruang lingkup dan penerapan metode penyatuan kepemilikan.

Standar baru, revisi dan amandemen serta interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Revisi PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen standar tersebut.

- Annual Improvements on PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; and
- Revised PSAK 338: Business Combination of Entity Under Common Control regarding the scope and application of the method of pooling of interest.

New, revised and amendment of standards and interpretation of standard which are effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted, are as follows:

- PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;
- PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;
- Amendment PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;
- Revised PSAK 401: Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements;
- ISAK 403: Components of Financial Reports of Sharia Entities That Apply Indonesian SAK for Private Entities and Indonesian SAK for Micro, Small, and Medium Entities;
- PSAK 413: Impairment; and
- PSAK 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Implementing Indonesian SAK for Private Entities (SAK EP).

As at the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments these standards.

43. Reklasifikasi Akun

Grup telah mereklasifikasi penyajian dalam laporan laba rugi konsolidasian agar lebih mencerminkan sifat transaksi dan menyesuaikan dengan penyajian laporan laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

43. Reclassification of Account

The Group has reclassified presentation in consolidated statements of profit or loss to better reflect the nature of transaction and to conform with the presentation of consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2025.

	2024			
	Sebelum Perubahan/ Before Change	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Laporan Laba Rugi Konsolidasian				Statements of Profit and Loss Consolidated
Beban Umum dan Administrasi	295.386.279.940	(1.049.065.307)	294.337.214.633	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	56.456.367.812	1.049.065.307	57.505.433.119	Other Expenses

44. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

45. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk terbit tanggal 29 Mei 2026.

44. Supplementary Financial Information

The accompanying financial information of Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2025 and 2024, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes equity and cash flows for the years ended December 31, 2025 and 2024, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

45. Responsibility on the Consolidated Financial Statements

Management of the Group is responsible for preparation and presentation of the consolidated financial statements which were authorized by Directors for issuance on May 29, 2026.

Lampiran I

Attachment I

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 As of December 31, 2025 and 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024	
ASET			ASSETS
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Setara Kas	125.216.251.570	66.439.438.317	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	460.915.443.220	396.853.205.436	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	24.518.175.761	31.540.292.754	Other Receivables
Persediaan	36.555.193.451	60.436.693.423	Inventories
Uang Muka	477.942.353.777	123.536.128.335	Advances
Pajak Dibayar di Muka	31.581.158.769	26.700.312.867	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka	2.507.993.911	1.667.657.878	Prepaid Expenses
Aset Tidak Lancar			Non-Current
yang Dimiliki untuk Dijual	--	59.259.000.000	Assets Held for Sale
Jumlah Aset Lancar	1.159.236.570.459	766.432.729.010	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar			Non-Current Assets
Investasi pada Entitas Anak	3.498.000.000	3.498.000.000	Investments in Subsidiaries
Investasi dalam Saham	3.704.654.645	4.249.798.487	Investments in Shares
Aset Tetap	8.393.596.478.820	1.880.877.437.984	Fixed Assets
Aset Takberwujud	18.124.680.810	21.712.294.385	Intangible assets
Properti Investasi	1.463.517.512.000	1.236.695.100.000	Investment Properties
Aset Hak Guna	3.341.851.647	3.497.483.708	Right of Use Assets
Aset Pajak Tangguhan	172.563.272.431	165.663.083.989	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	374.440.196.051	402.980.629.795	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.432.786.646.404	3.719.173.828.348	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	11.592.023.216.863	4.485.606.557.358	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek			Current Liabilities
Utang Usaha	738.625.318.455	369.687.344.443	Trade Payables
Utang Pajak	13.541.223.015	17.677.298.913	Tax Payables
Liabilitas Sewa	1.157.438.745	1.674.083.306	Lease Liabilities
Beban yang Masih Harus Dibayar	29.982.709.413	17.283.446.645	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima			Short Term
di Muka - Jangka Pendek	253.468.613.154	164.031.309.667	Unearned Revenues
Utang Bank Jangka Pendek	79.700.000.000	296.680.200.868	Short Term Bank Loan
Liabilitas Imbalan Kerja	376.805.151	276.693.052	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			Other Current
Lainnya	76.454.169.187	68.253.922.873	Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.193.306.277.120	935.564.299.767	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang			Non-Current Liabilities
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi	23.687.544.118	23.687.544.118	Other Payables - Related Parties
Liabilitas Sewa	3.661.697.584	2.281.446.783	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima dimuka	52.703.904.118	--	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	39.638.625.648	44.683.319.032	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	119.691.771.468	70.652.309.933	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	1.312.998.048.588	1.006.216.609.700	Total Liabilities

Lampiran I (Lanjutan)**Attachment I (Continued)**

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 As of December 31, 2025 and 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	31 Desember/ December 2024
EKUITAS		
Modal Saham	1.826.131.000.000	1.826.131.000.000
Tambahan Modal Disetor	(231.041.634.346)	(231.041.634.346)
Saldo Laba		
Telah Ditentukan Penggunaannya		
Cadangan Umum	132.323.037.613	111.890.435.294
Cadangan Khusus	1.531.912.169	1.531.912.169
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.990.519.184.169	1.839.617.310.091
Komponen Ekuitas Lainnya	6.559.561.668.670	(68.739.075.550)
Jumlah Ekuitas	10.279.025.168.275	3.479.389.947.658
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.592.023.216.863	4.485.606.557.358

EQUITY
Share Capital
Additional Paid in Capital
Retained Earnings
Appropriated
General Reserves
Specific Reserves
Unappropriated
Other Component Equity
Total Equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended
 December 31, 2025 and 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan Usaha	6.014.201.434.715	2.202.213.564.562	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(5.702.954.087.214)	(2.005.290.343.439)	Cost of Revenues
LABA KOTOR	311.247.347.501	196.923.221.123	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi	(9.959.784.506)	(13.647.354.927)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(204.729.939.661)	(188.722.887.086)	General and Administration Expenses
Jumlah Beban Usaha	(214.689.724.167)	(202.370.242.013)	Total Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA	96.557.623.334	(5.447.020.890)	OPERATING INCOME (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA			NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non-Usaha	151.718.928.782	88.678.009.125	Non-Operating Income
Beban Non-Usaha	(72.845.930.567)	(73.966.236.295)	Non-Operating Expense
Pajak Final	(4.685.742.468)	(4.858.840.368)	Final Tax
Pendapatan Non-Usaha - Bersih	74.187.255.747	9.852.932.462	Non-Operating Income - Net
LABA SEBELUM PAJAK	170.744.879.081	4.405.911.572	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	589.597.317	1.941.637.460	Income Tax Expenses
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	171.334.476.398	6.347.549.032	NET PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other Comprehensive Income:
<u>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi</u>			<u>Items that will not be reclassified to Profit or Loss</u>
Kerugian yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar	(545.693.887)	(3.020.873.853)	Unrealized loss on Financial assets at fair value
Surplus Revaluasi Aset Tetap	6.645.064.400.985	--	Revaluation Surplus of Fixed Assets
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(20.792.260.100)	(16.051.161.303)	Remeasurement of Employee Benefits
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	4.574.297.222	3.531.255.487	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	6.628.300.744.220	(15.540.779.669)	Other Comprehensive Income (Loss) For The Year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6.799.635.220.618	(9.193.230.637)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lampiran III

Attachment III

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba/ Retained Earnings							
	Telah Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated				Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Component Equity		Jumlah/ Total
	Modal Saham/ Shares Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Khusus/ Spesific Reserve				
Saldo per 31 Desember 2023	942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.833.269.761.058	(53.198.295.881)	2.605.196.402.088	Balance as of December 31, 2023
Penerbitan Modal Saham	883.386.000.000	776.206	--	--	--	--	883.386.776.206	Issued of Shares
Laba bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	6.347.549.032	--	6.347.549.032	Net Profit for the Year
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	(15.540.779.669)	(15.540.779.669)	Other Comprehensive Loss
Saldo per 31 Desember 2024	1.826.131.000.000	(231.041.634.346)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.839.617.310.090	(68.739.075.550)	3.479.389.947.657	Balance as of December 31, 2024
Penerbitan Modal Saham	--	--	--	--	--	--	--	Issued of Shares
Pembentukan Dana Cadangan	--	--	20.432.602.319	--	(20.432.602.319)	--	--	
Laba bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	171.334.476.398	--	171.334.476.398	Net Profit for the Year
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	6.628.300.744.220	6.628.300.744.220	Other Comprehensive Loss
Saldo per 31 Desember 2025	1.826.131.000.000	(231.041.634.346)	132.323.037.613	1.531.912.169	1.990.519.184.169	6.559.561.668.670	10.279.025.168.275	Balance as of December 31, 2025

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Years Ended
 As of December 31, 2025 and 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6.193.919.572.284	1.946.403.508.236	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(5.843.598.441.223)	(1.916.168.822.378)	Cash Payment to Vendors and Employees
Pembayaran Kas untuk Beban Operasional dan Lainnya	(59.225.479.750)	(38.703.282.580)	Cash Payment to Operational Expenses and Others
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan	16.740.080.503	14.307.801.006	Cash Receipts from Corporate Income Taxes
Pembayaran Bunga	(13.620.450.225)	(23.659.145.353)	Interest Payment
Pembayaran Pajak	(16.226.348.625)	(3.099.173.677)	Tax Payment
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	277.988.932.964	(20.919.114.746)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap	(6.127.504.937)	(1.683.324.333)	Acquisition of Fixed Assets
Penambahan Aset Lain-lain	--	(28.177.528.739)	Additional of Other Assets
Penjualan Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	6.281.538.462	--	Sales on Non-Current Assets held for sale
Uang Muka Penjualan Properti Investasi	--	61.538.461.538	Advance of Sales on Investment Properties
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	--	4.258.075.000	Proceed From Sale of Fixed Asset
Penambahan Aset Takberwujud	(969.301.526)	--	Acquisition of Intangible Assets
Penerimaan Dividen atas Aset Keuangan	132.519.750	--	Receipt of Dividends on Financial Assets
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(682.748.251)	35.935.683.466	Net Cash Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS IN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Utang Bank - Jangka Pendek	975.365.985.151	567.568.850.342	Proceeds from Bank Loan Loan - Current Portion
Pembayaran Utang Bank - Jangka Pendek	(1.192.346.186.019)	(15.418.148.176)	Payment Bank Loan - Current Portion
Pembayaran Liabilitas Sewa	(1.549.170.000)	--	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Utang Bank - Jangka Panjang	--	(530.557.398.622)	Payment Bank Loan - Long Term
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(218.529.370.868)	21.593.303.544	Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	58.776.813.845	36.609.872.264	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS - PADA AWAL TAHUN	66.439.438.317	30.869.507.594	CASH AND CASH EQUIVALENTS - AT THE BEGINNING OF THE YEAR
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(592)	(1.039.941.541)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	125.216.251.570	66.439.438.317	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
ENTITAS INDUK
PENGUNGKAPAN LAINNYA**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
PARENT ENTITY
OTHER DISCLOSURES**

For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

The accompanying statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flow is which is an separate financial statements additional information to consolidated financial statements.

2. Laporan Keuangan Tersendiri

Investasi pada entitas anak dan asosiasi sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

2. Separate Financial Statements

Investments in subsidiaries and associates as mentioned in the separate financial statements are recorded using the cost method.

3. Daftar Investasi Pada Entitas Anak dan Asosiasi

3. Detail of Investments in Subsidiaries and Associates

Nama Entitas/ Entity Name	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
	%	2025	2024
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>			
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPII")	99,90	999.000.000	999.000.000
PT BGR Logistik Indonesia ("BGRLI")	99,96	2.499.000.000	2.499.000.000
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Property ("PPIP")	99,96	--	--
Jumlah/ Total		3.498.000.000	3.498.000.000



PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRHA PPI

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160

Tel.: (021) 3862141

Fax.: (021) 3862143

email: ppi.info@ptppi.co.id



Website: www.ptppi.co.id